



**PEMERINTAH
KOTA SURABAYA**

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2025

Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Surabaya Nomor
52 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Surabaya
Tahun 2025

2025



surabaya.go.id



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah guna diselaraskan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, Asta Cita Presiden periode 2025-2029 dan Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
37. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9);
49. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
50. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53);
51. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 121);
52. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 23

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-15
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-182
2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-198
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-200
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024.....	II-200
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan.....	II-202
2.3 Permasalahan Pembangunan	II-552
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-552
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-554
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya	III - 7
3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2025 dan Tahun 2026	III - 21

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 22
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 25
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 50
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 60
3.2.4	Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah	III - 63
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV - 1
4.1	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV - 12
4.2.1	Isu Strategis	IV - 12
4.2.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional	IV - 18
4.2.3	Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	IV - 146
4.2.4	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV - 187
4.2.5	Pembangunan Pengarusutamaan Gender	IV - 188
4.2.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	IV - 189
4.2.7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	IV - 290
4.2.8	Inovasi Pembangunan Tahun 2025	IV - 291
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V - 1
5.1	Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	V - 1
5.2	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	V - 526
BAB VI PENUTUP		VI-1
6.1	Kesimpulan dan Substansial	VI-1
6.2	Pengendalian dan Evaluasi	VI-10
6.3	Penutup	VI-12

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sistem Drainase di Kota Surabaya.....	II-4
Tabel II.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan	II-15
Tabel II.3 Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2021–2025 (TW I)	II-16
Tabel II.4 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-20
Tabel II.5 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-20
Tabel II.6 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-21
Tabel II.7 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan.....	II-22
Tabel II.8 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2024	II-23
Tabel II.9 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama	II-24
Tabel II.10 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024	II-25
Tabel II.11 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	II-26
Tabel II.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024.....	II-27
Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024 (dalam persen)	II-28
Tabel II.14 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)	II-30

Tabel II.15 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)	II–31
Tabel II.16 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	II–32
Tabel II.17 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–34
Tabel II.18 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	II–36
Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	II–37
Tabel II.20 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–39
Tabel II.21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–39
Tabel II.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–40
Tabel II.23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024	II–40
Tabel II.24 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–41
Tabel II.25 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–42
Tabel II.26 Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–44
Tabel II.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–44
Tabel II.28 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–45
Tabel II.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–45
Tabel II.30 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–46

Tabel II.31 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2021–2025 (TW I)	II–47
Tabel II.32 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–49
Tabel II.33 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–49
Tabel II.34 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–49
Tabel II.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ...	II–51
Tabel II.36 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024.....	II–52
Tabel II.37 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II–53
Tabel II.38 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2024	II–55
Tabel II.39 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021– 2024	II–78
Tabel II.40 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2024	II–78
Tabel II.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024	II–81
Tabel II.42 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020–2024.....	II–83
Tabel II.43 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2021–2025 (TW I)	II–84
Tabel II.44 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021–2025 (TW I)	II–84
Tabel II.45 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2025 (TW I)	II–84
Tabel II.46 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–87

Tabel II.47 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I)	II-87
Tabel II.48 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I)	II-87
Tabel II.49 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025 (TW I)	II-88
Tabel II.50 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021–2025 (TW I)	II-89
Tabel II.51 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2021–2025 (TW I).....	II-89
Tabel II.52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2021–2025 (TW I)	II-91
Tabel II.53 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2021–2025 (TW I)	II-91
Tabel II.54 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025 (TW I)	II-91
Tabel II.55 Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2021–2025 (TW I)	II-92
Tabel II.56 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)	II-92
Tabel II.57 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-93
Tabel II.58 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II-93
Tabel II.59 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II-94
Tabel II.60 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-94
Tabel II.61 Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-96
Tabel II.62 Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2020–2024.....	II-97

Tabel II.63 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2022– 2024	II–97
Tabel II.64 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2025 (TW I)	II–99
Tabel II.65 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–99
Tabel II.66 Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2025 (TW I)	II–100
Tabel II.67 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–101
Tabel II.68 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–102
Tabel II.69 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020 – 2025 (TW I)	II–103
Tabel II.70 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–104
Tabel II.71 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II–104
Tabel II.72 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–107
Tabel II.73 Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–108
Tabel II.74 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2021–2025 (TW I)	II–109
Tabel II.75 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025 (TW I)	II–109
Tabel II.76 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–110
Tabel II.77 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–110
Tabel II.78 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–112

Tabel II.79 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II–112
Tabel II.80 PSKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–113
Tabel II.81 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	II–114
Tabel II.82 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–114
Tabel II.83 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II–115
Tabel II.84 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–115
Tabel II.85 Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–116
Tabel II.86 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–116
Tabel II.87 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–117
Tabel II.88 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–118
Tabel II.89 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2020– 2024	II–118
Tabel II.90 KDRT Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–119
Tabel II.91 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–120
Tabel II.92 Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–120
Tabel II.93 Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–121
Tabel II.94 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–121
Tabel II.95 Pola Pangan Harapan Tahun 2020–2024	II–122

Tabel II.96 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–122
Tabel II.97 Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2021–2025 (TW I)	II–124
Tabel II.98 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2021–2025 (TW I)	II–124
Tabel II.99 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–125
Tabel II.100 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–126
Tabel II.101 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–126
Tabel II.102 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021–2025 (TW I)	II–127
Tabel II.103 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–127
Tabel II.104 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020–2024	II–128
Tabel II.105 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–129
Tabel II.106 Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2021–2025 (TW I)	II–130
Tabel II.107 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020–2024	II–132
Tabel II.108 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–132
Tabel II.109 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–135
Tabel II.110 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2021–2025 (TW I)	II–136
Tabel II.111 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2021–2025 (TW I)	II–137

Tabel II.112 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–137
Tabel II.113 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–139
Tabel II.114 Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–139
Tabel II.115 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–139
Tabel II.116 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–140
Tabel II.117 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–140
Tabel II.118 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–141
Tabel II.119 Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–142
Tabel II.120 Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–142
Tabel II.121 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2021–2025 (TW I)	II–143
Tabel II.122 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–143
Tabel II.123 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–144
Tabel II.124 Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–144
Tabel II.125 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–145
Tabel II.126 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)....	II–145
Tabel II.127 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–146
Tabel II.128 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020–2024	II–147
Tabel II.129 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–147

Tabel II.130 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–147
Tabel II.131 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–149
Tabel II.132 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2020–2024.....	II–149
Tabel II.133 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–150
Tabel II.134 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020–2024...	II–151
Tabel II.135 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–151
Tabel II.136 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–152
Tabel II.137 Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022-2025 (TW I)	II–154
Tabel II.138 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–155
Tabel II.139 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II–156
Tabel II.140 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II–157
Tabel II.141 Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I).....	II–158
Tabel II.142 Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–159
Tabel II.143 Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020–2024	II–160
Tabel II.144 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2020–2024	II–161
Tabel II.145 Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	II–162
Tabel II.146 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–163

Tabel II.147 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2021 – 2025 (TW I)	II-164
Tabel II.148 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2021–2025 (TW I)	II-165
Tabel II.149 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-166
Tabel II.150 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II-166
Tabel II.151 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2020–2024	II-167
Tabel II.152 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-167
Tabel II.153 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021– 2025 (TW I)	II-168
Tabel II.154 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020–2024	II-168
Tabel II.155 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-169
Tabel II.156 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-169
Tabel II.157 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2021–2025 (TW I)	II-170
Tabel II.158 SOP Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)	II-170
Tabel II.159 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2020–2025 (TW I)	II-171
Tabel II.160 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II-171
Tabel II.161 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2020–2024 ...	II-172
Tabel II.162 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023–2025 (TW I)	II-173
Tabel II.163 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2025 (TW I)	II-173
Tabel II.164 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)	II-173

Tabel II.165 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) .	II–176
Tabel II.166 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II–177
Tabel II.167 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–177
Tabel II.168 Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–177
Tabel II.169 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–178
Tabel II.170 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2020–2024	II–179
Tabel II.171 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–179
Tabel II.172 Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–180
Tabel II.173 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–180
Tabel II.174 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I).....	II–181
Tabel II.175 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)...	II–182
Tabel II.176 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–182
Tabel II.177 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–183
Tabel II.178 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2020–2024	II–183
Tabel II.179 Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2024	II–184
Tabel II.180 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–185

Tabel II.181 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–185
Tabel II.182 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–186
Tabel II.183 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024	II–187
Tabel II.184 Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	II–187
Tabel II.185 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–188
Tabel II.186 Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–189
Tabel II.187 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–189
Tabel II.188 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–190
Tabel II.189 Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2021–2025 (TW I).	II–191
Tabel II.190 Jumlah Unjuk Rasa di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–192
Tabel II.191 Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)	II–193
Tabel II.192 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 ...	II–194
Tabel II.193 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2020-2024	II–194
Tabel II.194 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–195
Tabel II.195 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024.....	II–195
Tabel II.196 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024	II–196

Tabel II.197 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024.....	II-196
Tabel II.198 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	II-197
Tabel II.199 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023	II-198
Tabel II.200 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Surabaya	II-204
Tabel III.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Surabaya Tahun 2025.....	III - 5
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam juta)	III - 8
Tabel III.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam juta)	III - 11
Tabel III.4 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam %)	III - 14
Tabel III.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020-2024	III - 15
Tabel III.6 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2020 - Tahun 2025.....	III - 19
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2020 - 2024	III - 21
Tabel III.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 38
Tabel III.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 40
Tabel III.10 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 58
Tabel III.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026	III - 62
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	IV-4

Tabel IV.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	IV-8
Tabel IV.3 Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya Dengan Asta Cita Presiden Tahun 2025	IV-21
Tabel IV.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-31
Tabel IV.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	IV-146
Tabel IV.6 Perubahan Target Tujuan PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	IV-148
Tabel IV.7 Perubahan Target Sasaran PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	IV-148
Tabel IV.8 Perubahan Target Progam PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	IV-149
Tabel IV.9 Perubahan Target Kegiatan PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	IV-151
Tabel IV.10 Perubahan Target Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025	IV-157
Tabel IV.11 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 ...	IV-190
Tabel IV.12 Penyelarasan SPM dengan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	IV-208
Tabel V.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	V - 4
Tabel V.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025	V – 528
Tabel V.3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025	V – 1221

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya	II-2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya	II-12
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.....	II-13
Gambar II.4 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya	II-16
Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng	II-17
Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara.....	II-18
Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya.....	II-18
Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya	II-19
Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.....	II-23
Gambar II.10 Inflasi Kota Surabaya (year-to-date) Tahun 2021–2025 (TW I).....	II-35
Gambar II.11 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021–2025 (TW I).....	II-51
Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2020–2024	II-54
Gambar II.13 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025 (TW I).....	II-90
Gambar II.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2025 (TW I)	II-92
Gambar II.15 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024	II-95
Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi	II-153
Gambar II.17 Perangkat Smart Water Level.....	II-190
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 - 2024 (%).....	III- 16
Gambar IV.1 Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-14
Gambar IV.2 Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2025.....	IV-20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 mempedomani pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu dengan tahapan :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan

c. Penetapan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024,, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan subkegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan.

yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Muatan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 dan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang

- Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
45. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
46. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

- Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 51. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
 52. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
 53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
 54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
 55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9);
58. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
59. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53);
60. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 121);
61. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

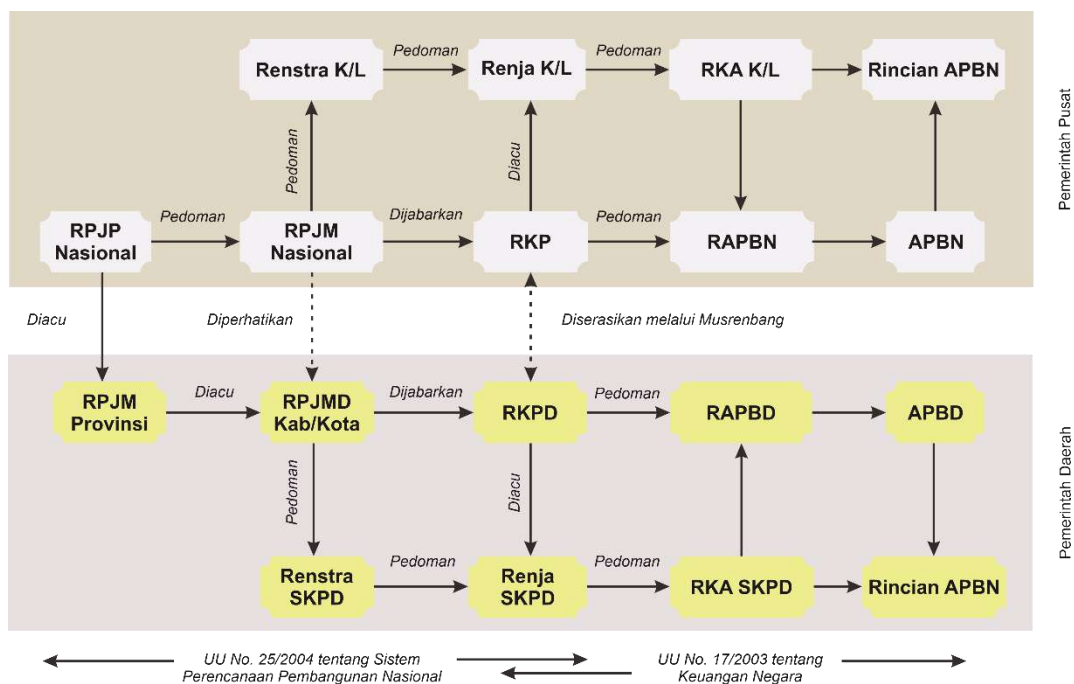
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur. RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara substansial, Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2025.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, program prioritas nasional dalam RKP 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, serta memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2025;
5. Penyesuaian perubahan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 serta instruksi Presiden tentang efisiensi belanja daerah;
6. Menjadi dasar penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 106/S-HP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 23 April 2025, untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
7. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, latar belakang penyusunan RKPD serta proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I menguraikan hasil evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan dokumen RKPD tahun 2025 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Menjelaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam bentuk tabel yang disertai dengan penjelasan dan analisis untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan pencapaian indikator TPB/SDGs.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui sinkronisasi keselarasan tema dan prioritas pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada Rakortekrenbang, dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun rencana. Selain itu, dijabarkan juga kebijakan dan inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, sasaran pembangunan, serta inovasi unggulan.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pasal 14 Ayat (3) bahwa Penetapan RKPD perubahan, paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan, serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada angka 4 huruf a bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan, maka penyusunan evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 memuat dan menganalisis capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

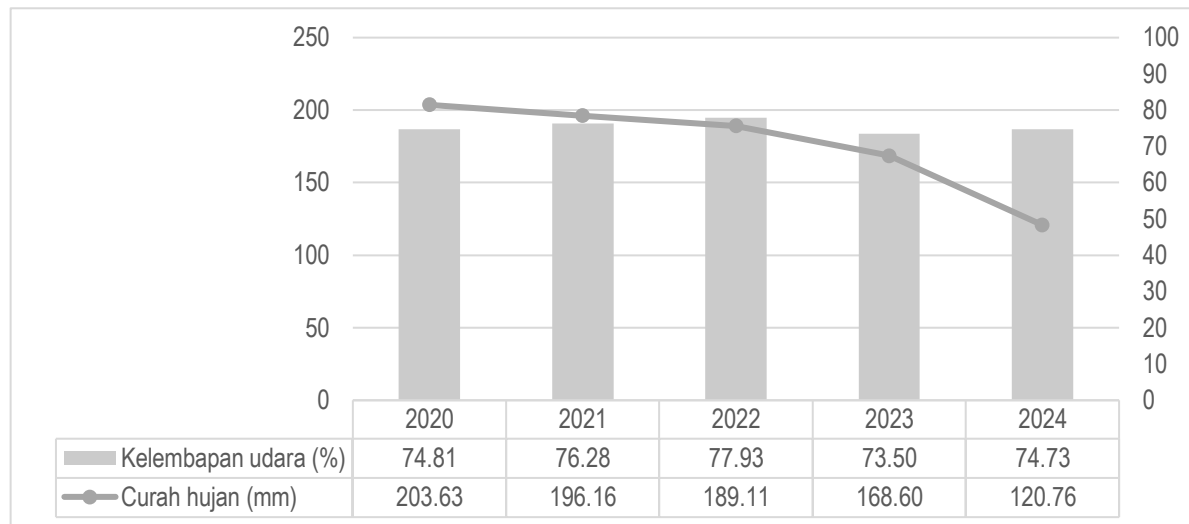
Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas kurang lebih 33.850 Hektare. Menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2025, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya kurang lebih 32.681 Hektare.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 3-6 meter di atas permukaan laut, pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di tahun 2023, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 487,1 milimeter dengan temperatur berkisar antara 20°C hingga 36°C, dan kelembapan udara juga mencapai puncak tertingginya di tahun itu, yakni pada 83,2 persen. Sedangkan untuk data tahun 2024, curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 463,8 milimeter. Sedangkan temperatur berkisar antara 21,8°C hingga 37,8°C, dan kelembapan udara mencapai puncak tertingginya pada bulan Februari dan April tahun itu, yakni pada 98 persen. Gambar II.1 menunjukkan grafik hubungan curah hujan dengan kelembapan udara di Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan pencatatan data kelembapan udara di Kota Surabaya tersebut serta rata-rata tingkat kelembapan udara keseluruhan setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Tinggi rendahnya kelembapan udara sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu suhu,

tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran dan vegetasi. Rata-rata kelembapan tertinggi berada pada angka 77,93 persen dan kelembapan terendah berada pada 73,5 persen.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas dan Kali Jagir. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya rawan terkena dampak atas yang terjadi di daerah hulu, secara kuantitas (debit air) maupun kualitas. Pada musim penghujan, limpahan air yang berasal dari DAS yang melalui Kota Surabaya, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu upaya yang telah dilakukan antara lain dengan pembuatan boezem di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang berjumlah 110 boezem hingga tahun 2024, yang berfungsi sebagai tampungan air sementara yang berkontribusi dalam pengendalian banjir di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui PDAM Surya Sembada dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I juga melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik terkait pengondisian dan kontrol atas pintu air Ngagel dan pintu air Jagir untuk memastikan memastikan pasokan air baku tetap terpenuhi baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau. Sedangkan kualitas air Sungai Brantas saat ini mengalami penurunan, sehingga berdampak pada tingginya kandungan zat pencemar dalam air baku yang diolah oleh Kota Surabaya seperti nitrit, amonia, dan bahan organik. Untuk mengatasi hal ini, PDAM Surya Sembada melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan dosis disinfektan, menggunakan koagulan baru, memodifikasi sistem, serta mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada juga berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas untuk ikut serta dalam upaya pencegahan pencemaran sungai.

Sebagai upaya mengatasi potensi banjir, Kota Surabaya memiliki sistem drainase yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola limpasan air hujan secara efektif. Sistem drainase ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier yang membagi Kota Surabaya menjadi 30 sistem drainase dengan *catchment area* seluas 31.881,1 Ha. Saluran primer berfungsi mengalirkan air dari daerah tangkapan besar ke sungai-sungai utama, sementara saluran sekunder dan tersier berfungsi mengalirkan air dari lingkungan permukiman dan jalan-jalan. Upaya

pembangunan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase ini terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir dan mengurangi dampak genangan air di berbagai wilayah.

Tabel II.1
Sistem Drainase di Kota Surabaya

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
1	Saluran Perbatasan	10.166.967	Saluran Perbatasan	Saluran Dukuh Menanggal
				Saluran Menanggal Indah
				Saluran Cabang Menanggal Indah
				Saluran Tengah A. Yani Selatan
				Saluran Siwalankerto Permai
				Saluran Siwalankerto Selatan
				Saluran Cabang Siwalankerto
				Saluran Siwalankerto
				Saluran Kutisari Indah
				Saluran Rungkut Industri Selatan
				Saluran Rungkut Barat
				Saluran Rungkut Industri II
				Saluran Cabang Rungkut Industri II
				Saluran Tengah MERR
				Saluran Rungkut Barata
				Saluran Rungkut Menanggal
				Saluran Cabang Amir Mahmud
				Saluran BP2IP
2	Kebon Agung	16.795.892	Saluran Kebon Agung	Saluran Kebon Agung
				Saluran Gayungan Peternakan I
				Saluran Gayungan Peternakan II
				Saluran Gayung Kebonsari
				Saluran Gayungsari
				Saluran Jemur Andayani
				Saluran Kutisari XII
				Saluran Kutisari IV
				Saluran Kutisari Utara I
				Saluran Gunung Anyar
				Saluran Gunung Anyar Jaya
				Saluran Rungkut Kidul
				Saluran Rungkut Harapan
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Wiguna Timur
				Saluran Medayu Selatan
				Saluran Gunung Anyar Mas
3	Kali Sumo	3.834.787	Saluran Kali Sumo	Saluran Ngagel Jaya Tengah Barat
				Saluran Ngagel Jaya Tengah Timur
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Barat
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Timur
				Saluran Bratang Perintis VI
4	Avoor Wonorejo	19.539.892	Saluran Avoor Wonorejo	Saluran Jambangan
				Saluran Bibis Karah

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Karah Agung
				Saluran Ketintang Selatan
				Saluran Prof Supomo
				Saluran Ketintang Wiyata
				Saluran Ketintang
				Saluran Jemur Gayungan
				Saluran Tengah A. Yani Utara
				Saluran Wonokromo
				Saluran Cabang Wonokromo
				Saluran Wonocolo
				Saluran Raya Panjang Jiwo
				Saluran Kalirejo
				Saluran Tenggilis Kauman
				Saluran Rungkut
				Saluran Sidosermo
				Saluran Sidosermo Indah
				Saluran Drasimo
				Saluran Panjang Jiwo
				Saluran Rungkut Waru
				Saluran Cabang Rungkut Waru
				Saluran Kedung Asem
				Saluran Nirwana
				Saluran Penjaringan Timur
				Saluran Kendal Sari
				Saluran Nirwana Eksekutif
				Saluran Wonorejo Permai
				Saluran Wonorejo Permai Utara VIII
				Saluran Rungkut Jaya
				Saluran Wonorejo Rungkut I
5	Jagir Kalimir	2.701.859	Saluran Jagir Kalimir	Saluran Karang Rejo
				Saluran Bendul Merisi
6	Rungkut	7.789.178	Saluran Rungkut	Saluran Rungkut Asri
				Saluran Rungkut Asri Utara
				Saluran Rungkut Medokan
				Saluran Medokan Timur
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Medokan Asri Selatan
7	Medokan Semampir	19.504.694	Saluran Medokan Semampir	Saluran Manyar Indah
				Saluran Wisma Mukti
				Saluran Klampis Indah 4
				Saluran Semolo Waru Utara
				Saluran Semolo Waru
				Saluran Araya Barat
				Saluran Araya Timur
				Saluran Suko Semolo
				Saluran Semolo Waru Bahari
				Saluran Araya Selatan
				Saluran Semampir Tengah

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Semolo Waru Timur Saluran Nginden Jangkungan Saluran Brimob Saluran Medokan Semampir Baru Saluran Medokan Semampir Baru I Saluran Medokan Semampir Tengah Saluran Keputih Tegal
8	Kalidami	15.111.012	Saluran Kalidami	Saluran Pucang Anom timur Saluran Pucang Adi Saluran Kertajaya X Saluran Srikana Saluran Karang Menjangan Saluran Dharmahusada Indah Saluran Wisma Permai II Saluran Mleto Saluran Raya ITS / Sawahan Saluran ITS Barat Saluran Bhaskara
9	Kalibokor	11.363.661	Saluran Kalibokor	Saluran Manyar Tirtosari Saluran Manyar Tirtomoyo Saluran Manyar Tirtoyoso Saluran Klampis Ngasem Saluran UPB Saluran ITS Tengah Saluran ITS selatan Saluran Laguna Utara Saluran Keputih Barat Saluran Keputih Tengah Saluran Keputih Timur Saluran Marina Barat Saluran Marina Tengah Saluran Marina Timur Saluran Laguna Selatan
10	Jeblokan	6.985.578	Saluran Jeblokan	Saluran Jolotundo Saluran Gersikan Saluran Rangkah
11	Pegirian	9.847.074	Saluran Pegirian	Saluran Bulak Banteng Saluran Bulak Banteng Tengah Saluran Sidotopo Lor Saluran Tenggumung Karya Saluran Wonosari Lor Saluran Simolawang Saluran Simokerto/Donokerto Saluran Sawah Pulo Saluran Wonosari Wetan Saluran Gembong III Saluran Gembong Saluran Kemuning

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Kalisari THR
				Saluran Kalisari Timur
				Saluran Jatisrono
				Saluran Mrutu - Kalianyar
12	Kenjeran	4.975.012	Saluran Kenjeran - Larangan	Saluran Kenjeran Utara I
				Saluran Lebak Arum
				Saluran Karang Empat
				Saluran Kalijudan
13	Tambak Wedi	7.223.897	Saluran Tambak Wedi	Saluran Bandar Rejo
				Saluran Tambak Wedi Utara
				Saluran Bulak Banteng Timur
				Saluran Tambak Wedi Barat
				Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan
				Saluran Randu Barat
				Saluran Randu Timur
				Saluran Tanah Merah
				Saluran Kapas Madya Timur
				Saluran Kapas Madya
				Saluran Tambak Sari
14	Kali Kepiting (Kalisari)	7.400.810	Saluran Kalisari	Saluran Pacar Kembang
				Saluran Mulyorejo
				Saluran Sutorejo
				Saluran Prima
				Saluran Babatan Pantai
				Saluran Kenjeran Lama
				Saluran Mulyosari
15	Lebak Indah	5.131.741	Saluran Lebak Indah	Saluran Gading
				Saluran Lebak Jaya Utara
				Saluran Kenjeran
				Saluran Larangan Barat
				Saluran Komplek Kenjeran
				Saluran Pantai Ria
				Saluran Kyai Tambak Deres
				Saluran Bulak Setro
				Saluran Cumpat Kulon
16	Greges	14.608.194	Saluran Greges	Saluran Surabayan
				Saluran Tempel Sukorejo
				Saluran Kedung Anyar Wetan
				Saluran Kedung Anyar
				Saluran Margorukun
				Saluran Genie Pelajar
				Saluran Petemon V
				Saluran Petemon Sidomulya
				Saluran Petemon Kali
				Saluran Pacuan Kuda
				Saluran Asem Bagus
				Saluran Kedung Doro
				Saluran Tembok Gede

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Semarang Saluran Pasar Turi Saluran Dupak Timur Saluran Dupak Saluran Rembang Saluran Krembangan Baru Saluran Indrapura I Saluran Jepara Saluran Pesapen Kali Saluran Pesapen Selatan Saluran Moro Krembangan Saluran Ikan Mungsing Saluran Ikan Mungsing Selatan Saluran Johar Saluran Indrapura II Saluran Pasar Loak Saluran Asem Mulya Saluran Simo
17	Darmokali	2.754.455	Saluran Darmokali	Saluran Ciliwung Saluran Gajah Mada Saluran Hayam Wuruk Saluran Perwira Saluran Brawijaya
18	Dinoyo	2.612.612	Saluran Kupang	Saluran Dr Wahidin Saluran Dinoyo Saluran Ir Anwari Saluran Sriwijaya Saluran Kartini Saluran Kupang Panjaan Saluran Jenggolo Saluran Sambas-Untung Suropati Saluran Keputran
19	Kayun	1.550.764	-	Saluran Embong Sawo Barat Saluran Grahadi Saluran RRI Saluran Embong Ploso Barat Saluran Embong Tanjung Timur Saluran Kenongo Timur Saluran Embong Malang sisi Utara Saluran Embong Malang sisi Selatan
20	Balong	7.683.763	Saluran Kali Balong	Saluran Tengah Margomulyo Saluran Margomulyo Gendong
21	Kalianak	2.377.255	Saluran Kalianak	Saluran Kalianak Timur
22	Krembangan	10.292.349	Saluran Kali Krembangan	Saluran Tanjungsari Saluran Suko Manunggal Utara Saluran Tambak Mayor Saluran Tambak Mayor PJKA

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
23	Diversi Gunungsari	44.145.581	Saluran Diversi Gunungsari	Saluran Putat Jaya
				Saluran Simo Gunung
				Saluran Simo Mulyo Barat
				Saluran Simo Pomahan
				Saluran Kupang Jaya
				Saluran Darmo Satelit
				Saluran Darmo Harapan
				Saluran Darmo Indah
				Saluran Karangpoh
				Saluran Tubanan
				Saluran Balongsari
				Saluran Gadelsari
				Saluran Manukan Madya
				Saluran Manukan Kulon
				Saluran Manukan Kasman
				Saluran Manukan Mulyo
				Saluran Manukan Lor
				Saluran Sambikerep
				Saluran Sawo 1
				Saluran Sawo 2
				Saluran Made
				Saluran Citra Raya
				Saluran Sememi
				Saluran Kendung
				Saluran Babat Jerawat
				Saluran Mayjen Sungkono Utara
				Saluran Mayjen Sungkono Selatan
				Saluran Kencanasari
24	Kali Kandangan	8.391.999	Saluran Kali Kandangan	Saluran Grand Pakuwon Barat
25	Sememi	9.591.308	Saluran Sememi	Saluran Sememi Baru
				Saluran Babat Buran
26	Tambakdono	6.420.706	Saluran Tambakdono	Saluran Kauman
				Saluran Sumber Rejo 1
				Saluran Sukodono Tambakdono
27	Romo Kalisari	11.448.422	Saluran Romo Kalisari	Saluran Romo Kalisari
28	Sumberrejo	4.236.633	Saluran Sumberrejo	Saluran Beji
				Saluran Benowo
				Saluran Singgapur
				Saluran Sumber Rejo 2
				Saluran Jawu Kidul
29	Kalimakmur	38.088.100	Saluran Kalimakmur	Saluran Bukit Golf
				Saluran Jajar Tunggal
				Saluran Raya Menganti
				Saluran Kedurus Indah Tengah
				Saluran Kramat
				Saluran Bukit Golf Graha Family
				Saluran Wiyung/Kali Kendal
				Saluran Babatan Indah

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m ²)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Babatan
				Saluran Babatan Mukti
				Saluran Lidah Harapan
				Saluran Lidah Wetan
				Saluran Lidah Kulon
				Saluran Raya Pakuwon
				Saluran Pakuwon
				Saluran Perum Lidah Kulon
				Saluran Banjar Mlati
				Saluran Banjar Mlati Tengah
				Saluran Banjar Mlati Barat
				Saluran Raya Lakarsantri
				Saluran Lakarsantri
				Saluran Bangkingan
				Saluran Pondok Manggala
				Saluran Pondok Maritim
				Saluran Pondok Bogangan
				Saluran Kebraon Manis Barat
				Saluran Kebraon Manis Selatan
				Saluran Kebraon Utara
				Saluran Kebraon Selatan
				Saluran Kemlaten Baru
				Saluran Kemlaten
				Saluran Pesapen
				Saluran Sumur Welut
				Saluran Pondok Maritim Indah Barat
30	Karangpilang	6.236.895	-	Saluran Ksatria
				Saluran Karangpilang Barat
				Saluran Karangpilang Bromo
				Saluran Karangpilang Bagong
				Saluran Karangpilang Pdam
				Saluran Warugunung Suparma
				Saluran Warugunung Makam
				Saluran Warugunung Perbatasan

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

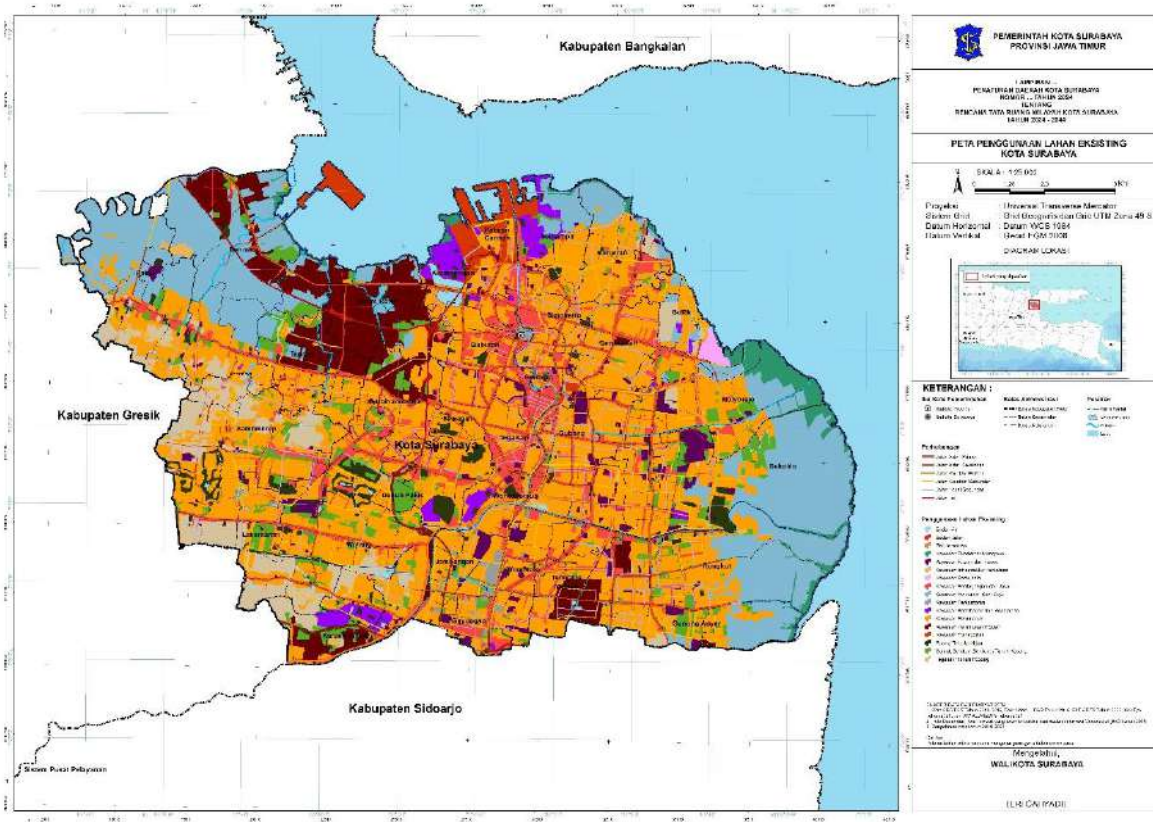
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.361 rukun warga (RW) dan 9.155 rukun tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya yang sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yang dikenal dengan sebutan Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya,

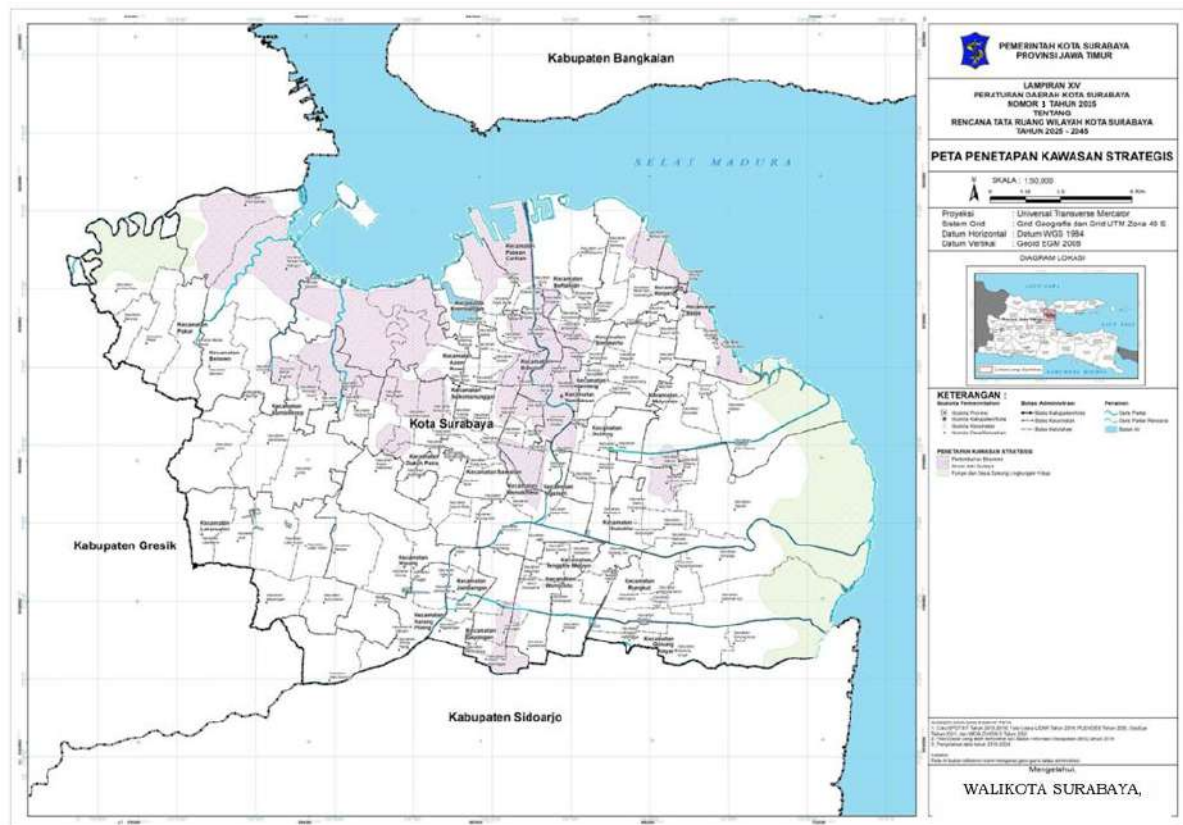
pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, perumahan menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 48 persen atau 16.057 hektar. Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.3 menunjukkan Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.



Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Sumber: RTRW Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, di antaranya adalah:

a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu area geografis yang memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam mempertimbangkan kawasan ekonomi maka dibutuhkan beberapa aspek yang mendukung dalam menetapkan kawasan ekonomi tersebut seperti Sumber daya alam, infrastruktur yang mendukung, SDM yang memiliki daya saing, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah, keterbukaan dalam berinvestasi dan mengembangkan ekonomi. Kawasan yang memenuhi aspek tersebut dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Surabaya yakni :

- Kawasan Gerbang Kota Surabaya pada Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonocolo;
- Kawasan KKJS Kenjeran pada Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo;

- Kawasan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya pada Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo;
- Kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat terdapat di Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes
- Kawasan Segi Delapan Darmo pada Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal;
- Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo.

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan salah satu area geografis yang memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan sektor sosial budaya. Selain itu, kawasan ini juga dikembangkan untuk kepentingan sosial dan budaya yang telah kental dengan kawasan adat tertentu dan kawasan konservasi warisan budaya. Dalam pengembangannya, kawasan yang akan dipilih menjadi kawasan sosial budaya harus memiliki beberapa aspek yang mendukung dalam pengembangan sosial budaya. Aspek yang berbeda dan harus menonjol dalam menentukan kawasan ini adalah kawasan tersebut harus memiliki history kebudayaan yang kental akan asal usul daerah. Kawasan yang memiliki karakteristik tersebut di Kota Surabaya terdapat beberapa wilayah yang masuk didalamnya yakni:

- Kecamatan Genteng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Tegalsari;
- Kecamatan Wonokromo;
- Kecamatan Krembangan;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Semampir;

- Kecamatan Simokerto; dan
- Kecamatan Tegalsari.

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota yang memiliki cagar budayanya pada era kolonial tidak hanya tersebar pada beberapa kawasan yang telah disebutkan di atas. Wilayah kecamatan di Kota Surabaya memiliki persebaran situs dan lingkungan cagar budayanya masing-masing. Hanya saja beberapa kecamatan yang memiliki situs cagar budaya belum menjadi pusat pengembangan kawasan sosial budaya.

Tabel II.2

Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	67
2	Krembangan	57
3	Pabean Cantian	29
4	Tegalsari	28
5	Wonokromo	24
6	Bubutan	24
7	Semampir	14
8	Gubeng	11
9	Sawahan	9
10	Simokerto	8
11	Tambaksari	7
12	Lakarsantri	2
13	Gayungan	1
14	Bulak	1
15	Dukuh Pakis	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		285

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi atau memiliki potensi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kawasan ini dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya. Adapun kawasan yang masuk dalam kategori sebagai kawasan pelestarian lingkungan hidup yakni:

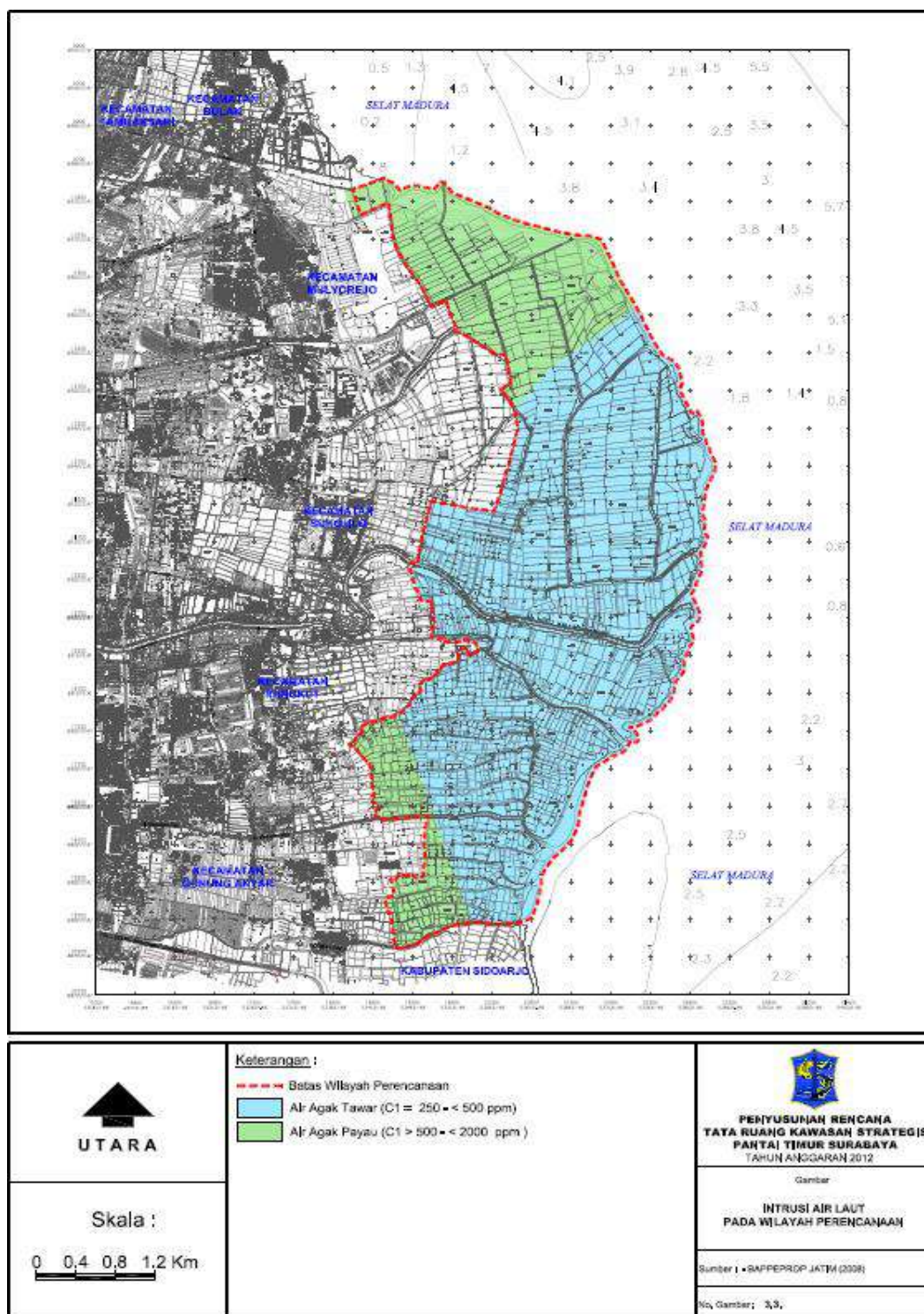
- Kawasan Muara Kali Lamong, terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal; dan
- Kawasan Pamurbaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Sukolilo.

Tabel II.3

Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenis RTH	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33	4.600,33
2	Hutan kota	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.636,36	4.636,36	4.666,36	4.666,36	4.666,36

Sumber: Bappedalitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah, 2025



Gambar II.4 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.5.



Gambar II.5 Peta Sesar Kendeng

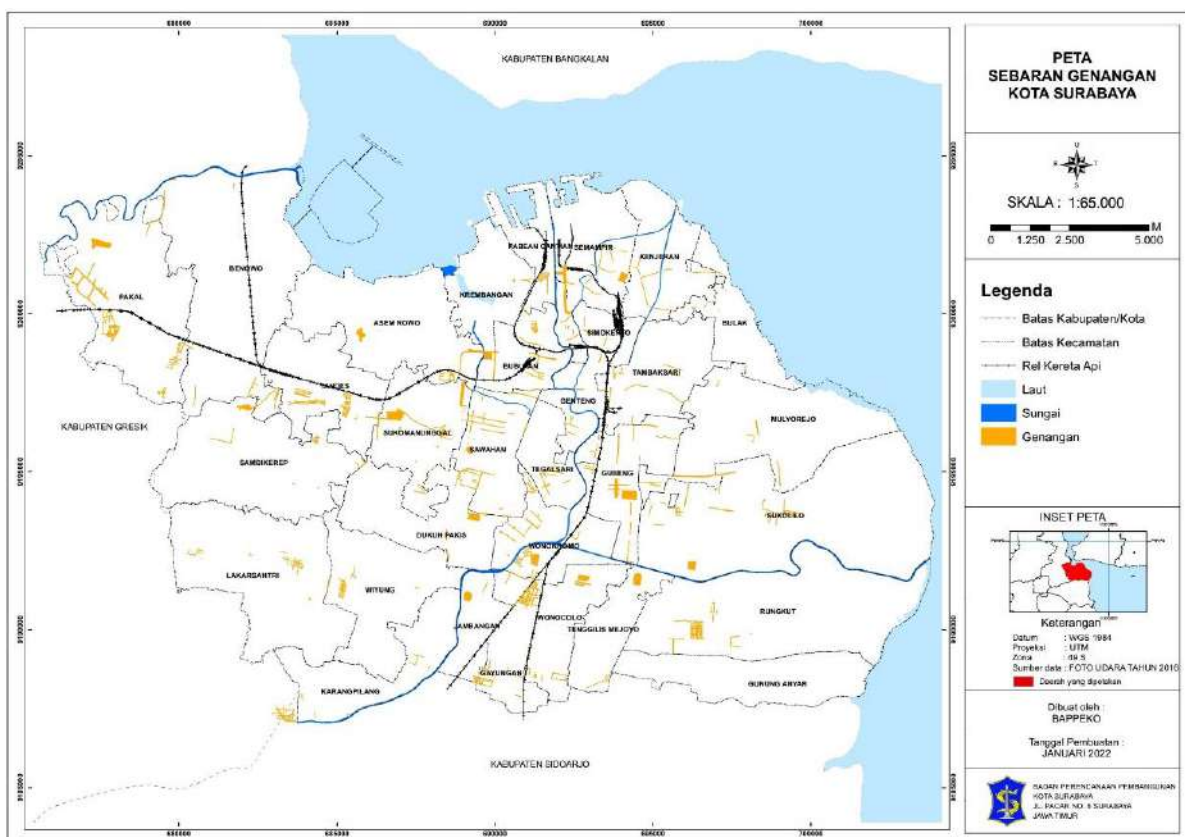
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan

genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.



Gambar II.6 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

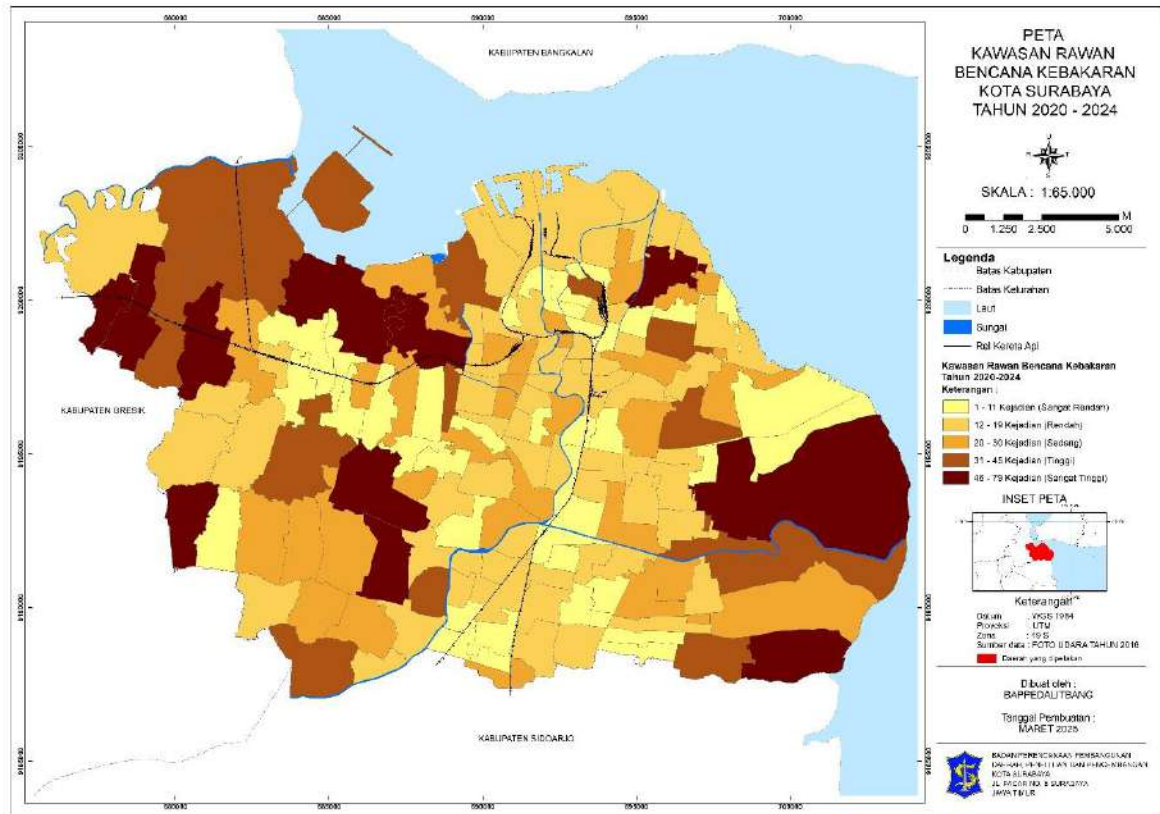


Gambar II.7 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk,

kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar II.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang

cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.4
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung	4	0	0	0	15
3	Kebakaran	705	589	771	112	40
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0
Total		709	589	771	112	55

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, serta kegagalan teknologi sepanjang tahun 2021-2025 Triwulan I belum pernah terjadi di Kota Surabaya. Sedangkan angin puting beliung pada tahun 2025 TW I terjadi sebanyak 15 kali diakibatkan pemanasan global yang tidak terhindarkan dan menyebabkan semakin tidak menentunya kondisi cuaca saat ini.

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019 telah membentuk kelurahan tangguh bencana di seluruh kelurahan. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Kota Surabaya, yakni mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi dampak bencana. Pada tahun 2023, jumlah kelurahan tangguh bencana berkurang disebabkan adanya penggabungan 2 kelurahan menjadi satu. Data kelurahan tangguh bencana tahun 2021 – 2025 (TW I) bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	154	154	153	153	153

Sumber: BPBD Kota Surabaya, 2025

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen

masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kapasitas Command Center 112 dan menyediakan 7 lokasi posko terpadu dan 22 lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan. Jumlah pos pantau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 34 lokasi disebabkan sebagian pos pantau sudah tidak aktif lagi karena keterbatasan jumlah personil yang ada (pergeseran penugasan di balai RW). Sehingga pos pantau yang masih aktif merupakan pos pantau yang wilayahnya paling sering terjadi kedaruratan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi-hazard*) tersebut dengan tingkatan, seperti nilai 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Berikut adalah kondisi kinerja historis Pemerintah Kota Surabaya melalui IRB selama 5 tahun.

Tabel II.6
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	150,34	136,36	124,93	113,31	112,08*

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur, 2025

*) nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan H&V tahun 2021

IRB Kota Surabaya sejak tahun 2020 mengalami tren menurun, hingga tahun 2024 nilai IRB Kota Surabaya adalah 112,08 (masuk dalam klasifikasi sedang). Meski demikian, penyelenggaraan urusan kebencanaan pada periode mendatang akan memiliki tantangan yang cukup besar, terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim, serta dampak dari penambahan penduduk yang berpotensi besar menjadi penyebab bencana lingkungan. Di sisi lain permasalahan birokrasi dan tata kelola kebencanaan harus dapat terselesaikan, Perangkat Daerah belum sinkron serta sinergis dalam rangka mendukung ketahanan daerah, peralatan kebencanaan yang sesuai dengan standar masih belum tercukupi, aparatur serta perangkat kebencanaan yang belum merata memiliki kompetensi memadai dalam penanganan kedaruratan. Permasalahan dan tantangan tersebut selanjutnya menjadi isu yang perlu dioptimalkan dengan penyiapan dan penguatan ketangguhan serta ketahanan kota yang berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi potensi bencana di Surabaya adalah melakukan pelatihan

mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, penguatan kapasitas petugas Kelurahan Tangguh Bencana, dan memonitoring secara berkala peralatan kesiapsiagaan bencana.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

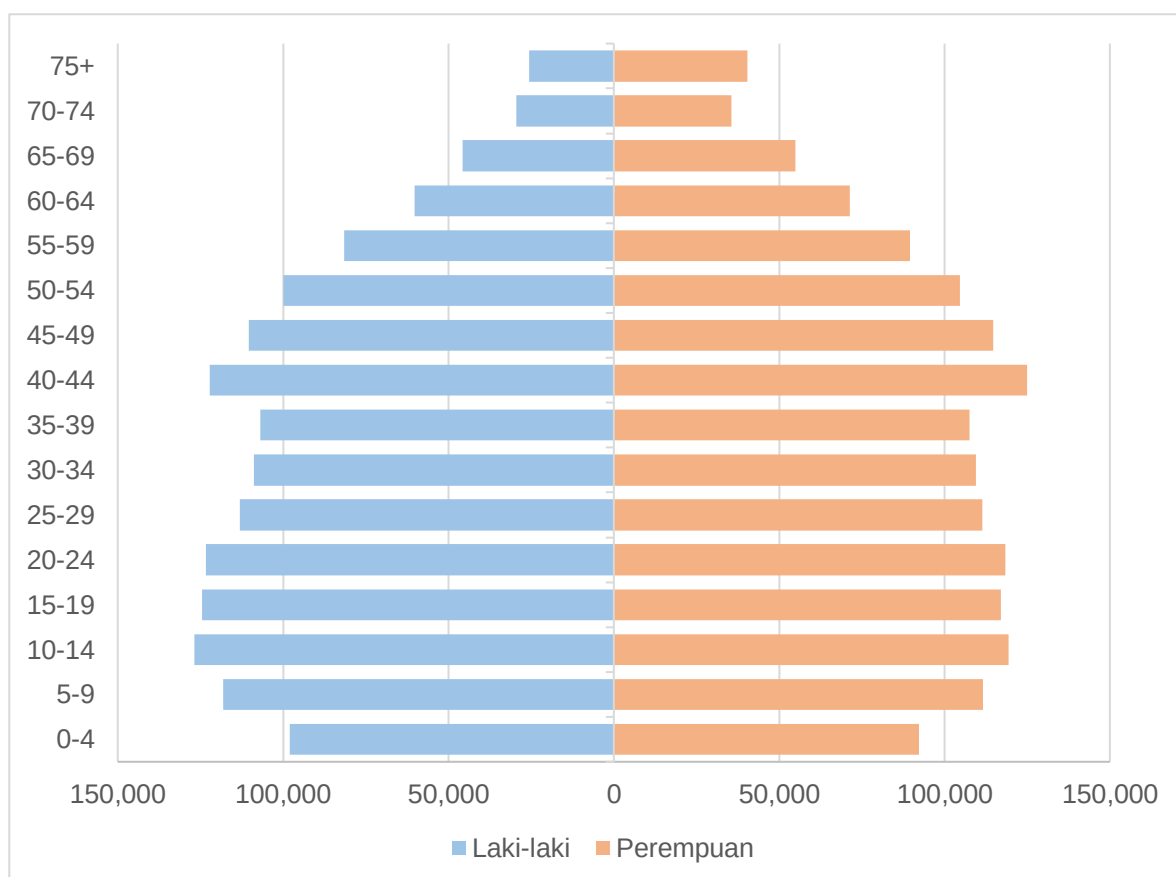
Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2024 sebesar 3.018.022 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.6. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Terdapat 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.7
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Asem Rowo	15,0083	48.841	3.254	17	Pakal	18,5756	64.515	3.473
2	Benowo	26,6462	74.933	2.812	18	Rungkut	22,9428	123.653	5.390
3	Bubutan	3,9060	96.704	24.758	19	Sambikerep	17,4166	69.076	3.966
4	Bulak	6,2363	47.839	7.671	20	Sawahan	7,1563	198.516	27.740
5	Dukuh Pakis	10,2708	59.345	5.778	21	Semampir	9,0671	183.295	20.215
6	Gayungan	5,9121	43.846	7.416	22	Simokerto	2,6300	92.057	35.003
7	Genteng	4,0919	58.216	14.227	23	Sukolilo	30,1774	115.913	3.841
8	Gubeng	7,9291	132.382	16.696	24	Sukomanunggal	9,4023	104.166	11.079
9	Gunung Anyar	10,1527	62.342	6.140	25	Tambaksari	8,9657	227.025	25.321
10	Jambangan	4,1191	54.212	13.161	26	Tandes	9,9805	91.784	9.196
11	Karang Pilang	9,3896	75.503	8.041	27	Tegalsari	4,3334	97.511	22.502
12	Kenjeran	8,5193	185.294	21.750	28	Tenggiling Mejoyo	5,8085	58.932	10.146
13	Krembangan	8,6046	114.866	13.349	29	Wiyung	12,3170	76.501	6.211
14	Lakarsantri	18,6939	65.013	3.478	30	Wonocolo	6,5445	80.034	12.229
15	Mulyorejo	17,3741	88.214	5.077	31	Wonokromo	8,2768	153.563	18.553
16	Pabean Cantian	5,4765	73.931	13.500	Total		335,925	3.018.022	8.984

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.523.288 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.494.734 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.9.



Gambar II.9 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2024 yaitu usia 4-6 tahun sebanyak 135.798 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 286.240 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 147.342 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 146.363 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.8
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2024

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	2.635	5.083	2.470	2.604
2	Benowo	3.449	7.372	3.882	3.828
3	Bubutan	4.281	8.978	4.659	4.763
4	Bulak	2.359	4.768	2.484	2.446

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
5	Dukuh Pakis	2.516	5.572	2.784	2.780
6	Gayungan	1.838	4.079	2.060	2.166
7	Genteng	2.429	5.239	2.781	2.822
8	Gubeng	5.324	11.414	5.952	6.156
9	Gunung Anyar	2.844	5.993	3.019	2.852
10	Jambangan	2.453	5.289	2.763	2.635
11	Karangpilang	3.374	6.916	3.546	3.569
12	Kenjeran	9.774	19.517	9.692	9.431
13	Krembangan	5.417	11.038	5.725	5.596
14	Lakarsantri	3.004	6.188	3.177	3.291
15	Mulyorejo	3.694	7.843	4.010	4.089
16	Pabean Cantian	3.527	7.024	3.654	3.653
17	Pakal	2.994	6.277	3.176	3.250
18	Rungkut	5.502	11.811	5.912	5.636
19	Sambikerep	3.124	6.451	3.380	3.357
20	Sawahan	8.233	18.196	9.664	9.613
21	Semampir	9.592	19.394	9.743	9.555
22	Simokerto	4.237	8.867	4.521	4.339
23	Sukolilo	5.108	10.990	5.507	5.335
24	Sukomanunggal	4.688	9.913	4.956	4.887
25	Tambaksari	9.706	20.889	10.989	10.792
26	Tandes	3.944	8.881	4.674	4.625
27	Tegalsari	4.085	8.964	4.668	4.558
28	Tenggiling Mejoyo	2.575	5.434	2.836	2.829
29	Wiyung	3.240	6.929	3.591	3.583
30	Wonocolo	3.609	7.446	3.838	3.856
31	Wonokromo	6.243	13.485	7.229	7.467
Jumlah		135.798	286.240	147.342	146.363

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, diolah

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.9
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2020	2021	2022	2023	2024
1. Islam	85,70%	85,83%	85,99%	86,05%	86,08%
2. Kristen	8,75%	8,68%	8,59%	8,56%	8,54%
3. Katholik	3,90%	3,87%	3,83%	3,83%	3,83%
4. Budha	1,40%	1,37%	1,34%	1,32%	1,30%
5. Hindu	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Agama	2020	2021	2022	2023	2024
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2024, Kota Surabaya masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 86,08% sedangkan sisanya sebesar 13,92% adalah penduduk beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 81 jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah Karyawan swasta, sebesar 56,13 persen. Posisi kedua ditempati oleh penduduk dengan status Mengurus rumah tangga yakni sebesar 14,09 persen, dan di posisi ketiga adalah Wiraswasta sebesar 11,79 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.10
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Karyawan Swasta	556.212	55,39717	21	Nelayan/Perikanan	995	0,09910
2	Mengurus Rumah Tangga	142.972	14,23961	22	Perawat	793	0,07898
3	Wiraswasta	118.890	11,84111	23	Karyawan BUMD	449	0,04472
4	Pelajar Mahasiswa	46.550	4,63625	24	Pendeta	400	0,03984
5	Belum / Tidak Bekerja	38.270	3,81159	25	Mekanik	366	0,03645
6	Pegawai Negeri Sipil	23.215	2,31215	26	Tukang Jahit	325	0,03237
7	Pensiunan	14.856	1,47962	27	Pelaut	318	0,03167
8	Guru	9.837	0,97974	28	Industri	310	0,03088
9	Tentara Nasional Indonesia	9.702	0,96629	29	Pembantu Rumah Tangga	291	0,02898
10	Pedagang	5.767	0,57438	30	Buruh Tani/Perkebunan	257	0,02560
11	Buruh Harian Lepas	4.546	0,45277	31	Tukang Kayu	249	0,02480
12	Karyawan BUMN	4.247	0,42299	32	Transportasi	246	0,02450
13	Dosen	3.806	0,37907	33	Konstruksi	235	0,02341
14	Kepolisian RI	3.729	0,37140	34	Pengacara	233	0,02321
15	Dokter	3.153	0,31403	35	Wartawan	185	0,01843
16	Petani/Pekebun	2.472	0,24620	36	Tukang Las/Pandai Besi	149	0,01484
17	Perdagangan	2.037	0,20288	37	Biarawati	136	0,01355
18	Sopir	1.814	0,18067	38	Seniman	133	0,01325
19	Karyawan Honorer	1.403	0,13973	39	Konsultan	129	0,01285
20	Tukang Batu	1.310	0,13047	40	Notaris	125	0,01245

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
41	Bidan	120	0,01195	62	Anggota DPRD Provinsi	7	0,00070
42	Tukang Listrik	111	0,01106	63	Penterjemah	7	0,00070
43	Apoteker	105	0,01046	64	Perancang Busana	6	0,00060
44	Arsitek	92	0,00916	65	Perangkat Desa	6	0,00060
45	Buruh Nelayan/Perikanan	79	0,00787	66	Penyiar Radio	5	0,00050
46	Ustadz/Mubaligh	57	0,00568	67	Penata Busana	5	0,00050
47	Juru Masak	55	0,00548	68	Tukang Gigi	4	0,00040
48	Tukang Sol Sepatu	48	0,00478	69	Anggota DPR RI	4	0,00040
49	Tukang Cukur	41	0,00408	70	Pialang	2	0,00020
50	Peneliti	32	0,00319	71	Penyiar Televisi	2	0,00020
51	Penata Rias	30	0,00299	72	Anggota Kabinet/ Kementerian	2	0,00020
52	Pastor	28	0,00279	73	Paranormal	2	0,00020
53	Penata Rambut	26	0,00259	74	Promotor Acara	2	0,00020
54	Akuntan	26	0,00259	75	Gubernur	2	0,00020
55	Peternak	25	0,00249	76	Kepala Desa	2	0,00020
56	Psikiater/Psikolog	21	0,00209	77	Paraji	1	0,00010
57	Pilot	16	0,00159	78	Walikota	1	0,00010
58	Imam Masjid	13	0,00129	79	Wakil Walikota	1	0,00010
59	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	12	0,00120	80	Wakil Bupati	1	0,00010
60	Tabib	10	0,00100	81	Lainnya	1.914	0,19063
61	Buruh Peternakan	9	0,00090				

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (29,75 persen), merupakan penduduk lulusan SMA sederajat. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 19,70 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sederajat sebanyak 15,35 persen.

Tabel II.11
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	594.608	19,70
Belum Tamat SD/setara	241.676	8,01
Tamat SD/setara	463.240	15,35
SMP/setara	438.040	14,51
SMA/setara	897.840	29,75
D1/D2	16.341	0,54
D3/Sarjana Muda	41.259	1,37
D4/S1	301.325	9,98
S2	21.961	0,73
S3	1.732	0,06
Total	3.018.022	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.12.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2024, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2024 dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha pertanian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 yakni administrasi pemerintahan, diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Lapangan usaha administrasi pemerintahan pada tahun 2024 mengalami laju pertumbuhan tertinggi di Kota Surabaya sebesar 9,88 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2024 yakni pertanian kehutanan, dan perikanan yang berkontraksi sebesar -6,06 persen. Lapangan usaha pertanian tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif disebabkan karena selain karena terbatasnya lahan untuk pertanian di Kota Surabaya juga karena faktor pola musiman.

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,90	1,11	3,46	0,51	-6,06
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,34	0,08	-1,98	-6,54	1,54
C	Industri Pengolahan	-1,15	3,90	6,55	3,34	5,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,25	6,10	8,03	30,84	5,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,02	5,63	2,13	2,41	2,17
F	Konstruksi	-5,39	4,38	6,40	5,02	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,57	7,37	6,95	5,48	4,13
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,98	2,05	14,14	11,16	9,03

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,87	2,08	8,48	7,84	7,38
J	Informasi dan Komunikasi	7,19	6,00	3,14	6,76	6,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	0,49	1,68	4,05	3,73
L	Real Estate	2,00	1,63	4,07	2,42	2,38
M,N	Jasa Perusahaan	-7,11	1,97	5,75	8,30	7,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,33	-0,12	0,16	0,06	9,88
P	Jasa Pendidikan	2,75	0,59	0,08	4,47	5,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,75	5,17	1,62	3,97	5,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	-16,30	2,76	13,26	9,28	8,26
PDRB		-4,85	4,29	6,51	5,70	5,76

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya bergerak positif sehingga pada tahun 2022 tercapai pada angka 6,51 persen. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kota Surabaya tercapai pada angka 5,70 persen yang mengindikasikan bahwa ekonomi di Kota Surabaya tetap mengalami pertumbuhan namun lebih rendah dari target sebesar 5,90 persen. Kendati begitu, pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi tetap bertumbuh mencapai angka 5,76 persen dengan target yang berada pada range 5,6 hingga 6,1 persen. Kendati pertumbuhan diproyeksikan bergerak positif, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan utamanya pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2024, Kota Surabaya mengalami peningkatan namun untuk Provinsi Jawa Timur dan Nasional sedikit mengalami penurunan. Data selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020–2024 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024*

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024*
Surabaya	-4,85	4,29	6,51	5,70	5,76
Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2025. *) data sementara

2.1.2.1.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010, mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024, sebesar Rp772.493.614,50 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, sebesar Rp715.294.707,23 juta. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2024 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp214.341.080,16 juta atau sebesar 27,75%. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp147.302.541,52 juta atau sebesar 19,07% sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.14.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp459.030.719,58 juta meningkat menjadi sebesar Rp485.448.887,46 juta di tahun 2024. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp134.133.559,71 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp92.182.283,14 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp71.889.162,06 juta seperti dapat dilihat pada Tabel II.15 berikut.

Tabel II.14
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,39	0,15	1.026.186,70	0,14	969.357,95	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,8	0,01	32.761,34	0,01	33.392,98	0,01	32.513,35	0,00	31.379,96	0,004
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	19,37	113.544.581,14	19,24	126.030.898,75	19,22	135.434.984,12	18,93	147.302.541,52	19,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	0,40	2.417.167,25	0,41	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52	3.970.550,80	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,33	0,14	968.113,96	0,14	994.411,87	0,13
F	Konstruksi	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,94	9,37	64.940.579,25	9,08	70.335.981,63	9,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16	214.341.080,16	27,75
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17	36.260.418,47	5,53	42.834.312,86	5,99	47.529.709,19	6,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.698,97	15,60	114.627.560,20	16,03	126.222.540,64	16,34
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,23	5,57	39.290.062,52	5,49	42.170.987,10	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,52	5,18	35.852.303,70	5,01	37.509.068,51	4,86
L	Real Estate	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,83	2,53	17.213.531,88	2,41	17.731.558,74	2,30
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	2,55	14.543.157,97	2,46	15.772.593,51	2,41	17.530.932,18	2,45	19.268.197,54	2,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,22	1,29	8.533.021,21	1,19	9.788.000,22	1,27
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,13	2,27	15.784.480,73	2,21	16.838.454,88	2,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,81	0,84	5.958.216,19	0,83	6.374.976,68	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,81	1,32	10.106.272,69	1,41	11.114.817,11	1,44
Produk Domestik Regional Bruto		554.509.457,38	100	590.227.966,81	100	655.616.221,58	100	715.294.707,23	100	772.493.614,50	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.

Tabel II.15

Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,9	0,14	554.054,70	0,14	573.236,82	0,13	1.026.186,70	0,14	541.237,84	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,55	0,01	32.513,35	0,00	18.120,26	0,004
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,11	19,47	135.434.984,12	18,93	92.182.283,14	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,76	0,38	3.728.710,22	0,52	2.301.731,69	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,79	0,16	968.113,96	0,14	711.522,48	0,15
F	Konstruksi	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,68	9,82	64.940.579,25	9,08	47.910.218,85	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,45	28,12	201.432.925,47	28,16	134.133.559,71	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87	22.684.941,35	5,22	42.834.312,86	5,99	27.494.461,88	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,35	14,29	114.627.560,20	16,03	71.889.162,06	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,48	7,43	39.290.062,52	5,49	36.698.243,72	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74	19.648.801,34	4,52	35.852.303,70	5,01	21.207.821,53	4,37
L	Real Estate	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,68	2,68	17.213.531,88	2,41	12.200.164,26	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	2,20	9.490.093,03	2,19	17.530.932,18	2,45	11.082.009,45	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,15	1,10	8.533.021,21	1,19	5.229.776,89	1,08
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,71	2,30	15.784.480,73	2,21	10.983.874,40	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,79	0,87	5.958.216,19	0,83	4.155.684,76	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,07	1,31	10.106.272,69	1,41	6.709.014,54	1,38
Produk Domestik Regional Bruto		390.936.424,98	100	407.726.799,20	100	434.268.341,12	100	715.294.707,23	100	485.448.887,46	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.

Tabel II.16

**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Kategori	Uraian	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,004	0,004
C	Industri Pengolahan	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47	18,93	19,04	19,07	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38	0,52	0,47	0,51	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15
F	Konstruksi	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82	9,08	9,75	9,11	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12	28,16	28,06	27,75	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22	5,99	5,49	6,15	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29	16,03	14,58	16,34	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43	5,49	7,50	5,46	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52	5,01	4,45	4,86	4,37
L	Real Estate	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68	2,41	2,60	2,30	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19	2,45	2,24	2,49	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10	1,19	1,04	1,27	1,08
P	Jasa Pendidikan	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30	2,21	2,28	2,18	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87	0,83	0,86	0,83	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31	1,41	1,35	1,44	1,38
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.

Struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 yang banyak tantangan dan ketidakpastian selaras dengan perekonomian pusat dan global, membuat beberapa peran sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua

sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2024 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 27,63 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 28,06 persen. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 18,99 persen yang sebelumnya sebesar 19,04 persen. Artinya selama tahun 2024, peran Industri Pengolahan turun sebesar 0,05 persen. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecenderungan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03 persen dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29 persen. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 14,81 persen. Tingginya peran lapangan usaha ini didorong oleh banyaknya aktivitas *event* maupun hiburan sehingga banyak hotel maupun restoran, cafe, rumah makan yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan kontribusi, yang pada tahun 2023 sebesar 5,49 persen menjadi 5,66 persen. Meningkatnya peran lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Kota Surabaya selaras dengan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi secara otomatis membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal itu dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2020 – 2024.

Tabel II.17
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023*	2024**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Milyar Rp)	554.509,46	590.227,97	655.616,22	715.294,71	772.493,61
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	193,01	204,92	227,08	245,72	264,37
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Milyar Rp)	390.936,42	407.726,80	434.268,34	459.030,72	485.448,89
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	136,07	141,56	150,41	157,69	166,14
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.873	2.880	2.887	2.911	2.922

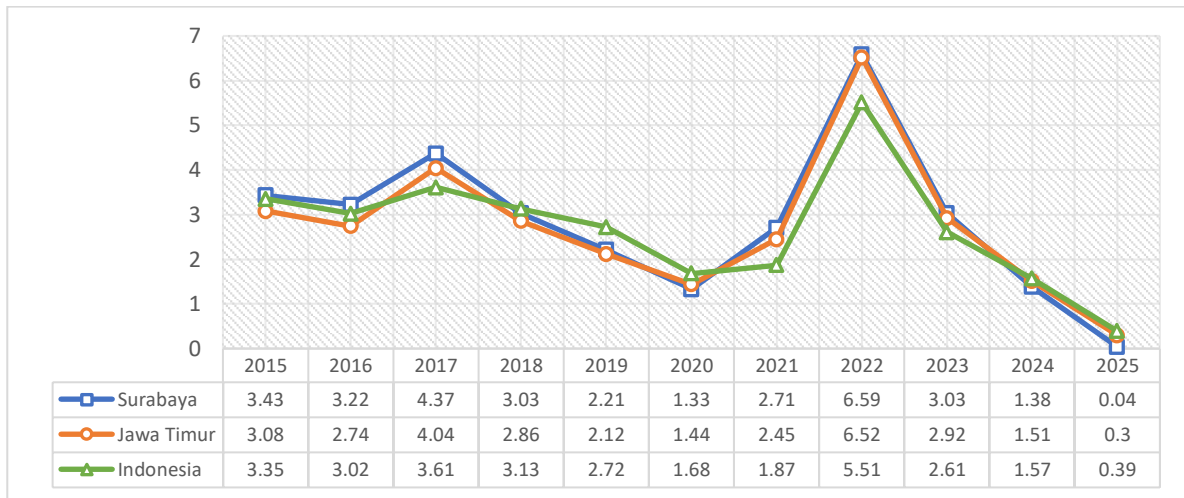
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025. *)data sementara. **)data sangat sementara.

Pada tabel di atas, PDRB per kapita Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa ADHB dan ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini karena dampak adanya pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 1,38 persen menurun dibandingkan tahun 2023. Bahkan nilai inflasi pada tahun ini lebih rendah dari sasaran yang ditargetkan $2,5 \pm 1$ persen. Terkendalnya inflasi Kota Surabaya sejalan dengan masifnya aksi pengendalian harga sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menstabilkan harga. Aksi pengendalian harga diwujudkan melalui monitoring harga secara berkala, operasi pasar serta kolaborasi kerjasama dengan daerah penghasil. Nilai inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 capaiannya juga lebih

rendah dibanding nilai inflasi pada tingkat provinsi yang tercatat sebesar 1,51 persen dan Nasional sebesar 1,57 persen.



Gambar II.10
Inflasi Kota Surabaya (year-to-date) Tahun 2021–2025 (TW I)

Sumber: BPS Kota Surabaya, April 2025

Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Sejak tahun 2021, rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional maupun provinsi, tingginya nilai inflasi tersebut berpotensi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Namun pada tahun 2023 dan berlanjut sampai akhir tahun 2024, angka tersebut berhasil dikendalikan, salah satunya karena upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama.

Sementara inflasi Kota Surabaya selama tahun 2025 secara kumulatif sebesar 0,04 persen. Nilai inflasi kumulatif tersebut tergolong rendah. Hal itu dikarenakan inflasi bulanan selama tahun 2025 Kota Surabaya mengalami deflasi 2 (dua) kali yakni pada bulan Januari dan Februari dengan deflasi masing-masing sebesar -0,72 persen dan -0,53 persen. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 Kota Surabaya mengalami inflasi bulanan sebesar 1,30 persen. Inflasi bulan Maret

didorong oleh faktor inflasi musiman pada momen puasa Ramadhan sehingga mendorong tingginya permintaan yang akhirnya memicu inflasi. Berdasarkan jenis komoditasnya, 10 komoditas tertinggi penyumbang inflasi bulan maret 2025 yakni tarif listrik, cabai rawit, bawang merah, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, santan jadi, air kemasan, telur ayam ras dan daging sapi. Sebaliknya 10 (sepuluh) komoditas yang menyumbang deflasi pada bulan Maret 2025 yakni angkutan udara, cumi-cumi, tomat, kepiting, telepon seluler, kacang panjang, biskuit, makan hewan peliharaan, wortel dan ikan gurami.

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang dirilis BPS, indeks gini Kota Surabaya memiliki angka yang cenderung lebih tinggi dibandingkan keduanya, kecuali kondisi pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan indeks gini di Kota Surabaya cukup signifikan. Oleh sebab itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

Tabel II.18
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	0,344	0,351	0,388	0,423	0,381

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber data: BPS, 2025 (versi data Maret)

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Meski garis kemiskinan setiap tahun cenderung meningkat mengikuti inflasi, namun angka dan jumlah penduduk miskin harus semakin menurun. Pada periode pandemi Covid-19, tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin naik cukup signifikan sebagai dampak dari pembatasan sosial dalam skala besar. Namun, di tahun 2022 hingga 2024, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 4,65 sebagai dampak dari berbagai intervensi kemiskinan yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Uraian	Lingkup	2020	2021	2022	2023*	2024
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya*	5,02	5,23	4,72	4,65	3,96
	Jawa Timur	11,46	10,59	10,49	10,35	9,56
	Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Surabaya*	592.137	611.466	652.540	718.370	742.678
	Jawa Timur	418.228	445.139	487.908	507.286	547.751
	Nasional	458.947	486.168	535.547	550.458	595.242
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya*	145,67	152,489	138,21	136,37	116,62
	Jawa Timur	4.585,97	4.259,60	4.236,51	4.188,81	3.893,82
	Nasional	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.898,55	24.054,72

Sumber: BPS, 2025 (versi data Sept). *) versi data Maret

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi

intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69.330 jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35.020 jiwa (1,20%), tahun 2022 sebanyak 23.530 jiwa (0,80%), tahun 2023 sebanyak 7.572 jiwa (0,25%), hingga menjadi 0 jiwa di tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/103/436.1.2/2024. Salah satu kunci sukses pengentasan kemiskinan ekstrem adalah bentuk intervensi bagi mereka dengan mendorong pembukaan lapangan kerja padat karya untuk peningkatan kemandirian ekonomi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, angka IPM mengalami *update* data Umur Harapan Hidup, yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. *Update* angka umur harapan hidup tersebut mengakibatkan penyesuaian angka IPM sejak tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kota Surabaya meningkat dari 82,76 pada tahun 2020 menjadi 84,69 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,58% per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, yang juga merupakan angka tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 5 tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kota Surabaya	82,76	82,94	83,32	83,99	84,69
IPM Provinsi Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, data UHH yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sehingga mengakibatkan perubahan angka UHH sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya. Perkembangan UHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.21
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Umur Harapan Hidup (UHH)	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya (tahun)	75,24	75,43	75,62	75,82	76,02
Provinsi Jawa Timur (tahun)	74,21	74,28	74,57	74,87	75,07
Nasional (tahun)	73,37	73,46	73,7	73,93	74,15

Sumber: BPS, 2025.

UHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 75,24 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 75,43 tahun meski di tengah kondisi pandemi. Kemudian di tahun 2022, UHH penduduk Kota Surabaya kembali meningkat menjadi 75,62 tahun. Hingga pada tahun 2023 dan 2024 UHH penduduk Kota Surabaya terus meningkat menjadi berturut-turut 75,82 dan 76,02 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (*mean years of schooling*) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses

pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.22
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,49	10,50	10,51	10,70	10,89
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,78	7,88	8,03	8,11	8,28
RLS Nasional (tahun)	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS, 2025

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) menurut BPS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.23
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2020	2021	2022	2023	2024
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,80	14,81	14,83	14,85	14,87
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,19	13,36	13,37	13,38	13,43
HLS Nasional (tahun)	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa peluang penduduk usia 7 tahun ke atas untuk terus bersekolah/ mengakses pendidikan sampai dengan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Adapun penyebab utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi HLS dan RLS antara lain karena faktor penduduk yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Penyebab anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di antaranya karena menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup dan telah bekerja.

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pemerataan dan pengembangan akses di bidang Pendidikan, melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP, penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada 1 PAUD, 284 SD negeri dan 63 Unit SMPN, pengembangan PAUD Holistik Integratif, Kejar Paket dengan muatan pendidikan vokasi, Sinau dan Ngaji Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 234 balai RW, serta Program Tebus Ijazah bagi 631 siswa jenjang SMA/SMK/MA dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong program Orang Tua Asuh, beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.456 siswa (meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 1.339 siswa), beasiswa SMA/SMK/MA untuk 21.000 siswa, beasiswa pemuda tangguh untuk 3.500 mahasiswa, serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak didapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.24

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Pengeluaran Per Kapita	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya (Rp .000)	17.755	17.826	18.345	18.977	19.666
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.601	11.707	11.992	12.421	12.852
Nasional (Rp .000)	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 19,666 juta rupiah per tahun. Tentu, angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional, karena tingginya kebutuhan hidup di kota besar yang selaras dengan perkembangan kemajuan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

2.1.2.2.2 Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator baru dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada keselarasan perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkul, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat

pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel II.25
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	N/A	80,08	82,70	99,83
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	N/A	48,01	56,51	113,32
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	N/A	97,67	97,86	97,98
1.c	Indeks Budaya Lokal	88,56	89,67	89,97	89,99	90,11

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 99,83 tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi event budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutинnya pelaksanaan event, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota

Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Peringatan Peristiwa Perobekan Bendera, Surabaya Heroic Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Pemilihan Duta Wisata, Kya-Kya Festival, Cak dan Ning, Peringatan Hari Tari Sedunia serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung zero waste, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti *Surabaya Smart City*, *ECO school*, ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkoba dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Seiring dengan upaya dalam mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga senantiasa berupaya penuh dalam meningkatkan nilai kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Salah satu langkah strategis dalam meraih hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang diukur dalam Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Kepedulian Sosial merupakan suatu sinergi yang menggabungkan antara nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti serta kepatuhan terhadap peraturan negara.

2.1.2.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH penduduk Kota Surabaya sudah sebesar 100 persen sejak tahun 2016. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.26
Perkembangan AMH Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.460.443	2.295.394	2.300.947	2.330.830	2.330.830
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM SD/MI (persen)	98,46	100,82	91,37	95,08	95,34
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang berusia 7-12 Tahun	295.357	299.814	269.289	277.858	272.908
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	299.966	297.369	294.723	292.229	286.240
2	APM SMP/MTs (persen)	87,58	87,34	80,77	96,17	96,27
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 Tahun	126.874	129.763	119.705	141.948	141.853
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.872	148.573	148.205	147.594	147.342

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil Kota Surabaya, 2025

Peningkatan APM SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2024 tersebut dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs serta menjadi tolak ukur keberhasilan atas penambahan daya tampung ruang kelas baru di beberapa sekolah. Sedangkan manfaat pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi siswa mampu membantu peningkatan perekonomian dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa itu sendiri.

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.28
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio APM SD/MI (persen)	92,73	99,80	94,04	100,15	100,25
2.	Rasio APM SMP/MTs (persen)	90,59	103,13	94,00	101,63	101,71

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (Triwulan I) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.29
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APK PAUD (persen)	69,59	75,56	77,57	77,39	73,02
1.1	Jumlah Seluruh Siswa PAUD	123.269	102.666	105.998	105.090	135.798
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4-6 Tahun	177.135*	135.876	136.632	135.798	99.156
2.	APK SD/MI (persen)	106,90	106,37	109,89	104,50	88,11
2.1	Jumlah Seluruh Siswa SD/MI	317.885	313.505	321.128	299.111	252.194
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	297.369	294.723	292.229	286.240	286.240
3.	APK SMP/MTs (persen)	110,64	108,47	110,53	105,89	79,04
3.1	Jumlah Seluruh Siswa SMP/MTs	164.376	160.764	163.134	156.024	116.456
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	148.573	148.205	147.594	147.342	147.342

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025. *)data menggunakan kelompok usia 3-6 tahun.

Rendahnya APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Triwulan I Tahun 2025 dikarenakan masih banyak satuan pendidikan yang sedang proses melakukan pembaruan data peserta didik di masing-masing jenjang baik SD/setara maupun SMP/setara.

2.1.2.2.4 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan status gizi masyarakat. Utamanya pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun

2021 yang sebesar 0,10 persen, berhasil diturunkan menjadi 0,04 persen di triwulan I tahun 2025, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.30
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	148	123	118	109	47
2	Jumlah balita yang ditimbang	148.720	126.113	149.899	142.254	131.328
3	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,10	0,10	0,08	0,08	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Tabel II.31
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Kecamatan	2021			2022			2023			2024			2025 (TW I)		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	12	3.257	0,37%	4	3.504	0,11%	0	3.523	0,00%	1	3.619	0,03%	0	3.453	0,00%
2	Kec. Benowo	1	3.475	0,03%	3	3.017	0,10%	6	5.112	0,02%	4	4.304	0,09%	3	3.912	0,08%
3	Kec. Bubutan	4	5.008	0,08%	5	4.212	0,12%	8	4.418	0,05%	2	5.191	0,04%	1	4.882	0,02%
4	Kec. Bulak	6	2.645	0,23%	4	2.458	0,16%	1	2.543	0,07%	2	2.196	0,09%	1	2.342	0,04%
5	Kec. Dukuh Pakis	6	2.167	0,28%	5	1.771	0,28%	3	2.505	0,05%	2	1.968	0,10%	3	1.794	0,17%
6	Kec. Gayungan	1	1.828	0,05%	3	1.501	0,20%	1	2.130	0,00%	1	2.244	0,04%	0	2.086	0,00%
7	Kec. Genteng	5	3.181	0,16%	1	2.850	0,04%	0	2.351	0,00%	2	2.051	0,10%	3	1.842	0,16%
8	Kec. Gubeng	1	6.056	0,02%	2	3.506	0,06%	3	5.950	0,04%	5	5.090	0,10%	0	4.739	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	0	3.383	0,00%	2	1.305	0,15%	2	2.543	0,00%	2	3.671	0,05%	0	3.415	0,00%
10	Kec. Jambangan	0	3.280	0,00%	0	1.838	0,00%	0	3.206	0,04%	1	2.705	0,04%	0	2.647	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	0	4.552	0,00%	3	1.982	0,15%	3	4.050	0,49%	1	2.828	0,04%	0	1.885	0,00%
12	Kec. Kenjeran	8	10.635	0,08%	10	9.711	0,10%	8	10.884	0,03%	4	9.772	0,04%	1	9.969	0,01%
13	Kec. Krembangan	3	6.197	0,05%	11	6.068	0,18%	7	5.690	0,07%	4	5.854	0,07%	0	5.705	0,00%
14	Kec. Lakarsantri	5	2.857	0,18%	3	2.952	0,10%	3	3.722	0,09%	5	3.766	0,13%	2	3.374	0,06%
15	Kec. Mulyorejo	3	2.368	0,13%	1	2.158	0,05%	0	4.678	0,00%	4	4.363	0,09%	0	3.611	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	1	3.478	0,03%	2	3.980	0,05%	0	3.708	0,00%	1	3.323	0,03%	0	3.322	0,00%
17	Kec. Pakal	8	3.841	0,21%	2	3.793	0,05%	1	3.434	0,00%	2	3.608	0,06%	0	2.986	0,00%
18	Kec. Rungkut	2	5.186	0,04%	6	3.056	0,20%	12	5.146	0,16%	3	5.451	0,06%	2	5.323	0,04%

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kecamatan	2021			2022			2023			2024			2025 (TW I)		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
19	Kec. Sambikerep	4	3.317	0,12%	2	2.960	0,07%	4	3.995	0,1%	4	3.683	0,11%	4	3.232	0,12%
20	Kec. Sawahan	10	10.349	0,10%	3	10.046	0,03%	7	10.456	0,05%	5	8.459	0,06%	5	8.331	0,06%
21	Kec. Semampir	11	9.578	0,11%	12	8.537	0,14%	18	8.542	0,13%	7	9.195	0,08%	7	8.204	0,09%
22	Kec. Simokerto	7	4.887	0,14%	4	4.102	0,10%	5	4.254	0,1%	3	4.565	0,07%	4	4.202	0,10%
23	Kec. Sukolilo	1	4.759	0,02%	5	2.879	0,17%	1	5.190	0,03%	4	5.568	0,07%	0	3.779	0,00%
24	Kec. Sukomanunggal	22	5.558	0,40%	1	5.156	0,02%	0	5.340	0,02%	4	4.646	0,09%	0	4.402	0,00%
25	Kec. Tambaksari	6	10.767	0,06%	9	8.616	0,10%	8	10.103	0,05%	3	10.085	0,03%	4	9.044	0,04%
26	Kec. Tandes	2	5.864	0,03%	2	4.066	0,05%	0	4.951	0,00%	6	4.061	0,15%	1	4.205	0,02%
27	Kec. Tegalsari	12	3.960	0,30%	3	3.906	0,08%	1	5.187	0,00%	6	4.055	0,15%	0	3.009	0,00%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.714	0,00%	0	2.376	0,00%	6	2.827	0,41%	1	2.620	0,04%	0	2.413	0,00%
29	Kec. Wiyung	3	2.395	0,13%	6	3.132	0,19%	5	3.214	0,23%	4	2.918	0,14%	3	2.976	0,10%
30	Kec. Wonocolo	2	4.261	0,05%	1	4.262	0,02%	0	4.082	0,00%	5	4.200	0,12%	0	4.104	0,00%
31	Kec. Wonokromo	2	6.917	0,03%	8	6.413	0,12%	5	6.165	0,06%	11	6.195	0,18%	3	6.140	0,05%
Total		148	148.720	0,10%	123	126.113	0,10%	118	149.899	0,08%	109	142.254	0,08%	47	131.328	0,04%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Selain itu prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 8,21, berhasil diturunkan menjadi 1,53 pada akhir tahun 2024, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.32
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita dengan status gizi kurang	6.200	2.501	2.332	2.178	2.902
2	Jumlah balita yang ditimbang	148.763	126.113	149.259	142.254	126.066
3	Prevalensi balita gizi kurang (%)	4,17	1,98	1,56	1,53	2,3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Keberhasilan penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang ini didukung oleh pelaksanaan intervensi penurunan yang masif mulai dari penguatan skrining balita, optimalisasi pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk bayi dan balita melalui Sistem Aplikasi Sayang Warga, pemanfaatan alat antropometri untuk pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus), sekolah orang tua hebat yang memuat bagaimana pola asuh anak termasuk penyusunan makan bergizi bagi anak dengan gizi buruk, gizi kurang dan stunting.

Di sisi lain, capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.33
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	17	16	13	11	0
2	Kelahiran Hidup	40.158	40.012	39.891	36.208	35.849
3	AKI per 100.000 KH	42,33	39,99	32,59	30,38	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan AKI dan AKB secara signifikan ini terjadi dikarenakan adanya penguatan intervensi yang tepat sasaran, antara lain terkait upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis obgyn (1P-1O), pendampingan calon pengantin dan ibu hamil oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) hingga PMT Lokal untuk Ibu Hamil KEK Risiko Tinggi dan pemberian permakanan Ibu Hamil KEK. Sedangkan dalam kasus kematian bayi, penyebab terbanyaknya adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan.

Tabel II.34
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025

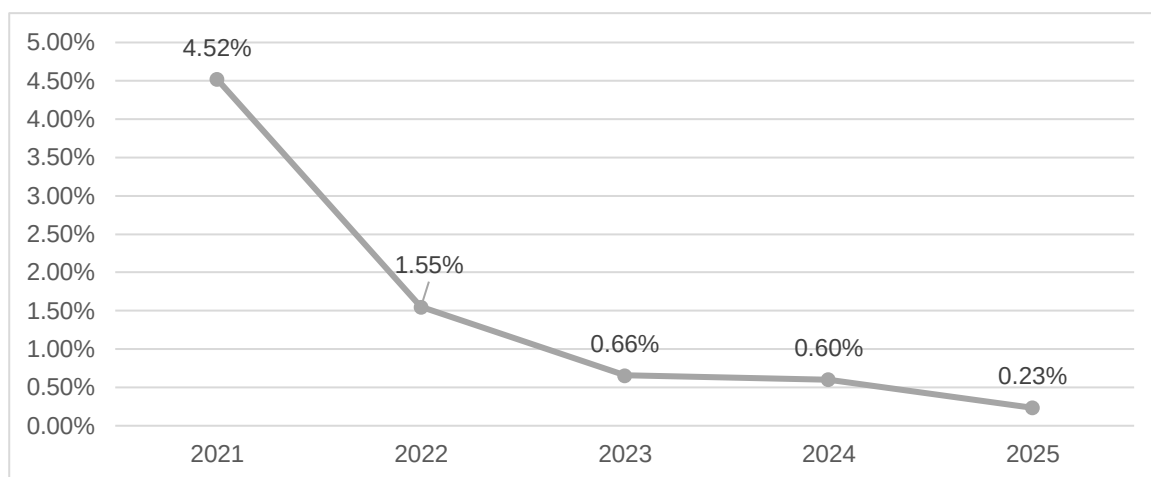
No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi lahir meninggal	199	174	161	146	10
2	Kelahiran Hidup	40.158	40.012	39.891	36.208	35.849
3	AKB per 1.000 KH	4,96	4,35	4,04	4,03	0,28

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) di mana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita *Stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2021 sebesar 4,52 persen menjadi hanya 0,23 persen pada tahun 2025 triwulan I. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program pencegahan dan penanganan balita *stunting* termasuk balita gizi buruk dan gizi kurang di Kota Surabaya berjalan dengan baik, didukung dengan adanya pemanfaatan Kader Surabaya Hebat dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan setiap balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, juga didukung dengan adanya sistem Aplikasi Sayang Warga yang memudahkan pendataan dan monitoring secara *realtime* perkembangan balita dari waktu ke waktu. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.11 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2021–2025 (TW I)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 mempunyai tren meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,68 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja yang utamanya banyak terjadi ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan menjadi 4,91 persen, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pengangguran akibat terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas SDM angkatan kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pemulihan sektor pariwisata, dan program padat karya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2020–2024.

Tabel II.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	154.933	152.273	125.276	106.120	79.767

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1.582.564 menjadi 1.624.822 di tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada tingginya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79 dan 9,68 persen. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2022, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 7,62 persen di akhir tahun 2022, sehingga pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 5% dari semula pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 8,26%. Sementara itu, pada tahun 2024, TPT Kota Surabaya semakin menurun di angka 4,91%.

Tabel II.36
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber data: BPS, 2025 (versi data Agustus).

Seperti pada tabel di atas, dalam kurun 5 tahun terakhir angka TPT Kota Surabaya cenderung menurun, utamanya disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, meningkatkan jumlah pengangguran. Namun pada tahun 2022 dan 2023 angka TPT berhasil diturunkan cukup signifikan, meski belum mencapai di angka sebelum pandemi. Angka TPT di Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada periode yang sama juga mengalami hal serupa meski dengan derajat yang berbeda. Di tahun 2024, dengan fokus pada pemulihan ekonomi sebagai tema pembangunan, di antaranya melalui program padat karya dan penyelenggaraan *job fair*, ternyata dapat menurunkan kembali angka TPT di Kota Surabaya menjadi 4,91%, lebih rendah dari masa sebelum pandemi.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.37
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

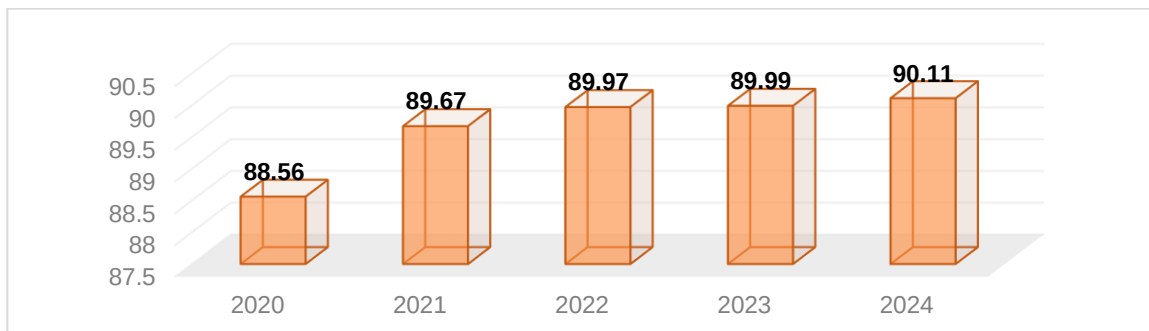
No.	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Grup Kesenian	743	806	715	911	915
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	45	49	58	58
4	Jumlah Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dasar pembangunan seni budaya adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2021 sebanyak 743 grup kesenian, dan sampai dengan triwulan I tahun 2025 jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tercatat bertambah menjadi 915 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/ pertunjukan seni di ruang publik. Adapun event pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Festival Seni Lintas Budaya, Surabaya Vaganza, *Night At The Museum*, Surabaya Art & Culture Festival, Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Suroboyo serta fasilitasi tampilan seni di ruang-ruang publik lainnya.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap

kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2020 hingga triwulan I tahun 2025, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.12 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2020–2024

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 90,11%. Angka tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2020 sebesar 88,56%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Pada aspek Olahraga, jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina sampai dengan tahun 2024 sebanyak 64 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 5 gedung olahraga antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila. Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2024, lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 635 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan panjat tebing. Pembinaan atlet dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota serta pengiriman atlet untuk kejuaraan skala regional dan nasional, serta pemberian *reward* untuk atlet berprestasi.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.38
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
URUSAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA						100,00%
1	Pendidikan Anak Usia Dini					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Orang	91.826	91.826	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	2. Angka partisipasi murni	%	66,26	66,26	0	100,00%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	49,53	49,53	0	100,00%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	83,78	83,78	0	100,00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	0,42	0	100,00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100,00%
	7. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	31,24	31,24	0	100,00%
	9. Proporsi PTK penggerak	%	5,14	5,14	0	100,00%
2	Pendidikan Dasar					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Orang	444.550	444.550	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	SD					
	1. Angka partisipasi kasar	%	104,2	104,2	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	88,29	88,29	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	77,12	77,12	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3,87	3,87	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,81	1,81	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,7	74,7	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,32	75,32	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,46	57,46	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	82,41	82,41	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	85,79	85,79	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	52,72	52,72	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	8,97	8,97	0	100,00%
	SMP					100,00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	105,79	105,79	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	91,23	91,23	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	88,29	88,29	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	5,51	5,51	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,37	3,37	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,48	74,48	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,92	76,92	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,24	61,24	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	84,43	84,43	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	87,08	87,08	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	52,24	52,24	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	10,93	10,93	0	100,00%
3	Pendidikan Kesetaraan					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	4.740	4.740	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100,00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	62,87	62,87	0	100,00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	58,57	58,57	0	100,00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	9,2	9,2	0	100,00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	6,34	6,34	0	100,00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	64,03	64,03	0	100,00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	60,59	60,59	0	100,00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,02	54,02	0	100,00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100,00%
	URUSAN KESEHATAN KOTA SURABAYA					100,00%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	37.187	37.506	-319	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	29.916	30.005	-89	100,00%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	6.731.100	6.751.080	-19.980	100,00%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	37.395	37.506	-111	100,00%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	37.395	38.091	-696	100,00%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	5.609	5.626	-17	100,00%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	37.395	37.437	-42	100,00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	11. Gel USG	Botol	2.493	2.500	-7	100,00%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	3.611	3.611	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	37.187	37.187	0	100,00%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	37.187	37.295	-108	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Formulir partograf	Formulir	37.187	37.295	-108	100,00%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.506	-111	100,00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	3.611	3.611	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	1.891	1.891	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	36.208	37.952	-1.744	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	36.208	37.952	-1744	100,00%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	36.208	37.952	-1744	100,00%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	36.208	37.952	-1744	100,00%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	36.208	37.952	-1744	100,00%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	108.624	113.856	-5232	100,00%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	38.091	-696	100,00%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3.619	3.619	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	84	84	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
4	Pelayanan Kesehatan Balita					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	152.252	152.609	-357	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	152.252	152.609	-357	100,00%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	152.252	152.609	-357	100,00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	37.395	38.091	-696	100,00%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	17.490	30.015	-12525	100,00%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	152.252	154.847	-2595	100,00%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.069	12.313	-244	100,00%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	5.973	6.134	-161	100,00%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.959	9.194	-235	100,00%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.959	9.152	-193	100,00%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	8.959	9.253	-294	100,00%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.295	10.357	-62	100,00%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	10.295	10.302	-7	100,00%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	840	840	0	100,00%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	63	63	0	100,00%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	63	63	0	100,00%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	20. Guru PAUD	Orang	11.595	11.595	0	100,00%
	21. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan		396.102	398.643	-2.541	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	396.102	398.643	-2541	100,00%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	65	65	0	100,00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	396.102	398.643	-2541	100,00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	756	756	0	100,00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	0	100,00%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	6.814.288	6.814.288	0	100,00%
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	63	63	0	100,00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.920	21.920	0	100,00%
	9. Media promosi kesehatan	Paket	63	63	0	100,00%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	10.479	10.482	-3	100,00%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	4.471	4.471	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	25.764	25.764	0	100,00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1.923.364	2.161.327	-237.963	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	315	315	0	100,00%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	63	63	0	100,00%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	63	63	0	100,00%
	4. Alat : Glukometer	Unit	63	63	0	100,00%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	63	63	0	100,00%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	2.654.500	2.654.500	0	100,00%
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	0	100,00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1.923.364	2.154.168	-230.804	100,00%
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	63	63	0	100,00%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	63	63	0	100,00%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	130	130	0	100,00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	0	100,00%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	4.674	4.758	-84	100,00%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	378.637	378.637	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	63	63	0	100,00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	63	63	0	100,00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	378.637	378.637	0	100,00%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	378.637	378.637	0	100,00%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	260	260	0	100,00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		727.432	738.280	-10.848	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	126	126	0	100,00%
	2. Obat Hipertensi	Paket	727.423	738.280	-10.857	100,00%
	3. Tensimeter	Unit	63	63	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	63	63	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	84	84	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	101.979	113.051	-11.072	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	101.797	113.051	0	100,00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	63	63	0	100,00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.654.500	2.654.500	0	100,00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	63	63	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	189	189	0	100,00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	5.552	5.849	-297	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	Buku	63	63	0	100,00%
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	63	63	0	100,00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	63	63	0	100,00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	756	756	0	100,00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	189	189	0	100,00%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	63	63	0	100,00%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	63	63	0	100,00%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	78.502	108.826	-30.324	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Reagen Zn TB	Kit	1.570	2.177	-607	100,00%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	78.502	108.826	-30.324	100,00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	157.004	217.652	-60.648	100,00%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	78.502	108.826	-30.324	100,00%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	756	756	0	100,00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	63	0	100,00%
	8. Tuberkulin	Vial	280	280	0	100,00%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	3.491	3.491	0	100,00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	0	100,00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	480	480	0	100,00%
	15. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	0	100,00%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100,00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	49.485	63.442	-13.957	100,00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.537	3.537	0	100,00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	0	100,00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	0	100,00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	1.392	1.392	0	100,00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	0	100,00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	63	63	0	100,00%
URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SURABAYA						100,00%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	Orang	3.017.382	3.017.382	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
JARINGAN PERPIPAAN						

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	618.436	618.436	0	100,00%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	618.436	618.436	0	100,00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	20.440	20.440	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	577.832	577.832	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	5.110	5.110	0	100,00%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100,00%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SURABAYA						100,00%
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
1. Pendataan						
	Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100
	Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota					100
	Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)					100
	Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
2	2. Perhitungan					
	Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota					100
	Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100
	Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					100
	3. Perencanaan					
	Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota					100
	Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					100
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
1	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Orang	243	243	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	201	201	0	100,00%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	68	68	0	100,00%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	68	68	0	100,00%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	65	65	0	100,00%
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2	5	-3	100,00%
	URUSAN TRANTIBUM KOTA SURABAYA					100,00%
	1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	Orang	1.280	1.296	-16	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	423	423	0	100,00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	12	12	0	100,00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	978	1426	-448	100,00%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100,00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100,00%
2	Pelayanan Informasi Rawan bencana					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	730.728	730.728	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	730.728	730.728	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	1.650	1.650	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	100	100	0	100,00%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Orang	412	412	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	5	5	0	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	412	412	0	100,00%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	739	1.665	-926	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	8	8	0	100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.000	1.665	-665	100,00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	100,00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	10	10	0	100,00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	684	684	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	684	684	0	100,00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	10	10	0	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	845	845	0	100,00%
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	10	15	-5	100,00%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	684	684	0	100,00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	684	684	0	100,00%
	URUSAN SOSIAL KOTA SURABAYA					100,00%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase capaian
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	40	40	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100,00%
	2. Penyediaan permakanan	Orang	40	40	0	100,00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	40	40	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	40	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	0	100,00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	40	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	40	40	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	6	6	0	100,00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	90	90	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	25	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	90	90	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	90	90	0	100,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	90	90	0	100,00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	90	90	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	90	90	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	90	90	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	90	90	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100,00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	230	230	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	130	130	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	100	100	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	230	230	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	230	230	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	27	27	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	230	230	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	230	230	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	25	25	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	7	7	0	100,00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	230	230	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	230	230	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	105	105	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100,00%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	900	900	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	100	100	0	100,00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	650	650	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	900	900	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	900	900	0	100,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	900	900	0	100,00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	900	900	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	150	150	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	400	400	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	800	800	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	50	50	0	100,00%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Persentase capaian
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	1.214	1.214	0	100,00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	120	8.503	-8.383	100,00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	95	148	-53	100,00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	71	87	-16	100,00%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Meski SPM Kota Surabaya Tahun 2024 secara rata-rata pada 6 urusan tercapai 100% (meningkat dari tahun 2023 yang tercapai 99,67%), namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, di antaranya masih diperlukannya perbaikan komunikasi dan kerjasama antar perangkat instansi pemerintahan, baik di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Pada tahun 2024, Kota Surabaya mencapai target 100% di semua indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota, tenaga pendidik dan kependidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan serta inovasi yang telah diterapkan.

Tabel II.39

Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021–2024

No.	Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	97,15%	99,34%	100%
2	Pendidikan Dasar	100%	99,83%	99,69%	100%
3	Pendidikan Kesenjangan	100%	98,65%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2025

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.40

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Asemrowo	5.083	4.111	80,88%	2.470	1.872	75,79%
Benowo	7.372	6.658	90,31%	3.882	3.759	96,83%
Bubutan	8.978	8.373	93,26%	4.659	2.107	45,22%
Bulak	4.768	6.349	133,16%	2.484	2.820	113,53%
Dukuh Pakis	5.572	5.776	103,66%	2.784	3.723	133,73%
Gayungan	4.079	5.069	124,27%	2.060	2.448	118,83%
Genteng	5.239	5.621	107,29%	2.781	5.536	199,07%
Gubeng	11.414	12.510	109,60%	5.952	4.873	81,87%
Gunung Anyar	5.993	4.777	79,71%	3.019	2.137	70,79%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Jambangan	5.289	5.049	95,46%	2.763	3.986	144,26%
Karangpilang	6.916	5.895	85,24%	3.546	3.287	92,70%
Kenjeran	19.517	17.853	91,47%	9.692	9.734	100,43%
Krembangan	11.038	12.129	109,88%	5.725	7.856	137,22%
Lakarsantri	6.188	8.510	137,52%	3.177	5.123	161,25%
Mulyorejo	7.843	10.131	129,17%	4.010	6.073	151,45%
Pabean Cantian	7.024	4.049	57,65%	3.654	1.597	43,71%
Pakal	6.277	7.386	117,67%	3.176	3.617	113,89%
Rungkut	11.811	10.811	91,53%	5.912	5.209	88,11%
Sambikerep	6.451	6.728	104,29%	3.380	4.733	140,03%
Sawahan	18.196	14.143	77,73%	9.664	4.959	51,31%
Semampir	19.394	18.471	95,24%	9.743	5.754	59,06%
Simokerto	8.867	6.637	74,85%	4.521	3.527	78,01%
Sukolilo	10.990	11.763	107,03%	5.507	7.857	142,67%
Sukomanunggal	9.913	9.647	97,32%	4.956	6.682	134,83%
Tambaksari	20.889	15.831	75,79%	10.989	6.722	61,17%
Tandes	8.881	10.614	119,51%	4.674	3.978	85,11%
Tegalsari	8.964	8.866	98,91%	4.668	2.757	59,06%
Tenggilis Mejoyo	5.434	4.928	90,69%	2.836	2.864	100,99%
Wiyung	6.929	6.558	94,65%	3.591	2.891	80,51%
Wonocolo	7.446	7.098	95,33%	3.838	5.120	133,40%
Wonokromo	13.485	10.567	78,36%	7.229	8.252	114,15%
Total	286.240	272.908	95,34%	147.342	141.853	96,27%

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun masih diperlukan pemerataan fasilitas layanan pendidikan.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data APK per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Dari data di bawah terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar

wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

Tabel II.41
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	2.635	1.729	49,69%	5.083	4.473	76,29%	2.470	2.015	58,73%
Benowo	3.449	3.015	67,66%	7.372	7.347	88,27%	3.882	4.071	83,54%
Bubutan	4.281	3.005	52,84%	8.978	9.220	87,19%	4.659	2.364	36,66%
Bulak	2.359	2.052	60,32%	4.768	6.949	121,13%	2.484	3.075	95,31%
Dukuh Pakis	2.516	2.502	70,80%	5.572	6.398	98,37%	2.784	4.279	114,39%
Gayungan	1.838	1.430	61,11%	4.079	5.613	123,96%	2.060	2.675	94,49%
Genteng	2.429	2.254	71,12%	5.239	6.223	101,95%	2.781	6.134	164,77%
Gubeng	5.324	4.488	62,16%	11.414	13.788	101,46%	5.952	5.376	62,70%
Gunung Anyar	2.844	2.808	73,72%	5.993	5.203	72,74%	3.019	2.321	59,15%
Jambangan	2.453	1.725	50,98%	5.289	5.495	86,81%	2.763	4.339	128,00%
Karangpilang	3.374	2.779	65,01%	6.916	6.488	81,84%	3.546	3.618	76,90%
Kenjeran	9.774	6.385	50,06%	19.517	19.407	88,37%	9.692	10.492	86,41%
Krembangan	5.417	3.829	53,81%	11.038	13.244	103,24%	5.725	8.645	117,81%
Lakarsantri	3.004	2.694	66,50%	6.188	9.337	130,04%	3.177	5.740	130,40%
Mulyorejo	3.694	4.149	85,73%	7.843	11.159	119,93%	4.010	6.890	128,64%
Pabean Cantian	3.527	1.833	40,59%	7.024	4.406	54,83%	3.654	1.760	37,22%
Pakal	2.994	2.903	72,07%	6.277	8.080	114,11%	3.176	3.938	94,99%
Rungkut	5.502	4.684	63,85%	11.811	11.832	87,63%	5.912	5.629	77,31%
Sambikerep	3.124	2.237	57,15%	6.451	7.296	93,61%	3.380	5.270	114,70%
Sawahan	8.233	5.151	49,77%	18.196	15.510	71,95%	9.664	5.481	40,69%
Semampir	9.592	5.463	43,05%	19.394	20.122	90,39%	9.743	6.252	50,29%

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	Penduduk usia 3-6 tahun	Siswa di jenjang PAUD	APK	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa di jenjang SD/MI	APK	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Simokerto	4.237	3.453	68,45%	8.867	7.260	69,64%	4.521	3.851	65,33%
Sukolilo	5.108	4.252	60,78%	10.990	12.837	104,71%	5.507	8.607	114,95%
Sukomanunggal	4.688	4.267	62,57%	9.913	10.624	90,99%	4.956	7.276	110,22%
Tambaksari	9.706	7.138	52,95%	20.889	17.431	71,99%	10.989	7.408	49,59%
Tandes	3.944	4.116	80,66%	8.881	11.631	110,12%	4.674	4.308	65,76%
Tegalsari	4.085	2.793	51,70%	8.964	9.761	94,22%	4.668	3.063	52,02%
Tenggilis Mejoyo	2.575	2.190	61,72%	5.434	5.430	85,89%	2.836	3.137	84,80%
Wiyung	3.240	3.137	69,18%	6.929	7.221	91,70%	3.591	3.234	72,17%
Wonocolo	3.609	2.441	55,54%	7.446	7.754	88,98%	3.838	5.628	113,39%
Wonokromo	6.243	4.188	53,13%	13.485	11.572	70,78%	7.229	9.148	91,16%
Total	135.798	105.090	77,39%	286.240	299.111	104,50%	147.342	156.024	105,89%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025 diolah

2.1.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2020 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2024. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2020 sebesar 100 persen, dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan akhir tahun 2024. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.42
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	41.677	41.182	44.039	44.930	45.929
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	41.677	41.182	44.039	44.930	45.929
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	38.403	37.413	38.131	40.218	38.709
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.403	37.413	38.131	40.218	38.709

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2021 APS di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai

dengan triwulan pertama tahun 2025. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya yang tidak ditangani dengan menyekolahkan kembali dan mendampingi hingga tuntas masa pendidikannya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.43
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2.	Jumlah Siswa SD/MI	317.885	313.505	321.128	292.229	221.696
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1.	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2.	Jumlah Siswa SMP/MTs	156.083	160.764	163.134	147.594	287.488

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

2.1.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (Triwulan I) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Ketersediaan SD/MI	1:358	1:358	1:355	1:355	1:353
1.1.	Jumlah gedung sekolah	831	823	823	823	811
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	297.369	294.723	292.229	292.229	286.240
2.	Rasio Ketersediaan SMP/MTs	1:372	1:371	1:387	1:387	1:384
2.1.	Jumlah gedung sekolah	399	399	381	381	383
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	148.573	148.205	147.594	147.594	147.342

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Tabel II.45
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2025 (TW I)

Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs

	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	9	15	5.083	1:339	3	3	6	2.470	1:412
Benowo	14	5	19	7.372	1:388	4	2	6	3.882	1:647
Bubutan	28	2	30	8.978	1:299	8	0	8	4.659	1:582
Bulak	12	6	18	4.768	1:265	4	2	6	2.484	1:414
Dukuh Pakis	20	1	22	5.572	1:253	11	1	12	2.784	1:232
Gayungan	14	1	15	4.079	1:272	5	1	6	2.060	1:343
Genteng	20	1	21	5.239	1:249	11	0	11	2.781	1:253
Gubeng	23	5	29	11.414	1:394	13	0	13	5.952	1:458
Gununganyar	15	1	16	5.993	1:375	9	1	10	3.019	1:302
Jambangan	7	5	12	5.289	1:441	6	3	9	2.763	1:307
Karangpilang	12	3	15	6.916	1:461	8	0	8	3.546	1:443
Kenjeran	18	22	39	19.517	1:500	12	7	19	9.692	1:510
Krembangan	31	7	38	11.038	1:290	17	2	19	5.725	1:301
Lakarsantri	21	6	28	6.188	1:221	10	5	15	3.177	1:212
Mulyorejo	21		24	7.843	1:327	15	0	15	4.010	1:267
Pabean Cantian	14	4	18	7.024	1:390	5	0	5	3.654	1:731
Pakal	15	6	21	6.277	1:299	7	3	10	3.176	1:318
Rungkut	23	5	29	11.811	1:407	10	2	12	5.912	1:493
Sambikerep	14	6	22	6.451	1:293	15	4	19	3.380	1:178
Sawahan	41		41	18.196	1:444	13	1	14	9.664	1:690
Semampir	34	30	62	19.394	1:313	15	10	25	9.743	1:390
Simokerto	18	6	24	8.867	1:369	9	3	12	4.521	1:377
Sukolilo	31	1	33	10.990	1:333	16	2	18	5.507	1:306
Sukomanunggal	25	1	28	9.913	1:354	15	2	17	4.956	1:292
Tambaksari	36	10	46	20.889	1:454	17	3	20	10.989	1:549
Tandes	20	10	31	8.881	1:286	12	2	14	4.674	1:334
Tegalsari	28	2	31	8.964	1:289	8	0	8	4.668	1:584
Tenggiling Mejoyo	17	1	19	5.434	1:286	7	0	7	2.836	1:405
Wiyung	14	1	17	6.929	1:408	10	0	10	3.591	1:359
Wonocolo	18	2	19	7.446	1:392	8	1	9	3.838	1:426
Wonokromo	33	8	41	13.485	1:329	18	2	20	7.229	1:361
Total	644	167	823	286.240	1:348	321	62	383	147.342	1:385

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah baik di jenjang SD dan di jenjang SMP semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah, ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang

SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:461, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Lakarsantri dengan nilai rasio sebesar 1:221. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Pabean Cantian memiliki rasio tertinggi yaitu 1:731 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:178.

Kecamatan yang rasio ketersediaan sekolahnya tinggi menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya rendah perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2025 terdapat 347 sekolah SMP/ sederajat yang telah terakreditasi, terdiri dari 230 sekolah yang terakreditasi A, 108 sekolah terakreditasi B dan terdapat 9 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/ sederajat terdapat 770 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 230 sekolah yang terakreditasi A, 108 sekolah terakreditasi B dan 9 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2024, terdapat 332 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 72 lembaga, dan sebanyak 260 lembaga sisanya belum terakreditasi. Fakta bahwa masih adanya sekolah di jenjang SD maupun SMP yang terakreditasi C, kemudian masih adanya lembaga kursus/pelatihan yang belum terakreditasi ini penting untuk diperbaiki kembali guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan global seperti saat ini.

Di samping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2025 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta

pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 35 peserta. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 85 peserta dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 78 peserta, seluruh peserta akan mengikuti ujian di pertengahan tahun.

2.1.3.1.1.6 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.46
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Guru SD/MI	1:24	1:23	1:23	1:23	1:23	1:19
1.1.	Guru SD/MI	12.806	13.725	13.340	14.024	11.437	13.185
1.2.	Murid SD/MI	312.873	317.885	313.505	321.128	258.667	252.194
2.	Rasio Guru SMP/MTs	1:23	1:23	1:25	1:22	1:21	1:17
2.1.	Guru SMP/MTs	6.250	6.862	6.512	7.346	6.347	7.044
2.2.	Murid SMP/MTs	143.329	156.083	160.764	163.134	135.327	116.456

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.47
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	2	-	2	-	-	55	13	-	72
SD	19	1	17	-	2	2.819	453	1	3.312
SMP	-	-	1	3	-	919	307	1	1.231
Total	21	1	20	3	2	3.793	773	2	4.615

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel II.48
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025 (TW I)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	442	23	68	34	4	3.933	137	-	4.641
SD	118	3	26	14	6	9.292	412	4	9.871
SMP	12	-	3	10	3	5.321	458	3	5.810

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
Total	572	26	97	58	13	18.546	1.007	7	20.322

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.49
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025 (TW I)

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	3.085	4.369	7.454	3.312	9.873	13.185	227	5.504	5.731
2	SMP	1.163	2.877	4.040	1.231	5.813	7.044	68	2.936	3.004
Jumlah		4.248	7.246	11.494	4.543	15.686	20.229	295	8.440	8.735

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 5.731 guru SD/MI/setara dan 3.004 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan AHH, salah satunya melalui penanganan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular yang dapat dilihat pada tabel berikut. Meski semua penderita telah ditangani, namun tingginya jumlah penderita dari tahun ke tahun, utamanya penyakit hipertensi dan diabetes melitus, serta penyakit menular covid-19, menunjukkan masih diperlukannya perbaikan di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Data penderita penyakit menular dan tidak menular selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.50
Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
1.	TBC	4.628	8.218	10.987	12.096	2.516
2.	COVID-19	67.073*	77.739	4.580	688	12
3.	HIV/AIDS	749	828	1.260	1.261	337
4.	Kusta	45	91	93	68	18
5.	DBD	111	195	191	231	114
6.	Hipertensi	737.258	740.719	761.441	738.280	69.418
7.	Diabetes Melitus	96.279	96.773	113.970	113.051	34.125

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025. Keterangan: *) dihitung berdasarkan estimasi.

Jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular secara umum mengalami penurunan. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular secara umum didukung oleh adanya pelaksanaan skrining dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui 63 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Surabaya serta dengan diresmikannya 153 Integrasi Layanan Primer di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan UHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.51
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	154	154	153	153	153
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	154	154	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

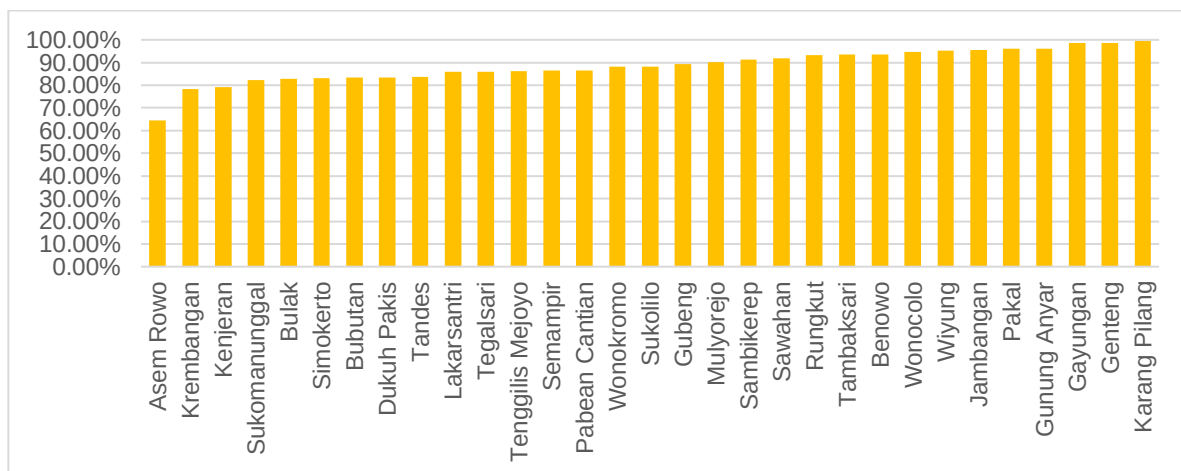
Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Kejadian Luar Biasa tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Surabaya. Sedangkan Kejadian Luar Biasa pada tahun 2023 dan 2024 adalah kasus Demam Berdarah, HIV serta penyakit menular lainnya yang terjadi di 153 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sesuai Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Untuk kasus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021, 31 Kecamatan di Kota Surabaya telah membentuk 1.298 Kampung Tangguh Wani Covid-19 di tiap RW sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II.13
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025 (TW I)

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2025

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri.

Pada tahun 2025 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	153	153	153
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Kelurahan siaga aktif mulai tahun 2020 hingga tahun 2025 konsisten terpenuhi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan Kecamatan/Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, serta pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) oleh 63 Puskesmas di Kota Surabaya. Selain itu, integrasi layanan primer (ILP) telah diterapkan di seluruh Puskesmas di Kota Surabaya.

Tabel II.53
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.100	42.019	41.893	37.295	4.692
2	Jumlah sasaran ibu nifas	42.164	42.014	41.885	37.187	36.818
3	Persentase (persen)	99,85	100,01	100,02	101,11	12,74

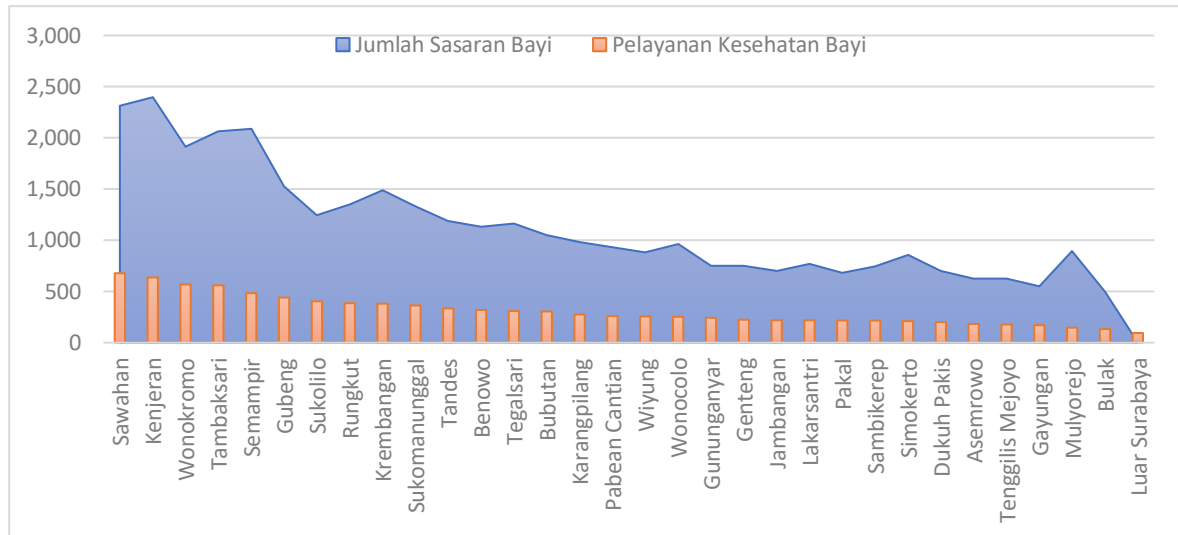
Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Cakupan pelayanan Ibu Nifas dari tahun 2021 sebesar 99,85 mengalami peningkatan hingga 100% pada tahun 2024 dan terus diupayakan cakupannya di 100%. Hal ini didukung oleh adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat kepada sasaran ibu nifas yang ada di Surabaya, serta upaya 1 puskesmas 1 dokter spesialis *obgyn* yang berdampak pada terpantaunya secara rutin ibu-ibu hamil hingga melahirkan dan memasuki masa nifasnya.

Tabel II.54
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	42.248	41.931	37.349	37.952	3.267
2	Jumlah sasaran bayi	42.708	41.901	41.180	36.208	35.479
3	Cakupan kunjungan bayi (persen)	98,92	100,1	90,70	104,82	9,21

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



Gambar II.14

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi per Kecamatan Tahun 2025 (TW I)

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2025

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar di atas adalah di Kecamatan Sawahan. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Bulak.

Tabel II.55

Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	148	123	118	109	47
2	Jumlah balita gizi buruk	148	123	118	109	47
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sejak tahun 2018 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing. Di tahun 2021 jumlah posyandu balita sebanyak 2.734. Sedangkan pada tahun 202, jumlah posyandu balita sebanyak 2.731, dan pada tahun 2023 jumlah posyandu sebanyak 2.682. Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan I jumlah posyandu sebanyak 2.676. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.56

Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024 (TW II)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah posyandu	2.734	2.731	2.682	2.676	2.676

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah sasaran balita	208.175	206.810	205.688	187.400	183.292
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,1	13,2	13,04	14,28	14,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Dari data tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1.000 penduduk berkisar angka 13-15. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 1, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 23 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 58 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2024 sejumlah 3.018.022 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.906 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2021 sampai tahun 2025 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.57
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	358	442	352	519	519
3	Jumlah pustu	59	59	58	58	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.58
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/	5	5	5	5	5

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Provinsi)					
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	3	3	3	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	3	3
6.	Rumah Sakit Swasta	43	43	43	48	48
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		60 (N/A)	60 (56)	60 (59)	66 (66)	66 (66)
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0209	0,0209	0,0199	0,0219	0,0219

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2021, jumlah dokter sebanyak 8.113, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Sedangkan pada Tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 6.970, dengan rasio 2,32 per 1000 penduduk. Serta tahun 2024 jumlah dokter sebanyak 7.446, dengan rasio 2,47 per 1.000 penduduk. Selain kecukupan kuantitas, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.017.382
2	Jumlah dokter	1.561	8.113	8.158	6.970	7.446
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,53	2,73	2,73	2,32	2,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.60
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Instansi	2020	2021	2022	2023	2024
IKM RSUD Bhakti Dharma Husada	88,76	79,89	87,46	93,67	95,72
IKM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	83,48	88,85	87,49	91,89	94,49

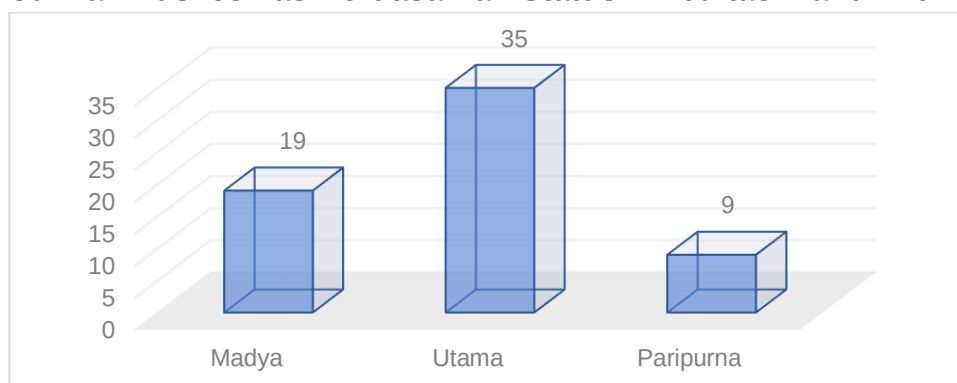
Instansi	2020	2021	2022	2023	2024
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	81,55	86,39	86,87	92,59	95,96
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	82,83	84,85	91,57	86,87	88,89

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari tabel pencapaian nilai IKM dan SPM di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie di atas, dapat dinilai masih tergolong baik, namun cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya proses renovasi gedung yang menghambat pelayanan kesehatan. Meski begitu, tentu hal ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 seluruh puskesmas sejumlah 63 unit telah dilakukan akreditasi. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna. Serta adanya RSUD baru yakni RSUD Eka Candrarini juga telah mendapatkan akreditasi utama. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.15
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 diolah

Selain peningkatan mutu, aksesibilitas pelayanan kesehatan, juga diupayakan melalui pemberian jaminan kesehatan, terutama kepada warga miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2019 telah ditetapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala untuk memperbarui data tersebut. Pada tahun 2021, cakupan jaminan kesehatan untuk MBR sebesar 69,80 persen. Masih rendahnya capaian ini

disebabkan penambahan jumlah data MBR juga dilakukan pembaruan menjadi 1.566.307 orang. Kemudian di tahun 2022, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin, istilah MBR diperbarui menjadi anggota keluarga miskin (gakin), yakni 219.427 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin meningkat menjadi 100 persen. Dan di akhir tahun 2023 jumlah anggota keluarga miskin kembali diperbarui menjadi 193.786 orang, sehingga pada tahun tersebut cakupan jaminan kesehatannya tetap 100 persen, sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I, jumlah anggota keluarga miskin diperbarui menjadi 70.312 orang, dengan cakupan jaminan kesehatan yang konsisten di 100 persen. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota untuk menjamin akses hidup sehat bagi penduduknya. Selengkapanya tentang data perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61

Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021*	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anggota keluarga miskin	1.566.307	219.427	193.786	70.243	70.312
2	Jumlah anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	1.093.374	219.427	193.786	70.243	70.312
3	Persentase anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (%)	69,80	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024

*)Data 2021 merupakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Dalam rangka mencapai Bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Pemerintah Kota Surabaya terus berusaha meningkatkan capaian kelurahan yang bebas BABS. Peningkatan yang terjadi, dari tahun 2017 sebanyak 35 persen atau sejumlah 54 kelurahan, hingga tahun 2023 telah seluruhnya atau sejumlah 153 kelurahan bebas BABS. Tahun 2024 Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terbaik 1 kategori Madya, yang artinya Surabaya diakui telah menerapkan 3 (tiga) dari 5 (lima) pilar STBM, yakni, Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Pengamanan Pangan Olahan Makanan Rumah Tangga.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan untuk menjamin makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi syarat kebersihan (higienis sanitasi). Hasil

pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62
Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP)
Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPM	1.846	1.797	2.369	3.811	3.824
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.408	1.532	2.104	3.387	3.407
3	Persentase (%)	76,27	85,25	88,81	88,87	89,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

Adapun capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2020 hingga 2024 pada tabel di bawah ini, secara umum, mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait masih adanya balita yang tidak dilaporkan pelayanan kesehatannya dikarenakan domisili penduduk ber-KTP Surabaya tersebut yang berada di luar Kota Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dan himbauan bagi warga tersebut untuk menyesuaikan lokasi dokumen administrasi kependudukannya dengan domisili tetapnya saat ini.

Tabel II.63
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2022–2024

No	Nama Indikator	2022			2023			2024		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	44.012	44.182	100,39	43.881	44.057	100,40	37.187	37.506	100,86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	42.014	42.019	100,01	41.885	41.893	100,02	37.187	37.295	100,29
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	40.012	41.930	104,79	39.891	41.804	104,80	36.208	37.952	104,82
4	Pelayanan kesehatan balita	164.909	160.663	97,43	164.508	164.023	99,71	152.252	152.609	100,23
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	331.551	415.739	125,39	330.258	398.238	120,58	396.102	398.643	100,64
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.042.586	2.081.701	101,91	2.041.119	2.155.512	105,60	1.923.364	2.161.327	112,37
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	303.328	313.027	103,20	314.690	326.681	103,81	378.637	378.637	100,00

No	Nama Indikator	2022			2023			2024		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	740.719	708.121	95,60	744.436	761.441	102,28	727.432	738.280	101,49
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	96.732	106.860	110,47	104.362	113.970	109,21	101.979	113.051	110,86
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	7.320	6.226	85,05	5.580	5.766	103,33	5.552	5.849	105,35
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	60.804	83.577	137,45	63.879	89.139	139,15	78.502	108.826	138,63
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	51.607	61.726	119,61	52.741	66.001	125,14	49.485	63.442	128,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2025

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2025 (Triwulan I), rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 1.774,14, yang berarti setiap satu kilometer jalan melayani 1.774,14 penduduk.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottleneck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada tahun 2021, akibat pandemi covid-19 maka tidak ada penambahan panjang jalan dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, penambahan jalan baru dapat terlaksana dengan persentase jalan kondisi baik berturut-turut sebesar 99,54% dan 99,55%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2020–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	1.686,88	1.692,19	1.693,42	1.693,42	1.693,42
Panjang jalan (km)	1.697,39	1.699,95	1.701,12	1.701,12	1.701,12
Persentase jalan kondisi baik (%)	99,38	99,54	99,55	99,55	99,55

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga dituntut untuk menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di kawasan permukiman penduduk. Untuk meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, bekerjasama dengan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Cakupan penduduk dengan akses air bersih terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 98,27% sampai dengan 100% di tahun 2023. Program Sanitasi dan Kebersihan Kota Surabaya juga melibatkan pengembangan fasilitas umum seperti toilet umum yang bersih dan mudah diakses terutama di area publik. Upaya untuk meningkatkan sanitasi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi warga kota, serta mengurangi risiko penyakit disebabkan sanitasi yang buruk. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	98,27%	99,62%	100,0%	100,0%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses	99,12%	99,85%	100,0%	100,0%	100,0%

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak					
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,46%	99,67%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: DSDABM dan PDAM Surya Sembada, 2025

Adapun pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya Tahun 2024 sebesar 100% dengan rincian Jenis Layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 100%. Secara umum, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan mutu minimal layanan di bidang urusan Pekerjaan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian terhadap aspek mutu yaitu 1) kuantitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan pemenuhan kebutuhan jaringan perpipaan air minum, serta 2) adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga telah terpenuhi 100%.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan melalui integrasi RTRW dengan rencana induk dan rencana-rencana sektoral lainnya.

Rencana induk sektoral mutlak dibutuhkan untuk menjawab perkembangan kota yang pesat dan dinamis. Sepanjang periode 2016-2024, rencana induk yang telah disusun, beserta kebutuhan rencana induk yang masih diperlukan untuk disusun ke depannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Penyusunan Rencana Induk Kota Surabaya Tahun 2015 – 2025 (TW I)

Uraian	Tahun Penyusunan
1. Rencana Induk Air Minum	2015
2. Rencana Induk Kereta Api	2015
3. Rencana Induk Pelabuhan	2015
4. Rencana induk Bandara	2015
5. Masterplan Permakaman	2016
6. Masterplan RTH	2016
7. Masterplan Permukiman (RP3KP)	2016

Uraian	Tahun Penyusunan
8. Masterplan Sarpras Kebakaran	2016
9. Masterplan Drainase	2017
10. Masterplan Air Limbah	2018
11. Masterplan Transportasi	2019
12. Masterplan RPPLH	2020
13. Masterplan Energi	2021
14. Masterplan Persampahan	(belum disusun)
15. Masterplan Industri	(belum disusun)
16. Strategi Sanitasi Kota	2022
17. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	2023
18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	2015
19. Rencana Induk Sistem Drainase Lingkungan di Perkotaan	(belum disusun)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan *Surabaya Single Window* (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.67
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tinggal	6.615	5.983	5.687	2.200	0
2	Non Rumah Tinggal	1.572	1.616	1.881	4.844	0
3	Reklame	101	105	53	32	0

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Total	8.288	3.238	7.568	7.076	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Tabel II.68

Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	412 persil	150 persil	62 persil	92 persil	0 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana-prasarananya kurang. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/433/436.1.2/2019 tentang Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya, bahwa total luas penanganan kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 145,89 Ha (nol kumuh).

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kegiatan “Dandan Omah” yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022, kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah menjadi layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kegiatan pembangunan berdasarkan partisipasi warga (*community-based development*), yang pelaksanaan kegiatannya dioptimalkan melalui

pemberdayaan warga setempat. Perbaikan rumah tidak layak huni ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan pendampingan secara berkala oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), Kelurahan dan Dinas dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 intervensi perbaikan rumah tidak layak huni terus meningkat dan telah dikerjakan sampai dengan akhir tahun 2024 sejumlah 7.668 unit, sehingga sisa yang belum dikerjakan yaitu 2.756 unit dan akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.69
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Tahun 2020–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.174	3.103	5.990	7.668	0
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	4.550	4.550	9.772	10.424	0
Persentase perbaikan rumah tidak layak huni (%)	47,78	68,20	61,30	73,56	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat adalah melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang kurang atau *backlog* di Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 87.259 unit, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi *backlog* adalah mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi, peremajaan dan permukiman kembali serta pengadaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; mengembangkan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah susun milik atau sewa yang layak dan terjangkau, khususnya bagi keluarga miskin; dan mengaplikasikan prinsip subsidi silang untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung Rusunawa melalui skema hunian campuran yang mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru tidak hanya dapat dihuni oleh masyarakat miskin saja, melainkan juga masyarakat berpenghasilan

menengah ke bawah bahkan masyarakat berpenghasilan menengah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70

Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemohon Rusun	1.234	363	10	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemohon rusun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah antrian dan ketersediaan unit hunian yang terbatas, sehingga pendaftaran permohonan pemakaian rumah susun sewa melalui aplikasi ditutup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2023, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 23 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.71

Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m ²)	Keterangan
1	URIP SUMOHARJO	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun 1983 (APBN)
2	DUPAK BANGUNREJO	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun 1992 (APBN)
3	SOMBO	Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	18	8	± 41.044	Dibangun 1993 (APBN)
		Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto	24	2		Dibangun 2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI	Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	18	3	± 32.350	Dibangun 1995 (APBN)
		Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	6		Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	24	2		Dibangun 2009 (APBN)
		Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	WARUGUNUNG	Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	21	10	± 29.845	Dibangun 1996 (APBD)
6	WONOREJO	Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	21	2	± 5.466	Dibangun 2003 (APBN)
		Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	21	4		Dibangun 2006 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan / Kecamatan	Tipe	Blok	Luas Lahan (m ²)	Keterangan
7	TANAH MERAH	Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	21	4	± 28.810	Dibangun 2007 (APBN)
		Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	24	4		Dibangun 2009 (APBN)
8	RANDU	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun 2007 (APBN)
9	GRUDO	Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	PESAPEN	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011 (APBN)
11	JAMBANGAN I	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1	± 2.977	Dibangun 2011 (APBN)
12	JAMBANGAN II	Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	24	1		Dibangun 2017 (APBD)
13	SIWALANKERTO	Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14	ROMOKALISARI	Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	24	4	± 25.000	Dibangun 2012 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	24	4		Dibangun 2013 (APBN)
		Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	24	2		Dibangun 2014 (APBN)
15	BANDAREJO	Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
16	DUKU MENANGGAL	Kelurahan Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	24	2	± 14.388	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	36	2		Dibangun 2020 (APBN)
17	KEPUTIH	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	36	4	± 258.140	Dibangun 2016 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	36	2		Dibangun 2017 (APBN)
		Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2017 (APBN)
19	TAMBAK WEDI II	Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	36	2	±	Dibangun 2020 (APBN)
20	INDRAPURA	Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	24	2	± 5.466	Dibangun 2019 (APBD)
21	BABAT JERAWAT	Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	2	± 4.129	Dibangun 2019 (APBD)
22	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	24	2	± 14.150	Dibangun 2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	36	2		Dibangun 2020 (APBD)
23	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	24	2	± 29.900	Dibangun 2022 (APBD)
JUMLAH				109		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Pada tahun 2024, Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar 100% melalui pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan cakupan penduduk yang memperoleh fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebesar 100%, serta cakupan pemenuhan penyediaan rumah layak huni juga tercapai 100%.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Pemerintah Kota berkomitmen tinggi dalam perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Dalam hal ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu pengendalian dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Melalui beberapa indikator kinerja dalam setiap layanannya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana layanan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan peraturan daerah, pelaksanaan penanganan unjuk rasa serta pelaksanaan operasi kawasan yang memiliki potensi tinggi akan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Tabel II.38 di atas, upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja SPM, antara lain:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebanyak 1.296 orang melalui aktivitas penegakan perda sesuai SOP menggunakan sarana prasarana serta SDM Satpol PP sesuai standar.
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan cara melakukan identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana kepada sejumlah 56.328 orang dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada 820 orang.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kepada sebanyak 324 orang. Aktivitas yang mendukung pelayanan tersebut antara lain, pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana, melakukan respon cepat kejadian kedaruratan dan respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (*Command Center 112*), serta pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, antara lain melalui layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak sebanyak 38 orang. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan sebanyak 8 orang.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	781	783	978	978	1.517
2	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,62	2,63	3,27	3,25	5,03

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.73

Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	4.124	10.736	13.102	21.805	5.124
2	Jumlah pelanggaran K3	4.124	13.261	16.420	26.817	5.400
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	80,96	79,79	81,31	94,89

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2021, sebanyak 4.124 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah pelanggaran meningkat signifikan sebanyak 13.261 dan diselesaikan 80,96 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, jumlah pelanggaran kembali meningkat berturut-turut sebanyak 16.420 dan 26.817, yang dapat diselesaikan sebanyak 79,79 dan 81,31 persen. Kemudian di tahun 2025, sampai dengan triwulan I, jumlah pelanggaran dapat diselesaikan 94,89 persen dari 5.400 jumlah pelanggaran K3. Meningkatnya pelanggaran K3 di tahun 2022 dan 2023 disebabkan mulai normalnya aktivitas masyarakat dari dampak

pandemi Covid-19, sehingga mulai banyak pelanggaran yang terjadi di tempat umum seperti berjualan asongan, kaki lima, maupun pengamen jalanan.

Tabel II.74
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	284	414	345	478	103
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Kejadian Anarkis	8	10	7	5	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis di sepanjang tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2025. Namun, jumlah kejadian unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme tersebut cenderung menurun. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan, serta didukung dengan pendekatan persuasif dari petugas lapangan guna mencegah dan meminimalisasi kondisi unjuk rasa menjadi tidak terkendali. Selain itu, juga diperlukan kapasitas dan kesiagaan petugas Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.75
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Penyebab	2021	2022	2023	2024	2025
1	Hubungan Listrik	200	219	95	71	16
2	Api Terbuka	246	212	247	91	14
3	Api Mekanis	0	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	257	158	429	205	10
5	Tidak Ada Keterangan	2	0	0	1	0
Total		705	589	771	368	40

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Penyebab kebakaran di tahun 2024, dari total 368 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 91 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 71 kejadian, sebagian besarnya karena hubungan arus pendek. Sedangkan untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dari total 40 kejadian, penyebab kebakaran paling banyak disebabkan oleh sumber listrik sebanyak 16 kejadian, dan sebanyak 14 kejadian karena sumber api terbuka dari pembakaran alang-alang dan sampah.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional *Command Center* 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan tahun 2025 triwulan I, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.76
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	705	589	771	368	40
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	705	589	771	368	40
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2025

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I) rata-rata di atas 95%, dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit didesain untuk dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.77
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	86	86	86	86	89
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	21	21
3	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.009.286	3.018.022
4	Cakupan Pelayanan WMK	95,6%	95,6%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 3 (tiga) UPTD Dinas Sosial, yaitu 1) UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban; 2) UPTD Kampung Anak negeri yang ada di Wonorejo (untuk anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar) dan di Kalijudan (untuk anak dengan kedisabilitas dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi); 3) UPTD Griya Werdha melayani

dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, serta Liponsos Babat Jerawat yang melayani dan menangani eks penderita kusta.

Tabel II.78
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PPKS yang ada	62.243	64.933	54.916	24.583	26.865
2	Jumlah PPKS yang ditangani	31.516	34.180	25.562	11.861	26.443
3	Persentase PPKS yang ditangani (%)	50,63	52,63	46,55	48,25	98,43

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2025

Secara umum, jumlah PPKS menurun dari tahun 2021 sebanyak 62.243 orang menjadi 24.583 orang di tahun 2024, dengan persentase penanganan sebesar 48,25 persen. Sementara sampai dengan triwulan I tahun 2025, sebanyak 26.443 orang PPKS yang ditangani, atau 98,43 persennya. PPKS yang ditangani yang dimaksud yakni PPKS yang ada di UPTD yang dimiliki Dinas Sosial dan mendapat penanganan mulai dari permakanaan hingga penanganan sosial lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PPKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PPKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PPKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanaan, pembinaan maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Tingginya mobilitas penduduk di sekitar Kota Surabaya menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang yang rentan menjadi PPKS, serta kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan reunifikasi atau pemulangan PPKS ke daerah asal. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.79
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PPKS non Surabaya	1.252	1.409	419	516	278

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2025

Secara umum, penanganan PPKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PPKS yang terverifikasi serta

keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PPKS. PSKS merupakan komponen masyarakat yang dapat diandalkan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.80
PSKS Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total PSKS	1.159	3.855	2.160	1.977	549
PSKS Aktif	996	2.443	1.747	1.715	365

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan signifikan dalam bidang sosial pada tahun 2024, dengan semua target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan sosial mencapai 100%. Pencapaian ini mencakup berbagai program rehabilitasi sosial dasar yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan di luar panti sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berhasil menjangkau seluruh penyandang disabilitas terlantar, memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial juga mencapai target 100%, memastikan bahwa semua anak terlantar menerima perawatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai. Upaya rehabilitasi bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial juga tidak ketinggalan, dengan pencapaian 100% yang menunjukkan bahwa setiap lanjut usia terlantar mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, juga telah berhasil sepenuhnya, memastikan bahwa mereka menerima bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan merata, serta memastikan bahwa semua warganya, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2021, jumlah Angkatan kerja sempat menurun dari 1.582.564 pada tahun 2020 menjadi 1.572.888 pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 1.643.314. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,69 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas sebanyak 1.569.714 jiwa. Pada tahun 2024, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,70 dengan komposisi jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas sebanyak 1.624.822 jiwa. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Ke Atas	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.330.830	2.305.008
3	Rasio angkatan kerja	0,68	0,67	0,69	0,67	0,70

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2025

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	283	120	176	182	37
2	Jumlah Sengketa Selesai	117	120	116	118	22
3	Jumlah Perusahaan	12.782	10.592	10.592	10.592	10.592
4	Rasio sengketa	2,21	1,13	1,66	1,72	0,35

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2021 jumlah sengketa mengalami penurunan menjadi sebesar 283 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa menurun kembali menjadi 120 sengketa. Namun pada akhir tahun 2023 dan 2024 jumlah sengketa meningkat menjadi masing-masing sebesar 176 sengketa dan 182 sengketa, dengan 116 dan 118 di antaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2024
1	Tidak/belum pernah sekolah	11.134
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	13.785
5	SMA	44.107
6	SMK	
7	Diploma I/II/III/Akademi	10.741
8	Universitas	

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Tabel II.84
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	2.815	7.291	7.760	7.853	1.241
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	5.132	7.291	7.760	7.853	1.241

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2025

Relatif rendahnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020

dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, kegiatan fasilitasi pencari kerja terus ditingkatkan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, pencari kerja diharapkan mampu dengan cepat menempati lowongan kerja yang ada, maupun membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal guna mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Data peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85
Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja	441	732	1.117	752	112

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	12.746	8.573	7.560	3.032	801
2	Jumlah Perusahaan	12.780	10.592	10.592	10.592	10.592
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3	99,73	80,94	71,37	28,63	7,56

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

Pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 12.780 perusahaan atau 99,73% dari total perusahaan yang terdaftar. Untuk tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 8.573 perusahaan atau

80,94% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 7.560 perusahaan atau 71,37% dari total perusahaan yang terdaftar. Dan pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menjadi 3.032 perusahaan atau 28,63% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender sejatinya dapat dilihat dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai IKG cenderung fluktuatif. Dari dimensi pendukung nilai IKG yang meliputi dimensi kesehatan reproduksi, pasar tenaga kerja dan pemberdayaan, di Kota Surabaya nilai IKG lebih banyak dipengaruhi oleh dimensi pasar tenaga kerja yaitu masih adanya kesenjangan persentase anggota legislatif antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG cenderung meningkat karena keterkaitannya dengan nilai IPM di Kota Surabaya yang semakin meningkat. Sedangkan nilai IDG dari tahun ke tahun juga cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena IDG menitikberatkan pada partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sejauh ini, di Kota Surabaya, pembentukan nilai IDG lebih banyak dipengaruhi faktor alami dari kemampuan individu. Karenanya masih diperlukan strategi-strategi khusus dalam percepatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik.

Tabel II.87
Indeks Ketimpangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,160	0,206	0,230	0,128	0,125
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,90	94,21	94,36	94,53
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,86	82,82	83,20	85,29	76,40

Sumber : BPS, 2025

2.1.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Meski demikian, jika dilihat dari partisipasinya dibanding jumlah pekerja perempuan di Kota Surabaya menurut BPS, terdapat sedikit penurunan partisipasi pekerja di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pekerja Perempuan	600.845	584.865	632.797	629.533	663.493
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	13.433	14.903	14.828	15.660	15.478
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,24	2,55	2,34	2,49	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2020 sebesar 600.845 orang. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 312.338 orang atau 53,43%. Salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi Covid-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya sebesar 632.797 orang atau 95,38%. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun sekitar 1,42% menjadi 93,96%. Pada tahun 2024, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya meningkat menjadi sebesar 663.493 orang atau 95,01%. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	655.746	584.465	663.404	669.988	698.308
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	600.845	312.338	632.797	629.533	663.493

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	91,63	53,43	95,38	93,96	95,01

Sumber : BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

2.1.3.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.90
KDRT Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	957.188	974.298	974.298	1.011.183	1.004.044
2	Jumlah KDRT	13	33	75	103	137
3	Rasio KDRT	1:73.630	1:29.524	1:12.991	1:9.817	1:7.329

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada tabel di atas jumlah KDRT pada tahun 2020 sebanyak 13 kejadian. Akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2024 jumlah kasusnya cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran dan keberanian masyarakat yang meningkat untuk melaporkan tindak kekerasan di lingkungannya. Pada tahun 2023 resmi berdiri UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sehingga pelaksanaan penanganan kasus lebih masif, serta adanya peran aktif jejaring UPTD PPA dan Konselor untuk penanganan pengaduan yang masuk, serta masyarakat lebih mudah dalam mengakses pelayanan. Masyarakat juga telah mengenal adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW yang memfasilitasi untuk konseling dan pengaduan, sehingga jangkauan ke masyarakat lebih intens sampai dengan level RW.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	235	138	192	264	342
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	235	138	192	264	342
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penguatan terhadap peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka permasalahan perempuan dan anak. Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak pada bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92

Jejaring Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak (lembaga)	63	70	75	662	672

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 kelurahan ramah anak. Sampai dengan tahun 2024, seluruh 31 kecamatan sudah responsif gender dan 153 kelurahan ramah anak. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung pengarusutamaan gender adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usia produktif. Jumlah perempuan usia produktif yang mengikuti pemberdayaan ekonomi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93
Perempuan Mengikuti Pemberdayaan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi	0	50	14	68	80

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 248,28 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2022 menjadi 210,75 kg/kapita/th, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 115,93 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun, dan ketersediaan pangan utama Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 201,24 kg/kapita/th.

Tabel II.94
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	643.307.412	737.617.453	629.700.570	348.867.348	607.346.940
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	216,55	248,28	210,75	115,93	201,24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2025

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2020, PPH masyarakat Kota Surabaya berada pada angka 96,25. Namun, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi menjadi 94,48 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 94,16. Hal ini

dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Sedangkan pada akhir tahun 2023, PPH masyarakat Kota Surabaya meningkat menjadi 94,34, begitu pula pada akhir tahun 2024 juga terjadi peningkatan skor PPH menjadi 95,53. Artinya pola pangan masyarakat di tahun 2024 ini lebih bagus dari tahun sebelumnya. Tentunya ini hasil yang bagus untuk urusan pangan. Program kegiatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menerapkan menu bergizi, beragam, sehat dan aman (B2SA) memberikan dampak untuk pencapaian Skor Pola Pangan.

Tabel II.95
Pola Pangan Harapan Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pola Pangan Harapan	96,25	94,48	94,16	94,34	95,53

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Selain permasalahan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat Surabaya. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya pada tahun 2021 hingga triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.96
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah sampel pangan segar	2.061	1.500	1.668	1.500	130
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	149	60	12	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pangan antara lain perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, hal ini harus dilakukan untuk mendukung stabilitas harga pangan di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota besar dengan karakter pasokan pangan yang sangat bergantung kepada daerah penghasil pangan.

Selanjutnya adalah optimalisasi potensi *urban farming* di masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Dengan keterbatasan lahan di perkotaan, Pemerintah Kota tetap berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di dalam kota sendiri. Memanfaatkan teknologi *urban farming* dan juga memanfaatkan

semaksimal mungkin lahan-lahan aset pemerintah yang tidak produktif serta menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi.

Selanjutnya masalah bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan. Permasalahan ini akan terus diawasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan segar yang aman. Selain itu juga pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar dan melakukan pemeriksaan sampel secara acak dan rutin setiap bulannya.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada tahun 2021 tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 35,12 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran. Pada tahun 2022, tanah aset selain jalan dan saluran yang bersertifikat telah mencapai 46,55 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota selain jalan dan saluran, serta terus mengalami peningkatan menjadi 50,16 persen di akhir tahun 2023. Pada akhir tahun 2024, tercatat 50,21 persen aset pemerintah selain jalan dan saluran yang telah tersertifikasi kemudian 52,61 persen hingga triwulan I tahun 2025. Pengamanan administrasi berupa pencatatan/inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan

oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain.

Tabel II.97
Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Aset Pemerintah yang telah bersertifikat*	1.408	1.889	2.255	2.257	2.391
Total aset pemerintah*	4.008	4.058	4.495	4.495	4.495
Persentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat (%)	35,12	46,55	50,16	50,21	53,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2021, luas lahan aset yang bersertifikat mencapai 17.296.108 m². Kemudian pada tahun 2022, luas lahan aset yang bersertifikat bertambah menjadi seluas 18.905.062 m² dan sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah lagi menjadi seluas 20.247.009 m² lahan aset yang bersertifikat. Pada tahun 2024, akumulasi luas lahan aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran yang telah bersertifikat seluas 20.913.708 m². Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.98
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Akumulasi Luas Lahan* Aset Bersertifikat (m ²)	17.296.108	18.905.062	20.247.009	20.913.708	21.699.774
Luas Lahan Aset (m ²)*	38.012.923	38.165.116	38.005.231	38.055.231	38.055.231
Persentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	45,50	49,53	53,20	54,95	57,02

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

*Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, TPA Benowo, serta Makam Waru Gunung.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur. Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 2,08 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 2,24 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu untuk infrastruktur dan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Berikut adalah tabel luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan non infrastruktur.

Tabel II.99
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	7,93	1,92	1,74	1,015	0
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	1,41	0,78	0,82	1,263	0

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Dari tabel di atas, realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur cenderung menurun karena menyesuaikan skala prioritas pembangunan kota. Sedangkan realisasi luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur cenderung fluktuatif, yang disebabkan adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan.

Tabel II.100

Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	33	44	30	30	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	2	28	16	30	31	7
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (%)	6,06	63,64	53,33	100	103,33	23,33

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.1 Persampahan

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga saat ini cenderung meningkat seiring bertambahnya penduduk dan aktivitasnya selepas pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.101

Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.810,43	1.810,81
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.585,26	1.601	1.536,76	1.540,97	1.704,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Peningkatan volume produksi sampah antara lain disebabkan karena belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah dari sumber sampah. Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Data terkait jumlah TPS tahun 2020 hingga Triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.102
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2	Jumlah TPS (unit)	190	190	190	190	190
3	Jumlah TPS 3R	9	9	10	12	12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Jumlah TPS sebanyak 190 unit telah merata di setiap kelurahan di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pembangunan maupun peningkatan kualitas operasional TPS 3R secara bertahap sebagai bentuk optimalisasi reduksi volume sampah yang masuk ke TPA.

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.103
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	909	1.113	818	1.645	615

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Selain itu, RTH memiliki berbagai manfaat antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup (pengurangan polusi); mendukung perekonomian daerah (penciptaan lapangan kerja); mendorong pembangunan berkelanjutan (penggunaan energi terbarukan); dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (peningkatan taraf hidup).

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,99 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha. Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (TW II) luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22,01 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.392,11 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2020–2024

No.	Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTH makam	283,53	284,95	284,95	284,95	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	360,58	361,08	361,08	363,42	363,42
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	198,23	198,23	198,23	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.570,33	4.570,33	4.600,33	4.600,33
6	RTH hutan	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.672,75	1.672,75	1.673,65	1.673,65	1.673,65
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.356,96	7.358,87	7.359,77	7.392,11	7.392,11
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451	33.592	33.592
Persentase luas RTH terhadap luas		21,99	22,00	22,00	22,01	22,01

No.	Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
	kota (persen)					

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

2.1.3.2.5.3 Kepatuhan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan

Keberadaan industri dan tempat usaha yang semakin pesat di kota Surabaya berkaitan dengan adanya pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, saluran drainase, polusi udara, dan kebisingan. Di Kota Surabaya kasus dugaan pencemaran lingkungan masih terjadi. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 43 kasus, dan sebanyak 43 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2021, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 51 kasus, dan sebanyak 51 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 44 kasus, dan sebanyak 44 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 24 kasus, dan sebanyak 24 kasus dapat ditangani. Kemudian pada tahun 2024 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 41 kasus, dan sebanyak 41 kasus dapat ditangani. Rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.105

Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah permasalahan lingkungan	51	44	51	41	9
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	51	44	51	41	9
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Meskipun jumlah permasalahan lingkungan naik dan turun, tetapi dapat ditangani seluruhnya. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah kota dalam melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, Perangkat Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di Kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.106
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	254	241	254	61
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	190	129	122	120	42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.3.2.5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dan Persampahan)

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, *mall*, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari

pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian dan sistem kontrol bersama.

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km².

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78 masih menggunakan metode lama. Sedangkan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang telah menggunakan metode

baru, masing-masing sebesar 68,49 dan 71,45. Sedangkan di tahun 2022, IKLH Kota Surabaya telah menggunakan metode baru yang mencapai 55,97, lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,92 dan 72,42. Kemudian di tahun 2023, IKLH Kota Surabaya mencapai 54,52 dan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 69,59 dan 72,54. Selengkapnya nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.107
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH Kota Surabaya	60,96*	67,78*	55,97	54,52	60,76
IKLH Provinsi Jawa Timur	67,70*	68,49	69,92	69,59	71,14
IKLH Nasional	70,27*	71,45	72,42	72,54	73,55

*Sumber data: DLH Surabaya, 2025. *)hasil perhitungan KLHK metode lama*

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel II.108
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,05	58,18	57,91	58,50	57,65
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,35	90,28	90,55	86,61	83,72
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,63	42,63	42,64	42,65	42,68
Indeks Persampahan	75,84	76,62	82,91	83,79	83,84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,08	65,71	70,82	70,35	69,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2025

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak

memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan;
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2019 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 IKLHS sebesar 64,97 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 IKLHS telah mencapai 70,35. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2022, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo meliputi PSEL, *Buffer zone*, IPAL, dan penutupan membran pada area *landfill*. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024, IKLHS Kota Surabaya mengalami penurunan disebabkan oleh relatif menurunnya Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 86,61 dan menurun menjadi 83,72 di tahun 2024. Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara dikarenakan faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat. Selain itu, emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Sedangkan untuk nilai indeks kualitas air pada tahun 2023 sebesar 58,50 dan menurun menjadi 57,65 di tahun 2024. Penurunan nilai indeks kualitas air disebabkan salah satunya menurunnya volume air akibat kemarau panjang yang menyebabkan konsentrasi polutan lebih tinggi di badan air.

2.1.3.2.5.5 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan adalah definisi perubahan iklim yang diberikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang meliputi karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan penebalan atmosfer. Semakin banyak yang terperangkap di atmosfer bumi, menyebabkan kenaikan suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global.

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas di atmosfer yang menyerap radiasi infra merah dan juga menentukan suhu atmosfer. Dampak aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah meningkat secara signifikan, terutama sejak era pra-industri, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menimbulkan masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ada enam jenis yang dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca, yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu, beberapa gas yang juga dihitung sebagai gas rumah kaca, yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), klorofluorokarbon (CFC), dan gas organik volatil non logam. Gas rumah kaca yang paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO_2 , CH_4 , N_2O , NOX, CO, PFC dan SF_6 .

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Inventarisasi GRK dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan

data tentang aktivitas sumber emisi, kemudian melakukan perhitungan emisi dan serapan GRK untuk mendapatkan data *real-time* mengenai tingkat, status, dan tren perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan serapan, termasuk penyimpanan karbon. Dalam menjalankan amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pelaporan secara rutin melalui aplikasi Aksara Bappenas, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ eq)	48.241,15	48.241,15	172.842,60	173.209,27	210.612,16

Sumber: Aksara Bappenas, 2025

2.1.3.2.5.6 Konservasi Energi

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan *solar cell*, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG (bahan bakar gas) untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung Pemerintah Kota Surabaya antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan area Balai Kota Surabaya,

sedangkan pada gedung swasta antara lain Intiland Tower, Esa Sampoerna Center, dan Graha Wonokoyo, sehingga masih diperlukan optimalisasi penerapan teknologi dan pengembangan pemanfaatan energi alternatif terbarukan baik pada sektor pemerintah maupun swasta.

Tabel II.110

Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2021–2025 (TW I)

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PJU LED	Unit	20.598	96.252	105.846	105.846	116.531
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	40	40	40	40	40
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8	8
<i>Warning Light (APIL) Solar Cell</i>	Unit	8	21	21	21	21
<i>Traffic Light (APIL) Solar Cell</i>	Unit	77	77	77	77	77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2023, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.111
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2021	2.217.423	2.181.345
2022	2.251.947	2.204.168
2023	2.280.865	2.033.593
2024	2.251.964	2.241.808
2025	2.244.850	2.233.364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025.

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.112
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	75.253	40.012	90.577	60.149	11.799
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	75.253	40.012	90.577	60.149	11.799
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	42.717	30.960	27.503	29.396	6.587
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	42.717	30.960	27.503	29.396	6.587

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas, menunjukkan bahwa seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK memperoleh akta kelahiran, dimana anak yang dilahirkan di seluruh rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya (yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Untuk anak yang dilahirkan di luar kota Surabaya dan selain rumah sakit, puskesmas, dan bidan di kota Surabaya, maka akta kelahiran anak tersebut diurus secara pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik di Siola dan mobil pelayanan keliling oleh dispendukcapil yang beroperasi di beberapa titik lokasi, antara lain: di RT, RW, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan taman kota (tempat publik). Hal

yang sama juga berlaku pada penduduk yang meninggal, di mana penduduk meninggal dapat diurus di kantor kelurahan/kecamatan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 yaitu 371.971 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 768.210 jiwa. Pada tahun 2022 kepemilikan KIA bertambah menjadi 407.572 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun sejumlah 775.167 jiwa. Pada tahun 2023, kepemilikan KIA menjadi 655.946 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 769.674 jiwa. Pada tahun 2024, kepemilikan KIA menjadi 671.796 jiwa, dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun, yakni 766.134 Jiwa. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, kepemilikan KIA bertambah menjadi 666.873 jiwa, atau 88,33% dari jumlah anak berusia kurang dari 17 tahun yaitu 754.966 jiwa.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran dan pendampingan keluarga.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Akseptor KB di Kota Surabaya seluruhnya telah menggunakan alat kontrasepsi modern.

Secara umum, rasio akseptor KB di Kota Surabaya tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dengan rasio tertinggi dicapai pada tahun 2022 (93,41%). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan cara perhitungan data PUS yang semula di tahun 2021 berupa sensus menjadi survei oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2022 dan seterusnya. Selain itu, naik dan turunnya rasio akseptor KB dipengaruhi oleh keadaan penduduk pada masa tersebut. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi keputusan pasangan untuk ber-KB. Sedangkan tahun 2024, peningkatan rasio akseptor KB tidak lepas dari keberhasilan peningkatan kesadaran ber-KB masyarakat melalui edukasi di berbagai media (*podcast*, media sosial dan cetak) termasuk *door-to-door* (Gropyokan KB), pelayanan KB (Bhakti Sosial KB), serta peran aktif kader. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.113

Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	496.405
2	Jumlah Akseptor KB/ mCPR	434.983	429.350	303.968	307.610	417.081
3	Rasio Akseptor KB (persen)	82,37	81,33	93,41	83,00	84,02

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk tahun 2020, 2021 belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya. Namun, sejak tahun 2022, angka ASFR mulai dirilis oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Angka mCPR dan ASFR secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.114

Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka ASFR	N/A	N/A	18	8,7	5,8

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.115

Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	528.086	527.912	325.405	370.601	496.405
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	434.983	429.350	306.896	307.610	417.081
3	Cakupan Peserta KB Aktif	82,37	81,33	94,31	83,03	84,02

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Cakupan peserta KB Aktif dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif.

Program KB bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan terciptanya keluarga sejahtera. Keberhasilan implementasi program dapat dilihat

dari tingkat kepesertaan masyarakat pada program KB. Jika dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi, Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (*unmet need*), dan Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dengan banyak fasilitas kesehatan yang membatasi layanannya, sekaligus banyak peserta KB yang membatasi interaksi dengan orang lain.

Tabel II.116
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif yang <i>drop out</i> kontrasepsi	712	937	627	371	303
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	93.103	98.562	69.610	61.899	74.708
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	12	14	204	29	26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.117
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	1,70	1,73	1,83	1,70	1,68

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2025.

2.1.3.2.7.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang

berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2019 terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Sedangkan sampai dengan tahun 2024 terdapat 620 BKB, 159 BKR, dan 196 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot). Jumlah angkutan darat di Kota Surabaya sendiri terus menurun sejak tahun tahun tahun 2020 menjadi 1.999 kendaraan, berlanjut ke tahun 2021 menjadi 1.870 kendaraan, kemudian pada tahun 2022 ini menjadi 1.051 kendaraan, sedangkan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 373 kendaraan akibat banyaknya angkutan umum yang dinonaktifkan dan semakin menurun pada akhir tahun 2024 menjadi 176 kendaraan. Dalam rangka peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi. Detil jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.118
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	1	1	0
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	11	13	13	13	14
4	Jumlah Angkutan Darat	1.870	1.051	373	176	120

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin

trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.119
Rasio Izin Trayek Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	2.869	563	188	86	36
3	Rasio Izin Trayek	0,000966	0,000188	0,000062	0,000028	0,000012

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha. Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam.

Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek, Pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan menyediakan angkutan umum Suroboyo Bus dan Wira-Wiri serta memperpendek waktu tunggu kendaraan umum di terminal atau halte. Rata-rata waktu tunggu angkutan umum di Kota Surabaya dari tahun ke tahun diharapkan semakin singkat. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 triwulan I terjadi peningkatan waktu tunggu angkutan kota karena banyak masyarakat pengguna angkutan umum eksisting dan kendaraan pribadi beralih menggunakan *trunk* dan *feeder* dikarenakan faktor kenyamanan dan ketepatan waktu. Rata-rata waktu tunggu kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.120
Rata-Rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	12,61	12,71	14	14	17

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	13	18,95	15	15	13,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan pada pengguna angkutan umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan *load factor* angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk per satuan waktu tertentu. *Load factor* menggambarkan kebutuhan/*demand* dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka *load factor* kendaraan umum maka semakin efisien pula biaya operasionalnya. Pada tahun 2021 nilai *load factor* angkutan kota sebesar 33,02 dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi 44,86. Nilai *load factor* angkutan kota semakin meningkat di tahun 2024 menjadi 64,99 dan menjadi 67,79 di triwulan I tahun 2025. Begitu pula dengan nilai *load factor* bus, yang menunjukkan tren serupa. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.121

Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Load factor</i> angkutan kota (persen)	33,02	33,92	44,86	64,99	65,61
<i>Load factor</i> bus (persen)	44,65	57,45	55,21	45,31	60,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Dari tahun 2021, jumlah kendaraan umum yang lulus uji terus menurun menjadi sebanyak 123.678 kendaraan sampai dengan akhir tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan uji KIR sebagai syarat kendaraan untuk beroperasi di jalan, serta banyak kendaraan angkutan umum yang beroperasi melebihi umur kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.122

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah uji kir angkutan umum	43.135	43.870	42.770	42.892	10.941
2	Jumlah kendaraan wajib uji kir	151.064	143.605	136.367	123.550	31.808
3	Jumlah kendaraan yang diuji kir	142.532	136.735	126.819	123.714	30.996
4	Jumlah kendaraan lulus uji kir	135.905	132.719	123.196	119.969	13.141

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.123

Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	18.140	19.261	1.296	2.053	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit, kemudian pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit dan sampai dengan akhir tahun 2025 jumlahnya masih tetap 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.124

***Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah <i>Weather Information Display</i>	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*Double Track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang baru di wilayah Kecamatan Pakal. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan

keselamatan kepada operator perlintasan sebidang serta masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan di perlintasan sebidang.

Tabel II.125

Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	5	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah jaringan fiber optik (FO) yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi HT (*handy talkie*) pada tiap SKPD. Selain menggunakan alat komunikasi berupa HT (*handy talkie*), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.126

Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Alat Komunikasi HT (unit)	2.838	2.938	2.978	2.978	2.978
Jaringan Fiber Optik (kilometer)	248,84	285,93	285,93	285,93	295,88

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan *website* resmi, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perizinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi

pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2024, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK.

Tabel II.127
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	10	10	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi sejumlah 221.968 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan menjadi 256.946 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan karena menggunakan sumber data yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu *online data system* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM sehingga jumlah anggota koperasi aktif menjadi 153.809 dengan rincian jenis kelamin laki-laki sejumlah 88.038 orang dan perempuan sejumlah 65.771 orang. Sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 150.327 orang. Kemudian pada tahun 2024 jumlah anggota koperasi aktif sejumlah 147.666. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.128
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota koperasi	221.968	256.946	153.809	150.327	147.666

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 1.817 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.554 koperasi. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 1.834 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.571 koperasi. Untuk tahun 2022 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi sebanyak 2.002 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 598 koperasi. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koperasi sedikit meningkat menjadi sebanyak 2.009 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 596 koperasi. Kemudian pada tahun 2024 jumlah koperasi meningkat kembali sebanyak 2.019 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 630 koperasi. Secara rinci persentase koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.129
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi	1.817	1.834	2.002	2.009	2.019
2	Jumlah koperasi aktif	1.554	1.571	598	596	630
3	Persentase koperasi aktif (%)	85,52	85,66	29,87	29,67	31,20

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2023 adalah 295 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.396 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 129 koperasi berjenis koperasi produsen dan 167 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Distribusi jumlah koperasi di Tahun 2024 adalah 289 koperasi berjenis koperasi jasa, 1.407 koperasi berjenis koperasi konsumen, 31 koperasi berjenis koperasi pemasaran, 123 koperasi berjenis koperasi produsen dan 169 koperasi berjenis koperasi simpan pinjam. Sedangkan jumlah koperasi per jenis usaha di Kota Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.130
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Angkutan Darat	13	13	17	17	16
Jasa Angkutan Laut	1	1	0	0	0
Jasa Lain-Lain	91	105	681	693	688

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
KJKS	23	23	18	16	16
Kopinkra	7	7	7	7	7
Kopkar	327	328	377	372	369
Kopma	21	21	22	22	23
Koppas	24	24	15	16	19
Koppontren	22	22	23	23	23
Kopwan	171	171	142	142	145
KPRI	185	186	183	182	180
KSP	108	110	114	113	117
KSU	666	665	238	238	250
KUD	5	5	5	5	5
Pemuda	4	4	6	6	6
Pertanian	4	4	5	5	5
PK 5	33	33	26	26	26
Primkopabri	12	12	12	12	12
Primkopad	18	18	18	18	17
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	11	11
Primkoptama	30	30	30	30	30
Profesi	18	18	26	27	26
Sekunder	1	1	1	1	0
Nelayan	4	4	5	5	5
Tenaga Kerja Bongkar	-	-	2	2	3
Koperasi Digital	-	-	-	-	1
Kopra	-	-	-	-	1
TOTAL	1.817	1.834	2.002	2.007	2.019

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2025

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 adalah 1.864 milyar dari 1.554 koperasi dan pada tahun 2021 volume usaha koperasi meningkat menjadi 2.147 Milyar Rupiah dari 1.571 koperasi. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi turun menjadi 1.412 Milyar Rupiah karena jumlah koperasi aktif RAT mengalami penurunan menjadi 488 koperasi aktif namun secara rasio meningkat menjadi 2,89. Pada tahun 2023, rasio volume usaha koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 3,12 dengan nilai volume usaha koperasi aktif sebesar 1.419 Milyar Rupiah dari 455 koperasi aktif ber-RAT. Namun, pada tahun 2024 peningkatan volume usaha koperasi aktif tidak sebanding dengan banyaknya peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2024 tercatat dari 630 koperasi aktif mampu menghasilkan volume usaha sebesar 1.421 Milyar Rupiah. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.131

**Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	1.554	1.571	598	596	630
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.864	2.147	1.412	1.419	1.421
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	1,20	1,37	2,36	2,38	2,25

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan fasilitasi pemasaran dan kemitraan terhadap 6.212 pelaku usaha mikro dengan berbagai macam intervensi di antaranya pendampingan pengurusan merek 250 usaha mikro, pendampingan sertifikasi halal 550 usaha mikro, pelatihan 663 usaha mikro, fasilitasi kemitraan/kerjasama 139 usaha mikro, fasilitasi pemasaran berupa pameran/bazar/gelar produk 1.429 UMKM, dan pemasaran secara *online* melalui e-Peken 3.181 usaha mikro. Selengkapannya fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha mikro yang dilakukan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.132

**Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan
Intervensi Tahun 2020–2024**

Intervensi	2020	2021	2022	2023	2024
Merek	140	200	125	156	250
Halal	70	165	100	265	550
Pelatihan UMKM	88	505	62	1.086	663
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	187	260	136	136	139
Pameran/Bazar/Gelar Produk	9	346	2.188	2.012	1.429
Pemasaran Online Peken	-	-	2.752	2.945	3.181
Total	494	1.476	5.363	6.600	6.212

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2025

Dengan upaya tersebut di atas maka sebanyak 6.212 UMKM binaan yang naik kelas sampai dengan akhir Desember 2024 omsetnya mencapai Rp 56.608.535.242. Detil upaya peningkatan UMKM naik kelas tersebut dilakukan dengan:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;

2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan dengan perbankan;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken dan melaksanakan pelatihan pemasaran *online* dengan bekerjasama dengan *marketplace/platform* digital.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel II.133
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Proyek PMDN	466	1.310	63.360	147.254	90.136
Jumlah Proyek PMA	122	177	340	677	1.203
Total	588	1.487	63.700	147.931	91.339

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat sejumlah 1.487 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 147.931 proyek dan pada tahun 2024 mencapai 91.339 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2021 sebesar Rp29.215,06 Miliar dan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.897,81 Miliar dan Rp37.573,89 Miliar. Pada tahun 2024, nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp40.476,06 Miliar.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.134
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persetujuan (USD Juta)	2.046,22	6.337,45	-	-	-
1.1	Jumlah Proyek	588	31.467	117.580	134.984	141.037
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	22.152,03	65.888,88	151.959,88	115.914,68	100.991,18
2	Realisasi (USD Juta)	2.046,22	2.810,02	-	-	-
2.1	Jumlah Proyek	588	1.487	63.700	147.931	91.339
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	22.152,03	29.215,06	34.897,81	37.573,89	40.476,06

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.135
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMA/PMDN	348	961	30.304	70.817	91.339
2	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan PMA/PMDN	4.862	13.496	92.707	199.420	247.713
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13,97	14,04	3,06	2,81	2,71

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi, baik dari penanaman PMA dan PMDN, pada tahun 2021 menyerap sebanyak 13.496 tenaga kerja dari 961 proyek, dengan nilai rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,04. Untuk tahun 2022 kembali terdapat peningkatan baik jumlah proyek maupun jumlah tenaga kerja yang

terserap masing-masing 30.304 proyek dan 92.707 tenaga kerja dengan rasio 3,06. Kemudian pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang terserap kembali meningkat sebanyak 199.420 orang dari 70.817 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 2,81. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan daya serap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN menjadi sebesar 247.713 orang pada 91.339 investor PMA/PMDN.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya di antaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2024, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 635 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.136
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

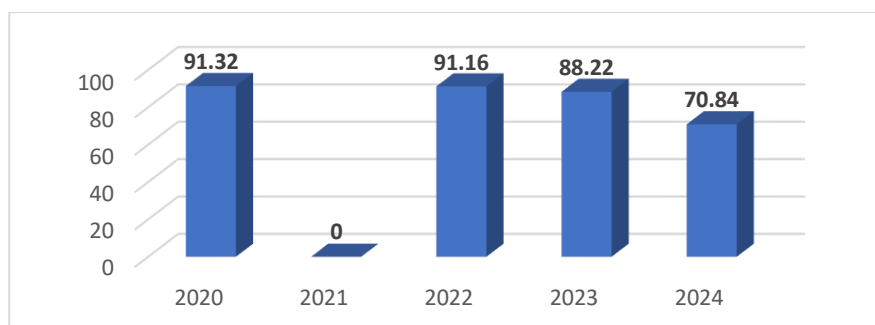
No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lapangan olahraga	665	603	632	635	635
2	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.018.022
3	Rasio lapangan olahraga	1:4.467	1:4.955	1:4.762	1:4.753	1:4.753

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Surabaya menyeluruh meliputi semua cabang olahraga prestasi dan induk olahraga rekreasi dan tradisional. Pembinaan olahraga tersebut bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan juga dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Di bawah komite tersebut bernaung cabang-cabang olahraga yang didukung Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kegiatan

pembibitan, pelatihan rutin, pelatihan terpusat, pengiriman atlet untuk lomba, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi. Pembibitan atlet muda dilaksanakan secara profesional di cabang olahraga masing-masing. Untuk meningkatkan kompetensi pelatih, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kegiatan pelatihan untuk pelatih. Hal ini dilakukan agar proses pembibitan atlet terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,16%. Pada tahun 2023, sejumlah 781 orang atlet mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, 689 orang atlet di antaranya berhasil menorehkan prestasi, sehingga nilai persentase atlet yang berprestasi menjadi 88,22%. Sejak tahun 2007 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur I) sampai dengan tahun 2023 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII), Pemerintah Kota Surabaya selalu menjadi juara umum di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim). Hal ini dapat diraih tidak terlepas dari dukungan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan olahraga secara menyeluruh. Pada tahun 2024, dari total 1.430 atlet olahraga yang dibina, sejumlah 1.013 atlet berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan tingkat regional, nasional serta internasional. Jika dilihat capaian persentase atlet berprestasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 memang menurun, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak ada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jatim.



Gambar II.16 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi

kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja, dan terdapat tambahan 170 pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pemuda yang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja sebanyak 777 orang. Kemudian pada tahun 2024, sebanyak 823 orang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja.

Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program wirausaha bagi pemuda. Pada tahun 2020 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha menurun menjadi 200 pemuda. Pada tahun 2021 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha meningkat menjadi 282 pemuda. Pada tahun 2022 jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha kembali meningkat menjadi sejumlah 567 pemuda. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 472 pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha. Kemudian pada tahun 2024, sebanyak 698 pemuda mendapatkan pelatihan wirausaha. Pelatihan ini juga dilanjutkan dengan fasilitasi magang wirausaha. Pemuda terpilih yang telah mendapatkan pelatihan juga akan ditempatkan di beberapa perusahaan sebelum mereka benar-benar menjadi wirausahawan mandiri.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja urusan statistik dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain melalui pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang dipublikasikan secara rutin setiap tahun. Data statistik sektoral yang dimaksud antara lain data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri dan sektor perdagangan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian dari diseminasi dan informasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dapat menjadi bahan rujukan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Tabel II.137
Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022-2025 (TW I)

Uraian	2022	2023	2024	2025
Persentase hasil analisa data yang terpublikasi (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2025

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota, maka pada data yang dikumpulkan oleh Walidata, yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dilakukan analisis dan publikasi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan analisis dan publikasi data sebesar 100% yang terdiri dari data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri, dan sektor perdagangan. Sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, serta kebutuhan masyarakat akan informasi secara umum, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan sistem terintegrasi antara *ePlanning* dan portal satu data (satudata.surabaya.go.id), yang di dalamnya mencakup *Open Data* dan *Peta Digital* serta Statistik Sektoral Kota Surabaya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan utamanya untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi yang mendukung pelayanan publik, serta seluruh proses pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan sistem keamanan informasi untuk melindungi sistem informasi yang ada.

Tabel II.138
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah serangan	56	240	270	160	60
2	Jumlah penanganan serangan	56	240	270	160	60
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dalam pelaksanaannya sistem keamanan informasi Kota Surabaya dapat menangani serangan siber dengan perangkat teknologi yang dimiliki, namun seiring

perkembangan teknologi sistem keamanan informasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan informasi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kebudayaan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.139
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	454	521	497	44

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Tahun 2021, festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya hanya 4 festival dikarenakan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 454 kali, dan pada tahun 2023 penyelenggaraan festival seni budaya meningkat menjadi 521 kali. Pada tahun 2024, sebanyak 497 festival seni budaya yang diselenggarakan dan sampai dengan triwulan I tahun 2025, telah diselenggarakan 44 festival seni dan budaya. Promosi pelaksanaan festival seni dan budaya di Kota Surabaya dilakukan secara masif, baik di media cetak maupun melalui media elektronik, termasuk di dalamnya berbagai *platform* media sosial, seperti instagram *sparklingsurabaya* dan *website* *tiketwisata.surabaya.go.id*.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Untuk mendukung perkembangan seni dan budaya di Kota Surabaya Pemerintah Kota menyediakan gedung/tempat yang dapat digunakan oleh

masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi antara lain di THP Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, Balai Pemuda, Balai Kota, Wisata Kota Lama, serta di Lokasi Wisata Tunjungan Romansa.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota melakukan pengawasan dan upaya pelestarian bekerjasama dengan tenaga ahli di bidang cagar budaya. Pada tahun 2023 terdapat 286 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2024 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berkurang menjadi sejumlah 284 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2024 terdapat 2 bangunan cagar budaya yang dievaluasi, dimana hasil dari evaluasi bersama Tim Ahli Cagar Budaya memutuskan status cagar budaya pada 2 bangunan tersebut dicabut. Pada tahun 2025, jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya berjumlah 285 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Saat ini seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini dalam kondisi baik. Dalam upaya pelestarian seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini rutin diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya menjadi destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Adapun kawasan yang sedang direvitalisasi antara lain kawasan kota lama terdiri dari zona eropa, zona pecinan dan zona arab. Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhir yang akan dituju adalah terlestarikannya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.140
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	288	289	286	284	285
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	288	289	286	284	285
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

Karya seni tidak sebatas fenomena keindahan saja, tetapi juga adalah sebuah ekspresi, tepatnya objektifikasi manusia pada ruang dan waktu di mana ia berada. Segala bentuk hasil cipta manusia adalah fakta budaya yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat luas melalui suatu pagelaran budaya. Kelompok seni binaan sebanyak 507 pada tahun 2021, yang selanjutnya dilatih dan dibimbing hingga 415 di antara kelompok seni tersebut layak tampil di depan publik. Kelompok seni layak tampil dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2024 mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya perkembangan di bidang seni dan minat seni masyarakat di Kota Surabaya. Adapun kelompok seni yang telah dibina dan layak tampil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.141
Jumlah Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kelompok seni layak tampil	415	423	428	433	433
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	92	292	287	282	282
Jumlah kelompok seni binaan	507	715	715	715	715

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2025

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022, perpustakaan terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, taman baca, dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-

lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/*leaflet*, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2024 berjumlah 2 perpustakaan yang didukung dengan 530 taman dan sudut baca masyarakat, serta 84 perpustakaan keliling. Selain itu terdapat 65 Perpustakaan milik non Pemda Kota Surabaya yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi, serta instansi pemerintahan lainnya. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.142
Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah Milik Pemda Kota Surabaya (unit)	2	2	2	2	2
1.a	Jumlah taman dan sudut baca (unit)	530	530	530	530	530
1.b	Jumlah perpustakaan keliling (unit)	84	85	84	84	84
2	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya (unit)	61	61	65	65	65
3	Jumlah Tenaga Perpustakaan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	N/A	N/A	502	506	511
4	Jumlah Pustakawan di Perpustakaan Milik Pemda Kota Surabaya (orang)	4	4	6	6	25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Kota Surabaya, selain mengembangkan fasilitas perpustakaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan serta sertifikasi pada tenaga perpustakaan di perpustakaan maupun TBM guna peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Mulai tahun 2022 hingga 2024 target tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah seluruhnya. Dari jumlah tenaga perpustakaan yang terus meningkat diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan perpustakaan.

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya

ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung layanan baca tercatat 13.504 per bulannya, dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 80.138 orang per bulannya. Peningkatan kunjungan tersebut tidak lepas dari terus bertambahnya koleksi buku yang dimiliki layanan baca milik Pemerintah Kota yang didukung oleh kegiatan-kegiatan literasi yang diselenggarakan di layanan baca. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah koleksi buku dan kunjungan di layanan baca milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.143
Jumlah Koleksi dan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	533.361	537.571	541.781	541.781	543.281
Jumlah pengunjung layanan baca per bulan (orang)	N/A	13.504	87.515	73.690	80.138

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Mengacu kepada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas even literasi, di antaranya Bercerita Surabaya, kegiatan mendongeng siswa SD, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Barometer keberhasilan perpustakaan adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat guna. Hal ini sangat dipengaruhi oleh prosedur di dalam perpustakaan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun hasil survei Bidang Perpustakaan dan Kearsipan pada triwulan I tahun 2025 adalah 98,05. Survei pelayanan kearsipan ini dilaksanakan secara langsung kepada responden melalui *Google Form*.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.144
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	580	583	78	70	70
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	531	583	78	70	70
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	91,55	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Pada tahun 2020 sebanyak 531 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 583 lembaga. Sedangkan, pada tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 78 lembaga. Kemudian pada tahun 2023, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan menurun menjadi 70 lembaga dan persentasenya menjadi 100 persen. Kemudian pada tahun 2024, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang didampingi sejumlah 70 instansi dan 100% sistem tata kearsipannya telah sesuai ketentuan.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2021, 100 persen arsip telah terakuisisi.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.145
Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perikanan Laut	8.057,63	7.805,50	8.057,49	8.295,33	8.526,00
2.	Perikanan Tambak	8.442,47	9.054,27	9.349,56	9.508,29	9.976,24
Jumlah		15.670,22	16.500,11	17.407,05	17.803,62	18.502,24

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Tabel di atas dapat dilihat jumlah produksi perikanan laut dan tambak meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan, fasilitasi sarana, dan pemasaran bagi pembudidaya ikan.

Di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi sarana perikanan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, mulai dari perahu, mesin perahu, alat tangkap serta alat pendukung lainnya seperti papan seluncur lumpur, tali, serta senter. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan juga diberikan keterampilan untuk pengolahan hasil laut yang dapat dijadikan produk turunan dari hasil tangkapan. Di sektor perikanan budidaya selain bantuan sarana dan prasarana, pembudiya perikanan juga rutin dibekali dengan pelatihan terkait penerapan teknologi tepat guna, agar hasil budidaya dapat maksimal. Masing-masing pembudidaya juga rutin mendapatkan pendampingan

oleh penyuluh. Selain itu, Pemerintah Kota juga memfasilitasi pemasaran produk nelayan melalui ePeken.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Pada tahun 2020, adanya pandemi virus Covid-19, membuat kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi sebanyak 10.681.318 kunjungan saja, dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 319.082 dan wisatawan nusantara sebanyak 10.362.236 kunjungan. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan sebanyak 9.335.841 kunjungan dengan perincian sebanyak 100.767 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 9.235.074 kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan sebanyak 14.237.215 dengan perincian sebanyak 565.998 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 13.671.217 kunjungan wisatawan nusantara. Sedangkan pada tahun 2023, kunjungan wisatawan sebanyak 17.425.476 dengan perincian sebanyak 1.285.905 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 16.139.571 kunjungan wisatawan nusantara. Peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi pada tahun 2024, dengan total 21.004.639 kunjungan wisatawan dengan rincian 1.996.287 kunjungan wisatawan mancanegara dan 19.008.352 kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Surabaya. Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.146
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	319.082	100.767	565.998	1.285.905	1.996.287
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	10.362.236	9.235.074	13.671.217	16.139.571	19.008.352
Jumlah		10.681.318	9.335.841	14.237.215	17.425.476	21.004.639

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, 2025

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan

pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel II.147
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2021 – 2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	2	5	6	7	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2025

Pengembangan obyek daya tarik wisata pada tahun 2020 ke tahun 2021 tampak menurun karena pengertian pengembangan lebih spesifik yang semula hanya sebatas adanya penambahan wahana baru di ODTW yang dikelola pemerintah Kota Surabaya, kemudian menjadi ditingkatkan kualitasnya sesuai standar berdasarkan kriteria yang ditetapkan (sapta pesona). Pada tahun 2021, terdapat 1 kampung dan 1 kawasan yang berhasil dikembangkan memenuhi kriteria sapta pesona, yakni Kampung Lawas Maspati dan Kawasan Tunjungan yang dikenal sekarang dengan Tunjungan Romansa. Pada tahun 2022, terdapat 3 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan antara lain, Kota Lama Pecinan, Kampung Pecinan WKP, serta THP Kenjeran. Pada tahun 2023 terdapat tambahan 1 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan dengan kriteria sapta pesona yakni Wisata Perahu Kalimas dan pada tahun 2024 terdapat 1 kampung yang berhasil dikembangkan yakni Kampung Wethan Wonderland. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 7 destinasi wisata yang berhasil dikembangkan dengan standar kriteria sapta pesona. 7 destinasi wisata ini juga berhasil menarik kunjungan wisatawan dalam negeri maupun manca negara.

Untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Surabaya, pemerintah terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu fokus pembangunan di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perananan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat mengentaskan kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya cukup besar, hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan pajak hotel pada tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp. 384.781.372.811,00 atau 6,29% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 yakni sebesar Rp6.114.378.521.533,49. Nilai perolehan pajak restoran pada tahun 2024 juga tinggi yakni mencapai

Rp673.358.993.847,00 atau 11% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024. Selain itu perolehan pajak hiburan pada tahun 2024 juga mencapai Rp85.576.593.642,00 atau 1,39% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024. Jika digabungkan 3 jenis perolehan pajak ini, nilainya mencapai 18,7% dari total nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024.

Sinergitas dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* di Surabaya tentu memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan objek wisata. Kolaborasi antar *stakeholder* tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2024 terjadi peningkatan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Surabaya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.148
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	9	14	22	34	34

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2025

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga fokus untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Terdapat beberapa program kegiatan yang disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya pendampingan, fasilitasi kerjasama, fasilitasi sarana dan prasarana, branding dan promosi serta penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya seperti di Balai Pemuda, *coworking space* (koridor siola) serta di ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di seluruh wilayah. *Event-event* pertunjukan hasil produk ekonomi kreatif juga rutin dilaksanakan untuk membantu branding dan promosi produk. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, *Fashion* serta Aplikasi untuk dikembangkan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk berkembang melalui kerja sama antar pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Terdapat beberapa kesepakatan di Bidang Pariwisata yang berhasil dilaksanakan, tentunya kerjasama ini sangat berdampak bagi pelaku usaha kreatif.

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.149
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	8.082,50	6.156,69	7.150,88	7.387,50	1.140,86
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.242,8	955,15	1.090,74	1.099,30	168,10
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,51	6,45	6,56	6,72	6,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Pada tabel di bawah ini disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di Kota Surabaya dari tahun 2021–2025 (TW I).

Tabel II.150
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	8.076,12	8.156,78	7.150,88	7.387,50	1.140,86
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	162,219	154,95	158,35	281,65	77,5
3.	Jumlah Produksi Cabai (ton)	N/A	37,48	32,10	56,68	3,27
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	202,8	151,55	480,61	144,68	19,3
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	6.763,71	10.111,78	9.717,68	10.715,25	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2025

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, cabai, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu jagung dan sayur, sedangkan produksi padi, cabai, dan buah mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2024 komoditi yang mengalami peningkatan produksi adalah padi, jagung, cabai, dan buah. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana tabel di atas.

Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya membuka pelayanan untuk pengobatan hewan ternak di Kota Surabaya. Selain itu untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk daging halal, Rumah Potong Hewan Pegirian telah memperoleh sertifikat halal. Pada tahun 2024, telah dibangun rumah potong hewan baru (khusus babi) di Banjarsugihan, Kecamatan Tandes. Di masa mendatang, rumah potong hewan untuk sapi direncanakan akan dipindahkan ke kawasan Tambak Osowilangun dengan kawasan yang lebih luas

dan sistem instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lebih lengkap sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan mutu dan keamanan produk serta dapat menaikkan omzet dari PD Rumah Potong Hewan Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksin hewan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.151
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ternak (ekor)	91.609	23.870	21.753	16.381	16.125
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	81.398	21.128	19.509	14.666	14.606
Persentase ternak yang diintervensi (%)	88,85	88,51	89,68	89,53	90,58

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Di Kota Surabaya, kontribusi sektor pertanian memang relatif kecil, namun demikian sektor ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan penduduk dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya, sehingga di masa mendatang tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *urban farming*, penguatan kelembagaan pertanian, serta pengembangan investasi industri pengolahan hasil pertanian.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.152
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Jenis Pasar Modern	2020	2021	2022	2023	2024
1	Toko Swalayan	792	792	663	663	592
2	Departement Store	13	13	16	16	170
3	Mall/Plaza	34	34	38	38	37
Total		839	839	717	717	799

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2025

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (Usaha Mikro Kecil). Pada tahun 2024, berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terdapat perbedaan jumlah toko

swalayan dan *departmen store* dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan izin usahanya. Toko swalayan adalah toko yang menjual berbagai barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri. Swalayan dapat berupa *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, atau grosir. *Department store* atau toserba adalah toko besar yang menjual berbagai macam barang dari berbagai departemen.

Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.153
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	Pasar Sememi	Pasar Kutisari (rehab)	Pasar Keputran (rehab)	-
2		Gunung Anyar	Pasar Gununganyar (rehab)	Pasar Pabean (rehab)	-
3		Pegirian	Pasar Nambangan (rehab)	Pasar Tembok (rehab)	-
4		Keputih	Pasar Keputih (rehab)	Pasar Kutisari (rehab)	-
5		Burung Dolly (lanjutan)	Pasar Dukh Menanggal (rehab)	Pasar Ikan Hias Gunungsari (rehab)	-
6		Jambangan	Pasar Sememi (rehab)	Pasar Dupak (rehab)	-
7		Gembong Asih	Pasar Raci (rehab)	Pasar Nambangan (rehab)	-
8		Penjaringan Sari	Pasar Jambangan (rehab)	Pasar Jambangan (rehab)	-
9		Dupak	Pasar Rakyat Jambangan (Rehab)	Pasar Ndeso Jeruk (rehab)	-
10		Kutisari	Pasar Simo (rehab)	Pasar Burung Dolly (rehab)	-
11		Nambangan (lanjutan)		Pasar Karah tahap 2	-
12				Pasar Ex Halte trem JMP (rehab)	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2025

Tabel II.154
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2020–2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	67	67	67	67	67

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan dan industri, yang baru dimulai di tahun 2021 menggunakan OSS-RBA terpusat, sehingga data jumlah usaha menjadi lebih akurat. Sebagaimana pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah usaha sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.155
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2020–2024

No	Jenis Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdagangan	13.562	691	1.054	56.201	56.643
2	Industri	253	208	356	25.476	39.520
Total		13.815	899	1.410	81.677	96.163

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.156
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	A	A	AA
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	75,13	75,34	80,31	83,92	90,24

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Pada tahun

2024, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan predikat kinerja tingkat AA. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2025 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 150 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.157
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah jenis pelayanan	361	215	215	215	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	215	131	143	150	150
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	59,56	60,93	66,51	69,77	69,77

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Sedangkan untuk SOP yang dievaluasi tiap tahun bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.158
SOP Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah SOP	906	1.446	1.536	1.536	567
SOP dievaluasi	68	123	556	550	255

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari keseluruhan 906 SOP yang ada, 68 di antaranya telah dilakukan evaluasi pada tahun 2021. Sedangkan di tahun 2024, sebanyak 550 SOP telah dievaluasi dari total 1.536 SOP yang ada. Sedangkan pada tahun 2025, sampai dengan triwulan I, dari 567 SOP yang ada, telah dievaluasi sebanyak 255 SOP.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2021 hingga tahun 2025 (TW I) selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2020–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah rancangan produk hukum	149	155	30	67	15
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	149	155	30	67	15
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.160
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Nama BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
PDAM Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PD Pasar Surya	WDP	WDP	WDP	WDP	N/A
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP
PD Rumah Potong Hewan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PT Bank SAU (Surya Artha Utama)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Surya Karsa Utama	WDP	TMP	WDP	-	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiliki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2024 antara lain PDAM Surya Sembada dan PT Bank SAU (Surya Artha Utama).

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.161
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	86,05	88,37	90,76	95,82	97,21

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan adalah unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 63 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2024, mayoritas berada di atas nilai 90, yakni “Sangat Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta

peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2024 terdapat 20 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 11 MoU dan keseluruhan 11 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan pada triwulan I Tahun 2025 terdapat 5 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 3 MoU dan keseluruhan 3 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.162

MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2023–2025 (TW I)

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	20	20	5
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	20	20	5
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Tabel II.163

MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2025 (TW I)

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	11	11	3
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan	11	11	3
3.	Persentase bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.164

MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kerjasama dievaluasi	21	36	31	31	8

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan

Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2020 – 2024, yakni:

1) PDAM Surya Sembada

Pada tahun 2024, PDAM Surya Sembada berkomitmen secara bersama gotong royong membantu membangun Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada turut memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor sosial, lingkungan, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan dengan total biaya bantuan CSR sejumlah Rp3.564.519.554.

2) PT BPR Surya Artha Utama (SAU)

PT BPR Surya Artha Utama mendukung upaya penguatan UMKM di Kota Surabaya sebagai bagian dari langkah strategis pemberdayaan UMKM Kota Surabaya, melalui pembinaan dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2024, PT BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat ber-KTP Surabaya sebanyak 2.414 orang dan pinjaman kepada pelaku UMKM Kota Surabaya melalui Program PUSPITA dan SIKUMIS sebanyak 250 orang. PT BPR-SAU juga turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan sarana prasarana pendidikan di 2 sekolah dasar melalui penyediaan CSR berupa LCD proyektor dan tripod. Di sektor pariwisata, PT BPR-SAU ikut berpartisipasi dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama melalui bantuan CSR berupa *signage*. Total biaya bantuan CSR yang telah diberikan kepada masyarakat sejumlah Rp69.952.052.

3) PT YEKAPE

PT YEKAPE tetap berkomitmen melalui CSR untuk memberikan bantuan kemasyarakatan di Kota Surabaya melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Bantuan kegiatan kemasyarakatan langsung yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat mencapai Rp703.530.000. Selain itu, PT YEKAPE juga secara rutin memberikan beasiswa kepada 100 siswa SMA Kota Surabaya dari keluarga miskin dan memberikan bantuan kepada 1.000 anak yatim. PT YEKAPE juga secara konsisten mendukung ketahanan pangan melalui dukungan pembangunan kios TPID di Kota Surabaya yang berupaya menekan laju inflasi daerah.

4) PT BPD Jatim

Meski Pemerintah Kota Surabaya hanya memiliki 2,13% saham, PT BPD Jatim, secara rutin memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil binaan

Pemerintah Kota Surabaya berupa barang dan uang. PT BPD Jatim juga mendukung digitalisasi transaksi daerah melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dalam hal pembayaran ePeken melalui QRIS. Selain itu, PT BPD Jatim juga mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui pemberian bantuan CSR berupa Wisata Perahu Kalimas senilai Rp1.745.000.000 dan bantuan CSR pada wisata rakyat sejumlah Rp790.000.000. Dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi, PT BPD Jatim aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan *event* dan acara seremonial sektor pendidikan, budaya dan lingkungan di Pemerintah Kota Surabaya. PT BPD Jatim turut aktif bersama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dalam menciptakan ekosistem olahraga yang mendukung munculnya atlet daerah melalui pelaksanaan *event* olahraga di antaranya turnamen sepak takraw, *event run*, dan jalan sehat.

5) PT SIER

Pada tahun 2024, PT SIER berkomitmen melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk memberikan bantuan dalam kegiatan sosial di Kota Surabaya melalui bantuan uang saku untuk 100 anak yatim-piatu, kegiatan Khitan Massal Surabaya sejumlah 102 orang anak, serta melaksanakan program pemeriksaan kesehatan untuk 100 lansia. Selain itu PT SIER turut serta memberi dukungan dalam pengembangan pariwisata daerah melalui pembuatan *video mapping* untuk mendukung peresmian Wisata Kota Lama Surabaya tahun 2024 dan bantuan 2 unit becak listrik untuk kendaraan Wisata Kota Lama Surabaya. PT SIER juga turut memberikan dukungan dalam pembangunan daerah melalui bantuan pembangunan infrastruktur. Total dukungan bantuan yang diberikan PT SIER kepada pemerintah dan masyarakat sejumlah Rp583.928.452.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan untuk RPJMD, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, sehingga Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.165
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Jenis Dokumen	2021	2022	2023	2024	2025
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2025, telah dilakukan *review* terhadap RPJMD 2021-2026 untuk digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 123 program.

Tabel II.166
Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	123	123	123	123
2	Jumlah Program RKPD	121	124	124	124	124
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (%)	100*	100*	100*	100*	100*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Keterangan: *) Jumlah program sejak RKPD 2021 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Sementara itu, tingkat capaian keberhasilan program mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024, tingkat capaian keberhasilan program sedikit menurun menjadi 99,04 persen. Sedangkan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I, tingkat capaian keberhasilan programnya baru mencapai 39,90 persen. Selengkapnya data tingkat capaian keberhasilan program pembangunan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.167
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	98,13	99,21	99,43	99,04	39,90

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2025

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif menyesuaikan kebutuhan sehingga terdapat sisa. Sedangkan di tahun 2025, sampai dengan triwulan I, penyerapan anggarannya baru mencapai 14,85 persen.

Tabel II.168
Rata – Rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan (%)	80,17	88,83	88,19	87,82	14,85

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2025

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karir pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. Pada tahun 2020 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.503 pegawai. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai, lalu pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.776 pegawai, dan pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 5.603 pegawai. Kemudian pada tahun 2024, jumlahnya sebanyak 6.556 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel II.169
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pegawai kompeten	4.503	4.725	5.776	5.603	6.556
2	Jumlah pegawai belum kompeten	2.033	1.636	312	403	541

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Dari data di atas, sejak tahun 2020 – 2022, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih

terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.170
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pejabat struktural	1.461	1.414	1.197	1.233	1.169
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.048	944	624	642	507
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	71,73	66,76	52,13	52,07	43,37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.1.3.5.3 Pengelolaan Perbatasan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2024, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel II.171
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
Sudah dilakukan penegasan wilayah	10	16	22	25	27

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan di instansi pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah.

Karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.172

Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi	24	19	0	0	0

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas, tahun 2020 sampai tahun 2022 pelanggaran tata kelola administrasi mengalami penurunan. Dari 24 pelanggaran di tahun 2020, menjadi nol pelanggaran di tahun 2022. Mulai di tahun 2022 hingga saat ini, jumlah pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan.

Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, cenderung meningkat, karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal untuk mengurangi jumlah pelanggaran.

Tabel II.173

Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Jenis Hukuman Disiplin	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	8	13	2	5	4
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	7	1	2	19	11
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	15	16	29	21	17
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	30	30	33	45	32

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.7.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Adapun beberapa kegiatan untuk mendukung pembinaan politik dan organisasi masyarakat antara lain sosialisasi pendidikan politik, sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ormas, dialog interaktif dan rakor bersama Kapolsek dan Danramil. Jumlah Ormas Tahun 2021 – 2025 (Triwulan I) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.174
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ormas Aktif	38	27	26	10	0
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	104	213	252	252

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat 252 ormas yang terdaftar, dan akan mendapat pembinaan pada triwulan berikutnya.

2.1.3.7.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya pengawasan terhadap potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.175
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah potensi konflik	297	403	309	196	107
2	Jumlah konflik	8	5	5	2	3

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, pelibatan tim kewaspadaan dini penting dalam memetakan potensi konflik, dan didukung penuh oleh partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.176
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total
	Makanan	%	Non Makanan	%	

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%
2023	948.701	38,79	1.497.216	61,21	2.445.917	100%
2024	1.061.448	40,79	1.541.008	59,21	2.602.456	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.177
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (orang)	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
PDRB (Juta Rp)	554.509.457	590.227.116	655.616.222	715.294.707	772.493.614
Produktivitas (Juta Rp per orang)	350,39	375,25	398,96	455,68	475,43

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan perdagangan.

Tabel II.178
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Perdagangan Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	19.477,42	19.874,94	22.684,94	25.217,17	27.494,46
Laju Pertumbuhan (persen)	-4,98	2,04	14,14	11,16	9,03

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2025

2.1.4.2 Fokus Infrastruktur Kewilayahan

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas

infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020-2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Tabel II.179
Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Indeks Infrastruktur Kota	0,67	0,75	0,81
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,78	0,81	0,83
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,53	0,67	0,82
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,67	0,74	0,78

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2025

Pada tahun 2024 Realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya meningkat menjadi 0,81. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada tahun 2022 sebanyak 2.072 ruas jalan, sebanyak 2.780 ruas jalan di tahun 2023 dan sebanyak 3.537 ruas jalan di tahun 2024. Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya dalam peningkatan konektivitas dan optimalisasi kinerja jalan melalui pembangunan jalan baru yakni, Jalan Lingkar Luar Barat di tahun 2022 dan *Radial Road* di tahun 2023 yang dilanjutkan pada tahun 2024 serta Pelebaran Jalan Wiyung di tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin, dengan 105 blok rusunawa pada tahun 2022, yang meningkat menjadi 109 blok sampai dengan tahun 2024. Program Dandan Omah juga dilaksanakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimulai dengan 929 unit rumah pada tahun 2022, meningkat menjadi 2.887 unit pada tahun 2023, dan 1.678 unit pada tahun 2024 yang dibiayai dari APBD. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang meningkat dari 22 lokasi pada tahun 2022 menjadi 35 lokasi pada tahun 2023, dan 63 lokasi pada tahun 2024. Upaya ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang

lebih baik. Di bidang penataan ruang, pemerintah telah melakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan antara lain Suroboyo Bus sebanyak 28 unit yang melayani 2 rute layanan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, serta Program Teman Bus hasil kerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang mengoperasikan 17 unit bus di 1 rute. Selain itu, terdapat 12 unit Bus Listrik yang melayani 1 rute, serta 102 unit angkutan *feeder* yang melayani 11 rute sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Di sisi lain, capaian kinerja aspek transportasi juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta koordinasi dengan berbagai untuk meningkatkan konektivitas antarmoda. Hal ini mencakup kerja sama dengan PT KAI DAOP VIII Surabaya dalam meningkatkan integrasi transportasi di tiga stasiun serta koordinasi dengan PT PELINDO untuk pengelolaan transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Di masa mendatang, kerjasama dengan Provinsi dan Wilayah Aglomerasi Surabaya Raya, utamanya dalam penyediaan transportasi publik perlu diintensifkan, karena setiap harinya rata-rata terdapat 390.777 perjalanan keluar-masuk Kota Surabaya yang sebagian besar berasal dari Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan, sehingga diperlukan kerjasama untuk menghadirkan transportasi publik untuk mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2024, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.180

Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (%)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2025

Tabel II.181

Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (%)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2024 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.182

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2025

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2024, terdapat 92 jalan kewenangan kota, 1 jalan kewenangan provinsi, dan 1 jalan kewenangan pusat yang memiliki V/C Ratio $\leq 0,90$ dari total 101 ruas jalan yang di-sampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,47 dan di tahun 2021 turun menjadi 0,42. Namun pada tahun 2022, rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya mengalami kenaikan

menjadi 0,75, dan tetap bertahan hingga tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024, rata-rata V/C ratio berhasil diturunkan menjadi 0,72. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.183
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata V/C Ratio	0,47	0,42	0,75	0,75	0,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Tabel II.184
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,295	0,54	0,85	0,80
2	Jl. Bengawan	kota	0,13	0,155	0,69	0,70	0,47
3	Jl. Blauran	kota	0,72	0,57	0,71	0,51	0,71
4	Jl. Bubutan	kota	0,4	0,82	0,81	0,44	0,84
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,4	0,27	0,72	0,84	0,67
6	Jl. Darmo	kota	0,5	0,545	0,88	0,76	0,75
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,12	0,065	0,58	0,56	0,37
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,34	0,27	0,89	0,70	0,54
9	Jl. Dinoyo	kota	0,28	0,195	0,69	0,80	0,74
10	Jl. Diponegoro	kota	0,42	0,45	0,58	0,69	0,73
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,42	0,49	0,86	0,79	0,84
12	Jl. Dr. Soetomo	kota	0,42	0,3	0,61	0,62	0,84
13	Jl. Embong Malang	kota	0,44	0,55	0,65	0,46	0,50
14	Jl. Gemblongan	kota	0,48	0,53	0,95	0,95	0,83
16	Jl. Gubeng pojok	kota	0,47	0,28	0,65	0,55	0,78
17	Jl. Gubernur Suryo	kota	0,67	0,32	0,69	0,60	0,68
18	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,17	0,14	0,52	0,86	0,74
19	Jl. Indragiri	kota	0,18	0,375	0,69	0,77	0,82
20	Jl. Indrapura	kota	0,83	0,8	0,76	0,74	0,61
21	Jl. Jagir Wonokromo	kota	0,18	0,315	0,61	0,60	0,72
22	Jl. Jakarta	kota	0,6	0,385	0,80	0,88	0,85
23	Jl. Joyoboyo	kota	0,22	0,545	0,78	0,87	0,77
24	Jl. Kapuas	kota	0,01	0,035	0,64	0,43	0,51
25	Jl. Kayoon	kota	0,23	0,25	0,64	0,78	0,81
26	Jl. Kedungdoro	kota	0,27	0,41	0,82	0,76	0,79
27	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,27	0,2	0,71	0,70	0,57
28	Jl. Kembang Jepun	kota	0,57	0,55	0,74	0,77	0,67
29	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,45	0,53	0,74	0,73	0,86
30	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,49	0,47	0,75	0,76	0,67

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
31	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,22	0,25	0,67	0,63	0,49
32	Jl. Mayjend HR. Muhammad	kota	0,26	0,565	0,72	0,98	0,81
34	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,44	0,475	0,92	0,94	0,79
35	Jl. Ngagel	kota	0,5	0,27	0,70	0,70	0,81
36	Jl. Pahlawan	kota	1,11	0,53	0,80	0,82	0,83
37	Jl. Pemuda	kota	0,79	0,83	0,86	0,90	0,90
38	Jl. Perak Barat	nasional	0,63	0,71	1,03	0,99	0,93
39	Jl. Perak Timur	nasional	0,54	0,41	1,16	0,96	0,91
40	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,16	0,22	0,79	0,78	0,59
41	Jl. Prof. Dr. Moestopo	kota	0,72	0,565	0,88	0,72	0,46
42	Jl. Rajawali	kota	0,83	0,51	0,76	0,76	0,78
43	Jl. Raya ITS	kota	0,19	0,23	0,49	0,65	0,44
44	Jl. Stasiun Wonokromo	kota	0,5	0,42	0,77	0,63	0,75
45	Jl. Sumatra	kota	0,37	0,02	0,72	0,78	0,40
46	Jl. Tunjungan	kota	1,03	0,58	0,66	0,87	0,49
47	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,55	0,475	0,87	0,70	0,69
48	Jl. Jendral Basuki Rachmat	kota	1,38	1,2	0,82	0,76	0,78
49	Jl. Jembatan Merah/ Jl. Veteran	kota	1,01	1,05	0,71	0,70	0,84
50	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,96	0,27	0,85	0,71	0,67
51	Jl. Keputran	kota	0,05	0,035	0,72	0,87	0,81
Rata-rata di jalan kewenangan kota			0,48	0,43	0,73	0,71	0,71
Rata-rata total			0,47	0,42	0,75	0,74	0,72

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Pada tabel di atas, rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang relatif tinggi di angka 0,72. Masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,90 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tertib saat berkendara, memasang rambu, dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.185
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya
Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	932	1.263	1.404	1.495	398

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2025

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.018.022 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari kabupaten/kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar-masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2021 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,04 menit dapat diturunkan tiap tahunnya, hingga triwulan I tahun 2025 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 18,68 menit, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.186
Rata-rata Lama Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	22,04	19,12	18,69	18,54	18,68

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021, rata-rata genangan setinggi 10,92 cm. Hingga triwulan I tahun 2025 ini, rata-rata tinggi genangan tersebut menjadi 10,01 centimeter sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.187
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	10,92	10,92	10,01	10,01	10,01

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, wilayah genangan Kota Surabaya seluas 452,57 hektar. Hingga triwulan I tahun 2025 ini, luas wilayah genangan terus menurun menjadi sebesar 365,61 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.188

Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Wilayah Genangan (ha)	452,57	432,09	400,74	378,17	365,61

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematuan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 67 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi.



Gambar II.17
Perangkat Smart Water Level

Optimalnya kinerja drainase secara umum pada tahun 2024 ini tidak lepas dari dilaksanakannya pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase pada 159 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematuan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran,

peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 116.531 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.189
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2021–2025 (TW I)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	6.400	1.324	3.002	9.594	10.685	368

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban pemeliharaan dan tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan nilai A- (95,12), sementara pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil mendapatkan nilai A- (100,67). Meski mendapat A-, namun evaluasi terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi.

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2021-2025 (Triwulan I) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.190
Jumlah Unjuk Rasa di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Politik	64	97	113	144	18
2	Bidang Ekonomi	142	165	55	77	25
3	Bidang Sosial Budaya	78	152	177	257	60
Jumlah unjuk rasa		284	414	345	478	103

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Jumlah unjuk rasa di Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga saat ini cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa secara signifikan yang didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Di tahun 2023, jumlah kejadian sedikit menurun, namun kembali meningkat di tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Selain bidang politik, tingginya kejadian unjuk rasa di tahun 2024 juga didominasi bidang sosial budaya. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan,

hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka perlu adanya pemantauan CCTV pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas serta penerangan jalan umum yang merata di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Tabel II.191

Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2021–2025 (TW I)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	1	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hukum dan Kerjasama menerbitkan Perda yang secara tidak langsung berkaitan dengan iklim usaha, salah satunya adalah Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perda ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi peredaran Narkotika, sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang kondusif.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.192

Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan D4/S1	303.41	287.516	290.887	297.446	301.325
2	Jumlah lulusan S2	21.179	19.976	20.615	21.304	21.961
3	Jumlah lulusan S3	1.405	1.412	1.518	1.617	1.732
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	325.994	308.904	313.020	320.367	325.018
5	Jumlah penduduk	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,109	0,104	0,105	0,106	0,108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Daya saing SDM salah satunya tercermin pada pemerataan gender dan tingkat pendidikan dalam angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja Kota Surabaya pada tahun 2024 sejumlah 1.624.822 orang atau sebesar 70,49 persen sedikit meningkat dibanding tahun 2023 sejumlah 1.569.714 orang atau sebesar 68,73 persen. Peningkatan ini diperkirakan karena dua hal, yang pertama karena peningkatan jumlah penduduk 15 tahun ke atas umumnya ini akan diikuti dengan kenaikan angkatan kerja. Yang kedua, karena adanya pergeseran (utamanya dari perempuan yang mengurus rumah tangga) dari kelompok bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja.

Berdasarkan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat setiap tahunnya mencapai 59,48 persen pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 57,61 persen. Sementara partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,92 persen pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yakni sebesar 80,25 persen. Semakin tinggi partisipasi perempuan untuk bekerja menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan yang berarti pengarusutamaan gender pada sektor ketenagakerjaan semakin baik.

Tabel II.193

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.325.749	2.337.229	2.348.058	2.283.993	2.305.008
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,05	67,30	69,99	68,73	70,49
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki	81,23	81,69	85,07	80,25	81,92
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35	53,44	55,46	57,61	59,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, angkatan kerja Kota Surabaya sejak tahun 2020 hingga 2024 didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan menengah atas, diikuti dengan pendidikan tinggi (universitas dan diploma), kemudian pendidikan menengah pertama, dan paling sedikit adalah pendidikan dasar ke bawah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.194
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja lulusan SD ke bawah	280.991	277.665	242.208	259.079	322.151
2	Jumlah angkatan kerja lulusan SMP	209.422	205.322	245.457	214.666	206.995
3	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Umum	364.391	361.454	446.306	375.281	745.186
4	Jumlah angkatan kerja lulusan SMA Kejuruan	344.292	348.882	331.289	367.480	
5	Jumlah angkatan kerja lulusan Diploma I/II/III	59.030	56.790	47.937	47.479	350.490
6	Jumlah angkatan kerja lulusan Universitas	324.438	322.775	330.117	305.729	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas. Sebesar 21,99 persen penduduk bekerja di Kota Surabaya berpendidikan perguruan tinggi, 45,38 persen berpendidikan menengah atas, dan sisanya tersebar pada lulusan SMP dan SD atau kurang sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.195
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2020–2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan SD ke bawah	287.732	268.174	255.077	238.468	245.250	311.017
2	Jumlah lulusan SMP	214.547	182.651	185.909	213.754	198.479	193.210
3	Jumlah lulusan SMA	330.195	322.011	319.721	392.352	342.080	368.673
4	Jumlah lulusan SMK	285.022	298.881	309.413	314.112	337.375	332.406
5	Jumlah lulusan perguruan tinggi	381.598	355.951	350.495	359.352	340.410	339.749

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya semakin menurun secara signifikan mencapai 4,91 persen pada tahun 2024 dibanding tahun 2022 yakni sebesar 7,62 persen. Penganggur terbuka yang dimaksud terdiri dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan

dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II.196
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengangguran	154.896	152.273	125.276	106.120	79.767
2	Tingkat pengangguran terbuka	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
3	Tingkat pengangguran terbuka laki-laki	10,79	10,77	9,66	7,30	4,85
4	Tingkat pengangguran terbuka perempuan	8,37	8,07	4,61	6,04	4,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagaimana tabel di bawah, pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2024 pada seluruh tingkat Pendidikan. Namun perlu dicermati bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2024 adalah pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA. Hal ini diperkirakan terjadi akibat belum optimalnya pasar kerja menyerap lulusan SMP dan SMA dan mereka juga tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara lulusan perguruan tinggi tercatat menurun dari 3,62 persen di tahun 2023 menjadi 3,06 persen di tahun 2024 menunjukkan tingginya kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel II.197
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengangguran terbuka lulusan SD ke bawah	4,56	8,13	1,54	5,34	3,46
2	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMP	12,78	9,45	12,92	7,54	6,66
3	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMA	11,63	11,55	12,09	8,85	6,28
4	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMK	13,19	11,31	5,18	8,19	5,52
5	Persentase pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi	7,18	7,66	4,95	3,62	3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, antara lain semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja dan meratanya gender dalam partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka terutama pada tingkat pendidikan tinggi, daya saing daerah sektor ketenagakerjaan Kota Surabaya dapat diproyeksikan semakin baik dan berkualitas pada periode ke depan. Kunci utama dalam daya saing sumber daya manusia adalah perbaikan kualitas pendidikan yang mampu membuka akses

terhadap berbagai kesempatan dan potensi pekerjaan, bukan hanya pada pasar kerja formal melainkan juga informal yang justru mampu menciptakan lowongan pekerjaan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi berada pada tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Tertinggi selanjutnya yakni berada pada tingkat pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana selayaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang semakin baik pula. Artinya, semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan, begitu sebaliknya. Sehingga besarnya proporsi jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut menjadi potensi tenaga kerja yang berdaya saing di pasar kerja. Ditambah lagi, untuk meningkatkan tenaga kerja di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan standar pasar tenaga kerja yang terus berkembang pesat.

2.1.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.198
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	688.478	675.558	686.916	678.456	666.337
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	186.272	193.749	208.815	220.805	231.656
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	874.750	869.307	895.731	899.261	897.993
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.095.980	2.101.645	2.092.132	2.110.025	2.120.029
6	Rasio ketergantungan	0,417	0,414	0,428	0,426	0,424

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada akhir tahun 2024, antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun sedikit menurun dari tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) meningkat dari tahun 2023. Sehingga rasio ketergantungan sedikit turun menjadi sebesar 0,424 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dengan demikian, program-program di tahun 2025 dan 2026 perlu dioptimalkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM pada kelompok usia produktif.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kota Surabaya pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel II.199

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	25	17	7	-	1
2	Tanpa Kelaparan	10	6	1	-	3

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Ada Target	Tidak Ada Data
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	33	22	7	-	4
4	Pendidikan Berkualitas	14	10	3	-	1
5	Kesetaraan Gender	14	7	5	-	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	12	1	-	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	-	-	-	-
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	11	-	-	7
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	8	2	-	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3	1	-	3
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	12	9	1	-	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	6	2	-	-	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	-	-
14	Ekosistem Lautan	0	-	-	-	-
15	Ekosistem Daratan	2	2	-	-	-
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	23	12	7	-	4
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	11	1	3	1
Total		207	133	37	3	34

Sumber: KLHS RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, 2025

Mengacu tabel di atas, sebanyak 170 indikator dari 207 indikator atau sebesar 82,13% indikator TPB memiliki relevansi/kesesuaian dengan indikator kinerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan seluruhnya telah mencapai predikat Tercapai dan Akan Tercapai untuk target tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Sebanyak 76 program dari 148 program pembangunan Kota Surabaya serta 109 kegiatan dari 1.666 kegiatan Pemerintah Kota Surabaya mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaksanaan TPB dengan dukungan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4,129 triliun.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk menyediakan data realisasi/kondisi terkini atas 37 indikator lainnya, dan sebanyak 34 indikator di antaranya tidak tersedia data, disebabkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa data tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk penyediaannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Pada tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

2.2.1.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencatat kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan ini mencapai 108,37% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sebesar 101,77%;
- 2) Kesehatan sebesar 102,92%;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 134,44%
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 112,64%
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 102,94%
- 6) Sosial sebesar 95,51%.

2.2.1.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencapai 107,71% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 23,13%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain disebabkan adanya permasalahan hukum terkait kepemilikan persil, nilai dan luasannya sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah yang akan dibebaskan sesuai prioritas pembangunan

Pemerintah Kota Surabaya. Penyelesaian permasalahan tersebut diupayakan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan pihak-pihak terkait utamanya mengenai tahapan pengadaan tanah skala kecil; verifikasi status alas hak persil dan subyek kepemilikan yang akan dibebaskan serta kesiapan pelaksanaan konsinyasi sampai dengan eksekusi. Rincian capaian per Bidang Urusan sebagai berikut:

- 1) Tenaga Kerja sebesar 105,98%;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 105,89%;
- 3) Pangan sebesar 154,48%;
- 4) Pertanahan sebesar 23,13%;
- 5) Lingkungan Hidup sebesar 108,21%;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 122,58%;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100,00%;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 169,40%;
- 9) Perhubungan sebesar 102,94%;
- 10) Komunikasi dan Informatika sebesar 106,38%;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 102,71%;
- 12) Penanaman Modal sebesar 107,56%;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga sebesar 104,92%;
- 14) Statistik sebesar 100,00%;
- 15) Persandian sebesar 102,19%;
- 16) Kebudayaan sebesar 101,67%;
- 17) Perpustakaan sebesar 117,78%;
- 18) Kearsipan sebesar 102,99%.

2.2.1.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 106,80% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

- 1) Kelautan dan Perikanan sebesar 103,50%;
- 2) Pariwisata sebesar 127,74%;
- 3) Pertanian sebesar 101,89%;
- 4) Perdagangan sebesar 100,76%;
- 5) Perindustrian sebesar 100,10%.

2.2.1.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 102,92% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar 105,97% dan Bidang Urusan Sekretariat DPRD sebesar 99,86%.

2.2.1.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 108,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sebesar 100,64%;
- 2) Keuangan sebesar 140,82%;
- 3) Kepegawaian sebesar 98,80%;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan sebesar 105,26%;
- 5) Penelitian dan Pengembangan sebesar 100,00%.

2.2.1.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,70% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 107,07% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 109,13% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 dan realisasi tahun keempat RPJMD 2021-2026 yang bersumber dari hasil monitoring

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2025, secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.200

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025 Triwulan I Kota Surabaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.065.645.443		1.012.986.877		1.129.140.344		203.344.980		18.01%		1.216.331.858		114.14%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94.13 %		95.06 %		93.34 %		97.43 %		104.38 %		97.43 %		103.51%		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.442.377		1.167.855		1.409.549		249.248		17.68%		1.417.103		31.90%		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		1 kegiatan		33.33 %		1 kegiatan		33.33 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.442.377		1.167.855		1.409.549		249.248		17.68%		1.417.103		31.90 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		10 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.029.406.176		1.003.060.241		1.115.127.923		201.898.746		18.11%		1.204.958.987		117.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.029.406.176		1.003.060.241		1.115.127.923		201.898.746		18.11%		1.204.958.987		117.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5929 Orang/bulan		8672 Orang/bulan		8621 Orang/bulan		8451 Orang/bulan		98.03 %		8451 Orang/bulan		142.54 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.331.194		527.660		768.926		55.416		7.21%		583.076		43.80%		
			Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.331.194		527.660		768.926		55.416		7.21%		583.076		43.80 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket		12 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.870.126		1.180.578		4.284.298		42.936		1.00%		1.223.513		25.12%		
			Persentase pemeliharaan dan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pengadaan sarana perkantoran															Pendidikan	
	1.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.870.126		1.180.578		4.284.298		42.936		1.00%		1.223.513		25.12 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	768 Unit		636 Unit		1029 Unit		116 Unit		11.27 %		116 Unit		15.10 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.595.570		7.050.544		7.549.648		1.098.634		14.55%		8.149.178		31.84%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.477.487		1.927.166		2.280.371		138.300		6.06%		2.065.466		83.37 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		23.118.083		5.123.378		5.269.276		960.335		18.23%		6.083.713		26.32 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
2	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1.278.141.505		938.158.205		1.179.620.098		98.078.953		8.31%		1.036.237.158		81.07%		
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	57%		29.01 %		48%		20.09 %		41.85 %		20.09 %		35.25%		Dinas Pendidikan	
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84.85 %		89.90 %		84.47 %		27.14 %		32.13 %		27.14 %		31.99%		Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100.31 %		100%		99.5 %		99.50 %		99.5 %		99.50%		Dinas Pendidikan	
			Persentase SD terakreditasi minimal B	95.04 %		91.89 %		94.59 %		92.24 %		97.52 %		92.24 %		97.05%		Dinas Pendidikan	
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	91.43 %		100.00 %		90.45 %		113.16 %		125.11 %		113.16 %		123.77%		Dinas Pendidikan	
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		100.00%		Dinas Pendidikan	
			Persentase SMP	97.44 %		93.47 %		97.12 %		95.33 %		98.16 %		95.33 %		97.83%		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			terakreditasi minimal B															Pendidikan	
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			642.779.016		449.540.137		519.132.359		42.151.250		8.12%		491.691.387		76.49%		
			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga		N/A		692 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.209.068		15.605.660		78.963.401		8.200		0.01%		15.613.860		15.28 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit		7 Unit		17 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			188.257		129.432		165.472		5.600		3.38%		135.032		71.73 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		259 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			6.043.654		1.173.854		2.154.242		219.403		10.18%		1.393.258		23.05 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik		71409 Peserta Didik		73986 Peserta Didik		58906 Peserta Didik		79.62 %		58906 Peserta Didik		79.62 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah			7.328.937		5.590.505		15.422.968		5.600		0.04%		5.596.105		76.36 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			148.042.295		207.308.110		205.615.560		5.600		0.00%		207.313.710		140.04 %		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan		590 Satuan Pendidikan		587 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			30.802.004		957.578		931.055		42.227		4.54%		999.805		3.25 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang		4563 Orang		3135 Orang		3155 Orang		100.64 %		3155 Orang		100.64 %		Dinas Pendidikan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.01.0054		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		320.687.503		201.244.127		200.768.139		40.573.829		20.21%		241.817.956		75.41 %		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik		38170 Peserta Didik		85997 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		320.597		380.161		442.312		42.915		9.70%		423.076		131.97 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		649 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		27.156.702		14.118.909		14.669.210		1.247.876		8.51%		15.366.784		56.59 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	205 Unit		155 Unit		155 Unit		35 Unit		22.58 %		35 Unit		17.07 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		362.852.051		269.767.923		358.837.368		27.715.403		7.72%		297.483.326		81.98%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga		376 Lembaga		305 Lembaga		284 Lembaga		93.11 %		284 Lembaga		93.11 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Dinas Pendidikan	
			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan		4 laporan		4 laporan		1 laporan		25.00 %		1 laporan		25.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		68.139.379		8.950.794		85.180.410		5.600		0.01%		8.956.394		13.14 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		3 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		441.521		115.350		204.123		38.200		18.71%		153.550		34.78 %		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258 Satuan Pendidikan		323 Satuan Pendidikan		257 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		4.584.334		1.858.329		3.804.208		293.925		7.73%		2.152.254		46.95 %		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2280 Peserta Didik		2283 Peserta Didik		2220 Peserta Didik		238 Peserta Didik		10.72 %		238 Peserta Didik		10.44 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		6.779.353		7.227.272		1.484.015		5.600		0.38%		7.232.872		106.69 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		80.429.498		122.890.065		125.412.830		5.600		0.00%		122.895.665		152.80 %		
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan		272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		13.494.310		591.675		776.800		34.594		4.45%		626.270		4.64 %		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang		2061 Orang	1013 Orang		1019 Orang		100.59 %		1019 Orang		100.59 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		170.635.719		117.494.791		129.509.218		26.582.610		20.53%		144.077.402		84.44 %		
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37574 Peserta Didik		16259 Peserta Didik	38574 Peserta Didik		3415 Peserta Didik		8.85 %		3415 Peserta Didik		9.09 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		243.465		357.050		484.900		19.600		4.04%		376.650		154.70 %		
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	330 Satuan Pendidikan		38606 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		18.104.473		10.282.595		11.980.865		729.673		6.09%		11.012.269		60.83 %		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit		22 Unit	18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		155.588.380		121.707.959		163.796.533		11.289.890		6.89%		132.997.848		85.48%		
				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
				Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
				Jumlah laporan pencairan jasa belayanan pendidik PAUD	4 laporan		12 laporan	4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
				Jumlah laporan pencairan jasa belayanan pendidik PAUD	4 laporan		12 laporan	4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		716.291		445.878		763.112		13.400		1.76%		459.278		64.12 %		
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan		2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0009		Pengadaan Perlengkapan PAUD		742.276		83.016		243.728		18.026		7.40%		101.043		13.61 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket		4 Paket		3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD		69.014.400		60.265.082		58.642.480		0		0.00%		60.265.082		87.32 %		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan		2217 Satuan Pendidikan		2479 Satuan Pendidikan		2245 Satuan Pendidikan		90.56 %		2245 Satuan Pendidikan		90.56 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		8.420.251		2.456.244		5.017.056		5.600		0.11%		2.461.844		29.24 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang		3176 Orang		3092 Orang		1197 Orang		38.71 %		1197 Orang		38.71 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		161.215		4.317.893		5.165.801		795.404		15.40%		5.113.297		3,171.72 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik		349 Peserta Didik		209 Peserta Didik		209 Peserta Didik		100.00 %		209 Peserta Didik		100.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0047		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		76.002.570		53.360.624		93.362.428		10.457.460		11.20%		63.818.084		83.97 %		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidikan		88778 Peserta Didik		88878 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0045		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		531.376		732.720		601.929		0		0.00%		732.720		137.89 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		6 Unit		3 Unit		2 Unit		66.67 %		2 Unit		66.67 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		116.922.057		97.142.187		137.853.838		16.922.410		12.28%		114.064.597		97.56%		
			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari		1.01 hari		5 hari		1 hari		180.00 %		1 hari		180.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah laporan pencairan jasa belayanan pendidik kesetaraan	4 laporan		12 laporan		4 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		135.748		70.200		101.830		5.600		5.50%		75.800		55.84 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan		162 Satuan Pendidikan		153 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0040		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		297.779		29.117		749.813		0		0.00%		29.117		9.78 %		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah	2 Paket		2 Paket		2 Paket		1 Paket		50.00 %		1 Paket		50.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang Tersedia															Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		6.791.865		4.463.004		5.272.910		0		0.00%		4.463.004		65.71 %		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		25 Satuan Pendidikan		92.59 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		113.511		51.512		76.703		5.600		7.30%		57.112		50.31 %		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		253 Orang		250 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		849.600		4.752.198		7.698.602		879.160		11.42%		5.631.358		662.82 %		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik		35 Peserta Didik		40 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		108.733.554		87.776.156		123.953.981		16.032.050		12.93%		103.808.206		95.47 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2822 Peserta Didik		34 Peserta Didik		2812 Peserta Didik		0 Peserta Didik		0.00 %		0 Peserta Didik		0.00 %		Dinas Pendidikan	
3	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		134.346.197		36.829.912		41.240.062		5.524.200		13.40%		42.354.112		31.53%		
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05		0.06		0.05		0.06		120.00 %		0.06		120.00%		Dinas Pendidikan	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05		0.05		0.05		0.05		100.00 %		0.05		100.00%		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		134.346.197		36.829.912		41.240.062		5.524.200		13.40%		42.354.112		31.53%		
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		8856 orang		7725 orang		9928 orang		128.52 %		9928 orang		128.52 %		Dinas Pendidikan	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang		N/A		12685 orang		13301 orang		104.86 %		13301 orang		104.86 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan		133.374.035		36.629.450		40.544.000		5.518.600		13.61%		42.148.050		31.60 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan		434 Laporan		350 Laporan		435 Laporan		124.29 %		435 Laporan		124.29 %		Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.0001			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		972.162		200.462		696.062		5.600		0.80%		206.062		21.20 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pendidikan	
	1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
4	1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.104.548.933		1.206.071.060		1.682.447.600		143.911.802		8.55%		1.349.982.861		122.22%		
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	83%		88.89 %		82.95 %		88.89 %		107.16 %		88.89 %		107.10%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		92.21 %		89%		98.14 %		110.27 %		98.14 %		110.27%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		89.94 %		100%		91.3 %		91.30 %		91.3 %		91.30%		Dinas Kesehatan	
				Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	84%		95.96 %		82%		92.93 %		113.33 %		92.93 %		110.63%		RSUD Bhakti Dharma Husada	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	%		0.00		85%		95.39 %		112.22 %		95.39 %		N/A		RSUD Eka Candrarini	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		91.22 %		87.95 %		91.44 %		103.97 %		91.44 %		103.91%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan		374.216.829		462.685.411		868.528.585		119.030.070		13.70%		581.715.482		155.45%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perangkat Daerah																
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35.732.522		58.842.549		77.005.757		15.250.767		19.80%		74.093.316		207.36 %	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		478 Orang/bulan		478 Orang/bulan		473 Orang/bulan		98.95 %		473 Orang/bulan		246.35 %		RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			71.091.174		97.524.819		127.934.243		25.788.261		20.16%		123.313.081		173.46 %	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		809 Orang/bulan		811 Orang/bulan		804 Orang/bulan		99.14 %		804 Orang/bulan		178.67 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			267.393.133		306.318.043		627.838.694		75.214.825		11.98%		381.532.868		142.69 %	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1174 Orang/bulan		2240 Orang/bulan		2253 Orang/bulan		2206 Orang/bulan		97.91 %		2206 Orang/bulan		187.90 %		Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		0		35.749.891		2.776.217		7.77%		2.776.217		N/A	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		127 Orang/bulan		35 Orang/bulan		27.56 %		35 Orang/bulan		N/A		RSUD Eka Candrarini
	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.082.258		10.301.570		8.236.810		35.560		0.43%		10.337.130		127.90%	
				Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini
				Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.082.258		10.301.570		766.868		35.560		4.64%		10.337.130		127.90 %	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		9 Unit		4 Unit		1 Unit		25.00 %		1 Unit		25.00 %		Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		0		7.469.942		0		0.00%		0		N/A	
				Jumlah Unit Sarana dan	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		RSUD Eka

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															Candrarini	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.831.229		127.430.411		165.368.027		24.846.171		15.02%		152.276.582		60.95%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			72.073.629		1.352.019		1.798.494		388.000		21.57%		1.740.019		2.41 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.112.416		1.102.000		1.210.000		232.000		19.17%		1.334.000		2.96 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.645.183		124.976.391		102.615.612		21.047.770		20.51%		146.024.162		110.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Laporan		16.67 %		2 Laporan		16.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		59.743.920		3.178.401		5.32%		3.178.401		N/A		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		N/A		RSUD Eka Candrarini	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			472.418.617		605.653.668		640.314.179		0		0.00%		605.653.668		128.20%		
			Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang			304.879.739		274.658.191		295.816.172		0		0.00%		274.658.191		90.09 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		166.477.578		167.340.752		167.920.381		0		0.00%		167.340.752		100.52 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.061.298		163.654.725		174.827.622		0		0.00%		163.654.725		15420%		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (63 Puskesmas)	63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		63 Unit Kerja		100.00 %		63 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0		0		1.750.000		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	N/A		N/A		1 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0.00 %		0 Unit Kerja		N/A		Dinas Kesehatan	
5	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		717.960.756		1.065.252.803		1.035.267.081		125.040.747		12.08%		1.190.293.550		165.79%		
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		100.00 %		100%		23.02 %		23.02 %		23.02 %		23.02%		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Rumah Sehat	88.22 %		88.42 %		88.21 %		88.51 %		100.34 %		88.51 %		100.33%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	60%		60.32 %		58%		25.4 %		43.79 %		25.4 %		42.33%		Dinas Kesehatan	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.100 %		0.08 %		0.101 %		0.04 %		160.40 %		0.04 %		160.00		Dinas Kesehatan	
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas	100%		100.00 %		100%		10.74 %		10.74 %		10.74 %		10.74%		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembantu																
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	%		0.00		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	%		0.00		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	84.13 %		100.00 %		82.54 %		100%		121.15 %		100%		118.86%		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usaha	82.65 %		100.00 %		82.60 %		28.54 %		34.55 %		28.54 %		34.53%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit	%		0.00		90%		99.23 %		110.26 %		99.23 %		N/A		RSUD Eka Candrarini	-
			Persentase Jaminan Kesehatan	98.00 %		99.30 %		97.60 %		94.6 %		96.93 %		94.6 %		96.53%		Dinas Kesehatan	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	100%		104.72 %		98%		104.7 %		106.84 %		104.7 %		104.70%		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %		100.00 %		98.08 %		100%		101.96 %		100%		101.96%		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Cakupan Pertolongan Pergeseran Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinkes)	99.21 %		100.29 %		99.20 %		12.74 %		12.84 %		12.74 %		12.84%		Dinas Kesehatan	-
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.07 %		100.86 %		99.06 %		15.33 %		15.48 %		15.33 %		15.47%		Dinas Kesehatan	-
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			175.358.764		529.103.302		511.131.113		540.475		0.11%		529.643.777		302.03%		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		64 Unit		64 Unit		64 Unit		100.00 %		64 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	-
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	-
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-
			Persentase Pemenuhan	100%		100%		100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		RSUD Bhakti	-

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Dharma Husada	
																		RSUD Eka Candrarini	
																		RSUD Eka Candrarini	
																		Dinas Kesehatan	
																		Dinas Kesehatan	
																		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas			0		11.179.738		10.000.000		0		0.00%		11.179.738		N/A		
																		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			110.381.289		423.106.433		353.443.210		0		0.00%		423.106.433		383.31 %		
																		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20.455.226		3.329.056		4.194.182		5.600		0.13%		3.334.656		16.30 %		
																		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			8.332.225		1.307.811		12.865.629		8.400		0.07%		1.316.211		15.80 %		
																		RSUD Bhakti Dharma Husada	
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.772.987		49.642		1.432.448		8.400		0.59%		58.042		3.27 %		
																		RSUD dr. Mohamad	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Soewandhie	
	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.388.852		68.602.020		4.244.536		0		0.00%		68.602.020		4.939.48 %		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		88 Unit		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0		0		55.140.055		2.600		0.00%		2.600		N/A		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		9.093.726		2.286.447		23.670.595		6.538		0.03%		2.292.985		25.22 %		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		6 Paket		2 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		0		0		9.830.144		500.737		5.09%		500.737		N/A		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	N/A		N/A		3 Paket		3 Paket		100.00 %		3 Paket		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		101.369		41.000		71.200		8.200		11.52%		49.200		48.54 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		4 Unit		3 Unit		1 Unit		33.33 %		1 Unit		33.33 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit		103.983		15.366.331		27.850.077		0		0.00%		15.366.331		14,777.80 %		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		RSUD Bhakti Dharma Husada	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit																
	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		926.120		317.573		250.000		0		0.00%		317.573		34.29 %		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		22.802.988		1.654.752		8.139.036		0		0.00%		1.654.752		7.26 %		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		484.382.171		534.537.125		519.502.232		124.471.214		23.96%		659.008.339		136.05%		
			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan		3 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		100.00 %		153 Kelurahan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		6 kegiatan		4 kegiatan		2 kegiatan		50.00 %		2 kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan		6 kegiatan		4 kegiatan		2 kegiatan		50.00 %		2 kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		64 Puskesmas		101.59 %		64 Puskesmas		101.59 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		100.00 %		3 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah puskesmas yang	63 Puskesmas		N/A		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular														Kesehatan		
					Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen		145 Dokumen		70 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		N/A		700 Lokasi		271 Lokasi		38.71 %		271 Lokasi		38.71 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		100.00 %		2 kegiatan		100.00 %		Dinas Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
					Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		-83935 jiwa		105 jiwa		0 jiwa		0.00 %		0 jiwa		0%		Dinas Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	76.198		131.944		7.981		6.05%		84.179		N/A			
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	49.345		115.500		6.796		5.88%		56.140		N/A			
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0034				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0	168.892		153.755		0		0.00%		168.892		N/A			
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (63 Puskesmas)	N/A		756 Dokumen		756 Dokumen		124 Dokumen		16,40%		124 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0033				Operasional Pelayanan		773.640	42.768.309		47.779.639		2.405.916		5.06%		45.174.230		5839,18%			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Puskesmas																
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen	756 Dokumen		130 Dokumen		17,20%		130 Dokumen		17,20%		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		19.478.405		2.374.442		622.389		11.200		1.80%		2.385.642		12,25 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		20 Dokumen	12 Dokumen		5 Dokumen		41,67 %		5 Dokumen		41,67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		973.287		950.160		6.487.611		0		0,00%		950.160		97,62%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen	756 Dokumen		129 Dokumen		17,06%		129 Dokumen		17,06%		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0028			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		0		887.249		918.131		23.712		2,58%		910.961		N/A		
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	N/A		2 Paket	2 Paket		0 Paket		0,00 %		0 Paket		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0026			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		434.139.730		438.970.123		426.213.353		121.657.939		28,54%		560.628.062		129,14 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		2 Dokumen		16,67 %		2 Dokumen		16,67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0047			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		0		0		227280		0		0,00%		0		N/A		
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan pelayanan (63 Puskesmas)	N/A		N/A	63 Dokumen		0 Dokumen		0,00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		175.559		396.902		773.719		54.746		7,08%		451.648		257,26 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		2 Dokumen		16,67 %		2 Dokumen		16,67 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		0		0		2.377.186		0		0.00%		0		N/A		
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A		N/A	152252 Orang		57960 Orang		38.07 %		57960 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		0		385.176		387.650		0		0.00%		385.176		N/A		
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	N/A		40590 Orang	4401 Orang		4361 Orang		99.09 %		4361 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		25.123		164.789		301.789		0		0.00%		164.789		655,93%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen	756 Dokumen		128 Dokumen		16,93%		128 Dokumen		16,93%		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		3.281.051		0		110.000		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41553 Orang		N/A	37187 Orang		6452 Orang		17.35 %		6452 Orang		15.53 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		9.146.714		2.409.272		4.358.980		51.921		1.19%		2.461.193		26.91 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang		36837 Orang	43532 Orang		8383 Orang		19.26 %		8383 Orang		19.26 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.280		65.340		0		0.00%		14.280		426.31 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang		1022 Orang	739 Orang		265 Orang		35.86 %		265 Orang		35.86 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		7.320		23.232		0		0.00%		7.320		218.53 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang		189 Orang	220 Orang		48 Orang		21.82 %		48 Orang		21.82 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang		412 Orang	540 Orang		113 Orang		20.93 %		113 Orang		20.93 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.640		46.464		0		0.00%		9.640		287.79 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang		188 Orang	217 Orang		50 Orang		23.04 %		50 Orang		23.04 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		4.880		46.464		0		0.00%		4.880		145.68 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang		575 Orang	929 Orang		197 Orang		21.21 %		197 Orang		21.21 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.040		75.504		0		0.00%		19.040		568.41 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang		786 Orang	825 Orang		187 Orang		22.67 %		187 Orang		22.67 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.520		23.232		0		0.00%		19.520		582.74 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang		562 Orang	673 Orang		148 Orang		21.99 %		148 Orang		21.99 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang		658 Orang	760 Orang		173 Orang		22.76 %		173 Orang		22.76 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.520		75.504		0		0.00%		19.520		582.74 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1029 Orang		540 Orang	1029 Orang		183 Orang		17.78 %		183 Orang		17.78 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		6.100		23.232		0		0.00%		6.100		182.11 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang		311 Orang	360 Orang		81 Orang		22.50 %		81 Orang		22.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.400		65.340		0		0.00%		9.400		280.62 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang		964 Orang	1286 Orang		161 Orang		12.52 %		161 Orang		12.52 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		16.225		75.504		0		0.00%		16.225		484.37 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang		499 Orang	670 Orang		135 Orang		20.15 %		135 Orang		20.15 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang		715 Orang	595 Orang		104 Orang		17.48 %		104 Orang		17.48 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		13.680		75.504		0		0.00%		13.680		408.39 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	969 Orang		888 Orang	969 Orang		215 Orang		22.19 %		215 Orang		22.19 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		56.628		0		0.00%		14.640		437.05 %		
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang		725 Orang	813 Orang		118 Orang		14.51 %		118 Orang		14.51 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan		3.350		4.820		23.232		0		0.00%		4.820		143.89 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesehatan Ibu Hamil																
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang		624 Orang		277 Orang		122 Orang		44.04 %		122 Orang		44.04 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		10.300		46.464		0		0.00%		10.300		307.49 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		282 Orang		295 Orang		67 Orang		22.71 %		67 Orang		22.71 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang		298 Orang		819 Orang		64 Orang		7.81 %		64 Orang		7.81 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		572 Orang		846 Orang		183 Orang		21.63 %		183 Orang		21.63 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		17.600		75.504		0		0.00%		17.600		525.42 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang		806 Orang		853 Orang		70 Orang		8.21 %		70 Orang		8.21 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang		449 Orang		577 Orang		90 Orang		15.60 %		90 Orang		15.60 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		18.050		75.504		0		0.00%		18.050		538.85 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1109 Orang		970 Orang		1109 Orang		286 Orang		25.79 %		286 Orang		25.79 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.100		75.504		0		0.00%		19.100		570.20 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang		491 Orang		686 Orang		82 Orang		11.95 %		82 Orang		11.95 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		24.160		46.464		0		0.00%		24.160		721.26 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang		514 Orang		606 Orang		157 Orang		25.91 %		157 Orang		25.91 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang		242 Orang		292 Orang		64 Orang		21.92 %		64 Orang		21.92 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.520		46.464		0		0.00%		19.520		582.74 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang		530 Orang		403 Orang		158 Orang		39.21 %		158 Orang		39.21 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.400		65.340		0		0.00%		14.400		429.89 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang		458 Orang		600 Orang		115 Orang		19.17 %		115 Orang		19.17 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		8.800		46.464		0		0.00%		8.800		262.71 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	399 Orang		228 Orang		399 Orang		64 Orang		16.04 %		64 Orang		16.04 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		17.325		46.464		0		0.00%		17.325		517.21 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang		608 Orang		698 Orang		101 Orang		14.47 %		101 Orang		14.47 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		387 Orang		261 Orang		77 Orang		29.50 %		77 Orang		29.50 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang		763 Orang		848 Orang		200 Orang		23.58 %		200 Orang		23.58 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		18.300		65.340		0		0.00%		18.300		546.32 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang		712 Orang		899 Orang		171 Orang		19.02 %		171 Orang		19.02 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		7.680		65.340		0		0.00%		7.680		229.27 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang		275 Orang		459 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1158 Orang		973 Orang		1158 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		4.850		23.232		0		0.00%		4.850		144.79 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang		727 Orang		821 Orang		189 Orang		23.02 %		189 Orang		23.02 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.060		65.340		0		0.00%		14.060		419.74 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang	616 Orang		350 Orang		616 Orang		52 Orang		8.44 %		52 Orang		8.44 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang		789 Orang		844 Orang		227 Orang		26.90 %		227 Orang		26.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.700		46.464		0		0.00%		9.700		289.58 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang		638 Orang		755 Orang		269 Orang		35.63 %		269 Orang		35.63 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang		393 Orang		533 Orang		111 Orang		20.83 %		111 Orang		20.83 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang		342 Orang		415 Orang		81 Orang		19.52 %		81 Orang		19.52 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang		544 Orang		610 Orang		114 Orang		18.69 %		114 Orang		18.69 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		19.280		75.504		0		0.00%		19.280		575.57 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang		902 Orang		1078 Orang		208 Orang		19.29 %		208 Orang		19.29 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	642 Orang		556 Orang		642 Orang		131 Orang		20.40 %		131 Orang		20.40 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		6.600		23.232		0		0.00%		6.600		197.03 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang		498 Orang		784 Orang		113 Orang		14.41 %		113 Orang		14.41 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.460		65.340		0		0.00%		14.460		431.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang		476 Orang		536 Orang		105 Orang		19.59 %		105 Orang		19.59 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.760		46.464		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	455 Orang		552 Orang		703 Orang		139 Orang		19.77 %		139 Orang		30.55 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesehatan Sesuai Standar																
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		4.880		23.232		0		0.00%		4.880		145.68 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang		417 Orang		455 Orang		347 Orang		76.26 %		347 Orang		49.36 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		18.560		75.504		0		0.00%		18.560		554.08 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang		974 Orang		1347 Orang		313 Orang		23.24 %		313 Orang		23.24 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang		986 Orang		618 Orang		143 Orang		23.14 %		143 Orang		23.14 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.550		46.464		0		0.00%		14.550		434.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang		489 Orang		788 Orang		152 Orang		19.29 %		152 Orang		19.29 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		5.760		23.232		0		0.00%		5.760		171.96 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang		1005 Orang		1051 Orang		110 Orang		10.47 %		110 Orang		10.47 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		9.610		46.464		0		0.00%		9.610		286.89 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang		454 Orang		604 Orang		106 Orang		17.55 %		106 Orang		17.55 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		13.200		65.340		0		0.00%		13.200		394.07 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang		1216 Orang		1164 Orang		132 Orang		11.34 %		132 Orang		11.34 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		6.600		23.232		0		0.00%		6.600		197.03 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang		227 Orang		245 Orang		60 Orang		24.49 %		60 Orang		24.49 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang		378 Orang		586 Orang		47 Orang		8.02 %		47 Orang		15.77 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		3.350		18.680		23.232		0		0.00%		18.680		557.66 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang		219 Orang		298 Orang		67 Orang		22.48 %		67 Orang		11.43 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		9.760		26.136		0		0.00%		9.760		291.37 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang		575 Orang		942 Orang		162 Orang		17.20 %		162 Orang		17.20 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		21.960		65.340		0		0.00%		21.960		655.58 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang		329 Orang		354 Orang		57 Orang		16.10 %		57 Orang		16.10 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang		549 Orang		719 Orang		141 Orang		19.61 %		141 Orang		19.61 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		17.600		75.504		0		0.00%		17.600		525.42 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang		666 Orang		732 Orang		184 Orang		25.14 %		184 Orang		25.14 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		65.340		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang		705 Orang		846 Orang		203 Orang		24.00 %		203 Orang		24.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		14.640		23.232		0		0.00%		14.640		437.05 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang		458 Orang		613 Orang		111 Orang		18.11 %		111 Orang		18.11 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.350		11.280		23.232		0		0.00%		11.280		336.75 %		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang		1049 Orang		1123 Orang		89 Orang		7.93 %		89 Orang		7.93 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0		0		41.970		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	N/A		N/A		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.942.877		777.031		397.000		12.904		3.25%		789.935		26.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.743.398		0		67.750		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (63	N/A		N/A		756 Dokumen		126 Dokumen		16,67%		2 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Puskesmas)																
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0		12.222		27.000		0		0.00%		12.222		N/A		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A		10 Orang		10 Orang		1 Orang		10.00 %		1 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		490.000		2.178		0.44%		2.178		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		5552 Orang		3129 Orang		56.36 %		3129 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		88 Orang		105 Orang		119.32 %		105 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		18 Orang		64.29 %		18 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		52 Orang		34 Orang		65.38 %		34 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		9 Orang		32.14 %		9 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		115 Orang		84 Orang		73.04 %		84 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.520		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		53 Orang		46.09 %		53 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		68 Orang		33 Orang		48.53 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		4.500		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		105 Orang		49 Orang		46.67 %		49 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		110 Orang		21 Orang		19.09 %		21 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		42 Orang		44 Orang		104.76 %		44 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.510		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		172 Orang		32 Orang		18.60 %		32 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan		0		0		2.430		0		0.00%		0		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		81 Orang		42 Orang		51.85 %		42 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		75 Orang		29 Orang		38.67 %		29 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.580		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		114 Orang		19 Orang		16.67 %		19 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		112 Orang		128 Orang		114.29 %		128 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		39 Orang		19 Orang		48.72 %		19 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		33 Orang		9 Orang		27.27 %		9 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.160		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		85 Orang		10 Orang		11.76 %		10 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.420		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		97 Orang		34 Orang		35.05 %		34 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		8 Orang		8.00 %		8 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		83 Orang		107.79 %		83 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		152 Orang		41 Orang		26.97 %		41 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		87 Orang		23 Orang		26.44 %		23 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0		0		4.140		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		74 Orang		477 Orang		644.59 %		477 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan			0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		36 Orang		12 Orang		33.33 %		12 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.340		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		46 Orang		10 Orang		21.74 %		10 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		84 Orang		47 Orang		55.95 %		47 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.700		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		56 Orang		57 Orang		101.79 %		57 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.815		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		97 Orang		8 Orang		8.25 %		8 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.800		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		28 Orang		33 Orang		117.86 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.880		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		105 Orang		15 Orang		14.29 %		15 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		7.020		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		128 Orang		46 Orang		35.94 %		46 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		92 Orang		55 Orang		59.78 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		148 Orang		63 Orang		42.57 %		63 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		4.500		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		87 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		2.880		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		53 Orang		68.83 %		53 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		101 Orang		31 Orang		30.69 %		31 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan		0		0		4.500		0		0.00%		0		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		59 Orang		51.30 %		59 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		66 Orang		40 Orang		60.61 %		40 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.600		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		58 Orang		18 Orang		31.03 %		18 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		4.320		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		73 Orang		35 Orang		47.95 %		35 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		138 Orang		61 Orang		44.20 %		61 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.580		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		4.860		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		87 Orang		42 Orang		48.28 %		42 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		7.380		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		132 Orang		36 Orang		27.27 %		36 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.420		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		61 Orang		14 Orang		22.95 %		14 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		6.300		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		100 Orang		23 Orang		23.00 %		23 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		7.020		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		135 Orang		55 Orang		40.74 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.710		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		77 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.040		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		91 Orang		32 Orang		35.16 %		32 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan		0		0		6.660		0		0.00%		0		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Gangguan Jiwa Berat																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		115 Orang		161 Orang		140.00 %		161 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		69 Orang		33 Orang		47.83 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		143 Orang		139 Orang		97.20 %		139 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		32 Orang		33 Orang		103.13 %		33 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.980		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		37 Orang		17 Orang		45.95 %		17 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.760		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		102 Orang		38 Orang		37.25 %		38 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.960		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	N/A		N/A		113 Orang		41 Orang		36.28 %		41 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		1.440		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		50 Orang		163 Orang		326.00 %		163 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		105 Orang		55 Orang		52.38 %		55 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.940		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		109 Orang		46 Orang		42.20 %		46 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		3.060		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		111 Orang		50 Orang		45.05 %		50 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		4.140		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		73 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0		0		5.400		0		0.00%		0		N/A		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	N/A		N/A		126 Orang		51 Orang		40.48 %		51 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan		0		756.798		841.880		0		0.00%		756.798		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			HIV (ODHIV)																
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1477 Orang	205 Orang		534 Orang		260.49 %		534 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		3.350		1.057.352		455.082		66.008		14.50%		1.123.360		33,536.14 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 Orang		39500 Orang	52741 Orang		11761 Orang		22.30 %		11761 Orang		952.31 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0040			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		0		710.160		977.288		0		0.00%		710.160		N/A		
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2079 Orang	666 Orang		451 Orang		67.72 %		451 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		13.451.339		488.160		109.312		22.39%		13.560.650		404,831.78 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang		84039 Orang	60512 Orang		30293 Orang		50.06 %		30293 Orang		50.06 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		3.600		19.872		0		0.00%		3.600		107.47 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang		1604 Orang	949 Orang		219 Orang		23.08 %		219 Orang		23.08 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		600		16.872		0		0.00%		600		17.91 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang		428 Orang	283 Orang		28 Orang		9.89 %		28 Orang		9.89 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		2.640		18.432		0		0.00%		2.640		78.81 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang		914 Orang	707 Orang		244 Orang		34.51 %		244 Orang		34.51 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		900		17.472		0		0.00%		900		26.87 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	293 Orang		389 Orang	293 Orang		82 Orang		27.99 %		82 Orang		27.99 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		60		16.362		0		0.00%		60		1.79 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang		1501 Orang		1293 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		16.512		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang		1561 Orang		1179 Orang		7820 Orang		663.27 %		7820 Orang		663.27 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.980		17.472		0		0.00%		1.980		59.11 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang		995 Orang		712 Orang		290 Orang		40.73 %		290 Orang		40.73 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		7.200		23.472		0		0.00%		7.200		214.94 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang		1307 Orang		1164 Orang		264 Orang		22.68 %		264 Orang		22.68 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		9.450		17.712		0		0.00%		9.450		282.11 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang		1552 Orang		1216 Orang		332 Orang		27.30 %		332 Orang		27.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		840		17.172		0		0.00%		840		25.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang		835 Orang		463 Orang		200 Orang		43.20 %		200 Orang		43.20 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		7.020		21.672		0		0.00%		7.020		209.57 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang		3478 Orang		1879 Orang		363 Orang		19.32 %		363 Orang		19.32 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan		3.350		0		17.712		0		0.00%		0		0.00 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang		1117 Orang		887 Orang		359 Orang		40.47 %		359 Orang		40.47 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		180		16.632		0		0.00%		180		5.37 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang		1035 Orang		834 Orang		303 Orang		36.33 %		303 Orang		36.33 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.260		18.072		0		0.00%		1.260		37.62 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang		1640 Orang		1203 Orang		211 Orang		17.54 %		211 Orang		17.54 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		720		18.672		0		0.00%		720		21.49 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang		1891 Orang		1273 Orang		413 Orang		32.44 %		413 Orang		32.44 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		2.580		17.712		0		0.00%		2.580		77.02 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang		539 Orang		423 Orang		193 Orang		45.63 %		193 Orang		45.63 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.560		19.872		0		0.00%		1.560		46.57 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang		616 Orang		354 Orang		479 Orang		135.31 %		479 Orang		135.31 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		720		17.712		0		0.00%		720		21.49 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang		1866 Orang		917 Orang		569 Orang		62.05 %		569 Orang		62.05 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		23.472		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga	1067 Orang		1778 Orang		1067 Orang		308 Orang		28.87 %		308 Orang		28.87 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar															Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		17.172		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang		1380 Orang		1065 Orang		263 Orang		24.69 %		263 Orang		24.69 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		420		17.172		0		0.00%		420		12.54 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang		1671 Orang		847 Orang		117 Orang		13.81 %		117 Orang		13.81 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		90		16.992		0		0.00%		90		2.69 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang		2326 Orang		1514 Orang		561 Orang		37.05 %		561 Orang		37.05 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		240		16.632		0		0.00%		240		7.16 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang		1074 Orang		917 Orang		242 Orang		26.39 %		242 Orang		26.39 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang		1687 Orang		750 Orang		716 Orang		95.47 %		716 Orang		95.47 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.520		17.532		0		0.00%		2.520		75.23 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang		1186 Orang		391 Orang		711 Orang		181.84 %		711 Orang		181.84 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.160		18.432		0		0.00%		2.160		64.48 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang		540 Orang		496 Orang		183 Orang		36.90 %		183 Orang		36.90 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		600		17.352		0		0.00%		600		17.91 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang		1159 Orang	941 Orang		299 Orang		31.77 %		299 Orang		31.77 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		780		16.572		0		0.00%		780		23.29 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang		681 Orang	593 Orang		3858 Orang		650.59 %		3858 Orang		650.59 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang		1262 Orang	1029 Orang		393 Orang		38.19 %		393 Orang		38.19 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		6.840		23.472		0		0.00%		6.840		204.20 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang		407 Orang	298 Orang		104 Orang		34.90 %		104 Orang		34.90 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		16.572		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang		1536 Orang	1163 Orang		251 Orang		21.58 %		251 Orang		21.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		6.360		21.660		0		0.00%		6.360		189.87 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang		1606 Orang	1323 Orang		1259 Orang		95.16 %		1259 Orang		95.16 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.500		17.772		0		0.00%		1.500		44.78 %		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang		1081 Orang	1010 Orang		200 Orang		19.80 %		200 Orang		19.80 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.320		20.592		0		0.00%		1.320		39.41 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang		2039 Orang		1649 Orang		536 Orang		32.50 %		536 Orang		32.50 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		19.872		0		0.00%		0		0.00 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang		1188 Orang		932 Orang		257 Orang		27.58 %		257 Orang		27.58 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		540		20.592		0		0.00%		540		16.12 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang		1105 Orang		843 Orang		362 Orang		42.94 %		362 Orang		42.94 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		6.420		21.072		0		0.00%		6.420		191.66 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang		1970 Orang		1137 Orang		412 Orang		36.24 %		412 Orang		36.24 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		6.930		22.872		0		0.00%		6.930		206.88 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang		1367 Orang		1268 Orang		76 Orang		5.99 %		76 Orang		5.99 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.110		17.172		0		0.00%		1.110		33.14 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang		617 Orang		741 Orang		185 Orang		24.97 %		185 Orang		24.97 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		1.800		16.932		0		0.00%		1.800		53.74 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang		935 Orang		630 Orang		111 Orang		17.62 %		111 Orang		17.62 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		16.872		0		0.00%		0		0.00 %		
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	798 Orang		1361 Orang		798 Orang		555 Orang		69.55 %		555 Orang		69.55 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sesuai Standar																
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		4.320		18.432		0		0.00%		4.320		128.97 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang		1560 Orang		1535 Orang		710 Orang		46.25 %		710 Orang		46.25 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.632		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 Orang		1273 Orang		1115 Orang		103 Orang		9.24 %		103 Orang		9.24 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		360		16.992		0		0.00%		360		10.75 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang		1200 Orang		945 Orang		101 Orang		10.69 %		101 Orang		10.69 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		870		18.072		0		0.00%		870		25.97 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang		2756 Orang		1444 Orang		213 Orang		14.75 %		213 Orang		14.75 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		300		17.712		0		0.00%		300		8.96 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang		1105 Orang		1127 Orang		400 Orang		35.49 %		400 Orang		58.82 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		360		17.352		0		0.00%		360		10.75 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 Orang		867 Orang		680 Orang		195 Orang		28.68 %		195 Orang		17.30 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		16.272		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang		1376 Orang		1383 Orang		487 Orang		35.21 %		487 Orang		35.21 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga			3.350		900		16.872		0		0.00%		900		26.87 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang		1002 Orang		840 Orang		247 Orang		29.40 %		247 Orang		29.40 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.200		12.800		0		0.00%		7.200		214.94 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang		1524 Orang		1018 Orang		329 Orang		32.32 %		329 Orang		32.32 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		6.300		17.712		0		0.00%		6.300		188.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang		1251 Orang		1246 Orang		81 Orang		6.50 %		81 Orang		6.50 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		2.100		18.672		0		0.00%		2.100		62.69 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang		2033 Orang		779 Orang		416 Orang		53.40 %		416 Orang		53.40 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		840		9.220		0		0.00%		840		25.08 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang		2884 Orang		1562 Orang		151 Orang		9.67 %		151 Orang		9.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		3.600		19.872		0		0.00%		3.600		107.47 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang		429 Orang		354 Orang		117 Orang		33.05 %		117 Orang		33.05 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		7.200		21.312		0		0.00%		7.200		214.94 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang		1078 Orang		1148 Orang		397 Orang		34.58 %		397 Orang		108.77 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.350		0		14.160		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1148 Orang		1424 Orang		365 Orang		96 Orang		26.30 %		96 Orang		8.36 %		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		4.200		17.472		0		0.00%		4.200		125.38 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang		1528 Orang		1194 Orang		313 Orang		26.21 %		313 Orang		26.21 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		540		16.572		0		0.00%		540		16.12 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang		647 Orang		552 Orang		73 Orang		13.22 %		73 Orang		13.22 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		0		18.192		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang		1483 Orang		1176 Orang		277 Orang		23.55 %		277 Orang		23.55 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		180		17.352		0		0.00%		180		5.37 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang		1464 Orang		1186 Orang		261 Orang		22.01 %		261 Orang		22.01 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		480		16.362		0		0.00%		480		14.33 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang		1966 Orang		1196 Orang		532 Orang		44.48 %		532 Orang		44.48 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		3.000		18.972		0		0.00%		3.000		89.56 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang		968 Orang		829 Orang		193 Orang		23.28 %		193 Orang		23.28 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.350		3.570		17.772		0		0.00%		3.570		106.58 %		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang		1765 Orang		1404 Orang		285 Orang		20.30 %		285 Orang		20.30 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan		4.295.627		28.000		112.095		5.600		5.00%		33.600		0.78 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesehatan pada Usia Lanjut																
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang		367909 Orang		337268 Orang		99501 Orang		29.50 %		99501 Orang		29.50 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		1.380		1.200		0		0.00%		1.380		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3990 Orang		5706 Orang		1138 Orang		19.94 %		1138 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.850		1.050		0		0.00%		2.850		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1357 Orang		1656 Orang		152 Orang		9.18 %		152 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		6.210		1.260		0		0.00%		6.210		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1659 Orang		3874 Orang		281 Orang		7.25 %		281 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		3.960		1.320		0		0.00%		3.960		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1454 Orang		1608 Orang		431 Orang		26.80 %		431 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		3.420		1.140		0		0.00%		3.420		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2794 Orang		6988 Orang		729 Orang		10.43 %		729 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.850		3.600		0		0.00%		2.850		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5526 Orang		6896 Orang		1321 Orang		19.16 %		1321 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		3.450		1.350		0		0.00%		3.450		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	N/A		9593 Orang		4331 Orang		255 Orang		5.89 %		255 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	standar		0	7.500		5.400		0		0.00%		7.500		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2657 Orang		5976 Orang		985 Orang		16.48 %		985 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	2.880	2.880		2.580		0		0.00%		2.880		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1144 Orang		6383 Orang		176 Orang		2.76 %		176 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	2.490	2.490		1.200		0		0.00%		2.490		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1114 Orang		3074 Orang		357 Orang		11.61 %		357 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	3.330	3.330		1.140		0		0.00%		3.330		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		7158 Orang		10240 Orang		797 Orang		7.78 %		797 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	6.120	6.120		3.120		0		0.00%		6.120		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2083 Orang		4690 Orang		954 Orang		20.34 %		954 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	1.140	1.140		1.920		0		0.00%		1.140		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1491 Orang		4449 Orang		229 Orang		5.15 %		229 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	1.500	1.500		1.800		0		0.00%		1.500		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3579 Orang		6652 Orang		937 Orang		14.09 %		937 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0	4.440	4.440		2.280		0		0.00%		4.440		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pendidikan Dasar																
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4324 Orang		6300 Orang		810 Orang		12.86 %		810 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		1.050		900		0		0.00%		1.050		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1809 Orang		2299 Orang		613 Orang		26.66 %		613 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.730		1.170		0		0.00%		2.730		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1940 Orang		2048 Orang		339 Orang		16.55 %		339 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		6.720		1.440		0		0.00%		6.720		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		8127 Orang		4565 Orang		1973 Orang		43.22 %		1973 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		780		1.620		0		0.00%		780		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4541 Orang		5505 Orang		1845 Orang		33.51 %		1845 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		1.020		2.610		0		0.00%		1.020		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3787 Orang		6006 Orang		1045 Orang		17.40 %		1045 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		840		660		0		0.00%		840		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1947 Orang		4530 Orang		497 Orang		10.97 %		497 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		1.410		1.620		0		0.00%		1.410		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	N/A		10378 Orang		7997 Orang		3999 Orang		50.01 %		3999 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			elayanan kesehatan sesuai standar																
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		870		1.620		0		0.00%		870		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1605 Orang		5361 Orang		254 Orang		4.74 %		254 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		540		720		0		0.00%		540		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4490 Orang		6861 Orang		797 Orang		11.62 %		797 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		7.560		2.520		0		0.00%		7.560		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3399 Orang		2058 Orang		148 Orang		7.19 %		148 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.400		960		0		0.00%		2.400		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2165 Orang		2626 Orang		434 Orang		16.53 %		434 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		5.820		2.460		0		0.00%		5.820		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2749 Orang		4993 Orang		259 Orang		5.19 %		259 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		4.740		3.300		0		0.00%		4.740		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2357 Orang		3397 Orang		3 Orang		0.09 %		3 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		3.600		2.700		0		0.00%		3.600		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6750 Orang		5718 Orang		772 Orang		13.50 %		772 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan		0		9.480		1.260		0		0.00%		9.480		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2501 Orang			1631 Orang		432 Orang		26.49 %		432 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		0		1.680		0		0.00%		0		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4704 Orang			6600 Orang		799 Orang		12.11 %		799 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.460		1.200		0		0.00%		2.460		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4082 Orang			7453 Orang		622 Orang		8.35 %		622 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.250		3.600		0		0.00%		2.250		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4822 Orang			5331 Orang		250 Orang		4.69 %		250 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		2.340		4.350		0		0.00%		2.340		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1144 Orang			8294 Orang		284 Orang		3.42 %		284 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		150		1.020		0		0.00%		150		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		748 Orang			5274 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		1.320		2.520		0		0.00%		1.320		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6252 Orang			4483 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0		4.560		2.040		0		0.00%		4.560		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan	N/A		4941 Orang			5796 Orang		496 Orang		8.56 %		496 Orang		N/A	Dinas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar															Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		6.480		4.050		0		0.00%		6.480		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2979 Orang		6772 Orang		1240 Orang		18.31 %		1240 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.550		1.260		0		0.00%		2.550		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3572 Orang		3893 Orang		413 Orang		10.61 %		413 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.350		1.800		0		0.00%		1.350		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3798 Orang		3698 Orang		245 Orang		6.63 %		245 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.500		2.760		0		0.00%		1.500		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5253 Orang		4033 Orang		2960 Orang		73.39 %		2960 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.250		1.800		0		0.00%		2.250		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4761 Orang		8285 Orang		490 Orang		5.91 %		490 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.400		1.680		0		0.00%		2.400		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2474 Orang		5544 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		960		1.200		0		0.00%		960		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4669 Orang		5372 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.590		3.240		0		0.00%		1.590		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6341 Orang		7599 Orang		325 Orang		4.28 %		325 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		11.280		4.680		0		0.00%		11.280		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3438 Orang		4170 Orang		1459 Orang		34.99 %		1459 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.980		2.160		0		0.00%		1.980		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1694 Orang		5640 Orang		681 Orang		12.07 %		681 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		8.100		4.350		0		0.00%		8.100		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		10624 Orang		8152 Orang		884 Orang		10.84 %		884 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		11.010		2.040		0		0.00%		11.010		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2451 Orang		4512 Orang		243 Orang		5.39 %		243 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		4.050		1.560		0		0.00%		4.050		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		14406 Orang		5973 Orang		6018 Orang		100.75 %		6018 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.650		1.890		0		0.00%		1.650		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5908 Orang		7354 Orang		631 Orang		8.58 %		631 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		9.060		3.960		0		0.00%		9.060		N/A		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5130 Orang		4285 Orang		1724 Orang		40.23 %		1724 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.470		300		0		0.00%		1.470		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		12202 Orang		8704 Orang		3677 Orang		42.24 %		3677 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		3.300		1.890		0		0.00%		3.300		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3380 Orang		1832 Orang		789 Orang		43.07 %		789 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.800		1.320		0		0.00%		1.800		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		1947 Orang		2402 Orang		96 Orang		4.00 %		96 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		2.190		1.500		0		0.00%		2.190		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		5706 Orang		6072 Orang		412 Orang		6.79 %		412 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		5.790		1.800		0		0.00%		5.790		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		6227 Orang		7137 Orang		1511 Orang		21.17 %		1511 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.440		1.080		0		0.00%		1.440		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		499 Orang		2687 Orang		122 Orang		4.54 %		122 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0		1.890		2.070		0		0.00%		1.890		N/A		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	N/A		5855 Orang		6253 Orang		952 Orang		15.22 %		952 Orang		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	standar		0	0		3.240		0		0.00%		0		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		4211 Orang		6257 Orang		1190 Orang		19.02 %		1190 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0	2.400		3.600		0		0.00%		2.400		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		2810 Orang		6172 Orang		501 Orang		8.12 %		501 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0	6.300		2.640		0		0.00%		6.300		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3814 Orang		4345 Orang		178 Orang		4.10 %		178 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0	4.770		3.060		0		0.00%		4.770		N/A		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		3627 Orang		8525 Orang		187 Orang		2.19 %		187 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.226.155	1.198.520		1.312.197		11.200		0.85%		1.209.720		37.50 %		
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang		1427657 Orang		2034759 Orang		300867 Orang		14.79 %		300867 Orang		14.79 %	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0	1.300.365		55.000		0		0.00%		1.300.365		N/A		
				Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A		91045 Orang		104362 Orang		23036 Orang		22.07 %		23036 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			18.866	124.862		133.000		0		0.00%		124.862		661.84 %		
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang		612182 Orang		749560 Orang		73585 Orang		9.82 %		73585 Orang		9.82 %	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0	0		485.491		0		0.00%		0		N/A		
				Jumlah dokumen hasil	N/A		N/A		63 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		N/A	Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (63 Puskesmas)															Kesehatan	
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			315.144		341.866		461.000		28.400		6.16%		370.266		117.49 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0		353.169		184.850		0		0.00%		353.169		N/A		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			438.104		92.047		107.873		15.401		14.28%		107.448		24.53 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			422.037		6.361.948		425.178		0		0.00%		6.361.948		1507,44%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		128 Dokumen		16,93%		128 Dokumen		16,93%		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			0		243.375		38.400		0		0.00%		243.375		N/A		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		N/A		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			363.311		1.255.623		123.973		14.700		11.86%		1.270.323		349.65%		
			Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi		3 Aplikasi		3 Aplikasi		0 Aplikasi		0.00 %		0 Aplikasi		0.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			363.311		1.255.623		123.973		14.700		11.86%		1.270.323		349.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		20.00 %		1 Dokumen		20.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			57.856.510		356.754		4.509.762		14.357		0.32%		371.111		0.64%		
			Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga		126 Lembaga		122 Lembaga		29 Lembaga		23.77 %		29 Lembaga		23.77 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	N/A		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		47.189.112		287.954		844.298		5.600		0.66%		293.554		0.62 %		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		100.00 %		63 Unit		100.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		0		0		3.476.799		3.157		0.09%		3.157		N/A		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	N/A		N/A		1 Unit		1 Unit		100.00 %		1 Unit		N/A		RSUD Eka Candrarini	
	1.02.02.2.04.0004		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		10.667.398		68.800		188.666		5.600		2.97%		74.400		0.70 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
6	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		3.841.543		2.197.926		2.255.217		19.367		0.86%		2.217.293		57.72%		
			Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	53.52 %		53.72 %		53.51 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		3.841.543		219.399		519.375		19.367		3.73%		238.766		6.22%		
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang		289 Orang		63 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.841.543		219.399		519.375		19.367		3.73%		238.766		6.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		1.978.527		1.735.842		0		0.00%		1.978.527		N/A		
			Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	N/A		4 Kegiatan		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		N/A		Dinas Kesehatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan		0	1.978.527		1.735.842		0		0.00%		1.978.527		N/A		
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	N/A		289 Orang		189 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		N/A	Dinas Kesehatan	
7	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.790.371	159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93%		
				Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2.790.371	159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93%		
				Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT		217 PIRT		217 PIRT		34 PIRT		15.67 %		34 PIRT		15.67 %	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			2.790.371	159.921		476.543		5.600		1.18%		165.521		5.93 %		
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit		157 Unit		150 Unit		34 Unit		22.67 %		34 Unit		22.67 %	Dinas Kesehatan	
8	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			66.842.725	188.642.062		1.178.720		22.400		1.90%		188.664.462		282.25%		
				Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.118.740	121.912		181.415		5.600		3.09%		127.512		1.26%		
				Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		153 Kelurahan		99.35 %		153 Kelurahan		99.35 %	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan			10.118.740	121.912		181.415		5.600		3.09%		127.512		1.26 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Hidup Bersih dan Sehat																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56.723.985		188.520.150		997.305		16.800		1.68%		188.536.950		332.38%		
			Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		3 Kegiatan		50.00 %		3 Kegiatan		50.00 %		Dinas Kesehatan	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		100.00 %		63 Puskesmas		100.00 %		Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			54.013.675		179.927.583		780.975		16.800		2.15%		179.944.383		333.15 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.710.308		8.592.573		216.320		0		0.00%		8.592.573		317,03%		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (63 Puskesmas)	756 Dokumen		756 Dokumen		756 Dokumen		189 Dokumen		25.00 %		189 Dokumen		25.00 %		Dinas Kesehatan	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
9 1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.419.812		127.475.076		140.369.904		26.191.564		18.66%		153.666.640		113.47%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.75 %		92.96 %		86.50 %		94.45 %		109.19 %		94.45 %		108.88%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%		99.13 %		95%		99.13 %		104.35 %		99.13 %		104.35%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran,			344.372		68.900		157.174		28.600		18.20%		97.500		28.31%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		344.372		68.900		157.174		28.600		18.20%		97.500		28.31 %		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58.347.173		47.035.201		51.223.248		10.685.580		20.86%		57.720.781		98.93%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		58.347.173		47.035.201		51.223.248		10.685.580		20.86%		57.720.781		98.93 %		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan		202 Orang/bulan	202 Orang/bulan		199 Orang/bulan		98.51 %		199 Orang/bulan		101.02 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.691.809		4.996.415		5.756.463		790.072		13.72%		5.786.487		54.12%		
				Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.691.809		4.996.415		5.756.463		790.072		13.72%		5.786.487		54.12 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.036.458		75.374.560		83.233.019		14.687.312		17.65%		90.061.872		136.38%		
				Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
				Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		300 unit	300 unit		51 unit		17.00 %		51 unit		15.36 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34.268.991		47.245.936		51.848.762		13.259.814		25.57%		60.505.750		176.56 %		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		7 Unit	6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan		17.184.882		14.348.713		16.093.425		309.527		1.92%		14.658.240		85.30 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
			Alat Besar																	
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	76 Unit		73 Unit		73 Unit		13 Unit		17.81 %		13 Unit		17.11 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14.582.585		13.779.911		15.290.832		1.117.971		7.31%		14.897.882		102.16 %			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit		227 Unit		227 Unit		38 Unit		16.74 %		38 Unit		15.64 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
10	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30%		
				Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30%			
				Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		63 unit		70 unit		36 unit		51.43 %		36 unit		56.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.02.2.01.0085		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		50.157.841		58.689.280		51.297.298		12.184.966		23.75%		70.874.246		141.30 %			
				Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	285 Unit		270 Unit		290 Unit		52 Unit		17.93 %		52 Unit		18.25 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
11	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		9.306.760		8.310.266		7.140.326		1.338.419		18.74%		9.648.685		103.67%			
				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		913.00 m3		917 m3		227 m3		24.75 %		227 m3		24.59%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
				Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		9.306.760		8.310.266		7.140.326		1.338.419		18.74%		9.648.685		103.67%			
				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		75.00 %		3 Jenis		75.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
				jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang	2 kelurahan		1 kelurahan		2 kelurahan		121 kelurahan		6,050.00 %		121 kelurahan		6,050.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				dibangun														Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		7.156.794		6.437.102		5.676.666		1.327.289		23.38%		7.764.390		108.49 %		
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit		96 Unit	96 Unit		24 Unit		25.00 %		24 Unit		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		2.149.966		1.107.264		1.463.660		11.131		0.76%		1.118.395		52.02 %		
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga		200 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga		361 Rumah Tangga		722.00 %		361 Rumah Tangga		722.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
12	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		582.830.777		399.243.503		881.484.794		286.592.173		32.51%		685.835.676		117.67%		
				Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		582.830.777		399.243.503		881.484.794		286.592.173		32.51%		685.835.676		117.67%		
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		52 lokasi	200 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		85 dokumen	80 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1299 lokasi	1000 lokasi		159 lokasi		15.90 %		159 lokasi		13.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0031		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		103.393.336		80.794.488		70.845.353		18.356.152		25.91%		99.150.640		95.90 %		
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan		30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan		22 Sistem Drainase Perkotaan		73.33 %		22 Sistem Drainase Perkotaan		73.33 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		125.161.494		40.483.649		353.128.226		41.986.732		11.89%		82.470.380		65.89 %		
				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M		9685.02 M	10000 M		0 M		0.00 %		0 M		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0029		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		246.834.073		234.552.490		250.672.022		192.046.004		76.61%		426.598.494		172.83 %		
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan		21 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0025		Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		10.118.188		11.241.774		9.210.978		48.471		0.53%		11.290.246		111.58 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan		16 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0030		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		8.038.411		4.009.967		7.306.392		5.011.525		68.59%		9.021.492		112.23 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen		56 Dokumen		50 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.06.2.01.0028		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		89.285.275		28.161.135		190.321.824		29.143.289		15.31%		57.304.424		64.18 %		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	15 Sistem Drainase Perkotaan		10 Sistem Drainase Perkotaan		15 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		0 Sistem Drainase Perkotaan		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
13	1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		3.183.407		1.693.033		2.193.756		214.012		9.76%		1.907.045		59.91%		
			Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11%		10.03 %		9%		1.44 %		16.00 %		1.44 %		13.09%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3.183.407		1.693.033		2.193.756		214.012		9.76%		1.907.045		59.91%		
			Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas		243 berkas		240 berkas		60 berkas		25.00 %		60 berkas		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Dokumen		15 Dokumen		13 Dokumen		6 Dokumen		46.15 %		6 Dokumen		42.86 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.0018		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		1.771.015		1.006.157		1.413.022		109.159		7.73%		1.115.316		62.98 %		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit		243 Unit		240 Unit		60 Unit		25.00 %		60 Unit		25.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.07.2.01.0030		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		1.412.391		686.877		780.734		104.853		13.43%		791.729		56.06 %		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan	13 Unit		15 Unit		13 Unit		7 Unit		53.85 %		7 Unit		53.85 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
14	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi		315.023.875		217.399.864		328.262.338		64.097.485		19.53%		281.497.349		89.36%		
			Persentase bangunan yang ber IMB	2.69 %		1.93 %		2.51 %		0.69 %		27.49 %		0.69 %		25.65%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	90%		58.91 %		87%		67.42 %		77.49 %		67.42 %		74.91%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	91.25 %		90.86 %		90.99 %		11.82 %		12.99 %		11.82 %		12.95%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			315.023.875		217.399.864		328.262.338		64.097.485		19.53%		281.497.349		89.36%		
			Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	248 Bangunan		256 Bangunan		246 Bangunan		38 Bangunan		15.45 %		38 Bangunan		15.32 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1768 Berkas		2503 Berkas		1756 Berkas		758 Berkas		43.17 %		758 Berkas		42.87 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1907 Lokasi		2108 Lokasi		1893 Lokasi		622 Lokasi		32.86 %		622 Lokasi		32.62 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			8.725.773		5.573.497		6.135.320		3.042.002		49.58%		8.615.498		98.74 %		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	65 Dokumen		68 Dokumen		63 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.08.2.01.0022		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			3.517.554		1.337.490		1.790.467		162.221		9.06%		1.499.711		42.64 %		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang		2124 Orang		1861 Orang		622 Orang		33.42 %		622 Orang		33.42 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.08.2.01.0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota			38.016.233		39.029.058		30.200.143		3.409.555		11.29%		42.438.613		111.63 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung		167 Bangunan Gedung		161 Bangunan Gedung		38 Bangunan Gedung		23.60 %		38 Bangunan Gedung		23.60 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.08.2.01.0017		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			257.832.869		169.439.525		286.190.604		57.227.461		20.00%		226.666.987		87.91 %		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	140 Bangunan Gedung		142 Bangunan Gedung		140 Bangunan Gedung		0 Bangunan Gedung		0.00 %		0 Bangunan Gedung		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		6.187.321		1.771.494		3.348.039		247.846		7.40%		2.019.340		32.64 %		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.08.2.01.0019		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		744.126		248.800		597.764		8.400		1.41%		257.200		34.56 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
15	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		604.516.934		468.777.911		711.160.967		140.262.609		19.72%		609.040.520		100.75%		
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		53.290.07 meter		11700 meter		0 meter		0.00 %		0 meter		0.00%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		446,332.96 m2		190000 m2		62175.15 m2		32.72 %		62175.15 m2		29.61%		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		604.516.934		468.777.911		711.160.967		140.262.609		19.72%		609.040.520		100.75%		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi		3525 lokasi		1501 lokasi		1317 lokasi		87.74 %		1317 lokasi		87.74 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang	338 lokasi		218 lokasi		325 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dibangun															Bina Marga	
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		6 lokasi		2 lokasi		1 lokasi		50.00 %		1 lokasi		50.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		146 dokumen		137 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.10.2.01.0041		Pelebaran Jalan Menambah Lajur			221.175.434		182.559.259		185.275.192		764.652		0.41%		183.323.912		82.89 %		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM		1.02 KM		0.6 KM		0.03 KM		5.00 %		0.03 KM		5.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan			273.886.986		204.002.703		414.412.327		116.238.693		28.05%		320.241.397		116.92 %		
			Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan			87.885.919		61.484.751		91.113.766		19.150.562		21.02%		80.635.313		91.75 %		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM		179.27 KM		40 KM		30.26 KM		75.65 %		30.26 KM		75.65 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.10.2.01.0030		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			14.182.828		9.416.856		9.229.012		111.122		1.20%		9.527.978		67.18 %		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	11.7 KM		53.29 KM		11.7 KM		0 KM		0.00 %		0 KM		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			7.385.767		6.572.291		11.130.669		3.997.580		35.91%		10.569.871		143.11 %		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen		77 Dokumen		70 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
16	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99%		
			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	100%		100.00 %		97%		21.43 %		22.09 %		21.43 %		21.43%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan			982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tenaga Terampil Konstruksi																
			Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis		5 jenis		5 jenis		1 jenis		20.00 %		1 jenis		20.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.11.2.01.0011		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		982.825		472.175		629.803		87.936		13.96%		560.111		56.99 %		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga		12 Lembaga		14 Lembaga		3 Lembaga		21.43 %		3 Lembaga		21.43 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
17	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		14.227.131		4.836.772		4.512.080		575.206		12.75%		5.411.977		38.04%		
			Persentase pelayanan penataan ruang	96%		102.19 %		96%		35.36 %		36.83 %		35.36 %		36.83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) Kabupaten/Kota		3.956.284		3.029.703		3.027.558		335.188		11.07%		3.364.892		85.05%		
			Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.01.0003		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		3.956.284		3.029.703		3.027.558		335.188		11.07%		3.364.892		85.05 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi		10.270.847		1.807.068		1.484.522		240.017		16.17%		2.047.086		19.93%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.12.2.03.0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			2.713.270		740.720		659.149		128.660		19.52%		869.381		32.04 %		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.03.12.2.03.0007		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			7.557.576		1.066.348		825.373		111.357		13.49%		1.177.705		15.58 %		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Dokumen		1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi		0.00 %		0 Sistem Informasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
18	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.352.356		30.288.848		41.298.546		6.608.839		16.00%		36.897.687		65.48%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Keseekretariatian	89.5 %		95.32 %		89%		96.01 %		107.88 %		96.01 %		107.27%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.04.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.425		41.600		78.582		11.700		14.89%		53.300		44.26%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.04.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen			120.425		41.600		78.582		11.700		14.89%		53.300		44.26 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			7 Dokumen		1 Dokumen		14.29 %		1 Dokumen		12.50 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		43.233.748		26.633.975		31.250.731		6.100.518		19.52%		32.734.493		75.72%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%			100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		43.233.748		26.633.975		31.250.731		6.100.518		19.52%		32.734.493		75.72 %		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan			100 Orang/bulan		98 Orang/bulan		98.00 %		98 Orang/bulan		120.99 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.664.298		2.935.398		7.074.258		426.838		6.03%		3.362.236		34.79%		
				Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis			3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.664.298		2.935.398		7.074.258		426.838		6.03%		3.362.236		34.79 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket			15 Paket		5 Paket		33.33 %		5 Paket		33.33 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.333.885		677.875		2.894.974		69.782		2.41%		747.657		22.43%		
				Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis			2 Jenis		2 Jenis		100.00 %		2 Jenis		100.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.333.885		677.875		2.894.974		69.782		2.41%		747.657		22.43 %		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		89 Unit		98 Unit		33 Unit		33.67 %		33 Unit		33.67 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30%		
			Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%		85.70 %		100%		86.95 %		86.95 %		86.95 %		86.95%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30%		
			Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5157 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		5233 Unit Hunian		100.00 %		5233 Unit Hunian		101.47 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.02.2.05.0002		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		40.719.101		14.764.802		20.266.176		3.274.006		16.16%		18.038.807		44.30 %		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	105 Dokumen		109 Dokumen		109 Dokumen		109 Dokumen		100.00 %		109 Dokumen		103.81 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
20	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82%		
			Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	100%		111.87 %		97%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas		18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
			Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.03.2.03.0002		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		18.599.004		67.779.206		89.581.794		3.236.224		3.61%		71.015.430		381.82 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	405 Unit Rumah		1678 Unit Rumah		1000 Unit Rumah		0 Unit Rumah		0.00 %		0 Unit Rumah		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
21	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42%		
			Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42%		
			Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi		9 lokasi		8 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		96.664.080		18.485.100		21.192.044		1.250.689		5.90%		19.735.789		20.42 %		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	10 Unit Rumah		9 Unit Rumah		10 Unit Rumah		0 Unit Rumah		0.00 %		0 Unit Rumah		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki															Permukiman serta Pertanahan	
22	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47%		
			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	100%		91.23 %		80%		97.37 %		121.71 %		97.37 %		97.37%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47%		
			Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen		22 dokumen		12 dokumen		5 dokumen		41.67 %		5 dokumen		41.67 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.260.047		1.251.052		1.156.286		279.508		24.17%		1.530.559		121.47 %		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		62 Laporan		12 Laporan		7 Laporan		58.33 %		7 Laporan		58.33 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
23	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.085.239		75.642.490		84.857.398		16.557.950		19.51%		92.200.440		95.96%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%		96.14 %		94%		98.53 %		104.82 %		98.53 %		103.72%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%		97.65 %		88%		94.66 %		107.57 %		94.66 %		107.57%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98%		96.79 %		97.5 %		98.85 %		101.38 %		98.85 %		100.87%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.722.492		64.615.020		71.326.178		14.554.223		20.41%		79.169.243		99.31%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.585.968		30.078.852		32.141.823		6.780.027		21.09%		36.858.879		98.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		128 Orang/bulan		129 Orang/bulan		127 Orang/bulan		98.45 %		127 Orang/bulan		96.21 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.269.993		10.305.919		11.558.414		2.342.959		20.27%		12.648.878		103.09 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		34 Orang/bulan		35 Orang/bulan		33 Orang/bulan		94.29 %		33 Orang/bulan		132.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			29.866.532		24.230.249		27.625.941		5.431.237		19.66%		29.661.486		99.31 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		103 Orang/bulan		103 Orang/bulan		101 Orang/bulan		98.06 %		101 Orang/bulan		90.99 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.872.334		4.050.898		6.015.098		806.288		13.40%		4.857.186		70.68%		
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			773.782		291.730		689.327		59.824		8.68%		351.554		45.43 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.659.697		1.986.388		2.083.448		310.575		14.91%		2.296.963		138.40 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		18 Paket		17 Paket		4 Paket		23.53 %		4 Paket		23.53 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.438.855		1.772.780		3.242.323		435.890		13.44%		2.208.670		49.76 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		4 Paket		23.53 %		4 Paket		23.53 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.490.413		6.976.572		7.516.123		1.197.440		15.93%		8.174.011		86.13%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		100.00 %		3 paket		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.935.520		1.376.075		1.514.056		229.202		15.14%		1.605.278		82.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.004.199		3.170.644		3.254.609		519.427		15.96%		3.690.071		92.16 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.550.694		2.429.853		2.747.457		448.810		16.34%		2.878.663		81.07 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
24	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38.444.848		77.914.627		73.766.230		18.174.703		24.64%		96.089.330		249.94%		
			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase PPNS yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.779.392		72.841.318		66.376.003		17.278.237		26.03%		90.119.555		259.12%		
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1520 Orang		1296 Orang		1400 Orang		320 Orang		22.86 %		320 Orang		21.05 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah pelaksanaan	192 Kali		210 Kali		192 Kali		47 Kali		24.48 %		47 Kali		24.48 %		Satuan Polisi	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja															Pamong Praja	
			Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		11 Lembaga		100.00 %		11 Lembaga		100.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	116 Titik/Lokasi		104 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		110 Titik/Lokasi		100.00 %		110 Titik/Lokasi		94.83 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			527.904		983.297		1.363.390		130.061		9.54%		1.113.358		210.90 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			31.434.907		66.895.116		59.931.094		16.142.179		26.93%		83.037.295		264.16 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			2.167.280		2.088.405		2.176.670		520.984		23.93%		2.609.389		120.40 %		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra			464.625		2.578.166		2.476.254		441.925		17.85%		3.020.091		650.01 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang		1426 Orang	1279 Orang		379 Orang		29.63 %		379 Orang		38.75 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0017			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		124.031		195.609	265.413		32.200		12.13%		227.809		183.67 %			
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01.0008			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		60.646		100.725	163.182		10.888		6.67%		111.613		184.04 %			
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		3.550.376		4.930.420	7.180.572		880.202		12.26%		5.810.621		163.66%			
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek		96 Objek	94 Objek		29 Objek		30.85 %		29 Objek		30.85 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek		4975 Objek	4230 Objek		939 Objek		22.20 %		939 Objek		22.20 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0011			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		1.865.433		3.769.190	4.955.041		731.184		14.76%		4.500.374		241.25 %			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0012			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan		417.432		741.855	958.019		149.018		15.55%		890.873		213.42 %			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0010			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.267.511		419.375		1.267.511		0		0.00%		419.375		33.09 %		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		115.079		142.890		209.655		16.264		7.76%		159.154		138.30%		
				Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	65 Orang		79 Orang	70 Orang		20 Orang		28.57 %		20 Orang		30.77 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.03.0006			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		115.079		142.890		209.655		16.264		7.76%		159.154		138.30 %		
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Satuan Polisi Pamong Praja	
25	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		48.680.383		26.341.243		24.685.487		5.409.697		21.91%		31.750.940		65.22%		
				Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		99.82 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%		99.99 %	100%		99.72 %		99.72 %		99.72 %		99.72%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		20.320.538		1.608.223		2.046.547		212.249		10.37%		1.820.472		8.96%		
				Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan		42 Kegiatan	42 Kegiatan		10 Kegiatan		23.81 %		10 Kegiatan		23.81 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02.0028			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		3.318.289		1.050.752		1.442.097		168.774		11.70%		1.219.525		36.75 %		
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	1650 Kawasan		1702 Kawasan	1650 Kawasan		160 Kawasan		9.70 %		160 Kawasan		9.70 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.05.03.2.02.0020		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	bencana		16.669.689		318.200		353.948		37.875		10.70%		356.075		2.14 %	
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan		31 Kawasan	31 Kawasan		7 Kawasan		22.58 %		7 Kawasan		22.58 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			332.559		239.272		250.503		5.600		2.24%		244.872		73.63 %	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit	5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28.359.846		24.733.020		22.638.940		5.197.448		22.96%		29.930.468		105.54%	
				Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis		9 Jenis		90.00 %		9 Jenis		90.00 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			26.091.537		22.940.494		20.231.579		4.976.076		24.60%		27.916.570		106.99 %	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4497 Orang		19277 Orang	12500 Orang		6501 Orang		52.01 %		6501 Orang		144.56 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota			2.268.308		1.792.525		2.407.361		221.373		9.20%		2.013.898		88.78 %	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang		1082 Orang	467 Orang		1497 Orang		320.56 %		1497 Orang		320.56 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
26	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			64.034.041		51.380.649		52.989.440		9.525.582		17.98%		60.906.230		95.12%	
				Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			menit																
			Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	46		38.10		47		7.29		184.49 %		7.29		184.15		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.884.592		50.459.909		51.887.967		9.372.811		18.06%		59.832.720		95.15%		
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas		656 Petugas		656 Petugas		0 Petugas		0.00 %		0 Petugas		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			42.696.091		34.544.240		30.229.603		8.018.032		26.52%		42.562.271		99.69 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01.0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			1.006.458		1.388.662		831.482		97.772		11.76%		1.486.434		147.69 %		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang		15 Orang		10 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			10.493.247		7.256.045		12.518.433		25.600		0.20%		7.281.645		69.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	910 Unit		850 Unit		875 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.2.01.0005		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			8.688.797		7.270.963		8.308.450		1.231.407		14.82%		8.502.370		97.85 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal																
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			550.836		497.674		558.744		84.367		15.10%		582.041		105.67%		
			Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	520 Berkas		480 Berkas		500 Berkas		110 Berkas		22.00 %		110 Berkas		21.15 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			550.836		497.674		558.744		84.367		15.10%		582.041		105.67 %		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		150.00 %		3 Dokumen		150.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			598.613		423.066		542.729		68.403		12.60%		491.469		82.10%		
			Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	110 Kegiatan		90 Kegiatan		100 Kegiatan		20 Kegiatan		20.00 %		20 Kegiatan		18.18 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			598.613		423.066		542.729		68.403		12.60%		491.469		82.10 %		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1100 Orang		1380 Orang		1000 Orang		330 Orang		33.00 %		330 Orang		30.00 %		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
27	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.100.497		18.155.767		21.167.206		3.807.772		17.99%		21.963.540		91.13%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%		94.01 %		88%		95.92 %		109.00 %		95.92 %		109.00%		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.227.230		15.852.407		18.012.806		3.380.045		18.76%		19.232.452		100.03%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.227.230		15.852.407		18.012.806		3.380.045		18.76%		19.232.452		100.03 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		47 Orang/bulan		48 Orang/bulan		44 Orang/bulan		91.67 %		44 Orang/bulan		97.78 %		Dinas Sosial	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.354.427		801.071		1.886.980		117.873		6.25%		918.944		39.03%		
			Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.354.427		801.071		1.886.980		117.873		6.25%		918.944		39.03 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket		12 Paket		3 Paket		25.00 %		3 Paket		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.518.840		1.502.289		1.267.419		309.854		24.45%		1.812.144		71.94%		
			Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.518.840		1.502.289		1.267.419		309.854		24.45%		1.812.144		71.94 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
28	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			8.489.757		5.301.061		6.332.770		1.534.606		24.23%		6.835.667		80.52%		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.98 %		87.00 %		87.97 %		66.48 %		75.57 %		66.48 %		74.71%		Dinas Sosial	
			Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepalawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%		100.00 %		94.12 %		54.55 %		57.96 %		54.55 %		54.55%		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			8.489.757		5.301.061		6.332.770		1.534.606		24.23%		6.835.667		80.52%		
			Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	7 jenis		6 jenis		6 jenis		3 jenis		50.00 %		3 jenis		42.86 %		Dinas Sosial	
			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	372 orang		1104 orang		367 orang		313 orang		85.29 %		313 orang		84.14 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			6.940.781		4.578.716		5.501.695		1.448.781		26.33%		6.027.497		86.84 %		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	597 Orang		897 Orang		590 Orang		239 Orang		40.51 %		239 Orang		40.03 %		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			1.548.976		722.345		831.076		85.826		10.33%		808.170		52.17 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		66.67 %		Dinas Sosial	
29	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		80.585.488		35.102.514		40.391.046		6.934.203		17.17%		42.036.718		52.16%		
			Persentase lansia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	
			Persentase anak terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	
			Persentase penyandang disabilitas terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		59.054.679		24.538.260		29.844.376		4.933.177		16.53%		29.471.438		49.91%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		5.917.303		6.809.880		6.856.459		1.239.436		18.08%		8.049.316		136.03 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang		99 Orang		300 Orang		233 Orang		77.67 %		233 Orang		179.23 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		37.558.454		8.447.788		8.386.630		1.022.020		12.19%		9.469.808		25.21 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan	215 Orang		224 Orang		230 Orang		243 Orang		105.65 %		243 Orang		113.02 %		Dinas Sosial	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota																
	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan		1.615.342		664.966		746.963		145.941		19.54%		810.906		50.20 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		50 Orang		40 Orang		44 Orang		110.00 %		44 Orang		110.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		476.574		103.070		367.320		20.260		5.52%		123.330		25.88 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang		1828 Orang		795 Orang		283 Orang		35.60 %		283 Orang		35.60 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan		13.487.005		8.512.557		13.487.005		2.505.521		18.58%		11.018.077		81.69 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Orang		2329 Orang		1470 Orang		1629 Orang		110.82 %		1629 Orang		110.82 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		21.530.809		10.564.254		10.546.670		2.001.026		18.97%		12.565.280		58.36%		
			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali		12 kali		12 kali		3 kali		25.00 %		3 kali		25.00 %		Dinas Sosial	
			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		17.475.588		6.902.956		6.843.025		1.250.557		18.27%		8.153.512		46.66 %		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang		1877 Orang		900 Orang		1112 Orang		123.56 %		1112 Orang		101.09 %		Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0002		Pemberian Layanan Kedaruratan		4.055.221		3.661.299		3.703.644		750.469		20.26%		4.411.768		108.79 %		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang		11095 Orang		4716 Orang		1642 Orang		34.82 %		1642 Orang		34.82 %		Dinas Sosial	
30	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		10.901.678		33.947.754		34.824.477		2.371.667		6.81%		36.319.421		333.15%		
			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%		98.07 %		87%		98.52 %		113.24 %		98.52 %		113.24%		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		10.901.678		33.947.754		34.824.477		2.371.667		6.81%		36.319.421		333.15%		
			Jumlah laporan pemutakhiran	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan pengelolaan data PMKS dan MBR																
			Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			116.497		4.601.401		3.791.623		0		0.00%		4.601.401		3,949.81 %		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2229 Orang		1071 Orang		2229 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.865.631		23.966.299		26.291.553		1.433.965		5.45%		25.400.264		433.04 %		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83899 Keluarga		42407 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga		75.36 %		25414 Keluarga		30.29 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.681.621		4.755.322		4.082.445		796.615		19.51%		5.551.937		118.59 %		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	534731 Orang		118222 Orang		92892 Orang		69515 Orang		74.83 %		69515 Orang		13.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			237.929		624.732		658.855		141.087		21.41%		765.819		321.87 %		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	264931 Keluarga		42408 Keluarga		33723 Keluarga		25414 Keluarga		75.36 %		25414 Keluarga		9.59 %		Dinas Sosial	
31	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57%		
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57%		
			Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		100.00 %		3 Jenis		100.00 %		Dinas Sosial	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota			1.980.041		2.237.866		1.350.914		268.206		19.85%		2.506.072		126.57 %		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam		7 Makam		7 Makam		7 Makam		100.00 %		7 Makam		100.00 %		Dinas Sosial	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN																	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		BIDANG TENAGA KERJA																	
32	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.606.977		15.655.016		17.337.460		3.468.707		20.01%		19.123.723		130.92%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		95.60 %		94%		98.47 %		104.76 %		98.47 %		103.65%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.701.619		14.018.763		15.532.831		3.171.311		20.42%		17.190.075		135.34%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.701.619		14.018.763		15.532.831		3.171.311		20.42%		17.190.075		135.34 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		50 Orang/bulan		52 Orang/bulan		49 Orang/bulan		94.23 %		49 Orang/bulan		158.06 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.905.358		1.636.252		1.804.630		297.396		16.48%		1.933.648		101.48%		
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.596.618		1.495.614		1.603.417		280.423		17.49%		1.776.037		111.24 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			308.739		140.638		201.213		16.973		8.44%		157.611		51.05 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
33	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			11.303.582		7.930.603		9.137.009		541.055		5.92%		8.471.658		74.95%		
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	85.02 %		94.02 %		83.02 %		70.54 %		84.97 %		70.54 %		82.97%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus	91.7 %		99.60 %		90.7 %		100%		110.25 %		100%		109.05%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pelatihan															Kerja	
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			6.876.862		5.043.552		6.357.686		365.652		5.75%		5.409.204		78.66%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		N/A		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01.0002		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			434.813		220.415		520.963		58.550		11.24%		278.965		64.16 %		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga		14 Lembaga		12 Lembaga		1 Lembaga		8.33 %		1 Lembaga		8.33 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			6.442.049		4.823.137		5.836.722		307.102		5.26%		5.130.239		79.64 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang		752 Orang		720 Orang		112 Orang		15.56 %		112 Orang		15.56 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			305.648		180.600		287.689		8.200		2.85%		188.800		61.77%		
			Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.04.0001		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			305.648		180.600		287.689		8.200		2.85%		188.800		61.77 %		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan		53 Perusahaan		50 Perusahaan		10 Perusahaan		20.00 %		10 Perusahaan		20.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.03.2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.121.071		2.706.451		2.491.634		167.203		6.71%		2.873.654		69.73%		
			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kategori
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.07.03.2.05.0001		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		4.121.071		2.706.451		2.491.634		167.203		6.71%		2.873.654		69.73 %		Kerja
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
34	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		3.690.000		1.626.716		2.553.785		290.086		11.36%		1.916.802		51.95%		
			Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	5%		3.00 %		4%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		2.280.264		1.114.098		1.749.005		221.975		12.69%		1.336.073		58.59%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan		9 laporan		9 laporan		2 laporan		22.22 %		2 laporan		22.22 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0002		Pelayanan antar Kerja		24.068		40.000		136.669		5.600		4.10%		45.600		189.46 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 Orang		2002 Orang		2050 Orang		204 Orang		9.95 %		204 Orang		9.49 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		1.151.313		474.386		584.653		122.554		20.96%		596.941		51.85 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang		1100 Orang		1200 Orang		205 Orang		17.08 %		205 Orang		13.67 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0005		Perluasan Kesempatan Kerja		1.104.883		599.711		1.027.683		93.821		9.13%		693.532		62.77 %		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang		274 Orang		250 Orang		65 Orang		26.00 %		65 Orang		26.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		338.718		141.814		363.652		5.600		1.54%		147.414		43.52%		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	7 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.0003		Job Fair /Bursa Kerja		338.718		141.814		363.652		5.600		1.54%		147.414		43.52 %		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	350 Orang		324 Orang		250 Orang		50 Orang		20.00 %		50 Orang		14.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		1.071.018		370.804		441.128		62.511		14.17%		433.315		40.46%		
			Jumlah laporan Kegiatan	7 Laporan		5 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI															Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.0001		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		1.071.018		370.804		441.128		62.511		14.17%		433.315		40.46 %		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang		250 Orang		300 Orang		85 Orang		28.33 %		85 Orang		24.29 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
35	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		2.216.940		1.336.638		2.081.048		257.828		12.39%		1.594.466		71.92%		
			Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	15.04 %		14.37 %		14.41 %		14.57 %		101.11 %		14.57 %		96.88%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	60%		41.27 %		50%		43.16 %		86.32 %		43.16 %		71.93%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.358.206		738.459		1.311.953		199.838		15.23%		938.296		69.08%		
			Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0001		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		62.206		30.600		56.869		5.600		9.85%		36.200		58.19 %		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online	220 Perusahaan		294 Perusahaan		220 Perusahaan		74 Perusahaan		33.64 %		74 Perusahaan		33.64 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		1.296.000		707.859		1.255.084		194.238		15.48%		902.096		69.61 %		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan															dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			858.734		598.180		769.095		57.990		7.54%		656.170		76.41%		
			Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.521		283.705		435.650		31.626		7.26%		315.331		60.00 %		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		64 Perkara		50 Perkara		15 Perkara		30.00 %		15 Perkara		30.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			333.213		314.474		333.445		26.365		7.91%		340.839		102.29 %		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	110 Perkara		120 Perkara		110 Perkara		22 Perkara		20.00 %		22 Perkara		20.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
36	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.557.497		14.512.482		16.216.842		3.208.925		19.79%		17.721.407		100.93%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		98.24 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.968.828		12.051.729		13.585.326		2.775.654		20.43%		14.827.383		114.33%	Berencana	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.968.828		12.051.729		13.585.326		2.775.654		20.43%		14.827.383		114.33 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		35 Orang/bulan		34 Orang/bulan		35 Orang/bulan		102.94 %		35 Orang/bulan		145.83 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.012.046		2.141.430		2.068.287		383.046		18.52%		2.524.476		62.92%		
			Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.012.046		2.141.430		2.068.287		383.046		18.52%		2.524.476		62.92 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		15 Paket		5 Paket		3 Paket		60.00 %		3 Paket		60.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			576.622		319.323		563.230		50.225		8.92%		369.548		64.09%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		576.622		319.323		563.230		50.225		8.92%		369.548		64.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		11 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		33.33 %		2 Laporan		33.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
37	2.08.02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.324.452		1.358.096		1.706.748		107.772		6.31%		1.465.868		63.06%		
			Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		782.126		494.938		719.570		48.035		6.68%		542.973		69.42%		
			Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.02.2.01.0006		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan		782.126		494.938		719.570		48.035		6.68%		542.973		69.42 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	218 Orang		58 Perangkat Daerah		218 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			467.797		306.975		418.236		42.365		10.13%		349.340		74.68%		
			Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		610 Orang		600 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.02.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			467.797		306.975		418.236		42.365		10.13%		349.340		74.68 %		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi		58 Organisasi		31 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1.074.529		556.183		568.942		17.372		3.05%		573.555		53.38%		
			Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan		N/A		21 Kegiatan		2 Kegiatan		9.52 %		2 Kegiatan		9.52 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.08.02.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.074.529		556.183		568.942		17.372		3.05%		573.555		53.38 %	Berencana	
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang		745 Orang		740 Orang		83 Orang		11.22 %		83 Orang		11.22 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
38	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		738.393		923.295		1.638.502		224.822		13.72%		1.148.118		155.49%		
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	100%		64.52 %		80.64 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		58.810		0		36.212		0		0.00%		0		0.00%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan		58.810		0		36.212		0		0.00%		0		0.00 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		N/A		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			211.816		599.787		1.121.672		189.373		16.88%		789.160		372.57%		
			Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus		100 kasus		20 kasus		16 kasus		80.00 %		16 kasus		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			106.288		0		92.110		6.284		6.82%		6.284		5.91 %		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		N/A		20 Layanan		16 Layanan		80.00 %		16 Layanan		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.02.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			105.528		599.787		1.029.562		183.090		17.78%		782.877		741.86 %		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang		100 Orang		20 Orang		16 Orang		80.00 %		16 Orang		80.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		467.767		323.508		480.617		35.449		7.38%		358.957		76.74%		
				Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	31 kecamatan		20 kecamatan	25 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.0004		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		433.382		323.508		446.233		35.449		7.94%		358.957		82.83 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		34.385		0		34.385		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang		N/A	50 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
39	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75%		
			Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	283		333.00		282		0		0.00 %		0		0.00%		Dinas Pemberdayaan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75%		
				Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan		12 laporan	12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.04.2.03.0001		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota		619.665		1.163.659		1.242.451		204.257		16.44%		1.367.917		220.75 %		
				Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan		2 Layanan		100.00 %		2 Layanan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36%		
				Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%		100.00 %	100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam		468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga		58 Lembaga		58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			468.442		242.548		297.128		35.542		11.96%		278.090		59.36 %		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
41	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			3.918.987		2.632.804		3.730.559		436.375		11.70%		3.069.179		78.32%		
			Persentase Kelurahan Layak Anak	100%		100.00 %		92.85 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			911.497		529.635		836.318		27.013		3.23%		556.648		61.07%		
			Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non			911.497		529.635		836.318		27.013		3.23%		556.648		61.07 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota																
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	21 Organisasi		31 Organisasi	20 Organisasi		0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3.007.491		2.103.169		2.894.241		409.363		14.14%		2.512.532		83.54%		
				Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan		0 kegiatan		0.00 %		0 kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.02.0003		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			1.431.215		691.734		1.161.548		102.635		8.84%		794.369		55.50 %		
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.2.02.0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1.576.276		1.411.435		1.732.693		306.728		17.70%		1.718.163		109.00 %		
				Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	10 Orang		43 Orang	10 Orang		31 Orang		310.00 %		31 Orang		310.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kabupaten/Kota															Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1.649.292		1.108.336		1.380.307		210.476		15.25%		1.318.812		79.96%		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	100%		64.52 %		80.64 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			65.288		0		65.288		0		0.00%		0		0.00%		
			Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot	1 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA			65.288		0		65.288		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	184 Orang		N/A		184 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.549.369		1.108.336		1.280.384		210.476		16.44%		1.318.812		85.12%	Berencana	
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus		242 kasus		150 kasus		53 kasus		35.33 %		53 kasus		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	31 lembaga		20 lembaga		25 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.02.0007		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			192.248		52.527		219.415		14.340		6.54%		66.867		34.78 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Layanan		242 Orang		150 Layanan		53 Layanan		35.33 %		53 Layanan		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			1.357.120		1.055.809		1.060.969		196.136		18.49%		1.251.945		92.25 %		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang		242 Orang		150 Orang		53 Orang		35.33 %		53 Orang		35.33 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.03		Penguatan dan			34.635		0		34.635		0		0.00%		0		0.00%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	2 Kegiatan		N/A		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.07.2.03.0006		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34.635		0		34.635		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang		N/A		50 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
43	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.817.816		22.038.025		28.322.648		4.583.454		16.18%		26.621.478		99.27%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		94.58 %		94.5 %		96.14 %		101.74 %		96.14 %		101.20%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.173.111		18.669.186		23.803.786		4.032.451		16.94%		22.701.637		102.38%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		22.173.111		18.669.186		23.803.786		4.032.451		16.94%		22.701.637		102.38 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		70 Orang/bulan		70 Orang/bulan		66 Orang/bulan		94.29 %		66 Orang/bulan		134.69 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.644.705		3.368.839		4.518.862		551.002		12.19%		3.919.841		84.39%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.681.649		2.767.524		3.209.727		487.510		15.19%		3.255.034		88.41 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		963.056		601.315		1.309.135		63.492		4.85%		664.807		69.03 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
44	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.185.139		1.143.927		1.834.836		138.171		7.53%		1.282.097		58.67%		
			Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.26		3.18		1.25		6.29		503.20 %		6.29		499.21%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		931.260		478.232		741.032		92.627		12.50%		570.858		61.30%		
			Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		1 Jenis		25.00 %		1 Jenis		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.01.0014		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		931.260		478.232		741.032		92.627		12.50%		570.858		61.30 %		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		3 Laporan		20.00 %		3 Laporan		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1.253.879		665.695		1.093.803		45.544		4.16%		711.239		56.72%		
			Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	lokal		1.253.879		665.695		1.093.803		45.544		4.16%		711.239		56.72 %		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
45	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13%		
			Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.91 %		100.00 %		97.90 %		98.82 %		100.94 %		98.82 %		100.93%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13%		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota			973.715		539.858		953.506		84.581		8.87%		624.440		64.13 %		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen		36 Dokumen		36 Dokumen		6 Dokumen		16.67 %		6 Dokumen		16.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
46	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87%		
			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	55265.71 M2		10,151.30 M2		54207.76 M2		0 M2		0.00 %		0 M2		0.00%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87%		
			Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi	1 lokasi		4 lokasi		1 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum															Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		153.598.241		64.183.843		89.205.871		133.940		0.15%		64.317.782		41.87 %		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
	2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
47	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		98.611.737		54.450.345		62.532.154		11.754.564		18.80%		66.204.909		67.14%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%		91.49 %		87%		94.67 %		108.82 %		94.67 %		108.82%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		81.736.755		45.569.920		51.157.844		10.051.027		19.65%		55.620.947		68.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		81.736.755		45.569.920		51.157.844		10.051.027		19.65%		55.620.947		68.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan		192 Orang/bulan		193 Orang/bulan		182 Orang/bulan		94.30 %		182 Orang/bulan		94.30 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.689.324		8.453.123		10.886.697		1.602.035		14.72%		10.055.157		64.09%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		15.689.324		8.453.123		10.886.697		1.602.035		14.72%		10.055.157		64.09 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.185.658		427.303		487.613		101.502		20.82%		528.805		44.60%		
			Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi		1.185.658		427.303		487.613		101.502		20.82%		528.805		44.60 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit		50 Unit		12 Unit		24.00 %		12 Unit		24.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
48	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		4.341.984		2.954.256		6.191.825		354.547		5.73%		3.308.803		76.20%		
			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	90%		93.44 %		88%		99.44 %		113.00 %		99.44 %		110.49%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	50%		40.59 %		48%		50%		104.17 %		50%		100.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2.963.234		1.855.710		2.723.080		316.316		11.62%		2.172.026		73.30%		
			Jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1.002.892		770.176		1.248.523		85.821		6.87%		855.997		85.35 %		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		1.960.342		1.085.534		1.474.557		230.495		15.63%		1.316.029		67.13 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.378.750		1.098.545		3.468.745		38.232		1.10%		1.136.777		82.45%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	3 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		2 stasiun		100.00 %		2 stasiun		66.67 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			1.378.750		1.098.545		3.468.745		38.232		1.10%		1.136.777		82.45 %		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
49	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			114.572.766		96.409.691		99.194.651		18.021.338		18.17%		114.431.029		99.88%		
			Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	100%		101.93 %		99.75 %		0.51 %		0.51 %		0.51 %		0.51%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			114.572.766		96.409.691		99.194.651		18.021.338		18.17%		114.431.029		99.88%		
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.88 Ha		2.85 Ha		2.88 Ha		101.05 %		2.88 Ha		100.35 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.87 Ha		2.88 Ha		2.85 Ha		2.88 Ha		101.05 %		2.88 Ha		100.35 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0.00 %		0 dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			88.616.171		74.980.745		75.449.385		14.322.256		18.98%		89.303.002		100.78 %		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.90 Ha		275.86 Ha		275.88 Ha		275.88 Ha		100.00 %		275.88 Ha		99.99 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			9.689.511		8.035.254		9.581.504		781.649		8.16%		8.816.903		90.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit		125 Unit		125 Unit		125 Unit		100.00 %		125 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			15.911.738		13.117.977		13.659.965		2.891.056		21.16%		16.009.033		100.61 %		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit		14 Unit		14 Unit		14 Unit		100.00 %		14 Unit		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan			355.347		275.715		503.796		26.377		5.24%		302.092		85.01 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
50	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.250.677		2.307.911		2.677.847		372.715		13.92%		2.680.626		51.05%		
			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		120.00 %		100%		120%		120.00 %		120%		120.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%		100.00 %		80%		100%		125.00 %		100%		125.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			779.119		227.913		448.987		36.875		8.21%		264.788		33.99%		
			Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas		273 berkas		250 berkas		71 berkas		28.40 %		71 berkas		28.40 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			779.119		227.913		448.987		36.875		8.21%		264.788		33.99 %		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen		304 Dokumen		255 Dokumen		61 Dokumen		23.92 %		61 Dokumen		23.92 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.471.557		2.079.998		2.228.860		335.840		15.07%		2.415.838		54.03%		
			Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100.00 %		1 kegiatan		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan			4.471.557		2.079.998		2.228.860		335.840		15.07%		2.415.838		54.03 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
51	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		4.000.329		1.295.194		1.916.797		207.613		10.83%		1.502.807		37.57%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	95%		59.00 %		80%		21%		26.25 %		21%		22.11%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.000.329		1.295.194		1.916.797		207.613		10.83%		1.502.807		37.57%		
			Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek		432 obyek		254 obyek		61 obyek		24.02 %		61 obyek		14.12 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH			2.406.414		885.542		1.112.345		140.136		12.60%		1.025.678		42.62 %		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	350 Dokumen		321 Dokumen		325 Dokumen		55 Dokumen		16.92 %		55 Dokumen		15.71 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan			1.593.914		409.652		804.452		67.477		8.39%		477.129		29.93 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengelolaan Lingkungan Hidup																
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha		254 Badan Usaha	254 Badan Usaha		61 Badan Usaha		24.02 %		61 Badan Usaha		24.02 %		Dinas Lingkungan Hidup	
52	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		8.194.978		1.175.240		2.511.667		213.710		8.51%		1.388.950		16.95%		
				Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	71.81 %		129.77 %	66.43 %		150.74 %		226.92 %		150.74 %		209.92%		Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	63.84 %		115.54 %	61.81 %		116.65 %		188.72 %		116.65 %		182.72%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8.194.978		1.175.240		2.511.667		213.710		8.51%		1.388.950		16.95%		
				Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali		13 kali	12 kali		1 kali		8.33 %		1 kali		8.33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis		1 jenis	1 jenis		1 jenis		100.00 %		1 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		7.391.891		767.761		1.682.444		151.416		9.00%		919.178		12.43 %		
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		13 Dokumen	12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		8.33 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0003		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		803.086		407.479		829.223		62.293		7.51%		469.772		58.50 %		
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1725 Orang		1645 Orang	1670 Orang		615 Orang		36.83 %		615 Orang		35.65 %		Dinas Lingkungan Hidup	
53	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25%		
				Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	92.00 %		112.00 %	81.60 %		112%		137.25 %		112%		121.74%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat		687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan		4 penghargaan		4 penghargaan		0 penghargaan		0.00 %		0 penghargaan		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			687.892		663.391		5.157.182		5.600		0.11%		668.991		97.25 %		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas		10 Entitas		10 Entitas		0 Entitas		0.00 %		0 Entitas		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
54	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81%		
			Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	46 obyek		41.00 obyek		47 obyek		9 obyek		180.85 %		9 obyek		180.43		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81%		
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			732.771		192.906		543.012		25.544		4.70%		218.450		29.81 %		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	47 Pengaduan		41 Pengaduan		47 Pengaduan		9 Pengaduan		19.15 %		9 Pengaduan		19.15 %		Dinas Lingkungan Hidup	
55	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			486.436.550		435.442.673		389.506.752		78.259.233		20.09%		513.701.906		105.61%		
			Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %		5.13 %		5.12 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase pengolahan	52%		53.45 %		51.5 %		53.45 %		103.79 %		53.45 %		102.79%		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			sampah di TPS 3R															Lingkungan Hidup	
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88.76 %		100.00 %		88.39 %		100%		113.13 %		100%		112.66%		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah			486.436.550		435.442.673		389.506.752		78.259.233		20.09%		513.701.906		105.61%		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis		4 jenis		4 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100.00 %		3 jenis		100.00 %		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0017		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			40.507.385		60.811.675		40.507.385		0		0.00%		60.811.675		150.12 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	305000 ton		290217.68 ton		305000 ton		28186961 ton		9,041.63 %		28186961 ton		9,241.63 %		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			222.633.644		143.498.839		159.679.775		38.812.589		24.31%		182.311.428		81.89 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton		562452.89 Ton		650430 Ton		153515.14 Ton		23.60 %		153515.14 Ton		23.60 %		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01.0012		Penanganan sampah melalui pengangkutan			182.639.754		174.775.084		171.376.695		38.351.348		22.38%		213.126.432		116.69 %		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton		503856.48 Ton		570129 Ton		124981.07 Ton		21.92 %		124981.07 Ton		21.92 %		Dinas Lingkungan Hidup	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota			40.655.768		56.357.075		17.942.898		1.095.295		6.10%		57.452.370		141.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit		230 Unit		231 Unit		230 Unit		99.57 %		230 Unit		101.77 %		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
56	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.618.623		48.143.961		54.443.312		9.779.983		17.96%		57.923.943		217.61%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.58 %		92.85 %		87.13 %		96.55 %		110.81 %		96.55 %		110.24%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.846		13.000		15.995		5.200		32.51%		18.200		108.04%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.846		13.000		15.995		5.200		32.51%		18.200		108.04 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.703.038		39.975.916		45.103.257		8.644.163		19.17%		48.620.079		309.62%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.703.038		39.975.916		45.103.257		8.644.163		19.17%		48.620.079		309.62 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan		180 Orang/bulan		182 Orang/bulan		170 Orang/bulan		93.41 %		170 Orang/bulan		414.63 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.049.047		5.514.105		6.332.466		757.020		11.95%		6.271.125		62.41%		
			Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas															Dinas Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.049.047		5.514.105		6.332.466		757.020		11.95%		6.271.125		62.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket		3 Paket		1 Paket		33.33 %		1 Paket		33.33 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		849.692		2.640.940		2.991.594		373.600		12.49%		3.014.540		354.78%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		849.692		2.640.940		2.991.594		373.600		12.49%		3.014.540		354.78 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
57	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		3.481.298		3.751.874		3.330.272		606.724		18.22%		4.358.598		125.20%		
			Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2.655.892		2.737.521		2.388.298		441.662		18.49%		3.179.183		119.70%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		209925 berkas		156000 berkas		49512 berkas		31.74 %		49512 berkas		31.74 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01.0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		2.655.892		2.737.521		2.388.298		441.662		18.49%		3.179.183		119.70 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		825.406		1.014.352		941.974		165.063		17.52%		1.179.415		142.89%		
			Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas		209925 berkas		156000 berkas		49326 berkas		31.62 %		49326 berkas		31.62 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.03.0002		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		825.406		1.014.352		941.974		165.063		17.52%		1.179.415		142.89 %		
			Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk															Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
58	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.969.905		2.801.167		2.594.110		497.121		19.16%		3.298.288		167.43%		
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%		100.00 %		95%		100%		105.26 %		100%		105.26%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			1.524.354		2.172.220		1.945.131		410.840		21.12%		2.583.060		169.45%		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		40594 berkas		36000 berkas		9886 berkas		27.46 %		9886 berkas		27.46 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			1.524.354		2.172.220		1.945.131		410.840		21.12%		2.583.060		169.45 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			445.551		628.947		648.979		86.281		13.29%		715.228		160.53%		
			Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas		83465 berkas		36000 berkas		16792 berkas		46.64 %		16792 berkas		46.64 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			445.551		628.947		648.979		86.281		13.29%		715.228		160.53 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2.941.983		3.110.956		3.217.495		417.974		12.99%		3.528.930		119.95%		
			Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	77%		100.00 %		74%		100%		135.14 %		100%		129.87%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	100%		118.18 %		80%		168.18 %		210.23 %		168.18 %		168.18%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Sipil	
			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	99%		99.53 %		98%		99.94 %		101.98 %		99.94 %		100.95%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			431.627		889.803		834.791		171.125		20.50%		1.060.928		245.80%		
			Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	48000 data		16737 data		48000 data		12579 data		26.21 %		12579 data		26.21 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.0001		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			431.627		889.803		834.791		171.125		20.50%		1.060.928		245.80 %		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			653.293		733.192		799.064		119.838		15.00%		853.030		130.57%		
			Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga		10 Lembaga		5 Lembaga		11 Lembaga		220.00 %		11 Lembaga		220.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0006		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			362.799		452.582		506.324		78.513		15.51%		531.095		146.39 %		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		11 Dokumen		220.00 %		11 Dokumen		220.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0004		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			290.494		280.611		292.740		41.325		14.12%		321.936		110.82 %		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		6 Dokumen		5 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.857.063		1.487.961		1.583.640		127.011		8.02%		1.614.972		86.96%		
			Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		32 unit layanan		100.00 %		32 unit layanan		100.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04.0001		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.857.063		1.487.961		1.583.640		127.011		8.02%		1.614.972		86.96 %		
			Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04%		
			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04%		
			Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi		4 Informasi		4 Informasi		0 Informasi		0.00 %		0 Informasi		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			89.414		101.165		118.497		16.000		13.50%		117.165		131.04 %		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
61	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95%		
			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	0%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		N/A		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95%		
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim	6642 Kegiatan		57 Kegiatan		53 Kegiatan		7 Kegiatan		13.21 %		7 Kegiatan		0.11 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		2.343.064		1.433.719		2.343.064		111.555		4.76%		1.545.275		65.95 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
62	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		553.981		465.620		697.882		46.790		6.70%		512.410		92.50%		
			Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	100%		76.03 %		81.10 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		231.497		124.965		295.265		36.600		12.40%		161.565		69.79%		
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	178 Orang		400 Orang		170 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.14.02.2.01.0009		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		231.497		124.965		295.265		36.600		12.40%		161.565		69.79 %		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	89 Satuan Pendidikan		275 Satuan Pendidikan		85 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		0 Satuan Pendidikan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		322.484		340.655		402.617		10.190		2.53%		350.845		108.79%		
			Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0.00 %		0 Perangkat Daerah		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0009		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		41.486		62.455		60.000		0		0.00%		62.455		150.55 %		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		132.700		179.200		212.700		4.590		2.16%		183.790		138.50 %		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		148.298		99.000		129.917		5.600		4.31%		104.600		70.53 %	Berencana	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
63	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		9.873.591		7.860.709		8.650.037		351.434		4.06%		8.212.143		83.17%		
			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.60 %		15.05 %		17.85 %		16.49 %		107.62 %		16.49 %		106.31		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86%		84.02 %		85%		73.96 %		87.01 %		73.96 %		86.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		528.928		792.812		815.000		109.665		13.46%		902.477		170.62%		
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		31 Kecamatan		100.00 %		31 Kecamatan		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra		250.000		149.996		250.000		63.367		25.35%		213.363		85.35 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kerja																
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi		31 Organisasi		31 Organisasi	0 Organisasi		0.00 %		0 Organisasi		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		178.928		463.494		465.000		46.298		9.96%		509.792		284.91 %		
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		100.000		99.355		100.000		0		0.00%		99.355		99.35 %		
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2.657.552		1.013.060		1.598.015		88.851		5.56%		1.101.910		41.46%		
				Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali		12 Kali		12 Kali	0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2.14.03.2.02.0006		Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			859.998		554.060		1.169.615		88.851		7.60%		642.910		74.76 %	Berencana	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.797.554		459.000		428.400		0		0.00%		459.000		25.53 %		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang		1566 Orang		1566 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			4.116.934		5.686.592		5.872.222		152.918		2.60%		5.839.510		141.84%		
			Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417096 Orang		417081 Orang		417050 Orang		256318 Orang		61.46 %		256318 Orang		61.45 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan			13.500		38.796		13.500		0		0.00%		38.796		287.38 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jejarinya																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0001			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya		2.353.459		580.354		689.017		24.864		3.61%		605.218		25.72 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.03.0003			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1.749.975		5.067.441		5.169.705		128.054		2.48%		5.195.495		296.89 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang		1950 Orang		1950 Orang		354 Orang		18.15 %		354 Orang		18.15 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		2.570.177		368.245		364.800		0		0.00%		368.245		14.33%		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		2.570.177		364.495		364.800		0		0.00%		364.495		14.18 %		
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung		31 Kampung	31 Kampung		0 Kampung		0.00 %		0 Kampung		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
64	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		17.633.126		19.894.390		19.537.784		283.167		1.45%		20.177.557		114.43%		
				Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun		22.40 tahun	21 tahun		0 tahun		0.00 %		0 tahun		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	44%		100.00 %	43%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	55.76 %		104.23 %	51.63 %		31.11 %		60.26 %		31.11 %		55.79%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.58 %		117.91 %	41.57 %		48.31 %		116.21 %		48.31 %		116.19%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3.684.926		11.384.160		5.589.584		283.167		5.07%		11.667.327		316.62%		
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		0 Kelompok		0.00 %		0 Kelompok		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0019		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			608.785		616.997		572.182		16.013		2.80%		633.010		103.98 %		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1136 Orang		930 Orang		966 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.0028		Pembentukan Kelompok			1.202.795		3.366.498		3.909.520		223.956		5.73%		3.590.454		298.51 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	57 Kelompok		153 Kelompok		56 Kelompok		20 Kelompok		35.71 %		20 Kelompok		35.09 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		412.985		474.810		120.000		0		0.00%		474.810		114.97 %		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	38 Unit		51 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		1.460.361		1.512.565		987.881		43.198		4.37%		1.555.763		106.53 %		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			13.948.200		8.510.230		13.948.200		0		0.00%		8.510.230		61.01%		
			jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 orang		6642 Orang		6642 orang		6642 orang		100.00 %		6642 orang		100.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			6.642.000		4.101.100		6.642.000		0		0.00%		4.101.100		61.74 %		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			7.306.200		4.409.130		7.306.200		0		0.00%		4.409.130		60.35 %		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Keluarga Berencana	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
65	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			123.067.835		80.580.955		104.164.000		14.038.876		13.48%		94.619.831		76.88%		
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%		94.39 %		92%		94.94 %		103.20 %		94.94 %		103.20%		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.040.321		55.271.334		61.276.734		11.925.816		19.46%		67.197.150		92.00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.040.321		55.271.334		61.276.734		11.925.816		19.46%		67.197.150		92.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan		256 Orang/bulan		258 Orang/bulan		242 Orang/bulan		93.80 %		242 Orang/bulan		84.32 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.949.269		3.782.483		5.647.613		616.133		10.91%		4.398.616		73.94%		
			Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.949.269		3.782.483		5.647.613		616.133		10.91%		4.398.616		73.94 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		14 Paket		23 Paket		4 Paket		17.39 %		4 Paket		17.39 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.725.751		8.556.744		7.887.159		1.496.927		18.98%		10.053.671		68.27%		
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.725.751		8.556.744		7.887.159		1.496.927		18.98%		10.053.671		68.27 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		5 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		100.00 %		3 Laporan		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			29.352.493		12.970.394		29.352.493		0		0.00%		12.970.394		44.19%		
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	53 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		5.66 %		Dinas Perhubungan	
			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.392.600		6.534.114		13.392.600		0		0.00%		6.534.114		48.79 %		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang			15.959.893		6.436.280		15.959.893		0		0.00%		6.436.280		40.33 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		1 Unit Kerja		100.00 %		1 Unit Kerja		100.00 %		Dinas Perhubungan	
66	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			472.129.235		466.993.130		487.594.521		76.219.397		15.63%		543.212.527		115.06%		
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.75 %		48.86 %		48.70 %		66.55 %		136.65 %		66.55 %		136.51%		Dinas Perhubungan	
			Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	50 km/jam		45.17 km/jam		48 km/jam		0 km/jam		0.00 %		0 km/jam		0.00%		Dinas Perhubungan	
			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%		92.54 %		80%		92.65 %		115.81 %		92.65 %		115.81%		Dinas Perhubungan	
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%		81.28 %		80%		80%		100.00 %		80%		100.00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			323.533.151		276.099.794		234.572.671		34.152.783		14.56%		310.252.577		95.90%		
			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi		9 Lokasi		15 Lokasi		2 Lokasi		13.33 %		2 Lokasi		13.33 %		Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan		31 Kawasan		31 Kawasan		32 Kawasan		103.23 %		32 Kawasan		103.23 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			117.251.786		113.599.901		64.141.775		526.314		0.82%		114.126.215		97.33 %		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit		10685 Unit		3000 Unit		368 Unit		12.27 %		368 Unit		12.27 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			28.689.292		7.057.154		10.738.926		2.800		0.03%		7.059.954		24.61 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		2051 Unit		2500 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			35.134.102		20.203.931		23.817.408		1.357.072		5.70%		21.561.004		61.37 %		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit		9000 Unit		9000 Unit		2250 Unit		25.00 %		2250 Unit		25.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana			142.457.971		135.238.807		135.874.563		32.266.597		23.75%		167.505.404		117.58 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jalan																
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105252 Unit		105846 Unit		102252 Unit		116531 Unit		113.96 %		116531 Unit		110.72 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		29.006.404		49.054.397		16.991.018		2.970.459		17.48%		52.024.856		179.36%		
			Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		29.006.404		49.054.397		16.991.018		2.970.459		17.48%		52.024.856		179.36 %		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit		14 Unit		12 Unit		14 Unit		116.67 %		14 Unit		116.67 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		20.323.724		16.612.602		16.785.982		3.036.912		18.09%		19.649.514		96.68%		
			Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas		94 Berkas		60 Berkas		27 Berkas		45.00 %		27 Berkas		45.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		20.323.724		16.612.602		16.785.982		3.036.912		18.09%		19.649.514		96.68 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		8.140.371		8.614.417		7.637.808		1.208.553		15.82%		9.822.970		120.67%		
			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit		119969 Unit		134525 Unit		30511 Unit		22.68 %		30511 Unit		22.68 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05.0001			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		8.140.371		8.614.417		7.637.808		1.208.553		15.82%		9.822.970		120.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit		34 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		21.001.558		32.582.293		30.804.537		6.297.198		20.44%		38.879.492		185.13%		
			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		2 Lokasi		20.00 %		2 Lokasi		20.00 %		Dinas Perhubungan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100.00 %		7 Jenis		100.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06.0017		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4.153.675		3.070.943		3.719.426		188.753		5.07%		3.259.696		78.48 %		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			16.847.884		29.511.350		27.085.111		6.108.445		22.55%		35.619.795		211.42 %		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			65.033.247		82.441.372		176.957.118		28.443.031		16.07%		110.884.403		170.50%		
			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang		75 Orang		75 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Perhubungan	
			Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor		18 Koridor		3 Koridor		14 Koridor		466.67 %		14 Koridor		466.67 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			32.542.203		26.546.994		3.536.695		102.683		2.90%		26.649.677		81.89 %		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			32.491.043		55.894.378		173.420.424		28.340.348		16.34%		84.234.726		259.26 %		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	72 Unit		167 Unit		72 Unit		167 Unit		231.94 %		167 Unit		231.94 %		Dinas Perhubungan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kabupaten/Kota yang Tersedia																
	2.15.02.2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.090.782		1.588.254		3.845.386		110.462		2.87%		1.698.716		33.37%		
			Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		0 Jaringan		0.00 %		0 Jaringan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.090.782		1.588.254		3.845.386		110.462		2.87%		1.698.716		33.37 %		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		6 Dokumen		10 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan	
67	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09%		
			Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali		2 Kali		2 Kali		0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.04.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		3.518.992		1.336.776		1.472.330		3.550		0.24%		1.340.326		38.09 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perhubungan	
68	2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11%		
			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Perhubungan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
	2.15.05.2.01			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11%			
					Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali		2 Kali		2 Kali	0 Kali		0.00 %		0 Kali		0.00 %		Dinas Perhubungan		
	2.15.05.2.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian		5.874.008		4.941.921		5.679.967		879.795		15.49%		5.821.716		99.11 %			
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perhubungan		
	2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
69	2.16.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.550.501		16.278.761		19.513.000		3.630.224		18.60%		19.908.985		107.32%			
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.58 %		93.36 %		89.57 %		96.64 %		107.89 %		96.64 %		107.88%		Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	2.16.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.330.201		14.431.722		16.951.182		3.350.673		19.77%		17.782.395		116.00%			
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.330.201		14.431.722		16.951.182		3.350.673		19.77%		17.782.395		116.00 %			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		55 Orang/bulan		56 Orang/bulan		55 Orang/bulan		98.21 %		55 Orang/bulan		148.65 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.996.579		1.486.245		1.674.171		267.435		15.97%		1.753.680		87.83%			
					Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.996.579		1.486.245		1.674.171		267.435		15.97%		1.753.680		87.83 %			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		100.00 %		4 Paket		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.223.721		360.794		887.647		12.117		1.37%		372.911		30.47%			
					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.223.721		360.794		887.647		12.117		1.37%		372.911		30.47 %			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit		90 Unit		90 Unit		9 Unit		10.00 %		9 Unit		10.00 %		Dinas Komunikasi dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
70	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			16.438.816		13.643.345		18.471.049		1.494.063		8.09%		15.137.408		92.08%	Informatika	
			Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	89%		99.97 %		88%		100%		113.64 %		100%		112.36%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			16.438.816		13.643.345		18.471.049		1.494.063		8.09%		15.137.408		92.08%		
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %		4 Jenis		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			2.943.703		1.347.353		1.659.559		193.926		11.69%		1.541.279		52.36 %		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas		12 Dokumen		68 Komunitas		13 Komunitas		19.12 %		13 Komunitas		19.12 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			849.870		1.153.332		2.001.839		42.833		2.14%		1.196.165		140.75 %		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan		12 Dokumen		36 Permohonan		21 Permohonan		58.33 %		21 Permohonan		58.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			12.645.244		11.142.660		14.809.651		1.257.304		8.49%		12.399.965		98.06 %		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media		12 Dokumen		34 Media		30 Media		88.24 %		30 Media		88.24 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
71	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			74.293.471		59.843.599		83.478.406		1.358.815		1.63%		61.202.415		82.38%		
			Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			74.293.471		7.996.151		83.478.406		1.358.815		1.63%		9.354.966		12.59%		
			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase penanganan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam															Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			498.811		357.765		370.879		61.033		16.46%		418.798		83.96 %		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan		58 Dokumen		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			31.760.170		2.470.682		2.458.129		435.629		17.72%		2.906.311		9.15 %		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	58 Dokumen		58 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		5.17 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			5.046.132		1.382.462		826.774		144.037		17.42%		1.526.499		30.25 %		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan		190 Unit		7 Layanan		7 Layanan		100.00 %		7 Layanan		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			31.347.122		0		70.258.841		607.280		0.86%		607.280		1.94 %		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	58 Perangkat Daerah		N/A		58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			5.641.236		3.785.242		9.563.783		110.837		1.16%		3.896.078		69.06 %		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen		2 Unit		12 Dokumen		1 Dokumen		8.33 %		1 Dokumen		8.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
72	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.889.705		28.667.161		32.457.832		6.394.545		19.70%		35.061.706		85.75%		
			Tingkat kepuasan pegawai	93%		94.03 %		92%		94.89 %		103.14 %		94.89 %		102.03%		Dinas Koperasi	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kategori
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			terhadap pelayanan kesekretariatan															Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.133.950		26.005.087		28.587.198		5.903.590		20.65%		31.908.678		93.48%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.133.950		26.005.087		28.587.198		5.903.590		20.65%		31.908.678		93.48 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		97 Orang/bulan		99 Orang/bulan		96 Orang/bulan		96.97 %		96 Orang/bulan		114.29 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.755.756		2.662.073		3.870.635		490.955		12.68%		3.153.028		46.67%		
			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.759.388		2.370.590		2.981.048		470.506		15.78%		2.841.096		49.33 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			996.368		291.483		889.586		20.449		2.30%		311.932		31.31 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
73	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72%		
			Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	44%		30.36 %		37%		31.81 %		85.97 %		31.81 %		72.30%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72%		
			Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		6 koperasi		20.00 %		6 koperasi		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin			778.729		220.387		237.495		34.450		14.51%		254.837		32.72 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota																
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		30 Unit Usaha		6 Unit Usaha		20.00 %		6 Unit Usaha		20.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
74	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78%		
			Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	71%		85.54 %		70%		100%		142.86 %		100%		140.85%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78%		
			Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi		415 koperasi		415 koperasi		80 koperasi		19.28 %		80 koperasi		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		1.063.751		756.455		758.927		124.093		16.35%		880.548		82.78 %		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		415 Unit Usaha		80 Unit Usaha		19.28 %		80 Unit Usaha		19.28 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
75	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79%		
			Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	72%		44.26 %		57%		44.26 %		77.65 %		44.26 %		61.47%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang		103 Orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		565.398		202.360		1.739.668		0		0.00%		202.360		35.79 %		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang		103 Orang		103 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
76	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90%		
			Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	100%		60.00 %		80%		60%		75.00 %		60%		60.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90%		
			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi		83 koperasi		83 koperasi		0 koperasi		0.00 %		0 koperasi		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		559.292		453.329		656.135		60.640		9.24%		513.970		91.90 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha		83 Unit Usaha		83 Unit Usaha		0 Unit Usaha		0.00 %		0 Unit Usaha		0.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
77	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		3.423.539		2.454.629		2.307.974		436.819		18.93%		2.891.447		84.46%		
			Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui	50%		29.87 %		39.96 %		31.95 %		79.95 %		31.95 %		63.90%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			program kemitraan usaha																
			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%		87.76 %		100%		69.39 %		69.39 %		69.39 %		69.39%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			3.423.539		2.454.629		2.307.974		436.819		18.93%		2.891.447		84.46%		
			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	9 sentra		11 sentra		10 sentra		2 sentra		20.00 %		2 sentra		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		139 Orang		136 Orang		40 Orang		29.41 %		40 Orang		29.41 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			3.048.602		2.203.383		2.030.630		390.381		19.22%		2.593.764		85.08 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	9 Unit Usaha		11 Unit Usaha		10 Unit Usaha		2 Unit Usaha		20.00 %		2 Unit Usaha		22.22 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			374.936		251.246		277.344		46.438		16.74%		297.684		79.40 %		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha		139 Unit Usaha		136 Unit Usaha		40 Unit Usaha		29.41 %		40 Unit Usaha		29.41 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
78	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35%		
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	100%		77.88 %		88%		23.72 %		26.95 %		23.72 %		23.72%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35%		
			Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang		500 orang		500 orang		150 orang		30.00 %		150 orang		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
2.17.08.2.01.0002		Pengembangan Usaha Mikro			1.548.127		1.662.015		1.927.336		123.818		6.42%		1.785.834		115.35 %		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		500 Unit Usaha		150 Unit Usaha		30.00 %		150 Unit Usaha		30.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Menengah dan Perdagangan	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
79	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.852.455		13.674.891		16.776.984		2.785.043		16.60%		16.459.934		103.83%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		94.82 %		92%		97.65 %		106.14 %		97.65 %		105.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.545.528		10.399.359		12.196.868		2.281.246		18.70%		12.680.605		93.61%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.545.528		10.399.359		12.196.868		2.281.246		18.70%		12.680.605		93.61 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan		37 Orang/bulan		37 Orang/bulan		36 Orang/bulan		97.30 %		36 Orang/bulan		133.33 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.306.927		3.275.532		4.580.116		503.797		11.00%		3.779.329		163.83%		
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.125.937		3.163.095		4.384.710		489.567		11.17%		3.652.662		171.81 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan			180.990		112.437		195.406		14.230		7.28%		126.667		69.99 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85%		
			Jumlah Investor PMA/PMDN	230 Perusahaan		194.00 Perusahaan		210 Perusahaan		16 Perusahaan		7.62 %		16 Perusahaan		6.96%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85%		
			Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	78%		83.99 %		76%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		665.825		529.954		460.003		94.930		20.64%		624.884		93.85 %		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
81	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34%		
			Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%		58.36 %		60%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34%		
			Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor		293 Calon Investor / Investor		300 Calon Investor / Investor		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		0 Calon Investor / Investor		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		738.216		649.578		645.143		46.868		7.26%		696.446		94.34 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
82	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			5.864.492		3.652.335		3.053.940		637.992		20.89%		4.290.328		73.16%		
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			5.864.492		3.652.335		3.053.940		637.992		20.89%		4.290.328		73.16%		
			Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	100000 berkas		117393 berkas		95000 berkas		31660 berkas		33.33 %		31660 berkas		31.66 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	12000 Kegiatan usaha		11602 Kegiatan usaha		12000 Kegiatan usaha		2791 Kegiatan usaha		23.26 %		2791 Kegiatan usaha		23.26 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			1.092.027		747.110		622.579		118.503		19.03%		865.613		79.27 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12000 Kegiatan Usaha		11602 Kegiatan Usaha		12000 Kegiatan Usaha		2791 Kegiatan Usaha		23.26 %		2791 Kegiatan Usaha		23.26 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			4.772.465		2.905.225		2.431.361		519.489		21.37%		3.424.715		71.76 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui	16.000 Pelaku Usaha		12174 Pelaku Usaha		14000 Pelaku Usaha		3420 Pelaku Usaha		24.43 %		3420 Pelaku Usaha		21,375.00 %		Dinas Penanaman Modal dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
83	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.056.164		748.684		748.946		107.569		14.36%		856.253		81.07%		
			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	46%		51.90 %		45%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.056.164		748.684		748.946		107.569		14.36%		856.253		81.07%		
			Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1500 perusahaan		1551 perusahaan		1400 perusahaan		449 perusahaan		32.07 %		449 perusahaan		29.93 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			283.670		159.323		182.077		0		0.00%		159.323		56.16 %		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	290 Pelaku Usaha		289 Pelaku Usaha		280 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0.00 %		0 Pelaku Usaha		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			772.494		589.361		566.869		107.569		18.98%		696.930		90.22 %		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2960 Kegiatan Usaha		3047 Kegiatan Usaha		2930 Kegiatan Usaha		523 Kegiatan Usaha		17.85 %		523 Kegiatan Usaha		17.67 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
84	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82%		
			Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga		23.00 lembaga		20 lembaga		5 lembaga		25.00 %		5 lembaga		25.00%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82%		
			Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	500 perusahaan		407 perusahaan		450 perusahaan		120 perusahaan		26.67 %		120 perusahaan		24.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		377.020		125.775		89.139		16.823		18.87%		142.598		37.82 %		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
85	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		50.957.792		45.461.382		52.504.285		5.289.015		10.07%		50.750.396		99.59%		
			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	28%		24.52 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.98 %		47.99 %		47.60 %		10.03 %		21.07 %		10.03 %		20.90%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	28%		24.07 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		50.957.792		45.461.382		52.504.285		5.289.015		10.07%		50.750.396		99.59%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100.00 %		1 laporan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	24 jenis		22 jenis		19 jenis		1 jenis		5.26 %		1 jenis		4.17 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
2.19.02.2.01.0015		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			2.475.234		1.470.789		2.006.323		189.997		9.47%		1.660.787		67.10 %		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	810 Orang		925 Orang		859 Orang		62 Orang		7.22 %		62 Orang		7.65 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
2.19.02.2.01.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			1.715.027		405.964		457.168		45.895		10.04%		451.860		26.35 %		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan		825 Orang		10 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
2.19.02.2.01.0011		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota			1.758.202		707.567		796.715		44.047		5.53%		751.614		42.75 %		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang		700 Orang		700 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
2.19.02.2.01.0012		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa			45.009.330		42.877.061		49.244.078		5.009.075		10.17%		47.886.136		106.39 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dalam memajukan potensi pemuda																
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	15849 Orang		3515 Orang		3500 Orang		3142 Orang		89.77 %		3142 Orang		19.82 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
86	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			99.950.462		30.815.503		118.621.290		2.875.736		2.42%		33.691.239		33.71%		
			Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	205 medali		223.00 medali		195 medali		0 medali		0.00 %		0 medali		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	28%		18.00 %		27%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			24.739.225		4.576.504		39.828.095		38.800		0.10%		4.615.304		18.66%		
			Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	9 kecamatan		5 kecamatan		7 kecamatan		0 kecamatan		0.00 %		0 kecamatan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			24.739.225		4.576.504		39.828.095		38.800		0.10%		4.615.304		18.66 %		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	84 Unit		24 Unit		78 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			41.576.316		10.959.947		52.787.143		194.037		0.37%		11.153.985		26.83%		
			Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga		47 cabang olahraga		50 cabang olahraga		0 cabang olahraga		0.00 %		0 cabang olahraga		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			41.576.316		10.959.947		52.787.143		194.037		0.37%		11.153.985		26.83 %	serta Pariwisata	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	700 Orang		769 Orang		750 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			33.634.920		15.279.052		26.006.052		2.642.899		10.16%		17.921.951		53.28%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen		N/A		4 dokumen		1 dokumen		25.00 %		1 dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	166 lokasi		405 lokasi		393 lokasi		96 lokasi		24.43 %		96 lokasi		57.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			5.784.896		1.991.118		6.952.697		88.750		1.28%		2.079.868		35.95 %		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan		7 Dokumen		7 Laporan		1 Laporan		14.29 %		1 Laporan		14.29 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			27.850.024		13.287.934		19.053.356		2.554.149		13.41%		15.842.083		56.88 %		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	166 Unit		405 Unit		393 Unit		96 Unit		24.43 %		96 Unit		57.83 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
87	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71%		
			Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik			695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
				Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor		5 Sektor	5 Sektor		5 Sektor		100.00 %		5 Sektor		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.0010		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		695.275		375.169		518.547		46.933		9.05%		422.102		60.71 %		
				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		2 Dokumen		16.67 %		2 Dokumen		16.67 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
88	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		7.177.846		4.774.768		11.786.640		356.918		3.03%		5.131.686		71.49%		
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	41%		27.59 %	34%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.474.291		2.970.008		5.909.530		107.392		1.82%		3.077.400		68.78%		
				Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari		3 kali/per hari	3 kali/per hari		3.1 kali/per hari		103.33 %		3.1 kali/per hari		103.33 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		4.474.291		2.970.008		5.909.530		107.392		1.82%		3.077.400		68.78 %		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah		16 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		38.46 %		5 Perangkat Daerah		38.46 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		2.703.556		1.804.761		5.877.110		249.525		4.25%		2.054.286		75.98%		
				Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali		N/A	6 Kali		6 Kali		100.00 %		6 Kali		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.703.556		1.804.761		5.877.110		249.525		4.25%		2.054.286		75.98 %		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah		58 Perangkat Daerah		100.00 %		58 Perangkat Daerah		100.00 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
89	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			51.347.778		22.521.735		26.907.368		4.801.358		17.84%		27.323.093		53.21%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%		94.35 %		92%		95.31 %		103.60 %		95.31 %		102.48%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.124.462		20.805.705		24.476.111		4.537.849		18.54%		25.343.554		78.89%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.124.462		20.805.705		24.476.111		4.537.849		18.54%		25.343.554		78.89 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		79 Orang/bulan		79 Orang/bulan		76 Orang/bulan		96.20 %		76 Orang/bulan		105.56 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.223.316		1.716.030		2.431.257		263.509		10.84%		1.979.539		10.30%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.544.444		1.426.098		1.723.899		227.318		13.19%		1.653.415		9.42 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.678.872		289.932		707.358		36.191		5.12%		326.124		19.43 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-
90	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76%		
			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang	100%		80.00 %		90%		20%		22.22 %		20%		20.00%		Dinas Kebudayaan,	-

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			menampilkan budaya lokal															Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76%		
			Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	480 kali		408 kali		470 kali		65 kali		13.83 %		65 kali		13.54 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			6.343.173		4.036.199		9.124.877		135.312		1.48%		4.171.511		65.76 %		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		2 Objek		2 Objek		1 Objek		50.00 %		1 Objek		50.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
91	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63%		
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	62.00 %		60.56 %		61.00 %		60.56 %		99.28 %		60.56 %		97.68%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		3 dokumen		25.00 %		3 dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			2.443.046		1.050.339		1.350.224		137.746		10.20%		1.188.085		48.63 %		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	973 Orang		1436 Orang		934 Orang		851 Orang		91.11 %		851 Orang		87.46 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
92	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18%		
			Persentase siswa yang memahami materi sejarah	80%		77.55 %		78%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal			1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
				Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali		10 kali	10 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.04.2.01.0003		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		1.292.538		887.474		1.063.588		19.600		1.84%		907.074		70.18 %		
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
93	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43%		
				Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %		95.11 %	92.04 %		29.7 %		32.27 %		29.7 %		32.27%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43%		
				Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	289 lokasi		275 lokasi	280 lokasi		80 lokasi		28.57 %		80 lokasi		27.68 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya		1.514.094		946.717		1.176.501		210.508		17.89%		1.157.225		76.43 %		
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	289 Objek		275 Objek	280 Objek		80 Objek		28.57 %		80 Objek		27.68 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
94	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		3.477.181		8.977.289		9.009.770		1.580.465		17.54%		10.557.754		303.63%		
				Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%		100.00 %	100%		22.22 %		22.22 %		22.22 %		22.22%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		3.477.181		8.977.289		9.009.770		1.580.465		17.54%		10.557.754		303.63%		
				Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	8 lokasi		9 lokasi	9 lokasi		9 lokasi		100.00 %		9 lokasi		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, dan		223.926		422.046		450.849		29.900		6.63%		451.946		201.83 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit		730 Unit		730 Unit		200 Unit		27.40 %		200 Unit		27.40 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		433.529		799.291		813.648		6.864		0.84%		806.155		185.95 %		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		135.342		228.597		235.503		0		0.00%		228.597		168.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.22.06.2.01.0005		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		2.684.384		7.527.355		7.509.770		1.543.701		20.56%		9.071.056		337.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	8 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		100.00 %		9 Unit		112.50 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
95	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.264.534		18.568.263		23.276.788		4.350.180		18.69%		22.918.443		118.97%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.02 %		98.28 %		98.03 %		98.88 %		100.87 %		98.88 %		99.86%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.905.797		16.309.505		20.772.128		3.899.377		18.77%		20.208.882		127.05%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.905.797		16.309.505		20.772.128		3.899.377		18.77%		20.208.882		127.05 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		69 Orang/bulan		70 Orang/bulan		69 Orang/bulan		98.57 %		69 Orang/bulan		153.33 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		227.838		87.013		105.522		6.410		6.07%		93.423		41.00%		
			Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kantor																
	2.23.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		227.838		87.013		105.522		6.410		6.07%		93.423		41.00 %		dan Kearsipan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket		2 Paket		20.00 %		2 Paket		20.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		754.718		175.399		627.549		17.762		2.83%		193.160		25.59%		
			Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		754.718		175.399		627.549		17.762		2.83%		193.160		25.59 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		16 Unit		16 Unit		6 Unit		37.50 %		6 Unit		42.86 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.376.181		1.996.345		1.771.590		426.632		24.08%		2.422.978		101.97%		
			Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		214.853		287.270		320.280		42.751		13.35%		330.022		153.60 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.161.328		1.709.075		1.451.310		383.881		26.45%		2.092.956		96.84 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
96	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		32.318.230		16.464.349		15.512.437		2.943.319		18.97%		19.407.668		60.05%		
			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	100%		100.09 %		79.95 %		100.09 %		125.19 %		100.09 %		100.09%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100%		80.33 %		89.07 %		80.33 %		90.19 %		80.33 %		80.33%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase event literasi yang diselenggarakan	100%		58.80 %		79.2 %		63.76 %		80.51 %		63.76 %		63.76%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah		31.664.882		16.112.399		15.015.943		2.899.002		19.31%		19.011.401		60.04%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Kabupaten/Kota																	
			Jenis buku yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Tingkat Kepuasan Pemustaka	83.5 nilai		97.03 nilai		83 nilai		98.74 nilai		118.96 %		98.74 nilai		118.25 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga		306 Lembaga		230 Lembaga		1482 Lembaga		644.35 %		1482 Lembaga		644.35 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.0004		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			76.506		46.075		55.675		5.600		10.06%		51.675		67.54 %		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		106 Perpustakaan		30 Perpustakaan		1058 Perpustakaan		3,526.67 %		1058 Perpustakaan		3,526.67 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.0013		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			241.070		220.028		275.644		41.668		15.12%		261.696		108.56 %		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan		200 Perpustakaan		200 Perpustakaan		424 Perpustakaan		212.00 %		424 Perpustakaan		212.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.0009		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			1.665.490		491.280		927.128		27.789		3.00%		519.069		31.17 %		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1505 Eksemplar		1500 Eksemplar		1502 Eksemplar		0 Eksemplar		0.00 %		0 Eksemplar		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.394.765		15.126.473		13.549.411		2.782.137		20.53%		17.908.610		60.92 %		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1505 Perpustakaan		1500 Perpustakaan		1502 Perpustakaan		686 Perpustakaan		45.67 %		686 Perpustakaan		45.58 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			287.051		228.543		208.085		41.808		20.09%		270.351		94.18 %		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan	500 Orang		511 Orang		500 Orang		547 Orang		109.40 %		547 Orang		109.40 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		653.349		351.950		496.494		44.317		8.93%		396.267		60.65%		
			Jumlah bibit penulis dan pendongeng	7429 orang		5461 orang		6445 orang		5657 orang		87.77 %		5657 orang		76.15 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.02.2.02.0010		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		653.349		351.950		496.494		44.317		8.93%		396.267		60.65 %		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	260 Lokus		250 Lokus		255 Lokus		62 Lokus		24.31 %		62 Lokus		23.85 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
97	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		3.079.365		3.989.537		2.990.343		534.656		17.88%		4.524.193		146.92%		
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	17.98 %		15.21 %		16.03 %		16.14 %		100.69 %		16.14 %		89.77%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30.01 %		29.38 %		29.42 %		30.14 %		102.45 %		30.14 %		100.43%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%		77.72 %		88.10 %		77.68 %		88.17 %		77.68 %		77.68%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		943.857		1.755.512		1.058.509		167.119		15.79%		1.922.630		203.70%		
			Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item		9000 item		9000 item		2250 item		25.00 %		2250 item		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	66 lembaga		57 lembaga		60 lembaga		0 lembaga		0.00 %		0 lembaga		0.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0002		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		783.408		1.497.009		813.765		119.904		14.73%		1.616.912		206.39 %		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas		471 Berkas		471 Berkas		117 Berkas		24.84 %		117 Berkas		24.84 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		160.449		258.503		244.744		47.215		19.29%		305.718		190.54 %		
			Jumlah Laporan Hasil	66 Laporan		66 Laporan		66 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		1.743.109		1.700.618		1.439.994		268.100		18.62%		1.968.718		112.94%		
			Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar		8640 Lembar		8640 Lembar		2160 Lembar		25.00 %		2160 Lembar		25.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		1.743.109		1.700.618		1.439.994		268.100		18.62%		1.968.718		112.94 %		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		300 Arsip		300 Arsip		90 Arsip		30.00 %		90 Arsip		30.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		392.398		533.407		491.840		99.438		20.22%		632.845		161.28%		
			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga		70 Lembaga		69 Lembaga		69 Lembaga		100.00 %		69 Lembaga		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	9200 item		7783 item		8200 item		8260 item		100.73 %		8260 item		89.78 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		152.577		159.617		176.265		29.700		16.85%		189.317		124.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		70 Laporan		69 Laporan		69 Laporan		100.00 %		69 Laporan		100.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		239.821		373.790		315.575		69.738		22.10%		443.527		184.94 %		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna		9661 Pengguna		100 Pengguna		732 Pengguna		732.00 %		732 Pengguna		732.00 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
98	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62%		
			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	100%		59.98 %		79.98 %		20.48 %		25.61 %		20.48 %		20.48%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62%		
			Dokumen proses penilaian,	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun															Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.03.2.01.0001		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		178.274		52.700		90.209		10.800		11.97%		63.500		35.62 %		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip		1016 Arsip		880 Arsip		347 Arsip		39.43 %		347 Arsip		39.43 %		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
99	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14%		
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	50%		45.59 %		45%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.03.2.01.0004		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		4.094.028		1.228.192		1.648.321		87.707		5.32%		1.315.899		32.14 %		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	70 Unit		60 Unit		65 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
100	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.687.007		1.079.167		1.994.807		124.872		6.26%		1.204.039		71.37%		
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	40 orang/kelompok		30.00 orang/kelompok		35 orang/kelompok		30 orang/kelompok		85.71 %		30 orang/kelompok		75.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		379.056		289.530		437.839		33.960		7.76%		323.490		85.34%		
			Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	40 kali		36 kali		38 kali		4 kali		10.53 %		4 kali		10.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.02.0004		Pemberian Pendampingan,		379.056		289.530		437.839		33.960		7.76%		323.490		85.34 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok		31 Kelompok		35 Kelompok		4 Kelompok		11.43 %		4 Kelompok		10.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.307.951		789.637		1.556.968		90.912		5.84%		880.549		67.32%		
			Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.04.2.04.0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.307.951		789.637		1.556.968		90.912		5.84%		880.549		67.32 %		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 Unit		58 Unit		63 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
101	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39%		
			Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus		0.00 kasus		0 kasus		0 kasus		100.00 %		0 kasus		N/A		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39%		
			Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali		12 Kali		12 Kali		2 Kali		16.67 %		2 Kali		16.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.05.2.01.0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		45.590.707		157.109		207.018		18.866		9.11%		175.975		0.39 %		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan	1768 Pelaku Usaha		12 Dokumen		1768 Pelaku Usaha		305 Pelaku Usaha		17.25 %		305 Pelaku Usaha		17.25 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kabupaten/kota																
102	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87%		
			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	80%		70.00 %		75%		75%		100.00 %		75%		93.75%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87%		
			Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra		2 sentra		2 sentra		2 sentra		100.00 %		2 sentra		66.67 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			820.823		1.604.128		2.498.457		356.550		14.27%		1.960.679		238.87 %		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		180 Pelaku Usaha		100.00 %		180 Pelaku Usaha		72.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
103	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.263.210		6.811.771		7.571.917		1.220.168		16.11%		8.031.939		128.24%		
			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	78.57 %		50.00 %		64.28 %		50%		77.78 %		50%		63.64%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			5.122.716		5.641.610		6.592.256		1.140.441		17.30%		6.782.052		132.39%		
			Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100.00 %		2 lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			5.122.716		5.641.610		6.592.256		1.140.441		17.30%		6.782.052		132.39 %		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100.00 %		2 Lokasi		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)															serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.140.494		1.170.161		979.661		79.726		8.14%		1.249.887		109.59%		
			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi		1 lokasi		2 lokasi		0 lokasi		0.00 %		0 lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			150.212		121.826		174.761		11.200		6.41%		133.026		88.56 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		30 Laporan		50.00 %		30 Laporan		50.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			598.043		905.935		606.299		43.426		7.16%		949.361		158.74 %		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		1 Lokasi		2 Lokasi		0 Lokasi		0.00 %		0 Lokasi		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			392.238		142.400		198.600		25.100		12.64%		167.500		42.70 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
104	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98%		
			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	47%		116.18 %		45%		0%		0.00 %		0%		0%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98%		
			Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			6.583.809		1.794.350		5.278.868		179.568		3.40%		1.973.918		29.98 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pariwisata Kabupaten/Kota																
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100.00 %		2 Kegiatan		100.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
105	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.802.104		1.513.841		2.178.603		208.441		9.57%		1.722.282		61.46%		
			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	100%		60.00 %		80%		5%		6.25 %		5%		5.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	28%		24.11 %		26%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			822.352		387.399		621.701		44.374		7.14%		431.773		52.50%		
			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis		2 jenis		2 jenis		3 jenis		150.00 %		3 jenis		150.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			424.235		185.535		294.368		19.758		6.71%		205.294		48.39 %		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	300 Orang		276 Orang		300 Orang		98 Orang		32.67 %		98 Orang		32.67 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			398.118		201.863		327.333		24.616		7.52%		226.479		56.89 %		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya	80 Orang		60 Orang		80 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Dinas Kebudayaan,	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berdasarkan pada SKKNI															Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.126.442		1.556.902		164.067		10.54%		1.290.509		65.19%		
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk		4 Produk		5 Produk		0 Produk		0.00 %		0 Produk		0.00 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			1.979.752		1.126.442		1.556.902		164.067		10.54%		1.290.509		65.19 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang		220 Orang		220 Orang		17 Orang		7.73 %		17 Orang		6.80 %		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
106	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			7.660.760		4.155.520		6.157.166		464.717		7.55%		4.620.237		60.31%		
			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	45 Orang		35.00 Orang		40 Orang		35 Orang		87.50 %		35 Orang		77.78%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6.792.603		2.597.491		2.753.200		252.520		9.17%		2.850.011		41.96%		
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			6.792.603		2.081.176		2.753.200		252.520		9.17%		2.333.696		34.36 %		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			868.157		1.558.029		3.403.967		212.196		6.23%		1.770.226		203.91%		
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.27.02.2.03.0001		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / T anaman Skala Kecil		868.157		1.558.029		3.403.967		212.196		6.23%		1.770.226		203.91 %		
				Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
107	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		21.217.227		12.290.442		11.699.182		1.824.961		15.60%		14.115.403		66.53%		
				Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		2.00 Ha	2 Ha		0 Ha		0.00 %		0 Ha		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	35 Lokasi		24.00 Lokasi	29 Lokasi		24 Lokasi		82.76 %		24 Lokasi		68.57%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian		1.309.313		6.043.590		4.629.593		1.015.750		21.94%		7.059.341		539.16%		
				Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis		0 Jenis		0.00 %		0 Jenis		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1.309.313		6.043.590		4.629.593		1.015.750		21.94%		7.059.341		539.16 %		
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		16 Laporan	16 Laporan		11 Laporan		68.75 %		11 Laporan		183.33 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		19.907.914		6.246.851		7.069.589		809.211		11.45%		7.056.062		35.44%		
				Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		19.907.914		6.246.851		7.069.589		809.211		11.45%		7.056.062		35.44 %		
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		2 Unit	2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		15.38 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
108	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1.140.798		1.668.710		2.346.040		215.467		9.18%		1.884.177		165.16%		
				Persentase populasi ternak	89.5 %		90.58 %	89.5 %		78.04 %		87.20 %		78.04 %		87.20%		Dinas	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan															Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	8 kelompok		6.00 kelompok		7 kelompok		0 kelompok		0.00 %		0 kelompok		0.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			845.362		1.296.816		1.199.492		209.867		17.50%		1.506.683		178.23%		
			Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%		89.15 %		80%		88.62 %		110.78 %		88.62 %		110.78 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			845.362		1.296.816		1.199.492		209.867		17.50%		1.506.683		178.23 %		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			295.436		371.894		1.146.547		5.600		0.49%		377.494		127.78%		
			Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	45 Unit		36 Unit		40 Unit		9 Unit		22.50 %		9 Unit		20.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			295.436		371.894		1.146.547		5.600		0.49%		377.494		127.78 %		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	40 Unit Usaha		36 Unit Usaha		40 Unit Usaha		9 Unit Usaha		22.50 %		9 Unit Usaha		22.50 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
109	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59%		
			Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59%		
			Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor	80%		100%		80%		100%		125.00 %		100%		125.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.27.06.2.01.0002		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	pertanian dan perikanan		113.553		28.000		48.922		5.600		11.45%		33.600		29.59 %	
				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
110	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.709.423		2.058.457		2.784.192		256.894		9.23%		2.315.351		85.46%	
				Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Tingkat Produktivitas Pertanian	6.05 ton/ha		6.72 ton/ha	6 ton/ha		6.79 ton/ha		113.17 %		6.79 ton/ha		112.23%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.709.423		2.058.457		2.784.192		256.894		9.23%		2.315.351		85.46%	
				Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang		25 orang	25 orang		0 orang		0.00 %		0 orang		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali		7 kali	7 kali		0 kali		0.00 %		0 kali		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.702.059		962.129		1.751.811		90.559		5.17%		1.052.688		61.85 %	
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		7 Unit	7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1.007.364		1.096.329		1.032.381		166.334		16.11%		1.262.663		125.34 %	
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
111	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			1.879.526		899.481		904.619		146.730		16.22%		1.046.211		55.66%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan	96%		97.57 %	95%		100%		105.26 %		100%		104.17%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan			501.503		255.482		271.654		43.344		15.96%		298.826		59.59%	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																
				Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		501.503		255.482		271.654		43.344		15.96%		298.826		59.59 %		
				Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen		616 Dokumen	450 Dokumen		132 Dokumen		29.33 %		132 Dokumen		29.33 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		585.879		250.280		221.052		37.641		17.03%		287.921		49.14%		
				Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.02.0001			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		585.879		250.280		221.052		37.641		17.03%		287.921		49.14 %		
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen		203 Dokumen	60 Dokumen		67 Dokumen		111.67 %		67 Dokumen		111.67 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.03			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		127.369		82.926		98.504		15.119		15.35%		98.045		76.98%		
				Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.03.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		127.369		82.926		98.504		15.119		15.35%		98.045		76.98 %		
				Jumlah Dokumen yang	24 Dokumen		27 Dokumen	24 Dokumen		8 Dokumen		33.33 %		8 Dokumen		33.33 %		Dinas Koperasi	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri															Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		127.369		28.000		52.197		5.600		10.73%		33.600		26.38%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.04.0002		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		127.369		28.000		52.197		5.600		10.73%		33.600		26.38 %		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen		27 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		537.406		282.792		261.213		45.027		17.24%		327.819		61.00%		
			Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.02.2.05.0001		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		537.406		282.792		261.213		45.027		17.24%		327.819		61.00 %		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen		45 Dokumen		40 Dokumen		18 Dokumen		45.00 %		18 Dokumen		45.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
112	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI		4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		PERDAGANGAN																	
			Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30%		
			Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			4.968.209		4.532.608		4.295.244		1.046.938		24.37%		5.579.546		112.30 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen		645 Dokumen		611 Dokumen		150 Dokumen		24.55 %		150 Dokumen		24.55 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
113	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			1.309.691		610.175		752.338		119.297		15.86%		729.472		55.70%		
			Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.309.691		610.175		752.338		119.297		15.86%		729.472		55.70%		
			Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan		N/A		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota			425.952		263.394		251.066		67.336		26.82%		330.730		77.64 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok			883.738		346.781		501.272		51.961		10.37%		398.742		45.12 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
114	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		2.045.562		618.272		792.743		82.870		10.45%		701.142		34.28%		
				Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		2.045.562		618.272		792.743		82.870		10.45%		701.142		34.28%		
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		1.898.815		520.604		675.840		67.776		10.03%		588.379		30.99 %		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	24290 Unit		23358 Unit	23810 Unit		6354 Unit		26.69 %		6354 Unit		26.16 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		146.747		97.669		116.903		15.095		12.91%		112.763		76.84 %		
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang		1222 Orang	1200 Orang		306 Orang		25.50 %		306 Orang		25.50 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
115	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73%		
				Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73%		
				Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan		12 laporan	12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	3.30.07.2.01.0006		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota		6.660.120		6.652.756		6.575.613		1.121.644		17.06%		7.774.400		116.73 %		
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM		5220 UMKM	5220 UMKM		1000 UMKM		19.16 %		1000 UMKM		19.16 %		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
116	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		726.718		495.562		958.755		36.033		3.76%		531.595		73.15%		
				Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	26%		20.01 %	22%		3.79 %		17.23 %		3.79 %		14.58%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		726.718		495.562		958.755		36.033		3.76%		531.595		73.15%		
				Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		136.965		113.075		136.965		0		0.00%		113.075		82.56 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		589.753		382.487		821.790		36.033		4.38%		418.520		70.97 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
117	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94%		
				Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	90%		85.21 %	87%		38.13 %		43.83 %		38.13 %		42.37%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha		331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																
				Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		331.422		295.539		375.278		29.050		7.74%		324.590		97.94 %		
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
118	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10%		
				Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10%		
				Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		213.589		227.600		342.244		39.600		11.57%		267.200		125.10 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Dinas Perindustrian dan Tenaga	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kategori
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															Kerja	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH																	
119	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			262.195.831		261.375.376		278.995.000		43.351.880		15.54%		304.727.256		116.22%		
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		95.45 %		100%		96.62 %		96.62 %		96.62 %		96.62%		Sekretariat Daerah	
			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		100.00 %		98%		100%		102.04 %		100%		102.04%		Sekretariat Daerah	
			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	75%		100.00 %		72.22 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	98%		99.64 %		96%		100%		104.17 %		100%		102.04%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase perangkat	90%		100.00 %		90%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan															Daerah	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.628.677		66.560.269		81.928.394		14.725.052		17.97%		81.285.321		88.71%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			91.628.677		66.560.269		81.928.394		14.725.052		17.97%		81.285.321		88.71 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan		200 Orang/bulan		197 Orang/bulan		195 Orang/bulan		98.98 %		195 Orang/bulan		124.20 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.083.838		686.930		536.431		136.094		25.37%		823.024		20.15%		
			Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			4.083.838		686.930		536.431		136.094		25.37%		823.024		20.15 %		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		5 Paket		5 Paket		1 Paket		20.00 %		1 Paket		20.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			33.982.990		17.851.340		57.653.627		4.582.957		7.95%		22.434.297		66.02%		
			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan		12 laporan		12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.982.990		17.851.340		57.653.627		4.582.957		7.95%		22.434.297		66.02 %		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1200 Unit		6366 Unit		1400 Unit		538 Unit		38.43 %		538 Unit		44.83 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.205.968		146.359.655		105.064.833		18.049.659		17.18%		164.409.314		260.12%		
			Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%		N/A		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			52.008.578		140.288.508		99.873.042		17.173.270		17.20%		157.461.777		302.76 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan			6.349.570		3.850.845		3.140.118		506.767		16.14%		4.357.612		68.63 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.847.821		2.220.303		2.051.673		369.622		18.02%		2.589.925		53.42 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			9.302.988		8.304.104		12.222.634		1.775.122		14.52%		10.079.226		108.34%		
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			8.072.880		8.129.478		12.036.469		1.725.000		14.33%		9.854.478		122.07 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.230.108		174.626		186.165		50.122		26.92%		224.749		18.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		100.00 %		2 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi			3.818.611		2.327.689		3.229.786		338.760		10.49%		2.666.448		69.83%		
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		20.69 %		12 instansi		20.69 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi		58 instansi		58 instansi		12 instansi		20.69 %		12 instansi		20.69 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit		253 unit		253 unit		253 unit		100.00 %		253 unit		100.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas			1.545.079		622.631		1.195.537		83.903		7.02%		706.534		45.73 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1.005.337		859.265		1.019.345		136.937		13.43%		996.202		99.09 %		
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1.268.196		845.793		1.014.904		117.920		11.62%		963.712		75.99 %		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen		50.00 %		1 Dokumen		50.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		56.172.758		19.285.389		18.359.296		3.744.237		20.39%		23.029.626		41.00%		
				Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
				Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan		12 laporan	12 laporan		3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan		54.169.994		18.617.037		17.923.137		3.666.282		20.46%		22.283.319		41.14 %		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		2.002.763		668.352		436.159		77.955		17.87%		746.307		37.26 %		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
120	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		40.046.015		99.965.458		275.464.980		58.058.069		21.08%		158.023.528		394.60%		
				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	100%		100.00 %	99%		100%		101.01 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	100%		79.33 %	77.83 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
				Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		100.00 %	100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
				Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari		14.00 hari	14 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00		Sekretariat Daerah	
				Persentase produk hukum	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang disebarluaskan															Daerah	
			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari		2.00 hari		2 hari		0 hari		200.00 %		0 hari		200.00		Sekretariat Daerah	
			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	100%		100.00 %		90%		100%		111.11 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	100%		87.10 %		90.32 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	100%		100.00 %		97%		100%		103.09 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			14.579.943		7.240.600		12.563.851		511.099		4.07%		7.751.699		53.17%		
			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	31 Kecamatan		27 Kecamatan		28 Kecamatan		0 Kecamatan		0.00 %		0 Kecamatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	185 Lembaga		142 Lembaga		144 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5.403.004		4.243.992		4.426.347		231.923		5.24%		4.475.916		82.84 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		100.00 %		2 Dokumen		100.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan			4.813.183		1.910.130		4.410.785		94.681		2.15%		2.004.811		41.65 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4.363.756		1.086.478		3.726.719		184.494		4.95%		1.270.972		29.13 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.931.081		86.966.500		252.264.437		56.641.347		22.45%		143.607.847		2,912.30%		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			outreach															Daerah	
			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00 %		0 Kegiatan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3.101.912		33.502.844		32.633.395		5.602.518		17.17%		39.105.363		1.260.69 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			104.165		52.626.891		61.453.965		12.126.250		19.73%		64.753.142		62,163.73 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.725.003		836.764		158.177.077		38.912.578		24.60%		39.749.342		2,304.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			17.480.417		4.671.125		7.767.319		676.949		8.72%		5.348.075		30.59%		
			Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		21 permasalahan hukum		20 permasalahan hukum		2 permasalahan hukum		10.00 %		2 permasalahan hukum		10.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum		67 rancangan produk hukum		60 rancangan produk hukum		15 rancangan produk hukum		25.00 %		15 rancangan produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum		67 produk hukum		60 produk hukum		15 produk hukum		25.00 %		15 produk hukum		25.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum			8.163.200		1.553.180		2.337.888		289.077		12.36%		1.842.256		22.57 %		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		2 Kasus		10.00 %		2 Kasus		10.00 %		Sekretariat Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Bantuan Hukum																
	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		7.357.890		2.129.127		4.091.596		306.943		7.50%		2.436.070		33.11 %		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1.959.326		988.819		1.337.834		80.930		6.05%		1.069.749		54.60 %		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen		67 Dokumen		60 Dokumen		15 Dokumen		25.00 %		15 Dokumen		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		3.054.574		1.087.234		2.869.373		228.674		7.97%		1.315.908		43.08%		
			Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga		31 Lembaga		32 Lembaga		8 Lembaga		25.00 %		8 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga		11 Lembaga		12 Lembaga		3 Lembaga		25.00 %		3 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga		20 Lembaga		20 Lembaga		5 Lembaga		25.00 %		5 Lembaga		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		171.358		214.550		451.887		43.783		9.69%		258.333		150.76 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1.043.032		519.579		608.803		174.091		28.60%		693.670		66.51 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0002		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1.840.185		353.105		1.808.683		10.800		0.60%		363.905		19.78 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
121	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		34.422.025		15.528.731		20.134.497		1.960.399		9.74%		17.489.130		50.81%		
			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	100%		100.00 %		90%		33.33 %		37.03 %		33.33 %		33.33%		Sekretariat Daerah	
			Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat Daerah	
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	86%		85.07 %		85.5 %		1.24 %		1.45 %		1.24 %		1.44%		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.723.953		5.336.147		4.691.641		490.837		10.46%		5.826.984		123.35%		
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
			Jumlah laporan pelaksanaan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kebijakan perekonomian															Daerah	
	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		2.272.753		936.290		1.221.798		135.400		11.08%		1.071.690		47.15 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1.863.337		3.808.798		2.840.033		228.936		8.06%		4.037.734		216.69 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		587.864		591.059		629.810		126.501		20.09%		717.561		122.06 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		16.052.307		6.678.176		10.532.329		874.751		8.31%		7.552.927		47.05%		
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		8.427.767		4.786.568		6.528.784		540.050		8.27%		5.326.618		63.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		2 Laporan		12.50 %		2 Laporan		12.50 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		7.624.540		1.891.608		4.003.546		334.701		8.36%		2.226.309		29.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		13.527.842		3.474.108		4.819.622		594.811		12.34%		4.068.919		30.08%		
			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat Daerah	
			Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	98%		100%		96%		100%		104.17 %		100%		102.04 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		11.720.292		207.630		315.600		18.600		5.89%		226.230		1.93 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		308 Orang		300 Orang		75 Orang		25.00 %		75 Orang		25.00 %		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan		1.807.550		3.266.478		4.504.022		576.211		12.79%		3.842.689		212.59 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Barang dan Jasa																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen		102 Dokumen		20 Dokumen		7 Dokumen		35.00 %		7 Dokumen		35.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117.922		40.300		90.905		0		0.00%		40.300		34.18%		
			Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0.00 %		0 laporan		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			117.922		40.300		90.905		0		0.00%		40.300		34.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat Daerah	
4.02		SEKRETARIAT DPRD																	
122	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			211.561.797		117.381.352		198.903.813		24.456.333		12.30%		141.837.685		67.04%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		92.74 %		93.5 %		93.46 %		99.96 %		93.46 %		99.43%		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.979.496		12.408.925		15.828.136		2.869.646		18.13%		15.278.571		95.61%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.979.496		12.408.925		15.828.136		2.869.646		18.13%		15.278.571		95.61 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		50 Orang/bulan		98.04 %		50 Orang/bulan		86.21 %		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.164.551		28.968.549		35.621.377		5.175.915		14.53%		34.144.464		113.19%		
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.164.551		28.968.549		35.621.377		5.175.915		14.53%		34.144.464		113.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket		11 Paket		11 Paket		100.00 %		11 Paket		100.00 %		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.459.328		4.993.782		5.333.567		412.686		7.74%		5.406.468		99.03%		
			Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari		1.02 Hari		1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	4.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.459.328		4.993.782		5.333.567		412.686		7.74%		5.406.468		99.03 %		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit		206 Unit	204 Unit		39 Unit		19.12 %		39 Unit		19.12 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		96.495.857		28.445.816		85.215.578		2.991.074		3.51%		31.436.890		32.58%		
				Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari		1 Hari	1 Hari		1 Hari		100.00 %		1 Hari		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan		96.495.857		28.445.816		85.215.578		2.991.074		3.51%		31.436.890		32.58 %		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan		97 Laporan	96 Laporan		24 Laporan		25.00 %		24 Laporan		25.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		59.974.263		42.022.087		54.522.057		12.967.543		23.78%		54.989.630		91.69%		
				Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		59.974.263		42.022.087		54.522.057		12.967.543		23.78%		54.989.630		91.69 %		
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan		50 Orang/Bulan		100.00 %		50 Orang/Bulan		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD		3.488.302		542.193		2.383.099		39.468		1.66%		581.661		16.67%		
				Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari		1.27 Hari	2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		3.488.302		542.193		2.383.099		39.468		1.66%		581.661		16.67 %		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan		11 Laporan	36 Laporan		2 Laporan		5.56 %		2 Laporan		5.56 %		Sekretariat DPRD	
123	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		50.604.084		61.989.027		77.104.891		21.901.382		28.40%		83.890.410		165.78%		
				Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5.204.429		901.494		3.966.580		42.335		1.07%		943.830		18.14%		
				Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5.204.429		901.494		3.966.580		42.335		1.07%		943.830		18.14 %		
				Jumlah Dokumen Hasil	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Sekretariat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah															DPRD	
	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		23.981.751		27.315.122		27.781.433		6.405.506		23.06%		33.720.628		140.61%		
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang		28 Orang		50 Orang		19 Orang		38.00 %		19 Orang		38.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD		1.976.169		546.000		1.876.347		109.000		5.81%		655.000		33.14 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen		6 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		150.00 %		3 Dokumen		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD		22.005.582		26.769.122		25.905.086		6.296.506		24.31%		33.065.628		150.26 %		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100.00 %		4 Dokumen		100.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		16.446.120		30.361.680		40.676.058		15.083.833		37.08%		45.445.512		276.33%		
			Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		33.33 %		1 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses		16.446.120		30.361.680		40.676.058		15.083.833		37.08%		45.445.512		276.33 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen		100 Dokumen		150 Dokumen		50 Dokumen		33.33 %		50 Dokumen		33.33 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		4.971.784		3.410.732		4.680.819		369.708		7.90%		3.780.440		76.04%		
			Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari		1 Hari		2 Hari		1 Hari		150.00 %		1 Hari		150.00 %		Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		4.971.784		3.410.732		4.680.819		369.708		7.90%		3.780.440		76.04 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen		55 Dokumen		36 Dokumen		11 Dokumen		30.56 %		11 Dokumen		30.56 %		Sekretariat DPRD	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01		PERENCANAAN																	
124	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.308.369		26.611.544		30.021.852		5.658.837		18.85%		32.270.381		91.40%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.69 %		97.47 %		95.62 %		97.98 %		102.47 %		97.98 %		102.39%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		210.672		238.160		282.328		37.700		13.35%		275.860		130.94%		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100.00 %		2 jenis		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		210.672		238.160		282.328		37.700		13.35%		275.860		130.94 %		Pengembangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		2 Dokumen		25.00 %		2 Dokumen		22.22 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.185.574		23.367.636		25.544.049		5.047.562		19.76%		28.415.198		91.12%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31.185.574		23.367.636		25.544.049		5.047.562		19.76%		28.415.198		91.12 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		69 Orang/bulan		69 Orang/bulan		66 Orang/bulan		95.65 %		66 Orang/bulan		143.48 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.912.122		3.005.748		4.195.475		573.575		13.67%		3.579.323		91.49%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.386.893		2.689.987		3.376.030		524.325		15.53%		3.214.312		94.90 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		525.229		315.761		819.445		49.250		6.01%		365.011		69.50 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
125	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN		3.929.602		2.461.307		2.469.109		431.385		17.47%		2.892.692		73.61%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.402.991		1.203.410		1.202.234		314.742		26.18%		1.518.153		108.21%		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen		6 dokumen		7 dokumen		2 dokumen		28.57 %		2 dokumen		33.33 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.402.991		1.203.410		1.202.234		314.742		26.18%		1.518.153		108.21 %		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.519.411		747.116		724.979		50.842		7.01%		797.958		52.52%		
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.519.411		747.116		724.979		50.842		7.01%		797.958		52.52 %		
			Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)															Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.007.199		510.781		541.896		65.800		12.14%		576.581		57.25%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD		58 PD		58 PD		58 PD		100.00 %		58 PD		100.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.007.199		510.781		541.896		65.800		12.14%		576.581		57.25 %		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
126	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			10.791.670		5.008.346		5.427.802		789.725		14.55%		5.798.072		53.73%		
			Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.63 %		98.82 %		98.56 %		99.41 %		100.86 %		99.41 %		100.79%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3.064.620		1.791.118		2.009.006		330.143		16.43%		2.121.261		69.22%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.742.848		1.037.762		1.238.209		193.328		15.61%		1.231.091		70.64 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Manusia															Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1.321.772		753.356		770.797		136.814		17.75%		890.170		67.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			3.728.973		1.475.183		1.863.646		233.563		12.53%		1.708.747		45.82%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			2.300.253		764.062		953.567		132.918		13.94%		896.980		38.99 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1.428.720		711.121		910.079		100.646		11.06%		811.767		56.82 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.998.078		1.742.045		1.555.150		226.019		14.53%		1.968.064		49.23%		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		2.288.163		902.102		681.139		118.173		17.35%		1.020.276		44.59 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		1.709.914		839.943		874.011		107.846		12.34%		947.788		55.43 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.02	KEUANGAN																	
127	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		158.554.798		81.246.134		300.720.459		16.949.247		5.64%		98.195.381		61.93%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		93.83 %		93%		95.83 %		103.04 %		95.83 %		101.95%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%		95.94 %		93%		96.2 %		103.44 %		96.2 %		102.34%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		138.590.122		67.071.373		284.322.210		14.898.476		5.24%		81.969.849		59.15%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		33.513.641		28.792.537		243.658.664		6.474.524		2.66%		35.267.061		105.23 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		89 Orang/bulan		89 Orang/bulan		88 Orang/bulan		98.88 %		88 Orang/bulan		106.02 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		105.076.481		38.278.835		40.663.546		8.423.952		20.72%		46.702.787		44.45 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		119 Orang/bulan		118 Orang/bulan		118 Orang/bulan		100.00 %		118 Orang/bulan		103.51 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan		302.277		237.417		237.515		38.532		16.22%		275.949		91.29%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.04.0002		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			302.277		237.417		237.515		38.532		16.22%		275.949		91.29 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.257.261		50.949		140.224		0		0.00%		50.949		2.26%		
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.257.261		50.949		140.224		0		0.00%		50.949		2.26 %		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit		200 Unit		200 Unit		200 Unit		100.00 %		200 Unit		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.380.438		10.635.122		11.823.419		1.690.349		14.30%		12.325.471		147.07%		
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.381.130		2.514.281		2.460.965		397.027		16.13%		2.911.307		122.27 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.702.468		5.660.728		5.911.788		908.904		15.37%		6.569.631		115.21 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		52.856		405.354		419.918		96.735		23.04%		502.089		949.92 %		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		243.984		2.054.759		3.030.748		287.684		9.49%		2.342.444		960.08 %		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.024.700		3.251.273		4.197.092		321.890		7.67%		3.573.164		39.59%		
				Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		9.024.700		3.251.273		4.197.092		321.890		7.67%		3.573.164		39.59 %		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.240 Unit		1821 Unit	2380 Unit		230 Unit		9.66 %		230 Unit		10,267.86 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
128	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		22.253.236		7.098.338		44.708.860		1.120.914		2.51%		8.219.252		36.94%		
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%		100.00 %	100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2.377.973		3.488.952		3.580.704		553.117		15.45%		4.042.070		169.98%		
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun																
	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		570.265		1.134.049		1.230.976		298.262		24.23%		1.432.311		251.17 %		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		595.726		801.567		759.023		88.700		11.69%		890.266		149.44 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		637.253		1.270.075		1.269.578		118.256		9.31%		1.388.331		217.86 %		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		574.729		283.262		321.126		47.900		14.92%		331.162		57.62 %		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.181.881		1.883.392		2.300.704		335.509		14.58%		2.218.901		69.74%		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		1 dokumen		25.00 %		1 dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian	104440 berkas		108992 berkas		99464 berkas		19785 berkas		19.89 %		19785 berkas		18.94 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembayaran yang dilayani																
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		N/A		244 Dokumen		60 Dokumen		24.59 %		60 Dokumen		24.59 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			625.752		607.156		541.828		105.945		19.55%		713.101		113.96 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		60 Dokumen		24.59 %		60 Dokumen		24.59 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			376.596		382.730		368.299		69.943		18.99%		452.673		120.20 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			2.179.533		893.506		1.390.578		159.621		11.48%		1.053.127		48.32 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen		108992 Dokumen		99464 Dokumen		19785 Dokumen		19.89 %		19785 Dokumen		18.94 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.193.382		1.128.467		1.327.453		189.987		14.31%		1.318.454		110.48%		
			Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.0008		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1.193.382		1.128.467		1.327.453		189.987		14.31%		1.318.454		110.48 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		37.50 %		9 Dokumen		37.50 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		15.500.000		597.526		37.500.000		42.301		0.11%		639.827		4.13%		
				Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%		100%	100%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%		25%	25%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		500.000		0		500.000		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		15.000.000		597.526		37.000.000		42.301		0.11%		639.827		4.27 %		
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
129	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		50.448.426		26.107.014		26.855.210		5.436.539		20.24%		31.543.553		62.53%		
				Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %		34.00 %	33.3 %		8.33 %		25.02 %		8.33 %		25.02%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		50.448.426		26.107.014		26.855.210		5.436.539		20.24%		31.543.553		62.53%		
				Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%		N/A	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen		31 Dokumen	30 Dokumen		7 Dokumen		23.33 %		7 Dokumen		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		10.102.386		17.623.128		17.652.981		3.828.264		21.69%		21.451.391		212.34 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	7679 Dokumen		8554 Dokumen	7679 Dokumen		1916 Dokumen		24.95 %		1916 Dokumen		24.95 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Daerah		3.138.336		1.361.816		1.388.350		283.594		20.43%		1.645.410		52.43 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		100.00 %		60 Orang		100.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			9.289.359		5.488.063		6.207.685		1.005.311		16.19%		6.493.374		69.90 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			27.918.345		1.634.007		1.606.194		319.370		19.88%		1.953.377		7.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan		31 Laporan		30 Laporan		7 Laporan		23.33 %		7 Laporan		23.33 %		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
130	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			37.665.666		17.639.782		15.853.354		2.929.097		18.48%		20.568.879		54.61%		
			Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	85%		99.96 %		84%		100%		119.05 %		100%		117.65%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%		77.37 %		60%		52.69 %		87.82 %		52.69 %		87.82%		Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	73%		69.06 %		71%		19.5 %		27.46 %		19.5 %		26.71%		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			37.665.666		17.639.782		15.853.354		2.929.097		18.48%		20.568.879		54.61%		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20615 Objek Pajak		22318 Objek Pajak		20211 Objek Pajak		8451 Objek Pajak		41.81 %		8451 Objek Pajak		40.99 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pengawasan Pajak Daerah		697.318		302.730		311.809		74.538		23.90%		377.267		54.10 %		
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	4.872.361	12 Dokumen	3.221.236		2.771.775		528.871		19.08%		3.750.107		76.97 %		
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	17.564.766	12 Laporan	6.526.269		5.841.163		1.206.581		20.66%		7.732.851		44.02 %		
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.397.431	12 Dokumen	2.880.014		2.887.838		426.310		14.76%		3.306.323		236.60 %		
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.615 Obyek Pajak	13.133.790	22318 Obyek Pajak	4.709.533		4.040.768		692.798		17.15%		5.402.331		41.13 %		
	5.03	KEPEGAWAIAN																	
131	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	19.003.190	94.18 %	16.252.694		19.138.517		3.839.582		20.06%		20.092.277		105.73%		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16.673.062	100%	15.060.771		17.235.803		3.632.783		21.08%		18.693.553		112.12%		
																		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.673.062		15.060.771		17.235.803		3.632.783		21.08%		18.693.553		112.12 %		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		44 Orang/bulan	45 Orang/bulan		43 Orang/bulan		95.56 %		43 Orang/bulan		107.50 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.624.599		677.650		1.309.162		106.016		8.10%		783.665		48.24%		
				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.624.599		677.650		1.309.162		106.016		8.10%		783.665		48.24 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		15 Paket	28 Paket		14 Paket		50.00 %		14 Paket		50.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		705.530		514.274		593.552		100.784		16.98%		615.058		87.18%		
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		705.530		514.274		593.552		100.784		16.98%		615.058		87.18 %		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
132	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		7.304.388		5.046.593		7.600.053		735.485		9.68%		5.782.079		79.16%		
				Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	37.94 %		26.19 %	35.25 %		26.19 %		74.30 %		26.19 %		69.03%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase pegawai yang disiplin	96.99 %		97.33 %	96.80 %		97.33 %		100.55 %		97.33 %		100.35%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Sumber Daya Manusia	
			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	95%		99.88 %		94%		99.88 %		106.26 %		99.88 %		105.14%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		94.83 %		94.83 %		94.83 %		94.83%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			2.823.680		939.000		3.511.375		255.768		7.28%		1.194.768		42.31%		
			Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	94%		100%		93%		0%		0.00 %		0%		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			2.014.416		453.986		3.014.521		158.942		5.27%		612.928		30.43 %		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian			483.991		228.199		220.420		43.900		19.92%		272.099		56.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			325.274		256.815		276.434		52.925		19.15%		309.740		95.22 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN			1.935.060		1.091.638		1.482.417		198.652		13.40%		1.290.290		66.68%		
			Jumlah berkas mutasi, promosi	8555 berkas		11789 berkas		8555 berkas		1863 berkas		21.78 %		1863 berkas		21.78 %		Badan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian															Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			695.225		275.282		449.718		77.113		17.15%		352.395		50.69 %		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN			649.787		463.256		488.581		83.740		17.14%		546.995		84.18 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN			590.048		353.100		544.119		37.800		6.95%		390.900		66.25 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.545.648		3.015.955		2.606.261		281.065		10.78%		3.297.021		129.52%		
			Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis		2 jenis		2 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		5 jenis		5 jenis		3 jenis		60.00 %		3 jenis		60.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		1 jenis		1 jenis		0 jenis		0.00 %		0 jenis		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			933.164		1.948.400		1.143.002		50.300		4.40%		1.998.700		214.19 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		684.603		602.563		707.279		111.564		15.77%		714.128		104.31 %		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5199 Dokumen		5939 Dokumen	5502 Dokumen		7660 Dokumen		139.22 %		7660 Dokumen		147.34 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		927.881		464.992		755.980		119.201		15.77%		584.193		62.96 %		
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
133	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.535.107		4.875.131		4.813.488		242.558		5.04%		5.117.689		53.67%		
				Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	96%		100.00 %	95.5 %		100%		104.71 %		100%		104.17%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		2.027.793		3.735.836		1.946.145		115.050		5.91%		3.850.885		189.91%		
				Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang		2232 orang	2232 orang		200 orang		8.96 %		200 orang		8.96 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		2.027.793		3.735.836		1.946.145		115.050		5.91%		3.850.885		189.91 %		
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang		2232 Orang	2232 Orang		200 Orang		8.96 %		200 Orang		8.96 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7.507.314		1.139.295		2.867.343		127.508		4.45%		1.266.803		16.87%		
				Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang		176 orang	168 orang		42 orang		25.00 %		42 orang		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		7.507.314		1.139.295		2.867.343		127.508		4.45%		1.266.803		16.87 %		
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
134	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		689.355		1.418.350		5.555.833		330.737		5.95%		1.749.087		253.73%		
				Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %	100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		689.355		1.418.350		5.555.833		330.737		5.95%		1.749.087		253.73%		
				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0003		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		292.621		782.759		1.095.410		126.599		11.56%		909.358		310.76 %		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Bersifat Inovatif															Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi		396.735		635.591		4.460.423		204.138		4.58%		839.729		211.66 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH																	
135	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.555.889		23.228.932		27.047.087		5.070.227		18.75%		28.299.159		89.68%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		97.88 %		100%		98.38 %		98.38 %		98.38 %		98.38%		Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.567.135		21.762.950		24.441.630		4.774.577		19.53%		26.537.527		96.27%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.567.135		21.762.950		24.441.630		4.774.577		19.53%		26.537.527		96.27 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan		40 Orang/bulan		42 Orang/bulan		105.00 %		42 Orang/bulan		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			802.437		180.048		712.327		25.324		3.56%		205.372		25.59%		
			Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			802.437		180.048		712.327		25.324		3.56%		205.372		25.59 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket		2 Paket		2 Paket		100.00 %		2 Paket		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.186.316		1.285.934		1.893.130		270.325		14.28%		1.556.260		48.84%		
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Inspektorat	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.186.316		1.285.934		1.893.130		270.325		14.28%		1.556.260		48.84 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Inspektorat	
136	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.764.043		1.360.300		2.418.017		295.800		12.23%		1.656.100		59.92%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Inspektorat	
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.115.113		847.300		1.526.862		175.800		11.51%		1.023.100		48.37%		
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan movev	20 Rekomendasi		147 Rekomendasi		20 Rekomendasi		0 Rekomendasi		0.00 %		0 Rekomendasi		0.00 %		Inspektorat	
			Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen		N/A		17 Dokumen		2 Dokumen		11.76 %		2 Dokumen		11.76 %		Inspektorat	
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		60 lembaga		65 lembaga		17 lembaga		26.15 %		17 lembaga		26.15 %		Inspektorat	
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.440.287		237.000		379.895		55.500		14.61%		292.500		20.31 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen		147 Dokumen		20 Dokumen		0 Dokumen		0.00 %		0 Dokumen		0.00 %		Inspektorat	
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			598.536		227.700		384.379		39.900		10.38%		267.600		44.71 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan		60 Laporan		65 Laporan		17 Laporan		26.15 %		17 Laporan		26.15 %		Inspektorat	
6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan			36.351		193.600		422.240		40.500		9.59%		234.100		643.99 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan		1 Laporan		14.29 %		1 Laporan		14.29 %		Inspektorat	
6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja			39.940		189.000		340.348		39.900		11.72%		228.900		573.11 %		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		1 Laporan		10.00 %		1 Laporan		10.00 %		Inspektorat	
6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			648.930		513.000		891.155		120.000		13.47%		633.000		97.55%		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		4 lembaga		20.00 %		4 lembaga		20.00 %		Inspektorat	
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			35.956		250.700		314.326		62.300		19.82%		313.000		870.50 %		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian N egara / D aerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Inspektorat	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		612.973		262.300		576.829		57.700		10.00%		320.000		52.20 %		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		4 Laporan		20.00 %		4 Laporan		20.00 %		Inspektorat	
137	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.127.801		1.297.800		2.321.071		274.300		11.82%		1.572.100		139.40%		
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Inspektorat	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Inspektorat	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%		100.00 %		100%		11.48 %		11.48 %		11.48 %		11.48%		Inspektorat	
	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		522.100		454.800		532.418		83.800		15.74%		538.600		103.16%		
			Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen		8 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		50.00 %		2 dokumen		50.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		78.860		213.300		266.209		39.900		14.99%		253.200		321.08 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		1 Rekomendasi		25.00 %		1 Rekomendasi		25.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		443.240		241.500		266.209		43.900		16.49%		285.400		64.39 %		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		4 Rekomendasi		1 Rekomendasi		25.00 %		1 Rekomendasi		25.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi		605.701		843.000		1.788.654		190.500		10.65%		1.033.500		170.63%		
			Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	49 Kali		95 Kali		47 Kali		11 Kali		23.40 %		11 Kali		22.45 %		Inspektorat	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		60 Laporan		65 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan		56.261		198.800		632.823		41.900		6.62%		240.700		427.83 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan		25 Kegiatan		25 Kegiatan		5 Kegiatan		20.00 %		5 Kegiatan		20.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0004				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		36.045		204.700		339.181		41.900		12.35%		246.600		684.14 %		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 perangkat daerah		10 perangkat daerah		12 perangkat daerah		6 perangkat daerah		50.00 %		6 perangkat daerah		42.86 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0002				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		70.353		195.300		471.641		45.200		9.58%		240.500		341.85 %		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah		60 perangkat daerah		10 perangkat daerah		0 perangkat daerah		0.00 %		0 perangkat daerah		0.00 %		Inspektorat	
	6.01.03.2.02.0001				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		443.042		244.200		345.009		61.500		17.83%		305.700		69.00 %		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah		60 perangkat daerah		65 perangkat daerah		0 perangkat daerah		0.00 %		0 perangkat daerah		0.00 %		Inspektorat	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01		KECAMATAN																			
138	7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		627.261.662		712.759.083		759.524.278		149.779.309		19.72%		862.538.392		137.51%		
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.04 %		96.94 %		96.01 %		97.1 %		101.14 %		97.1 %		101.10%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.15 %		97.37 %		97.91 %		97.12 %		99.19 %		97.12 %		98.95%		Kec. Tambaksari	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.08 %		96.51 %		97.02 %		96.75 %		99.72 %		96.75 %		99.66%		Kec. Gubeng	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.99 %		96.84 %		96.98 %		96.93 %		99.95 %		96.93 %		99.94%		Kec. Mulyorejo	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.45 %		96.00 %		97.26 %		96.33 %		99.04 %		96.33 %		98.85%		Kec. Rungkut	
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		96.11 %		98.06 %		96.61 %		98.52 %		96.61 %		98.49%		Kec. Gunung Anyar	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.09 %		94.16 %		98.00 %		94.21 %		96.13 %		94.21 %		96.04%		Kec. Benowo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.19 %		96.58 %		96.12 %		98.7 %		102.68 %		98.7 %		102.61%		Kec. Bubutan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.10 %		97.45 %		99.02 %		98.73 %		99.71 %		98.73 %		99.63%		Kec. Sambikerep	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.48 %		96.23 %		97.44 %		96.59 %		99.13 %		96.59 %		99.09%		Kec. Pakal	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.58 %		97.08 %		98.49 %		96.87 %		98.36 %		96.87 %		98.27%		Kec. Jambangan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.29 %		96.41 %		97.79 %		96.85 %		99.04 %		96.85 %		98.53%		Kec. Dukuh Pakis	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92 %		97.29 %		97.90 %		96.28 %		98.35 %		96.28 %		98.33%		Kec. Sukomanunggal	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %		95.80 %		97.12 %		96.16 %		99.01 %		96.16 %		98.77%		Kec. Tandes	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.65 %		96.49 %		99.23 %		96.76 %		97.51 %		96.76 %		97.10%		Kec. Gayungan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100.6 %		97.06 %		100%		96.86 %		96.86 %		96.86 %		96.28%		Kec. Asemrowo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.05 %		95.72 %		97.93 %		97.48 %		99.54 %		97.48 %		99.42%		Kec. Pabean Cantian	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.43 %		96.30 %		97.36 %		96.22 %		98.83 %		96.22 %		98.76%		Kec. Wonocolo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.92 %		97.15 %		95.67 %		96.75 %		101.13 %		96.75 %		100.87%		Kec. Semampir	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.76 %		97.29 %		98.74 %		98.77 %		100.03 %		98.77 %		100.01%		Kec. Kenjeran	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		97.59 %		97.25 %		97.78 %		100.54 %		97.78 %		100.53%		Kec. Lakarsantri	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.26 %		96.15 %		97.18 %		95.04 %		97.80 %		95.04 %		97.72%		Kec. Sukolilo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %		95.90 %		97.39 %		96.93 %		99.53 %		96.93 %		99.48%		Kec. Krembangan	
			Tingkat kepuasan pegawai	98.36 %		98.06 %		98.23 %		99.68 %		101.48 %		99.68 %		101.34%		Kec.	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			terhadap pelayanan kesekretariatan															Wonokromo	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.35 %		95.40 %		98.25 %		96.11 %		97.82 %		96.11 %		97.72%		Kec. Tegalsari	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %		95.81 %		96.80 %		96.31 %		99.49 %		96.31 %		99.48%		Kec. Karangpilang	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.93 %		96.19 %		96.82 %		96.64 %		99.81 %		96.64 %		99.70%		Kec. Sawahan	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.56 %		97.30 %		97.53 %		97.02 %		99.48 %		97.02 %		99.45%		Kec. Simokerto	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.70 %		97.88 %		97.60 %		98.41 %		100.83 %		98.41 %		100.73%		Kec. Genteng	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.46 %		98.04 %		98.43 %		99.07 %		100.65 %		99.07 %		100.62%		Kec. Wiyung	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.82 %		97.73 %		99.36 %		99.11 %		99.75 %		99.11 %		99.29%		Kec. Bulak	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			546.130.426		568.818.729		617.471.671		122.672.725		19.87%		691.491.454		126.62%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sambikerep	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bulak	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan	
					Persentase ketepatan waktu	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Wonocolo		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Wonokromo		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Simokerto		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Dukuh Pakis		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.940.971		17.637.417		19.543.176		3.974.786		20.34%		21.612.202		135.58 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		55 Orang/bulan		54 Orang/bulan		100.00 %		54 Orang/bulan		79.41 %			Kec. Simokerto		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.781.899		15.196.002		16.754.413		3.302.228		19.71%		18.498.231		110.23 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		47 Orang/bulan		45 Orang/bulan		97.78 %		44 Orang/bulan		73.33 %			Kec. Kenjeran		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.603.917		15.460.057		17.078.146		3.175.837		18.60%		18.635.894		119.43 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		50 Orang/bulan		46 Orang/bulan		91.30 %		42 Orang/bulan		65.63 %			Kec. Wiyung		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.790.611		16.305.354		17.858.151		3.395.079		19.01%		19.700.433		110.73 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		47 Orang/bulan		47 Orang/bulan		89.36 %		42 Orang/bulan		72.41 %			Kec. Krembangan		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.118.818		19.366.852		21.235.793		4.035.836		19.00%		23.402.688		122.41 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		62 Orang/bulan		59 Orang/bulan		91.53 %		54 Orang/bulan		67.50 %			Kec. Sukomanunggal		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.428.208		20.024.120		21.971.096		4.649.593		21.16%		24.673.712		127.00 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		60 Orang/bulan		58 Orang/bulan		100.00 %		58 Orang/bulan		71.60 %			Kec. Gubeng		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.296.819		22.170.937		23.755.933		4.861.729		20.47%		27.032.666		133.19 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		71 Orang/bulan		70 Orang/bulan		98.57 %		69 Orang/bulan		85.19 %			Kec. Tandes		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.809.979		15.685.841		17.340.089		3.238.845		18.68%		18.924.685		119.70 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		89.58 %		43 Orang/bulan		71.67 %			Kec. Pakal		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.154.579		15.144.785		16.386.932		3.271.373		19.96%		18.416.158		121.52 %		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		44 Orang/bulan		44 Orang/bulan		97.73 %		43 Orang/bulan		71.67 %			Kec. Gunung Anyar		
	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan			19.969.408		21.294.419		22.638.377		4.662.963		20.60%		25.957.381		129.99 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		66 Orang/bulan		64 Orang/bulan		62 Orang/bulan		96.88 %		62 Orang/bulan		81.58 %		Kec. Rungkut	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		21.775.782		23.733.828		25.578.226		5.106.617		19.96%		28.840.445		132.44 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		75 Orang/bulan		75 Orang/bulan		71 Orang/bulan		94.67 %		71 Orang/bulan		79.78 %		Kec. Sukolilo	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		20.215.176		20.786.590		22.305.572		4.593.632		20.59%		25.380.222		125.55 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		65 Orang/bulan		62 Orang/bulan		63 Orang/bulan		101.61 %		63 Orang/bulan		82.89 %		Kec. Sawahan	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.466.465		16.089.982		17.325.190		3.549.141		20.49%		19.639.123		112.44 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		50 Orang/bulan		50 Orang/bulan		49 Orang/bulan		98.00 %		49 Orang/bulan		77.78 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.466.930		18.803.207		20.186.620		4.025.226		19.94%		22.828.433		138.63 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan		59 Orang/bulan		58 Orang/bulan		55 Orang/bulan		94.83 %		55 Orang/bulan		80.88 %		Kec. Genteng	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.169.150		17.989.852		19.895.993		3.874.608		19.47%		21.864.460		120.34 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		58 Orang/bulan		55 Orang/bulan		53 Orang/bulan		96.36 %		53 Orang/bulan		75.71 %		Kec. Semampir	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.997.087		14.719.761		16.071.543		3.081.313		19.17%		17.801.074		127.18 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		52 Orang/bulan		50 Orang/bulan		46 Orang/bulan		92.00 %		46 Orang/bulan		79.31 %		Kec. Asemrowo	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.192.561		18.362.796		19.968.301		3.941.023		19.74%		22.303.818		137.74 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		64 Orang/bulan		62 Orang/bulan		57 Orang/bulan		91.94 %		57 Orang/bulan		78.08 %		Kec. Gayungan	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.035.256		17.674.196		19.226.460		3.802.620		19.78%		21.476.815		142.84 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		59 Orang/bulan		58 Orang/bulan		57 Orang/bulan		98.28 %		57 Orang/bulan		78.08 %		Kec. Jambangan	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.950.603		17.046.845		18.773.262		3.601.286		19.18%		20.648.131		121.81 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		53 Orang/bulan		51 Orang/bulan		49 Orang/bulan		96.08 %		49 Orang/bulan		73.13 %		Kec. Tegalsari	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		21.653.687		21.389.261		23.353.270		4.594.556		19.67%		25.983.817		120.00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		71 Orang/bulan		65 Orang/bulan		64 Orang/bulan		98.46 %		64 Orang/bulan		72.73 %		Kec. Wonokromo	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.766.279		16.221.678		17.569.083		3.536.028		20.13%		19.757.707		125.32 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		51 Orang/bulan		49 Orang/bulan		48 Orang/bulan		97.96 %		48 Orang/bulan		76.19 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.739.285		15.846.381		16.918.846		3.418.684		20.21%		19.265.065		122.40 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		50 Orang/bulan		48 Orang/bulan		47 Orang/bulan		97.92 %		47 Orang/bulan		79.66 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.615.151		17.116.190		18.392.610		3.645.277		19.82%		20.761.468		132.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		55 Orang/bulan		55 Orang/bulan		52 Orang/bulan		94.55 %		52 Orang/bulan		82.54 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.957.215		17.772.838		19.752.595		3.557.592		18.01%		21.330.430		133.67 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		60 Orang/bulan		55 Orang/bulan		47 Orang/bulan		85.45 %		47 Orang/bulan		65.28 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		20.279.561		21.534.976		23.106.872		4.725.345		20.45%		26.260.321		129.49 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		66 Orang/bulan		100.00 %		66 Orang/bulan		75.86 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.925.618		16.783.991		18.066.147		3.719.967		20.59%		20.503.959		128.75 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		53 Orang/bulan		53 Orang/bulan		51 Orang/bulan		96.23 %		51 Orang/bulan		79.69 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.595.265		18.947.342		20.535.769		4.071.377		19.83%		23.018.719		130.82 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		60 Orang/bulan		60 Orang/bulan		58 Orang/bulan		96.67 %		58 Orang/bulan		77.33 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.063.586		22.232.865		23.644.595		4.762.653		20.14%		26.995.518		149.45 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan		72 Orang/bulan		71 Orang/bulan		67 Orang/bulan		94.37 %		67 Orang/bulan		77.01 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.822.509		16.186.321		17.676.993		3.650.658		20.65%		19.836.979		117.92 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		50 Orang/bulan		98.04 %		50 Orang/bulan		76.92 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.104.845		15.368.590		16.623.922		3.232.524		19.45%		18.601.114		123.15 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		46 Orang/bulan		44 Orang/bulan		42 Orang/bulan		95.45 %		42 Orang/bulan		76.36 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25.443.205		25.925.456		27.937.694		5.614.330		20.10%		31.539.786		123.96 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		82 Orang/bulan		80 Orang/bulan		76 Orang/bulan		95.00 %		76 Orang/bulan		80.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		76.007.353		141.279.723		137.920.505		26.710.770		19.37%		167.990.493		221.02%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Persentase barang dan jasa	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Kenjeran	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				untuk menunjang administrasi umum yang disediakan															
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tambaksari
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		24 Paket		19 Paket		13 Paket		68.42 %		13 Paket		68.42 %		Kec. Tenggilis Mejoyo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tandes
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Jambangan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Lakarsantri
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut
				Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket		N/A		29 Paket		11 Paket		37.93 %		11 Paket		37.93 %		Kec. Sambikerep
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Mulyorejo
				Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	31 Paket		29 Paket		30 Paket		5 Paket		16.67 %		5 Paket		16.13 %		Kec. Gunung Anyar
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukomanunggal
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sawahan
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonocolo

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			umum yang disediakan																
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket		23 paket		24 paket		9 paket		37.50 %		9 paket		37.50 %		Kec. Bulak	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pakal	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.643.376		6.031.353		5.874.745		1.142.242		19.44%		7.173.595		271.38 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket		15 Paket		5 Paket		33.33 %		5 Paket		33.33 %		Kec. Sukolilo	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.909.831		3.686.572		3.837.982		685.341		17.86%		4.371.912		228.92 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		100.00 %		9 Paket		100.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.885.216		5.572.325		5.145.506		1.069.064		20.78%		6.641.389		352.29 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		8 Paket		40.00 %		8 Paket		40.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			816.940		2.667.874		2.558.279		540.230		21.12%		3.208.105		392.70 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		8 Paket		47.06 %		8 Paket		47.06 %		Kec. Asemrowo	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.142.237		5.070.135		4.926.365		958.293		19.45%		6.028.428		281.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan	24 Paket		24 Paket		24 Paket		14 Paket		58.33 %		14 Paket		58.33 %		Kec.	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
																		Krembangan	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.172.553		3.774.455		4.521.311		687.898		15.21%		4.462.353		205.40 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket		11 Paket		57.89 %		11 Paket		57.89 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.029.400		4.867.624		6.826.911		878.192		12.86%		5.745.816		189.67 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		27 Paket	22 Paket		15 Paket		68.18 %		15 Paket		68.18 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.723.479		4.306.078		4.498.946		856.026		19.03%		5.162.104		189.54 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Genteng	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.734.121		3.942.381		4.063.821		741.064		18.24%		4.683.445		270.08 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.462.248		3.374.698		3.424.369		595.132		17.38%		3.969.829		271.49 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		24 Paket	19 Paket		13 Paket		68.42 %		13 Paket		68.42 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.775.956		5.298.165		5.254.067		1.051.230		20.01%		6.349.396		168.15 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		20 Paket	15 Paket		14 Paket		93.33 %		14 Paket		93.33 %		Kec. Semampir	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.448.920		4.322.416		3.573.363		817.845		22.89%		5.140.261		354.76 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		29 Paket	36 Paket		15 Paket		41.67 %		15 Paket		41.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.786.799		4.426.757		4.011.035		878.849		21.91%		5.305.606		140.11 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		23 Paket	24 Paket		9 Paket		37.50 %		9 Paket		37.50 %		Kec. Bulak	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		847.284		5.874.853		5.131.489		1.117.553		21.78%		6.992.406		825.27 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket		27 Paket	23 Paket		7 Paket		30.43 %		7 Paket		30.43 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.920.502		4.331.537		4.617.237		795.482		17.23%		5.127.019		175.55 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	27 Paket		30 Paket	27 Paket		11 Paket		40.74 %		11 Paket		40.74 %		Kec. Tegalsari	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Disediakan															
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.755.199		4.078.429		3.842.086		771.910		20.09%		4.850.340		176.04 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		100.00 %		8 Paket		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.729.368		4.930.117		4.662.320		933.769		20.03%		5.863.886		339.08 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		7 Paket		6 Paket		6 Paket		100.00 %		6 Paket		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.098.006		7.523.535		6.860.142		1.313.455		19.15%		8.836.990		173.34 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket		10 Paket		50.00 %		10 Paket		50.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.367.996		3.462.573		3.027.235		651.709		21.53%		4.114.281		94.19 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		100.00 %		1 Paket		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.448.980		5.955.966		5.811.964		1.102.627		18.97%		7.058.593		288.23 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket		34 Paket		19 Paket		15 Paket		78.95 %		15 Paket		78.95 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.807.210		3.191.803		3.213.762		620.883		19.32%		3.812.686		210.97 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		27 Paket		22 Paket		11 Paket		50.00 %		11 Paket		50.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		724.460		3.059.115		2.546.916		574.374		22.55%		3.633.489		501.54 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket		17 Paket		7 Paket		41.18 %		7 Paket		41.18 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.840.899		6.007.287		5.571.069		1.153.036		20.70%		7.160.323		388.96 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		17 Paket		15 Paket		11 Paket		73.33 %		11 Paket		73.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.181.219		4.422.619		4.461.339		833.530		18.68%		5.256.149		444.98 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket		501 Paket		501 Paket		60 Paket		11.98 %		60 Paket		11.98 %		Kec. Pakal	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.415.085		4.664.104		5.788.816		894.155		15.45%		5.558.259		86.64 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket		29 Paket		30 Paket		5 Paket		16.67 %		5 Paket		16.13 %		Kec. Gunung Anyar	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.007.331		2.936.219		2.627.476		587.958		22.38%		3.524.177		349.85 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		105 Paket	100 Paket		18 Paket		18.00 %		18 Paket		18.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.832.212		5.129.297		4.759.836		959.892		20.17%		6.089.189		332.34 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket		10 Paket		100.00 %		10 Paket		100.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.827.863		4.495.372		3.977.959		848.094		21.32%		5.343.465		292.33 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		124 Paket	100 Paket		23 Paket		23.00 %		23 Paket		23.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		964.089		5.288.742		4.881.002		999.848		20.48%		6.288.590		652.28 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		11 Paket	10 Paket		8 Paket		80.00 %		8 Paket		80.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.109.517		4.548.580		3.905.891		844.075		21.61%		5.392.655		486.04 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		27 Paket	12 Paket		11 Paket		91.67 %		11 Paket		91.67 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.599.059		4.038.742		3.717.266		807.013		21.71%		4.845.755		63.77 %		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		22 Paket	29 Paket		11 Paket		37.93 %		11 Paket		37.93 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.123.883		2.660.631		4.132.102		395.815		9.58%		3.056.446		59.65%		
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Rungkut	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Gubeng	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Genteng	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Krembangan	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				disediakan															
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Sukolilo	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Benowo	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		18 Unit	30 Unit		4 Unit		13.33 %		4 Unit		13.33 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Bubutan	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Wiyung	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Tegalsari	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Asemrowo	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit		2 unit		100.00 %		2 unit		100.00 %		Kec. Bulak	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Karangpilang	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Simokerto	
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau	20 Unit		20 Unit	20 Unit		6 Unit		30.00 %		6 Unit		30.00 %		Kec. Gunung Anyar	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					direhabilitasi	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Kenjeran		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Pakal		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Jambangan		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Mulyorejo		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Sukomanunggal		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Gayungan		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Lakarsantri		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Wonocolo		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Sambikerep		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Wonokromo		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Tandes		
					Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Sawahan		
					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %			Kec. Tambaksari		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			disediakan																
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.239		86.162		139.580		13.662		9.79%		99.824		49.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		8 Unit		36 Unit		5 Unit		13.89 %		5 Unit		13.89 %		Kec. Krembangan	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		170.767		81.107		145.628		12.769		8.77%		93.876		54.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		7 Unit		50 Unit		6 Unit		12.00 %		6 Unit		12.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		211.392		115.973		124.316		19.725		15.87%		135.698		64.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		10 Unit		34 Unit		7 Unit		20.59 %		7 Unit		20.59 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		140.091		65.451		103.693		11.400		10.99%		76.851		54.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit		15 Unit		65 Unit		4 Unit		6.15 %		4 Unit		6.15 %		Kec. Simokerto	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		148.255		55.345		142.625		11.778		8.26%		67.123		45.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		18 Unit		35 Unit		4 Unit		11.43 %		4 Unit		11.43 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		126.396		83.430		123.515		11.458		9.28%		94.888		75.07 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit		29 Unit		29 Unit		10 Unit		34.48 %		10 Unit		34.48 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		198.810		95.567		198.810		9.005		4.53%		104.571		52.60 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		4 Unit		133.33 %		4 Unit		133.33 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			164.611		48.680		96.462		4.643		4.81%		53.323		32.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Genteng	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.587		99.681		97.036		15.446		15.92%		115.127		104.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			301.827		160.755		273.296		14.423		5.28%		175.178		58.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		11 Unit		6 Unit		10 Unit		166.67 %		10 Unit		166.67 %		Kec. Semampir	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			156.241		61.989		110.834		8.547		7.71%		70.536		45.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit		5 Unit		2 Unit		40.00 %		2 Unit		40.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.228		86.082		103.557		14.989		14.47%		101.071		53.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100.00 %		2 Unit		100.00 %		Kec. Bulak	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			194.913		73.822		135.728		11.340		8.36%		85.163		43.69 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7 Unit		7 Unit		7 Unit		5 Unit		71.43 %		5 Unit		71.43 %		Kec. Wonokromo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Dipelihara/Direhabilitasi																
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		161.471		69.236		99.218		10.035		10.11%		79.270		49.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit		3 Unit		6 Unit		200.00 %		6 Unit		200.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		175.905		80.963		111.416		10.472		9.40%		91.436		51.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit		4 Unit		2 Unit		50.00 %		2 Unit		50.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		232.980		140.957		200.498		22.478		11.21%		163.435		70.15 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		17 Unit		50 Unit		4 Unit		8.00 %		4 Unit		8.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		96.413		86.213		122.958		13.563		11.03%		99.776		103.49 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		100.00 %		4 Unit		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		168.090		89.106		91.312		14.386		15.75%		103.491		61.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		100.00 %		5 Unit		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		139.792		63.489		110.532		9.548		8.64%		73.037		52.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		8 Unit		6 Unit		5 Unit		83.33 %		5 Unit		83.33 %		Kec. Rungkut	
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		141.228		130.889		163.886		19.431		11.86%		150.319		106.44 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		19 Unit		19 Unit		6 Unit		31.58 %		6 Unit		31.58 %		Kec. Pakal	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.600		48.564		101.456		9.123		8.99%		57.687		54.63 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit		20 Unit		6 Unit		30.00 %		6 Unit		30.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			117.333		77.652		118.339		19.200		16.22%		96.852		82.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		96 Unit		100 Unit		9 Unit		9.00 %		9 Unit		9.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			305.712		69.575		252.377		10.620		4.21%		80.195		26.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		100.00 %		7 Unit		100.00 %		Kec. Tegalsari	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			223.592		96.854		68.765		9.400		13.67%		106.254		47.52 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		78 Unit		100 Unit		15 Unit		15.00 %		15 Unit		15.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.863		97.646		174.641		15.348		8.79%		112.994		103.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		8 Unit		60 Unit		6 Unit		10.00 %		6 Unit		10.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			160.370		70.910		106.960		10.349		9.68%		81.260		50.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit		6 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Kenjeran	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		95.506		84.117		87.867		11.628		13.23%		95.745		100.25 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		32 Unit		50 Unit		5 Unit		10.00 %		5 Unit		10.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		132.288		83.062		150.125		12.731		8.48%		95.793		72.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit		4 Unit		3 Unit		75.00 %		3 Unit		75.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		162.335		84.542		153.202		11.726		7.65%		96.267		59.30 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit		60 Unit		60 Unit		6 Unit		10.00 %		6 Unit		10.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		133.688		78.538		99.792		11.640		11.66%		90.179		67.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		5 Unit		3 Unit		3 Unit		100.00 %		3 Unit		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		148.363		94.274		123.679		14.954		12.09%		109.228		73.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit		5 Unit		4 Unit		80.00 %		4 Unit		80.00 %		Kec. Gayungan	
139	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.265.386		535.762		672.768		57.053		8.48%		592.815		46.85%		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			konflik di Kecamatan																
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	-
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	-

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.265.386		535.762		672.768		57.053		8.48%		592.815		46.85%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus		150 Kasus		150 Kasus		30 Kasus		20.00 %		30 Kasus		20.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		20 Kasus		20 Kasus		3 Kasus		15.00 %		3 Kasus		15.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		N/A		12 Kasus		3 Kasus		25.00 %		3 Kasus		25.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tandes	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sawahan	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		12 Kasus		12 Kasus		3 Kasus		25.00 %		3 Kasus		25.00 %		Kec. Pakal	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Kenjeran	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan		12 Laporan		7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		150.00 %		Kec. Mulyorejo	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus		44 Kasus		44 Kasus		8 Kasus		18.18 %		8 Kasus		18.18 %		Kec. Lakarsantri	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		9 Kasus		24.32 %		9 Kasus		24.32 %		Kec. Sambikerep	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus		20 kasus		24 kasus		0 kasus		0.00 %		0 kasus		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Benowo	
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus		12 Kasus		9 Kasus		3 Kasus		33.33 %		3 Kasus		33.33 %		Kec. Genteng	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Jambangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional															
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus		13 Kasus		7 Kasus		3 Kasus		42.86 %		3 Kasus		42.86 %		Kec. Simokerto
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		24 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		30.00 %		6 Kasus		30.00 %		Kec. Tandes
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Mulyorejo
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wiyung
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Lakarsantri
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Bubutan
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Pakal
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus		36 Kasus		36 Kasus		9 Kasus		25.00 %		9 Kasus		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Rungkut
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus		5 Kasus		2 Kasus		1 Kasus		50.00 %		1 Kasus		50.00 %		Kec. Sukolilo
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tambaksari
			Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				bersama Babinsa/Babinkamtibmas															
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Genteng
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	28 Kasus		35 Kasus		30 Kasus		6 Kasus		20.00 %		6 Kasus		21.43 %		Kec. Jambangan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus		88 Kasus		88 Kasus		21 Kasus		23.86 %		21 Kasus		23.86 %		Kec. Wonocolo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonokromo
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Karangpilang
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	19 Kasus		30 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		31.58 %		Kec. Bubutan
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		25.00 %		6 kasus		25.00 %		Kec. Wiyung
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukomanunggal
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		4 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Semampir
				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Gubeng

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		18 Kasus		24.66 %		18 Kasus		24.66 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		0.00 %		0 topik		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0.00 %		0 Topik		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus		21 Kasus		21 Kasus		5 Kasus		23.81 %		5 Kasus		2.38 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus		45 Kasus		45 Kasus		9 Kasus		20.00 %		9 Kasus		20.00 %		Kec. Gayungan	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Benowo	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus		N/A		2 kasus		3 kasus		150.00 %		3 kasus		150.00 %		Kec. Tambaksari	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		23 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		30.00 %		6 Kasus		30.00 %		Kec. Pabean Cantian	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus		N/A		62 Kasus		16 Kasus		25.81 %		16 Kasus		25.81 %		Kec. Tegalsari	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus		144 Kasus		144 Kasus		36 Kasus		25.00 %		36 Kasus		25.00 %		Kec. Sawahan	
				Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		25.00 %		6 Kasus		25.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.05.2.01.0002				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.079		1.200		13.256		0		0.00%		1.200		7.46 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		20 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.05.2.01.0002				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		18.011		6.560		7.600		0		0.00%		6.560		36.42 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		35 Orang		35 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.05.2.01.0002				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,		11.883		5.000		11.475		0		0.00%		5.000		42.08 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang		68 Orang	64 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.05.2.01.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		13.399		5.420		2.830		0		0.00%		5.420		40.45 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang		110 Orang	61 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.05.2.01.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		30.147		5.700		7.600		0		0.00%		5.700		18.91 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		120 Orang	120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.05.2.01.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		10.049		5.890		4.300		0		0.00%		5.890		58.61 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang		92 Orang	100 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
7.01.05.2.01.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		9.379		1.750		8.900		0		0.00%		1.750		18.66 %		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	160 Orang		160 Orang	160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Lakarsantri	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		10.049		6.900		7.800		0		0.00%		6.900		68.66 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang		166 Orang		166 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		10.049		4.480		9.430		0		0.00%		4.480		44.58 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		116 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		22.510		8.200		22.019		0		0.00%		8.200		36.43 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang		30 Orang		4 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		6.699		2.800		2.800		0		0.00%		2.800		41.79 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang		51 Orang		187 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.079		6.600		6.900		0		0.00%		6.600		41.05 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	80 Orang		80 Orang		80 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sambikerep	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		8.039		9.980		15.400		0		0.00%		9.980		124.14 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang		418 Orang		418 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.749		8.757		5.433		0		0.00%		8.757		52.29 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang		457 Orang		561 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		51.920		1.350		4.820		0		0.00%		1.350		2.60 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang		45 Orang		94 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		10.049		5.000		9.692		0		0.00%		5.000		49.76 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang		47 Orang		43 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan		23.898		4.700		5.120		0		0.00%		4.700		19.67 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Ketahanan Nasional																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		110 Orang		55 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tandes	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			18.011		10.400		10.400		0		0.00%		10.400		57.74 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		160 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			7.933		3.590		3.410		0		0.00%		3.590		45.25 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang		53 Orang		47 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			10.049		5.200		9.830		0		0.00%		5.200		51.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52 Orang		80 Orang		136 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			24.610		4.190		21.842		0		0.00%		4.190		17.03 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	123 Orang		93 Orang		64 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan			10.049		6.200		9.830		0		0.00%		6.200		61.70 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		120 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		32.616		1.200		10.900		0		0.00%		1.200		3.68 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang		40 Orang		230 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		29.707		5.600		7.600		0		0.00%		5.600		18.85 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang		120 Orang		120 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.079		12.360		11.875		0		0.00%		12.360		76.87 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang		212 Orang		160 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		2.512		1.990		1.990		0		0.00%		1.990		79.21 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	34 Orang		46 Orang		33 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Bulak	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		23.766		3.050		3.500		0		0.00%		3.050		12.83 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang		35 Orang		39 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		33.671		20.560		20.560		0		0.00%		20.560		61.06 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang		310 Orang		663 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.414		5.720		3.650		0		0.00%		5.720		34.85 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36 Orang		124 Orang		55 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		5.025		4.460		3.200		0		0.00%		4.460		88.76 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang		82 Orang		40 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16.414		3.080		7.100		0		0.00%		3.080		18.77 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti	12 Orang		12 Orang		12 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Kec. Benowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		8.039		6.439		7.691		1.610		20.93%		8.048		100.11 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		29.778		6.439		6.439		1.073		16.67%		7.512		25.23 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7 Laporan		12 Laporan	7 Laporan		2 Laporan		28.57 %		2 Laporan		28.57 %		Kec. Krembangan	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		13.399		8.227		13.106		1.073		8.19%		9.300		69.41 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		13.260		10.731		10.731		2.683		25.00%		13.414		101.16 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		53.595		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		18.69 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		10.049		9.300		9.830		3.219		32.75%		12.520		124.58 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		8.039		6.439		7.864		1.073		13.65%		7.512		93.44 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Lakarsantri	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Peraturan Perundang-Undangan																
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		8.039		7.154		7.864		1.789		22.74%		8.943		111.24 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan		37 Laporan		37 Laporan		9 Laporan		24.32 %		9 Laporan		24.32 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		10.049		9.300		9.658		0		0.00%		9.300		92.55 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		10.049		0		4.292		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		22.510		17.170		17.170		4.292		25.00%		21.462		95.34 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28 Laporan		33 Laporan		30 Laporan		6 Laporan		20.00 %		6 Laporan		21.43 %		Kec. Jambangan	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		103.841		32.193		32.193		7.154		22.22%		39.347		37.89 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		8.039		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		124.58 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		25.917		23.251		24.608		3.756		15.26%		27.006		104.20 %		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial		103.841		7.154		17.885		0		0.00%		7.154		6.89 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan																
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		100.121		25.754		25.754		4.292		16.67%		30.047		30.01 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		29.778		16.275		28.437		2.325		8.18%		18.600		62.46 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		2.103		1.789		2.248		0		0.00%		1.789		85.06 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		13.399		18.435		17.170		2.862		16.67%		21.297		158.94 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		10.049		4.292		8.585		715		8.33%		5.008		49.83 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		21.770		19.316		25.754		0		0.00%		19.316		88.73 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.05.2.01.0005			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		10.049		8.943		9.830		0		0.00%		8.943		88.99 %		
				Jumlah Laporan Konflik yang	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan		1 Laporan		20.00 %		1 Laporan		20.00 %		Kec. Rungkut	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.763		6.975		12.877		2.146		16.67%		9.121		134.87 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		7.149		4.292		6.807		715		10.51%		5.008		70.05 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8.039		8.585		8.585		1.431		16.67%		10.016		124.58 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		3.350		2.862		1.431		358		25.00%		3.219		96.11 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		16.308		12.877		4.350		715		16.45%		13.593		83.35 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan		88 Laporan		24 Laporan		6 Laporan		25.00 %		6 Laporan		6.82 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		27.844		25.200		22.065		5.366		24.32%		30.566		109.78 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		16.414		15.560		15.918		1.431		8.99%		16.991		103.52 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		15.550		10.731		10.731		1.789		16.67%		12.520		80.51 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.05.2.01.0005				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan		16.414		15.023		14.666		2.325		15.85%		17.348		105.70 %		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
140	7.01.03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		638.675.286		432.322.507		515.025.074		22.737.156		4.41%		455.059.662		71.25%		
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	
			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase kelurahan yang	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			menindaklanjuti konsep inovasi																
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			inovasi																
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.5 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		62.50 %		87.50 %		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			632.376.540		427.063.377		510.095.354		22.701.829		4.45%		449.765.205		71.12%		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		8 kelurahan		8 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Pokmas dan Ormas	1		2		1		0		0.00 %		0		0.00 %		Kec. Tenggilis	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas				Pokmas/Ormas				Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit		34 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kelurahan yang Terbangun															Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		8 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan		7 kelurahan		7 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bulak	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			wilayahnya																
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		5 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		6 kelurahan		5 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan		4 Kelurahan		4 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %		0 kelurahan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00 %		0 Kelurahan		0.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.544.639		2.324.057		2.545.645		0		0.00%		2.324.057		65.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.767.659		1.130.211		2.021.934		0		0.00%		1.130.211		40.84 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.520.370		1.995.598		2.308.022		0		0.00%		1.995.598		131.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit		9 Unit		66 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			984.989		1.171.481		1.467.927		0		0.00%		1.171.481		118.93 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		3 Unit		24 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.551.881		1.970.596		1.923.736		0		0.00%		1.970.596		126.98 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		10 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.348.168		1.191.825		1.456.501		0		0.00%		1.191.825		22.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		5 Unit		27 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.777.698		847.899		1.680.174		0		0.00%		847.899		47.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		4 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.658.766		1.624.209		1.611.278		0		0.00%		1.624.209		44.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.787.980		2.536.815		3.876.389		0		0.00%		2.536.815		90.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		11 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.459.209		2.015.200		2.415.206		0		0.00%		2.015.200		45.19 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.505.701		353.675		2.751.399		0		0.00%		353.675		10.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kelurahan yang Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.436.054		1.529.017		2.907.926		0		0.00%		1.529.017		106.47 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.675.411		1.036.258		1.396.161		0		0.00%		1.036.258		61.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		998.221		2.212.763		2.334.726		0		0.00%		2.212.763		221.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.667.236		1.355.346		2.912.279		0		0.00%		1.355.346		81.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.166.718		1.836.247		2.067.627		0		0.00%		1.836.247		84.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.474.407		1.645.150		3.148.875		0		0.00%		1.645.150		47.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		9 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.545.939		2.889.949		3.229.850		0		0.00%		2.889.949		81.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.577.259		3.751.898		3.569.923		0		0.00%		3.751.898		104.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.776.235		2.616.497		2.140.286		0		0.00%		2.616.497		69.29 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		11 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.611.036		2.757.321		3.266.060		0		0.00%		2.757.321		76.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		18 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.934.527		1.193.574		1.578.696		0		0.00%		1.193.574		40.67 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.157.876		2.362.183		3.793.717		0		0.00%		2.362.183		204.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		12 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		914.917		1.225.811		1.813.286		0		0.00%		1.225.811		133.98 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		8 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.059.580		1.691.006		2.341.327	0			0.00%		1.691.006		159.59 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		7 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			716.396		1.248.368		1.445.344	0			0.00%		1.248.368		174.26 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		10 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			510.519		904.703		1.379.692	0			0.00%		904.703		177.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			497.724		2.575.745		3.402.929	0			0.00%		2.575.745		517.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		11 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.697.312		1.107.328		3.029.659	0			0.00%		1.107.328		65.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		3 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.393.201		1.175.871		1.732.552	0			0.00%		1.175.871		84.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		15 Unit		15 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.567.015		1.151.201		1.659.501	0			0.00%		1.151.201		73.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		11 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			743.626		1.760.205		1.785.442	0			0.00%		1.760.205		236.71 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			393.697		2.139.247		2.346.014	0			0.00%		2.139.247		543.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.587.513		1.363.996		1.382.993	0			0.00%		1.363.996		85.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.786.345		1.630.533		2.381.060	0			0.00%		1.630.533		91.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.283.835		847.903		972.422	0			0.00%		847.903		37.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan			2.790.793		1.012.871		2.797.578	0			0.00%		1.012.871		36.29 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.277.356		1.784.017		1.776.803		0		0.00%		1.784.017		78.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.398.685		3.328.575		4.060.819		0		0.00%		3.328.575		97.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.392.974		1.678.681		1.707.996		0		0.00%		1.678.681		120.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.453.097		1.660.907		1.956.760		0		0.00%		1.660.907		48.10 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		4 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.998.712		594.332		825.825		0		0.00%		594.332		14.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		2 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.172.837		1.863.952		2.198.090		0		0.00%		1.863.952		58.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.234.239		1.135.812		3.118.094		0		0.00%		1.135.812		35.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		2 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.703.650		2.168.672		2.158.333		0		0.00%		2.168.672		58.55 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.064.205		856.118		1.687.983		0		0.00%		856.118		27.94 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.894.195		1.634.051		1.846.331		0		0.00%		1.634.051		56.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.125.820		1.706.545		1.561.743		0		0.00%		1.706.545		54.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.986.633		2.135.312		1.694.606		0		0.00%		2.135.312		71.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.931.648		1.158.239		1.115.259		0		0.00%		1.158.239		39.51 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		9 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.084.961		1.292.105		2.190.921		0		0.00%		1.292.105		61.97 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		7 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.995.477		1.468.451		1.485.174		0		0.00%		1.468.451		36.75 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.855.743		1.077.716		2.616.481		0		0.00%		1.077.716		37.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.787.091		2.877.114		3.482.668		0		0.00%		2.877.114		60.10 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.839.386		3.088.758		3.071.180		0		0.00%		3.088.758		80.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		8 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.937.372		3.145.242		3.605.692		0		0.00%		3.145.242		63.70 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		5 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.906.513		3.266.716		3.189.641		0		0.00%		3.266.716		83.62 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit		14 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.822.107		3.096.036		3.100.330		0		0.00%		3.096.036		81.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.019.165		1.817.447		2.068.866		0		0.00%		1.817.447		90.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5.446.203		1.753.904		1.714.822		0		0.00%		1.753.904		32.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.947.833		1.026.131		1.701.464		0		0.00%		1.026.131		34.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.902.278		1.481.474		1.767.177		0		0.00%		1.481.474		77.88 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kelurahan yang Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.902.278		2.104.962		2.604.846		0		0.00%		2.104.962		110.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		14 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		951.139		1.241.090		1.595.161		0		0.00%		1.241.090		130.48 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		6 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.377.848		1.230.969		2.220.735		0		0.00%		1.230.969		51.77 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		10 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.377.848		2.698.949		3.577.849		0		0.00%		2.698.949		113.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		12 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.114.697		1.912.659		2.386.491		0		0.00%		1.912.659		61.41 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		343.974		1.055.676		1.689.697		0		0.00%		1.055.676		306.91 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		675.134		1.055.667		1.263.419		0		0.00%		1.055.667		156.36 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		949.596		1.650.062		1.706.563		0		0.00%		1.650.062		173.76 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.294.288		2.436.686		2.965.831		0		0.00%		2.436.686		56.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		560.418		943.265		1.516.066		0		0.00%		943.265		168.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		733.449		866.504		1.488.108		0		0.00%		866.504		118.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.314.486		1.435.949		1.689.811		0		0.00%		1.435.949		62.04 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.268.395		2.644.723		2.902.166		0		0.00%		2.644.723		116.59 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.343.308		1.746.191		1.990.935	0		0.00%			1.746.191		129.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.055.456		1.137.104		1.529.802	0		0.00%			1.137.104		107.74 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		1 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.764.212		2.278.490		2.487.178	0		0.00%			2.278.490		47.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		4 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.458.343		2.180.950		2.718.210	0		0.00%			2.180.950		88.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.774.678		1.839.772		1.830.202	0		0.00%			1.839.772		66.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.714.272		2.388.483		2.005.843	0		0.00%			2.388.483		64.31 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		4 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.508.587		2.226.068		2.321.336	0		0.00%			2.226.068		49.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.937.215		948.193		1.328.259	0		0.00%			948.193		32.28 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.591.799		2.066.612		2.381.206	0		0.00%			2.066.612		129.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.876.228		1.783.585		2.299.563	0		0.00%			1.783.585		62.01 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.405.262		2.523.591		1.174.559	0		0.00%			2.523.591		104.92 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		6 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.011.356		2.358.510		1.979.781	0		0.00%			2.358.510		233.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan			3.155.850		2.179.642		2.230.029	0		0.00%			2.179.642		69.07 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		5 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.405.315		2.183.779		2.072.281		0		0.00%		2.183.779		64.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		5 Unit		10 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		563.929		782.781		1.213.519		0		0.00%		782.781		138.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.184.566		1.817.479		1.819.862		0		0.00%		1.817.479		83.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.952.311		1.445.278		1.772.973		0		0.00%		1.445.278		74.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.310.806		1.527.611		2.328.581		0		0.00%		1.527.611		66.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		7 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		934.257		1.747.512		1.824.568		0		0.00%		1.747.512		187.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		11 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.560.404		537.792		2.363.793		0		0.00%		537.792		34.46 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.101.652		1.664.426		1.653.855		0		0.00%		1.664.426		151.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.258.246		1.378.240		1.576.549		0		0.00%		1.378.240		109.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.267.520		2.510.682		2.778.836		0		0.00%		2.510.682		58.83 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		33 Unit		33 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.368.380		2.916.965		2.959.583		0		0.00%		2.916.965		123.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		9 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.066.352		2.770.567		3.530.560		0		0.00%		2.770.567		134.08 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		5 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.923.694		2.368.856		2.130.052		0		0.00%		2.368.856		123.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		20 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.011.339		2.168.638		2.104.868		0		0.00%		2.168.638		54.06 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.869.453		1.808.647		1.398.771		0		0.00%		1.808.647		37.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.861.720		2.361.925		2.578.174		0		0.00%		2.361.925		48.58 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		793.506		1.244.633		1.465.931		0		0.00%		1.244.633		156.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.875.658		1.840.999		1.831.137		0		0.00%		1.840.999		47.50 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		8 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.423.557		2.119.001		2.404.977		0		0.00%		2.119.001		47.90 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.481.058		1.495.150		1.730.912		0		0.00%		1.495.150		100.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		9 Unit		13 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		642.099		2.853.979		3.164.776		0		0.00%		2.853.979		444.48 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5.176.870		3.222.179		3.399.689		0		0.00%		3.222.179		62.24 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.656.137		2.749.596		2.577.157		0		0.00%		2.749.596		59.05 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.738.431		2.125.766		2.190.424		0		0.00%		2.125.766		56.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		1 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.339.186		3.518.627		3.736.783		0		0.00%		3.518.627		81.09 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kelurahan yang Terbangun																
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.144.651		2.301.885		2.002.310		0		0.00%		2.301.885		107.33 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		10 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.382.471		2.244.737		2.837.236		0		0.00%		2.244.737		94.22 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		10 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.382.471		1.702.369		1.403.707		0		0.00%		1.702.369		71.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.144.651		2.020.836		1.941.379		0		0.00%		2.020.836		94.23 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		10 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.249.664		1.740.932		2.144.390		0		0.00%		1.740.932		77.39 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.392.343		1.181.898		2.320.563		0		0.00%		1.181.898		49.40 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		11 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.020.102		3.250.998		2.509.886		0		0.00%		3.250.998		107.65 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		6 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.020.102		2.366.748		2.256.618		0		0.00%		2.366.748		78.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		8 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3.298.312		118.636		1.406.383		0		0.00%		118.636		3.60 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.761.470		1.491.664		1.145.019		0		0.00%		1.491.664		84.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		18 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.046.368		1.878.679		1.744.465		0		0.00%		1.878.679		91.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.422.669		2.679.521		3.310.057		0		0.00%		2.679.521		188.34 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		499.855		2.132.753		2.304.606		0		0.00%		2.132.753		426.67 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.480		971.900		1.004.357		0		0.00%		971.900		68.81 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			307.061		2.979.804		3.253.508		0		0.00%		2.979.804		970.43 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.570.614		1.316.215		1.281.848		0		0.00%		1.316.215		83.80 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		3 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			588.445		1.089.397		1.206.425		0		0.00%		1.089.397		185.13 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit		2 Unit		1 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			718.802		1.623.454		1.354.170		0		0.00%		1.623.454		225.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		6 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.449.825		1.234.746		1.147.350		0		0.00%		1.234.746		85.17 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.311.429		1.570.322		2.217.399		0		0.00%		1.570.322		47.42 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.829.275		635.158		1.925.191		0		0.00%		635.158		22.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		9 Unit		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.281.862		1.898.322		1.944.205		0		0.00%		1.898.322		57.84 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit		12 Unit		18 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.679.181		3.024.388		3.816.926		0		0.00%		3.024.388		180.11 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		14 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.720.121		1.467.526		2.062.777		0		0.00%		1.467.526		53.95 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		10 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.966.850		1.801.025		2.556.932		0		0.00%		1.801.025		91.57 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan			1.875.774		2.061.015		2.736.488		0		0.00%		2.061.015		109.88 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.417.269		1.591.842		1.783.021		0		0.00%		1.591.842		65.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		25 Unit		40 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.170.973		2.088.442		1.030.947		0		0.00%		2.088.442		96.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit		10 Unit		20 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.775.556		1.744.517		931.200		0		0.00%		1.744.517		62.85 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		3 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.823.588		1.769.528		2.447.128		0		0.00%		1.769.528		36.68 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		7 Unit		5 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.410.138		1.288.292		2.034.985		0		0.00%		1.288.292		29.21 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		6 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.422.502		2.078.078		3.069.815		0		0.00%		2.078.078		46.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		9 Unit		3 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5.650.489		1.827.656		2.046.040		0		0.00%		1.827.656		32.35 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		8 Unit		4 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4.961.405		1.091.181		1.360.244		0		0.00%		1.091.181		21.99 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		7 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.537.320		1.727.524		2.923.788		0		0.00%		1.727.524		112.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.119.392		1.334.356		1.406.816		0		0.00%		1.334.356		119.20 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		11 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.123.349		3.179.151		3.507.962		0		0.00%		3.179.151		149.72 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		14 Unit		12 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2.848.309		850.363		1.567.901		0		0.00%		850.363		29.86 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		5 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.143.111		1.373.567		1.131.898		0		0.00%		1.373.567		120.16 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5.477.931		1.704.579		2.486.097		0		0.00%		1.704.579		31.12 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit		2 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.166.147		731.168		602.509		79.109		13.13%		810.276		69.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.805.410		1.127.492		1.070.300		151.149		14.12%		1.278.640		70.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		918.505		920.948		903.032		116.947		12.95%		1.037.895		113.00 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.104.769		1.111.149		1.190.321		162.642		13.66%		1.273.792		60.52 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.467.127		1.003.634		958.968		145.017		15.12%		1.148.651		78.29 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.250.584		1.803.922		1.354.728		203.919		15.05%		2.007.841		89.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.272.583		833.177		2.451.376		141.333		5.77%		974.510		42.88 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.479.471		1.211.395		1.341.540		205.562		15.32%		1.416.957		57.15 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.407.099		1.317.000		1.356.600		219.500		16.18%		1.536.500		63.83 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.574.386		1.368.644		2.053.817		230.126		11.20%		1.598.770		44.73 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		947.958		659.878		957.400		109.873		11.48%		769.751		81.20 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.837.092		1.018.136		1.135.407		170.409		15.01%		1.188.546		64.70 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		842.672		523.058		1.130.208		70.318		6.22%		593.375		70.42 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		962.895		643.119		793.621		109.816		13.84%		752.935		78.19 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.320.793		931.532		713.500		104.950		14.71%		1.036.482		78.47 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.216.778		1.367.757		1.996.572		219.026		10.97%		1.586.783		49.33 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.103.167		897.988		1.204.935		152.917		12.69%		1.050.905		49.97 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.435.573		1.310.357		1.710.988		220.310		12.88%		1.530.667		62.85 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.160.036		1.647.751		1.822.782		276.328		15.16%		1.924.080		60.89 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.820.535		1.095.354		1.107.622		167.172		15.09%		1.262.526		69.35 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.271.557		1.953.699		2.569.680		301.767		11.74%		2.255.465		99.29 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.071.524		581.388		628.995		97.833		15.55%		679.221		63.39 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.141.471		682.604		655.965		100.414		15.31%		783.018		68.60 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.099.598		1.275.738		761.360		112.987		14.84%		1.388.725		126.29 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.067.306		651.221		782.292		109.783		14.03%		761.004		71.30 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.271.723		515.669		561.344		85.613		15.25%		601.282		47.28 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.248.122		612.633		842.257		89.700		10.65%		702.333		56.27 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.394.393		943.512		1.279.407		112.548		8.80%		1.056.060		75.74 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		965.059		449.401		517.560		75.468		14.58%		524.869		54.39 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986.245		681.891		396.049		53.821		13.59%		735.713		74.60 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		979.817		397.224		479.295		46.731		9.75%		443.955		45.31 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.643.893		1.156.212		1.335.763		144.395		10.81%		1.300.607		79.12 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		703.767		483.928		496.488		81.499		16.42%		565.427		80.34 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		628.210		376.937		314.245		42.867		13.64%		419.804		66.83 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.131.939		799.182		910.757		134.016		14.71%		933.197		82.44 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.735.397		1.477.049		1.860.295		171.195		9.20%		1.648.244		60.26 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.181.764		878.967		1.205.761		144.884		12.02%		1.023.851		86.64 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.982.423		1.056.034		1.156.140		176.903		15.30%		1.232.938		62.19 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.432.113		1.228.226		1.344.440		171.480		12.75%		1.399.706		57.55 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.373.294		1.214.296		1.416.341		171.087		12.08%		1.385.383		100.88 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.164.376		391.524		341.320		37.677		11.04%		429.201		36.86 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.050.663		1.987.962		1.027.963		161.640		15.72%		2.149.602		204.59 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.332.172		1.622.178		2.788.849		228.023		8.18%		1.850.201		79.33 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.948.824		1.304.810		1.465.329		219.720		14.99%		1.524.530		78.23 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.625.380		1.023.442		1.043.098		151.622		14.54%		1.175.064		72.29 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.668.532		772.637		910.377		130.256		14.31%		902.893		54.11 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.574.842		1.004.257		1.358.134		159.698		11.76%		1.163.955		73.91 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.668.143		1.703.537		1.661.671		266.600		16.04%		1.970.137		118.10 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas		15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.313.211		848.180		899.014		142.918		15.90%		991.098		75.47 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.115.318		1.405.402		1.340.161		201.384		15.03%		1.606.786		75.96 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.963.261		1.049.168		1.484.187		175.777		11.84%		1.224.945		62.39 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.297.476		573.457		622.348		95.608		15.36%		669.065		51.57 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.772.012		1.720.072		1.813.132		288.187		15.89%		2.008.260		72.45 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.091.174		1.263.672		1.646.249		211.505		12.85%		1.475.177		70.54 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.025.727		1.459.693		1.443.756		217.705		15.08%		1.677.398		55.44 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.025.849		2.016.878		2.183.777		337.784		15.47%		2.354.662		77.82 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.239.302		1.950.516		2.036.400		326.766		16.05%		2.277.282		70.30 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.871.745		1.108.632		1.166.413		168.398		14.44%		1.277.030		68.23 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.323.475		753.586		787.200		126.305		16.04%		879.891		66.48 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.101.041		969.713		1.376.788		165.293		12.01%		1.135.005		103.08 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.127.615		800.358		1.220.592		134.668		11.03%		935.026		82.92 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.027.721		1.039.665		1.354.361		148.340		10.95%		1.188.005		115.60 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		558.633		426.356		744.071		58.496		7.86%		484.852		86.79 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.669.712		848.989		958.011		141.626		14.78%		990.615		59.33 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		850.264		582.507		602.400		98.786		16.40%		681.293		80.13 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.466.004		1.036.873		1.051.757		174.561		16.60%		1.211.434		82.64 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.071.548		1.145.343		1.299.065		192.125		14.79%		1.337.467		64.56 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		874.932		272.046		369.073		45.402		12.30%		317.448		36.28 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.768.963		1.262.155		871.200		140.484		16.13%		1.402.639		79.29 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		772.531		405.283		412.268		58.565		14.21%		463.848		60.04 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.497.398		449.604		505.915		62.502		12.35%		512.106		34.20 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.901.301		701.856		855.964		104.447		12.20%		806.302		42.41 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.911.965		842.557		1.363.523		134.585		9.87%		977.142		51.11 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		911.900		599.151		687.745		101.768		14.80%		700.920		76.86 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.727.658		836.867		867.320		140.814		16.24%		977.681		56.59 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		885.745		704.847		1.195.188		95.775		8.01%		800.622		90.39 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		962.207		543.745		568.200		91.637		16.13%		635.382		66.03 %		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.815.890		1.780.488		1.876.200		301.070		16.05%		2.081.558		73.92 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		810.766		819.995		577.120		78.614		13.62%		898.609		110.83 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.312.079		718.870		714.685		107.960		15.11%		826.830		63.02 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.783.596		1.162.179		1.866.477		195.303		10.46%		1.357.483		76.11 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.662.868		1.810.512		1.849.242		278.922		15.08%		2.089.434		78.47 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.341.718		1.156.913		804.853		128.757		16.00%		1.285.670		95.82 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.470.002		932.461		905.400		145.074		16.02%		1.077.535		73.30 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		413.413		327.381		727.011		45.117		6.21%		372.498		90.10 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.986.677		1.238.270		1.338.311		201.623		15.07%		1.439.892		72.48 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		557.717		373.582		482.054		38.671		8.02%		412.253		73.92 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		407.201		458.647		553.780		50.701		9.16%		509.348		125.09 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.209.682		745.164		2.300.727		124.944		5.43%		870.108		71.93 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.187.055		1.351.099		1.461.024		226.718		15.52%		1.577.817		72.14 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		626.804		645.714		1.092.143		91.439		8.37%		737.153		117.61 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.133.491		646.928		622.811		82.543		13.25%		729.471		64.36 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.043.949		766.852		670.800		108.510		16.18%		875.361		83.85 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.756.326		938.669		965.016		144.487		14.97%		1.083.155		61.67 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.486.122		496.846		1.773.939		85.367		4.81%		582.213		39.18 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.547.999		407.808		439.900		69.092		15.71%		476.900		30.81 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.080.816		409.521		459.104		68.692		14.96%		478.213		44.25 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.066.891		1.386.247		1.451.025		230.351		15.88%		1.616.598		78.21 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		930.189		461.666		501.825		74.473		14.84%		536.139		57.64 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		129.030		572.752		618.225		94.593		15.30%		667.345		517.20 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.169.320		533.953		943.047		88.425		9.38%		622.378		53.23 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		648.488		401.723		411.600		64.931		15.78%		466.654		71.96 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		667.913		1.194.824		1.789.701		191.763		10.71%		1.386.588		207.60 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		877.868		1.083.931		1.082.160		170.471		15.75%		1.254.401		142.89 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.241.199		394.461		286.200		45.621		15.94%		440.081		13.58 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.062.865		928.735		977.914		156.287		15.98%		1.085.022		102.08 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.224.080		1.324.293		1.554.119		222.691		14.33%		1.546.984		69.56 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.456.023		1.261.199		1.338.560		210.334		15.71%		1.471.533		59.92 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.675.032		1.460.135		1.335.100		195.076		14.61%		1.655.211		98.82 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.427.230		1.538.966		1.585.483		257.780		16.26%		1.796.745		74.02 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.685.781		1.347.355		1.409.061		225.722		16.02%		1.573.077		58.57 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.357.204		770.571		821.181		129.313		15.75%		899.884		66.30 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.667.073		1.471.945		1.160.960		184.040		15.85%		1.655.985		62.09 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		702.840		530.338		1.827.660		88.395		4.84%		618.734		88.03 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.184.061		838.575		959.099		119.492		12.46%		958.067		80.91 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		748.403		687.344		1.048.199		115.360		11.01%		802.705		107.26 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		699.380		732.683		924.136		95.862		10.37%		828.545		118.47 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		780.674		426.850		756.492		71.379		9.44%		498.229		63.82 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.033.519		730.373		1.004.852		121.383		12.08%		851.756		82.41 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.470.386		847.239		1.093.017		127.736		11.69%		974.974		66.31 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Sukolilo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.167.111		877.188		935.400		146.232		15.63%		1.023.420		87.69 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.403.731		858.411		896.080		144.571		16.13%		1.002.982		71.45 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.206.980		1.304.971		947.200		154.106		16.27%		1.459.077		120.89 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.198.532		1.063.090		1.143.254		179.509		15.70%		1.242.599		103.68 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.518.871		1.357.403		1.432.800		225.402		15.73%		1.582.805		104.21 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.418.571		1.189.213		1.221.600		198.028		16.21%		1.387.241		97.79 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		833.579		479.327		536.810		80.144		14.93%		559.471		67.12 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		587.694		284.629		324.558		46.500		14.33%		331.129		56.34 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.878.070		905.483		901.200		148.299		16.46%		1.053.782		56.11 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %	Kec. Gunung Anyar	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		655.157		788.416		771.768		112.344		14.56%		900.760		137.49 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.088.790		757.481		992.569		119.824		12.07%		877.305		80.58 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.460.828		564.549		966.464		81.347		8.42%		645.896		44.21 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.835.583		1.075.604		844.889		128.399		15.20%		1.204.003		65.59 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.452.106		683.623		1.599.999		116.307		7.27%		799.930		55.09 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.809.622		1.273.591		1.505.697		181.227		12.04%		1.454.818		80.39 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		949.789		1.021.542		1.094.600		172.219		15.73%		1.193.762		125.69 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.614.622		1.097.687		2.394.487		183.603		7.67%		1.281.290		79.36 %		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.728.681		795.398		981.894		132.724		13.52%		928.122		53.69 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.596.717		910.207		2.352.423		150.447		6.40%		1.060.655		66.43 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.446.145		687.000		731.400		114.500		15.65%		801.500		32.77 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.158.529		1.235.510		2.227.157		203.517		9.14%		1.439.027		66.67 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.177.498		1.081.033		1.562.289		151.067		9.67%		1.232.100		38.78 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.445.420		1.761.950		1.708.493		271.285		15.88%		2.033.235		59.01 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.894.153		2.285.827		2.450.889		383.599		15.65%		2.669.426		92.24 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.445.420		1.350.618		1.951.831		219.055		11.22%		1.569.674		45.56 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.445.420		1.434.801		1.568.260		226.870		14.47%		1.661.671		48.23 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		4 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.833.928		1.552.307		1.640.608		222.537		13.56%		1.774.845		96.78 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		709.961		625.477		879.734		102.265		11.62%		727.742		102.50 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.975.407		914.795		949.200		152.716		16.09%		1.067.511		54.04 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		846.811		1.078.071		1.310.740		156.547		11.94%		1.234.618		145.80 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.505.548		732.400		1.070.128		95.103		8.89%		827.503		54.96 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.004.486		568.067		874.155		96.440		11.03%		664.507		66.15 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.02.0003				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3.821.171		1.976.470		2.378.520		331.154		13.92%		2.307.623		60.39 %		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		0 Pokmas / Ormas		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		37.564		5.340		10.800		0		0.00%		5.340		14.22 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi		1.340		1.260		1.311		0		0.00%		1.260		94.04 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2.010		7.200		7.200		0		0.00%		7.200		358.24 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6.389		4.920		6.000		0		0.00%		4.920		77.00 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26.673		6.300		7.200		0		0.00%		6.300		23.62 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10.853		10.200		10.616		0		0.00%		10.200		93.98 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6.699		7.200		6.540		0		0.00%		7.200		107.47 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pembangunan di Kelurahan																
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		13.399		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		26.87 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		33.497		3.300		4.500		0		0.00%		3.300		9.85 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1.072		2.640		1.740		0		0.00%		2.640		246.29 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		30.147		9.750		13.700		0		0.00%		9.750		32.34 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6.029		2.580		5.550		0		0.00%		2.580		42.79 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		16.528		7.500		17.319		0		0.00%		7.500		45.38 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Genteng	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.049		4.680		5.340		0		0.00%		4.680		46.57 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Asemrowo	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		6.060		6.060		0		0.00%		6.060		361.82 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.196		22.000		36.000		0		0.00%		22.000		54.73 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tandes	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1.675		1.500		1.638		0		0.00%		1.500		89.56 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		0		2.520		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30.147		4.800		4.800		0		0.00%		4.800		15.92 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1.675		6.000		7.000		0		0.00%		6.000		358.24 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		30.147		9.000		9.000		0		0.00%		9.000		29.85 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2.680		7.200		7.200		0		0.00%		7.200		268.68 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26.798		4.050		6.000		0		0.00%		4.050		15.11 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		23.448		10.500		7.770		0		0.00%		10.500		44.78 %		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.02.0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		6.163		3.000		3.000		0		0.00%		3.000		48.67 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.025		4.800		5.400		0		0.00%		4.800		95.53 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		23.448		1.980		17.920		0		0.00%		1.980		8.44 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8.374		7.500		8.192		0		0.00%		7.500		89.56 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		46.839		10.800		4.800		0		0.00%		10.800		23.06 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		27.783		9.000		26.860		0		0.00%		9.000		32.39 %		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		18.318		17.400		7.500		0		0.00%		17.400		94.99 %		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		6.298.746		5.259.130		4.929.720		35.327		0.72%		5.294.457		84.06%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		62 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga		70 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		140 Unit Usaha		35 Unit Usaha		25.00 %		35 Unit Usaha		25.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		5 Lembaga		20.00 %		5 Lembaga		20.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		116 Lembaga		116 Lembaga		30 Lembaga		25.86 %		30 Lembaga		25.86 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		150 pelaku usaha		150 pelaku usaha		53 pelaku usaha		35.33 %		53 pelaku usaha		35.33 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	62 Unit Usaha		174 Unit Usaha		62 Unit Usaha		15 Unit Usaha		24.19 %		15 Unit Usaha		24.19 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	90 Unit Kerja		90 Unit Kerja		90 Unit Kerja		22 Unit Kerja		24.44 %		22 Unit Kerja		24.44 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga		192 Lembaga		192 Lembaga		42 Lembaga		21.88 %		42 Lembaga		21.88 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		N/A		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	124 Lembaga		124 Lembaga		124 Lembaga		33 Lembaga		26.61 %		33 Lembaga		26.61 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		24.00 %		24 Pelaku Usaha		24.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	53 Lembaga		N/A		53 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Mulyorejo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Pemberdayaan dapat disediakan															
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	50 Lembaga		N/A		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		100 pelaku usaha		15 pelaku usaha		15.00 %		15 pelaku usaha		15.00 %		Kec. Pakal
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Krembangan
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Karangpilang
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga		109 Lembaga		100 Lembaga		26 Lembaga		26.00 %		26 Lembaga		26.00 %		Kec. Jambangan
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga		67 Lembaga		67 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukolilo
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga		50 Lembaga		50 Lembaga		12 Lembaga		24.00 %		12 Lembaga		24.00 %		Kec. Pabean Cantian
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		N/A		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bubutan
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga		N/A		78 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tambaksari
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	480 Lembaga		440 Lembaga		460 Lembaga		114 Lembaga		24.78 %		114 Lembaga		23.75 %		Kec. Bulak
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gayungan
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		N/A		51 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Tandes
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		110 Unit Usaha		22 Unit Usaha		20.00 %		22 Unit Usaha		20.00 %		Kec. Rungkut
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		120 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha		30.00 %		30 Pelaku Usaha		30.00 %		Kec. Gunung Anyar
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk	26 Lembaga		26 Lembaga		26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Benowo

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				Pemberdayaan dapat disediakan															
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha		117 Unit Usaha	116 Unit Usaha		30 Unit Usaha		25.86 %		30 Unit Usaha		25.86 %		Kec. Wonokromo	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga		N/A	21 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Bulak	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga		N/A	26 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Jambangan	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		36 Lembaga	36 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		38 Lembaga	38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Kenjeran	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga		N/A	58 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonokromo	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga		17 Lembaga	17 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Asemrowo	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga		288 Lembaga	288 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga		156 Lembaga	156 Lembaga		10 Lembaga		6.41 %		10 Lembaga		6.41 %		Kec. Wonocolo	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga		32 Lembaga	32 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		149 Lembaga	148 Lembaga		36 Lembaga		24.32 %		36 Lembaga		24.32 %		Kec. Sambikerep	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga	29 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		N/A	38 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sambikerep	
				Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga		N/A	72 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Sawahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga		48 Lembaga		48 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga		N/A		74 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga		34 Lembaga		34 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga		52 Lembaga		52 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga		61 Lembaga		61 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		24 Pelaku Usaha		24.00 %		24 Pelaku Usaha		24.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	480 Lembaga		440 Lembaga		460 Lembaga		76 Lembaga		16.52 %		76 Lembaga		15.83 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		25.00 %		25 Pelaku Usaha		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		120 pelaku usaha		100 pelaku usaha		30 pelaku usaha		30.00 %		30 pelaku usaha		30.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha		20.00 %		10 Pelaku Usaha		20.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		120 Lembaga		120 Lembaga		30 Lembaga		25.00 %		30 Lembaga		25.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	29 Lembaga		15 Lembaga		23 Lembaga		5 Lembaga		21.74 %		5 Lembaga		17.24 %		Kec. Genteng	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		50 Potensi usaha		12 Potensi usaha		24.00 %		12 Potensi usaha		24.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha		20 unit usaha		20 unit usaha		5 unit usaha		25.00 %		5 unit usaha		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.079		1.200		15.720		0		0.00%		1.200		7.46 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			8.039		6.500		9.000		0		0.00%		6.500		80.85 %		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9.179		4.320		8.640		0		0.00%		4.320		47.06 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		49 Laporan	48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		15.000		4.500		15.000		0		0.00%		4.500		30.00 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		51.641		3.600		3.600		0		0.00%		3.600		6.97 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		15.312		10.800		14.978		2.400		16.02%		13.200		86.21 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		19.294		22.000		22.800		3.800		16.67%		25.800		133.72 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		23.854		16.100		23.110		0		0.00%		16.100		67.49 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		25.324		9.900		23.456		900		3.84%		10.800		42.65 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		55 Laporan	48 Laporan		10 Laporan		20.83 %		10 Laporan		20.83 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		10.049		5.760		46.064		0		0.00%		5.760		57.32 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		42.599		16.800		16.800		0		0.00%		16.800		39.44 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		73.733		3.600		10.500		0		0.00%		3.600		4.88 %		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan		12.863		11.520		12.582		1.920		15.26%		13.440		104.49 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Usaha Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		10.049		9.000		9.830		1.800		18.31%		10.800		107.47 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9.647		6.120		9.437		0		0.00%		6.120		63.44 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		12.059		4.800		11.796		0		0.00%		4.800		39.80 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3.350		8.640		7.200		0		0.00%		8.640		257.93 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		19.294		10.660		18.873		0		0.00%		10.660		55.25 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		12 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		17.824		2.050		17.212		0		0.00%		2.050		11.50 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3.182		2.400		2.760		0		0.00%		2.400		75.42 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3.350		23.401		32.378		0		0.00%		23.401		698.59 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		4 Laporan		8.33 %		4 Laporan		8.33 %		Kec. Wonocolo	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		31.822		12.150		31.128		3.300		10.60%		15.450		48.55 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
7.01.03.2.03.0004			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		23.854		7.440		20.400		0		0.00%		7.440		31.19 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		10.260		14.700		3.900		26.53%		14.160		86.27 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9.647		2.880		8.640		0		0.00%		2.880		29.85 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			16.414		15.660		16.055		2.640		16.44%		18.300		111.49 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			28.539		3.000		9.200		0		0.00%		3.000		10.51 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			14.999		6.500		14.490		1.500		10.35%		8.000		53.34 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			50.246		12.160		32.000		0		0.00%		12.160		24.20 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.448		8.800		22.900		0		0.00%		8.800		37.53 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			23.113		21.030		20.400		3.360		16.47%		24.390		105.53 %		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25.00 %		12 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			71.766		62.045		54.264		0		0.00%		62.045		86.45 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit		17 Unit		17 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Asemrowo	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga			281.439		244.529		213.864		0		0.00%		244.529		86.89 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kemasyarakatan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit		67 Unit		67 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			302.442		262.777		229.824		0		0.00%		262.777		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit		72 Unit		72 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			98.701		94.892		82.992		0		0.00%		94.892		96.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		26 Unit		26 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Benowo	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			79.720		79.720		67.032		0		0.00%		79.720		100.00 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit		21 Unit		21 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bulak	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			134.419		116.790		118.742		9.807		8.26%		126.597		94.18 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit		32 Unit		32 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			130.218		113.140		98.952		0		0.00%		113.140		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit		31 Unit		31 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			218.430		182.484		159.600		0		0.00%		182.484		83.54 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit		50 Unit		52 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142.820		124.089		108.528		0		0.00%		124.089		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		34 Unit		34 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wiyung	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		121.817		105.841		111.082		0		0.00%		105.841		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		29 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		294.041		255.478		221.445		0		0.00%		255.478		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit		70 Unit		70 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		201.628		175.185		153.216		0		0.00%		175.185		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		159.622		138.688		121.296		0		0.00%		138.688		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit		38 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		105.015		91.242		79.800		0		0.00%		91.242		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit		25 Unit		25 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		310.843		270.076		236.208		0		0.00%		270.076		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit		74 Unit		74 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		222.631		193.433		203.011		0		0.00%		193.433		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit		53 Unit		53 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		218.430		189.783		165.984		0		0.00%		189.783		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana	52 Unit		52 Unit		52 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gubeng	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan																
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		193.827		186.134		162.792		0		0.00%		186.134		96.03 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit		51 Unit		51 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		184.826		160.586		140.448		0		0.00%		160.586		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		256.236		231.568		194.712		0		0.00%		231.568		90.37 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit		61 Unit		61 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		182.218		175.185		153.216		0		0.00%		175.185		96.14 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit		48 Unit		48 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		109.215		94.892		82.992		0		0.00%		94.892		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit		26 Unit		26 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		121.817		105.841		92.568		0		0.00%		105.841		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit		29 Unit		29 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		243.634		211.681		185.136		0		0.00%		211.681		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit		58 Unit		58 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		126.017		109.490		95.760		0		0.00%		109.490		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit		30 Unit		30 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga		155.422		138.688		121.296		0		0.00%		138.688		89.23 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kemasyarakatan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	37 Unit		38 Unit		38 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		142.820		124.089		108.528		0		0.00%		124.089		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit		34 Unit		34 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		151.221		131.388		114.912		0		0.00%		131.388		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit		36 Unit		36 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		327.645		284.675		248.976		0		0.00%		284.675		86.89 %		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit		78 Unit		78 Unit		0 Unit		0.00 %		0 Unit		0.00 %		Kec. Tambaksari	
141	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.087.451		4.435.308		4.788.765		779.741		16.28%		5.215.049		102.51%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tegalsari	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase koordinasi	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan																
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.087.451		4.435.308		4.788.765		779.741		16.28%		5.215.049		102.51%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		21 Lokasi		100.00 %		21 Lokasi		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Tandes	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		100.00 %		20 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Pakal	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Sambikerep	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		22 Lokasi		100.00 %		22 Lokasi		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		13 Lokasi		108.33 %		13 Lokasi		108.33 %		Kec. Pabean Cantian	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %		10 Lokasi		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		26 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		26 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %		15 Lokasi		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		14 lokasi		100.00 %		14 lokasi		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Benowo	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %		15 lokasi		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	82 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		9.76 %		Kec. Jambangan	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		16 Lokasi		100.00 %		16 Lokasi		100.00 %		Kec. Semampir	
			Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Lakarsantri	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
					keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan															
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		100.00 %		26 Lokasi		100.00 %		Kec. Mulyorejo
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		100.00 %		24 Lokasi		100.00 %		Kec. Sukomanunggal
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		13 Lokasi		118.18 %		13 Lokasi		118.18 %		Kec. Sukolio
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		100.00 %		5 Lokasi		100.00 %		Kec. Asemrowo
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Wonocolo
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %		8 Lokasi		100.00 %		Kec. Karangpilang
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		14 Lokasi		100.00 %		14 Lokasi		100.00 %		Kec. Simokerto
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		100.00 %		17 lokasi		100.00 %		Kec. Tambaksari
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		12 Lokasi		100.00 %		12 Lokasi		100.00 %		Kec. Genteng
	7.01.04.2.01.0001			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			155.275		113.336		143.153		19.384		13.54%		132.720		85.47 %	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %			Kec. Bubutan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		177.759		140.755		146.115		24.353		16.67%		165.107		92.88 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		262.249		121.627		133.986		28.897		21.57%		150.524		57.40 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		154.683		123.704		154.683		10.993		7.11%		134.697		87.08 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		169.641		103.177		118.183		17.589		14.88%		120.766		71.19 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		88.039		113.353		106.420		26.585		24.98%		139.938		158.95 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		145.639		179.405		185.668		30.719		16.55%		210.124		144.28 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		199.767		150.101		147.515		24.567		16.65%		174.668		87.44 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		90 Laporan	25.00 %		90 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		167.097		179.593		156.997		44.654		28.44%		224.247		134.20 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		88 Laporan	24.44 %		88 Laporan		24.44 %		Kec. Jambangan	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		120.295		120.165		138.571		21.913		15.81%		142.078		118.11 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		194.561		131.204		152.554		22.948		15.04%		154.151		79.23 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		157.159		143.792		241.441		23.323		9.66%		167.115		106.34 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		171.867		135.049		137.939		22.914		16.61%		157.963		91.91 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		142.826		148.866		138.445		23.074		16.67%		171.940		120.38 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		309.309		213.306		297.509		35.226		11.84%		248.532		80.35 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		146.260		222.737		202.733		35.831		17.67%		258.568		176.79 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		188.612		166.729		130.686		26.639		20.38%		193.368		102.52 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		154.049		89.276		149.742		24.957		16.67%		114.233		74.15 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		131.678		129.240		126.985		19.511		15.36%		148.751		112.97 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		152.729		143.445		146.262		18.308		12.52%		161.752		105.91 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		152.234		124.453		146.262		21.942		15.00%		146.395		96.16 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		154.049		149.763		153.830		24.900		16.19%		174.663		113.38 %		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		151.735		142.253		141.514		23.575		16.66%		165.828		109.29 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		157.866		157.008		121.414		18.832		15.51%		175.840		111.39 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		165.164		119.396		115.681		17.726		15.32%		137.122		83.02 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		31.844		88.063		109.900		18.272		16.63%		106.335		333.93 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		165.173		128.000		121.104		22.377		18.48%		150.377		91.04 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		88 Laporan		24.44 %		88 Laporan		24.44 %		Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		316.157		246.407		285.407		61.984		21.72%		308.391		97.54 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		156.952		138.135		147.423		23.779		16.13%		161.914		103.16 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		129.511		122.138		131.427		20.191		15.36%		142.329		109.90 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		16.67 %		1 Laporan		16.67 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		117.273		150.834		159.217		23.779		14.94%		174.613		148.89 %		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
142	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN		145.220.138		1.180.640		4.186.003		394.927		9.43%		1.575.567		1.08%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bubutan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.72 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %		52.94 %		30.77 %		91.18 %		296.33 %		91.18 %		296.33%		Kec. Gubeng	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Lakarsantri	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.71 %		100%		99.76 %		99.76 %		99.76 %		99.76%		Kec. Jambangan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20%		32.79 %		18%		87.5 %		486.11 %		87.5 %		437.50%		Kec. Pabean Cantian	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %		52.50 %		50.51 %		89.56 %		177.31 %		89.56 %		177.31%		Kec. Tandes	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sambikerep	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		54.39 %		31.15 %		73.58 %		236.21 %		73.58 %		223.85%		Kec. Gayungan	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Asemrowo	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pakal	-
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sawahan	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		33.33 %		24.37 %		85.29 %		349.98 %		85.29 %		349.98%		Kec. Bubutan	-
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Semampir	-
			Persentase usulan musrenbang kecamatan	26.32 %		45.45 %		26.32 %		92.86 %		352.81 %		92.86 %		352.81%		Kec. Dukuh Pakis	-

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang dipertimbangkan																
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	65.01 %		69.64 %		50.15 %		90.77 %		181.00 %		90.77 %		139.62%		Kec. Wonokromo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.30 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sambikerep	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		43.12 %		24.45 %		92.86 %		379.80 %		92.86 %		371.44%		Kec. Semampir	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %		57.86 %		53.19 %		90.36 %		169.88 %		90.36 %		169.88%		Kec. Pakal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		48.81 %		51%		86.42 %		169.45 %		86.42 %		169.45%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tandes	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		93.94 %		93.94 %		93.94 %		93.94%		Kec. Rungkut	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Jambangan	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %		74.36 %		24.73 %		96.41 %		389.85 %		96.41 %		389.85%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.53 %		100%		99.95 %		99.95 %		99.95 %		99.95%		Kec. Tegalsari	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.93 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		54.08 %		24.37 %		94.03 %		385.84 %		94.03 %		385.84%		Kec. Sambikerep	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %		51.22 %		33.33 %		88.59 %		265.80 %		88.59 %		265.80%		Kec. Kenjeran	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.94 %		57.50 %		35.14 %		87.5 %		249.00 %		87.5 %		230.63%		Kec. Wonocolo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %		26.12 %		34.45 %		90.55 %		262.84 %		90.55 %		262.84%		Kec. Benowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Krembangan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Karangpilang	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonokromo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Genteng	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %		39.58 %		55.81 %		92.21 %		165.22 %		92.21 %		165.22%		Kec. Wiyung	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Pabean Cantian	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.41 %		100%		99.64 %		99.64 %		99.64 %		99.64%		Kec. Tambaksari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%		62.37 %		50%		98.06 %		196.12 %		98.06 %		196.12%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukolilo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Genteng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Simokerto	
			Persentase jenis pelayanan	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Simokerto	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			yang dinilai baik oleh masyarakat																
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.61 %		51.72 %		74.03 %		99.3 %		134.13 %		99.3 %		110.81%		Kec. Sawahan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Rungkut	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Dukuh Pakis	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wiyung	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Benowo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		97.83 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Asemrowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Benowo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Bulak	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bulak	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Bubutan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		85.77 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gunung Anyar	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gayungan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Gubeng	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Karangpilang	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			masyarakat																
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%		49.61 %		100%		56.6 %		56.60 %		56.6 %		56.60%		Kec. Karangpilang	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Kenjeran	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Sukomanunggal	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Sawahan	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tambaksari	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tandes	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tegalsari	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.98 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		100.00 %		100%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%		99.41 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Kec. Wonocolo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		44.71 %		24.45 %		86.64 %		354.36 %		86.64 %		346.56%		Kec. Lakarsantri	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %		58.18 %		23.25 %		95.83 %		412.17 %		95.83 %		412.17%		Kec. Tegalsari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25%		51.85 %		24.45 %		70.59 %		288.71 %		70.59 %		282.36%		Kec. Bulak	
			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %		63.56 %		23.38 %		88.46 %		378.36 %		88.46 %		378.36%		Kec. Genteng	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %		50.89 %		26.71 %		97.12 %		363.61 %		97.12 %		363.61%		Kec. Sukolilo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.3 %		52.85 %		29.53 %		91.06 %		308.36 %		91.06 %		290.93%		Kec. Jambangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %		44.44 %		27.27 %		84%		308.03 %		84%		308.03%		Kec. Asemrowo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %		31.72 %		37.11 %		97.12 %		261.71 %		97.12 %		261.71%		Kec. Krembangan	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %		81.08 %		37.16 %		94.65 %		254.71 %		94.65 %		254.71%		Kec. Rungkut	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %		55.56 %		40.51 %		86.43 %		213.35 %		86.43 %		213.35%		Kec. Mulyorejo	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %		78.63 %		47.02 %		98.23 %		208.91 %		98.23 %		208.91%		Kec. Tambaksari	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81.7 %		53.66 %		81.7 %		97.06 %		118.80 %		97.06 %		118.80%		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			267.325		92.340		157.525		106.830		67.82%		199.170		74.50%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		7 Lembaga		116.67 %		7 Lembaga		116.67 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah unsur lembaga yang	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Benowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan																
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100.00 %		2 laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		4 Lembaga		100.00 %		4 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonocolo	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		100.00 %		5 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		7 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		6 lembaga		100.00 %		6 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Tegalsari	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			kecamatan																
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		100.00 %		6 Lembaga		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.786		1.470		2.250		840		37.33%		2.310		21.42 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		100.00 %		6 Laporan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.843		4.200		8.650		8.640		99.88%		12.840		145.20 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.374		3.000		3.000		3.000		100.00%		6.000		71.65 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2.512		2.220		2.250		2.250		100.00%		4.470		177.93 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Kenjeran	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.699		3.600		4.500		4.500		100.00%		8.100		120.91 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			14.739		6.300		6.300		6.300		100.00%		12.600		85.49 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.752		1.740		1.740		1.740		100.00%		3.480		92.76 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.108		3.000		4.997		4.950		99.06%		7.950		155.63 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Genteng	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6.967		2.250		6.815		2.250		33.01%		4.500		64.59 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8.374		3.600		3.600		3.600		100.00%		7.200		85.98 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3.048		2.910		2.982		2.280		76.47%		5.190		170.26 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12.729		1.950		1.950		1.050		53.85%		3.000		23.57 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5.025		1.050		4.500		4.500		100.00%		5.550		110.46 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5.694		5.400		5.400		5.400		100.00%		10.800		189.66 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6.699		1.650		3.000		3.000		100.00%		4.650		69.41 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4.020		2.100		1.500		1.500		100.00%		3.600		89.56 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12.394		1.050		1.050		1.050		100.00%		2.100		16.94 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		15.779		4.500		5.820		5.820		100.00%		10.320		65.40 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Semampir	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10.049		0		6.540		390		5.96%		390		3.88 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Bulak	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3.852		3.450		3.450		2.460		71.30%		5.910		153.42 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Asemrowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10.887		2.700		2.700		2.700		100.00%		5.400		49.60 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10.049		6.000		9.830		2.250		22.89%		8.250		82.10 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		125 Laporan		100.00 %		125 Laporan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5.427		5.190		5.308		2.700		50.87%		7.890		145.40 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.01.0001				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		15.375		3.000		15.040		10.500		69.82%		13.500		87.80 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tambaksari	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		1.020		3.277		750		22.89%		1.770		52.84 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		178 Laporan		100.00 %		178 Laporan		100.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.079		4.200		4.200		3.540		84.29%		7.740		48.14 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.441		990		2.520		0		0.00%		990		11.73 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.910		1.800		1.800		1.800		100.00%		3.600		40.40 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			19.294		6.600		18.840		11.400		60.51%		18.000		93.29 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tandes	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.350		3.000		3.232		3.000		92.83%		6.000		179.12 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.719		2.400		10.485		2.670		25.46%		5.070		47.30 %		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100.00 %		2 Laporan		100.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			138.837.194		698.746		3.149.353		288.097		9.15%		986.843		0.71%		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan	280 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		281 Lembaga		100.00 %		281 Lembaga		100.36 %		Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			urusan pemerintahan																
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		100.00 %		323 Lembaga		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		185 Lembaga		100.00 %		185 Lembaga		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		414 Lembaga		100.00 %		414 Lembaga		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga		371 Lembaga		376 Lembaga		371 Lembaga		98.67 %		371 Lembaga		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga		219 Lembaga		219 Lembaga		219 Lembaga		100.00 %		219 Lembaga		100.92 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		627 lembaga		100.00 %		627 lembaga		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		100.00 %		Kec. Genteng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		364 Lembaga		100.00 %		364 Lembaga		99.73 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		100.00 %		346 Lembaga		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		568 Lembaga		100.00 %		568 Lembaga		100.00 %		Kec. Wonokromo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga		193 lembaga		188 lembaga		198 lembaga		105.32 %		198 lembaga		105.32 %		Kec. Benowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	749 Lembaga		751 Lembaga		751 Lembaga		751 Lembaga		100.00 %		751 Lembaga		100.27 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		636 Lembaga		100.00 %		636 Lembaga		100.00 %		Kec. Semampir	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			urusan pemerintahan																
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		480 Lembaga		100.00 %		480 Lembaga		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		431 Lembaga		100.00 %		431 Lembaga		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		100.00 %		460 Lembaga		100.00 %		Kec. Kenjeran	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		211 lembaga		100.00 %		211 lembaga		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		100.00 %		197 Lembaga		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00 %		158 Lembaga		100.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		139 Lembaga		100.00 %		139 Lembaga		100.00 %		Kec. Asemrowo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		220 Lembaga		100.00 %		220 Lembaga		100.00 %		Kec. Karangpilang	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		100.00 %		371 lembaga		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga		441 Lembaga		439 Lembaga		441 Lembaga		100.46 %		441 Lembaga		100.46 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga		497 Lembaga		488 Lembaga		497 Lembaga		101.84 %		497 Lembaga		101.84 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		262 Lembaga		100.38 %		262 Lembaga		100.77 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		196 Lembaga		100.00 %		196 Lembaga		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			urusan pemerintahan																
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		356 lembaga		100.00 %		356 lembaga		100.00 %		Kec. Simokerto	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		229 Lembaga		100.00 %		229 Lembaga		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga		214 Lembaga		168 Lembaga		168 Lembaga		100.00 %		168 Lembaga		100.00 %		Kec. Jambangan	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	200 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		205 Lembaga		100.00 %		205 Lembaga		102.50 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.454.403		12.701		71.652		6.954		9.71%		19.655		0.80 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.200.886		31.104		113.648		7.776		6.84%		38.880		0.63 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.594.402		27.929		99.508		6.982		7.02%		34.911		0.62 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.798.635		29.803		132.933		4.979		3.75%		34.781		0.60 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.890.578		28.577		121.038		7.144		5.90%		35.721		0.61 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.708.920		23.069		104.627		3.845		3.67%		26.914		0.57 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.745.070		13.014		130.324		15.520		11.91%		28.534		1.04 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.852.656		23.587		74.038		12.655		17.09%		36.242		0.75 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.686.608		22.421		80.437		5.605		6.97%		28.026		0.42 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.876.732		13.673		60.982		3.418		5.61%		17.091		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.280.353		40.597		218.038		10.157		4.66%		50.755		0.55 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sawahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				di Wilayah Kecamatan															
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.483.134		11.988		26.895		2.997		11.14%		14.985		0.60 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.437.744		26.827		167.706		6.707		4.00%		33.534		0.76 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.917.046		24.041		73.136		15.567		21.29%		39.608		0.81 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5.427.372		32.206		120.916		22.800		18.86%		55.006		1.01 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.108.477		10.238		66.849		1.706		2.55%		11.945		0.57 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1.881.581		9.007		45.659		5.162		11.31%		14.169		0.75 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.761.646		14.839		69.666		12.827		18.41%		27.666		1.00 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8.285.543		42.345		214.062		6.869		3.21%		49.214		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan		30 Laporan		30 Laporan		6 Laporan		20.00 %		6 Laporan		20.00 %		Kec. Semampir	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.569.468		48.665		184.246		22.374		12.14%		71.039		0.74 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.436.619		12.506		55.750		3.208		5.75%		15.714		0.64 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.411.844		14.191		37.106		3.548		9.56%		17.739		0.74 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.001.019		23.587		83.650		5.897		7.05%		29.484		0.59 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.680.000		10.886		52.466		7.342		13.99%		18.228		1.09 %		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				di Wilayah Kecamatan															
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.152.648		20.930		103.782		5.233		5.04%		26.163		0.63 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		63 Laporan	60 Laporan		15 Laporan		25.00 %		15 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.859.088		14.256		86.636		9.566		11.04%		23.822		0.83 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.600.212		12.766		44.859		5.428		12.10%		18.193		0.70 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6.782.123		36.796		183.722		30.616		16.66%		67.412		0.99 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.684.744		25.832		90.219		10.994		12.19%		36.826		1.00 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.422.884		16.913		79.745		9.815		12.31%		26.728		0.78 %		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		4.844.760		23.452		155.056		14.408		9.29%		37.860		0.78 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Wilayah Kecamatan																
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			6.115.619		389.554		879.125		0		0.00%		389.554		6.37%		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat																
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Krembangan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat															
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Karangpilang
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Asemrowo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bubutan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukolilo
				Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		12 Layanan		11 Layanan		12 Layanan		109.09 %		12 Layanan		109.09 %		Kec. Bulak
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tegalsari

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat																
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonokromo	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Lakarsantri	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		66.67 %		4 Bidang Urusan		66.67 %		Kec. Genteng	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Genteng	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				dilimpahkan kepada Camat															
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Semampir	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
				Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan		N/A			3 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Mulyorejo	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		N/A			4 Bidang Urusan		100.00 %		4 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Bulak	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A			9 Bidang Urusan		150.00 %		9 Bidang Urusan		150.00 %		Kec. Gubeng	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A			6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Kenjeran	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang	1 Bidang Urusan		N/A			1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dilimpahkan kepada Camat																
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sukomanunggal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sambikerep	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tandes	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wiyung	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Wonocolo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		33 Dokumen		30 Dokumen		9 Dokumen		30.00 %		9 Dokumen		30.00 %		Kec. Rungkut	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pakal	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Jambangan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	635 Dokumen		362 Dokumen		630 Dokumen		82 Dokumen		13.02 %		82 Dokumen		12.91 %		Kec. Gunung Anyar	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Pabean Cantian	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Krembangan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Tambaksari	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gubeng	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Sawahan	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		50.00 %		3 Bidang Urusan		50.00 %		Kec. Sukolilo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Benowo	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Gayungan	
			Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %		Kec. Simokerto	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
					pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat															
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Kenjeran	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Bubutan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Jambangan	
					Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan		N/A		12 laporan		25.00 %		3 laporan		25.00 %			Kec. Gunung Anyar	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Sawahan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Tambaksari	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		N/A		1 Bidang Urusan		100.00 %		1 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Jambangan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		N/A		6 Bidang Urusan		100.00 %		6 Bidang Urusan		100.00 %			Kec. Dukuh Pakis	
	7.01.02.2.04.0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8.039		0	7.738	0	0.00%		0		0.00 %				
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %			Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8.039	3.140	7.864	0	0.00%		3.140		39.06 %					
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %			Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait		4.020	0	3.932	0	0.00%		0		0.00 %					

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.049		746		28.743		0		0.00%		746		7.42 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3.753		1.614		3.652		0		0.00%		1.614		43.00 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.049		4.691		9.259		0		0.00%		4.691		46.68 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1.102		6.444		10.170		0		0.00%		6.444		584.96 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		912		366		854		0		0.00%		366		40.17 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13.399		4.884		5.404		0		0.00%		4.884		36.45 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		16.079		7.076		9.349		0		0.00%		7.076		44.01 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kecamatan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															Pakis	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.049		971		9.830		0		0.00%		971		9.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		18.591		3.923		18.069		0		0.00%		3.923		21.10 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8.039		7.143		1.957		0		0.00%		7.143		88.85 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.049		0		9.830		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		21.494		666		8.163		0		0.00%		666		3.10 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8.039		2.271		4.508		0		0.00%		2.271		28.25 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.594		5.495		10.363		0		0.00%		5.495		51.87 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan		8.597		2.381		2.444		0		0.00%		2.381		27.69 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12.863		4.973		12.161		0		0.00%		4.973		38.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2.043		860		1.999		0		0.00%		860		42.09 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		128.628		7.390		16.436		0		0.00%		7.390		5.75 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tegalsari	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12.059		826		10.800		0		0.00%		826		6.85 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		8.039		7.565		7.864		0		0.00%		7.565		94.10 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.652		7.146		10.420		0		0.00%		7.146		67.08 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		32.500		12.246		32.500		0		0.00%		12.246		37.68 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Jambangan	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.049		0		11.598		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			402		9.828		20.374		0		0.00%		9.828		2,445.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.699		585		1.680		0		0.00%		585		8.73 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.039		0		7.864		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.374		6.546		10.167		0		0.00%		6.546		78.16 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.118		9.602		23.592		0		0.00%		9.602		39.81 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			14.259		9.237		10.023		0		0.00%		9.237		64.78 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bubutan	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan			14.259		1.110		12.288		0		0.00%		1.110		7.78 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gubeng	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		4.020		3.793		3.932		0		0.00%		3.793		94.36 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonokromo	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		3.753		2.620		2.284		0		0.00%		2.620		69.79 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		10.049		9.196		9.273		0		0.00%		9.196		91.51 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		8.039		5.661		5.712		0		0.00%		5.661		70.42 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Genteng	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		10.049		3.791		9.830		0		0.00%		3.791		37.72 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		13.399		5.095		13.023		0		0.00%		5.095		38.03 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		14.259		1.415		11.701		0		0.00%		1.415		9.93 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		10.049		4.405		4.495		0		0.00%		4.405		43.84 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		100.00 %		1 Laporan		100.00 %		Kec. Sawahan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintahan																
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		18.591		9.774		17.942		0		0.00%		9.774		52.57 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		9.171		11.049		7.997		0		0.00%		11.049		120.47 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gayungan	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		14.259		4.445		13.705		0		0.00%		4.445		31.17 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan		3039 Laporan		2923 Laporan		793 Laporan		27.13 %		793 Laporan		27.13 %		Kec. Lakarsantri	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		21.494		4.440		10.765		0		0.00%		4.440		20.66 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		4.809.279		9.935		21.369		0		0.00%		9.935		0.21 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Kenjeran	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		19.438		3.905		9.000		0		0.00%		3.905		20.09 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Semampir	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		4.913		1.530		4.755		0		0.00%		1.530		31.14 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Bulak	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		14.259		0		11.661		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		12.075		4.873		11.749		0		0.00%		4.873		40.35 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Asemrowo	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.098		7.417		5.729		0		0.00%		7.417		36.90 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan		4210 Laporan		4140 Laporan		1077 Laporan		26.01 %		1077 Laporan		26.01 %		Kec. Tegalsari	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			12.059		4.782		11.778		0		0.00%		4.782		39.65 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tambaksari	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			8.039		4.905		7.123		0		0.00%		4.905		61.01 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Benowo	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.652		9.768		10.419		0		0.00%		9.768		91.70 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Gunung Anyar	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			72.000		0		23.819		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan		4277 Laporan		4277 Laporan		1068 Laporan		24.97 %		1068 Laporan		24.97 %		Kec. Jambangan	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		3.170		9.596		0		0.00%		3.170		31.55 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukomanunggal	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			402		283		1.142		0		0.00%		283		70.40 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Karangpilang	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.049		765		5.342		0		0.00%		765		7.61 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sukolilo	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan			2.010		1.008		1.966		0		0.00%		1.008		50.15 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		8.374		17.771		8.060		0		0.00%		17.771		212.21 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		24.118		17.231		19.353		0		0.00%		17.231		71.45 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Tandes	
	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		3.350		3.034		16.539		0		0.00%		3.034		90.56 %		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		25.00 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		16.079		1.620		1.132		0		0.00%		1.620		10.08 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen		102 Dokumen	40 Dokumen		31 Dokumen		77.50 %		31 Dokumen		77.50 %		Kec. Bubutan	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		16.079		1.154		13.584		0		0.00%		1.154		7.18 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen		9 Dokumen		25.71 %		9 Dokumen		25.71 %		Kec. Gubeng	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1.675		2.008		453		0		0.00%		2.008		119.89 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wonokromo	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.016		8.888		14.150		0		0.00%		8.888		88.74 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		36 Dokumen	50 Dokumen		43 Dokumen		86.00 %		43 Dokumen		86.00 %		Kec. Sukolilo	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan		16.079		2.897		10.831		0		0.00%		2.897		18.02 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen		142 Dokumen		100 Dokumen		37 Dokumen		37.00 %		37 Dokumen		37.00 %		Kec. Kenjeran	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		3.753		2.997		406		0		0.00%		2.997		79.85 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen		74 Dokumen		20 Dokumen		33 Dokumen		165.00 %		33 Dokumen		165.00 %		Kec. Simokerto	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.049		3.552		9.273		0		0.00%		3.552		35.35 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Krembangan	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		13.399		593		13.106		0		0.00%		593		4.42 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		230 Dokumen		30 Dokumen		38 Dokumen		126.67 %		38 Dokumen		126.67 %		Kec. Mulyorejo	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.049		346		9.526		0		0.00%		346		3.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Wiyung	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		16.079		3.128		3.256		0		0.00%		3.128		19.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Dukuh Pakis	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		12.059		10.656		11.796		0		0.00%		10.656		88.37 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Genteng	
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.049		9.481		5.332		0		0.00%		9.481		94.34 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Sawahan	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.591		2.922		5.889		0		0.00%		2.922		15.72 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00 %		1 Dokumen		100.00 %		Kec. Tenggilis Mejoyo	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.079		0		2.159		0		0.00%		0		0.00 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen		42 Dokumen		42 Dokumen		12 Dokumen		28.57 %		12 Dokumen		28.57 %		Kec. Lakarsantri	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.340		3.350		8.879		0		0.00%		3.350		250.02 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		48 Dokumen		48 Dokumen		16 Dokumen		33.33 %		16 Dokumen		33.33 %		Kec. Gayungan	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			21.494		844		8.871		0		0.00%		844		3.92 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Pabean Cantian	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2.456		1.035		3.447		0		0.00%		1.035		42.14 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		25.00 %		6 Dokumen		25.00 %		Kec. Bulak	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			18.142		12.600		2.831		0		0.00%		12.600		69.45 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		12 Dokumen		10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Semampir	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			9.647		2.635		9.189		0		0.00%		2.635		27.31 %		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		87 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %		3 Dokumen		25.00 %		Kec. Asemrowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		13.834		0		6.058		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen		12 Dokumen	10 Dokumen		3 Dokumen		30.00 %		3 Dokumen		30.00 %		Kec. Pakal	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		9.513		2.953		8.991		0		0.00%		2.953		31.04 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen		230 Dokumen	38 Dokumen		61 Dokumen		160.53 %		61 Dokumen		160.53 %		Kec. Sambikerep	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		24.118		7.516		5.061		0		0.00%		7.516		31.16 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		1 Dokumen		25.00 %		Kec. Tegalsari	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		8.039		888		7.864		0		0.00%		888		11.05 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen		4 Dokumen		26.67 %		4 Dokumen		26.67 %		Kec. Benowo	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		12.059		3.000		6.434		0		0.00%		3.000		24.88 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		192 Dokumen	48 Dokumen		47 Dokumen		97.92 %		47 Dokumen		97.92 %		Kec. Tambaksari	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.652		3.336		10.420		0		0.00%		3.336		31.31 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	635 Dokumen		362 Dokumen	630 Dokumen		82 Dokumen		13.02 %		82 Dokumen		12.91 %		Kec. Gunung Anyar	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1.005		470		983		0		0.00%		470		46.77 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen		32 Dokumen	16 Dokumen		12 Dokumen		75.00 %		12 Dokumen		75.00 %		Kec. Jambangan	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan		12.863		5.197		7.392		0		0.00%		5.197		40.40 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kec.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Non Usaha																
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		66 Dokumen	48 Dokumen		30 Dokumen		62.50 %		30 Dokumen		62.50 %		Kec. Karangpilang	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.049		0		33.870		0		0.00%		0		0.00 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		51 Dokumen	30 Dokumen		7 Dokumen		23.33 %		7 Dokumen		23.33 %		Kec. Sukomanunggal	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		108.004		1.133		1.500		0		0.00%		1.133		1.05 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen		95 Dokumen	48 Dokumen		23 Dokumen		47.92 %		23 Dokumen		47.92 %		Kec. Wonocolo	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		16.079		750		900		0		0.00%		750		4.66 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen		33 Dokumen	30 Dokumen		9 Dokumen		30.00 %		9 Dokumen		30.00 %		Kec. Rungkut	
	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		24.118		7.824		23.592		0		0.00%		7.824		32.44 %		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen		9 Dokumen		25.71 %		9 Dokumen		25.71 %		Kec. Tandes	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
143	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.375.109		12.429.718		13.951.229		2.493.144		17.87%		14.922.862		103.81%		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%		97.90 %	100%		98.66 %		98.66 %		98.66 %		98.66%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.120.103		9.815.129		11.114.909		2.039.952		18.35%		11.855.081		129.99%		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.120.103		9.815.129		11.114.909		2.039.952		18.35%		11.855.081		129.99 %		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan		24 Orang/bulan		85.71 %		24 Orang/bulan		96.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat		191.802		82.118		128.788		8.825		6.85%		90.943		47.41%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		Daerah																	
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			191.802		82.118		128.788		8.825		6.85%		90.943		47.41 %		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket		5 Paket		0 Paket		0.00 %		0 Paket		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.063.203		2.532.472		2.707.532		444.367		16.41%		2.976.838		58.79%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%		100%		100%		100%		100.00 %		100%		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.063.203		2.532.472		2.707.532		444.367		16.41%		2.976.838		58.79 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		25.00 %		1 Laporan		25.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
144	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97%		
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94%		92.78 %		93%		93.33 %		100.35 %		93.33 %		99.29%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97%		
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga		291 Lembaga		293 Lembaga		45 Lembaga		15.36 %		45 Lembaga		15.46 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			846.659		3.407.210		5.906.877		89.212		1.51%		3.496.422		412.97 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang		291 Orang		293 Orang		45 Orang		15.36 %		45 Orang		15.46 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
145	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1,475.75%		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
		DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%		54.23 %		77%		34.23 %		44.45 %		34.23 %		34.23%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1.475.75%		
			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70 Lembaga		30 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			8.317.287		122.734.960		17.524.830		7.100		0.04%		122.742.060		1.475.75 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	140 Orang		60 Orang		140 Orang		0 Orang		0.00 %		0 Orang		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Daerah																
146	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40%		
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	100%		100.00 %		81%		0%		0.00 %		0%		0.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40%		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	30 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %		0 Lembaga		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			59.370		60.078		84.368		2.500		2.96%		62.578		105.40 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0.00 %		0 Laporan		0.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
147	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69%		
			Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69%		
			Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	8 Lembaga		N/A		8 Lembaga		8 Lembaga		100.00 %		8 Lembaga		100.00 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya																
	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		823.293		686.028		806.743		77.082		9.55%		763.110		92.69 %		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang		702 Orang		690 Orang		140 Orang		20.29 %		140 Orang		20.29 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
148	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		12.624.896		11.907.791		12.803.112		2.972.819		23.22%		14.880.611		117.87%		
			Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%		100.00 %		100%		100%		100.00 %		100%		100.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12.624.896		11.907.791		12.803.112		2.972.819		23.22%		14.880.611		117.87%		
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga		14 Lembaga		14 Lembaga		13 Lembaga		92.86 %		13 Lembaga		108.33 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	18 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga		19 Lembaga		111.76 %		19 Lembaga		105.56 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,		11.875.472		11.402.763		12.083.834		2.923.241		24.19%		14.326.004		120.64 %		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang		24 Orang		17 Orang		19 Orang		111.76 %		19 Orang		105.56 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		749.424		505.028		719.278		49.579		6.89%		554.606		74.00 %		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan		45 Laporan		44 Laporan		4 Laporan		9.09 %		4 Laporan		9.09 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)												39.90%	14.85%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Hasil penelaahan terhadap monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dilakukan pada 10 (sepuluh) indikator tujuan, 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran, 511 (lima ratus sebelas) indikator program, 890 (delapan ratus sembilan puluh) indikator kegiatan dan 2.158 (dua ribu seratus lima puluh delapan) indikator sub kegiatan. Berdasarkan target tahun 2025 diperoleh capaian rata-rata sebesar 46,86% dengan predikat capaian Sangat Rendah. Namun demikian, capaian ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian Tahun 2024 Triwulan I sebesar 41,66%.

Perangkat Daerah dengan capaian tertinggi sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian 76,24%;
- 2) RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dengan capaian 74,92%;
- 3) RSUD Eka Candrarini, dengan capaian 72,03%;
- 4) Sekretariat DPRD, dengan capaian 68,82%;
- 5) RSUD Bhakti Dharma Husada, dengan capaian 68,66%.

Tingginya capaian Perangkat Daerah tersebut didorong oleh:

- 1) Tersedianya alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Tersedianya SOP yang jelas serta sistem informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan dan intervensi dapat berjalan secara optimal;
- 3) Komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan program dan kegiatan terlaksana sesuai perencanaan;
- 4) Komitmen RSUD dalam pelaksanaan akreditasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 5) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Perangkat Daerah dengan capaian terendah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan capaian 25,71%;
- 2) Dinas Kesehatan, dengan capaian 26,71%;
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dengan capaian 33,33%;
- 4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan capaian 33,85%;

- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan capaian 34,43%.

Rendahnya capaian Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh:

- 1) Triwulan I merupakan tahapan persiapan atau adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan, dan hasil kinerja berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di triwulan-triwulan selanjutnya;
- 2) Belum banyaknya masyarakat yang melakukan pengajuan pelayanan perizinan/non-perizinan di triwulan I;
- 3) Masih terdapat beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pelaporan data pelayanan dan data kunjungan tepat waktu;
- 4) Pengukuran data penyusun realisasi indikator dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan di triwulan III/IV.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

- 1) Pemantauan dan penyesuaian timeline target kinerja dengan mengedepankan kondisi terkini, alokasi kebutuhan dan proyeksi capaian target kinerja;
- 2) Dinas Kesehatan mendorong dan melakukan monitoring secara rutin kepada puskesmas untuk secara aktif melakukan outreach atas target sasaran intervensi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan;
- 3) Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan dan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan capaian target sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan/non-perizinan dan reformasi birokrasi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan 2025 hingga triwulan I, serta analisis isu pada media sosial menggunakan *big data*, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perlunya percepatan penanganan kemiskinan;
2. Perlunya penanganan terhadap pengangguran terbuka;
3. Perlunya penanganan inflasi;

4. Perlunya penurunan kesenjangan pendapatan;
5. Perlunya menjaga ketahanan pangan;
6. Perlunya penguatan kerjasama antar daerah dan lembaga untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan;
7. Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
8. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
9. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting serta ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
10. Masih perlunya percepatan pelaksanaan eliminasi penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/Aids dan Kusta;
11. Masih perlunya optimalisasi pelayanan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan sarana-prasarana kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta penurunan stunting;
12. Masih perlunya peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
13. Perlunya peningkatan kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata;
14. Perlunya peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
15. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
16. Masih perlunya optimalisasi peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat pasca Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
17. Perlunya upaya peningkatan pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
18. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih belum optimalnya kualitas tenaga pendidik sesuai standar, maka diperlukan fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik untuk meningkatkan standarisasi tenaga pendidik;
2. Perlunya optimalisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang literasi dan numerasi serta melakukan rehabilitasi terhadap prasarana sekolah;
3. Perlunya optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan kualitas lembaga PAUD (TK), melalui pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital bagi pendidik PAUD dan Forum Komunikasi PAUD-SD untuk pengembangan kualitas lembaga PAUD;
4. Masih adanya lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi, maka diperlukan fasilitasi pendampingan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ke BAN (Badan Akreditasi Nasional).

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV/AIDS, TB, dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, obesitas, melalui upaya peningkatan cakupan skrining penyakit menular dan optimalisasi inisiasi pengobatan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar. Upaya yang dilakukan yakni pelaksanaan pembangunan/relokasi dan rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu, peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit melalui pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
3. Perlunya pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan dengan adanya Pembangunan Rumah Sakit di wilayah Surabaya Timur sebagai wujud pemerataan cakupan rumah sakit milik pemerintah di setiap wilayah kota.
4. Masih perlunya peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah, upaya yang dilaksanakan

dengan melakukan optimalisasi sumber daya rumah sakit dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencapai SPM yang belum terpenuhi.

5. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan produk makanan-minuman industri rumah tangga (PIRT).
6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan. Upaya yang akan dilaksanakan yakni pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, workshop dan seminar.
7. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan yakni optimalisasi sistem informasi kesehatan yang ada seperti e-Health, Aplikasi Sayang Warga (ASW), Pemantauan Wilayah Sekitar (PWS) dan integrasi lainnya dengan sistem pemerintah kota.
8. Perlunya optimalisasi rujukan berjenjang, melalui peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bersama mitra layanan kesehatan di Kota Surabaya.
9. Perlunya optimalisasi pemanfaatan jaminan kesehatan semesta dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Upaya yang dilaksanakan yakni mempertahankan bantuan pembiayaan kesehatan yakni *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Surabaya melalui pembiayaan bantuan dan iuran PBPU Pemda.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan survei di jalan arteri, lokal, dan lingkungan untuk melakukan *monitoring* terkait adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB;
2. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi

- optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya telah membuat rencana konektivitas saluran pada sistem drainase di Kota Surabaya sebagai bentuk upaya optimalisasi sistem drainase dan penanganan genangan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi;
3. Perlunya optimalisasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta, salah satunya melalui audiensi terkait Proyek *Sustainable Energy Transition in Indonesia* (SETI), yang merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) dengan *International Climate Initiative*, sebagai salah satu upaya optimalisasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan dan/atau konservasi energi pada gedung pemerintah dan swasta;
 4. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi intens dengan PDAM Surya Sembada dalam penyediaan master meter untuk penanganan terhadap penyediaan layanan air bersih yang terkendala masalah lahan;
 5. Adanya jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan rutin melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman setiap tahunnya, mulai dari rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni, melalui perbaikan rumah tidak layak huni;

3. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya dalam penyediaan sanitasi layak melalui kerjasama CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan pihak swasta. Sedangkan dalam upaya penyediaan air layak minum, Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan PDAM Surya Sembada dalam melaksanakan pekerjaan peremajaan pipa distribusi yang berusia ratusan tahun;
4. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penyediaan perumahan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk pembangunan rumah susun di Kota Surabaya.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan yang mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan sosialisasi melalui *platform* media informasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat;
2. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk ini diperlukan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara rutin kepada masyarakat.

2.3.2.6 Sosial

1. Perlunya peningkatan kualitas pemutakhiran data Keluarga Miskin secara berkala, melalui integrasi data pekerjaan dan pendapatan warga miskin pada Sistem Padat Karya, serta secara rutin melaksanakan musyawarah kelurahan setiap bulan bersama seluruh pemangku kepentingan di kelurahan;
2. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, dilakukan melalui pelatihan berkala untuk PSKS, serta pemberian penghargaan kepada PSKS yang berperan serta aktif dalam membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, partisipasi PSKS juga ditingkatkan melalui pembentukan jaringan atau forum komunikasi antara PSKS untuk saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan jumlah dan partisipasi relawan baru.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Masih diperlukannya perluasan kesempatan bekerja dan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memiliki program kegiatan perluasan kesempatan kerja yang meliputi bimtek perluasan kesempatan kerja dalam rangka menciptakan wirausaha baru melalui bimtek menjahit, kuliner makanan, sablon, cuci kendaraan, membatik, cuci helm, pembuatan sabun, cuci AC, dan sebagainya yang juga mendukung program padat karya Pemkot dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran dari warga miskin;
2. Perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial belum optimal. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terkait hubungan industrial, syarat kerja, dan jamsostek baik kepada perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja/serikat buruh.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh beberapa pemangku kepentingan. Untuk itu dilakukan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang melibatkan semua Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan terkait pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan melalui pelatihan Pengarusutamaan Gender yang melibatkan semua Perangkat Daerah serta adanya pembinaan kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;
3. Perlunya optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pencapaian indikator Kelurahan/kampung layak anak melalui penjangkaran aspirasi pada saat musrenbang kota, kecamatan, dan kelurahan dengan melibatkan Forum Anak Surabaya, LSM Pemerhati Anak, dan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) serta

peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) dalam proses pembangunan di Kota Surabaya;

4. Perlunya optimalisasi upaya perlindungan perempuan dan anak utamanya dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui fasilitasi konseling dan pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sudah menyebar hingga tingkat RW.

2.3.2.9 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang layak dan aman di masyarakat, serta menjaga keamanan pangan segar mulai dari proses produksi sampai ke tahapan konsumsi. Selain sosialisasi, juga dilakukan secara rutin dan berkala pemeriksaan bahan pangan yang beredar di masyarakat, pengambilan sampel ini dilakukan secara acak di pasar tradisional, toko swalayan maupun di pasar modern;
2. Perlunya perluasan kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat rutin melaksanakan survei terkait ketersediaan stok dan harga pangan pokok di masyarakat. Selain itu, juga diupayakan stabilnya pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peninjauan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan yang ada di Jawa Timur;
3. Perlunya optimalisasi potensi *urban farming* baik di masyarakat maupun pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Untuk itu, di sisi produksi, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,

Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan kemampuan produksi komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan aset sebagai lahan produktif budidaya pertanian, peternakan serta perikanan. Gerakan *urban farming* juga dilakukan di lingkungan warga kota, didukung oleh Pemerintah Kota yang memberikan bantuan berupa sarana/prasarana dan pendampingan.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Masih perlunya pengadaan tanah/bangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan penggunaan aset tanah untuk penyediaan perumahan, pada tahun 2024 telah direncanakan perbaikan rumah susun di 9 lokasi;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan proses sertifikasi mulai dari permohonan peta bidang, permohonan hak, hingga pendaftaran hak, serta memperkuat sinergi dengan pihak terkait seperti Kejaksaan serta Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset;
3. Perlunya optimalisasi pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan, melalui percepatan proses sertifikasi serta sinergi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian sertifikasi aset.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penataan Ruang Terbuka Hijau, di antaranya melalui diversifikasi jenis pohon/tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan;
2. Masih diperlukan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R, melalui penambahan kapasitas maupun penambahan lokasi baru;
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, melalui pembinaan kepada masyarakat;
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan. Ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kegiatan/usaha terkait kewajiban terhadap

pengelolaan lingkungan serta mempermudah pelaporan melalui portal Sistem Pelaporan Elektronik (e-simpel);

5. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi. Ini dilakukan dengan melakukan sinergi bersama pelaku usaha untuk melaksanakan program-program pelestarian lingkungan serta kompetisi lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan persetujuan lingkungan dikarenakan adanya transisi perubahan peraturan dengan diterbitkannya PP 5 tahun 2021, PP 22 tahun 2021 dan Permenlh 4 tahun 2021 dan adanya perpindahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan di provinsi dan pusat. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari.

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perlunya optimalisasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* melalui optimalisasi aplikasi Mobile Klampid dan Takon Klampid. Selain itu juga membentuk SPP (Sentra Pelayanan Publik) yang tersebar di berbagai wilayah kota, antara lain di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Surabaya Selatan, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Surabaya Timur, Taman Cahaya Pakal di Surabaya Barat dan Wisata Rakyat Nambangan di Surabaya Utara.

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perlunya upaya peningkatan cakupan jumlah peserta KB baru melalui kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB;
2. Perlunya upaya peningkatan akses Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui kampanye dan edukasi tentang perencanaan keluarga dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan MKJP;
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun. Untuk itu dilakukan pemberdayaan pusat informasi dan konseling Remaja (PIK-R), pembinaan terhadap keluarga yg mempunyai

- remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), dan kampanye program Bangga Kencana melalui Generasi Berencana (Duta Genre);
4. Perlunya penguatan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam mendukung tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB di tingkat desa/kelurahan melalui kegiatan seperti Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

2.3.2.14 Perhubungan

1. Masih diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitar Surabaya, melalui koordinasi dengan instansi penyelenggara transportasi lainnya di dalam maupun sekitar wilayah Kota Surabaya, untuk saling mendukung dan membangun konektivitas wilayah yang lebih baik;
2. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, melalui penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Surabaya dengan menambah jumlah koridor dan jumlah armada angkutan dengan skema *Buy The Service* (BTS);
3. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas serta menerapkan pengembangan teknologi untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan, di antaranya melalui pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana dan jaringan utilitas TIK secara rutin dan berkala serta peningkatan kompetensi teknis SDM TIK dalam pengelolaan sarana prasarana TIK.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Adanya Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang kurang strategis, sehingga perlu dilakukan optimalisasi melalui revitalisasi sentra, melakukan rebranding beberapa sentra, melaksanakan pelatihan-pelatihan baik cita rasa, penyajian dan pemasaran online, melaksanakan program bapak asuh untuk pengelolaan SWK, serta perlu dilakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berada di sekitar lokasi Sentra Wisata Kuliner;
2. Adanya koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif, sehingga Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan kemitraan berkelanjutan untuk mendorong dan memelihara koperasi tetap aktif secara kelembagaan dan usaha. Selain itu, diberikan juga pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, serta didukung melalui kebijakan yang mendorong iklim berkoperasi yang sehat dan produktif untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi;
3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta masuknya produk-produk import dari luar negeri yang berpengaruh pada produk-produk UMKM, untuk itu Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait memberikan berbagai macam pelatihan baik tentang manajemen produk sampai pemasaran *digital*, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui ePeken, *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri), meningkatkan kualitas dan *branding* produk UMKM dengan menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* dan fasilitasi sertifikasi merk BPPOM dan PIRT.

2.3.2.17 Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi untuk semua cabang olahraga. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga terstandar terus diupayakan sebagai prioritas yang mendukung peningkatan daya saing atlet daerah dengan

- memperhatikan kebutuhan kesiapan atlet dan juga event olahraga nasional terutama pada cabang olahraga yang diperlombakan;
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan lapangan olahraga di kawasan pemukiman salah satunya dengan melakukan pemeliharaan/revitalisasi dan mendorong giat aktivitas dan lomba olahraga di tingkat kecamatan;
- 3. Masih belum tersedianya sistem untuk *database* atlet dan pelatih olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
- 4. Belum tersusunnya Dokumen Desain Olahraga Daerah dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang ada di daerah.

2.3.2.18 Statistik

- 1. Perlunya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta yang tervalidasi dan terintegrasi, salah satunya melalui penyediaan portal satu data tentang Kota Surabaya yang terbuka sehingga memberikan kemudahan akses untuk publik maupun instansi pemerintahan lainnya;
- 2. Perlunya penyusunan standar data dan data prioritas sebagai pedoman pelaksanaan statistik, melalui pelaksanaan koordinasi dalam Forum Satu Data.

2.3.2.19 Persandian

- 1. Perlunya optimalisasi integrasi sistem antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, melalui penerapan sistem keamanan informasi yang secara berkala dilakukan evaluasi mandiri dalam penerapannya;
- 2. Perlunya perlindungan keamanan data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, melalui peningkatan pengelolaan dan dukungan sumber daya persandian yang memadai dan berkompeten sesuai bidang IT dan keamanan informasi.

2.3.2.20 Kebudayaan

- 1. Masih terbatasnya kesempatan bagi pelaku seni dan budaya untuk tampil di ruang publik, yang diupayakan antara lain dengan mendorong partisipasi pelaku seni dan budaya dalam setiap kegiatan seremonial, seni dan budaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga melalui penyediaan dan pengembangan ruang-ruang publik

seperti taman dan tempat wisata yang menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong pihak-pihak swasta dalam pelibatan pelaku seni lokal untuk tampil pada event yang dilaksanakan di hotel, restoran dan tempat publik lainnya;

2. Belum optimalnya pemanfaatan obyek dan situs cagar budaya, sehingga perlu dilakukan antara lain pengembangan dan revitalisasi kawasan wisata serta melakukan pendekatan kepada potensi pemodal/pengusaha untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya;
3. Masih belum ditetapkannya Dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

2.3.2.21 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, melalui pengembangan sistem layanan perpustakaan yang modern dan terintegrasi.

2.3.2.22 Kearsipan

1. Perlunya optimalisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan, melalui sertifikasi kompetensi;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal, sehingga pemerintah kota mengembangkan sistem layanan kearsipan yang modern dan terintegrasi, serta menyempurnakan regulasi dan SOP pengelolaan kearsipan.

2.3.2.23 Kelautan dan Perikanan

1. Perlunya optimalisasi pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan, melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang tidak hanya sebatas pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya namun juga sekaligus pendampingan dari tenaga penyuluh;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, melalui pemberian bantuan intervensi kepada keluarga nelayan untuk dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Keluarga nelayan yang dibina menjadi pelaku

usaha UMKM tersebut juga mendapatkan fasilitas pemasaran di Sentra Ikan Bulak dan Romokalisari (*Romokalisari Adventure Land*).

2.3.2.24 Pariwisata

1. Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kunjungan di objek wisata, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta integrasi dengan kawasan wisata lain;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata, melalui penambahan destinasi wisata baru di kawasan kota lama yang pengembangan dan pengintegrasian antar zonanya masih akan terus dilakukan hingga 5 tahun ke depan;
3. Perlunya optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata, melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal seperti *Bersukaria Walk* dan *Surabaya Walking Tour by Roodebrug*, serta perusahaan, melalui *creating shared value* (CSV) untuk mengembangkan wisata rakyat yang dapat dijangkau masyarakat.

2.3.2.25 Pertanian

1. Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian (*urban farming*), peternakan dan perikanan, melalui Program Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya, tenaga pendamping maupun penyuluh;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan. Untuk itu, dilakukan optimalisasi klinik hewan yang beroperasi untuk menangani kesehatan hewan ternak di masyarakat;
3. Perlunya pencegahan dan penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, melalui peran aktif veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didukung juga oleh klinik hewan.

2.3.2.26 Perdagangan

1. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang berpengaruh pada sektor perdagangan. Untuk itu Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan daya

saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait memberikan berbagai macam pelatihan baik tentang produk sampai pemasaran *digital*, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui ePeken, *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri), meningkatkan kualitas dan *branding* produk UMKM dengan menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* bagi UMKM dan fasilitasi sertifikasi merk BPPOM dan PIRT;

2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional, melalui pemenuhan sarana prasarana di beberapa pasar untuk menuju pasar ber-SNI Pasar Rakyat, serta pasar pangan aman berbasis komunitas;
3. Perlunya sistem informasi dan fluktuasi harga dan ketersediaan terutama bahan pokok penting untuk mencegah *panic buying* di masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi.

2.3.2.27 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah. Untuk itu, dilakukan penegasan batas pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Karang Pilang yang kemudian akan disahkan melalui perwali hasil penegasan batas kecamatan. Sedangkan 4 kecamatan yang belum ditegaskan, yakni Kecamatan Krembangan, Tandes, Sukomanunggal, dan Asemrowo akan diselesaikan pada tahun 2026;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat, melalui evaluasi secara bertahap terhadap produk hukum yang telah ditetapkan maupun diundangkan.

2.3.2.28 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi ePlanning;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi, melalui evaluasi atas penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP sesuai standar penyelenggaraan statistik sektoral dan pengajuan rekomendasi statistik untuk penyelenggaraan data dan informasi tahun berikutnya.

2.3.2.29 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah. Untuk itu, dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, khususnya untuk pajak dan retribusi daerah dengan menggalakkan pembayaran melalui kanal-kanal *digital*, yaitu pembayaran retribusi parkir melalui QRIS serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *internet banking* dan *virtual account* serta kanal-kanal pembayaran *digital* lainnya;
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada melalui pemasangan alat pemantauan pajak secara elektronik;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis. Untuk itu, dilakukan pendataan ulang *database* pajak daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan. Untuk itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pendapatan dan belanja transfer.

2.3.2.30 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, melalui pengembangan evaluasi kinerja dan karir ASN berbasis *talent pool* elektronik, *awarding*, serta absensi *online*;

2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala, melalui pengembangan *talent pool* elektronik.

2.3.2.31 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai, melalui pengembangan e-learning, balai diklat terakreditasi, serta aplikasi perencanaan dan dampak diklat.

2.3.2.32 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Untuk itu, dilakukan finalisasi *longlist* dan *shortlist* permasalahan yang dapat menjadi topik penelitian oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan/atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Kota Surabaya, serta dibangun basis data/direktori penelitian terkait Kota Surabaya yang bersumber dari hasil penelitian yang masih relevan;
2. Perlunya penguatan kelembagaan bidang urusan penelitian dan pengembangan, antara lain melalui:
 - a. koordinasi untuk segera menindaklanjuti MoU dengan PTN dan/atau PTS pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Perjanjian Kerjasama terkait kolaborasi penelitian.
 - b. pengembangan sistem informasi sehingga siap terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka merintis iklim berbagi-pakai infrastruktur, sumber daya, maupun hasil riset dan inovasi antar pemangku kepentingan.

2.3.2.33 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, selain dilakukan pengembangan WBS (*whistleblowing system*) yang melibatkan aduan masyarakat, juga dibentuk sekretariat bersama penyuluh anti KKN;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan e-consulting sebagai kanal bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi pada APIP terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas;

3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi peraturan terkait kedisiplinan secara rutin yang bekerja sama dengan PD Kepegawaian sebagai upaya penanganan pelaku tindak indisipliner.

2.3.2.34 Kecamatan

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas baik tenaga ASN maupun non-ASN;
2. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang dapat memudahkan dalam melaksanakan koordinasi antara personil di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan, dengan melibatkan segala unsur masyarakat, baik perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan difabel.

2.3.2.35 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan adanya Tim Kewaspadaan Dini untuk memetakan potensi konflik, serta perlu didukung pemenuhan kebutuhan dan koordinasi dari para petugas pengamanan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dinamika geopolitik yang cepat disertai ketidakpastian ekonomi yang tinggi masih menjadi tantangan perekonomian global hingga kini. Isu terkini, kebijakan pemerintahan Donald Trump diperkirakan menciptakan gejolak perekonomian yang sebelumnya telah berjalan cukup stabil. Pengambilan kebijakan dilakukan agar dapat memberikan keuntungan besar terhadap perekonomian Amerika Serikat, antara lain penetapan kenaikan tarif biaya barang impor, kebijakan imigrasi melalui pengetatan pasar tenaga kerja melalui pengurangan tenaga kerja ilegal, perpanjangan kebijakan *tax cut* untuk meningkatkan permintaan domestik, dan kebijakan geopolitik terhadap konflik timur tengah.

Kebijakan Amerika Serikat tersebut menimbulkan terganggunya stabilitas perekonomian global, khususnya dari sisi perdagangan. China sebagai mitra dagang utama dan eksportir terbesar ke Amerika Serikat menjadi pihak yang paling terdampak, memicu balasan berupa kebijakan tarif serupa terhadap produk-produk Amerika. Tarif yang tinggi pada akhirnya menciptakan perang dagang yang mengganggu rantai pasok perdagangan, yang selanjutnya berimbas terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan. Perang dagang terjadi sebagai respons terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dirasa merugikan mitra dagangnya. Pengenaan tarif impor jika tidak diatasi akan berdampak terhadap penurunan daya saing produk dan tekanan terhadap industri dalam negeri yang berorientasi ekspor, yang akhirnya mendorong inflasi global meningkat dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Perlambatan ekonomi global diindikasikan dari beberapa asesmen, yakni pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun pada tahun 2025 dan 2026 yang ditandai oleh perlambatan pada beberapa negara maju; laju inflasi yang

cenderung sulit terkendali, seiring dengan terganggunya rantai pasok akibat perang dagang; suku bunga yang lebih tinggi; menguatnya dolar Amerika yang menyebabkan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah dan pelarian modal (investasi) dari negara berkembang ke Amerika Serikat. Berdasarkan data lembaga ekonomi *International Monetary Fund* (IMF), pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh cenderung stagnan di kisaran 3%. IMF bahkan melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 turun menjadi 2,8%.

Ketidakstabilan ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian negara-negara di dunia, tidak terkecuali juga Indonesia. Sebagai negara penganut perekonomian terbuka, ketidakstabilan faktor eksternal tidak dapat dihindari. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian moderat. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Meskipun kondisi ekonomi global sangat bergejolak, perekonomian nasional masih tetap berdaya tahan. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh di tengah ekonomi yang tidak stabil. Peran sektor dominan juga terus menunjukkan mampu menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah menyusun kerangka perekonomian tahun 2025 yang telah dimutakhirkan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 (KEM PPKF 2025). KEM PPKF merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Tema yang dimuat sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan (RKP) tahun 2025 dengan tema ***akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan***. KEM PPKF 2025 (pemutakhiran) memuat proyeksi perekonomian nasional tumbuh pada kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2025. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya

investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif, sedangkan inflasi (yoy) diperkirakan berada pada kisaran 1,5-3,5%.

Bappenas juga menargetkan sasaran indikator pembangunan lainnya di tahun 2025. Indikator ketenagakerjaan yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan pada kisaran 4,5-5,0%. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun di kisaran 8 hingga 7%. Sementara indikator Indeks Gini yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,379-0,382. Indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,56. Target-target tersebut diwujudkan melalui program-program kerja Pemerintah disertai arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93% (yoy). Sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antardaerah.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,9% hingga 5,70%. Perhitungan perkiraan tersebut merupakan hasil proyeksi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur ke depan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan upaya peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh positif sebesar 5,76%. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2024 ini masih tumbuh kuat meski kenaikannya lamban, bahkan ekonomi tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur yang mengalami kontraksi. Kinerja konsumsi yang diimbangi dengan tingginya daya beli masih menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya. Hampir 60% komponen konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Kota Surabaya dengan karakteristik kota perdagangan jasa dengan daya tarik pariwisata perkotaan yang menawarkan berbagai pusat hiburan, perbelanjaan, objek wisata alam maupun sejarah yang luas untuk rekreasi dan bisnis. Potensi-potensi yang dimiliki tersebut masih memperkuat peran konsumsi masyarakat sebagai fundamental ekonomi Kota Surabaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil tinggi. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 mencapai 40,48 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 37,57 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya, yakni kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Kinerja pembangunan manusia pada tahun 2024, nilai IPM Kota Surabaya sebesar 84,69 atau meningkat 0,7 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 83,99. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi 3,96% di tahun 2024 yang mulanya mencapai 4,65% di tahun 2023. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 6,76% pada tahun 2023 menjadi 4,91% di tahun 2024.

Tabel III.1
Kerangka Ekonomi Makro Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator Makro	2023	2024	2025	Perubahan 2025*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,70%	5,76%	5,5 – 6,1%	5,77%
2	Indeks Pembangunan Manusia	83,99	84,69	84,5 – 85,67	85,26
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,76%	4,91%	5,89 – 5,22%	4,5%
4	Persentase Penduduk Miskin	4,65%	3,96%	4,25 – 3,5%	3,90%
5	Indeks Gini	0,423	0,381	0,351 – 0,388	0,351 – 0,380

Keterangan : *) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024 serta target Tahun 2025 pada Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

Percepatan kinerja ekonomi terus dipertahankan dan diakselerasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa timur, yaitu :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;

6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* dan ekonomi biru/*blue economy* dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

Pemerintah Kota Surabaya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, akan dilakukan percepatan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga pada tahun 2025 akan terbentuk Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga telah menjalankan program yang mendukung perkoperasian agar menjadi koperasi sehat, meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengembangan ekonomi kreatif juga dilakukan dengan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di seluruh kecamatan dan pemanfaatan eks Hi-tech Mall untuk penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif terdiri dari program pencegahan dan penanganan perkawinan anak (deklarasi stop perkawinan anak, kelas pranikah dan kelas calon pengantin, Duta Genre di tingkat Kecamatan dan Kelurahan), Program Sekolah Orang Tua Hebat, layanan PUSPAGA, pelayanan KB (pelayanan sejuta akseptor, pembinaan 153 Kampung KB, fasilitas ruang laktasi, Kampung ASI, konsumsi tablet penambah darah), program padat karya, pemberdayaan UMKM melalui e-peken, pemberian bantuan sosial, penyediaan rumah sehat, bantuan untuk warga disabilitas, Kader Surabaya Hebat, penyediaan akses air minum. Sedangkan intervensi spesifik ditujukan secara khusus kepada calon pengantin, ibu hamil dan balita, melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendampingan, serta pemberian nutrisi.

Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889.331,91	917.595,42	982.815,39	1.026.186,70	969.357,95
B	Pertambangan dan Penggalian	31.943,80	32.761,34	33.392,98	32.513,35	31.379,96
C	Industri Pengolahan	107.416.294,34	113.535.139,44	126.030.898,75	135.434.984,12	147.302.541,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.237.615,57	2.417.167,25	2.742.046,30	3.728.710,22	3.970.550,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824.951,94	872.320,90	932.750,33	968.113,96	994.411,87
F	Konstruksi	51.969.408,77	55.273.538,87	61.408.502,94	64.940.579,25	70.335.981,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.246.755,05	163.509.913,19	184.610.467,40	201.432.925,47	214.341.080,16
H	Transportasi dan Pergudangan	29.794.090,41	30.518.851,24	36.260.418,47	42.834.312,86	47.529.709,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.618.582,64	91.418.079,71	102.248.698,97	114.627.560,20	126.222.540,64
J	Informasi dan Komunikasi	33.247.669,54	35.273.340,84	36.541.720,23	39.290.062,52	42.170.987,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.183.377,44	30.560.741,63	33.950.422,52	35.852.303,70	37.509.068,51
L	Real Estate	15.354.350,85	15.790.323,11	16.599.139,83	17.213.531,88	17.731.558,74
M,N	Jasa Perusahaan	14.116.912,06	14.543.157,97	15.772.593,51	17.530.932,18	19.268.197,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.238.304,23	8.310.975,30	8.486.026,22	8.533.021,21	9.788.000,22
P	Jasa Pendidikan	14.540.365,94	14.692.371,72	14.866.084,13	15.784.480,73	16.838.454,88

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.880.587,79	5.220.638,17	5.508.115,81	5.958.216,19	6.374.976,68
R,S,T, U	Jasa lainnya	6.918.915,11	7.340.199,70	8.642.127,81	10.106.272,69	11.114.817,11
	Produk Domestik Regional Bruto	554.509.457,38	590.227.115,79	655.616.221,58	715.294.707,23	772.493.614,49

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Catatan: *) data sementara

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif. Seperti yang terangkum pada Tabel III.2. Pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2020 sebesar **Rp554.509.457,38** juta dan hingga akhir tahun 2024 menghasilkan nilai tambah sebesar **Rp772.493.614,49** juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp214.341.080,16 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp147.302.541,52 juta dan sebesar Rp126.222.540,64 juta.

Selaras dengan realisasi PDRB ADHB Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.3, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp390.936.424,98 juta meningkat menjadi sebesar Rp485.448.887,46 juta di tahun 2024. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar Rp134.133.559,71 juta pada tahun 2024. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 27% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp92.182.283,14 juta.

Tabel III.3
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2020 s/d Tahun 2024* (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	547.994,90	554.054,69	573.236,82	576.177,55	541.237,84
B	Pertambangan dan Penggalian	19.464,04	19.479,83	19.094,55	17.844,90	18.120,26
C	Industri Pengolahan	76.384.521,77	79.366.597,57	84.567.579,11	87.392.236,59	92.182.283,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.449.668,99	1.538.145,94	1.661.665,76	2.174.083,24	2.301.731,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	630.336,37	665.833,73	680.003,79	696.386,15	711.522,48
F	Konstruksi	38.387.739,29	40.070.071,57	42.633.575,68	44.772.953,53	47.910.218,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	106.340.867,71	114.183.332,32	122.122.627,45	128.814.587,77	134.133.559,71
H	Transportasi dan Pergudangan	19.477.422,82	19.874.938,33	22.684.941,35	25.217.168,98	27.494.461,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.053.239,21	57.221.633,11	62.076.385,35	66.946.110,99	71.889.162,06
J	Informasi dan Komunikasi	29.511.280,46	31.281.790,23	32.264.418,48	34.446.030,83	36.698.243,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.231.210,98	19.324.709,68	19.648.801,34	20.445.326,71	21.207.821,53
L	Real Estate	11.000.304,15	11.179.684,13	11.634.820,68	11.916.338,17	12.200.164,26
M,N	Jasa Perusahaan	8.801.216,28	8.974.255,48	9.490.093,03	10.278.169,10	11.082.009,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.754.525,35	4.748.920,17	4.756.347,15	4.759.414,54	5.229.776,89
P	Jasa Pendidikan	9.934.443,75	9.993.042,98	10.001.195,71	10.447.847,60	10.983.874,40

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.539.299,11	3.722.145,29	3.782.452,79	3.932.734,49	4.155.684,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.872.889,81	5.007.190,09	5.671.102,07	6.197.308,43	6.709.014,54
	Produk Domestik Regional Bruto	390.936.424,98	407.725.825,13	434.268.341,12	459.030.719,58	485.448.887,46

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2025

Catatan: *) data sementara

Berdasarkan kontribusi sektor pembentuk perekonomian, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 yang banyak tantangan dan ketidakpastian selaras dengan perekonomian pusat dan global, membuat beberapa peran sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2024, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 27,63%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 28,06%. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 18,99% yang sebelumnya sebesar 19,04%. Artinya selama tahun 2024, peran Industri Pengolahan turun sebesar 0,05%. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecenderungan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29%. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 14,81%. Tingginya peran lapangan usaha ini didorong oleh banyaknya aktivitas *event* maupun hiburan sehingga banyak hotel maupun restoran, kafe, dan rumah makan yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan kontribusi, yang pada tahun 2023 sebesar 5,49% menjadi 5,66%. Meningkatnya peran lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian selaras dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada gilirannya membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal ini dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

Tabel III.4
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 s/d Tahun 2024*(dalam%)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
		%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10
C	Industri Pengolahan	19,54	19,47	19,47	19,04	18,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,38	0,38	0,47	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,82	9,83	9,82	9,75	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,2	28	28,12	28,06	27,63
H	Transportasi dan Pergudangan	4,98	4,87	5,22	5,49	5,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,34	14,03	14,29	14,58	14,81
J	Informasi dan Komunikasi	7,55	7,67	7,43	7,50	7,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	4,74	4,52	4,45	4,37
L	Real Estate	2,81	2,74	2,68	2,60	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	2,25	2,2	2,19	2,24	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,22	1,16	1,10	1,04	1,08
P	Jasa Pendidikan	2,54	2,45	2,30	2,28	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,91	0,87	0,86	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,25	1,23	1,31	1,35	1,38
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2025

Catatan: *) data sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir

tumbuh positif pada kisaran rata-rata di 5 hingga 6%. Kondisi yang berbeda terjadi ketika masa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian berkontraksi hingga -4,85% di tahun 2020. Namun selanjutnya, perekonomian Kota Surabaya kembali tumbuh positif seiring kebijakan pelonggaran pembatasan masyarakat diterapkan sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,29% dan meningkat menjadi 6,51% di akhir tahun 2022. Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar 5,70%. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lambat dibanding tahun 2022 yang mencapai 6,51%, namun perekonomian Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5%. Terkontraksinya perekonomian disebabkan oleh perubahan ekonomi yang sangat dinamis disertai ketidakpastian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara global selama tahun 2023.

Kondisi yang sama dirasakan di tahun 2024, ketika ekonomi tumbuh positif namun cenderung stagnan sama seperti kondisi ekonomi di tahun 2023. Meski demikian, ekonomi Kota Surabaya menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah kondisi global yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Hal itu ditunjukkan oleh capaian kinerja ekonomi secara kumulatif yang tumbuh positif mencapai 5,76% atau tumbuh lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 perlu diapresiasi mengingat kinerja global yang melambat serta kinerja domestik yakni pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur yang turut berkontraksi dibanding tahun 2023.

Tabel III.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-4,85
2021	4,29
2022	6,51
2023	5,70
2024	5,76

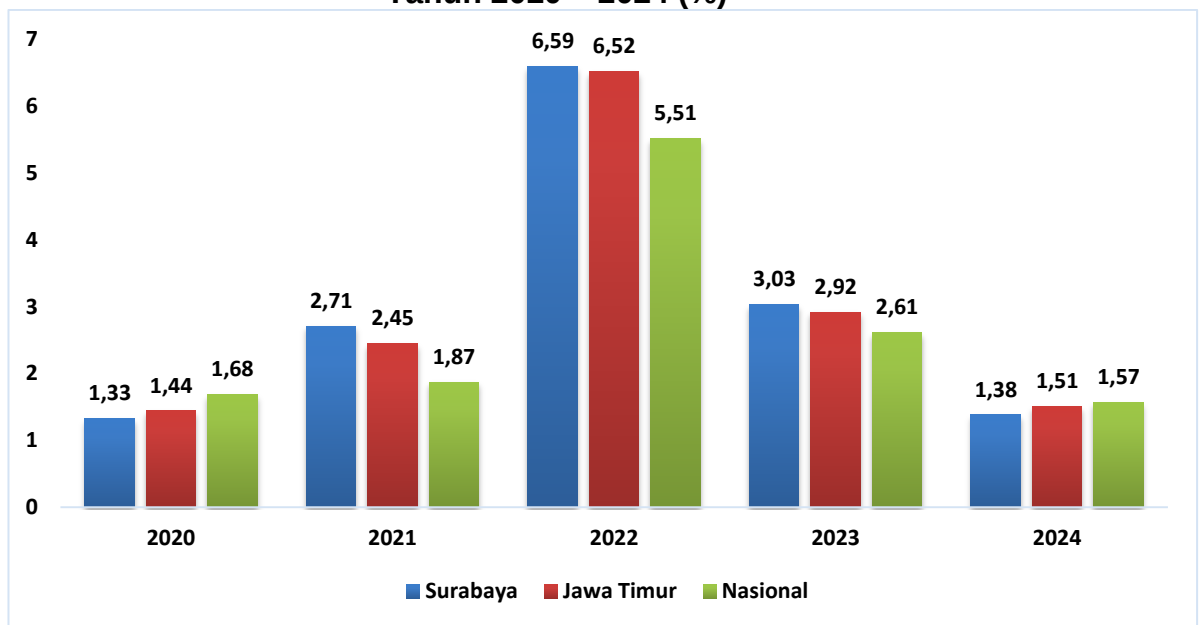
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2025

c. **Tingkat Inflasi**

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 nilainya lebih rendah dibandingkan

realisasi di tahun 2023. Capaian tersebut sedikit di bawah rentang sasaran target $2,5 \pm 1\%$. Berdasarkan data perkembangan harga, nilai inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 1,38%. Capaian inflasi Kota Surabaya memuaskan karena selain stabil rendah, inflasi Kota Surabaya tahun ini nilainya lebih rendah dibanding nilai inflasi Jawa Timur (1,51%) dan Nasional (1,57%), dibanding tahun 2023 yang nilainya lebih tinggi dari nasional dan Provinsi.

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2025, diolah

d.

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2024 secara *year on year* disebabkan oleh 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan sisanya 2 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya *year on year* tahun 2024 secara berurutan yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,69%); kelompok makanan, minuman dan tembakau (2,54%); penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,48%); kesehatan (1,83%); pendidikan (1,30%).

Perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok penyumbang utama inflasi selama tahun 2024. Emas perhiasan konsisten menjadi

komoditas dengan andil terbesar (0,36%) dengan tingkat inflasi (y-on-y) mencapai 37,42% pada November 2024. Komoditas emas perhiasan senantiasa mengalami kenaikan harga dalam 11 bulan terakhir. Peningkatan permintaan akan komoditas ini merupakan respons dari masyarakat khususnya investor untuk mencari perlindungan pada logam *safe haven* di tengah ketidakstabilan ekonomi sehingga emas perhiasan dianggap sebagai *saving asset* yang paling aman.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok tertinggi selanjutnya yang menyumbang inflasi Kota Surabaya secara yoy di tahun 2024. Komoditas utama yang menyumbang inflasi yoy tahun 2024 dari kelompok ini meliputi daging ayam ras, nasi dengan lauk, beras, minyak goreng, kopi bubuk, telur ayam ras, dan bawang merah. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dikontibusi oleh komoditas-komoditas bahan pangan yang disebabkan selain karena periode musiman yang tidak menentu yang berakibat pada terbatasnya ketersediaan stok di pasaran, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Meningkatnya harga beras didorong oleh tingginya permintaan beras di Kota Surabaya yang tidak diiringi ketersediaan yang memadai (terbatas) akibat produksi yang menurun dibanding periode sebelumnya di wilayah sentra penghasil beras. Selain itu, kenaikan harga beras di pasaran masih berlanjut sebagai dampak dari penerapan kebijakan pemerintah untuk menaikkan nilai HET beras yang diberlakukan sejak 31 Mei 2024. Sementara untuk komoditas kopi bubuk mengalami inflasi sejalan dengan kenaikan harga biji kopi dunia yang meningkat dari 228,24 USD/Lbs pada triwulan II menjadi 270,80 USD/Lbs.

Komoditas nasi dengan lauk kembali mengalami kenaikan harga sebagai dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku. Komoditas minyak goreng selama tahun 2024 mengalami kenaikan harga secara berturut-turut selama 6 bulan terakhir. Beberapa faktor penyebabnya selain peningkatan permintaan konsumsi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan secara domestik maupun internasional, juga kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit dan proses pengangkutan. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional dibandingkan bulan sebelumnya berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng serta

rantai distribusi yang panjang menyebabkan pasokan minyak goreng tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan konsumen pada momen tertentu. Komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang terjadi umumnya disebabkan kenaikan permintaan menjelang pada momen tertentu seperti perayaan dan hari raya yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai, ditambah lagi proses distribusi pasokan yang terhambat oleh cuaca buruk.

Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi yoy 1,83% di tahun 2024. Kenaikan kelompok ini sejalan dengan meningkatnya inflasi kelompok bahan makanan yang menjadi komponen pembentuknya. Berdasarkan data BPS, sektor penyediaan makanan dan minuman/restoran menjadi sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Secara otomatis, kebutuhan bahan pangan baku sebagai pasokan menjadi faktor penentu yang berpengaruh terhadap dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku.

Pada tahun 2024 kelompok kesehatan turut berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi Kota Surabaya. Komoditas yang dominan memberikan andil yakni obat dengan resep, vitamin, obat gosok, masker, biaya jasa dokter spesialis, dan tarif *check up*. Banyaknya rumah sakit besar baik milik pemerintah maupun swasta serta fasilitas kesehatan yang lainnya menjadikan Kota Surabaya sebagai tujuan berobat/rujukan masyarakat di luar Kota Surabaya membuat sektor kesehatan tumbuh. Sementara sektor Pendidikan turut andil berkontribusi inflasi setiap tahunnya yang umumnya terjadi pada momen tahun ajaran baru khususnya kenaikan tarif biaya sekolah yang dikelola oleh swasta. Selama tahun 2024, inflasi terjadi pada jenjang pendidikan wajib yakni kenaikan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

e. Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tetap kuat salah satunya dikontribusi oleh komponen investasi. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang

ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi. Selanjutnya, hal ini dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki faktor pengganda yang tinggi.

Tabel III.6
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2020 –Tahun 2025

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.924
2022	Rp 32.360.553.538.640	Rp 2.537.261.412.162
2023	Rp 34.810.311.974.810	Rp 2.525.167.120.000
2024	Rp 37.127.067.019.449	Rp 3.348.565.052.145

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2024 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp37.127.067.019.449, sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 3.348.565.052.145 sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp 40.475.632.071.954. Sektor yang mendominasi PMA Kota Surabaya pada tahun 2024 terbesar pada sektor perdagangan dan reparasi; industri makanan dan minuman; hotel dan restoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; jasa lainnya; serta sektor bidang usaha lainnya. Sementara sektor yang mendominasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2024 terbesar pada sektor perdagangan dan reparasi; industri makanan dan minuman; hotel dan restoran; jasa lainnya; dan konstruksi.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir yakni 2020 hingga tahun 2024 memiliki tren yang terus menurun. Pada tahun 2020 nilai TPT Kota Surabaya cukup tinggi mencapai angka 9,79%. Tingginya TPT Kota Surabaya kala itu disebabkan oleh banyaknya pemutusan hubungan kerja imbas pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021, TPT terus mengalami penurunan menjadi seiring adanya kebijakan pelonggaran dari pembatasan aktivitas masyarakat. Penurunan tersebut terus berangsur seiring juga fokus pemerintah Kota Surabaya mengurangi pengangguran khususnya difokuskan pada pengangguran akibat Covid-19. Penurunan ini merupakan sinyal efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat kembali terserap menjadi penduduk bekerja. Dampaknya pada akhir tahun 2023 TPT Kota Surabaya turun menjadi sebesar 6,76%.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 4,91%. TPT turun signifikan sebesar 1,85% poin dibanding tahun 2023. Capaian penurunan yang cukup drastis pada tahun 2024 dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja diiringi proporsi yang lebih besar pada peningkatan jumlah orang yang bekerja di tahun 2024. Sebaliknya, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan di saat jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,49% di tahun 2024, naik 1,76% poin dibandingkan tahun 2023, sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1,62 juta jiwa, bertambah 55,1 ribu orang dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan terbesar berasal dari pengangguran laki-laki. TPT pada laki-laki turun dari 7,30% pada Agustus 2023 menjadi 4,85% pada Agustus 2024, sedangkan TPT perempuan turun dari 6,04% pada Agustus 2023 menjadi 4,99% pada Agustus 2024. Jika ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, TPT Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang ditamatkan sekolah menengah pertama, sementara TPT paling rendah berada pada tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%
2023	6,76%
2024	4,91%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2025

Prospek Ekonomi Tahun 2025 dan 2026

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih berat dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2024. Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah dari ekspektasinya. Bahkan IMF melakukan revisi terkait prediksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mulanya sebesar 3,3% turun menjadi 2,8% di 2025 dan sebesar 3% di tahun 2026. Artinya, kondisi ekonomi global hingga saat ini menunjukkan penurunan kinerja. Perubahan estimasi tersebut sebagai penyesuaian imbas dari kebijakan Amerika Serikat yang membuat ekonomi global lebih bergejolak. Hal ini memicu perang dagang dan berimbas terhadap negara-negara lainnya, utamanya negara mitra dagangnya, salah satunya yang berlangsung saat ini yakni perang tarif antara Amerika dan China. Oleh karena itu IMF juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Pada tahun 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulanya sebesar 5,1% turun menjadi pada angka 4,7%. Meskipun demikian, penurunan estimasi prediksi pertumbuhan Indonesia lebih rendah dari perkiraan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Thailand dan Meksiko mengingat ketiga negara tersebut memiliki porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

Meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak, pemerintah tetap meyakini pertumbuhan ekonomi nasional mampu berdaya tahan. Pemerintah meyakini melalui sinergi yang kuat, ancaman dari luar mampu dihadapi. Pemerintah juga optimis pertumbuhan nasional masih mampu tumbuh pada kisaran 5%. Tentunya rasa optimis tersebut didukung oleh kemampuan konsumsi

dan investasi serta kinerja ekspor yang cukup baik, di tengah perlambatan ekonomi global. Inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026. Konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nilai tukar Rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil melalui fundamental yang baik, yakni inflasi rendah, imbal hasil investasi menarik, dan pertumbuhan tinggi.

Melihat perkembangan terkini, tahun 2024 tumbuh sebesar 5,76% maka pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya juga diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni di kisaran 5,5-6,1% yang kemudian ditargetkan menjadi 5,77%.. Masih kuatnya kinerja ekonomi Kota Surabaya selama ini dipengaruhi faktor fundamental Kota Surabaya, seperti kuatnya tingkat konsumsi yang menjadi komponen terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, diikuti oleh investasi dan ekspor. Dari sisi sektoral, lapangan usaha dominan Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2024 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara *year on year* (y-on-y) sebesar 1,38%. Jika dibandingkan pada tahun 2023, Kota Surabaya mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 3,03%. Sementara untuk tahun 2025 dan 2026, inflasi Kota Surabaya diperkirakan pada kisaran $2,5 \pm 1\%$, yang juga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 dan 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2025 mengacu pada:

- A. Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

B. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, movev pendanaan desentralisasi

C. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

D. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

III-24

E. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah

3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu
4. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha
5. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah:

- 1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan :

- i. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
- ii. Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- iii. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-141/PK.5/2024, Perihal : Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos dengan penjelasan :
 1. Pasal 1 angka 47 UU HPKD mengatur bahwa definisi dari Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya^{III-26}
 2. Pasal 53 UU HPKD ayat (1) mengatur bahwa Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang/pertemuan pada penyediaan jasa hotel seperti :
 1. Hotel
 2. Hostel
 3. Vila
 4. Pondok wisata
 5. Motel

6. Losmen
 7. Wisma
 8. Pesanggrahan
 9. Rumah penginapan /*guesthouse* /*bungalo* /*resort/ cottage*
 10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan
 11. Glamping
3. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel*” adalah rumah, apartemen dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih satu bulan)
 4. Berdasarkan pengaturan di atas, indekos/rumah kos dapat menjadi objek PBJT atas Jasa Perhotelan sepanjang memenuhi kriteria pada penjelasan pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD
 5. Pasal 1 angka 47 UU HPKD yang memuat frasa “dapat dilengkapi” memiliki maksud bahwa jasa perhotelan dapat maupun tidak dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya sehingga cenderung menitikberatkan pada penyediaan akomodasi saja
 6. Pasal 53 ayat (1) huruf j UU HPKD, dapat dimaknai jika terdapat kontrak yang menyatakan bahwa persewaan dilakukan untuk masa kontrak di atas 1 bulan, transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam maksud dari frasa “*tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel*”
- iv. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB)

v. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2 sebagai berikut:

1. Nilai NJOP 0-100 juta semula 0,10% menjadi 0,00%
2. Nilai NJOP 100-200 juta semula 0,10% menjadi 0,05%
3. Nilai NJOP 200 juta-1 miliar semula tidak ada perubahan yaitu 0,10%
4. Nilai NJOP 1 miliar-2 miliar semula 0,20% menjadi 0,15%
5. Nilai NJOP 2 miliar-10 miliar tidak ada perubahan yaitu 0,20%
6. Nilai NJOP 10 miliar-50 miliar semula 0,20% menjadi 0,25%
7. Nilai NJOP 50 miliar ke atas semula 0,20% menjadi 0,30%

vi. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%
III-28

vii. Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut:

1. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel tetap sebesar sebesar 10% dan rumah kos semula 5% menjadi tidak dipungut pajaknya
2. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan

katering serta jasa boga tetap sebesar 10%

3. PBJT Tenaga Listrik (PPJ) meliputi PLN rumah tangga semula 8% menjadi 10%, PLN Industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi tetap sebesar 3%, PLN selain Golongan Industri Pertambangan, Minyak Bumi, dan Gas Alam selain Rumah Tangga semula 5% menjadi 10%, Non PLN tetap sebesar 1,5%
4. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana semula 20% menjadi 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional semula 5% menjadi 10%, Kontes Kecantikan dan Sejenisnya semula 35% menjadi 10%, Kontes Binaraga tetap 10%, Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi tetap 10%, Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif, Properti semula 20% menjadi 10%, Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub Malam, dan Sejenisnya tetap 50%, Sirkus, Akrobat, Sulap tetap 10%, Permainan, Bilyard, Golf, Bowling semula 35% menjadi 10%, Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor semula 20% menjadi 10%, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa tetap 50%, Pusat Kebugaran tetap 10%, Pertandingan Olahraga 15% menjadi 10%, Karaoke Keluarga semula 35% menjadi 40%, Permainan Ketangkasan tetap 10%, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada maka sesuai perda yang baru tarifnya 10%
- viii. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%

- ix. Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%
- x. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut%tase tertentu meliputi:
 - 1. Pasal 44 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebutkan tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% sedangkan pada regulasi sebelumnya yaitu pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%;
 - 2. Penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempertimbangkan Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.12.1/12888/202.2/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal: Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
 - a) Melakukan evaluasi dan penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
 - b) Melakukan perbaikan peta PBB

- c) Menghitung target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
 - d) Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya
 - e) Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
 - f) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
 - g) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital
 - h) Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan
 - i) Sinergi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk *role sharing* dan *cost sharing*
 - j) Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor pajak daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- b. Kebijakan Retribusi Daerah:
- 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

- 3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - 4) Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal
 - 5) Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
 - 6) Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
 - a) Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
 - b) Penggunaan pembayaran non-tunai
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir
 - 7) Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerja sama dengan pengelola parkir swasta
 - 8) Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
 - a) asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
 - b) Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
 - c) Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*
 - 9) Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan dan alat kesehatan yang baru dan mutakhir
 - 10) Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor retribusi daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD:

- 1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintah Daerah
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
- 2) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
- 3) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan BUMD untuk menghasilkan inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat dan kemanfaatan umum, melalui diversifikasi usaha dan investasi
- 4) Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis. Restrukturisasi meliputi: restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan, dilaksanakan melalui restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; serta penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik

- d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c) Hasil kerja sama daerah
 - d) Jasa giro
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir
 - f) Pendapatan bunga
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - k) Pendapatan denda pajak daerah
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - n) Pendapatan dari pengembalian
 - o) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD. Pendapatan dari BLUD tersebut terdiri dari :
 1. Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan

2. Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie
 3. Pendapatan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada
 4. Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Eka Candrarini
 5. Pendapatan BLUD jasa layanan parkir pada Dinas Perhubungan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
 - 4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota
2. Kebijakan Pendapatan Transfer
- a) Berubahnya pengelolaan PKB dan BBNKB menjadi objek pajak baru berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi faktor menurunnya potensi dana transfer provinsi, namun di sisi lain meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali secara lebih maksimal dan pengelolaannya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
 - b) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari

pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;
- d) Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
- e) Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer;
- f) Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

III-36

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Perubahan RKPD	Target
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak Daerah	4.157.521.611.124	4.562.879.779.487	4.784.138.321.218	7.307.751.999.326	7.297.947.194.361	6.043.457.927.747
Retribusi Daerah	269.599.560.046	289.382.181.469	349.581.167.459	486.207.862.705	486.207.862.705	390.633.434.312
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	233.686.218.755	152.380.733.841	195.348.090.465	210.074.787.736	210.074.787.736	203.521.387.559
Lain-Lain PAD yang sah	653.887.867.869	767.175.835.656	785.318.328.456	792.302.517.968	792.302.517.968	739.751.887.208
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.314.695.257.794	5.771.818.530.453	6.114.385.907.599	8.796.337.167.735	8.786.532.362.770	7.377.364.636.826
Pendapatan Transfer		5.694.014.077.000				
Transfer Pemerintah Pusat	2.516.292.582.738	2.595.300.604.262	2.856.076.818.326	2.891.048.679.000	2.891.048.679.000	2.891.048.679.000
Dana Perimbangan	2.475.155.880.738	2.564.776.881.262	2.814.643.777.326	2.861.866.498.000	2.861.866.498.000	2.891.048.679.000
Dana Insentif Daerah	41.136.702.000	30.523.723.000	41.433.041.000	29.182.181.000	29.182.181.000	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0	0
Dana Keistimewaan		0	0	0	0	0
Dana Desa		0	0	0	0	0
Transfer Antar - Daerah	960.320.838.950	1.237.660.629.691	1.063.985.529.627	449.721.229.463	449.721.229.463	337.087.325.661
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	939.286.438.950	1.224.592.229.691	1.060.948.129.627	449.721.229.463	449.721.229.463	337.087.325.661
Pendapatan Bantuan Keuangan	21.034.400.000	13.068.400.000	3.037.400.000	0	0	0
Jumlah Pendapatan Transfer	3.476.613.421.688	3.832.961.233.953	3.920.062.347.953	3.340.769.908.463	3.340.769.908.463	3.228.136.004.661
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Hibah	0	0	0	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Perubahan RKPD	Target
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	8.791.308.679.482	9.604.779.764.406	10.034.448.255.552	12.137.107.076.198	12.127.302.271.233	10.605.500.641.487

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2024

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	Badan Pendapatan Daerah	4.177.250.689.693	4.573.798.966.702	4.795.260.275.199	7.307.751.999.326	7.297.947.194.361	5.996.619.634.117
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.848.389.155.761	4.157.105.095.159	4.254.119.499.024	3.701.528.492.263	3.701.528.492.263	3.237.919.084.683
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	101.733.121.281	112.508.222.727	81.235.816.770	124.390.533.646	124.390.533.646	105.861.330.254
4	Dinas Perhubungan	46.291.695.558	53.146.932.313	49.678.698.624	102.425.491.692	102.425.491.692	82.467.267.003
5	Dinas Lingkungan Hidup	79.520.392.415	84.916.831.126	143.865.269.849	122.455.080.145	122.455.080.145	112.105.544.172
6	Dinas Kesehatan	147.501.762.677	162.772.987.076	220.298.008.264	176.577.625.200	176.577.625.200	161.653.814.102
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	248.226.000	720.894.000	741.960.000	834.269.110	834.269.110	686.641.546
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	490.218.000	6.722.815.600	8.024.126.200	8.055.636.555	8.055.636.555	6.620.773.058
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	3.248.373.740	2.479.038.640	12.577.600	0	0	0
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	7.087.935.150	11.751.091.061	15.575.893.771	19.180.134.244	19.180.134.244	15.763.784.175

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	563.127.080	586.749.000	1.760.249.880	3.289.961.178	3.289.961.178	2.703.955.942
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.066.450.000	597.510.000	525.500.000	360.000.000	360.000.000	329.573.880
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	209.370.718.921	270.202.075.903	288.035.149.456	295.816.171.975	295.816.171.975	281.483.924.031
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	167.920.381.475	166.541.999.598	174.175.281.714	167.920.381.475	167.920.381.475	162.832.398.234
15	RSUD Eka Candrarini	0	0	0	105.000.000.000	105.000.000.000	96.125.715.031
16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	621.111.831	928.555.500	1.139.949.200	1.521.299.389	1.521.299.389	1.250.326.767
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.319.900	0	0			0
JUMLAH		8.791.308.679.482	9.604.779.764.405	10.034.448.255.552	12.137.107.076.198	12.127.302.271.233	10.264.423.766.995

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.034.448.255.552 atau 88,78% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.784.138.321.218 atau 92,55%; retribusi daerah sebesar Rp349.581.167.459 atau 84,54%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp195.348.090.465 atau 102,79%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp785.318.328.456 atau 96,46% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.784.138.321.218 atau 92,55%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2024, namun Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan pajak daerah, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
2. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
3. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/317/436.1.2/2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2025;
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/164/436.1.2/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/Atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlamabatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu,

Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79

Selain memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Lokasi objek pajak PBJT Jasa Parkir belum seluruhnya terpasang alat perekam pajak daring sehingga proses pengawasan dan integrasi pelaporan pajak parkir belum terlaksana secara optimal;
2. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) relatif besar belum terbayarkan karena data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak jelas atau tidak ditemukan;
3. Pergeseran minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan via media sosial karena dirasa lebih efektif dan lebih masif sehingga menurunkan potensi pemasangan reklame;
4. Pemungutan pajak PBJT Tenaga Listrik yang dilakukan oleh penyedia listrik (PLN) belum maksimal karena pemungutan pajak berdasarkan pembayaran langganan listrik oleh konsumen bukan dari jumlah konsumsi tenaga listrik sebenarnya.
5. Pemutakhiran data untuk mengatasi tingginya dinamika perubahan terhadap objek pajak dan wajib pajak yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
6. Wajib Pajak cenderung kurang memanfaatkan layanan dan fasilitas pembayaran pajak secara daring melalui beragam kanal mengakibatkan pelaksanaan pemungutan pajak masih belum dapat optimal^{III-44}
7. Ketentuan dasar pengenaan pajak reklame masih menggunakan regulasi lama (2010) dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pembaruan regulasi sehingga pendapatan pajak reklame masih belum optimal.

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp349.581.167.459 atau 84,54% dari target Rp413.533.091.681 meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp181.169.533.083 atau 116,82%; retribusi jasa usaha

sebesar Rp124.215.032.924 atau 88,72%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp44.196.601.453 atau 37,32%.

Pada tahun 2024, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini;
2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari, dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan tercapai 45,52% dikarenakan belum optimalnya pengawasan dan berkurangnya titik parkir;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 49,47%, meningkat 17,72% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 31,75% dikarenakan adanya penambahan lokasi titik parkir baru yang dikelola Dinas Perhubungan semula 44 lokasi menjadi 53 titik pada tahun 2024;
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai 32,45% dikarenakan adanya regulasi pengurangan, pembebasan, atau pengurangan denda, salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-730. Selain itu, pembangunan bangunan tinggi yang semakin sedikit dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan PBG sebelum membangun rumah tinggal juga turut mengurangi pendapatan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp195.348.090.465 atau 102,79%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan *output* pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2024.

Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) tercapai Rp16.585.784.987 atau 119,36% dari target;
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp166.389.166.111 atau 101,60% dari target Rp163.774.035.051 meliputi:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp19.671.336.512 atau 100% dari target terdiri dari:
 - PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tercapai Rp2.302.504.886 atau 100% dari target
 - PT BPD Jawa Timur tercapai Rp17.363.651.626 atau 100% dari target
 - PT BPR Jawa Timur tercapai Rp5.180.000 atau 100% dari target
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp5.768.350.525 atau 175,11% dari target Rp3.294.219.466 terdiri dari:
 - Perusahaan Daerah Pasar Surya tercapai Rp379.707.689 atau 148,56% dari target Rp255.564.102 dengan rincian :
 - Realisasi dividen tahun 2019 sebesar Rp41.000.000
 - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp114.564.102 tanggal 4 Januari 2024
 - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp100.000.000 tanggal 13 Juni 2024
 - Realisasi dividen tahun 2023 sebesar Rp123.143.587 tanggal 31 Desember 2024

- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp246.800.714 atau 100% dari target dengan rincian :

- Angsuran pertama sebesar Rp64.553.594
- Angsuran kedua sebesar Rp35.000.000
- Angsuran ketiga sebesar Rp5.000.000
- Angsuran keempat sebesar Rp5.000.000
- Angsuran kelima sebesar Rp137.247.120

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/84/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp564.553.594, terdapat selisih Rp317.752.880 akan dibayarkan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Surabaya dan diakui sebagai utang dividen

- PT Surya Karsa Utama tidak ada realisasi dividen karena sedang dalam proses pelaksanaan pembubaran melalui likuidasi berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Desember 2023, dan saat ini sedang dalam proses audit oleh kantor akuntan publik
- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar Rp5.141.842.122 atau 194,63% dari target Rp2.641.854.650 berdasarkan:

- 1) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/118/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Kota Surabaya, telah disetorkan sebesar Rp3.051.078.415;
- 2) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tahun 2022, telah disetorkan sebesar Rp2.590.763.707 di tahun 2023 dan tahun 2024

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp140.949.479.074 atau 100,10% dari target Rp140.808.479.073 berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/79/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.
- d. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu PT YEKAPE Surabaya tercapai Rp12.373.164.367 atau 100% dari target berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2024 yang telah disahkan Akta Notaris tanggal 6 Mei Tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp785.318.328.456 atau 96,46% dari target yang telah ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp3.920.062.347.953 atau 83,13% dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan transfer Tahun 2024 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp6.123.511.688 atau 90,51% dari target Rp6.765.509.000^{III-48} dikarenakan penyalurannya memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.
2. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp772.097.523.568 atau 97,63% dari target Rp790.857.390.000 dikarenakan penyalurannya memperhitungkan SILPA tahun sebelumnya
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp1.060.948.129.627 atau 53,46% dari target Rp1.984.543.201.137 berdasarkan:
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/635/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk

Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur berdasarkan Target Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

- b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024;
- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2024;

- i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
 - j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
 - k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tercapai Rp3.037.400.000 atau 79,03% dari target Rp3.843.313.779 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja

agar efektif untuk mendukung ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis"*** serta berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2025 yaitu :

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinkronisasi dengan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan;
6. Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat kajian yang tidak memberikan dampak langsung dan pencetakan serta belanja perjalanan dinas;
7. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
10. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Selain itu, belanja daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 146 Ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka total belanja pegawai sebesar Rp3.665.203.431.595 dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp276.428.650.000 sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp3.388.774.781.595 atau 27,41%;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.522.147.740.981 atau 20,42%;
3. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 147 ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, jumlah belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp 5.899.177.776.615 atau 47,76%

4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, mendukung arah kebijakan dan pencapaian target pembangunan yang mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Preseiden serta visi, misi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun kebijakan belanja Daerah tersebut diimplementasikan dengan:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang

sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20% dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan **“health for all”**, belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;

2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial^{III-54} untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan

pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, efisiensi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan dan publikasi dialihkan ke belanja yang mendukung pencapaian output kinerja, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);

5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pembiayaan belanja yang bersumber dari selain APBD melalui *creating shared value* (CSV) dengan Perusahaan, KPBU maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Operasi (KSO) serta pembiayaan alternatif lain sesuai dengan ketentuan perundangan;
7. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, kebijakan belanja daerah diarahkan pada :
 - a. Pemenuhan kebutuhan minimum pemerintahan (antara lain gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat *mandatory* antara lain anggaran pendidikan dan infrastruktur)
 - b. Optimalisasi penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN)
 - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- d. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Pemberian dukungan beasiswa pada kepada siswa/mahasiswa/pemuda yang memiliki prestasi sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa
 - f. Penurunan stunting
 - g. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
 - h. Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk Kota Surabaya
 - i. Pemenuhan gizi ibu hamil dan balita
 - j. Updating basis data keluarga miskin (gamis) dan pra miskin (pramis) di lingkup Kota Surabaya
 - k. Penyelenggaraan perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, dan lansia
 - l. Pembangunan rumah tidak layak huni
 - m. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
 - n. Perlindungan perempuan dan anak
 - o. Penguatan penyelenggaraan Pengurusutamaan Gender (PUG)
8. Sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat kajian dan pencetakan serta belanja perjalanan dinas;
 - b. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - c. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - e. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
9. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2022, realiasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026, maka belanja daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.10

Tabel III.10
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Tahun 2026
2	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi						
2.1.1	Belanja pegawai	2,460,367,884,874	2,540,673,580,810	2,871,477,429,285	3,764,318,412,108	3,665,203,431,595	3,790,762,823,546
2.1.2	Belanja barang dan jasa	4,892,062,090,432	4,835,931,638,916	4,768,556,407,351	5,215,155,800,507	5,381,293,198,062	4,849,102,300,855
2.1.3	Belanja Subsidi			23,212,862,862	99,880,607,558	95,728,337,093	22,880,299,696
2.1.4	Belanja hibah	327,011,169,427	404,050,361,625	432,667,414,836	338,348,048,378	338,348,048,378	338,348,048,378
2.1.5	Belanja bantuan sosial	-	78,223,729,100	4,287,200,000	6,763,200,000	1,200,000,000	3991200000
	Jumlah Belanja Operasi	7,679,441,144,733	7,858,879,310,451	8,100,201,314,334	9,424,466,068,551	9,481,773,015,128	9,005,084,672,475
2.2	Belanja Modal						
2.2.1	Belanja tanah	181,872,132,600	90,286,694,348	243,584,204,453	267,796,713,386	298,062,201,410	238,769,791,870
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	406,539,524,326	285,845,343,961	226,624,123,848	289,485,651,409	304,704,621,459	271,454,217,764
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	344,055,978,498	365,424,112,763	657,767,071,308	859,160,887,944	790,891,143,977	599,826,809,092
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	827,064,729,888	921,720,212,895	762,164,782,711	1,461,074,880,757	1,347,300,452,798	682,150,033,534
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	4,222,263,480	8,619,452,218	679,876,173	1,656,398,645	1,941,327,114	1,916,903,930
2.2.6	Belanja aset lainnya	2275837736	-	6421936175	10603115268	8995380767	7445807412
	Jumlah Belanja Modal	1,766,030,466,528	1,671,895,816,185	1,897,241,994,668	2,889,777,647,409	2,751,895,127,525	1,801,563,563,602
2.3	Belanja Tidak Terduga						
2.3.1	Belanja tidak terduga	1,702,578,492	12,815,776,299	597,526,380	37,000,000,000	117,575,573,307	37,000,000,000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1,702,578,492	12,815,776,299	597,526,380	37,000,000,000	117,575,573,307	37,000,000,000
2.4	Belanja Transfer						
2.4.1	Belanja bagi hasil	1,062,588,930	0	0	0	0	0
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Perubahan RKPD	Target
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
	Jumlah Transfer	1,062,588,930	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	Jumlah Belanja	9,448,236,778,683	9,543,590,902,935	9,998,040,835,382	12,351,743,715,960	12,351,743,715,960	10,844,148,236,077

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappedalitbang, diolah tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan berkelanjutan;
2. Optimalisasi peran BUMN, *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM;

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Surabaya diarahkan untuk penyertaan modal kepada 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama, penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Perseroda sebesar Rp.5.000.000.000,- dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp.5.000.000.000,-.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 diperoleh dari SILPA APBD Tahun 2024 sebesar Rp224.636.639.762, terjadi penyesuaian Rp234.441.444.727 berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 106/S-HP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 23 April 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2022-2026) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.11

Tabel III.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Perubahan RKPD	Target
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
3	PENERIMAAN						
3.1	Penerimaan Daerah						
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	824,424,505,647	156,690,767,646	207,963,505,945	224,636,639,762	234,441,444,727	248,647,594,590
3.1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	13,000,000	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	824,437,505,647	156,690,767,646	207,963,505,945	224,636,639,762	234,441,444,727	248,647,594,590
3.2	Pengeluaran Daerah						
3.2	Penyertaan modal	10,000,000,000	10,000,000,000	9,929,481,387	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
3.2.2	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10,000,000,000	9,929,481,387	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur, anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*; (2) *creative financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
 - a. Peningkatan kerja sama swasta dan pemerintah melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerja sama KPS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerja sama seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Transfer-Operate* (BTO), maupun bentuk lainnya maupun alternatif pembiayaan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), kerjasama dengan perusahaan dalam intervensi program dengan menawarkan value bagi Perusahaan atau dikenal dengan *Creating Shared Value* (CSV). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR maupun CSV dipandang potensial untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan yang merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Forum CSR Kota Surabaya telah dibentuk sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Pengembangan kerja sama antar daerah. Kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerja sama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung program prioritas daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerja sama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.
5. Pembiayaan lain dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, RKP Tahun 2025 serta mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis Nasional.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan dilantikannya Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode Tahun 2025 - 2030 pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sehubungan dengan hal

tersebut maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan menjadi jembatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Dengan demikian, selain memuat visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, perubahan RKPD Kota Surabaya tahun 2025 menjadi transisi yang memuat visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025-2030. Visi dan Misi yang termuat dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah ***“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”***. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode jabatan tahun 2025-2030 adalah ***“Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”***, yang kemudian dijabarkan dalam 5 misi yakni :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul & Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 terdapat penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi capaian di tahun 2024, hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025, memperhatikan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, memuat transisi visi misi kepala daerah periode jabatan 2025-2030, Astacita Presiden serta Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,1%	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,50%
			5,77%**		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,81% 5,48%*
		Indeks Gini	0,351-0,388		Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	7,95%
			0,351 – 0,380**		Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,27%
					Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33,20%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskin an	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,89-5,22%	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,90% 5,49%**
			4,5%**		Persentase tenaga kerja yang terserap	22,67% 22,89%*
		Persentase Penduduk Miskin	4,25-3,5%		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,69 0,63*
			3.90%**			
	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	84,5-85,67	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan
85,26**				Angka Harapan Hidup		76,15
				Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		2,16% 0,79%*
				Skor Pola Pangan Harapan		95,35
			Meningkatnya pengarusutamaan	Indeks Pembangunan Gender	93,77	

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	85,91 110,94*	gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak		96,11*
				Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Budaya Lokal	90,10 90,11*
					Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	73,43 119*
					Indeks Kepedulian Sosial	89,40 97,99*
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,793 0,81*	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,860
					Indeks Keciaptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,751 0,83*
					Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,745 0,78*
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,97 71,09*	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,10 57,65*
					Indeks Kualitas Udara	90,35
					Indeks Kualitas Lahan	42,75
					Indeks Persampahan	78,71 83,89*
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01 101,54*	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	90,20 (AA) 90,28**
					Opini BPK	WTP
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,82
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	96% 97,23%**
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,90 0,95*	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,89 0,942*
				Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan	Indeks Penanggulangan Bencana	0,899

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
				bencana berbasis masyarakat		0,96*

Keterangan :

*) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025

**) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan target Tahun 2025 pada Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan menjadi jembatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun dan berada pada posisi *timeline* pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bersama DPRD Kota Surabaya. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dengan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disampaikan pada tabel IV.2

Tabel IV.2
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Raperda RPJMD Tahun 2025-2029	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 – 6,1%	5,77%	5,77%	
Indeks Gini	0,351 – 0,388	0,351 – 0,380	0,351 – 0,380	
PDRB Per Kapita	-	-	274,83 juta	
Indeks Akses Keuangan Daerah	-	-	7,34	
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,50%	5,50%	-	
Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,81%	5,48%	-	
Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	7,95%	7,95%	-	
Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	5,27%	5,27%	-	
ICOR	-	-	4,77 – 4,67%	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	-	25,35% PDRB	
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	-	-	16,50%	
Rasio PDRB Industri Pengolahan	-	-	18,93%	
Rasio PDRB Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	27,78%	
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	-	-	3,66%	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Raperda RPJMD Tahun 2025-2029	Keterangan
Laju Inflasi	-	-	1,5 – 3,5%	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	60,56%	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,89 - 5,22%	4,50%	4,50%	
Persentase Penduduk Miskin	4,25 - 3,5%	3,90%	3,90%	
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,90%	5,49%	-	
Persentase tenaga kerja yang terserap	22,67%	22,89%	-	
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,69	0,63	-	
Indeks Pembangunan Manusia	84,5 - 85,67	85,26	85,26	
Indeks Pendidikan	80,14	78,82	78,82	
Angka Harapan Hidup	76,15	76,15	76,15	
Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,16%	0,79%		
Skor Pola Pangan Harapan	95,35	95,35		
Indeks Pembangunan Gender	93,77	96,11		
Indeks Daya Saing Olahraga dan Kepemudaan	-	-	0,95	
Indeks Harmoni Sosial	85,91	110,94	-	
Indeks Budaya Lokal	90,1	90,11	-	
Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	73,43	119	-	
Indeks Kepedulian Sosial	89,4	97,99	-	
Indeks Infrastruktur Kota	0,793	0,81	-	
Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,86	0,86	-	
Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,751	0,83	-	

Tujuan/Sasaran	RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Raperda RPJMD Tahun 2025-2029	Keterangan
Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,745	0,78	-	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	68,97	71,09	-	
Indeks Kualitas Air	56,1	57,65	-	
Indeks Kualitas Udara	90,35	90,35	-	
Indeks Kualitas Lahan	42,75	42,75	-	
Indeks Persampahan	78,71	83,89	-	
Indeks Reformasi Birokrasi	85,01	101,54	101,54	
Nilai SAKIP	90,2	90,28	90,28	
Opini BPK	WTP	WTP	-	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,82	4,82	4,82	
Nilai Kepuasan Masyarakat	96%	97,23%	97,23%	
Indeks Inovasi Daerah	-	-	94,5	
Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	79,38	
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	88,17%	
Indeks Pelayanan Publik	-	-	4,59	
Nilai Survey Penilaian Integritas	-	-	73,91	
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,9	0,95	-	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,89	0,942	-	
Indeks Penanggulangan Bencana	0,899	0,96	-	
Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	-	-	69,63	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	61,46	
Penurunan Emisi GRK	-	-	225.714,19 Ton CO ₂ eq	

Tujuan/Sasaran	RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Raperda RPJMD Tahun 2025-2029	Keterangan
Indeks Infrastruktur	-	-	0,66	Terdapat perbedaan perhitungan dengan Indeks Infrastruktur Kota pada Perubahan RKPD Tahun 2025
Indeks Risiko Bencana	-	-	108,77	
Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	-	-	7,31	
Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-	60,50	
Skor Peringkat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	-	-	359	
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-	0,112	
Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	81,88%	
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	80,30	
Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	57,00%	

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, strategi dan penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dan RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029.

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat;
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif;
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistim Transportasi Perkotaan Terpadu (*Integrated Transportation System*);
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025, memperhatikan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0%
3. Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 38,6
7. Nilai Tukar Petani 115 - 120
8. Nilai Tukar Nelayan 105 - 108

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2025, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



Gambar IV.1

Prioritas Nasional Tahun 2025

Sumber : Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP 2025

Prioritas nasional yang telah ditetapkan tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan 8 misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia 2045 yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada RKP Tahun 2025, target kontribusi PDRB terdiri atas Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,65%, Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%, Indeks Williamson (IW) sebesar 0,712, serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap PPDB sebesar 46,8%. Target kontribusi PDRB untuk wilayah Jawa dengan tema “Melagopolis yang Unggul, inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, yang dilaksanakan dengan target :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,10 – 5,41%
2. Tingkat Kemiskinan 7,58 – 8,08
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,9 – 4,49%
4. Indeks Modal Manusia 0,61
5. Rasio Gini 0,381 – 0,386

6. Intensitas Emisi GRK 1%

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Isu strategis RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, meliputi:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik Pendukung Pertumbuhan Wilayah;
3. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi;
6. Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana;
7. Optimalisasi Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan tema pada RKPD Provinsi Jawa Timur yakni “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan**”.

Tema dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dijabarkan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;

6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup.

Arahan pengembangan wilayah Kota Surabaya Tahun 2025 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yaitu :

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate serta jasa perusahaan) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri dan pergudangan) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jalan tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir
8. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal

9. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Surabaya
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

4.2.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan tema RKP Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan**”, serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 yaitu “**Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan**

Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis”.

Tema tersebut bermakna mendorong akselerasi ekonomi yang tidak hanya cepat dan inklusif, tetapi juga berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan posisi tawar Kota Surabaya baik pada level regional maupun global melalui intensifikasi kerjasama dengan pihak-pihak strategis yang sejalan dengan arah pembangunan. Tema yang termuat dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dinilai masih relevan dalam pelaksanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025. Fokus penguatan kapasitas Surabaya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis dibutuhkan untuk mencapai akselerasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kendati di tengah pergolakan ekonomi global dan nasional.

Sama halnya dengan tema pembangunan, Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 tetap arahkan untuk mencapai prioritas pembangunan Kota Surabaya yang telah tertuang dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial untuk mendukung peningkatan SDM dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
5. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
6. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
8. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum;
9. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Layanan Publik.

Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 diselaraskan dengan Tema Prioritas dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.



Gambar IV.2

Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2025

Penyelarasan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dengan Astacita Presiden disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya Dengan Asta Cita Presiden Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	38574 Peserta Didik	16.343 Peserta Didik	129,509,217,754	129,509,217,754	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	7,698,601,817	8,425,183,274	Dinas Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	27,850,077,380	55,700,154,760	RSUD Bhakti Dharma Husada
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	5 Paket	23,670,595,213	23,670,595,213	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	622,388,895	635,388,895	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0022	Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,487,616,000	6,487,616,000	63 Puskesmas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
							5	Penyakit Menular dan Tidak Menular					s
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	426,213,352,827	474,189,648,206	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12 Dokumen	12 Dokumen	38,400,060	38,400,060	Dinas Kesehatan
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	21,192,044,300	21,769,053,879	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	59,931,094,368	50,825,214,362	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	8 Lembaga	8 Lembaga	831,075,688	796,037,339	Dinas Sosial

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.							Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2229 Orang	680 Orang	3,791,623,304	3,791,623,304	Dinas Sosial
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	33723 Keluarga	25.901 Keluarga	26,291,553,140	20,767,452,444	Dinas Sosial
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	5,836,722,384	7,553,259,896	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	220 Perusahaan	220 Perusahaan	56,869,090	55,950,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		25650 Orang		5,171,040,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
11	disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	570129 Ton	570129 Ton	171,376,694,770	190,998,796,671	Dinas Lingkungan Hidup
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	13,500,000	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2500 Unit	2500 Unit	10,738,925,544	10,076,042,720	Dinas Perhubungan
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	12 Unit	12 Unit	16,991,017,589	16,044,601,876	Dinas Perhubungan
16	Memperkokoh	2.16	URUSAN	Terakselerasi	2.16.02	PROGRAM	2.16.02.	Pelayanan	36	36	2,001,839,01	2,016,694,652	Dinas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
	ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ya transformasi pemerintah digital di daerah		PENGELOLAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.01.001.7	Informasi Publik	Permohonan	Permohonan	8		Komunikasi dan Informatika
							2.16.02.2.01.002.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34 Media	34 Media	14,809,651,041	17,993,887,716	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.002.5	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	7 Layanan	7 Layanan	826,773,959	1,566,369,838	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.000.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2,030,629,998	2,304,051,058	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.000.6	Pengawasan Penanaman Modal	2930 Kegiatan Usaha	2930 Kegiatan Usaha	566,868,618	628,401,946	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Memperkuat pembangunan	2.19	URUSAN PEMERINT	Meningkatnya kualitas	2.19.02	PROGRAM PENGEMBA	2.19.02.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	700 Orang	700 Orang	796,715,103	816,923,598	Dinas Kebudayaan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		AHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga		NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	1	Penyelenggara n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota					n, Kepemuda an dan Olah Raga serta Pariwisata
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	750 Orang	750 Orang	52,787,142,762	52,455,798,201	Dinas Kebudayaan, Kepemuda an dan Olah Raga serta Pariwisata
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYAA N	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek	2 Objek	9,124,877,075	7,686,517,291	Dinas Kebudayaan, Kepemuda an dan Olah Raga serta Pariwisata
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	200 Perpustak aan	200 Perpustak aan	275,643,600	275,643,600	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.												
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	66 Laporan	244,744,279	250,154,482	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	315,574,969	336,308,351	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	207,017,600	129,167,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	198,600,000	131,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	4,629,592,678	4,906,556,584	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	821,790,231	661,106,672	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	375,277,657	315,860,310	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Asta Cita Presiden mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait sasaran siswa penerima Program MBG baik pada jenjang PAUD, SD dan SMP. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pelaksanaan MBG sampai dengan 5 Mei 2025, telah diberikan kepada 26.240 siswa dari total 59 Satuan Pendidikan dari jenjang TK/KB, SD/MI, SMP/MTs, SMA /SMK di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya mendukung pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, akan

dilakukan percepatan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga pada tahun 2025 akan terbentuk Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menjalankan program yang mendukung perkoperasian agar menjadi koperasi sehat, meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengembangan ekonomi kreatif juga dilakukan dengan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di seluruh kecamatan dan pemanfaatan eks Hi-tech Mall untuk penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif terdiri dari program pencegahan dan penanganan perkawinan anak (deklarasi stop perkawinan anak, kelas pranikah dan kelas calon pengantin, Duta Genre di tingkat Kecamatan dan Kelurahan), Program Sekolah Orang Tua Hebat, layanan PUSPAGA, pelayanan KB (pelayanan sejuta akseptor, pembinaan 153 Kampung KB, fasilitas ruang laktasi, Kampung ASI, konsumsi tablet penambah darah), program padat karya, pemberdayaan UMKM melalui e-peken, pemberian bantuan sosial, penyediaan rumah sehat, bantuan untuk warga disabilitas, Kader Surabaya Hebat, penyediaan akses air minum. Sedangkan intervensi spesifik ditujukan secara khusus kepada calon pengantin, ibu hamil dan balita, melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendampingan, serta pemberian nutrisi.

Tabel IV.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan		Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kebudayaan & Lingkungan Hidup				(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten/Kota			
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
							dan Tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Perdagangan	Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					(STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Menengah dan Perdagangan	Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
					Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
							Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGELOLAAN	Penyediaan Informasi	Fasilitasi Pengumpulan,	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dan Tenaga Kerja	dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				INDUSTRI	Industri Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Industri		
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pembinaan dan	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Gedung melalui SIMBG		
						Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM	Pengelolaan	Operasi dan	Dinas Sumber	Dinas Sumber

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Daya Air dan Bina Marga	Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM	Urusan	Koordinasi dan	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTr) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
							serta Pertanahan	serta Pertanahan
						Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultansi	Pelaksanaan	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	dan Kesehatan	yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kesejahteraan Keluarga	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balongsari	Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pegirian	Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Berencana	Berencana
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Standar Nasional Perpustakaan		
						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pendukungnya		
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
						Operasional	Instalasi	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Farmasi Kesehatan	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Gayungan	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Keputih	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Moro krembangan	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mulyorejo	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Ngagel rejo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sememi	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tenggilis	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Puskesmas	Dukuh Kupang	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Puskesmas	Kedungdoro	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Puskesmas	Menur	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Puskesmas	Rangkah	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Operasional	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Puskesmas	Tanah Kali Kedinding	Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tembok Duku	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Pelayanan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Gayungan	Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Menular dan Tidak Menular		
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Menular		
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pelayanan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidosermo	Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Menular dan Tidak Menular		
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Balita		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kalijudan	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas Krembangan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Gizi Masyarakat	Selatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Masyarakat		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tambakrejo	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Ibu Bersalin		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Gading	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kenjeran	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Moro Krembangan	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sawah Pulo	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tembok Dukuh	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Lingkungan		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Keputih	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Lingkungan		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Lingkungan		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Wiyung	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Asemrowo	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Terduga Tuberkulosis		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pacar Keling	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Terduga Tuberkulosis		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Gading	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pendidikan Dasar		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Moro krembangan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Ngagel rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sememi	Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tanah Kali	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kedinding	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Hipertensi		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Surveilans Kesehatan	Bulak Banteng	Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Surveilans Kesehatan	Kalirungkut	Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Surveilans Kesehatan	Manukan Kulon	Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Surveilans Kesehatan	Pucangsewu	Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan	Puskesmas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Surveilans Kesehatan	Tambakrejo	Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
						Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					aan			
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana,	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Prasarana dan Utilitas Sekolah		
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan	Pembinaan	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pendidikan	Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Nonformal/Kesetaraan		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
							Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Administrasi	Penyediaan Gaji dan	RSUD dr.	RSUD dr.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan ASN	Mohamad Soewandhie	Mohamad Soewandhie
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN	Penyediaan Layanan bagi	Koordinasi Pelaksanaan	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				KHUSUS ANAK	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan AMPK	n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Kewenangan Kabupaten/Kota		Berencana	Berencana
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan,	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	keunggulan ekonomi						
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas	Pengentasan	Pengentasan	Meningkatnya	PROGRAM	Pengelolaan	Fasilitasi Bantuan	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				PROGRAM	Penyediaan	Pembangunan	Dinas	Dinas

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan	Perhubungan
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten/Kota			
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	serta Pertanahan	serta Pertanahan
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
						Penting Terkait Pencatatan Sipil		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Sipil	Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Daerah Kabupaten/Kota			
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2.3. Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

Pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel IV.5 di bawah ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2025
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,50%
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3,81%
				5,48%*
			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	7,95%
			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,27%
			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	33,20%
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	6,90%
				5,49%*
			Persentase tenaga kerja yang terserap	22,67%
				22,89%*
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religious, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	80,14
				78,82**
			Angka Harapan Hidup	76,15
			Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	2,16%
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak		0,79%*
			Skor Pola Pangan Harapan	95,35
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,77
				96,11*
	Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter	Indeks Budaya Lokal	90,10
				90,11*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2025
		berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	73,43
				119*
			Indeks Kepedulian Sosial	89,40
				97,99*
Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi Masyarakat	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,860
			Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,751
				0,83*
			Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,745
				0,78*
	Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,10
				57,65*
			Indeks Kualitas Udara	90,35
			Indeks Kualitas Lahan	42,75
			Indeks Persampahan	78,71
				83,89*
Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	90,20 (AA)
				90,28*
			Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,82
			Nilai Kepuasan Masyarakat	96%
				97,23%**
Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban kota	0,89
				0,942*
		Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,899
				0,96*

Keterangan :

*) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025

**) Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan target Tahun 2025 pada Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ

tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga mengakibatkan adanya perubahan terhadap kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta upaya pencapaian target tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, diperlukan penjadwalan serta penyesuaian target indikator pada target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.6
Perubahan Target Tujuan PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator	Target		Keterangan	Perangkat Daerah
		Semula	Menjadi		
1	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	82.96%	88.4%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Indeks Pertanahan	0.089	0.018	Penyesuaian prioritas pengadaan tanah untuk pembangunan non infrastruktur	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel IV.7
Perubahan Target Sasaran PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator	Target		Keterangan	Perangkat Daerah
		Semula	Menjadi		
1	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.69	93.27	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Nilai Investasi daerah	54 Triliyun rupiah	42,69 triliyun rupiah	Perhitungan Nilai Investasi Daerah menggunakan nilai realisasi investasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan memperhatikan : a. Analisa berdasarkan proyeksi investasi di Kota Surabaya dan perkembangannya berdasarkan peningkatan nilai investasi daerah; b. Analisa berdasarkan target	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Target		Keterangan	Perangkat Daerah
		Semula	Menjadi		
				investasi nasional; dan c. Analisa berdasarkan saran dan masukan tenaga ahli/narasumber/akademisi	
3	Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat	80%	94%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan	85%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel IV.8
Perubahan Target Progam PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Indikator	Target		Keterangan	Perangkat Daerah
		Semula	Menjadi		
1	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	43%	100%	Adanya komitmen dan dukungan lintas sektor untuk berperan aktif dalam program UPPKA sehingga dapat meningkatkan pendapatan seluruh peserta UPPKA	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	54.207,76 M2	4.825 M2	Penyesuaian prioritas pengadaan tanah untuk pembangunan non infrastruktur	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Persentase SD terakreditasi minimal B	94.59%	92.24%	Penyesuaian jumlah seluruh SD di Kota Surabaya yang mempunyai izin operasional di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
4	Persentase SMP terakreditasi minimal B	97.12%	96.12%	Penyesuaian jumlah seluruh SMP di Kota Surabaya yang mempunyai izin operasional di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
5	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	81,60%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	66,43%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup

7	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase pengangkutan sampah ke TPA $\leq$ 1 hari	88,39%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	61,81%	100%	Penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel IV.9
Perubahan Target Kegiatan PD Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	53 kegiatan	28 kegiatan	Penyesuaian jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	Penyesuaian jenis dokumen PPRG berdasarkan materi dari Provinsi Jawa Timur yang disampaikan saat Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2025 yang semula PPRG terdiri dari Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan kerangka acuan kerja kegiatan (KAK) menjadi GAP dan GBS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	70 kasus	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima di UPT PPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	200 kasus	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima di UPT PPA	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	70 Dokumen	63 Dokumen	Penyesuaian target sesuai dengan jumlah laporan akreditasi puskesmas	Dinas Kesehatan
6	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	153 Kelurahan	Penyesuaian target sesuai dengan jumlah Kelurahan di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
7	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten / Kota	6 jenis	5 jenis	Penyesuaian jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan sesuai dengan kebutuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perakpita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 jenis	2 jenis	Penyesuaian jenis kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang tidak jadi mengadakan Lomba cipta menu olahan ikan dan lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman/B2SA di tahun 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
9	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	470 kali	420 kali	Penyesuaian pelaksanaan tampilan budaya daerah sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 lembaga	12 lembaga	Penyesuaian jumlah Kodim sebagai tindak lanjut surat dari Komando Daerah Militer V/Brawijaya Nomor : B/11/I/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	367 orang	852 orang	Penyesuaian anggota PSKS kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	Dinas Sosial
12	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	130 kelurahan	Penambahan jangkauan pelayanan sistem air limbah yang dilakukan pemeliharaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi	50 lokasi	Pembangunan drainase diprioritaskan pada penuntasan genangan di kawasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	82 dokumen	Penyesuaian jumlah dokumen perencanaan penanganan genangan yang dibutuhkan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	325 lokasi	200 lokasi	Penyesuaian prioritas pekerjaan jalan yang dilaksanakan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
16	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi	3 lokasi	Penambahan jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
17	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.501 lokasi	2.500 lokasi	Penambahan jumlah lokasi pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
18	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantaun lingkungannya	254 obyek	432 obyek	Penyesuaian jumlah obyek IPAL komunal warga dan IPAL milik Pemerintah Kota Surabaya yang dipantau	Dinas Lingkungan Hidup
19	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan/layanan baca yang dibina	230 lembaga	1.482 lembaga	Penyesuaian jumlah seluruh perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus di Kota Surabaya yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji kir	134.525 unit	120.000 unit	Penyesuaian dikarenakan : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, maka Pemilik Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Grabcar /Gocar) Tidak Diwajibkan Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor 2. Adanya kendaraan yang melakukan Mutasi dan Numpang Uji Keluar	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah implementasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	10 lokasi	3 lokasi	Penyesuaian prioritas lokasi implementasi kajian manajemen rekayasa lalu lintas dan pengadaan perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan
22	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 koridor	14 koridor	Penyesuaian jumlah koridor eksisting yang meliputi koridor Suroboyo Bus, Bus Sekolah, Feeder Wira Wiri dan Trans Semanggi	Dinas Perhubungan
23	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	95.000 berkas	110.000 berkas	Penyesuaian proyeksi berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang diterbitkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah berkas pencairan dana secara elektronik dan penatausahaan surat keterangan pemberhentian pembayaran yang dilayani	99.464 berkas	101.964 berkas	Penyesuaian jumlah berkas yang dilayani sesuai dengan jumlah ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 lembaga	13 lembaga	Penyesuaian dengan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Paket	10 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Bulak
27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan	33 Orang	46 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per	Kec. Bulak

No	Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			RT	
28	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	371 Lembaga	Penyesuaian dengan jumlah Lembaga kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian
29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	11 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Sambikerep
30	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	262 Lembaga	Penambahan jumlah lembaga kemasyarakatan sesuai dengan jumlah RT	Kec. Sambikerep
31	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	460 lembaga	304 lembaga	Penyesuaian jumlah lembaga potensi usaha yang difasilitasi	Kec. Bubutan

Tabel IV.10
Perubahan Target Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	50 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang tersedia	38 unit	10 unit	Penyesuaian alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2025 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-116/PK/2024	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	20 orang	70 orang	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima di UPT PPA	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	20 layanan	70 layanan	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima di UPT PPA	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	50 orang	184 orang	Penyesuaian jumlah satgas PPA dan satgas PKBM yang menjadi sasaran kegiatan	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 orang	200 orang	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima	Dinas Pembedayaan Perempuan dan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				di UPT PPA	Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 layanan	200 layanan	Penyesuaian jumlah aduan yang diterima di UPT PPA	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	50 orang	184 orang	Penyesuaian jumlah satgas PPA dan satgas PKBM yang menjadi sasaran kegiatan	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R) Bina KELUARAG lansia (BKL), Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R) Bina KELUARAG lansia (BKL), Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dibentuk	56 kelompok	306 kelompok	Penyesuaian target kelompok yang terbentuk di setiap kelurahan	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 orang	57 orang	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Komunikasi dan Informasi
11	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 unit	16 unit	Penyesuaian jenis alat kesehatan/alat penunjang medik yang disediakan	RSUD Bhakti Dharma Husada
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 orang/bulan	476 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	RSUD Eka Candrarini

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
13	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	149 unit	Penyesuaian jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang disediakan	RSUD Eka Candrarini
14	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket	5 paket	Penyesuaian jumlah paket Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	RSUD Eka Candrarini
15	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	8 unit	Penyesuaian jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang disediakan	RSUD dr. M. Soewandie
16	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	2 Unit	Penambahan pembangunan puskesmas	Dinas Kesehatan
17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	6 Unit	Penyesuaian prioritas gedung puskesmas yang dilakukan pemeliharaan/rehab	Dinas Kesehatan
18	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	5 Paket	Penyesuaian jumlah paket Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan	Dinas Kesehatan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di 63 puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43.532 Orang	37.024 orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk	Dinas Kesehatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					Tahun 2025	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.187 Orang	36.818 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.401 Orang	35.849 orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152.252 Orang	183.292 balita	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di 63 puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 5706 Orang	333.317 Orang	391.296 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.034.759 Orang	1.926.441 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai	Dinas Kesehatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337.268 Orang	395.999 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749.560 Orang	246.179 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104.362 Orang	111.477 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52.741 Orang	49.962 Orang	Penyesuaian proyeksi target sasaran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025	Dinas Kesehatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 orang/bulan	96 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
30	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	60 dokumen	160 dokumen	Penyesuaian target sesuai dengan tanda daftar gudang yang diterbitkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang bulan	72 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
32	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	2 laporan	Penyesuaian jumlah laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang tidak jadi mengadakan Lomba cipta menu olahan ikan dan lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman/B2SA di tahun 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/bulan	81 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 unit	88 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan operasional yang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					dipelihara	Pertanahan
35	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	8 dokumen	Penambahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
36	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 laporan	8 laporan	Penyesuaian jadwal kegiatan peningkatan SDM yang diselenggarakan oleh ASDEKSI	Sekretariat DPRD
37	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.470 orang	2.346 orang	Penyesuaian jumlah penghuni Liponsos Keputih, UPTD Griya Wreda, Kampung Anak Negeri dan Babat Jerawat yang diberikan permakanan	Dinas Sosial
38	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	376 orang	Penyesuaian jumlah penghuni UPTD Kampung Anak Negeri, Kalijudan, dan Asrama Bibit Unggul	Dinas Sosial
39	Peningkatan Kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	590 orang	545 orang	Penyesuaian jumlah anggota PSKS perorangan yang dibina	Dinas Sosial
40	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	1700 orang	Penyesuaian jumlah penghuni Liponsos Keputih	Dinas Sosial
41	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	92.892 orang	70.312 orang	Penyesuaian jumlah keluarga miskin	Dinas Sosial

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Kabupaten/Kota	Didata			sesuai dengan hasil Musyawarah Kelurahan Data Keluarga Miskin sampai dengan Maret 2025	
42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33.723 keluarga	25.901 keluarga	Penyesuaian jumlah keluarga miskin yang yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Dinas Sosial
43	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33.723 keluarga	25.901 keluarga	Penyesuaian jumlah keluarga miskin yang yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat	Dinas Sosial
44	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.229 orang	680 orang	Penyesuaian penerima bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT	Dinas Sosial
45	Penyediaan sub sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	50 rumah tangga	1.250 rumah tangga	Penambahan jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
46	Pembangunan sistem drainase lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	10.000 M	7.500 M	Pembangunan drainase diprioritaskan pada penuntasan genangan di kawasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
47	Pembinaan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibina secara teknis	15 sistem drainase perkotaan	10 sistem drainase perkotaan	Pembangunan drainase diprioritaskan pada penuntasan genangan di kawasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
48	Rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi	15 sistem drainase perkotaan	10 sistem drainase perkotaan	Rehabilitasi drainase diprioritaskan pada penuntasan genangan di kawasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
49	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	15 sistem drainase perkotaan	10 sistem drainase perkotaan	Pembangunan drainase diprioritaskan pada penuntasan genangan di kawasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
50	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	50 dokumen	52 dokumen	Disesuaikan dengan jumlah dokumen perencanaan penanganan genangan yang dibutuhkan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
51	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	40 km	110 km	Penambahan panjang jalan yang dipelihara	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
52	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	9 dokumen	Penambahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
53	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28 paket	15 paket	Penyesuaian jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
54	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5.502 dokumen	7.660 dokumen	Penyesuaian jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
55	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	16 unit	11 unit	Penyesuaian prioritas sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 orang bulan	69 orang bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
57	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	66 laporan	67 laporan	Penambahan Perangkat Daerah yang diawasi arsip dinamisnya yaitu RSUD Eka Candrarini	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
58	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	30 perpustakaan	1.058 perpustakaan	Penyesuaian jumlah seluruh perpustakaan sekolah di Kota Surabaya yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
59	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	200 perpustakaan	424 perpustakaan	Penyesuaian jumlah seluruh perpustakaan umum dan khusus di Kota Surabaya yang dibina	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 paket	13 paket	Penyesuaian jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	Badan Penanggulangan Bencana

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
61	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	258 orang bulan	242 orang bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Perhubungan
62	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 paket	13 paket	Penyesuaian jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	Dinas Perhubungan
63	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	102.252 unit	117.344 unit	Penyesuaian jumlah prasarana jalan (PJU) yang dipasang	Dinas Perhubungan
64	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	13 laporan	5 laporan	Penyesuaian prioritas kebutuhan laporan pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dinas Perhubungan
65	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 unit	167 unit	Penyesuaian jumlah unit Suroboyo Bus, Bus Sekolah, Feeder Wira Wiri dan Trans Semanggi	Dinas Perhubungan
66	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	10 dokumen	4 dokumen	Penyesuaian prioritas kebutuhan dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Dinas Perhubungan
67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang/bulan	39 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
68	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	875 unit	805 unit	Penyesuaian prioritas sarana dan prasarana yang diadakan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
69	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	99.464 berkas	101.964 berkas	Penyesuaian jumlah berkas yang dilayani sesuai dengan jumlah ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
70	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2.380 unit	1.182 unit	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas operasional yang telah dilelang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
71	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	10 dokumen	Penyesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Pendidikan
72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.929 orang bulan	8.451 orang bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Pendidikan
73	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1.029 unit	432 unit	Penyesuaian prioritas sarana dan prasarana kantor yang diadakan	Dinas Pendidikan
74	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85.997 peserta didik	32.802 peserta didik	Menyesuaikan data gamis / pramis per bulan Mei 2025	Dinas Pendidikan
75	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	73.986 peserta didik	69.270 peserta didik	Penyesuaian jumlah kompetisi/lomba yang diadakan secara berjenjang hingga tingkat nasional	Dinas Pendidikan
76	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	587 satuan pendidikan	593 satuan pendidikan	Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor	Dinas Pendidikan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Peenerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Anggaran 2025	
77	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	38.574 peserta didik	16.343 peserta didik	Menyesuaikan data gamis / pramis per bulan Mei 2025	Dinas Pendidikan
78	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	330 satuan pendidikan	34.706 satuan pendidikan	Disesuaikan dengan pemutakhiran di SIPD RI	Dinas Pendidikan
79	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	2.479 satuan pendidikan	2.245 satuan pendidikan	Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Peenerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan	Dinas Pendidikan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Anggaran 2025	
80	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	2.812 peserta didik	86 peserta didik	Disesuaikan dengan pemutakhiran di SIPD RI	Dinas Pendidikan
81	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	293 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	Disesuaikan dengan jumlah PKBM dan SKB yang memiliki izin operasional dan menjadi sasaran kegiatan	Dinas Pendidikan
82	Pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	27 satuan pendidikan	25 satuan pendidikan	Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Peenerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana	Dinas Pendidikan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Anggaran 2025	
83	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 orang/bulan	171 orang/bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
84	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 dokumen	13 dokumen	Penyesuaian dengan jumlah instansi yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
85	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	9 dokumen	Penambahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
86	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	9 dokumen	Penambahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
87	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Tandes
88	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	55 Orang	124 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Tandes

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
		Nasional				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	20 Paket	Penyesuaian jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	Kec. Pakal
89	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Pakal
90	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	120 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Pakal
91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	8 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Pakal
92	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	6 unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Pakal
93	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	10 Paket	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak
94	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	46 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Bulak
95	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	9 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
96	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	10 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak
97	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak
98	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	9 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak
99	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	3 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bulak
100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	14 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Simokerto
101	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Simokerto
102	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Lembaga	50 Lembaga	Penyesuaian dengan jumlah Lembaga kemasyarakatan	Kec. Pabean Cantian
103	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang Bulan	47 Orang Bulan	Menyesuaikan Jumlah ASN	Kec. Bubutan
104	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	15 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Bubutan
105	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Bubutan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
106	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	20 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Bubutan
107	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
108	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
110	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
111	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
112	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
114	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah	Kec. Bubutan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
					Kelurahan	
115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
116	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Bubutan
117	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	6 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Jambangan
118	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	3 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Jambangan
119	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	36 Dokumen	Penyesuaian jumlah dokumen perijinan non usaha yang dilayani	Kec. Jambangan
120	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	40 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Jambangan
121	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	2 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Jambangan
122	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	9 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Jambangan
123	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah	Kec. Jambangan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
124	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
125	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
126	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
127	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
128	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
129	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Dukuh Pakis
130	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Sukomanunggal
131	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Sukomanunggal
132	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
133	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit	5 Unit	Penyesuaian	Kec.

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Sukomanunggal
134	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	4 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sukomanunggal
135	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	90 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Lakarsantri
136	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	8 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Lakarsantri
137	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	13 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Lakarsantri
138	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	10 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Karangpilang
139	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Karangpilang
140	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	9 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Karangpilang
141	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	187 Orang	50 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan	Kec. Karangpilang

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			peserta per RT	
142	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	11 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Genteng
143	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	8 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Genteng
144	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Genteng
145	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Genteng
146	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Genteng
147	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Genteng
148	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	7 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Wonokromo
149	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Wonokromo
150	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wonokromo
151	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	3 Pokmas	2 Pokmas	Penyesuaian	Kec. Wonokromo

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	
152	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wonokromo
153	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wonokromo
154	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wonokromo
155	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	2 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wonokromo
156	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	60 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Wonokromo
157	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	11 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Wonocolo
158	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	7 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Wonocolo
159	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	10 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Sawahan
160	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan	Kec. Sawahan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			prasarana kantor yang dipelihara	
161	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sawahan
162	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sawahan
163	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sawahan
164	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sawahan
165	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sawahan
166	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	7 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Benowo
167	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	6 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Benowo
168	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	188 laporan	198 laporan	Penyesuaian jumlah laporan sesuai dengan jumlah RT/RW	Kec. Benowo
169	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Krembangan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Krembangan
170	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Krembangan
171	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Krembangan
172	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Krembangan
173	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	5 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Krembangan
174	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	14 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Krembangan
175	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	7 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Sukolilo
176	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	4 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tambaksari
177	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tambaksari
178	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	3 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara	Kec. Tambaksari

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Kelurahan				Musyawarah Kelurahan	
179	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tambaksari
180	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tambaksari
181	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tambaksari
182	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	312 Orang	Penyesuaian jumlah peserta sosialisasi wasbang sesuai dengan perwakilan peserta per RT	Kec. Tambaksari
183	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang Bulan	42 Orang Bulan	Penyesuaian jumlah ASN	Kec. Sambikerep
184	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	11 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Sambikerep
185	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	5 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Sambikerep
186	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	12 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sambikerep
187	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sambikerep

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
188	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	13 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sambikerep
189	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	16 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Sambikerep
190	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	144 Dokumen	Penyesuaian jumlah dokumen perijinan non usaha yang dilayani	Kec. Sambikerep
191	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	1 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Rungkut
192	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	25 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Gunung Anyar
193	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Gunung Anyar
194	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	14 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Tenggilis Mejoyo
195	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	4 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Tenggilis Mejoyo
196	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 laporan	70 laporan	Penyesuaian jumlah potensi usaha yang difasilitasi	Kec. Tenggilis Mejoyo
197	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Wiyung

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
198	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	5 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wiyung
199	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	2 Pokmas	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Wiyung
200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Gubeng
201	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	6 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kec. Gubeng
202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Gayungan
203	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Gayungan
204	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Gayungan
205	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	5 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Gayungan
206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	10 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Gayungan
207	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	4 Unit	Penyesuaian jenis sarana dan prasarana kantor	Kec. Gayungan

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			yang dipelihara	
208	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	11 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Kenjeran
209	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Kenjeran
210	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	12 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tegalsari
211	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	17 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tegalsari
212	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	12 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tegalsari
213	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	8 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Tegalsari
214	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	13 Paket	Penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah	Kec. Mulyorejo
215	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo
216	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo

No	Sub Kegiatan	Indikator	Semula	Menjadi	Keterangan	Perangkat Daerah
217	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo
218	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo
219	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo
220	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	Penyesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan	Kec. Mulyorejo

4.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 tidak ada perubahan. RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 diarahkan untuk menyelesaikan pokok-pok pikiran DPRD yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

4.2.5. Pembangunan Pengarusutamaan Gender

Berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Musrenbang Perempuan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.

Berdasarkan aspirasi perempuan yang diterima dalam Musrenbang Perempuan, terdapat beberapa saran dan masukan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan perempuan akan akses pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi serta harapan perempuan untuk dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara, berkiprah dan berkreasi dalam berbagai aspek pembangunan. Disamping itu, terdapat aspirasi untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan untuk setiap perempuan, termasuk perempuan disabilitas, agar mendapatkan kesempatan dalam Pembangunan kota. Lebih lanjut, terdapat masukan untuk memastikan hak-hak perempuan dihormati serta terdapat pusat pengembangan keterampilan bagi perempuan agar dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Aspirasi ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan perempuan mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, yang menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Masukan yang diterima dalam musrenbang perempuan kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025. Usulan terhadap Optimalisasi Satgas PPA dan PKBM sebagai relawan sahabat perempuan dan anak bersama Tim KRPPA Kelurahan dan Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait termasuk unsur Pentahelix dan lainnya untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak mendukung Kota Surabaya sebagai DRPLA (Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak) diakomodir dalam sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Usulan terhadap program prioritas Pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan untuk mendapatkan akses dalam bidang Pendidikan yang lebih tinggi untuk mewujudkan kesetaraan Gender yang inklusif diakomodir dalam sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan pengampu Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan BAZNAS. Usulan terhadap pemberian Pola Asuh yang baik dalam keluarga, mencegah terjadinya Kasus kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurunkan pekerja anak dan perkawinan anak bersama stake holder terkait termasuk pemerintah dan unsur lainnya diakomodir dalam sub kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Usulan terhadap Perempuan mampu mandiri secara Sosial dan Ekonomi dalam membantu Peningkatan Pendapatan Perempuan untuk Keluarga dan berpartisipasi dalam pembangunan Responsif Gender kota Surabaya diakomodir dalam sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) dengan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta diakomodir dalam subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota dengan pengampu Dinas Koperasi dan Perdagangan serta berkolaborasi dengan BAZNAS, Bangsa Surabaya Peduli (BSP), perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) serta memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pemberian modal usaha bagi pengusaha, pedagang dan pemilik toko kelontong perempuan.

4.2.6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menjaga mutu pelayanan dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM), Pemerintah

Kota Surabaya menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM. Rencana aksi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi penerapan SPM. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, rencana aksi penerapan SPM berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025. Target pencapaian SPM pelayanan dasar Kota Surabaya disampaikan pada Tabel IV.11 di bawah ini.

Tabel IV.11
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
BIDANG PENDIDIKAN					
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	91.826	92.744	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Angka partisipasi sekolah	0/	100	100	Dinas Pendidikan
	2. Angka partisipasi murni	0/	66,26	64,50	Dinas Pendidikan
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	0/	49,53	18,88	Dinas Pendidikan
	4 . Prpororsi guru PAUD dengan kualifikasi sarjana (S1)/ Dimploma empat (D-IV)	0/	83,78	80,16	Dinas Pendidikan
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0/	0,42	0,3	Dinas Pendidikan
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	0/	100	100	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks distribusi guru	0/	100	100	Dinas Pendidikan
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	0/	31,24	25,92	Dinas Pendidikan
	9. Proporsi PTK penggerak	0/ %	5,14	0,59	Dinas Pendidikan
2 .	Pendidikan Dasar				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	444.55	448.99 6	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	SD				
	1 . Angka partisipasi kasar	0/ %	104,24	103,5	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	88,29	84,77	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	77,12	66,29	Dinas Pendidikan
	5 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3,87	3,41	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1,81	0,90	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74,7	73,72	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75,32	72,59	Dinas Pendidikan
9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,46	57,50	Dinas Pendidikan	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	
			2024	2025		
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	82,41	53,16	Dinas Pendidikan	
	11 . Indeks distribusi guru		85,79	62,87	Dinas Pendidikan	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	0/	52,72	23,86	Dinas Pendidikan	
	13 . Proporsi PTK penggerak	0/ %	8,97	0,32	Dinas Pendidikan	
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	0/ %	105,79	99,03	Dinas Pendidikan	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	91,23	87,94	Dinas Pendidikan	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	88,29	69,93	Dinas Pendidikan	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5,51	4,05	Dinas Pendidikan	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,37	0,64	Dinas Pendidikan	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74,48	73,39	Dinas Pendidikan	
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,92	70,61	Dinas Pendidikan	
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,24	60,50	Dinas Pendidikan	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN		84,43	72,51	Dinas Pendidikan	
	11 . Indeks distribusi guru	0/	87,08	80,92	Dinas Pendidikan	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	0/	52,24	32,42	Dinas Pendidikan	
	13 . Proporsi PTK penggerak	0/ %	10,93	0,54	Dinas Pendidikan	
	3 .	Pendidikan Kesetaraan				
		PENERIMA LAYANAN DASAR				
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	4.74	4.865	Dinas Pendidikan
		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
		1 . Angka partisipasi kasar	0/ %	100	100	Dinas Pendidikan
		2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
		3 . Kemampuan literasi	Nilai	62,87	52,92	Dinas Pendidikan
		4 . Kemampuan numerasi	Nilai	58,57	43,58	Dinas Pendidikan
5 . Perbedaan skor literasi		Nilai	9,2	3,93	Dinas Pendidikan	
6 . Perbedaan skor numerasi		Nilai	6,34	2,81	Dinas Pendidikan	
7 . Indeks iklim keamanan		Nilai	64,03	64,05	Dinas Pendidikan	
8 . Indeks iklim kebinekaan		Nilai	60,95	60,06	Dinas Pendidikan	
9. Indeks iklim inklusivitas		Nilai	54,02	54,00	Dinas Pendidikan	
10 . Kecukupan formasi guru ASN			Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan	
11 . Indeks distribusi guru		0/	100	100	Dinas Pendidikan	
12 . Proporsi PTK bersertifikat		0/	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan	
13 . Proporsi PTK penggerak		0/ %	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan	
BIDANG KESEHATAN						
1		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	PENERIMA LAYANAN DASAR					
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan	
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	29.916	29.619	Dinas Kesehatan	
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	6.731. 100	6.664. 320	Dinas Kesehatan	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	Kehamilan				
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	5.609	5.554	Dinas Kesehatan
	7. Alat deteksi resiko Ibuy Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis	Paket	37.395	37.024	Dinass Kesehatan
	B dan Sifilis dan HIV				
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Buku	63	63	Dias Kesehatan
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi penmgadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	2.493	2.468	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga Medis Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1: 2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1: 16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3.611	3.611	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	15. Tenaga Kesehatan: Tenaga Keafarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	16. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Formulir Partograf	Formulir	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3.611	3.611	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	6 Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan: Tenaga Keafirmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	108.624	107.547	Dinas Kesehatan
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	3.619	3.619	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehaatan
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	84	84	Dinas Kesehatan
	13. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	14. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Haras Dilayani :	Orang	152.2552	148.716	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokume n	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kesahatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	17.49	17.288	Dinas Kesehatan
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.069	11.95	Dinas Kesehatan
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Orang	5.973	5.763	Dinas Kesehatan
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -	Vaksin	10.295	8.959	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	Hib				
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak- Rubella	Vaksin	10.295	8.959	Dinas Kesehatan
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	840	840	Dinas Kesehatan
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	15. Formula Terapi Gizi Burak	Paket	63	63	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	20 . Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
	21 . Guru PAUD	Orang	11.595	11.595	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	396.10 2	391.29 6	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	396.10 2	391.29 6	Dinas Kesehatan
	2 . Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	65	65	Dinas Kesehatan
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokume n	396.10 2	391.29 6	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokume n	756	756	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	Dinas Kesehatan
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	6.814. 288	6.795. 048	Dinas Kesehatan
	7. Alat pemeriksaan Hb	Alat	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.92	21.756	Dinas Kesehatan
	9. Media promosi kesehatan	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	10.473	10.217	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	4.471	4.471	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	14. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	15. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	16 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor				
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	25.764	25.764	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.923.364	1.926.441	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				Dinas Kesehatan
	1 . Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	315	315	Dinas Kesehatan
	2. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	4 . Alat : Glukometer	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	2.654.500	2.654.500	Dinas Kesehatan
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1.923.364	1.926.441	Dinas Kesehatan
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis /PPOK)	Dokumen	63	63	Dinas Kesehatan
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	130	130	Dinas Kesehatan
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	c. Vasectomi Set	Unit	4	4	Dinas Kesehatan
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	Dinas Kesehatan
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	4674	4628	Dinas Kesehatan
	14 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	18 . Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	19 . Tenaga kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	378.637	395.999	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				Dinas Kesehatan
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	63	63	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	378.63 7	395.99 9	Dinas Kesehatan
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	378.63 7	395.99 9	Dinas Kesehatan
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	260	260	Dinas Kesehatan
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	12. Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
e	13 . Kader kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	727.43 2	185.79 5	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	126	126	Dinas Kesehatan
	2. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	63	63	Dinas Kesehatan
	4 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	84	84	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	12 . Obat Hipertensi	Paket	727.43 2	185.79 5	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	101.97 9	51.094	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Fotometger atau Glukometer	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	2. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.654. 500	2.654. 500	Ddinas Kesehatan
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Orang	63	63	Dinas Kesehatan
	4 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoma n	189	189	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	101.97 9	51.094	Dinas Kesehatan
	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
PENERIMA LAYANAN DASAR					
• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5.552	5.57	Dinas Kesehatan	
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					
1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	63	Dinas Kesehatan	
2. Penyediaan Psikofamaka (pengobatan atau medikasi)	Jenus	63	63	Dinas Kesehatan	
3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	63	63	Dinas Kesehatan	
4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Orang	756	756	Dinas Kesehatan	
5 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan	
6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.42	3.42	Dinas Kesehatan	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	189	189	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga lain yang terlatih dibidang kesehatan jiwa	Orang	63	63	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Profesional Lainnya	Orang	63	63	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan
	2 . Reagen Zn TB	Paket	1.57	1.335	Dinas Kesehatan
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	Paket	157.00 4	133.47 8	Dinas Kesehatan
	Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering				
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokume n	756	756	Dinas Kesehatan
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokume n	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Tuberkulin	Vial	280	280	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	3.491	3.491	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
12	11. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	14. Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang	480	480	Dinas Kesehatan
	15. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	49.485	49.114	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan
	2 . Tes cepat HIV /Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Paket	48.485	49.114	Dinas Kesehatan
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	49.485	49.114	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	49.485	49.114	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.537	3.537	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	3.017. 382	2.992. 285	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambun gan Rumah/ SR	577.83 2	577.83 2	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambun gan Rumah/ SR	577.83 2	577.83 2	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	3 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	-	-	-
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	-	-	-

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Jiwa	20.44	60	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	577.83 2	577.83 2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-	-
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	5.11	10.05	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi	Rumah	0	0	Dinas Perumahan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	korban bencana				Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	243	120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	201	90	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	Rumah	68	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	68	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	65	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	KATEGORI TRANTIBUM				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	1280	1400	Satuan Polisi Pamong Praja
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan	unit	423	430	Satuan Polisi Pamong Praja
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan	Dokume n	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)				
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	978	1275	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Do kumen	1	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
KATEGORI DAMKAR					
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokume n	10	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil	unit	845	875	Dinas Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil				dan Penyelamatan
	komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)				
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
KEBENCANAAN					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	730. 728	732. 378	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokume n	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	730.72 8	730.72 8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1.65	1.65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	100	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	412	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko	unit	5	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	kesehatan, air sanitasi, ... dll)				
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	412	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	739	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	8	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	10	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	BIDANG SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		40	40	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	1	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	6	8	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40	40	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	40	40	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	3	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	40	40	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	40	Dinas Sosial
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	Dinas Sosial
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan	Orang	40	40	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	pendidikan dan kesehatan				
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	40	40	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	6	6	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		90	100	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	25	25	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	90	100	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	90	100	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	90	100	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	90	100	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	90	100	Dinas Sosial
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	90	100	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	90	100	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		230	230	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	130	130	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	100	120	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	230	230	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	230	230	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	27	30	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	230	230	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	230	230	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	25	25	Dinas Sosial
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,	Orang	7	10	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan				
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan dasar	Orang	230	230	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	230	230	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	105	105	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	4	4	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		900	900	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	100	100	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	650	700	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	900	900	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	900	900	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	900	900	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	900	900	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	150	170	Dinas Sosial
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	60	70	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	400	410	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	800	810	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	50	70	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	120	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok	Orang	95	0	Badan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	rentan				Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	71	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelarasan Indikator SPM dengan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan pada Tabel IV.12 di bawah ini.

Tabel IV.12
Penyelarasan SPM dengan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIDANG PENDIDIKAN							
	Pendidikan Dasar Usia Dini	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	100%	70,190,377,057	67,850,393,496	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%	48%			
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,47 %	84,47 %			
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	70,190,377,057	67,850,393,496	
			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	4 laporan			
			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan			
		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	209 Peserta Didik	5,165,801,252	5,160,817,691	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	3092 Orang	3092 Orang	5,017,055,500	2,682,055,500	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Kualifikasi					
		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	763,111,640	683,189,432	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	2.245 Satuan Pendidikan	58,642,480,000	58,642,480,000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	601,928,665	681,850,873	Dinas Pendidikan
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	1:20	40,544,000,000	40,544,000,000	
		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12685 orang	40,544,000,000	40,544,000,000	
		1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	40,544,000,000	40,544,000,000	Dinas Pendidikan
	Pendidika	1.01.02 PROGRAM	Angka Kelulusan (AL)	100%	100%	407,480,226,59	409,080,226,59	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	n Dasar (SD)	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SD/MI Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan Persentase guru yang mendapat pengembangan karir Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100% 48% 95%	100% 48% 95%	6	6	
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 Laporan 4 laporan 100% 1 laporan	1 Laporan 4 laporan 100% 1 laporan	407,480,226,59 6	409,080,226,59 6	
		1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	931,055,139	2,531,055,139	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	165,472,000	165,472,000	Dinas Pendidikan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					
					1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	593 Satuan Pendidikan	205,615,560,00 0	205,615,560,00 0	Dinas Pendidikan
					1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	32.802 Peserta Didik	200,768,139,45 7	200,768,139,45 7	Dinas Pendidikan
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	1:20	41,240,061,592	41,240,061,592		
					Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20	1:20				
			1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12685 orang	41,240,061,592	41,240,061,592			
				Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	7725 orang					
				1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	696,061,592	696,061,592	Dinas Pendidikan	
				1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan	350 Laporan	350 Laporan	40,544,000,000	40,544,000,000	Dinas Pendidikan	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
	Pendidikan Dasar (SMP)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	255,864,319,469	256,599,319,469	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%			
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%	48%			
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	95%	95%			
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	165,472,000	165,472,000	
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	165,472,000	165,472,000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	255,698,847,469	256,433,847,469	
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%			
			Pencairan biaya	4 laporan	4 laporan			

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu					
		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38574 Peserta Didik	16.343 Peserta Didik	129,509,217,75 4	129,509,217,75 4	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	776,799,715	1,511,799,715	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	125,412,830,00 0	125,412,830,00 0	Dinas Pendidikan
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	1:20	41,240,061,592	41,240,061,592	
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20	1:20			
		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12685 orang	41,240,061,592	41,240,061,592	
			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	7725 orang			
		1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	696,061,592	696,061,592	Dinas Pendidikan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
					1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	40,544,000,000	40,544,000,000	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%	48%	13,150,044,892	13,876,626,349		
					Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	90,45 %	90,45 %				
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	13,150,044,892	13,876,626,349		
					Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	4 laporan				
					Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari	3-5 hari				
					1.01.02.2.04.0010	Jumlah Peserta Didik	40 Peserta	40 Peserta	7,698,601,817	8,425,183,274	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	Didik		Pendidikan
			1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	250 Orang	76,703,075	Dinas Pendidikan
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	101,830,000	Dinas Pendidikan
			1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	5,272,910,000	Dinas Pendidikan
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	1:20	41,240,061,592	41,240,061,592
				Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	1:20	1:20		
			1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12685 orang	41,240,061,592	41,240,061,592
				Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	7725 orang		
			1.01.04.2.01.0001	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	696,061,592	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Pendidikan
		1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	40,544,000,000	40,544,000,000	Dinas Pendidikan
2	BIDANG KESEHATAN							
	Pelayana n Kesehata n Ibu Hamil	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06 %	99,06 %	7,637,596,335	6,639,054,335	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	7,637,596,335	6,639,054,335	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi	63 Unit	63 Unit			

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			baru lahir					
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43532 Orang	43532 Orang	4,358,980,335	3,360,438,335	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang	655 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	184 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	454 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	204 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang	783 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang	723 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	579 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	760 Orang	689 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1029 Orang	739 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	329 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang	1085 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	575 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	513 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	969 Orang	779 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang	702 Orang	56,628,000	56,628,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	247 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang	295 Orang	251 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan	
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	424 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	637 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang	745 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	545 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1109 Orang	1042 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	529 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	551 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	263 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang	357 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	477 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	399 Orang	357 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	577 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	209 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang	791 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang	691 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang	417 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1158 Orang	1069 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Ibu Hamil	Sesuai Standar					
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang	768 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	524 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	809 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	526 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang	455 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang	370 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang	534 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang	974 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	642 Orang	547 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	679 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	464 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang	549 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	412 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang	1204 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	563 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang	421 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang	935 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang	604 Orang	479 Orang	46,464,000	46,464,000	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kesehatan	
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang	1080 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	231 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	377 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	262 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang	774 Orang	26,136,000	26,136,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	333 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang	586 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang	664 Orang	75,504,000	75,504,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	767 Orang	65,340,000	65,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang	545 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang	1020 Orang	23,232,000	23,232,000	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n Ibu Bersalin	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,20 %	99,20 %	110,000,000	110,000,000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan	1 kegiatan	110,000,000	110,000,000	
		1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37187 Orang	36.818 Orang	110,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n Bayi Baru Lahir	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06 %	99,06 %	387,650,000	1,278,982,800	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	63 Unit	63 Unit	387,650,000	1,278,982,800	

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir					
				1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4401 Orang	35.849 Orang	387,650,000	1,278,982,800	Dinas Kesehatan
		Pelayana n Kesehata n Balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06 %	99,06 %	64,773,619,312	62,129,172,498		
				Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	100%				
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,101 %	0,101 %				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan	4 kegiatan	64,773,619,312	62,129,172,498		
				Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan				
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	63 Unit				
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	63 Puskesmas				

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	301,788,733	301,788,733	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	230,533,950	230,533,950	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	178,428,643	178,428,643	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	189,653,587	189,653,587	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	345,890,560	345,890,560	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	319,926,293	319,926,293	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	273,181,171	273,181,171	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	235,061,158	235,061,158	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	285,087,723	285,087,723	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Gizi Masyarakat	Gizi Masyarakat					
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	288,590,835	288,590,835	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	384,843,991	384,843,991	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	216,521,886	216,521,886	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	248,290,110	248,290,110	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	279,280,361	279,280,361	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	301,677,497	301,677,497	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	244,945,209	244,945,209	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	164,429,595	164,429,595	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	12 Dokumen	220,637,849	220,637,849	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	275,600,185	275,600,185	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	289,211,926	289,211,926	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	260,708,237	260,708,237	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	334,264,747	334,264,747	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	198,234,984	198,234,984	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	287,314,282	287,314,282	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	212,600,009	212,600,009	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	188,070,651	188,070,651	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen	12	12	251,292,313	251,292,313	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen			Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	237,775,522	237,775,522	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	292,856,507	292,856,507	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	184,450,108	184,450,108	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	280,536,593	280,536,593	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	302,629,872	302,629,872	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	189,749,588	189,749,588	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	326,625,870	326,625,870	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	376,936,286	376,936,286	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	264,244,450	264,244,450	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	304,513,870	304,513,870	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	270,175,420	270,175,420	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	265,207,591	265,207,591	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	305,484,764	305,484,764	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	216,167,905	216,167,905	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	320,525,698	320,525,698	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	245,834,611	245,834,611	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	324,058,661	324,058,661	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Gizi Masyarakat	Gizi Masyarakat					
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	266,001,552	266,001,552	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	324,840,029	324,840,029	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	221,173,741	221,173,741	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	345,506,773	345,506,773	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	263,602,814	263,602,814	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	276,126,515	276,126,515	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	416,092,859	416,092,859	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	202,274,345	202,274,345	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	12 Dokumen	396,566,126	396,566,126	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	193,037,330	193,037,330	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	270,967,758	270,967,758	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	252,921,911	252,921,911	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	314,152,265	314,152,265	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	150,035,811	150,035,811	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	250,956,082	250,956,082	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	237,789,151	237,789,151	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	233,919,611	233,919,611	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen	12	12	271,444,304	271,444,304	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dokumen			Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	354,331,222	354,331,222	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	936,372,897	830,999,773	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	506,894,212	470,847,727	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	598,346,905	627,137,259	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	545,023,882	510,308,697	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	783,873,626	682,269,626	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	800,803,179	775,476,179	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,010,606,210	938,928,205	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	663,837,022	622,336,978	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	632,999,706	579,960,536	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033	Jumlah Dokumen	12	12	712,233,319	672,112,578	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen			Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	957,461,465	934,501,790	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	660,810,829	620,596,941	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	610,092,348	606,940,589	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	821,898,396	798,127,162	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	962,448,827	927,627,425	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	517,414,688	502,176,153	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	731,738,874	691,300,010	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	536,838,652	500,199,932	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	912,950,270	867,082,596	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	756,622,735	736,712,140	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	770,611,247	718,135,976	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	871,866,623	728,923,607	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	769,227,853	683,564,433	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	692,209,395	642,224,055	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	531,848,683	492,066,008	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	521,355,556	467,517,532	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	776,526,143	749,874,574	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	606,419,337	597,266,786	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	788,159,192	691,881,029	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	539,938,841	510,316,967	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	699,851,407	636,494,827	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	666,552,878	607,922,900	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	12 Dokumen	696,631,604	670,620,212	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas					
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	681,538,035	678,518,635	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	957,093,085	857,115,956	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	689,763,135	656,523,425	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	922,458,987	840,467,305	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	743,507,938	743,507,938	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	614,243,987	531,704,155	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	705,828,329	690,404,329	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	592,705,124	568,619,284	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	934,392,715	913,980,715	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	573,958,391	535,457,445	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,033,247,964	1,033,298,905	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033	Jumlah Dokumen	12	12	703,468,846	712,353,256	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen			Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	467,560,001	461,374,238	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	598,853,630	579,320,790	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	883,960,405	792,046,269	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	805,296,878	760,408,778	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,220,447,975	1,169,574,560	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,018,129,426	986,644,106	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	669,371,041	667,278,001	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,015,442,595	936,392,342	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	757,880,842	730,457,003	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	841,228,648	775,091,178	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	727,345,443	647,321,391	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,162,131,866	1,139,987,116	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	858,569,676	779,715,666	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	853,658,343	853,658,343	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	835,258,388	768,635,057	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	846,572,536	803,553,688	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	485,052,184	448,288,024	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	990,206,038	981,043,338	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	38,400,060	38,400,060	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n pada Usia Pendidika n Dasar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	133,260,000	133,260,000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di	2 kegiatan	2 kegiatan	133,260,000	133,260,000	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	puskesmas				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5706 Orang	6824 Orang	1,200,000	1,200,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1656 Orang	2083 Orang	1,050,000	1,050,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3874 Orang	3604 Orang	1,260,000	1,260,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1608 Orang	2000 Orang	1,320,000	1,320,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6988 Orang	7979 Orang	1,140,000	1,140,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6896 Orang	8543 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	4331 Orang	5487 Orang	1,350,000	1,350,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5976 Orang	6955 Orang	5,400,000	5,400,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6383 Orang	7536 Orang	2,580,000	2,580,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3074 Orang	3015 Orang	1,200,000	1,200,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10240 Orang	12175 Orang	1,140,000	1,140,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4690 Orang	5531 Orang	3,120,000	3,120,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4449 Orang	5137 Orang	1,920,000	1,920,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	6652 Orang	8126 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6300 Orang	7201 Orang	2,280,000	2,280,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2299 Orang	2623 Orang	900,000	900,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2048 Orang	2422 Orang	1,170,000	1,170,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4565 Orang	5495 Orang	1,440,000	1,440,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5505 Orang	6713 Orang	1,620,000	1,620,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6006 Orang	7257 Orang	2,610,000	2,610,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	4530 Orang	5344 Orang	660,000	660,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7997 Orang	10437 Orang	1,620,000	1,620,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5361 Orang	6549 Orang	1,620,000	1,620,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6861 Orang	5358 Orang	720,000	720,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2058 Orang	2443 Orang	2,520,000	2,520,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2626 Orang	3263 Orang	960,000	960,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4993 Orang	5709 Orang	2,460,000	2,460,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	3397 Orang	4023 Orang	3,300,000	3,300,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5718 Orang	6906 Orang	2,700,000	2,700,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1631 Orang	1968 Orang	1,260,000	1,260,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6600 Orang	7609 Orang	1,680,000	1,680,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7453 Orang	9293 Orang	1,200,000	1,200,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5331 Orang	6272 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8294 Orang	9417 Orang	4,350,000	4,350,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	5274 Orang	6399 Orang	1,020,000	1,020,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4483 Orang	5205 Orang	2,520,000	2,520,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5796 Orang	6458 Orang	2,040,000	2,040,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6772 Orang	7912 Orang	4,050,000	4,050,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3893 Orang	4387 Orang	1,260,000	1,260,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3698 Orang	4390 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4033 Orang	4788 Orang	2,760,000	2,760,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	8285 Orang	9634 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5544 Orang	6235 Orang	1,680,000	1,680,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5372 Orang	6403 Orang	1,200,000	1,200,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7599 Orang	8737 Orang	3,240,000	3,240,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4170 Orang	4905 Orang	4,680,000	4,680,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5640 Orang	6358 Orang	2,160,000	2,160,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8152 Orang	10152 Orang	4,350,000	4,350,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	4512 Orang	5325 Orang	2,040,000	2,040,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5973 Orang	6930 Orang	1,560,000	1,560,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7354 Orang	8881 Orang	1,890,000	1,890,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4285 Orang	5287 Orang	3,960,000	3,960,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8704 Orang	10233 Orang	300,000	300,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1832 Orang	2219 Orang	1,890,000	1,890,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2402 Orang	3102 Orang	1,320,000	1,320,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	6072 Orang	6817 Orang	1,500,000	1,500,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7137 Orang	8919 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2687 Orang	3171 Orang	1,080,000	1,080,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6253 Orang	7174 Orang	2,070,000	2,070,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6257 Orang	7460 Orang	3,240,000	3,240,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6172 Orang	7404 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4345 Orang	5001 Orang	2,640,000	2,640,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	8525 Orang	10113 Orang	3,060,000	3,060,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			pada Usia Pendidikan Dasar	kesehatan sesuai standar				
	Pelayana n Kesehata n pada Usia Produktif	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	1,312,197,100	1,312,197,100	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	1,312,197,100	1,312,197,100	
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan			
		1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2034759 Orang	1.926.441 Orang	1,312,197,100	1,312,197,100	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n pada Usia Lanjut	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,60 %	82,60 %	112,094,700	112,094,700	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	112,094,700	112,094,700	
		1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang	337268 Orang	395.999 Orang	112,094,700	112,094,700	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
	Pelayana n Kesehata n Penderita Hipertensi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	133,000,000	184,736,000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	133,000,000	184,736,000	
		1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang	246.179 Orang	133,000,000	184,736,000	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n Penderita Diabetes Melitus	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	55,000,000	55,000,000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	55,000,000	55,000,000	
		1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	104362 Orang	111.477 Orang	55,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Melitus	sesuai standar					
	Pelayana n Kesehata n Orang dengan Gangguan n Jiwa Berat	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	732,925,000	732,925,000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	732,925,000	732,925,000	
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5552 Orang	5552 Orang	490,000,000	490,000,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	88 Orang	5,040,000	5,040,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang	1,980,000	1,980,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52 Orang	52 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	115 Orang	3,240,000	3,240,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	115 Orang	2,520,000	2,520,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	68 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	105 Orang	4,500,000	4,500,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	110 Orang	110 Orang	2,160,000	2,160,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	42 Orang	2,340,000	2,340,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	172 Orang	172 Orang	3,510,000	3,510,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	81 Orang	2,430,000	2,430,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	75 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	114 Orang	5,580,000	5,580,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010	Jumlah Orang yang	112 Orang	112 Orang	5,040,000	5,040,000	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				Kesehatan	
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	39 Orang	2,340,000	2,340,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	33 Orang	2,160,000	2,160,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang	2,160,000	2,160,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	97 Orang	3,420,000	3,420,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	2,700,000	2,700,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	77 Orang	3,060,000	3,060,000	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	152 Orang	152 Orang	6,660,000	6,660,000	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	87 Orang	2,700,000	2,700,000	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	74 Orang	4,140,000	4,140,000	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	36 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	46 Orang	2,340,000	2,340,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Sesuai Standar					
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	84 Orang	5,040,000	5,040,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	56 Orang	2,700,000	2,700,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	97 Orang	1,815,000	1,815,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang	1,800,000	1,800,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	105 Orang	2,880,000	2,880,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	128 Orang	128 Orang	7,020,000	7,020,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	92 Orang	3,960,000	3,960,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	148 Orang	6,660,000	6,660,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	87 Orang	4,500,000	4,500,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	77 Orang	2,880,000	2,880,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	101 Orang	3,960,000	3,960,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	115 Orang	115 Orang	4,500,000	4,500,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66 Orang	66 Orang	3,060,000	3,060,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	58 Orang	3,600,000	3,600,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	73 Orang	4,320,000	4,320,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138 Orang	138 Orang	5,940,000	5,940,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	5,580,000	5,580,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	87 Orang	87 Orang	4,860,000	4,860,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132 Orang	132 Orang	7,380,000	7,380,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	61 Orang	3,420,000	3,420,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	6,300,000	6,300,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	135 Orang	135 Orang	7,020,000	7,020,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	77 Orang	1,710,000	1,710,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010	Jumlah Orang yang	91 Orang	91 Orang	5,040,000	5,040,000	Dinas

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				Kesehatan	
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	115 Orang	6,660,000	6,660,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	69 Orang	3,060,000	3,060,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143 Orang	143 Orang	3,240,000	3,240,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	32 Orang	1,980,000	1,980,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang	1,980,000	1,980,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	102 Orang	102 Orang	5,760,000	5,760,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	113 Orang	3,960,000	3,960,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	1,440,000	1,440,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	105 Orang	5,940,000	5,940,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	109 Orang	5,940,000	5,940,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111 Orang	111 Orang	3,060,000	3,060,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Sesuai Standar					
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	73 Orang	4,140,000	4,140,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	126 Orang	5,400,000	5,400,000	Dinas Kesehatan
	Pelayana n Kesehata n Orang terduga Tuberkulo sis	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	100%	2,598,956,400	2,598,956,400	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	3 kegiatan 63 Puskesmas	3 kegiatan 63 Puskesmas	2,598,956,400	2,598,956,400	
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	60512 Orang	488,160,000	488,160,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	949 Orang	19,872,000	19,872,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	283 Orang	16,872,000	16,872,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang	707 Orang	18,432,000	18,432,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	293 Orang	17,472,000	17,472,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	1293 Orang	16,362,000	16,362,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1179 Orang	1179 Orang	16,512,000	16,512,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Standar					
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	712 Orang	17,472,000	17,472,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1164 Orang	1164 Orang	23,472,000	23,472,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang	1216 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	463 Orang	17,172,000	17,172,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	1879 Orang	21,672,000	21,672,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	887 Orang	887 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Tuberkulosis	Pelayanan Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	834 Orang	16,632,000	16,632,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	1203 Orang	18,072,000	18,072,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	1273 Orang	18,672,000	18,672,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	423 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	19,872,000	19,872,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	917 Orang	917 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Orang Terduga Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	1067 Orang	23,472,000	23,472,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	1065 Orang	17,172,000	17,172,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	847 Orang	17,172,000	17,172,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	1514 Orang	16,992,000	16,992,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	917 Orang	16,632,000	16,632,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	750 Orang	750 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 Orang	391 Orang	17,532,000	17,532,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	496 Orang	18,432,000	18,432,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	941 Orang	17,352,000	17,352,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang	593 Orang	16,572,000	16,572,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	1029 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011	Jumlah Orang	298 Orang	298 Orang	23,472,000	23,472,000	Dinas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				Kesehatan	
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	1163 Orang	16,572,000	16,572,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 Orang	1323 Orang	21,660,000	21,660,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	1010 Orang	17,772,000	17,772,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	1649 Orang	20,592,000	20,592,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	932 Orang	19,872,000	19,872,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang	843 Orang	20,592,000	20,592,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	1137 Orang	21,072,000	21,072,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	1268 Orang	22,872,000	22,872,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	741 Orang	17,172,000	17,172,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	630 Orang	16,932,000	16,932,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	798 Orang	798 Orang	16,872,000	16,872,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Standar					
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	1535 Orang	18,432,000	18,432,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 Orang	1115 Orang	16,632,000	16,632,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang	945 Orang	16,992,000	16,992,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	1444 Orang	18,072,000	18,072,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1127 Orang	1127 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	680 Orang	680 Orang	17,352,000	17,352,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Tuberkulosis	Pelayanan Sesuai Standar				
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	1383 Orang	16,272,000	16,272,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	840 Orang	16,872,000	16,872,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	1018 Orang	12,800,000	12,800,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	1246 Orang	17,712,000	17,712,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	779 Orang	18,672,000	18,672,000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 Orang	1562 Orang	9,220,000	9,220,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Orang Terduga Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	19,872,000	19,872,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	1148 Orang	21,312,000	21,312,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	365 Orang	14,160,000	14,160,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	1194 Orang	17,472,000	17,472,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	552 Orang	16,572,000	16,572,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1176 Orang	1176 Orang	18,192,000	18,192,000	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	1186 Orang	17,352,000	17,352,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	1196 Orang	16,362,000	16,362,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	829 Orang	18,972,000	18,972,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	1404 Orang	17,772,000	17,772,000	Dinas Kesehatan
					1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	666 Orang	977,288,400	977,288,400	Dinas Kesehatan
		Pelayana n	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA		Persentase cakupan Kelurahan yang	100%	100%	1,296,961,999	1,296,961,999		

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam					
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan	3 kegiatan	1,296,961,999	1,296,961,999	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	63 Puskesmas			
		1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 Orang	49.962 Orang	455,082,498	455,082,498	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	205 Orang	205 Orang	841,879,501	841,879,501	Dinas Kesehatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		(ODHIV)	sesuai standar					
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM							
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	100% 917 m3	100% 917 m3	7,140,325,823	6,309,632,362	
		1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	2 kelurahan 4 Jenis	130 kelurahan 4 Jenis	7,140,325,823	6,309,632,362	
		1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	96 Unit	5,676,665,577	5,650,374,056	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	1.250 Rumah Tangga	1,463,660,246	659,258,306	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97%	97%	89,581,794,035	89,697,322,114	
		1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	2 jenis	89,581,794,035	89,697,322,114	
		1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	1000 Unit Rumah	89,581,794,035	89,697,322,114	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemukiman Daerah	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter	11.700 meter	185,275,191,952	184,194,779,378	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Kabupate n/ Kota							
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi	3 lokasi	185,275,191,95 2	184,194,779,37 8	
		1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.6 KM	0.6 KM	185,275,191,95 2	184,194,779,37 8	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	100%	20,266,176,130	19,727,556,168	
		1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5233 Unit Hunian	5233 Unit Hunian	20,266,176,130	19,727,556,168	
		1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	20,266,176,130	19,727,556,168	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilit asi rumah susun sederhana sewa	100%	100%	21,192,044,300	21,769,053,879	
		1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	8 lokasi	21,192,044,300	21,769,053,879	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	21,192,044,300	21,769,053,879	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	BIDANG KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM							
	Pelayana n Ketentra man dan Ketertiba n Umum (TRANTIB UM)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti Persentase PPNS yang dibina Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan	100%	100%	73,766,230,208	62,761,811,694	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Perkada					
		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	11 Lembaga	66,376,003,440	56,411,362,205	
			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi	110 Titik/Lokasi			
			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	192 Kali			
			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang	1400 Orang			
		1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	1279 Orang	2,476,253,675	1,680,609,084	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar	12 Dokumen	12 Dokumen	1,363,390,416	1,300,273,778	Satuan Polisi Pamong Praja

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					
					1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	163,182,324	163,182,324	Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	59,931,094,368	50,825,214,362	Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	2,176,669,800	2,176,669,800	Satuan Polisi Pamong Praja

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	265,412,857	265,412,857	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	94 Objek	7,180,571,631	6,140,794,352	
			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek	4230 Objek			
		1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1,267,510,858	1,015,304,743	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala	12 Laporan	12 Laporan	4,955,041,376	4,167,470,212	Satuan Polisi Pamong Praja

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			daerah Sesuai SOP					
		1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	958,019,397	958,019,397	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	70 Orang	70 Orang	209,655,137	209,655,137	
		1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	209,655,137	209,655,137	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pelayana n Penyelam ata n dan Evakuasi Korban Kebakara n	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	47	52,989,439,618	84,430,625,585	
			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	100%			
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	656 Petugas	51,887,966,701	83,578,139,811	
			Persentase sarana dan prasarana	100%	100%			

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik					
				1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	30,229,602,558	16,149,829,919	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	8,308,449,684	7,781,171,246	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	10 Orang	831,481,642	621,229,130	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk	875 Unit	805 Unit	12,518,432,817	59,025,909,516	Dinas Pemadam

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
					dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				Kebakaran dan Penyelamatan	
					1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	500 Berkas	500 Berkas	558,743,517	454,788,934	
					1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	558,743,517	454,788,934	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	100 Kegiatan	100 Kegiatan	542,729,400	397,696,840	
					1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	1000 Orang	542,729,400	397,696,840	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan ke darurat yang direspon < 7 menit	100%	100%	22,278,126,520	24,145,783,260	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	100%			
		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	42 Kegiatan	2,046,547,337	1,781,626,493	
		1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5 Unit	250,502,546	250,502,546	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	353,948,243	265,890,000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1650 Kawasan	1,442,096,548	1,265,233,947	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	10 Jenis	20,231,579,183	22,364,156,767	
		1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	12500 Orang	20,231,579,183	22,364,156,767	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	BIDANG SOSIAL							
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	746,962,825	707,509,832	
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial	12 kali	12 kali	746,962,825	707,509,832	

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	dasar bagi Penyandang Disabilitas					
				1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	746,962,825	707,509,832	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	6,856,458,727	7,282,546,015	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	12 kali	6,856,458,727	7,282,546,015	
				1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	376 Orang	6,856,458,727	7,282,546,015	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase lansia terlantar yang memperoleh	100%	100%	8,386,630,063	8,087,866,122	

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		rehabilitasi sosial di luar panti sosial					
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	8,386,630,063	8,087,866,122	
		1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	230 Orang	8,386,630,063	8,087,866,122	Dinas Sosial
	Rehabilita si Sosial Dasar Tuna Sosial Khususny a Gelandan gan dan Pengemis di Luar Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	8,386,630,063	8,087,866,122	
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	8,386,630,063	8,087,866,122	

N o	JENIS LAYANAN SPM		PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
				1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	230 Orang	8,386,630,063	8,087,866,122	Dinas Sosial
		Perlindun ga n dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupate n/ Kota	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase pengaduan ke darurat yang direspon < 7 menit	100%	100%	2,407,360,566	1,728,168,886	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	10 Jenis	2,407,360,566	1,728,168,886	
				1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	467 Orang	467 Orang	2,407,360,566	1,728,168,886	Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

N o	JENIS LAYANAN SPM	PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Bencana					

4.2.7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan upaya penting dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem global. Emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O), berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas pertanian. Penurunan emisi GRK merupakan bagian dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan yakni :

1. SDG 13 : *Climate Action* (Aksi Iklim)

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan mengurangi emisi GRK.

2. SDG 7: *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)

Meningkatkan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua, termasuk transisi ke energi terbarukan yang lebih rendah emisi

3. SDG 11: *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan)

Membangun kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

4. SDG 12: *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

Mengurangi limbah dan mengelola sumber daya alam secara lebih efisien untuk mengurangi emisi dari produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Sejak tahun 2022 jumlah emisi gas rumah Kaca di Kota Surabaya mengalami peningkatan, hal ini salah satunya disebabkan karena mulai bergeraknya sektor perdagangan dan industri di Kota Surabaya dan daerah sekitar setelah sempat tertahan karena adanya pembatasan aktivitas akibat terjadinya pandemi Covid-19. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, berbagai langkah strategis akan diambil antara lain:

1. Transportasi ramah lingkungan dengan mengembangkan dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Selain itu pada sejak tahun 2024 secara bertahap dilakukan konversi kendaraan operasional dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik baik dengan pengadaan kendaraan baru maupun melalui skema sewa.
2. Efisiensi energi di perkantoran dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;Pengelolaan Limbah dengan mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan cara yang lebih efisien untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan sampah
4. Edukasi dan Kesadaran Publik dengan adanya kampung proklam, sekolah adiwiyata, putra/putri lingkungan serta kader masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi GRK dan cara-cara praktis untuk berkontribusi melalui edukasi dan kampanye publik.

4.2.8. Penyediaan Permukiman yang Layak

Sebagai kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Surabaya menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota telah menjalankan berbagai program, antara lain :

- a. Pembangunan Rusunawa untuk hunian terjangkau,
- b. Revitalisasi kampung dan permukiman kawasan prioritas,
- c. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembangunan Rusunami,
- d. Perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu)

Pemerintah juga mendorong pembangunan hunian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi publik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan tinggal yang layak, sehat, dan mendukung kualitas hidup. Surabaya juga menjadi kota ramah disabilitas, melalui penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan lift di Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO), pembangunan trotoar, penyediaan transportasi umum, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya yang ramah disabilitas.

Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh warga dan selaras dengan upaya pencapaian SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Dengan langkah ini, Surabaya berupaya mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua warganya memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan manusiawi.

4.2.9. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kota Surabaya telah mencapai target akses sanitasi layak 100% dan cakupan layanan air bersih layak 100% sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan upaya dalam rangka mencapai akses sanitasi aman dan cakupan layanan air minum aman. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045, target capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Surabaya pada tahun 2045 adalah 96% dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2045 adalah 100%. Target tersebut kemudian dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dimana target capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Surabaya di Tahun 2030 adalah 24% dan target cakupan layanan air minum aman di Tahun 2030 adalah 70,72%.

Dalam rangka mencapai target tersebut, upaya yang akan dilakukan oleh PDAM Surya Sembada selaku BUMD yang menangani pengelolaan air minum di Kota Surabaya, antara lain:

1. Perbaikan jaringan (penggantian pipa yang sudah lama) untuk memperbaiki kualitas air
2. Pembangunan reservoir pelayanan
3. Pembangunan pos desinfektan
4. Rehab dan penambahan jaringan distribusi air minum
5. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Terkait dengan target akses sanitasi aman, upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain :

1. Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
2. Penambahan unit sedot tinja
3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

Hal tersebut selaras dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya pencapaian SDG's 6 yaitu Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target yang harus dipenuhi antara lain:

1. Target 6.1 Air minum yang aman dan terjangkau
2. Target 6.2 Mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan
3. Target 6.3 Meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman
4. Target 6.4 Tingkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih
5. Target 6.5 Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu
6. Target 6.6 Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air

4.2.10. Inovasi Pembangunan Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 ***“Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis”***, pada tahun 2025

akan dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2025, antara lain :

1. Penataan, *branding* dan promosi kawasan wisata juga untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan untuk mengembalikan lagi geliat ekonomi di Kota Surabaya pasca Pandemi Covid-19 melanda. Dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024, penataan kawasan Wisata Kota Lama Surabaya akan berlanjut pada tahun 2025. Terdapat 4 zona yakni zona Eropa, zona Pecinan, zona Melayu dan zona Arab yang pada tahun 2025 akan tertintegrasikan. Destinasi wisata baru ini diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Surabaya dan meningkatkan transaksi ekonomi khususnya di sektor usaha hotel, restoran dan kafe;
2. Optimalisasi e-Peken, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui website maupun playstore pada android. Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi media transaksi untuk toko kelontong, UMKM dan Sentra Wisata Kuliner. Dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dan Pengadaan Barang/Jasa e-Peken maka e-Peken tidak hanya sebagai meningkatkan omset dari pelaku UMKM saja namun juga mendukung optimalisasi belanja untuk UMKM dan upaya pengembangan yang dilakukan pada Tahun 2025 berupa :
 - Kolaborasi E-Peken Surabaya dengan BUMD RPH;
 - Kolaborasi dengan pedagang *fresh market*;
 - Penambahan fitur pengiriman *instant*;
 - Optimalisasi UMKM sebagai penyedia e-Katalog (Dukungan P3DN).
3. Kios TPID dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Surabaya Kios TPID telah didirikan sebanyak 13 Pasar yang berlokasi di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Genteng Baru, Pasar Tambahrejo, Pasar Kupang Gunung, Pasar Nambangan, Pasar Sememi, Pasar Raci Pakal, Pasar Gunung Anyar, Pasar Jambangan, Pasar Dukuh Menanggal, Pasar Kutisari, dan Pasar Soponyono. Pasar Nambangan sebagai salah satu pasar

pangan aman dan berkualitas bagi masyarakat terpilih menjadi nominator dalam pelaksanaan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2024. Selanjutnya direncanakan untuk dilakukan penambahan Kios TPID yang berlokasi di Pasar Bendul Merisi, Pasar Inpres Bratang, Pasar Pacar Keling, Pasar Dukuh Kupang, Pasar Simo Gunung, Pasar Babaan, Pasar Gubeng Masjid, Pasar Banjar Sugihan, Pasar Dupak Bandarejo, Pasar Gayungsari, Pasar Kembang. Selain itu, direncanakan pembangunan Kios TPID di 4 rusun yaitu : Rusun Sumbo, Rusun Tanah Merah, Rusun Randu Agung dan Rusun Penjaringan Sari 3;

4. Peta Potensi Investasi Kota Surabaya, sebagai alat utama promosi yang dapat diakses secara *online* maupun katalog investasi. Diharapkan Peta Potensi Investasi Kota Surabaya dapat menggambarkan karakteristik wilayah, demografi, terutama potensi dan peluang investasi di masing-masing wilayah sehingga investor mampu menganalisis lokasi yang dianggap paling sesuai untuk berinvestasi serta mendapatkan gambaran yang utuh tentang investasi di Kota Surabaya;
5. Surabaya *Great Investment Promotion*. Event Promosi Investasi Kota Surabaya sebagai momen untuk pemasaran investasi di Kota Surabaya. Selain itu, calon investor juga akan mendapatkan pendampingan dan informasi yang mendalam tentang kemudahan pelayanan seluruh perizinan di Kota Surabaya;
6. Pesona Buaya (Pendampingan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya). Pesona Buaya dilatarbelakangi oleh pelaku usaha di banyak kelurahan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha dikarenakan belum mampu menjangkau layanan perizinan di Kota Surabaya. Inovasi ini dilakukan dalam bentuk pendampingan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha di seluruh Kelurahan sehingga dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha terkait pemenuhan Nomor Induk Berusaha serta izin-izin pendukung usaha lainnya;
7. Lapis Lupis (Layanan Asistensi dan Fasilitasi LKPM untuk peningkatan investasi). Inovasi yang memiliki fokus untuk asistensi pemenuhan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh investor di Kota Surabaya. Lapis Lupis memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan

capaian nilai investasi di Kota Surabaya melalui pelaporan yang baik, sistematis, dan tepat waktu;

8. **ASSIK** merupakan sinergi antara kebutuhan perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya dengan Pencari Kerja, baik berupa peningkatan softskill, keterampilan, pelatihan maupun bimbingan teknis yang telah diserap pada sektor formal dan informal akan tetap dilanjutkan dengan menambah fitur *link and match* sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Beberapa pengembangan sistem ASSIK dilakukan dengan menambah beberapa fitur diantaranya :

- WA Blast yang berupa penambahan fitur pengiriman lowongan melalui platform WA;
 - Pelatihan dan perluasan kesempatan kerja untuk Program Padat Karya;
 - Perbanyak Bimtek informal untuk supporting peningkatan kompetensi;
 - *Link and Match* kebutuhan sertifikasi umum perusahaan;
 - Kerjasama dengan SMK AKAD AKL;
 - Dukungan program 1 Keluarga 1 Sarjana akan diperbanyak pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - Selaras dengan ekonomi sirkular dan padat karya, akan ada pendataan industri untuk program 1 Kelurahan 1 Padat Karya/Industri
9. Program Padat Karya yang tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja namun juga pada pengurangan kemiskinan ekstrem sesuai Surat Keputusan Walikota 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem beserta Surat Edaran Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program Padat Karya mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin. Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan Program Padat Karya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memproduksi atau jasa yang setiap tahunnya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, agar keluarga miskin hasil pelatihan pada Program Padat Karya memiliki penghasilan dan mentas dari kemiskinan ekstrem;
 10. Program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya pertanian, peternakan serta perikanan (urban farming), juga merupakan program unggulan untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang terdata

sebagai keluarga miskin. Program budidaya ini memanfaatkan lahan-lahan aset milik pemerintah kota menjadi lahan produktif untuk budidaya perikanan, peternakan dan pertanian;

11. Pemberdayaan masyarakat di *Adventure Land* Romokalisari, merupakan program unggulan yang juga menjadi inovasi di sektor perikanan. *Adventure Land* Romokalisari merupakan bangunan bekas tempat pelelangan ikan bernama sentra ikan romokalisari yang terletak di Kecamatan Benowo. Seiring dengan berkurangnya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut membuat bangunan ini menjadi sepi pengunjung. Kini kawasan sentra ikan romokalisari telah berubah menjadi *Adventure Land* Romokalisari dengan daya tarik wisata utama adalah wisata edukasi dan wisata bahari. Di *Adventure Land* Romokalisari terdapat sejumlah 31 orang masyarakat dengan status keluarga miskin yang berhasil diberdayakan menjadi petugas / operator wahana. Terdapat 8 orang pelaku UMKM mamin dan 10 penjual ikan segar yang juga diberdayakan. Program pemberdayaan di *adventure land* akan terus dikembangkan agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung tiap tahunnya;
12. **E-rusun**, merupakan aplikasi yang digunakan untuk pembayaran retribusi rusun. Inovasi untuk memberikan kemudahan bagi penghuni rusun guna melakukan pembayaran restribusi secara online. Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa pengembangan antara lain menambahkan fitur pengembangan jaminan yang diperuntukkan untuk penghuni yang baru masuk, fitur pembayaran sewa unit hunian rusun, dan menu laporan kerusakan rusun oleh petugas di rusun. Kemudian pada tahun 2025 akan melakukan pengembangan berupa proses sanksi administratif, *Goes to Android*, pendataan penghuni yang mengikuti program padat karya/pelatihan/intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya, serta integrasi sistem antar PD yaitu SSW, data keluarga miskin, padat karya dan data kependudukan;
13. **e-rutilahu**, merupakan aplikasi untuk melakukan input usulan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) oleh Kelurahan. Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa pengembangan antara lain menambahkan fitur survey dan cetak BA survey, fitur mapping titik rutilahu, dan melakukan

penyederhanaan tampilan aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian pada tahun 2025 akan melakukan pengembangan berupa penambahan fitur prioritas dan cetak BA KRPR (Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah);

14. Beasiswa Pemuda Tangguh, merupakan program unggulan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah di Kota Surabaya. Program ini tentunya diprioritaskan kepada masyarakat yang terdata sebagai keluarga miskin. Beasiswa ini diberikan mulai dari jejang Pendidikan SD/SMP/SMA sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi. Adapun rincian beasiswa yang diberikan antara lain biaya pendidikan, biaya pendukung pendidikan, seragam, serta sepatu. Tata cara pemberian beasiswa ini tercantum di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
15. Platform Digital Terpadu untuk Bantuan Sosial (*Integrated Social Assistance Digital Platform*) yaitu platform digital yang terintegrasi untuk mendata, memantau, dan menyalurkan bantuan sosial secara efisien kepada warga miskin;
16. Program Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship Program*). Program ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin melalui penyediaan modal usaha, pelatihan bisnis, dan pendampingan;
17. Pengembangan *Surabaya Medical Tourism* yang bertujuan menjadikan Surabaya sebagai destinasi utama wisata medis di Indonesia, yang menawarkan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan beragam fasilitas pariwisata. Upaya ini rumah sakit, hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan untuk memberikan pengalaman yang komprehensif bagi pasien dari dalam dan luar negeri. Proses pembentukan koordinasi dan perencanaan dilaksanakan di tahun 2025, dan akan terus dilanjutkan di 2026 yang akan dijalankan beriringan dengan pengembangan *Urban Tourism* di Kota Surabaya;
18. Pengembangan Aplikasi ehealth terbaru melalui fitur pendaftaran catin yang dimana tercatat dalam aplikasi PWS pemantauan aplikasi setempat yang juga telah terbridging dengan DPMPTSP dan DP3APPKB.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 merupakan rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025.

Program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029. Selain itu, dalam menyusun program dan kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga memperhatikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 (pemutakhiran) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, tidak terdapat penambahan program dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun terdapat penambahan 3 subkegiatan baru sebagai berikut :

1. 1 (satu) subkegiatan baru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
2. 1 (satu) subkegiatan baru yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online;
3. 1 (satu) subkegiatan baru yang bersumber dari BLUD sebagai tindak lanjut atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3./281/436.1.2/2024 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya.

Selain penambahan 3 subkegiatan baru, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat penghapusan 1 subkegiatan dikarenakan pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya tidak mendapatkan DAK Non Fisik Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-116/PK/2024 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2025

Rencana program dan kegiatan pada dokumen rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	293 Orang	293 Orang	5,906,876,775	5,906,876,775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	68 Komunitas	68 Komunitas	1,659,558,686	1,875,180,860	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	36 Permohonan	36 Permohonan	2,001,839,018	2,016,694,652	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
(HAM)	Luhur dan Berintegritas											
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	34 Media	34 Media	14,809,651,041	17,993,887,716	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	1,363,390,416	1,300,273,778	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	12 laporan	12 laporan	59,931,094,368	50,825,214,362	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kebudayaan & Lingkungan Hidup	publik			1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	17 Orang	12,083,833,997	24,087,319,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem	Menjaga Harmoni Sosial & Alam	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	44 Laporan	44 Laporan	719,278,210	1,436,741,620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	kualitas pelayanan publik	masyarakat	DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	207,017,600	129,167,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 :	Pembangunan Sektor	Peningkatan ketahanan	Meningkatkan kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Pembudi	Pemberian Pendampingan,	35 Kelompok	35 Kelompok	437,839,088	351,189,088	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	pangan dan pengendalian inflasi daerah	pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PERIKANAN BUDIDAYA	Daya Ikan Kecil	Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	63 Unit	1,556,968,026	1,170,126,685	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	65 Unit	65 Unit	1,648,320,756	848,524,128	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	2,498,457,133	1,831,572,328	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	4,629,592,678	4,978,556,584	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2 Unit	2 Unit	7,069,589,216	4,870,511,631	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	2,753,199,543	2,247,521,873	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	3,403,966,617	2,611,838,023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7 Unit	7 Unit	1,751,811,259	1,035,848,457	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Unit	1 Unit	1,032,380,837	1,086,203,902	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	48,922,160	34,270,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	12 Lembaga	12 Lembaga	520,963,363	414,116,240	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	5,836,722,384	7,553,259,896	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	50 Perusahaan	287,688,800	277,960,320	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			pengentasan kemiskinan									
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	2,491,634,196	3,121,227,633	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	2050 Orang	2050 Orang	136,669,442	141,945,248	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	berbasis Kerakyatan		tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan									
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1200 Orang	1200 Orang	584,652,683	570,615,973	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	250 Orang	1,027,683,011	1,077,365,986	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	daerah	pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan									
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	250 Orang	363,652,260	295,082,260	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan	Pembangunan Sektor Pertanian,	Peningkatan ketahanan pangan dan	Meningkatnya nilai investasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon	300 Orang	300 Orang	441,127,686	357,723,191	Dinas Perindustrian dan	Dinas Perindustrian dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	pengendalian inflasi daerah	yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	KERJA	Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	342,244,200	339,980,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas	Pembangunan	Peningkatan	Meningkatnya	PROGRAM	Pelaksanaan	Pemasaran dan	5220	5220	6,575,613,4	7,308,693,1	Dinas	Dinas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	an Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	a sektor strategis berbasis potensi lokal	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	UMKM	UMKM	33	71	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya a sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	4,295,244,125	10,757,877,580	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	136,965,000	136,965,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	821,790,231	661,106,672	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	450 Dokumen	271,654,014	291,832,753	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	60 Dokumen	160 Dokumen	221,051,540	246,708,544	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	98,503,604	108,870,295	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	52,197,054	52,197,054	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	40 Dokumen	40 Dokumen	261,213,101	281,946,483	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	23810 Unit	23810 Unit	675,840,338	682,072,261	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
a pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1200 Orang	1200 Orang	116,902,858	118,110,584	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2,030,629,998	2,304,051,058	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pemberdayaan Pemerintahan Desa				Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	136 Unit Usaha	277,344,431	296,982,571	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	342,244,200	339,980,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1,927,336,410	1,745,050,239	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	5220 UMKM	5220 UMKM	6,575,613,433	7,308,693,171	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	4,295,244,125	5,378,938,790	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	keunggulan ekonomi		N	Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						dan Perdagangan	dan Perdagangan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	136,965,000	136,965,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	821,790,231	661,106,672	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	12 Laporan	12 Laporan	251,066,414	270,986,634	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pemberdayaan Pemerintahan Desa											
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	501,271,663	532,482,993	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Dokumen	63 Dokumen	6,135,319,803	6,135,319,803	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1861 Orang	1861 Orang	1,790,467,426	1,913,795,765	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					Bangunan Gedung							
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	161 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	30,200,143,356	32,021,793,947	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	140 Bangunan Gedung	140 Bangunan Gedung	286,190,603,940	258,754,846,018	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terpadu dan Berkeadilan	terpadu	terintegrasi		Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten/Kota					n serta Pertanahan	n serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,348,038,561	3,457,467,722	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi						Bangunan Gedung melalui SIMBG						
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	597,764,419	597,764,419	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	70,845,352,524	88,850,722,634	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	10000 M	7.500 M	353,128,225,994	231,458,124,347	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	250,672,021,627	338,738,658,157	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	9,210,978,232	12,922,944,708	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	50 Dokumen	52 Dokumen	7,306,391,509	13,488,156,986	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	190,321,824,437	163,286,308,066	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terpadu dan Berkeadilan	terpadu	terintegrasi	DRAINASE	yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	290 Unit	290 Unit	51,297,298,237	53,466,759,630	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	14 Lembaga	14 Lembaga	629,803,242	660,098,284	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	240 Unit	240 Unit	1,413,022,096	1,038,755,485	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	780,733,786	762,412,842	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	20,266,176,130	19,727,556,168	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	12 Laporan	1,156,286,301	2,811,394,972	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	0.6 KM	0.6 KM	185,275,191,952	184,194,779,378	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	11.7 KM	11.7 KM	414,412,327,305	368,901,092,688	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terpadu dan Berkeadilan	terpadu	terintegrasi									
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	40 KM	110 KM	91,113,766,238	102,523,325,442	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	11.7 KM	11.7 KM	9,229,012,098	7,341,936,407	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	70 Dokumen	70 Dokumen	11,130,668,935	14,987,660,804	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3000 Unit	3000 Unit	64,141,775,197	62,428,408,019	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2500 Unit	2500 Unit	10,738,925,544	10,076,042,720	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9000 Unit	9000 Unit	23,817,407,874	22,465,767,488	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	102252 Unit	117.344 Unit	135,874,562,678	133,435,286,655	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	12 Unit	12 Unit	16,991,017,589	16,074,351,876	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terpadu dan Berkeadilan	terpadu	terintegrasi	JALAN (LLAJ)								
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	16,785,981,684	14,551,850,297	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33 Unit	33 Unit	7,637,808,345	7,200,696,214	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	5 Laporan	3,719,426,267	1,696,241,975	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	27,085,111,046	30,819,975,153	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	3,536,694,587	1,738,294,034	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	72 Unit	167 Unit	173,420,423,867	169,998,104,772	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4 Dokumen	3,845,386,490	1,734,389,280	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	3,027,557,868	4,120,765,407	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terpadu dan Berkeadilan	terpadu	terintegrasi		Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTr) Kabupaten/Kota						n serta Pertanahan	n serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	659,149,280	728,175,607	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	825,373,096	926,875,318	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	89,205,870,896	119,913,880,269	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi					Kabupaten/Kota	Kabupaten / Kota						
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	12 Lembaga	12 Lembaga	520,963,363	414,116,240	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	5,836,722,384	7,553,259,896	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	50 Perusahaan	287,688,800	277,960,320	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	2,491,634,196	3,121,227,633	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	2050 Orang	2050 Orang	136,669,442	141,945,248	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	keunggulan ekonomi	keunggulan ekonomi	pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan									
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1200 Orang	1200 Orang	584,652,683	570,615,973	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sentra produksi melalui peran aktif koperasi												
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	250 Orang	1,027,683,011	1,077,365,986	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	250 Orang	363,652,260	295,082,260	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			kemiskinan									
Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	300 Orang	300 Orang	441,127,686	357,723,191	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	966 Orang	966 Orang	572,182,163	581,994,211	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	56 Kelompok	306 Kelompok	3,909,520,171	3,913,677,824	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas						Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	38 Unit	10 Unit	120,000,000	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	1 Laporan	1 Laporan	987,881,218	1,013,472,644	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			n Keluarga	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	181,415,081	181,415,081	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	780,975,270	780,975,270	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,830,000	2,830,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,419,280	3,419,280	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,739,280	4,739,280	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,019,280	4,019,280	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,059,280	3,059,280	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,739,280	4,739,280	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,019,280	4,019,280	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,899,280	3,899,280	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,890,000	2,890,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,139,280	4,139,280	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,090,000	4,090,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,139,280	4,139,280	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,890,000	2,890,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,810,000	4,810,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,710,000	2,710,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,419,280	3,419,280	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,370,000	3,370,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,419,280	3,419,280	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,830,000	2,830,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,250,000	3,250,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	5,710,000	5,710,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,899,280	3,899,280	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,419,280	3,419,280	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,830,000	2,830,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,759,280	2,759,280	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,010,000	3,010,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,059,280	3,059,280	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,250,000	3,250,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,359,280	3,359,280	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,669,280	2,669,280	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,970,000	3,970,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,710,000	2,710,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,059,280	3,059,280	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,150,000	4,150,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,090,000	4,090,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,250,000	3,250,000	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,059,280	3,059,280	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,939,280	2,939,280	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,819,280	2,819,280	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,370,000	3,370,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,130,000	3,130,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,280,000	3,280,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,830,000	2,830,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,330,000	4,330,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,250,000	3,250,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,370,000	3,370,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,370,000	3,370,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,370,000	3,370,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,419,280	3,419,280	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,879,280	2,879,280	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,710,000	2,710,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,239,280	3,239,280	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	2,894,280	2,894,280	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,779,280	3,779,280	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	3,299,280	3,299,280	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	4,019,280	4,019,280	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1,169,614,980	1,200,382,730	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	13,500,000	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	31 Kampung	31 Kampung	364,800,000	364,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	1.058 Perpustakaan	55,675,000	55,675,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	200 Perpustakaan	424 Perpustakaan	275,643,600	275,643,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1502 Eksemplar	1502 Eksemplar	927,128,270	914,381,756	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1502 Perpustakaan	1502 Perpustakaan	13,549,411,490	15,363,537,587	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	208,084,652	239,184,724	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	255 Lokus	255 Lokus	496,493,644	538,676,302	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Pembangunan Puskesmas	1 Unit	2 Unit	10,000,000,000	14,730,400,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Unit	1 Unit	353,443,209,832	352,912,809,832	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33 Unit	33 Unit	4,194,182,173	4,194,182,173	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	30 Unit	4,244,536,173	4,244,536,173	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	5 Paket	23,670,595,213	23,670,595,213	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	71,200,000	71,200,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	250,000,000	1,341,035,009	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12 Unit	6 Unit	8,139,036,013	6,872,001,004	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	131,944,000	119,183,600	Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	115,500,000	115,500,000	Instalasi Farmasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,185,000	1,185,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,005,000	1,005,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,957,500	1,957,500	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,095,000	1,095,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,737,500	2,737,500	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	840,000	840,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,725,000	4,725,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,440,000	1,440,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,862,500	3,862,500	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,725,000	4,725,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,185,000	1,185,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,862,500	3,862,500	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,655,000	2,655,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,972,500	1,972,500	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,275,000	1,275,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	5,587,500	5,587,500	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,240,000	3,240,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,455,000	1,455,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	825,000	825,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,365,000	1,365,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,090,000	3,090,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,687,500	4,687,500	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,650,000	1,650,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,482,500	2,482,500	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,317,500	2,317,500	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,440,000	1,440,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,550,000	2,550,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,545,000	4,545,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,862,500	3,862,500	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,365,000	1,365,000	Puskesmas Morokrembang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,642,500	4,642,500	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	Puskesmas Ngagel rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,895,000	2,895,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,650,000	1,650,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,095,000	1,095,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,550,000	2,550,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	4,275,000	4,275,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,650,000	1,650,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,820,000	2,820,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,047,500	2,047,500	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,792,500	1,792,500	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,860,000	1,860,000	Puskesmas Sidoserma	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,237,500	1,237,500	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,237,500	1,237,500	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,047,500	2,047,500	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,887,500	2,887,500	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,130,000	2,130,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,176,000	1,176,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,957,500	1,957,500	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	1,027,500	1,027,500	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,862,500	3,862,500	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	3,862,500	3,862,500	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,137,500	2,137,500	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	2,227,500	2,227,500	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	936,372,897	830,999,773	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	506,894,212	470,847,727	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	598,346,905	627,137,259	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	545,023,882	510,308,697	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	783,873,626	682,269,626	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	800,803,179	775,476,179	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,010,606,210	938,928,205	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	663,837,022	622,336,978	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	632,999,706	579,960,536	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	712,233,319	672,112,578	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	957,461,465	934,501,790	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	660,810,829	620,596,941	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	610,092,348	606,940,589	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	821,898,396	798,127,162	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	962,448,827	927,627,425	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	517,414,688	502,176,153	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	731,738,874	691,300,010	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	536,838,652	500,199,932	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	912,950,270	867,082,596	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	756,622,735	736,712,140	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	770,611,247	718,135,976	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	871,866,623	728,923,607	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	769,227,853	683,564,433	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	692,209,395	642,224,055	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	531,848,683	492,066,008	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	521,355,556	467,517,532	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	776,526,143	749,874,574	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	606,419,337	597,266,786	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	788,159,192	691,881,029	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	539,938,841	510,316,967	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	699,851,407	636,494,827	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	666,552,878	607,922,900	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	696,631,604	670,620,212	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	681,538,035	678,518,635	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	957,093,085	857,115,956	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	689,763,135	656,523,425	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	922,458,987	840,467,305	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	743,507,938	743,507,938	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	614,243,987	531,704,155	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	705,828,329	690,404,329	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	592,705,124	568,619,284	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	934,392,715	913,980,715	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	573,958,391	535,457,445	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,033,247,964	1,033,298,905	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	703,468,846	712,353,256	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	467,560,001	461,374,238	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	598,853,630	579,320,790	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	883,960,405	792,046,269	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	805,296,878	760,408,778	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,220,447,975	1,169,574,560	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,018,129,426	986,644,106	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	669,371,041	667,278,001	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,015,442,595	936,392,342	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	757,880,842	730,457,003	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	841,228,648	775,091,178	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	727,345,443	647,321,391	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1,162,131,866	1,139,987,116	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	858,569,676	779,715,666	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	853,658,343	853,658,343	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	835,258,388	768,635,057	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	846,572,536	803,553,688	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	485,052,184	448,288,024	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	990,206,038	981,043,338	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	622,388,895	635,388,895	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	116,703,300	116,703,300	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	113,913,300	113,913,300	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	57,252,000	57,252,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	128,493,300	128,493,300	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	91,842,000	91,842,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	87,832,500	87,832,500	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	119,823,300	119,823,300	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	115,833,300	115,833,300	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	149,391,000	149,391,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	110,814,000	110,814,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	54,792,000	54,792,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	103,928,400	103,928,400	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	120,573,300	120,573,300	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	125,823,300	125,823,300	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	113,433,300	113,433,300	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	98,334,000	98,334,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	72,684,000	72,684,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	120,633,300	120,633,300	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	97,116,000	97,116,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	90,702,000	90,702,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	115,353,300	115,353,300	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	91,398,000	91,398,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	110,193,300	110,193,300	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	103,060,200	103,060,200	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	91,653,000	91,653,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	70,632,000	70,632,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	92,334,000	92,334,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	90,907,200	90,907,200	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	93,099,000	93,099,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	108,573,300	108,573,300	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	84,633,000	84,633,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	129,170,900	129,170,900	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	112,779,000	112,779,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	131,016,000	131,016,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	127,353,300	127,353,300	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	57,630,000	57,630,000	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	112,683,300	112,683,300	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	88,380,000	88,380,000	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	115,632,000	115,632,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	115,593,300	115,593,300	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	47,170,500	47,170,500	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	100,626,000	100,626,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	98,860,500	98,860,500	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	114,153,300	114,153,300	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	99,642,000	99,642,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	109,626,000	109,626,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	82,134,000	82,134,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	141,003,300	141,003,300	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	119,253,300	119,253,300	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	96,141,000	96,141,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	84,297,000	84,297,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	51,814,500	51,814,500	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	130,383,300	130,383,300	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	111,813,300	111,813,300	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	116,673,300	116,673,300	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	93,112,500	93,112,500	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	70,068,000	70,068,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	112,992,000	112,992,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	124,083,300	124,083,300	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	119,343,300	119,343,300	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	126,726,600	126,726,600	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	120,333,300	120,333,300	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	85,374,000	85,374,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2 Paket	2 Paket	918,131,203	884,531,203	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	426,213,352,827	474,189,648,206	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	773,718,678	654,878,678	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	152252 Orang	183.292 Orang	2,377,186,418	2,377,186,418	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4401 Orang	35.849 Orang	387,650,000	1,278,982,800	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	301,788,733	301,788,733	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	230,533,950	230,533,950	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	178,428,643	178,428,643	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	189,653,587	189,653,587	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	345,890,560	345,890,560	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	319,926,293	319,926,293	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	273,181,171	273,181,171	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	235,061,158	235,061,158	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	285,087,723	285,087,723	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	288,590,835	288,590,835	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	384,843,991	384,843,991	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	216,521,886	216,521,886	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	248,290,110	248,290,110	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	279,280,361	279,280,361	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	301,677,497	301,677,497	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	244,945,209	244,945,209	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	164,429,595	164,429,595	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	220,637,849	220,637,849	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	275,600,185	275,600,185	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	289,211,926	289,211,926	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	260,708,237	260,708,237	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	334,264,747	334,264,747	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	198,234,984	198,234,984	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	287,314,282	287,314,282	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	212,600,009	212,600,009	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	188,070,651	188,070,651	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	251,292,313	251,292,313	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	237,775,522	237,775,522	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	292,856,507	292,856,507	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	184,450,108	184,450,108	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	280,536,593	280,536,593	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	302,629,872	302,629,872	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	189,749,588	189,749,588	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	326,625,870	326,625,870	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	376,936,286	376,936,286	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	264,244,450	264,244,450	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	304,513,870	304,513,870	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	270,175,420	270,175,420	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	265,207,591	265,207,591	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	305,484,764	305,484,764	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	216,167,905	216,167,905	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	320,525,698	320,525,698	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	245,834,611	245,834,611	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	324,058,661	324,058,661	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	266,001,552	266,001,552	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	324,840,029	324,840,029	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	221,173,741	221,173,741	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	345,506,773	345,506,773	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	263,602,814	263,602,814	Puskesmas Sidoserma	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	276,126,515	276,126,515	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	416,092,859	416,092,859	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	202,274,345	202,274,345	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	396,566,126	396,566,126	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	193,037,330	193,037,330	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	270,967,758	270,967,758	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	252,921,911	252,921,911	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	314,152,265	314,152,265	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	150,035,811	150,035,811	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	250,956,082	250,956,082	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	237,789,151	237,789,151	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	233,919,611	233,919,611	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	271,444,304	271,444,304	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	354,331,222	354,331,222	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37187 Orang	36.818 Orang	110,000,000	110,000,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43532 Orang	43532 Orang	4,358,980,335	3,360,438,335	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	739 Orang	655 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	220 Orang	184 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	540 Orang	454 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	217 Orang	204 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	929 Orang	783 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	825 Orang	723 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	673 Orang	579 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	760 Orang	689 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1029 Orang	739 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	360 Orang	329 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1286 Orang	1085 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	670 Orang	575 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	595 Orang	513 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	969 Orang	779 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	813 Orang	702 Orang	56,628,000	56,628,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	277 Orang	247 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	295 Orang	251 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	819 Orang	424 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	846 Orang	637 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	853 Orang	745 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	577 Orang	545 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1109 Orang	1042 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	686 Orang	529 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	606 Orang	551 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	292 Orang	263 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	403 Orang	357 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	600 Orang	477 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	399 Orang	357 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	698 Orang	577 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	261 Orang	209 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	848 Orang	791 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	899 Orang	691 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	459 Orang	417 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1158 Orang	1069 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	821 Orang	768 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	616 Orang	524 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	844 Orang	809 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	755 Orang	526 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	533 Orang	455 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	415 Orang	370 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	610 Orang	534 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1078 Orang	974 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	642 Orang	547 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	784 Orang	679 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	536 Orang	464 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	703 Orang	549 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	455 Orang	412 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1347 Orang	1204 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	618 Orang	563 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	788 Orang	421 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1051 Orang	935 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	604 Orang	479 Orang	46,464,000	46,464,000	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1164 Orang	1080 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	245 Orang	231 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	586 Orang	377 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298 Orang	262 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	942 Orang	774 Orang	26,136,000	26,136,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	354 Orang	333 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	719 Orang	586 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	732 Orang	664 Orang	75,504,000	75,504,000	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	846 Orang	767 Orang	65,340,000	65,340,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	613 Orang	545 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1123 Orang	1020 Orang	23,232,000	23,232,000	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	397,000,000	698,362,203	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,210,000	3,210,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,880,000	2,880,000	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,140,000	4,140,000	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,980,000	1,980,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,570,000	3,570,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,470,000	1,470,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,070,000	2,070,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000	4,500,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,230,000	1,230,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,640,000	2,640,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,360,000	3,360,000	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,760,000	2,760,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,310,000	2,310,000	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,910,000	2,910,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,240,000	3,240,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,520,000	2,520,000	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,250,000	2,250,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,040,000	2,040,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,050,000	4,050,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	280,000	280,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,580,000	2,580,000	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10 Orang	10 Orang	27,000,000	30,541,506	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5552 Orang	5552 Orang	490,000,000	490,000,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	205 Orang	205 Orang	841,879,501	841,879,501	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	52741 Orang	49.962 Orang	455,082,498	455,082,498	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	666 Orang	666 Orang	977,288,400	977,288,400	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60512 Orang	60512 Orang	488,160,000	488,160,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	949 Orang	949 Orang	19,872,000	19,872,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	283 Orang	283 Orang	16,872,000	16,872,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	707 Orang	707 Orang	18,432,000	18,432,000	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	293 Orang	293 Orang	17,472,000	17,472,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1293 Orang	1293 Orang	16,362,000	16,362,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1179 Orang	1179 Orang	16,512,000	16,512,000	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	712 Orang	712 Orang	17,472,000	17,472,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1164 Orang	1164 Orang	23,472,000	23,472,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1216 Orang	1216 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	463 Orang	463 Orang	17,172,000	17,172,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1879 Orang	1879 Orang	21,672,000	21,672,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	887 Orang	887 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	834 Orang	834 Orang	16,632,000	16,632,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1203 Orang	1203 Orang	18,072,000	18,072,000	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1273 Orang	1273 Orang	18,672,000	18,672,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	423 Orang	423 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	354 Orang	354 Orang	19,872,000	19,872,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	917 Orang	917 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1067 Orang	1067 Orang	23,472,000	23,472,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1065 Orang	1065 Orang	17,172,000	17,172,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	847 Orang	847 Orang	17,172,000	17,172,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1514 Orang	1514 Orang	16,992,000	16,992,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	917 Orang	917 Orang	16,632,000	16,632,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	750 Orang	750 Orang	16,272,000	16,272,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	391 Orang	391 Orang	17,532,000	17,532,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	496 Orang	496 Orang	18,432,000	18,432,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	941 Orang	941 Orang	17,352,000	17,352,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	593 Orang	593 Orang	16,572,000	16,572,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1029 Orang	1029 Orang	16,272,000	16,272,000	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	298 Orang	298 Orang	23,472,000	23,472,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1163 Orang	1163 Orang	16,572,000	16,572,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1323 Orang	1323 Orang	21,660,000	21,660,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1010 Orang	1010 Orang	17,772,000	17,772,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1649 Orang	1649 Orang	20,592,000	20,592,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	932 Orang	932 Orang	19,872,000	19,872,000	Puskesmas Moro Krembangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	843 Orang	843 Orang	20,592,000	20,592,000	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1137 Orang	1137 Orang	21,072,000	21,072,000	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1268 Orang	1268 Orang	22,872,000	22,872,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	741 Orang	741 Orang	17,172,000	17,172,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	630 Orang	630 Orang	16,932,000	16,932,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	798 Orang	798 Orang	16,872,000	16,872,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1535 Orang	1535 Orang	18,432,000	18,432,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1115 Orang	1115 Orang	16,632,000	16,632,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	945 Orang	945 Orang	16,992,000	16,992,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1444 Orang	1444 Orang	18,072,000	18,072,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1127 Orang	1127 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	680 Orang	680 Orang	17,352,000	17,352,000	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1383 Orang	1383 Orang	16,272,000	16,272,000	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	840 Orang	840 Orang	16,872,000	16,872,000	Puskesmas Sidoserma	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1018 Orang	1018 Orang	12,800,000	12,800,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1246 Orang	1246 Orang	17,712,000	17,712,000	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	779 Orang	779 Orang	18,672,000	18,672,000	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1562 Orang	1562 Orang	9,220,000	9,220,000	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	354 Orang	354 Orang	19,872,000	19,872,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1148 Orang	1148 Orang	21,312,000	21,312,000	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	365 Orang	365 Orang	14,160,000	14,160,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1194 Orang	1194 Orang	17,472,000	17,472,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	552 Orang	552 Orang	16,572,000	16,572,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1176 Orang	1176 Orang	18,192,000	18,192,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1186 Orang	1186 Orang	17,352,000	17,352,000	Puskesmas Tenggiling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1196 Orang	1196 Orang	16,362,000	16,362,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	829 Orang	829 Orang	18,972,000	18,972,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1404 Orang	1404 Orang	17,772,000	17,772,000	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	337268 Orang	395.999 Orang	112,094,700	112,094,700	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5706 Orang	6824 Orang	1,200,000	1,200,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1656 Orang	2083 Orang	1,050,000	1,050,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3874 Orang	3604 Orang	1,260,000	1,260,000	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1608 Orang	2000 Orang	1,320,000	1,320,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6988 Orang	7979 Orang	1,140,000	1,140,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6896 Orang	8543 Orang	3,600,000	3,600,000	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4331 Orang	5487 Orang	1,350,000	1,350,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5976 Orang	6955 Orang	5,400,000	5,400,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6383 Orang	7536 Orang	2,580,000	2,580,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3074 Orang	3015 Orang	1,200,000	1,200,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10240 Orang	12175 Orang	1,140,000	1,140,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4690 Orang	5531 Orang	3,120,000	3,120,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4449 Orang	5137 Orang	1,920,000	1,920,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6652 Orang	8126 Orang	1,800,000	1,800,000	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6300 Orang	7201 Orang	2,280,000	2,280,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2299 Orang	2623 Orang	900,000	900,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2048 Orang	2422 Orang	1,170,000	1,170,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4565 Orang	5495 Orang	1,440,000	1,440,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5505 Orang	6713 Orang	1,620,000	1,620,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6006 Orang	7257 Orang	2,610,000	2,610,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4530 Orang	5344 Orang	660,000	660,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7997 Orang	10437 Orang	1,620,000	1,620,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5361 Orang	6549 Orang	1,620,000	1,620,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6861 Orang	5358 Orang	720,000	720,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2058 Orang	2443 Orang	2,520,000	2,520,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2626 Orang	3263 Orang	960,000	960,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4993 Orang	5709 Orang	2,460,000	2,460,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3397 Orang	4023 Orang	3,300,000	3,300,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5718 Orang	6906 Orang	2,700,000	2,700,000	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1631 Orang	1968 Orang	1,260,000	1,260,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6600 Orang	7609 Orang	1,680,000	1,680,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7453 Orang	9293 Orang	1,200,000	1,200,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5331 Orang	6272 Orang	3,600,000	3,600,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8294 Orang	9417 Orang	4,350,000	4,350,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5274 Orang	6399 Orang	1,020,000	1,020,000	Puskesmas Morokrembang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4483 Orang	5205 Orang	2,520,000	2,520,000	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5796 Orang	6458 Orang	2,040,000	2,040,000	Puskesmas Ngagel rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6772 Orang	7912 Orang	4,050,000	4,050,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3893 Orang	4387 Orang	1,260,000	1,260,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3698 Orang	4390 Orang	1,800,000	1,800,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4033 Orang	4788 Orang	2,760,000	2,760,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8285 Orang	9634 Orang	1,800,000	1,800,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5544 Orang	6235 Orang	1,680,000	1,680,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5372 Orang	6403 Orang	1,200,000	1,200,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7599 Orang	8737 Orang	3,240,000	3,240,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4170 Orang	4905 Orang	4,680,000	4,680,000	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5640 Orang	6358 Orang	2,160,000	2,160,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8152 Orang	10152 Orang	4,350,000	4,350,000	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4512 Orang	5325 Orang	2,040,000	2,040,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5973 Orang	6930 Orang	1,560,000	1,560,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7354 Orang	8881 Orang	1,890,000	1,890,000	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4285 Orang	5287 Orang	3,960,000	3,960,000	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8704 Orang	10233 Orang	300,000	300,000	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1832 Orang	2219 Orang	1,890,000	1,890,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2402 Orang	3102 Orang	1,320,000	1,320,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6072 Orang	6817 Orang	1,500,000	1,500,000	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7137 Orang	8919 Orang	1,800,000	1,800,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2687 Orang	3171 Orang	1,080,000	1,080,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6253 Orang	7174 Orang	2,070,000	2,070,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6257 Orang	7460 Orang	3,240,000	3,240,000	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6172 Orang	7404 Orang	3,600,000	3,600,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4345 Orang	5001 Orang	2,640,000	2,640,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8525 Orang	10113 Orang	3,060,000	3,060,000	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2034759 Orang	1.926.441 Orang	1,312,197,100	1,312,197,100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	104362 Orang	111.477 Orang	55,000,000	55,000,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	749560 Orang	246.179 Orang	133,000,000	184,736,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	461,000,000	366,935,744	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	184,850,060	184,850,060	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	107,873,000	141,473,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,974,000	2,974,000	Puskesmas Wonokusumo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,992,000	7,992,000	Puskesmas Asemrowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,914,000	2,914,000	Puskesmas Balas Klumprik	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,962,000	7,962,000	Puskesmas Balongsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,528,000	5,528,000	Puskesmas Bangkingan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,648,000	5,648,000	Puskesmas Banyu Urip	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11,416,000	11,416,000	Puskesmas Benowo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,394,000	3,394,000	Puskesmas Bulak Banteng	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,682,000	8,682,000	Puskesmas Dr. Soetomo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11,776,000	11,776,000	Puskesmas Dukuh Kupang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,704,000	2,704,000	Puskesmas Dupak	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,832,000	8,832,000	Puskesmas Gading	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,396,000	10,396,000	Puskesmas Gayungan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,408,000	5,408,000	Puskesmas Gundih	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,366,000	10,366,000	Puskesmas Gunung Anyar	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,142,000	8,142,000	Puskesmas Jagir	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,154,000	3,154,000	Puskesmas Jemursari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,008,000	6,008,000	Puskesmas Jeruk	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,682,000	8,682,000	Puskesmas Kalijudan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	480,000	480,000	Puskesmas Kalirungkut	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,456,000	10,456,000	Puskesmas Kebonsari	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,558,000	5,558,000	Puskesmas Kedungdoro	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11,716,000	11,716,000	Puskesmas Kedurus	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,096,000	10,096,000	Puskesmas Kenjeran	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,988,000	4,988,000	Puskesmas Keputih	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,988,000	4,988,000	Puskesmas Ketabang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,948,000	5,948,000	Puskesmas Klampis Ngasem	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,022,000	8,022,000	Puskesmas Krembangan Selatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,888,000	5,888,000	Puskesmas Lidah Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,148,000	7,148,000	Puskesmas Lontar	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,528,000	5,528,000	Puskesmas Made	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,752,000	7,752,000	Puskesmas Manukan Kulon	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,662,000	10,662,000	Puskesmas Medokan Ayu	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	9,582,000	9,582,000	Puskesmas Menur	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,442,000	8,442,000	Puskesmas Mojo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,364,000	3,364,000	Puskesmas Morokrembang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,782,000	7,782,000	Puskesmas Mulyorejo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,578,000	6,578,000	Puskesmas Ngagel Rejo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,468,000	8,468,000	Puskesmas Pacar Keling	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,854,000	2,854,000	Puskesmas Pakis	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,454,000	3,454,000	Puskesmas Pegirian	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,782,000	7,782,000	Puskesmas Peneleh	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,456,000	10,456,000	Puskesmas Perak Timur	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,202,000	8,202,000	Puskesmas Pucangsewu	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,034,000	3,034,000	Puskesmas Putat Jaya	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,782,000	7,782,000	Puskesmas Rangkah	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,668,000	6,668,000	Puskesmas Sawahan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,914,000	2,914,000	Puskesmas Sawah Pulo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	11,776,000	11,776,000	Puskesmas Sememi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,982,000	8,982,000	Puskesmas Sidosermo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	5,648,000	5,648,000	Puskesmas Sidotopo	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,874,000	3,874,000	Puskesmas Sidotopo Wetan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,728,000	6,728,000	Puskesmas Simolawang	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,842,000	7,842,000	Puskesmas Simomulyo	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,974,000	2,974,000	Puskesmas Siwalankerto	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,722,000	7,722,000	Puskesmas Tambakrejo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,994,000	3,994,000	Puskesmas Tambak Wedi	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	2,884,000	2,884,000	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,862,000	8,862,000	Puskesmas Tanjungsari	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,020,000	1,020,000	Puskesmas Tembok Dukuh	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	13,156,000	13,156,000	Puskesmas Tenggilis	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,932,000	7,932,000	Puskesmas Wiyung	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,214,000	3,214,000	Puskesmas Wonokromo	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12 Dokumen	12 Dokumen	38,400,060	38,400,060	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	123,973,202	123,973,202	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	63 Unit	63 Unit	844,297,979	725,875,079	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	188,665,593	126,700,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Unit	16 Unit	12,865,628,540	25,731,257,080	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	27,850,077,380	55,700,154,760	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	8 Unit	1,432,448,450	3,234,043,348	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar			Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	40,544,000,000	40,544,000,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	696,061,592	696,061,592	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17 Unit	17 Unit	78,963,400,706	78,963,400,706	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	165,472,000	165,472,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	73986 Peserta Didik	69.270 Peserta Didik	2,154,241,795	2,154,241,795	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 Paket	3 Paket	15,422,968,201	15,422,968,201	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	587 Satuan Pendidikan	593 Satuan Pendidikan	205,615,560,000	205,615,560,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3135 Orang	3135 Orang	931,055,139	2,531,055,139	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	85997 Peserta Didik	32.802 Peserta Didik	200,768,139,457	200,768,139,457	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	649 Satuan Pendidikan	649 Satuan Pendidikan	442,312,000	442,312,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155 Unit	155 Unit	14,669,209,802	14,251,780,816	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	4 Unit	85,180,409,700	82,787,093,475	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	257 Satuan Pendidikan	257 Satuan Pendidikan	204,122,500	204,122,500	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3,804,207,598	3,804,207,598	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	1,484,015,107	3,877,331,332	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	125,412,830,000	125,412,830,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1013 Orang	1013 Orang	776,799,715	1,511,799,715	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	38574 Peserta Didik	16.343 Peserta Didik	129,509,217,754	129,509,217,754	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	330 Satuan Pendidikan	34.706 Satuan Pendidikan	484,900,000	484,900,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18 Unit	18 Unit	11,980,865,199	11,977,124,962	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	763,111,640	683,189,432	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3 Paket	3 Paket	243,727,534	217,624,898	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2479 Satuan Pendidikan	2.245 Satuan Pendidikan	58,642,480,000	58,642,480,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3092 Orang	3092 Orang	5,017,055,500	2,682,055,500	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	209 Peserta Didik	209 Peserta Didik	5,165,801,252	5,160,817,691	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	88878 Satuan Pendidikan	88878 Satuan Pendidikan	93,362,428,100	93,362,428,100	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Unit	3 Unit	601,928,665	681,850,873	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	153 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	101,830,000	101,830,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	749,812,818	749,812,818	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	5,272,910,000	5,272,910,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250 Orang	250 Orang	76,703,075	76,703,075	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	7,698,601,817	8,425,183,274	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2812 Peserta Didik	86 Peserta Didik	123,953,980,640	123,953,980,640	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	212,700,000	212,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar									Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	129,917,102	129,917,102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	519,374,676	519,374,676	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189 Orang	189 Orang	1,735,842,000	1,735,842,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	478 Orang/bulan	77,005,757,162	89,055,615,502	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1,210,000,000	1,210,000,000	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar										
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	167,920,381,475	167,920,381,475	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	811 Orang/bulan	127,934,242,602	138,347,114,605	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1,798,494,436	1,608,000,000	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	295,816,171,975	295,816,171,975	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	12 Lembaga	12 Lembaga	520,963,363	414,116,240	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	dan pengentasan kemiskinan			Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	720 Orang	5,836,722,384	7,553,259,896	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	50 Perusahaan	287,688,800	277,960,320	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	2,491,634,196	3,121,227,633	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus/ma, gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	2,343,064,332	2,343,064,332	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	Meningkatnya peran pengurus/ma, gender, pemberdayaan serta	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	20 Organisasi	20 Organisasi	836,317,890	836,317,890	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Kesehatan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	perlindungan perempuan dan anak		Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota					serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus tua, gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1,161,548,051	1,201,350,885	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus, gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	1,732,692,713	1,909,174,970	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus, gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	297,127,666	327,286,453	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Layanan	2 Layanan	1,242,450,921	1,345,433,669	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	Meningkatnya peran pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan serta	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	150 Layanan	200 Layanan	219,415,300	219,415,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Kesehatan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	perlindungan perempuan dan anak		Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus tua, gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	150 Orang	200 Orang	1,060,968,761	1,180,071,364	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	36,212,400	36,212,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	70 Layanan	92,110,200	92,110,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas												
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya peran pengurus/ta'arufan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	70 Orang	1,029,562,113	1,103,530,446	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang	Meningkatnya peran pengurus/ta'arufan gender, pemberdayaan serta	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	446,232,527	465,866,125	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Kesehatan	didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	perlindungan perempuan dan anak		Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	342,244,200	339,980,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
disabilitas												
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Dokumen	12 Dokumen	342,244,200	339,980,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	5220 UMKM	5220 UMKM	6,575,613,433	7,308,693,171	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	4,295,244,125	5,378,938,790	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri												
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	136,965,000	136,965,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	821,790,231	661,106,672	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa	Pengentasan kemiskinan menuju	Pengentasan kemiskinan menuju	Meningkatnya nilai investasi yang	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2229 Orang	680 Orang	3,791,623,304	3,791,623,304	Dinas Sosial	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	keadilan dan kesejahteraan sosial	keadilan dan kesejahteraan sosial	berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	SOSIAL	Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	33723 Keluarga	25.901 Keluarga	26,291,553,140	20,767,452,444	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	92892 Orang	70.312 Orang	4,082,444,741	4,813,806,705	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33723 Keluarga	25.901 Keluarga	658,855,486	668,752,856	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000 Unit Rumah	1000 Unit Rumah	89,581,794,035	89,697,322,114	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	2 Dokumen	5,679,966,845	5,208,641,716	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3000 Unit	3000 Unit	64,141,775,197	62,428,408,019	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas	Perluasan	Perluasan	Tersedianya	PROGRAM	Penyediaan	Penyediaan	2500 Unit	2500 Unit	10,738,925,	10,076,042,	Dinas	Dinas

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			544	720	Perhubungan	Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9000 Unit	9000 Unit	23,817,407,874	22,465,767,488	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	102252 Unit	117.344 Unit	135,874,562,678	133,435,286,655	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 :	Perluasan lapangan	Perluasan lapangan	Tersedianya infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	12 Unit	12 Unit	16,991,017,589	16,074,351,876	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	sarana dan prasarana yang terintegrasi	RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penumpang Tipe C	Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					n	n
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	16,785,981,684	14,551,850,297	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33 Unit	33 Unit	7,637,808,345	7,200,696,214	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun	Perluasan lapangan pekerjaan	Perluasan lapangan pekerjaan	Tersedianya infrastruktur sarana dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Pelaksanaan Manajemen dan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	13 Laporan	5 Laporan	3,719,426,267	1,696,241,975	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	dan membangun keunggulan ekonomi	dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	prasarana yang terintegrasi	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	27,085,111,046	30,819,975,153	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	3,536,694,587	1,738,294,034	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa	Perluasan lapangan pekerjaan dan	Perluasan lapangan pekerjaan dan	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	72 Unit	167 Unit	173,420,423,867	169,998,104,772	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	membangun keunggulan ekonomi	membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	yang terintegrasi	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4 Dokumen	3,845,386,490	1,734,389,280	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi & Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	21,192,044,300	21,769,053,879	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi	Penyelenggaraan pemerintahan yang	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	12000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	622,579,489	652,974,369	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	kualitas pelayanan publik	efektif dan inovatif		secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	berusaha berbasis risiko					Terpadu Satu Pintu	Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	2,431,360,873	2,752,620,961	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	1,945,131,328	2,290,438,596	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	648,979,087	711,586,952	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	2,388,297,550	2,784,089,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	941,974,142	1,039,422,531	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
san korupsi dan narkoba												
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	834,790,582	913,608,848	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	13 Dokumen	506,324,333	558,676,052	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	292,739,607	302,551,655	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
dan pemberantasan korupsi dan narkoba												
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	1,583,640,180	1,653,281,286	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	118,497,024	118,497,024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	4 Dokumen	4 Dokumen	89,139,356	100,115,213	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba			dan pengentasan kemiskinan		pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	460,002,665	490,806,629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	182,076,962	182,076,962	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Pengawasan Penanaman Modal	2930 Kegiatan Usaha	2930 Kegiatan Usaha	566,868,618	628,401,946	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Anti Korupsi	publik	penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan		Daerah Kabupaten/Kota							
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	645,142,619	668,046,592	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Entitas	10 Entitas	5,157,181,716	1,391,048,000	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
yang adil dan makmur												
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12 Dokumen	12 Dokumen	1,682,444,409	1,270,406,422	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1670 Orang	1670 Orang	829,222,806	862,037,687	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
yang adil dan makmur												
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1650 Kawasan	1650 Kawasan	1,442,096,548	1,265,233,947	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	353,948,243	265,890,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
yang adil dan makmur												
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5 Unit	5 Unit	250,502,546	250,502,546	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12500 Orang	12500 Orang	20,231,579,183	22,364,156,767	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN MENJADI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
yang adil dan makmur												
Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	467 Orang	467 Orang	2,407,360,566	1,728,168,886	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5.2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025, mempertimbangkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya pada Perubahan RKPD Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail sebagaimana pada Tabel V.2.

Tabel V.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			31,552,058,372	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			32,857,145,419
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			31,552,058,372	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			32,857,145,419
5.03 KEPEGAWAIAN			26,738,570,569	5.03 KEPEGAWAIAN			28,042,996,660
5.03..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	19,138,517,150	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	20,364,847,822
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,235,803,099	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,697,172,769
5.03.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	17,235,803,099	5.03.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	18,697,172,769
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,309,162,249	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,113,662,189
5.03.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	28 Paket	1,309,162,249	5.03.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15 Paket	1,113,662,189

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Kantor	Disediakan							Kantor	Disediakan		
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	593,551,802					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	554,012,864
				5.03.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	593,551,802					5.03.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	554,012,864
				5.03..02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	7,600,053,419					5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	7,678,148,838
					Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	94%							Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	94%	
					Persentase pegawai yang disiplin	96.80%							Persentase pegawai yang disiplin	96.80%	
					Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	35.25%							Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	35.25%	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	93%	3,511,375,443					5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	93%	3,486,192,106
				5.03.02.2.01.000 2 Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	1 Dokumen	276,434,052					5.03.02.2.01.000 2 Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	1 Dokumen	286,246,100

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
						5.03.02.2.01.000 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	3,014,521,249						5.03.02.2.01.000 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2,979,525,864
						5.03.02.2.01.001 1 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	220,420,142						5.03.02.2.01.001 1 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	220,420,142
						5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	1,482,417,333						5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	1,591,017,306
						5.03.02.2.02.000 1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	488,580,935						5.03.02.2.02.000 1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	550,516,133
						5.03.02.2.02.000 2 Pengelolaan	Jumlah Pengelolaan	1 Dokumen	449,717,877						5.03.02.2.02.000 2 Pengelolaan	Jumlah Pengelolaan	1 Dokumen	424,582,652

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kenaikan Pangkat ASN	Kenaikan Pangkat ASN							Kenaikan Pangkat ASN	Kenaikan Pangkat ASN		
						5.03.02.2.02.000 3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	544,118,521					5.03.02.2.02.000 3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	615,918,521
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2,606,260,643					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2,600,939,426	
						Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis							Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis		
						Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis							Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis		
					5.03.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5502 Dokumen	707,278,632					5.03.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.660 Dokumen	703,611,367	
					5.03.02.2.04.000 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1,143,002,083					5.03.02.2.04.000 3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1,131,536,083	
					5.03.02.2.04.000 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	755,979,928					5.03.02.2.04.000 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	765,791,976	
		5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4,813,487,803			5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4,814,148,759	
			5.04..02 PROGRAM PENGEMBANGAN			Persentase pegawai yang	95.50%	4,813,487,803				5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN		Persentase pegawai yang	95.50%	4,814,148,759	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			SUMBER DAYA MANUSIA	pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning					SUMBER DAYA MANUSIA	pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning			
			5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	1,946,145,292			5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	1,951,674,272	
			5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	1,946,145,292			5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	1,951,674,272	
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi	168 orang	2,867,342,511			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi	168 orang	2,862,474,487	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Manajerial dan Fungsional	Manajerial dan Fungsional						Manajerial dan Fungsional	Manajerial dan Fungsional	
				5.04.02.2.02.000 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan					5.04.02.2.02.000 7 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan
						2,867,342,511							2,862,474,487
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						51,077,159,761	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						51,380,372,134
	8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					51,077,159,761		8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					51,380,372,134
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				51,077,159,761			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				51,380,372,134
		8.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,951,229,284			8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	14,380,023,454
		8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,114,908,801			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,423,459,221
		8.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	28 Orang/bulan	11,114,908,801			8.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	28 Orang/bulan	11,423,459,221

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Tunjangan ASN	Tunjangan ASN							Tunjangan ASN	Tunjangan ASN		
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	128,788,010					8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	112,625,830
				8.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	128,788,010					8.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	112,625,830
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,707,532,473					8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,843,938,403
				8.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,707,532,473					8.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,843,938,403
				8.01..02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	5,906,876,775					8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	5,906,876,775
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan	293 Lembaga	5,906,876,775					8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan	293 Lembaga	5,906,876,775

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	293 Orang	5,906,876,775				8.01.02.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	293 Orang	5,906,876,775
			8.01..03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	17,524,830,000				8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	17,440,330,000
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan	70 Lembaga	17,524,830,000				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan	70 Lembaga	17,440,330,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
					8.01.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	140 Orang	17,524,830,000					8.01.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	140 Orang	17,440,330,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			8.01..04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	84,368,000				8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	84,368,000
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	84,368,000					8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	84,368,000
					8.01.04.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2 Laporan	84,368,000						8.01.04.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2 Laporan	84,368,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah								Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
				8.01..05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	806,743,495					8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	806,743,495
					8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga	806,743,495						8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Lembaga	806,743,495
					8.01.05.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	690 Orang	806,743,495						8.01.05.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	690 Orang	806,743,495

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
				8.01..06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	12,803,112,207						8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	12,762,030,410			
					Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%								Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%				
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	12,803,112,207						8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembaga	12,762,030,410			
					Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan	17 Lembaga								Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan	17 Lembaga				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial								Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial		
				8.01.06.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	12,083,833,997					8.01.06.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	12,043,659,600
				8.01.06.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	44 Laporan	719,278,210					8.01.06.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	44 Laporan	718,370,810

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
Badan Penanggulangan Bencana Daerah										39,841,404,524		Badan Penanggulangan Bencana Daerah										41,549,068,053	
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									39,841,404,524			1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									41,549,068,053	
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								39,841,404,524				1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								41,549,068,053	
			1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan		94%		15,155,917,438					1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan		94%		15,675,115,907	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesekretariatan					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesekretariatan			
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,558,413,644			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,141,485,194	
			1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	11,558,413,644			1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	12,141,485,194	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,083,447,584			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	1,966,926,830	
			1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,083,447,584			1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1,966,926,830	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,514,056,210			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,566,703,883	
			1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,514,056,210			1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,566,703,883	
			1.05..03 PROGRAM PENANGGULANGAN	Persentase pengaduan	100%	24,685,487,086			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN	Persentase pengaduan	100%	25,873,952,146	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			BENCANA	kedaruratan yang direspon < 7 menit						BENCANA	kedaruratan yang direspon < 7 menit		
				Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%						Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	2,046,547,337				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	1,781,626,493
			1.05.03.2.02.001 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	250,502,546				1.05.03.2.02.001 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	250,502,546
			1.05.03.2.02.002 0 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki	31 Kawasan	353,948,243				1.05.03.2.02.002 0 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki	31 Kawasan	265,890,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana								mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		
				1.05.03.2.02.002	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1,442,096,548					1.05.03.2.02.002	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1,265,233,947
				1.05.03.2.03	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	22,638,939,749					1.05.03.2.03	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	24,092,325,653
				1.05.03.2.03.000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	20,231,579,183					1.05.03.2.03.000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	22,364,156,767
				1.05.03.2.03.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	467 Orang	2,407,360,566					1.05.03.2.03.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	467 Orang	1,728,168,886

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan																		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi						
						dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
Badan Pendapatan Daerah												66,065,248,193		Badan Pendapatan Daerah												73,104,216,798		
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									66,065,248,193			5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									73,104,216,798						
		5.02 KEUANGAN									66,065,248,193				5.02 KEUANGAN									73,104,216,798				
			5.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		93%		49,843,596,035					5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		93%		55,345,258,421				
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100%		40,663,545,609						5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100%		46,113,310,169			
						5.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		118 Orang/bulan		40,663,545,609							5.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		118 Orang/bulan		46,113,310,169	
					5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen		237,514,507						5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen		257,693,246			
						5.02.01.2.04.000 2 Analisa dan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta		2 Dokumen		237,514,507							5.02.01.2.04.000 2 Analisa dan				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta		2 Dokumen		257,693,246	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah								Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		
						5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8,942,535,919						5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8,974,255,006
						5.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,030,747,512						5.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,435,421,777
						5.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,911,788,407						5.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,538,833,229
						5.02..02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	368,298,641						5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	413,898,487
						5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	4 dokumen	368,298,641						5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	4 dokumen	413,898,487

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Perbendaharaan Daerah	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						Perbendaharaan Daerah	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
					5.02.02.2.02.000 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	368,298,641					5.02.02.2.02.000 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	413,898,487
				5.02..04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84%	15,853,353,517				5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84%	17,345,059,890		
					Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	71%							Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir		71%	
					Persentase tagihan	60%							Persentase tagihan		60%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					piutang pajak daerah yang terbayar								piutang pajak daerah yang terbayar		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	15,853,353,517					5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	17,345,059,890
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Dokumen					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen				
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan				
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		20211 Objek Pajak					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Objek Pajak				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 Laporan					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan				
				5.02.04.2.01.000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12 Laporan	5,841,162,888					5.02.04.2.01.000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12 Laporan	6,417,039,630

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pajak dan Wajib Pajak Daerah								Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
				5.02.04.2.01.000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Obyek Pajak	4,040,768,331					5.02.04.2.01.000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Obyek Pajak	4,517,150,441
				7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
				5.02.04.2.01.001	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,771,775,116					5.02.04.2.01.001	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,030,755,619
				1 Penagihan Pajak Daerah								1 Penagihan Pajak Daerah			
				5.02.04.2.01.001	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,887,838,420					5.02.04.2.01.001	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,047,959,409
				3 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								3 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
				5.02.04.2.01.001	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	311,808,762					5.02.04.2.01.001	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	332,154,791
				4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							322,072,635,013	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							267,605,447,930
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							322,072,635,013	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							267,605,447,930

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	5.02 KEUANGAN			322,072,635,013		5.02 KEUANGAN			267,605,447,930
	5.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	250,876,863,418		5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	114,316,742,120
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	243,658,664,475		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	107,114,201,983
	5.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	243,658,664,475		5.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	107,114,201,983
	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	140,224,080		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	125,885,760
	5.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	140,224,080		5.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	125,885,760
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan barang dan jasa	100%	2,880,882,923		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan barang dan jasa	100%	2,979,701,549

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerintahan Daerah	perkantoran						Pemerintahan Daerah	perkantoran			
					Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%							Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100%
				5.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	419,918,100				5.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	418,682,050	
				5.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,460,964,823				5.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,561,019,499	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	4,197,091,940				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	4,096,952,828	
				5.02.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2380 Unit	4,197,091,940				5.02.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.182 Unit	4,096,952,828	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Kendaraan Dinas Jabatan									Kendaraan Dinas Jabatan				
				5.02..02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	44,340,561,714					5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	125,028,379,170		
					5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	3,580,703,700						5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	3,635,954,721		
					5.02.02.2.01.000 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,230,976,000						5.02.02.2.01.000 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,230,976,000		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5.02.02.2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	321,125,920						5.02.02.2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	321,125,920
					5.02.02.2.01.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	759,023,324						5.02.02.2.01.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	711,540,963
					5.02.02.2.01.000 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,269,578,456						5.02.02.2.01.000 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,372,311,838
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan	99464 berkas	1,932,405,240						5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan	101.964 berkas	1,989,293,003

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					Pemberhentian Pembayaran yang dilayani								Pemberhentian Pembayaran yang dilayani						
					Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen							Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen					
				5.02.02.2.02.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	541,827,575					5.02.02.2.02.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	598,574,548				
				5.02.02.2.02.000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	99464 Dokumen	1,390,577,665					5.02.02.2.02.000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	101.964 Dokumen	1,390,718,455				
				5.02.02.2.03	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	1,327,452,774					5.02.02.2.03	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	1,327,558,139				
				5.02.02.2.03.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	24 Dokumen	1,327,452,774					5.02.02.2.03.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	24 Dokumen	1,327,558,139				

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD								Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	37,500,000, 000					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	118,075,573 ,307		
					Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%							Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%			
					5.02.02.2.04.000 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000					5.02.02.2.04.000 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	
					5.02.02.2.04.000 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	37,000,000, 000					5.02.02.2.04.000 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	117,575,573 ,307	
				5.02..03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	26,855,209, 881					5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	28,260,326, 640		
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	26,855,209, 881					5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	28,260,326, 640		
					Jumlah dokumen	30							Jumlah dokumen	30			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	Dokumen							sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	Dokumen	
				5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,207,685,046					5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,252,538,591
				5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,606,193,677					5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,594,952,516
				5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	17,652,981,053					5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	18,953,778,224
				5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	1,388,350,105					5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	1,459,057,309

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			43,474,596,001		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			44,193,464,902	
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			43,474,596,001		5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			44,193,464,902	
5.01 PERENCANAAN			37,918,763,112		5.01 PERENCANAAN			38,706,452,538	
5.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,62 %	30,021,852,191		5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,62 %	31,606,163,365	
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	282,328,000		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	184,600,000	
5.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	282,328,000		5.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	184,600,000	
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	25,544,049,011		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,173,306,591	
5.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	25,544,049,011		5.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	28,173,306,591	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4,195,475,180					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3,248,256,774
					5.01.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	819,444,919					5.01.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390,021,115
					5.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,376,030,261					5.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,858,235,659
				5.01..02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	2,469,108,977				5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	1,973,330,493		
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%						Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%			
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan	100%						Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan	100%			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					daerah								daerah		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	1,202,234,115					5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	7 dokumen	1,120,853,634
				5.01.02.2.01.000 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	1,202,234,115					5.01.02.2.01.000 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	1,120,853,634
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	724,979,118					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	439,997,115
				5.01.02.2.02.000 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	724,979,118					5.01.02.2.02.000 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	439,997,115

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	541,895,744					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	412,479,744	
					5.01.02.2.03.000 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	541,895,744					5.01.02.2.03.000 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	412,479,744	
					5.01..03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56 %	5,427,801,944					5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98,56 %	5,126,958,680	
					5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	2,009,005,965					5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	2,016,988,186	
					5.01.03.2.01.000 4 Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	2 Laporan	770,796,780					5.01.03.2.01.000 4 Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	2 Laporan	781,330,761	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan							Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
				5.01.03.2.01.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,238,209,185					5.01.03.2.01.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1,235,657,425
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	1,863,645,790					5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	1,651,847,059
				5.01.03.2.02.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	953,567,078					5.01.03.2.02.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	816,700,387

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah Bidang Perekonomian									Daerah Bidang Perekonomian			
					5.01.03.2.02.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	910,078,712						5.01.03.2.02.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	835,146,672
					5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	1,555,150,189						5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	1,458,123,435
					5.01.03.2.03.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	681,139,077						5.01.03.2.03.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	653,180,283
					5.01.03.2.03.000 8 Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 Laporan	874,011,112						5.01.03.2.03.000 8 Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 Laporan	804,943,152

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan							Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
		5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						5,555,832,889			5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						5,487,012,364
			5.05..02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	5,555,832,889			5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	5,487,012,364	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	5,555,832,889				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	5,487,012,364	
					5.05.02.2.04.000 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	4,460,423,181					5.05.02.2.04.000 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	4,425,246,483	
					5.05.02.2.04.000 3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	2 Laporan	1,095,409,708					5.05.02.2.04.000 3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	2 Laporan	1,061,765,881	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi		
					Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata									234,787,290,851		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata									200,231,209,347	
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								219,757,903,725			2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								186,139,533,555	
		2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							171,125,574,789				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							139,535,663,315	
			2.19..02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja		26%	52,504,284,751					2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja		26%	53,404,537,302		
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri				26%						Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri				26%					
		Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah				47,60 %						Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah				47,60 %					
			2.19.02.2.01 Penyadaran,			Jumlah Jenis Kegiatan		19 jenis	52,504,284,751					2.19.02.2.01 Penyadaran,		Jumlah Jenis Kegiatan		19 jenis	53,404,537,302		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera						Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasi swi Berprestasi	1 laporan						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasi swi Berprestasi	1 laporan			
					Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis						Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis			
					2.19.02.2.01.001 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	796,715,103					2.19.02.2.01.001 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	816,923,598
					2.19.02.2.01.001 2 Pemberian	Jumlah yang menerima	3500 Orang	49,244,078,153					2.19.02.2.01.001 2 Pemberian	Jumlah yang menerima	3500 Orang	50,205,290,871

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	penghargaan pemuda							Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	penghargaan pemuda			
					2.19.02.2.01.001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	457,168,462					2.19.02.2.01.001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan	498,247,870	
					2.19.02.2.01.001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	2,006,323,033					2.19.02.2.01.001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	1,884,074,963	
					2.19..03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	195 medali	118,621,290,038					2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	195 medali	86,131,126,013	
						Persentase Penambahan dan	27%								Persentase Penambahan dan		27%

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Fasilitas Olahraga								Peningkatan Fasilitas Olahraga		
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	7 kecamatan	39,828,095,003					2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	7 kecamatan	9,117,676,786
				2.19.03.2.01.000 5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	78 Unit	39,828,095,003					2.19.03.2.01.000 5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	78 Unit	9,117,676,786
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	50 cabang olahraga	52,787,142,762					2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	50 cabang olahraga	52,795,256,321

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Provinsi								Provinsi				
					2.19.03.2.03.000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	750 Orang	52,787,142,762					2.19.03.2.03.000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	750 Orang	52,795,256,321	
					2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	26,006,052,273					2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	24,218,192,906	
						Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	393 lokasi							Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	393 lokasi		
					2.19.03.2.05.000 7 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan	6,952,696,600					2.19.03.2.05.000 7 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Laporan	4,683,635,400	
					2.19.03.2.05.000 9 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	393 Unit	19,053,355,673					2.19.03.2.05.000 9 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	393 Unit	19,534,557,506	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
						pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan					
		2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						48,632,328,936			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							46,603,870,240		
			2.22..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	26,907,368,283			2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	25,811,402,822		
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24,476,111,238				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,881,832,648		
					2.22.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	24,476,111,238					2.22.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	23,881,832,648		
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2,431,257,045				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1,929,570,174		
							Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%									Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.		100%	
					2.22.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan	707,358,455					2.22.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan	342,010,307		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Kantor	Disediakan								Kantor	Disediakan				
					2.22.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,723,898,5 90						2.22.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,587,559,8 67		
			2.22..02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	90%	9,124,877,0 75			2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	90%	7,686,517,2 91			
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	470 kali	9,124,877,0 75				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	420 kali	7,686,517,2 91					
				2.22.02.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	9,124,877,0 75				2.22.02.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	7,686,517,2 91					
			2.22..03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	61,00 %	1,350,224,2 95			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	61,00 %	1,371,292,3 57			
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan	12 dokumen	1,350,224,2 95				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan	12 dokumen	1,371,292,3 57					

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pelatihan kesenian tradisional						Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pelatihan kesenian tradisional	
				2.22.03.2.01.000 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	934 Orang 1,350,224,295					2.22.03.2.01.000 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	934 Orang 1,371,292,357
				2.22..04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	78% 1,063,587,820					2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	78% 1,001,987,820
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali 1,063,587,820					2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali 1,001,987,820
				2.22.04.2.01.000 3 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen 1,063,587,820					2.22.04.2.01.000 3 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen 1,001,987,820
				2.22..05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 % 1,176,501,078					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92,04 % 1,244,272,701
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar	Jumlah cagar budaya yang	280 lokasi 1,176,501,078					2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar	Jumlah cagar budaya yang	280 lokasi 1,244,272,701

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian							Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian		
				2.22.05.2.02.000 1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	280 Objek	1,176,501,078					2.22.05.2.02.000 1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	280 Objek	1,244,272,701
				2.22..06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	9,009,770,385					2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	9,488,397,249
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	9,009,770,385					2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	9,488,397,249
				2.22.06.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	450,849,060					2.22.06.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	450,849,060
				2.22.06.2.01.000 3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	813,648,000					2.22.06.2.01.000 3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	813,648,000
				2.22.06.2.01.000 4 Penyediaan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang	2 Unit	235,502,940					2.22.06.2.01.000 4 Penyediaan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang	2 Unit	235,502,940

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedia dan Terpelihara								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedia dan Terpelihara		
					2.22.06.2.01.000 5 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	7,509,770,385						2.22.06.2.01.000 5 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	7,988,397,249
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								15,029,387,126	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								14,091,675,792
		3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						15,029,387,126			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14,091,675,792
			3.26..02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	64,28 %	7,571,916,547				3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	64,28 %	7,395,624,626
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	6,592,255,696					3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	6,559,217,423
					3.26.02.2.01.000 5 Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	6,592,255,696						3.26.02.2.01.000 5 Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	6,559,217,423

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi	979,660,851					3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 lokasi	836,407,203
					3.26.02.2.03.000 2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	198,600,000					3.26.02.2.03.000 2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	131,000,000
					3.26.02.2.03.000 3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	606,299,401					3.26.02.2.03.000 3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	590,522,253
					3.26.02.2.03.001 0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	174,761,450					3.26.02.2.03.001 0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	114,884,950
					3.26..03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek	45%	5,278,867,590					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek	45%	4,679,936,927

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					wisata									wisata			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	5,278,867,590						3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	4,679,936,927	
				3.26.03.2.01.000 6 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	5,278,867,590						3.26.03.2.01.000 6 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	4,679,936,927	
				3.26..05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%	2,178,602,989						3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	100%	2,016,114,239	
					Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	26%								Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	26%		
					Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang	80%								Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang	80%		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					dilaksanakan 20 kesepakatan								dilaksanakan 20 kesepakatan						
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	621,701,142					3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	581,264,987				
					Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat	1 laporan							Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat	1 laporan					
				3.26.05.2.01.000 8 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang	327,333,041					3.26.05.2.01.000 8 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80 Orang	326,628,983				
				3.26.05.2.01.000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	300 Orang	294,368,101					3.26.05.2.01.000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	300 Orang	254,636,004				
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk	1,556,901,847					3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	5 Produk	1,434,849,252				

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			3.26.05.2.02.000 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
			220 Orang				220 Orang
			1,556,901,8 47				1,434,849,2 52
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
63,703,685, 556				61,500,488, 274			
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
63,703,685, 556				61,500,488, 274			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
63,703,685, 556				61,500,488, 274			
2.12..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
54,443,311, 723				51,128,336, 000			
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan			
87.13%				87.13%			
Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun				Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun			
2 jenis				2 jenis			
15,995,090				15,995,090			
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
8 Dokumen				9 Dokumen			
15,995,090				15,995,090			
2.12.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen				2.12.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Perencanaan Perangkat Daerah									Perencanaan Perangkat Daerah			
						2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	45,103,256,809						2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	42,090,517,329
						2.12.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan	45,103,256,809						2.12.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan	42,090,517,329
						2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	6,332,466,238						2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	6,332,466,238
						2.12.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,332,466,238						2.12.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,332,466,238
						2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,991,593,586						2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,689,357,343
						2.12.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	2,991,593,586						2.12.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	2,689,357,343

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Disediakan							Disediakan		
				2.12..02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95% 3,330,271,692					2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95% 3,823,511,861
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas 2,388,297,550					2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas 2,784,089,330
				2.12.02.2.01.000 2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen 2,388,297,550					2.12.02.2.01.000 2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen 2,784,089,330
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas 941,974,142					2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas 1,039,422,531
				2.12.02.2.03.000 2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	12 Dokumen 941,974,142					2.12.02.2.03.000 2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	12 Dokumen 1,039,422,531

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penduduk	Penduduk						Penduduk	Penduduk	
				2.12..03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95% 2,594,110,415					2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95% 3,002,025,548
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas 1,945,131,328					2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas 2,290,438,596
				2.12.03.2.01.000 1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen 1,945,131,328					2.12.03.2.01.000 1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen 2,290,438,596
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas 648,979,087					2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas 711,586,952
				2.12.03.2.02.000 4 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan	12 Laporan 648,979,087					2.12.03.2.02.000 4 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan	12 Laporan 711,586,952

Sebelum Perubahan									Setelah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
					Pencatatan Sipil	Sipil									Pencatatan Sipil	Sipil			
					2.12..04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT		74%	3,217,494,702						2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT		74%	3,428,117,841
						Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama		80%								Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama		80%	
						Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan		98%								Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan		98%	
					2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi		48000 data	834,790,582						2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi		48000 data	913,608,848
					2.12.04.2.01.000 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		2 Dokumen	834,790,582						2.12.04.2.01.000 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		2 Dokumen	913,608,848
					2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		5 Lembaga	799,063,940						2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		13 Lembaga	861,227,707

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Kependudukan								Kependudukan			
					2.12.04.2.03.000 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	292,739,607					2.12.04.2.03.000 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	302,551,655
					2.12.04.2.03.000 6 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	506,324,333					2.12.04.2.03.000 6 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	13 Dokumen	558,676,052
					2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	1,583,640,180					2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	1,653,281,286
					2.12.04.2.04.000 1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1,583,640,180					2.12.04.2.04.000 1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	1,653,281,286
					2.12..05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil	100%	118,497,024					2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil	100%	118,497,024

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						kependudukan									kependudukan		
					2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	118,497,024						2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	118,497,024
					2.12.05.2.01.000 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	118,497,024						2.12.05.2.01.000 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	118,497,024
Dinas Kesehatan								1,836,381,207,395	Dinas Kesehatan								1,752,905,830,638
		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,836,381,207,395			1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,752,905,830,638
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,836,381,207,395			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,752,905,830,638
					1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	907,798,799,308						1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	775,111,196,626
					1.02.01.2.02 Administrasi	Persentase ketepatan waktu	100%	627,838,694,206						1.02.01.2.02 Administrasi	Persentase ketepatan waktu	100%	486,695,178,525

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Kuangan Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN							Kuangan Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
				1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	627,838,694 ,206					1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	486,695,178 ,525
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	766,867,585					1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	1,023,931,840
				1.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	766,867,585					1.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1,023,931,840
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	102,615,612,317					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	110,814,461,061
				1.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102,615,612,317					1.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110,814,461,061
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional	3 jenis	176,577,625,200					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional	3 jenis	176,577,625,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi								pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi		
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,717,614,233					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,717,614,233
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,756,990,622					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,756,990,622
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,684,703,730					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,684,703,730
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,037,738,783					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,037,738,783
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,272,143,408					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,272,143,408
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	3,160,404,004					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	3,160,404,004

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan							Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan	
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,990,265,4 48						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,990,265,4 48
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,609,702,4 20						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,609,702,4 20
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,991,812,4 51						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,991,812,4 51
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,573,860,5 29						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,573,860,5 29
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,642,281,0 24						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,642,281,0 24
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,936,184,1 52						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,936,184,1 52
					1.02.01.2.10.000	Jumlah BLUD yang	1 Unit 5,719,801,1						1.02.01.2.10.000	Jumlah BLUD yang	1 Unit 5,719,801,1

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja 76						1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja 76
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,384,498,8 26						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,384,498,8 26
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,565,216,9 64						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,565,216,9 64
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,166,092,3 80						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,166,092,3 80
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,728,345,5 20						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,728,345,5 20
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,760,034,6 64						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,760,034,6 64
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,708,872,2 57						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,708,872,2 57

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Pelayanan				Pelayanan		
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,665,073,401	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,665,073,401
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,942,852,342	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,942,852,342
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,006,513,771	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,006,513,771
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,517,207,882	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,517,207,882
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,663,819,910	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,663,819,910
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,230,196,305	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,230,196,305
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2,306,442,453	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2,306,442,453

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,900,078,876						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,900,078,876
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,750,000,000						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,750,000,000
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,581,665,737						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,581,665,737
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,180,622,429						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,180,622,429
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,819,683,787						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,819,683,787
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,204,643,421						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,204,643,421

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,484,439,0 36	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,484,439,0 36
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,504,209,4 95	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,504,209,4 95
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,005,692,5 14	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,005,692,5 14
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,509,996,3 35	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,509,996,3 35
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,183,303,9 84	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,183,303,9 84
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,655,518,7 36	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,655,518,7 36
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1,428,301,3 67	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1,428,301,3 67

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan							Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan	
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,894,812,4 42						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,894,812,4 42
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,429,504,7 58						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,429,504,7 58
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,559,132,7 79						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,559,132,7 79
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,389,161,2 42						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,389,161,2 42
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,597,120,2 61						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,597,120,2 61
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,431,686,5 83						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,431,686,5 83
					1.02.01.2.10.000	Jumlah BLUD yang	1 Unit 1,928,075,6						1.02.01.2.10.000	Jumlah BLUD yang	1 Unit 1,928,075,6

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja 57						1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja 57
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,671,107,6 48						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,671,107,6 48
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,337,943,1 85						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,337,943,1 85
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,085,556,4 58						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 4,085,556,4 58
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,489,719,2 95						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,489,719,2 95
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,865,399,1 60						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,865,399,1 60
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja 1,390,202,2 18						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja 1,390,202,2 18

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Pelayanan				Pelayanan		
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,047,098,3 71	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,047,098,3 71
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,005,866,1 13	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,005,866,1 13
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,013,238,7 35	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,013,238,7 35
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,281,488,6 04	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,281,488,6 04
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,077,034,8 62	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,077,034,8 62
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,036,553,9 67	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,036,553,9 67
1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1,455,538,1 19	1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1,455,538,1 19

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,714,757,061						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 1,714,757,061
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,504,967,736						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,504,967,736
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,176,249,491						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,176,249,491
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,686,509,812						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 3,686,509,812
					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,562,076,271						1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 2,562,076,271
					1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100% 924,671,928,105						1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100% 973,884,154,030

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06 %				MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,06 %		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,60 %					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,60 %		
				Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,20 %					Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,20 %		
				Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%					Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%		
				Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	82,54 %					Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	82,54 %		
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%					Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%		
				Persentase Jaminan Kesehatan	97,60 %					Persentase Jaminan Kesehatan	97,60 %		
				Persentase	100%					Persentase	100%		

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan			
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%		
				Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%					Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%		
				Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	58%					Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	58%		
				Persentase Rumah Sehat	88,21 %					Persentase Rumah Sehat	88,21 %		
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%					Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%		
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,101 %					Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,101 %		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	404,012,759,404				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	408,036,759,404

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit					Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 unit		
					Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen						Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen		
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit						Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit		
				1.02.02.2.01.000 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	353,443,209,832					1.02.02.2.01.000 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	352,912,809,832
				1.02.02.2.01.000 2 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10,000,000,000					1.02.02.2.01.000 2 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	14,730,400,000
				1.02.02.2.01.000 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	71,200,000					1.02.02.2.01.000 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	71,200,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				1.02.02.2.01.000 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	8,139,036,013					1.02.02.2.01.000 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	6,872,001,004
				1.02.02.2.01.001 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	250,000,000					1.02.02.2.01.001 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1,341,035,009
				1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	4,244,536,173					1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	4,244,536,173
				1.02.02.2.01.002 0 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4,194,182,173					1.02.02.2.01.002 0 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	4,194,182,173
				1.02.02.2.01.002 3 Pengadaan	Jumlah Obat, Bahan Habis	2 Paket	23,670,595,213					1.02.02.2.01.002 3 Pengadaan	Jumlah Obat, Bahan Habis	5 Paket	23,670,595,213

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	519,502,231,927					1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	564,870,846,345		
				Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan						Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan					
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas					
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	63 Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	63 Puskesmas					

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pelayanan kesehatan lingkungan							pelayanan kesehatan lingkungan			
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas		
					Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi						Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi		
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas		
					Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa						Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa		
					Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	70 Dokumen						Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	63 Dokumen		
					Jumlah kegiatan	4 kegiatan						Jumlah kegiatan	4 kegiatan		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi			
					operasional pelayanan di Puskesmas										operasional pelayanan di Puskesmas						
					Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas									Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas					
					Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan									Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan					
					Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan									Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan					
					Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan									Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan					
					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan									Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan					
					Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan	3 kegiatan									Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan	3 kegiatan					

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Penyakit Menular di puskesmas									Penyakit Menular di puskesmas			
						Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan								Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	929 Orang	46,464,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	783 Orang	46,464,000	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	65,340,000	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	454 Orang	65,340,000	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	65,340,000	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	65,340,000	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			606 Orang				551 Orang
			46,464,000				46,464,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			969 Orang				779 Orang
			75,504,000				75,504,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			604 Orang				479 Orang
			46,464,000				46,464,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			217 Orang				204 Orang
			46,464,000				46,464,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			755 Orang				526 Orang
			46,464,000				46,464,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			1164 Orang				1080 Orang
			65,340,000				65,340,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			403 Orang				357 Orang
			46,464,000				46,464,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Sesuai Standar							Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Sesuai Standar	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang 75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	529 Orang 75,504,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang 23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang 23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang 65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang 65,340,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	732 Orang 75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	664 Orang 75,504,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	415 Orang 23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang 23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang 65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 Orang 65,340,000
					1.02.02.2.02.000	Jumlah Ibu Hamil	821 23,232,000						1.02.02.2.02.000	Jumlah Ibu Hamil	768 23,232,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang							1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575 Orang	75,504,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	788 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	46,464,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1123 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1020 Orang	23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	46,464,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	642 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	547 Orang	65,340,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Hamil	Standar								Hamil	Standar		
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	23,232,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1347 Orang	75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1204 Orang	75,504,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang	75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	723 Orang	75,504,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	942 Orang	26,136,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	774 Orang	26,136,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1158 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1069 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	477 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	354 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	333 Orang	65,340,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262 Orang	23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	464 Orang	65,340,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	853 Orang	75,504,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	75,504,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	524 Orang	65,340,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	46,464,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	23,232,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			43532 Orang				43532 Orang
			4,358,980,3 35				3,360,438,3 35
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			1078 Orang				974 Orang
			75,504,000				75,504,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			1109 Orang				1042 Orang
			75,504,000				75,504,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			1029 Orang				739 Orang
			75,504,000				75,504,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			610 Orang				534 Orang
			65,340,000				65,340,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			784 Orang				679 Orang
			23,232,000				23,232,000
			1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan				1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan
			399 Orang				357 Orang
			46,464,000				46,464,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Sesuai Standar							Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1286 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1085 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	813 Orang	56,628,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	702 Orang	56,628,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	23,232,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	23,232,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	46,464,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	513 Orang	46,464,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	563 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	65,340,000					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000	Jumlah Ibu Hamil	739	65,340,000					1.02.02.2.02.000	Jumlah Ibu Hamil	655	65,340,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang							1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	846 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	767 Orang	65,340,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	417 Orang	65,340,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang	46,464,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	23,232,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263 Orang	46,464,000
					1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	577 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	545 Orang	46,464,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Hamil	Standar								Hamil	Standar		
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	673 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579 Orang	23,232,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	23,232,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	703 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	46,464,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang	65,340,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	791 Orang	65,340,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	46,464,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	809 Orang	46,464,000
						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	533 Orang	23,232,000						1.02.02.2.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	455 Orang	23,232,000
						1.02.02.2.02.000 2 Pengelolaan	Jumlah Ibu Bersalin yang	37187 Orang	110,000,000						1.02.02.2.02.000 2 Pengelolaan	Jumlah Ibu Bersalin yang	36.818 Orang	110,000,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.000 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4401 Orang	387,650,000						1.02.02.2.02.000 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.849 Orang	1,278,982,800
						1.02.02.2.02.000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152252 Orang	2,377,186,418						1.02.02.2.02.000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183.292 Orang	2,377,186,418
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8152 Orang	4,350,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10152 Orang	4,350,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3074 Orang	1,200,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3015 Orang	1,200,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8294 Orang	4,350,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9417 Orang	4,350,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5796 Orang	2,040,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4530 Orang	660,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3397 Orang	3,300,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8704 Orang	300,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1631 Orang	1,260,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	6652 Orang	1,800,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1968 Orang	1,260,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8126 Orang	1,800,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar								Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7997 Orang	1,620,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10437 Orang	1,620,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4483 Orang	2,520,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5205 Orang	2,520,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6896 Orang	3,600,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8543 Orang	3,600,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5274 Orang	1,020,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6399 Orang	1,020,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4331 Orang	1,350,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5487 Orang	1,350,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			6072 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			1,500,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			4690 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			3,120,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			3874 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			1,260,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			5505 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			1,620,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			4345 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			2,640,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			2058 Orang				1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan
			2,520,000				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar								Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar		
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3893 Orang	1,260,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4387 Orang	1,260,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5706 Orang	1,200,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6824 Orang	1,200,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6300 Orang	2,280,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7201 Orang	2,280,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4033 Orang	2,760,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4788 Orang	2,760,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2626 Orang	960,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3263 Orang	960,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			4449 Orang				5137 Orang
			1,920,000				1,920,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			2048 Orang				2422 Orang
			1,170,000				1,170,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			4285 Orang				5287 Orang
			3,960,000				3,960,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			1608 Orang				2000 Orang
			1,320,000				1,320,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			7599 Orang				8737 Orang
			3,240,000				3,240,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat
			1656 Orang				2083 Orang
			1,050,000				1,050,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar							Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar		
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4170 Orang	4,680,000					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4905 Orang	4,680,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5640 Orang	2,160,000					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6358 Orang	2,160,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2299 Orang	900,000					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2623 Orang	900,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2687 Orang	1,080,000					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3171 Orang	1,080,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6861 Orang	720,000					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5358 Orang	720,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5718 Orang	2,700,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5544 Orang	1,680,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	8285 Orang	1,800,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4993 Orang	2,460,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4565 Orang	1,440,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	6253 Orang	2,070,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5709 Orang	2,460,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5495 Orang	1,440,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat	7174 Orang	2,070,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar								Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar		
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7453 Orang	1,200,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9293 Orang	1,200,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6772 Orang	4,050,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7912 Orang	4,050,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5361 Orang	1,620,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6549 Orang	1,620,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5372 Orang	1,200,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6403 Orang	1,200,000
						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6600 Orang	1,680,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7609 Orang	1,680,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			6172 Orang				7404 Orang
			3,600,000				3,600,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			6257 Orang				7460 Orang
			3,240,000				3,240,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			7137 Orang				8919 Orang
			1,800,000				1,800,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			8525 Orang				10113 Orang
			3,060,000				3,060,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
			2402 Orang				3102 Orang
			1,320,000				1,320,000
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat
			5976 Orang				6955 Orang
			5,400,000				5,400,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar								Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	pelayanan kesehatan sesuai standar		
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10240 Orang	1,140,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	12175 Orang	1,140,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5331 Orang	3,600,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6272 Orang	3,600,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5973 Orang	1,560,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6930 Orang	1,560,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3698 Orang	1,800,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4390 Orang	1,800,000
					1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6988 Orang	1,140,000						1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7979 Orang	1,140,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1832 Orang	1,890,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7354 Orang	1,890,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6383 Orang	2,580,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	6006 Orang	2,610,000	
			1.02.02.2.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4512 Orang	2,040,000	
			1.02.02.2.02.000 6 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	2034759 Orang	1,312,197,1 00	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337268 Orang	112,094,700						1.02.02.2.02.000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	395.999 Orang	112,094,700
						1.02.02.2.02.000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749560 Orang	133,000,000						1.02.02.2.02.000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.179 Orang	184,736,000
						1.02.02.2.02.000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104362 Orang	55,000,000						1.02.02.2.02.000 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111.477 Orang	55,000,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	3,060,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	69 Orang	3,060,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	74 Orang	4,140,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	74 Orang	4,140,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Gangguan Jiwa Berat	Jiwa Berat Sesuai Standar								Gangguan Jiwa Berat	Jiwa Berat Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	4,500,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	4,500,000
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	1,800,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	1,800,000
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	7,020,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	7,020,000
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	1,815,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97 Orang	1,815,000
						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	28 Orang	1,800,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	28 Orang	1,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	2,160,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang	2,160,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	3,240,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	3,240,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111 Orang	3,060,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111 Orang	3,060,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	1,980,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	1,980,000
						1.02.02.2.02.001	Jumlah Orang	50 Orang	1.440.000						1.02.02.2.02.001	Jumlah Orang	50 Orang	1.440.000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	3,960,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	3,960,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	5,040,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	5,040,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	3,600,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	3,600,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	100 Orang	6,300,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	100 Orang	6,300,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Berat	Standar								Berat	Standar		
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	1,800,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	1,800,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5552 Orang	490,000,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5552 Orang	490,000,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	3,600,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	3,600,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	4,140,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	4,140,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	77 Orang	1,710,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	77 Orang	1,710,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								dengan Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	2,700,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	2,700,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	6,660,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	6,660,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2,700,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	2,700,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	2,430,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	2,430,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	172 Orang	3,510,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	172 Orang	3,510,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	1,980,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	1,980,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	1,980,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	1,980,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143 Orang	3,240,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143 Orang	3,240,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	2,520,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	2,520,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	2,340,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	2,340,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	4,320,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	4,320,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	2,880,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	2,880,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	2,700,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	2,700,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	148 Orang	6,660,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	148 Orang	6,660,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Gangguan Jiwa Berat	Jiwa Berat Sesuai Standar								Gangguan Jiwa Berat	Jiwa Berat Sesuai Standar		
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	4,500,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	4,500,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	3,600,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	3,600,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5,580,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5,580,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	5,580,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	5,580,000
						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	110 Orang	2,160,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	110 Orang	2,160,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	2,340,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	2,340,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	5,040,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	5,040,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	3,960,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	3,960,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	2,160,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	2,160,000
					1.02.02.2.02.001	Jumlah Orang	152	6.660.000						1.02.02.2.02.001	Jumlah Orang	152	6.660.000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang							0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	97 Orang	3,420,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	97 Orang	3,420,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	61 Orang	3,420,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	61 Orang	3,420,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	112 Orang	5,040,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	112 Orang	5,040,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	105 Orang	2,880,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	105 Orang	2,880,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Berat	Standar								Berat	Standar		
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66 Orang	3,060,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66 Orang	3,060,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	2,340,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	2,340,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	3,060,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	3,060,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	5,400,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	5,400,000
					1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	102 Orang	5,760,000						1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	102 Orang	5,760,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							dengan Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	5,040,000					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88 Orang	5,040,000	
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	3,600,000					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	3,600,000	
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	4,500,000					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	4,500,000	
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138 Orang	5,940,000					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138 Orang	5,940,000	
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	132 Orang	7,380,000					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	132 Orang	7,380,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	135 Orang	7,020,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	135 Orang	7,020,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	4,860,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	4,860,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	5,940,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	5,940,000
					1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	3,960,000						1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	3,960,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	5,940,000	1.02.02.2.02.001 0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	5,940,000
1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	18,432,000	1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1535 Orang	18,432,000
1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	21,312,000	1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 Orang	21,312,000
1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	19,872,000	1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 Orang	19,872,000
1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	488,160,000	1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60512 Orang	488,160,000
1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1164 Orang	23,472,000	1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1164 Orang	23,472,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	16,632,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 Orang	16,632,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	16,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 Orang	16,872,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	17,472,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	17,472,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang	18,432,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 Orang	18,432,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 Orang	17,712,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Tuberkulosis	Standar								Tuberkulosis	Standar		
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang	16,992,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	945 Orang	16,992,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	17,472,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712 Orang	17,472,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	18,972,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 Orang	18,972,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	16,362,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 Orang	16,362,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 Orang	17,712,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1115 Orang	16,632,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1115 Orang	16,632,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang	16,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 Orang	16,872,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	23,472,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 Orang	23,472,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	17,712,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	16,992,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 Orang	16,992,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	19,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 Orang	19,872,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Tuberkulosis	Standar								Tuberkulosis	Standar		
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	16,632,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	16,632,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	21,072,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1137 Orang	21,072,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	18,672,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 Orang	18,672,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	17,352,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 Orang	17,352,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	18,432,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 Orang	18,432,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	391 Orang	17,532,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	391 Orang	17,532,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	16,362,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1196 Orang	16,362,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	17,472,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1194 Orang	17,472,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	14,160,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	14,160,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	22,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	22,872,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1127 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	1127 Orang	17,712,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tuberkulosis	Standar								Tuberkulosis	Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	18,672,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 Orang	18,672,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	17,772,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1010 Orang	17,772,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	17,772,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1404 Orang	17,772,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	16,572,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 Orang	16,572,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	18,192,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1176 Orang	18,192,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	843 Orang	20,592,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	843 Orang	20,592,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	17,172,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 Orang	17,172,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang	23,472,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 Orang	23,472,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	18,072,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1444 Orang	18,072,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	16,572,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 Orang	16,572,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang	17,712,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Tuberkulosis	Standar								Tuberkulosis	Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang	16,512,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1179 Orang	16,512,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	17,172,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	17,172,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	20,592,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1649 Orang	20,592,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	16,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	16,872,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	17,172,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 Orang	17,172,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1323 Orang	21,660,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1323 Orang	21,660,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	21,672,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1879 Orang	21,672,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang	16,572,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 Orang	16,572,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	19,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	19,872,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	17,712,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1246 Orang	17,712,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	12,800,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1018 Orang	12,800,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Tuberkulosis	Standar								Tuberkulosis	Standar		
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	16,932,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 Orang	16,932,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	16,272,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 Orang	16,272,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	17,352,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	17,352,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	16,272,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 Orang	16,272,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	19,872,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 Orang	19,872,000
						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1562 Orang	9,220,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1562 Orang	9,220,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	16,272,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1383 Orang	16,272,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	17,172,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 Orang	17,172,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang	17,352,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 Orang	17,352,000
					1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	18,072,000						1.02.02.2.02.001 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 Orang	18,072,000
					1.02.02.2.02.001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	52741 Orang	455,082,498						1.02.02.2.02.001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	49.962 Orang	455,082,498

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Terinfeksi HIV	Standar								Terinfeksi HIV	Standar		
						1.02.02.2.02.001 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	773,718,678						1.02.02.2.02.001 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	654,878,678
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	150,035,811						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	150,035,811
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	304,513,870						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	304,513,870
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	198,234,984						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	198,234,984
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275,600,185						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275,600,185
						1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	188,070,651						1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	188,070,651

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen							5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	396,566,126						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	396,566,126
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164,429,595						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	164,429,595
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	301,788,733						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	301,788,733
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	250,956,082						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	250,956,082
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	233,919,611						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	233,919,611
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	12 Dokumen	376,936,286						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	12 Dokumen	376,936,286

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Masyarakat	Masyarakat								Masyarakat	Masyarakat		
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	264,244,450						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	264,244,450
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	302,629,872						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	302,629,872
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	314,152,265						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	314,152,265
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	326,625,870						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	326,625,870
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	216,167,905						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	216,167,905
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	320,525,698						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	320,525,698
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	324,058,661						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	324,058,661

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	266,001,552						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	266,001,552
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	288,590,835						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	288,590,835
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	305,484,764						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	305,484,764
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212,600,009						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212,600,009
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	260,708,237						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	260,708,237
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	324,840,029						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	324,840,029

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	263,602,814						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	263,602,814
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	202,274,345						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	202,274,345
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	270,967,758						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	270,967,758
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	276,126,515						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	276,126,515
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	216,521,886						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	216,521,886
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	416,092,859						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	416,092,859
					1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	235,061,158						1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	235,061,158

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan Gizi Masyarakat							Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan Gizi Masyarakat		
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	345,506,773					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	345,506,773
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	245,834,611					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	245,834,611
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184,450,108					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	184,450,108
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178,428,643					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	178,428,643
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	280,536,593					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	280,536,593
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	319,926,293					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	319,926,293
						1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	384,843,991					1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	384,843,991

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen								5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	193,037,330							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	193,037,330
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	345,890,560							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	345,890,560
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	252,921,911							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	252,921,911
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	248,290,110							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	248,290,110
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	237,789,151							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	237,789,151
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	12 Dokumen	237,775,522							1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	12 Dokumen	237,775,522

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat	Masyarakat								Masyarakat	Masyarakat		
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	189,653,587						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	189,653,587
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	220,637,849						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	220,637,849
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	334,264,747						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	334,264,747
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	279,280,361						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	279,280,361
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	230,533,950						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	230,533,950
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	251,292,313						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	251,292,313
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	271,444,304						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	271,444,304

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	244,945,209						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	244,945,209
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	189,749,588						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	189,749,588
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	265,207,591						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	265,207,591
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	287,314,282						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	287,314,282
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	270,175,420						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	270,175,420
						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	292,856,507						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	292,856,507

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	273,181,171						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	273,181,171
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	354,331,222						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	354,331,222
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	289,211,926						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	289,211,926
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	221,173,741						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	221,173,741
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	285,087,723						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	285,087,723
					1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	301,677,497						1.02.02.2.02.001 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	301,677,497
					1.02.02.2.02.001 6 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	41,970,000						1.02.02.2.02.001 6 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	41,970,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kesehatan Kerja dan Olahraga								Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kesehatan Kerja dan Olahraga		
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,520,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,520,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,570,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,570,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,050,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,050,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,310,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,310,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	2,040,000						1.02.02.2.02.001	Jumlah Dokumen	12	2,040,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,140,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,140,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	280,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Lingkungan	Lingkungan								Lingkungan	Lingkungan		
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan								Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,880,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,880,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,230,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,230,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,470,000	
			1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	397,000,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan							Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan		
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,070,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,070,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,500,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4,500,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,360,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,360,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,240,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,240,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	2,640,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	2,640,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Lingkungan	Lingkungan								Lingkungan	Lingkungan		
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,580,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,580,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,210,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3,210,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	1,980,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	1,980,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan								Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,760,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,760,000
						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,250,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,250,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	280,000
					1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,910,000						1.02.02.2.02.001 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2,910,000
					1.02.02.2.02.001 8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	184,850,060						1.02.02.2.02.001 8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	184,850,060
					1.02.02.2.02.001 9 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	461,000,000						1.02.02.2.02.001 9 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	366,935,744

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya							Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,914,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,914,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,528,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,528,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,528,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,528,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,716,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,716,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,020,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,020,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,648,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,648,000	
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	11,416,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	11,416,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,682,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,682,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,142,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,142,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,456,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,456,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,752,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,752,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,148,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,148,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,022,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,022,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,782,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,782,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	5,408,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	5,408,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,008,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,008,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,728,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,728,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,648,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,648,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,394,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,394,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,994,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,994,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,932,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,932,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,578,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6,578,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	480,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	480,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kesehatan	Kesehatan							Kesehatan	Kesehatan		
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,704,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,704,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,468,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,468,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,974,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,974,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,442,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,442,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	107,873,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	141,473,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,582,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9,582,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,366,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,366,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	6,668,000					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	6,668,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,456,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,456,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,396,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,396,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,154,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,154,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,214,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,214,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,682,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,682,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,776,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,776,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,988,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,988,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	7,962,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	7,962,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,992,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,992,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,558,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,558,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13,156,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13,156,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,884,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,884,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,842,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,842,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,722,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,722,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,862,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,862,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	3,874,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	3,874,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,982,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,982,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,202,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,202,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,782,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7,782,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,034,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,034,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,974,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,974,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,888,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,888,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,454,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,454,000
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	7,782,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	7,782,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,662,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,662,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,776,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11,776,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,832,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8,832,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,096,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10,096,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,948,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5,948,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,988,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4,988,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,364,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3,364,000
					1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	2,914,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12 Dokumen	2,914,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan	Kesehatan								Kesehatan	Kesehatan		
						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,854,000						1.02.02.2.02.002 0 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2,854,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,333,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,333,300
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,573,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,573,300
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97,116,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	97,116,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99,642,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99,642,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penvakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penvakit Menular	12 Dokumen	115,353,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penvakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penvakit Menular	12 Dokumen	115,353,300

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,683,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,683,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	96,141,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	96,141,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	103,060,200						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	103,060,200
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	70,632,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	70,632,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,833,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,833,300
					1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	91,653,000						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	91,653,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen							5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,779,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,779,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	111,813,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	111,813,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	114,153,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	114,153,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	84,297,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	84,297,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	129,170,900						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	129,170,900

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91,842,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91,842,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124,083,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	124,083,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	90,702,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	90,702,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,860,500						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,860,500
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	57,252,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	57,252,000
					1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	130,383,300						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	130,383,300

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen							5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110,193,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110,193,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,253,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,253,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,334,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	98,334,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,343,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,343,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	116,703,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	116,703,300

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,992,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	112,992,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	100,626,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	100,626,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	113,433,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	113,433,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	82,134,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	82,134,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	88,380,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	88,380,000
					1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	103,928,400						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	103,928,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen							5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,593,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,593,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	127,353,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	127,353,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	70,068,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	70,068,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	51,814,500						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	51,814,500
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	92,334,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	92,334,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	109,626,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	109,626,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	116,673,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	116,673,300
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	108,573,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	108,573,300
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110,814,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110,814,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	84,633,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	84,633,000
						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	90,907,200						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	90,907,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen							5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,632,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	115,632,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	54,792,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	54,792,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	72,684,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	72,684,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	622,388,895						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	635,388,895
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	128,493,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	128,493,300

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	93,099,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	93,099,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	113,913,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	113,913,300
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	131,016,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	131,016,000
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	126,726,600						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	126,726,600
						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	149,391,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	149,391,000
						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	93,112,500						1.02.02.2.02.002	Jumlah Dokumen	12	93,112,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen							5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	141,003,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	141,003,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,823,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	119,823,300
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87,832,500						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87,832,500
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	47,170,500						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	47,170,500
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	125,823,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Dokumen	125,823,300

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Tidak Menular	dan Tidak Menular								dan Tidak Menular	dan Tidak Menular		
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	57,630,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	57,630,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85,374,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85,374,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91,398,000						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91,398,000
					1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,633,300						1.02.02.2.02.002 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	120,633,300
					1.02.02.2.02.002 6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	426,213,352,827						1.02.02.2.02.002 6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	474,189,648,206
					1.02.02.2.02.002 8 Pengambilan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial	2 Paket	918,131,203						1.02.02.2.02.002 8 Pengambilan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial	2 Paket	884,531,203

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan								dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	922,458,987						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	840,467,305
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	769,227,853						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	683,564,433
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	727,345,443						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	647,321,391
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	883,960,405						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	792,046,269
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	712,233,319						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	672,112,578
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	990,206,038						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	981,043,338
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	858,569,676						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	779,715,666

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Puskesmas	Puskesmas								Puskesmas	Puskesmas		
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	681,538,035						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	678,518,635
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	703,468,846						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	712,353,256
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	467,560,001						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	461,374,238
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	805,296,878						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	760,408,778
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	692,209,395						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	642,224,055
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	705,828,329						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	690,404,329
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	776,526,143						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	749,874,574
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	912,950,270						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	867,082,596

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Puskesmas	Puskesmas								Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	800,803,179						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	775,476,179
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	957,093,085						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	857,115,956
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	517,414,688						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	502,176,153
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	573,958,391						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	535,457,445
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,018,129,426						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	986,644,106
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	531,848,683						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	492,066,008
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	957,461,465						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	934,501,790
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	871,866,623						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	728,923,607

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas	Puskesmas							Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	743,507,938					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	743,507,938
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	699,851,407					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	636,494,827
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	539,938,841					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	510,316,967
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	689,763,135					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	656,523,425
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	663,837,022					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	622,336,978
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	592,705,124					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	568,619,284
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	536,838,652					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	500,199,932
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	934,392,715					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	913,980,715

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas	Puskesmas							Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,162,131,866					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,139,987,116
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	598,853,630					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	579,320,790
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	545,023,882					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	510,308,697
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	666,552,878					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	607,922,900
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	614,243,987					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	531,704,155
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	632,999,706					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	579,960,536
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	783,873,626					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	682,269,626
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	757,880,842					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	730,457,003

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Puskesmas	Puskesmas							Puskesmas	Puskesmas	
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 1,010,606,210						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 938,928,205
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 962,448,827						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 927,627,425
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 756,622,735						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 736,712,140
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 598,346,905						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 627,137,259
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 1,220,447,975						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 1,169,574,560
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 853,658,343						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 853,658,343
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 521,355,556						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen 467,517,532
					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen 660,810,829						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen 620,596,941

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Puskesmas	Puskesmas								Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	610,092,348						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	606,940,589
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	841,228,648						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	775,091,178
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	835,258,388						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	768,635,057
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	696,631,604						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	670,620,212
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	485,052,184						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	448,288,024
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	821,898,396						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	798,127,162
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	606,419,337						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	597,266,786
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	770,611,247						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	718,135,976

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Puskesmas	Puskesmas							Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	788,159,192					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	691,881,029
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	846,572,536					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	803,553,688
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	669,371,041					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	667,278,001
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	731,738,874					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	691,300,010
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,033,247,964					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1,033,298,905
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	506,894,212					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	470,847,727
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	936,372,897					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	830,999,773
						1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	1,015,442,595					1.02.02.2.02.003 3 Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	12 Dokumen	936,392,342

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Puskesmas	Puskesmas								Puskesmas	Puskesmas		
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,957,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,957,500
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,440,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,440,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,550,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,550,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,895,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,895,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	1,027,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	1,027,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,482,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,482,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,655,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,655,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,095,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,095,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Lainnya									Lainnya			
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,545,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,545,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	131,944,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	119,183,600
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,176,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,176,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,455,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,455,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	2,047,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	2,047,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,047,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,047,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,227,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,227,500

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			Lainnya				Lainnya
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			3,862,500				3,862,500
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			2,820,000				2,820,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			2,887,500				2,887,500
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			1,972,500				1,972,500
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			1,185,000				1,185,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional				1.02.02.2.02.003 4 Operasional
			Jumlah Dokumen Operasional				Jumlah Dokumen Operasional
			12 Dokumen				12 Dokumen
			1,237,500				1,237,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,687,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,687,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,737,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,737,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,550,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,550,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Lainnya									Lainnya			
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,090,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,090,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,650,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,587,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5,587,500
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,862,500
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,095,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,095,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	1,365,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	1,365,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,365,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,365,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,275,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,275,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,275,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,275,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	825,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	825,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Lainnya									Lainnya			
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,185,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,185,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,957,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,957,500
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,005,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,005,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,240,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,240,000
						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	4,642,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	4,642,500

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	4,725,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,792,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,792,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,137,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115,500,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	115,500,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			Lainnya				Lainnya
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			3,862,500				3,862,500
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			3,000,000				3,000,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			1,440,000				1,440,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			3,000,000				3,000,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			12 Dokumen				12 Dokumen
			1,860,000				1,860,000
			1.02.02.2.02.003 4 Operasional				1.02.02.2.02.003 4 Operasional
			Jumlah Dokumen Operasional				Jumlah Dokumen Operasional
			12 Dokumen				12 Dokumen
			840,000				840,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,237,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1,237,500
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,130,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,130,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3,000,000
					1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,317,500						1.02.02.2.02.003 4 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2,317,500
					1.02.02.2.02.004 0 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	666 Orang	977,288,400						1.02.02.2.02.004 0 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	666 Orang	977,288,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Tuberkulosis	kesehatan sesuai standar								Tuberkulosis	kesehatan sesuai standar		
						1.02.02.2.02.004 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841,879,501						1.02.02.2.02.004 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	841,879,501
						1.02.02.2.02.004 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	27,000,000						1.02.02.2.02.004 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	30,541,506
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9,801,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9,801,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,267,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,267,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1 Dokumen	3,630,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1 Dokumen	3,630,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Reproduksi	reproduksi							Reproduksi	reproduksi		
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14,520,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14,520,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	10,164,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	10,164,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pelayanan Kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi								Pelayanan Kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi		
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,808,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,808,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,808,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,808,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14,520,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14,520,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			9,801,000				9,801,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			7,986,000				7,986,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			10,164,000				10,164,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			5,808,000				5,808,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			3,630,000				3,630,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			7,623,000				7,623,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			11,616,000				11,616,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan
			1				1
			Dokumen				Dokumen

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kesehatan Reproduksi	kesehatan reproduksi								Kesehatan Reproduksi	kesehatan reproduksi		
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	6,534,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	6,534,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen							4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	5,082,000
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1 Dokumen	3,630,000						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	1 Dokumen	3,630,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Reproduksi	reproduksi							Reproduksi	reproduksi			
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,630,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,986,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,986,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,979,000	
					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	10,890,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	10,890,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pelayanan Kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi							Pelayanan Kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi		
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	11,616,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,623,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,904,000					1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,904,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			3,630,000				3,630,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			10,164,000				10,164,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			7,260,000				7,260,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			13,068,000				13,068,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			4,153,000				4,153,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			5,082,000				5,082,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
			1				1
			Dokumen				Dokumen
			5,808,000				5,808,000
			1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan
			1				1
			Dokumen				Dokumen

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Kesehatan Reproduksi	kesehatan reproduksi								Kesehatan Reproduksi	kesehatan reproduksi			
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9,801,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9,801,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2,541,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8,712,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7,260,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10,890,000
						1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,993,000							1.02.02.2.02.004 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3,993,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	12	38,400,060							1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	12	38,400,060

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen								6 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,920,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,920,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	6,240,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	6,240,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,880,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,880,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000							1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	2,400,000							1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	2,400,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,920,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,920,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	7,680,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	7,680,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,920,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,920,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,440,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1,440,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	3,840,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	3,840,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,880,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,880,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	3,600,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	3,600,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3,840,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3,840,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3,600,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	3,600,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,680,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,680,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,160,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,160,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	9,600,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	9,600,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	5,760,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	5,760,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,920,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,920,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	720,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	720,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	720,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	720,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12,000,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12,000,000
					1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	1,200,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	1,200,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	480,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	480,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,200,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,200,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11,520,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11,520,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	5,280,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	5,280,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	9,600,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	9,600,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	480,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	480,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	960,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,880,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,880,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	2,400,000
					1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	480,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	480,000
					1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	960,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	960,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,200,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7,200,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,320,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,320,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11,520,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	11,520,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	9,600,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	9,600,000
						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	960,000						1.02.02.2.02.004	Jumlah dokumen	1	960,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen							7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,200,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,200,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,880,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,880,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	4,800,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1,440,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	2,400,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	5,760,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	5,760,000
						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000						1.02.02.2.02.004 7 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	960,000
						1.02.02.2.03	Jumlah aplikasi	3 Aplikasi	123,973,202						1.02.02.2.03	Jumlah aplikasi	3 Aplikasi	123,973,202

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan				
				1.02.02.2.03.000 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	123,973,202		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	1,032,963,572		
				1.02.02.2.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	844,297,979		
				1.02.02.2.04.000 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	188,665,593		
				1.02..03 PROGRAM PENINGKATAN	Persentase tenaga kesehatan yang	53,51 %	2,255,216,676		
				1.02.02.2.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	725,875,079		
				1.02.02.2.04.000 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	126,700,000		
				1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN	Persentase tenaga kesehatan yang	53,51 %	2,255,216,676		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat peningkatan kapasitas						KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		mendapat peningkatan kapasitas		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	519,374,676					1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	519,374,676
				1.02.03.2.02.000 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	519,374,676					1.02.03.2.02.000 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	519,374,676
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	1,735,842,000					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	1,735,842,000
				1.02.03.2.03.000 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	189 Orang	1,735,842,000					1.02.03.2.03.000 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	189 Orang	1,735,842,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya							Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
				1.02..04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	476,543,155					1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	476,543,155
					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	476,543,155					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	476,543,155
					1.02.04.2.06.000 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	476,543,155						1.02.04.2.06.000 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	476,543,155
				1.02..05 PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase Upaya Kesehatan	100%	1,178,720,151					1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase Upaya Kesehatan	100%	1,178,720,151

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Bersumber Daya Masyarakat Aktif						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Bersumber Daya Masyarakat Aktif		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	181,415,081					1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	153 Kelurahan	181,415,081
				1.02.05.2.02.000 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	181,415,081					1.02.05.2.02.000 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	181,415,081
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	997,305,070					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	997,305,070
					Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan							Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	12 Dokumen	3,059,280					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	12 Dokumen	3,059,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,059,280					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,059,280
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)								Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,280,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,280,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,890,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,890,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	3,370,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	3,370,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	12 Dokumen	3,059,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	12 Dokumen	3,059,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,810,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,810,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,139,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,139,280

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(UKBM)									(UKBM)			
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,739,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,739,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,150,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,150,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	4,090,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	4,090,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,894,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,894,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,759,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,759,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan																
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi								
						Masyarakat (UKBM)									Masyarakat (UKBM)										
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280							1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280							1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280						
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,139,280							1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,139,280						
						1.02.05.2.03.000	Jumlah Dokumen	12	3,239,280							1.02.05.2.03.000	Jumlah Dokumen	12	3,239,280						

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen						1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,090,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,090,000	
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,710,000	
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	12 Dokumen	2,890,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	12 Dokumen	2,890,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,370,000
				1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,010,000					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,010,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)								Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,819,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,819,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,830,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,359,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,359,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,970,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,970,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	3,419,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan	12 Dokumen	3,419,280

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,779,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,779,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,419,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	12 Dokumen	3,370,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	12 Dokumen	3,370,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,899,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,899,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,059,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,059,280

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					(UKBM)									(UKBM)			
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,899,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,899,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,669,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,669,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	3,299,280

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,330,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,330,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,879,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,879,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	780,975,270						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	780,975,270

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,299,280
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,130,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,130,000
					1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	4,019,280

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan														
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi						
						Masyarakat (UKBM)									Masyarakat (UKBM)								
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5,710,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5,710,000					
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	3,250,000					
						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,939,280						1.02.05.2.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2,939,280					
						1.02.05.2.03.000	Jumlah Dokumen	12	4,739,280						1.02.05.2.03.000	Jumlah Dokumen	12	4,739,280					

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen							1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								60,495,095,110	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								50,875,546,081
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31,110,990,673		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26,818,160,531
		2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						31,110,990,673			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						26,818,160,531
			2.09..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,5 %	28,322,648,399				2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,5 %	25,022,958,442
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,803,786,427				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,730,710,177
					2.09.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	23,803,786,427						2.09.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	21,730,710,177

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%			4,518,861,972
				2.09.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1,309,134,644
				2.09.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3,209,727,328
				2.09..03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1,25			1,834,835,918
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis			741,032,446
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis			622,437,145

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Harga Pangan							Harga Pangan		
				2.09.03.2.01.001 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan 741,032,446					2.09.03.2.01.001 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan 622,437,145
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragamaan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis 1,093,803,472					2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragamaan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 Jenis 497,174,232
				2.09.03.2.04.000 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan 1,093,803,472					2.09.03.2.04.000 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan 497,174,232
				2.09..05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,90 % 953,506,356					2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97,90 % 675,590,712
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan	4 Laporan 953,506,356					2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan	4 Laporan 675,590,712

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Segar							Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Segar		
					2.09.05.2.01.000 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	953,506,356					2.09.05.2.01.000 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	675,590,712
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							29,384,104,437	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							24,057,385,550	
		3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6,348,602,603		3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4,330,579,829	
			3.25..03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	1,648,320,756			3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	848,524,128	
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	1,648,320,756				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/			Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	848,524,128

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Kota								Kota			
				3.25.03.2.01.000 4 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	65 Unit	1,648,320,756					3.25.03.2.01.000 4 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	65 Unit	848,524,128
				3.25..04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 orang/kelompok	1,994,807,114					3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	35 orang/kelompok	1,521,315,773
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	38 kali	437,839,088					3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	38 kali	351,189,088
				3.25.04.2.02.000 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	437,839,088					3.25.04.2.02.000 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	351,189,088
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1,556,968,026					3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1,170,126,685

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			3.25.04.2.04.000	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	1,556,968,026				3.25.04.2.04.000	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	1,170,126,685
			9 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							9 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			3.25..05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	207,017,600				3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	NIHIL kasus	129,167,600
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	207,017,600				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	129,167,600
			3.25.05.2.01.000	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	207,017,600				3.25.05.2.01.000	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	129,167,600
			7 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai							7 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					kewenangan kabupaten/kota									kewenangan kabupaten/kota				
			3.25..06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	75%	2,498,457,133			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	75%	1,831,572,328		
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	2,498,457,133				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	1,831,572,328
					3.25.06.2.03.000 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	2,498,457,133					3.25.06.2.03.000 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	1,831,572,328		
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						23,035,501,834			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19,726,805,721	
			3.27..02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak	40 Orang	6,157,166,160			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak	40 Orang	4,859,359,896		

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			dipasarkan				dipasarkan
			3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan				Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan
			10 Jenis				10 Jenis
			2,753,199,543				2,247,521,873
			3.27.02.2.01.000 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3.27.02.2.01.000 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			4 Laporan				4 Laporan
			2,753,199,543				2,247,521,873
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			6 Jenis				5 Jenis
			3,403,966,617				2,611,838,023
			3.27.02.2.03.000 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil				3.27.02.2.03.000 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
			12 Laporan				12 Laporan
			3,403,966,617				2,611,838,023
			3.27..03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat				Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat
			29 Lokasi				29 Lokasi
			11,699,181,894				9,849,068,215

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha						Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha		
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	4,629,592,678					3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	4,978,556,584
				3.27.03.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	4,629,592,678					3.27.03.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	4,978,556,584
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	7,069,589,216					3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	4,870,511,631
				3.27.03.2.02.000 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	7,069,589,216					3.27.03.2.02.000 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	4,870,511,631
			3.27..04 PROGRAM		Jumlah	7	2,346,039,5				3.27.04 PROGRAM		Jumlah	7	2,634,618,6

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	kelompok	24				PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	kelompok	51
				Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %						Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89,5 %	
			3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	1,199,492,490				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	2,103,486,842
			3.27.04.2.01.000 8 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	1,199,492,490				3.27.04.2.01.000 8 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	2,103,486,842
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit	40 Unit	1,146,547,034				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit	40 Unit	531,131,809

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	usaha dan produk asal hewan						Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	usaha dan produk asal hewan	
				3.27.04.2.04.001 0 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	40 Unit Usaha 1,146,547,034					3.27.04.2.04.001 0 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	40 Unit Usaha 531,131,809
				3.27..06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100% 48,922,160					3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100% 34,270,600
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80% 48,922,160					3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80% 34,270,600
				3.27.06.2.01.000 2 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen 48,922,160					3.27.06.2.01.000 2 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen 34,270,600
				3.27..07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi	100% 2,784,192,096					3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi	100% 2,349,488,359

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				sebagai penyuluh							sebagai penyuluh		
				Tingkat Produktivitas Pertanian	6 ton/ha						Tingkat Produktivitas Pertanian	6 ton/ha	
			3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	2,784,192,096				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	2,349,488,359
				Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang						Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	
			3.27.07.2.01.000 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1,032,380,837				3.27.07.2.01.000 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1,086,203,902
			3.27.07.2.01.000 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1,751,811,259				3.27.07.2.01.000 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1,035,848,457
										3.27.07.2.01.000 6 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan	15 Orang	227,436,000

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	
															Penyuluh pertanian	kapasitasnya				
Dinas Komunikasi dan Informatika									133,767,642,343	Dinas Komunikasi dan Informatika									127,187,991,572	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									133,767,642,343	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									127,187,991,572	
		2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							121,462,455,094			2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							115,210,261,616	
			2.16..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,57 %	19,513,000,200				2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,57 %	20,283,926,240	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,951,182,283					2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,808,355,902	
					2.16.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	16,951,182,283						2.16.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	17,808,355,902	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,674,171,200						2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1,705,195,016
					2.16.01.2.06.000		Jumlah Paket	4 Paket	1,674,171,2						2.16.01.2.06.000		Jumlah Paket	4 Paket	1,705,195,0	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		00						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16
						2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	887,646,717						2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	770,375,322
						2.16.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	887,646,717						2.16.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	770,375,322
						2.16..02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	88%	18,471,048,745						2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	88%	21,885,763,228
						2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	18,471,048,745						2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	21,885,763,228
							Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke	100%									Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke	100%

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					PPID ≤ 17 hari kerja								PPID ≤ 17 hari kerja		
				2.16.02.2.01.001	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,659,558,686					2.16.02.2.01.001	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	1,875,180,860
				2.16.02.2.01.001	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	2,001,839,018					2.16.02.2.01.001	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	2,016,694,652
				2.16.02.2.01.002	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	14,809,651,041					2.16.02.2.01.002	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	34 Media	17,993,887,716
				2.16..03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	83,478,406,149					2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	73,040,572,148
				2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di	Persentase penanganan gangguan terkait	100%	83,478,406,149					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di	Persentase penanganan gangguan terkait	100%	73,040,572,148

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam							Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam					
						Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%							Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%				
						Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%							Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%				
					2.16.03.2.02.001 5 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	370,878,712					2.16.03.2.02.001 5 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	349,810,752			
					2.16.03.2.02.001 6 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	9,563,782,846					2.16.03.2.02.001 6 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	8,730,517,450			
					2.16.03.2.02.002	Jumlah perangkat	58	70,258,841.					2.16.03.2.02.002	Jumlah perangkat	58	59,829,281.			

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				4 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		214	
				2.16.03.2.02.002 5 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	826,773,959		
				2.16.03.2.02.002 8 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	2,458,129,418		
				2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			518,547,407		
				2.20..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	518,547,407		
				4 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		930	
				2.16.03.2.02.002 5 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	1,566,369,838		
				2.16.03.2.02.002 8 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	2,564,592,178		
				2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			534,981,114		
				2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	534,981,114		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				SEKTORAL								SEKTORAL				
					2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	518,547,407					2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	534,981,114
					2.20.02.2.01.001 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	518,547,407					2.20.02.2.01.001 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	534,981,114
				2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				11,786,639,842					2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			11,442,748,842
					2.21..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34%	11,786,639,842					2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	34%	11,442,748,842
					2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	5,909,529,676					2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	5,562,173,396
					2.21.02.2.01.000 4 Penyediaan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	13 Perangkat Daerah	5,909,529,676					2.21.02.2.01.000 4 Penyediaan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	13 Perangkat Daerah	5,562,173,396

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
				Layanan Keamanan Informasi					Layanan Keamanan Informasi
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan					Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan
				6 Kali					6 Kali
				5,877,110,166					5,880,575,446
				2.21.02.2.02.000 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.21.02.2.02.000 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi					Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
				58 Perangkat Daerah					58 Perangkat Daerah
				5,877,110,166					5,880,575,446
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				53,405,926,423	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				55,723,671,138
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40,085,368,279	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40,450,831,576
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				40,085,368,279	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				40,450,831,576
2.17..01 PROGRAM				Tingkat kepuasan	2.17.01 PROGRAM				Tingkat kepuasan
				92%					92%
				32,457,832,					32,249,735,

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		333				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		346
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,587,197,714					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	28,930,083,604
				2.17.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	28,587,197,714					2.17.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	28,930,083,604
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	3,870,634,619					2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	3,319,651,742
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
				2.17.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	889,586,422					2.17.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	805,004,922
				2.17.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	2,981,048,197					2.17.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	2,514,646,820

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Disediakan									Disediakan		
				2.17..02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	37%	237,494,927					2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	37%	257,119,023
				2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	237,494,927					2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	257,119,023
					2.17.02.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	30 Unit Usaha	237,494,927						2.17.02.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	30 Unit Usaha	257,119,023

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			2.17..03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	70%	758,927,174				2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	70%	700,582,852
			2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	758,927,174				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	700,582,852
			2.17.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	758,927,174				2.17.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	700,582,852
			2.17..05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai	57%	1,739,668,000				2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai	57%	540,256,000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kemampuan mengelola unit usaha koperasi.								kemampuan mengelola unit usaha koperasi.		
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	1,739,668,000					2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	540,256,000
				2.17.05.2.01.000 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	1,739,668,000					2.17.05.2.01.000 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	540,256,000
				2.17..06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	80%	656,135,006					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	80%	2,357,054,487
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	656,135,006					2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	2,357,054,487

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Kabupaten/Kota								Kabupaten/Kota			
					2.17.06.2.01.000 5 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	656,135,006					2.17.06.2.01.000 5 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	83 Unit Usaha	2,357,054,487
				2.17..07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	39,96 %	2,307,974,429					2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	39,96 %	2,601,033,629	
					Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%								Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya		100%
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan	Jumlah sentra usaha yang pelaku	10 sentra	2,307,974,429					2.17.07.2.01 Pemberdayaan	Jumlah sentra usaha yang pelaku	10 sentra	2,601,033,629	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan						Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan				
						Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang							Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang		
					2.17.07.2.01.000 2 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	277,344,431					2.17.07.2.01.000 2 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	296,982,571	
					2.17.07.2.01.000 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,030,629,998					2.17.07.2.01.000 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	2,304,051,058	
					2.17..08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	88%	1,927,336,410					2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	88%	1,745,050,239	
					2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan	500 orang	1,927,336,410					2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan	500 orang	1,745,050,239	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha						Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	
				2.17.08.2.01.000 2 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha 1,927,336,410					2.17.08.2.01.000 2 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha 1,745,050,239
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13,320,558,144	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						15,272,839,562
				3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		13,320,558,144					3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		15,272,839,562
				3.30..02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	95% 904,619,313					3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	95% 981,555,129
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan 271,654,014					3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan 291,832,753
				3.30.02.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen	450 Dokumen 271,654,014					3.30.02.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen	450 Dokumen 291,832,753

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang					3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				12 Laporan					12 Laporan
				221,051,540					246,708,544
				3.30.02.2.02.000 1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang					3.30.02.2.02.000 1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
				60 Dokumen					160 Dokumen
				221,051,540					246,708,544
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
				Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
				12 Laporan					12 Laporan
				98,503,604					108,870,295
				3.30.02.2.03.000 2 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda					3.30.02.2.03.000 2 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda
				Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat
				24 Dokumen					24 Dokumen
				98,503,604					108,870,295

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri								Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		
					3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	52,197,054						3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	52,197,054
					3.30.02.2.04.000 2 Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	52,197,054						3.30.02.2.04.000 2 Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	52,197,054
					3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer	12 Laporan	261,213,101						3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer	12 Laporan	281,946,483

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				dan Penjual Langsung Minum di Tempat							dan Penjual Langsung Minum di Tempat		
				3.30.02.2.05.000 1 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen 261,213,101					3.30.02.2.05.000 1 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen 281,946,483
				3.30..03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100% 4,295,244,125					3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100% 5,378,938,790
				3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan 4,295,244,125					3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan 5,378,938,790
				3.30.03.2.02.000 1 Pembinaan dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	611 Dokumen 4,295,244,125					3.30.03.2.02.000 1 Pembinaan dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	611 Dokumen 5,378,938,790

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
				3.30..04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	752,338,077					3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	803,469,627
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	752,338,077					3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	803,469,627		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan			
					3.30.04.2.02.000 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	501,271,663					3.30.04.2.02.000 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	532,482,993	
					3.30.04.2.02.000 3 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	251,066,414					3.30.04.2.02.000 3 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	270,986,634	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota					Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota
				3.30..06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				Persentase pelayanan tera yang tepat waktu					Persentase pelayanan tera yang tepat waktu
				100%					100%
				792,743,196					800,182,845
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
				Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal
				12 Laporan					12 Laporan
				792,743,196					800,182,845
				3.30.06.2.01.000 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					3.30.06.2.01.000 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
				23810 Unit					23810 Unit
				675,840,338					682,072,261
				3.30.06.2.01.000 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					3.30.06.2.01.000 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
				1200 Orang					1200 Orang
				116,902,858					118,110,584
				3.30..07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran					Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran
				100%					100%
				6,575,613,433					7,308,693,171
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan					3.30.07.2.01 Pelaksanaan
				Jumlah laporan usaha mikro yang					Jumlah laporan usaha mikro yang
				12 laporan					12 laporan
				6,575,613,433					7,308,693,171

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	mendapat fasilitasi pemasaran							Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	mendapat fasilitasi pemasaran		
				3.30.07.2.01.000 6 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	6,575,613,433					3.30.07.2.01.000 6 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	7,308,693,171
Dinas Lingkungan Hidup							570,231,886,248	Dinas Lingkungan Hidup							547,424,298,257
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						570,231,886,248		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						547,424,298,257
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					570,231,886,248			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					547,424,298,257
		2.11..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	62,532,154,191			2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87%	61,256,511,924

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	51,157,844,472						2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	49,945,582,652	
				2.11.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	51,157,844,472						2.11.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	49,945,582,652	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	10,886,696,970						2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	10,766,393,207	
				2.11.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,886,696,970						2.11.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,766,393,207	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	487,612,749						2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	544,536,065	
				2.11.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	487,612,749						2.11.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	544,536,065	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			2.11..03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	48%	6,191,824,874				2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	48%	5,708,588,636
				Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%						Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	88%	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	2,723,079,997				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	2,226,616,940
				Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis						Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	
			2.11.03.2.01.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	1,248,522,992				2.11.03.2.01.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	763,031,144
			2.11.03.2.01.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas	1 Dokumen	1,474,557,005				2.11.03.2.01.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas	1 Dokumen	1,463,585,796

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan								Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	3,468,744,877						2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	3,481,971,696
					2.11.03.2.02.000 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	3,468,744,877						2.11.03.2.02.000 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	3,481,971,696
					2.11..04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,75 %	99,194,650,818						2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99,75 %	109,194,379,017
					2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang	3 dokumen	99,194,650,818						2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang	3 dokumen	109,194,379,017

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					disusun							disusun			
					Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.85 Ha						Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.85 Ha		
				2.11.04.2.01.000 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	503,795,927					2.11.04.2.01.000 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	523,420,023
				2.11.04.2.01.000 4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.88 Ha	75,449,385,373					2.11.04.2.01.000 4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.88 Ha	83,650,618,321
				2.11.04.2.01.000 7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	9,581,504,157					2.11.04.2.01.000 7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	9,869,759,739
				2.11.04.2.01.000 8 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit	13,659,965,361					2.11.04.2.01.000 8 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	14 Unit	15,150,580,934
				2.11..05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan)	100%	2,677,847,044					2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan)	100%	2,638,397,835

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		limbah B3 yang diterbitkan						BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	limbah B3 yang diterbitkan			
					Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%						Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	100%		
				2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	448,986,860				2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	408,678,534	
				2.11.05.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	448,986,860				2.11.05.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	408,678,534	
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	2,228,860,184				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	2,229,719,301	
				2.11.05.2.02.000 2 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &	1 Dokumen	2,228,860,184				2.11.05.2.02.000 2 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &	1 Dokumen	2,229,719,301	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
			2.11..06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	80%	1,916,796,583				2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	80%	1,852,728,166	
			2.11.06.2.01		Jumlah obyek	254 obyek	1,916,796,5				2.11.06.2.01		Jumlah obyek	432 obyek	1,852,728,1	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya		83					Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya		66
					Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%							Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	
				2.11.06.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	325 Dokumen	1,112,344,618					2.11.06.2.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	325 Dokumen	1,183,473,648
				2.11.06.2.01.000 9 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	804,451,965					2.11.06.2.01.000 9 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	669,254,518

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
			2.11..08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	100%	2,511,667,215				2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	100%	2,132,444,109		
						Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	100%						Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	100%			
			2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	2,511,667,215				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	2,132,444,109				
				Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan	1 jenis						Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan	1 jenis					

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				persampahan								persampahan			
			2.11.08.2.01.000 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1,682,444,409						2.11.08.2.01.000 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1,270,406,422
			2.11.08.2.01.000 3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1670 Orang	829,222,806						2.11.08.2.01.000 3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1670 Orang	862,037,687
			2.11..09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	100%	5,157,181,716						2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	100%	1,391,048,000
			2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	5,157,181,716						2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	1,391,048,000
			2.11.09.2.01.000 1 Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	10 Entitas	5,157,181,716						2.11.09.2.01.000 1 Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	10 Entitas	1,391,048,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kinerjanya dalam rangka PPLH								Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kinerjanya dalam rangka PPLH		
				2.11..10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	47 obyek	543,011,718					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	47 obyek	424,610,425
					2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	543,011,718						2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	424,610,425
					2.11.10.2.01.000 4 Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	47 Pengaduan	543,011,718						2.11.10.2.01.000 4 Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	47 Pengaduan	424,610,425

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten/Kota	ditindaklanjuti/ditangani								Kabupaten/Kota	ditindaklanjuti/ditangani		
				2.11..11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %	389,506,752,089				2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5,12 %	362,825,590,145			
					Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	100%						Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	100%				
					Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51,5 %						Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51,5 %				
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	389,506,752,089				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	362,825,590,145			
					Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis						Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis				
					Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis						Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis				
				2.11.11.2.01.000	Jumlah Sarana dan	231 Unit	17,942,897,					2.11.11.2.01.000	Jumlah Sarana dan	231 Unit	12,029,677,		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		544					7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		397	
					2.11.11.2.01.001 2 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton	171,376,694,770					2.11.11.2.01.001 2 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	570129 Ton	191,030,296,671	
					2.11.11.2.01.001 7 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	305000 ton	40,507,384,882									

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				2.11.11.2.01.002 0 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					2.11.11.2.01.002 0 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				650430 Ton					650430 Ton
				159,679,774,893					159,765,616,077
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
89,075,198,784					173,754,225,400				
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
89,075,198,784					173,754,225,400				
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
89,075,198,784					173,754,225,400				
1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
36,085,759,166					89,323,599,815				
Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan				
88%					88%				
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
32,141,823,019					86,152,818,370				
Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				
100%					100%				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	32,141,823,019						1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	86,152,818,370
					1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	689,326,697						1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	525,114,799
					1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	689,326,697						1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	525,114,799
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	3,254,609,450						1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	2,645,666,646
					1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,254,609,450						1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,645,666,646
				1.05..04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	52,989,439,618						1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	84,430,625,585	
					Persentase Penanganan Waktu Tanggap	100%									Persentase Penanganan Waktu Tanggap		100%

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kejadian kebakaran kurang dari 15 menit								kejadian kebakaran kurang dari 15 menit		
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	51,887,966,701				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	83,578,139,811	
					Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%							Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik		100%
				1.05.04.2.01.000 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	30,229,602,558				1.05.04.2.01.000 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	16,149,829,919	
				1.05.04.2.01.000 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	2 Dokumen	8,308,449,684				1.05.04.2.01.000 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	2 Dokumen	7,781,171,246	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal								Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		
				1.05.04.2.01.000 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	831,481,642					1.05.04.2.01.000 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	621,229,130
				1.05.04.2.01.001 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	875 Unit	12,518,432,817					1.05.04.2.01.001 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	805 Unit	59,025,909,516
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	500 Berkas	558,743,517					1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	500 Berkas	454,788,934
				1.05.04.2.02.000 2 Penilaian Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang	2 Dokumen	558,743,517					1.05.04.2.02.000 2 Penilaian Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang	2 Dokumen	454,788,934

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Proteksi Kebakaran	Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							Proteksi Kebakaran	Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					
				1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	100 Kegiatan	542,729,400					1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	100 Kegiatan	397,696,840		
					1.05.04.2.04.000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	542,729,400					1.05.04.2.04.000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	397,696,840			
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									57,441,304,420	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									58,983,349,848
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							57,441,304,420		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							58,983,349,848		
	2.08 URUSAN							26,212,536,		2.08 URUSAN							27,673,886,		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			644		PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			504
	2.08..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	16,216,842,152		2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	17,056,956,367
	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13,585,326,001		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,425,809,140
	2.08.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	13,585,326,001		2.08.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	14,425,809,140
	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,068,286,606		2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2,187,650,946
	2.08.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,068,286,606		2.08.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,187,650,946
	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa	Persentase penyediaan jasa	100%	563,229,545		2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa	Persentase penyediaan jasa	100%	443,496,281

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan Perangkat Daerah										Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan Perangkat Daerah						
					2.08.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan		563,229,545						2.08.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Laporan		443,496,281		
				2.08..02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud		100%		1,706,748,350						2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud		100%		1,765,852,835			
					Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		100%									Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		100%					
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah		3 Dokumen		719,569,907						2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah		2 Dokumen		759,050,296			
					2.08.02.2.01.000 6 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		218 Orang		719,569,907						2.08.02.2.01.000 6 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		218 Orang		759,050,296		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kewenangan Kab/Kota									kewenangan Kab/Kota			
					2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	418,236,364						2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	437,860,460
					2.08.02.2.02.000 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	418,236,364						2.08.02.2.02.000 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	437,860,460
					2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	21 Kegiatan	568,942,079						2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	21 Kegiatan	568,942,079

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
					2.08.02.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	568,942,079						2.08.02.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	568,942,079	
					2.08..03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,638,501,806					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	1,732,103,737
						Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	80.64%							Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	80.64%	
					2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Kegiatan	36,212,400					2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Kegiatan	36,212,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
				2.08.03.2.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	36,212,400					2.08.03.2.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	36,212,400
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	1,121,672,313					2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	70 kasus	1,195,640,646

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					2.08.03.2.02.000 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	1,029,562,113						2.08.03.2.02.000 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Orang	1,103,530,446
					2.08.03.2.02.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	92,110,200						2.08.03.2.02.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Layanan	92,110,200
					2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	25 kecamatan	480,617,093						2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	25 kecamatan	500,250,691
					2.08.03.2.03.000 2 Peningkatan	Jumlah sumber Daya Manusia	50 Orang	34,384,566						2.08.03.2.03.000 2 Peningkatan	Jumlah sumber Daya Manusia	184 Orang	34,384,566

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				
				2.08.03.2.03.000 4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	446,232,527		
				2.08.03.2.03.000 4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	446,232,527		
				2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	282	1,242,450,921		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	1,242,450,921		
				2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	282	1,345,433,669		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	1,345,433,669		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
			2.08.04.2.03.000 1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1,242,450,921			
			2.08.04.2.03.000 1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	1,345,433,669			
			2.08..05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	297,127,666			
			2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	297,127,666			
			2.08.05.2.01.000 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1 Dokumen	297,127,666			
			2.08.05.2.01.000 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1 Dokumen	327,286,453			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Tersedia							Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Tersedia	
					2.08..06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	92.85% 3,730,558,654						2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	92.85% 3,946,843,745
					2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan 836,317,890						2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan 836,317,890
					2.08.06.2.01.000 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi 836,317,890						2.08.06.2.01.000 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi 836,317,890
					2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan 2,894,240,764						2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan 3,110,525,855

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
				2.08.06.2.02.000 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 1,732,692,713					2.08.06.2.02.000 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 1,909,174,970
				2.08.06.2.02.000 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1,161,548,051					2.08.06.2.02.000 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1,201,350,885
				2.08..07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban	100% 1,380,307,095					2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban	100% 1,499,409,698

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam						kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	80.64%					Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	80.64%	
			2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	65,287,600			2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65,287,600
			2.08.07.2.01.000 4 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	184 Orang	65,287,600			2.08.07.2.01.000 4 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	65,287,600
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	1,280,384,061			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1,399,486,664

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	25 lembaga						Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	25 lembaga		
					2.08.07.2.02.000 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	1,060,968,761						2.08.07.2.02.000 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	200 Orang	1,180,071,364
					2.08.07.2.02.000 7 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	150 Layanan	219,415,300						2.08.07.2.02.000 7 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	200 Layanan	219,415,300
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 Kegiatan	34,635,434						2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	1 Kegiatan	34,635,434
					2.08.07.2.03.000 6 Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan	50 Orang	34,635,434						2.08.07.2.03.000 6 Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan	184 Orang	34,635,434

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK								Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				
		2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2,343,064,332			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2,343,064,332		
			2.13..05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	2,343,064,332				2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	2,343,064,332		
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	2,343,064,332				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	28 Kegiatan	2,343,064,332		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				2.13.05.2.01.000 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	2,343,064,332					2.13.05.2.01.000 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	2,343,064,332
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					28,885,703,444			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					28,966,399,012
			2.14..02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	81.10%	697,882,459				2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	81.10%	697,882,459
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga	170 Orang	295,265,357					2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga	170 Orang	295,265,357

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kependudukan						Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kependudukan			
				2.14.02.2.01.000 9 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	85 Satuan Pendidika n	295,265,357					2.14.02.2.01.000 9 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	85 Satuan Pendidika n	295,265,357
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	402,617,102					2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	402,617,102
				2.14.02.2.02.000 9 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	60,000,000					2.14.02.2.02.000 9 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	60,000,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
					2.14.02.2.02.001 2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	212,700,000						2.14.02.2.02.001 2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	212,700,000
					2.14.02.2.02.001 3 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	129,917,102						2.14.02.2.02.001 3 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	129,917,102
			2.14..03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.85%	8,650,037,433			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	17.85%	8,691,171,874	
						Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	85%							Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	85%		
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	815,000,000					2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	815,000,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Sesuai Kearifan Budaya Lokal								Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
					2.14.03.2.01.001 1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465,000,000					2.14.03.2.01.001 1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	465,000,000
					2.14.03.2.01.001 2 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	100,000,000					2.14.03.2.01.001 2 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	100,000,000
					2.14.03.2.01.001	Jumlah Organisasi	31	250,000,000					2.14.03.2.01.001	Jumlah Organisasi	31	250,000,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
						4 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisas i							4 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisas i		
					2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP		12 Kali	1,598,014,980						2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	1,628,782,730	
					2.14.03.2.02.000 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1566 Orang	428,400,000						2.14.03.2.02.000 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	428,400,000	
					2.14.03.2.02.000 6 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana		1 Laporan	1,169,614,980						2.14.03.2.02.000 6 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1,200,382,730	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417050 Orang	5,872,222,453		
				2.14.03.2.03.000 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	689,017,453		
				2.14.03.2.03.000 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417050 Orang	5,882,589,144		
				2.14.03.2.03.000 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	699,384,144		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jejaringnya									Jejaringnya			
					2.14.03.2.03.000 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,169,705,000						2.14.03.2.03.000 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	5,169,705,000
					2.14.03.2.03.000 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	13,500,000						2.14.03.2.03.000 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	13,500,000
					2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	364,800,000						2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	364,800,000
					2.14.03.2.04.000	Jumlah Kampung	31	364,800,000						2.14.03.2.04.000	Jumlah Kampung	31	364,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung						6 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	
				2.14..04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	19,537,783,552					2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	19,577,344,679
					Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.57%							Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.57%	
					Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	51.63%							Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	51.63%	
					Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%							Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	5,589,583,552					2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	5,629,144,679
					Jumlah laporan Pengadaan Sarana	1 Laporan							Jumlah laporan Pengadaan Sarana	1 Laporan	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
				Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok						Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	
			2.14.04.2.01.001 7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	987,881,218				2.14.04.2.01.001 7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1,013,472,644
			2.14.04.2.01.001 8 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)	38 Unit	120,000,000				2.14.04.2.01.001 8 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)	10 Unit	120,000,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia							Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti O rientasi/ Pelatihan T eknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	966 Orang	572,182,163					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti O rientasi/ Pelatihan T eknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	966 Orang	581,994,211	
					2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	56 Kelompok	3,909,520,171					2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	306 Kelompok	3,913,677,824	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk										Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk						
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		6642 orang		13,948,200,000						2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		6642 orang		13,948,200,000			
				2.14.04.2.02.000 5 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja		1 laporan		6,642,000,000						2.14.04.2.02.000 5 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja		1 laporan		6,642,000,000			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
						2.14.04.2.02.000 6 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	7,306,200,00						2.14.04.2.02.000 6 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	7,306,200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								21,774,154,858	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								22,557,252,144	
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21,774,154,858		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22,557,252,144	
		2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						21,774,154,858			2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						22,557,252,144	
			2.18..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	16,776,984,276				2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	17,082,209,472	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAERAH KABUPATEN/KOTA								DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,196,868,050					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,840,197,240
				2.18.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	12,196,868,050					2.18.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	12,840,197,240
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	4,580,116,226					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	4,242,012,232
					Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%					Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa		100%		
				2.18.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195,406,200					2.18.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182,581,840
				2.18.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,384,710,026					2.18.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,059,430,392
			2.18..02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor PMA/PMDN	210 Perusahaan	460,002,665					2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	210 Perusahaan	490,806,629

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76%	460,002,665					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76%	490,806,629	
					2.18.02.2.02.000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	460,002,665					2.18.02.2.02.000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	490,806,629	
					2.18..03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	645,142,619					2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	668,046,592	
					2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	645,142,619					2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	668,046,592	
					2.18.03.2.01.000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	645,142,619					2.18.03.2.01.000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	668,046,592	
					2.18..04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	3,053,940,362					2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	3,405,595,330	

V-827

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha									risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
			2.18..05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	45%	748,945,580				2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	45%	810,478,908
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1400 perusahaan	748,945,580					2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1400 perusahaan	810,478,908
					2.18.05.2.01.000 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	280 Pelaku Usaha	182,076,962						2.18.05.2.01.000 5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	280 Pelaku Usaha	182,076,962

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
				2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	566,868,618					2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2930 Kegiatan Usaha	628,401,946
				2.18..06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	89,139,356					2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	100,115,213
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman	450 perusahaan	89,139,356					2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman	450 perusahaan	100,115,213

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	modal							Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	modal			
					2.18.06.2.01.000 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	89,139,356						2.18.06.2.01.000 2 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	100,115,213
Dinas Pendidikan							2,350,000,503,319	Dinas Pendidikan							2,312,090,879,632		
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,350,000,503,319		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,312,090,879,632		
		1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2,350,000,503,319			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2,312,090,879,632		
			1.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.34%	1,129,140,344,013				1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.34%	1,090,956,394,289		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	1,409,549,492					1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	1,409,549,492		
				1.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,409,549,492					1.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,409,549,492		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,115,127,922,865					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,077,435,207,242		
				1.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8621 Orang/bulan	1,115,127,922,865					1.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.451 Orang/bulan	1,077,435,207,242		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	768,925,702					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	768,925,702		
				1.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	768,925,702					1.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	768,925,702		

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.01.01.2.07				1.01.01.2.07
			Pengadaan Barang				Pengadaan Barang
			Milik Daerah				Milik Daerah
			Penunjang Urusan				Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah				Pemerintah Daerah
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran
			100%				100%
			4,284,298,403				4,105,021,282
			1.01.01.2.07.001				1.01.01.2.07.001
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			1029 Unit				432 Unit
			4,284,298,403				4,105,021,282
			1.01.01.2.08				1.01.01.2.08
			Penyediaan Jasa				Penyediaan Jasa
			Penunjang Urusan				Penunjang Urusan
			Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah
			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
			100%				100%
			7,549,647,551				7,237,690,571
			1.01.01.2.08.000				1.01.01.2.08.000
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			4 Laporan				4 Laporan
			2,280,371,400				2,007,676,077
			1.01.01.2.08.000				1.01.01.2.08.000
			4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			1 Laporan				1 Laporan
			5,269,276,151				5,230,014,494
			1.01..02 PROGRAM				1.01.02 PROGRAM
			PENGLOLAAN				PENGLOLAAN
			PENDIDIKAN				PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI				Angka Kelulusan (AL) SD/MI
			100%				100%
			1,179,620,097,714				1,179,894,423,751
			Angka Kelulusan SMP/MTS				Angka Kelulusan SMP/MTS
			100%				100%

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	
			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%					Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	
			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%					Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	48%	
			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,47 %					Persentase lembaga PAUD berkualitas	84,47 %	
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	90,45 %					Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	90,45 %	
			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	95%					Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	95%	
			Persentase SD terakreditasi minimal B	92.24%					Persentase SD terakreditasi minimal B	92.24%	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.12%					Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.12%	
		1.01.02.2.01	Jumlah laporan	4 laporan	519,132,359			1.01.02.2.01	Jumlah laporan	4 laporan	520,314,930

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar		,100					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar		,114			
						Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga							Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga				
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan				
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%							Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%				
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan							Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan				
					1.01.02.2.01.000 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	78,963,400,706					1.01.02.2.01.000 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	78,963,400,706			
					1.01.02.2.01.001 6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	15,422,968,201					1.01.02.2.01.001 6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	15,422,968,201			
					1.01.02.2.01.002 5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	73986 Peserta Didik	2,154,241,795					1.01.02.2.01.002 5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	69.270 Peserta Didik	2,154,241,795			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Akademik									Akademik		
					1.01.02.2.01.002 7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	931,055,139						1.01.02.2.01.002 7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	2,531,055,139
					1.01.02.2.01.002 8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidika n	165,472,000						1.01.02.2.01.002 8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidika n	165,472,000
					1.01.02.2.01.002 9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidika n	205,615,560,000						1.01.02.2.01.002 9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	593 Satuan Pendidika n	205,615,560,000
					1.01.02.2.01.004 8 Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	14,669,209,802						1.01.02.2.01.004 8 Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	14,251,780,816
					1.01.02.2.01.005 0 Penyelenggaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	649 Satuan Pendidika	442,312,000						1.01.02.2.01.005 0 Penyelenggaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	649 Satuan Pendidika	442,312,000

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Proses Belajar	n							Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Proses Belajar	n		
						1.01.02.2.01.005 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	200,768,139 ,457						1.01.02.2.01.005 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32.802 Peserta Didik	200,768,139 ,457	
					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	358,837,367 ,573					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	359,568,627 ,336			
						Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga							Jumlah lembaga pendidikan menengahyang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga				
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan				
						Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%							Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%				
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan							Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan				
					1.01.02.2.02.001 2 Pembangunan	Jumlah Sarana, Prasarana dan	4 Unit	85,180,409, 700					1.01.02.2.02.001 2 Pembangunan	Jumlah Sarana, Prasarana dan	4 Unit	82,787,093, 475			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun								Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
					1.01.02.2.02.002 4 Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	11,980,865,199						1.01.02.2.02.002 4 Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	11,977,124,962
					1.01.02.2.02.002 7 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1,484,015,107						1.01.02.2.02.002 7 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	3,877,331,332
					1.01.02.2.02.003 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38574 Peserta Didik	129,509,217,754						1.01.02.2.02.003 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16.343 Peserta Didik	129,509,217,754
					1.01.02.2.02.003 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	3,804,207,598						1.01.02.2.02.003 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	3,804,207,598
					1.01.02.2.02.004 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian	1013 Orang	776,799,715						1.01.02.2.02.004 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian	1013 Orang	1,511,799,715

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Menengah Pertama	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								Menengah Pertama	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
						1.01.02.2.02.004 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	257 Satuan Pendidika n	204,122,500						1.01.02.2.02.004 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	257 Satuan Pendidika n	204,122,500
						1.01.02.2.02.004 2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidika n	125,412,830 ,000						1.01.02.2.02.004 2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidika n	125,412,830 ,000
						1.01.02.2.02.005 8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	330 Satuan Pendidika n	484,900,000						1.01.02.2.02.005 8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.706 Satuan Pendidika n	484,900,000
					1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	163,796,532 ,691						1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	161,430,446 ,494	
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan								Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan		
						Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan								Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1.01.02.2.03.000 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	243,727,534					1.01.02.2.03.000 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	217,624,898	
					1.01.02.2.03.001 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	5,165,801,252					1.01.02.2.03.001 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	5,160,817,691	
					1.01.02.2.03.001 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	5,017,055,500					1.01.02.2.03.001 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	2,682,055,500	
					1.01.02.2.03.001 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidika n	763,111,640					1.01.02.2.03.001 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidika n	683,189,432	
					1.01.02.2.03.001 8 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidika n	58,642,480,000					1.01.02.2.03.001 8 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2.245 Satuan Pendidika n	58,642,480,000	
					1.01.02.2.03.004 5 Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang	3 Unit	601,928,665					1.01.02.2.03.004 5 Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang	3 Unit	681,850,873	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
						1.01.02.2.03.004 7 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidika n	93,362,428, 100						1.01.02.2.03.004 7 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88878 Satuan Pendidika n	93,362,428, 100
					1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	137,853,838 ,350					1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	138,580,419 ,807		
						Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari							Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3-5 hari			
						Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan							Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan			
					1.01.02.2.04.001 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta Didik	7,698,601,8 17					1.01.02.2.04.001 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta Didik	8,425,183,2 74		
					1.01.02.2.04.001 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	250 Orang	76,703,075					1.01.02.2.04.001 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	250 Orang	76,703,075		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
						1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	101,830,000						1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	101,830,000
						1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan	5,272,910,000						1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	5,272,910,000
						1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	749,812,818						1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	749,812,818
						1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2812 Peserta Didik	123,953,980,640						1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	86 Peserta Didik	123,953,980,640
			1.01..04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	41,240,061,592				1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA			Rasio Guru/ Murid jenjang SD	1:20	41,240,061,592	
						Rasio Guru/ Murid	1:20								Rasio Guru/ Murid	1:20		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				KEPENDIDIKAN	jenjang SMP								KEPENDIDIKAN	jenjang SMP			
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	41,240,061,592						1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	41,240,061,592	
					Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang								Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang		
				1.01.04.2.01.000 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	696,061,592						1.01.04.2.01.000 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	696,061,592	
				1.01.04.2.01.000 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	350 Laporan	40,544,000,000						1.01.04.2.01.000 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	350 Laporan	40,544,000,000	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan							Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan	
Dinas Perhubungan							598,910,818,339	Dinas Perhubungan							580,204,819,656
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							598,910,818,339	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							580,204,819,656
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							598,910,818,339	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							580,204,819,656
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	104,164,000,206	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	101,646,870,571
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	61,276,733,970	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	59,575,832,580
2.15.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	61,276,733,970	2.15.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/bulan	59,575,832,580
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	5,647,613,461	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	4,193,554,979

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				2.15.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5,647,613,461					2.15.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	4,193,554,979
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	7,887,159,289					2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	8,524,989,526
				2.15.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	7,887,159,289					2.15.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8,524,989,526
				2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	29,352,493,486					2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	29,352,493,486
					Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan							Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan	
				2.15.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15,959,893,090					2.15.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	15,959,893,090
				2.15.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	13,392,600,396					2.15.01.2.10.000 1 Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	13,392,600,396

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
			2.15..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	487,594,521 ,168		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	48 km/jam	472,219,408 ,483						
				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48,70 %							
				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%				Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%							
				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%				Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%							
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	234,572,671 ,293		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	228,405,504 ,882						
				Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota	31 Kawasan				Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota	31 Kawasan							

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Surabaya								Surabaya		
				2.15.02.2.02.000	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	64,141,775,197					2.15.02.2.02.000	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3000 Unit	62,428,408,019
				2.15.02.2.02.000	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	10,738,925,544					2.15.02.2.02.000	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	10,076,042,720
				2.15.02.2.02.000	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	102252 Unit	135,874,562,678					2.15.02.2.02.000	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	117.344 Unit	133,435,286,655
				2.15.02.2.02.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	23,817,407,874					2.15.02.2.02.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	22,465,767,488
				2.15.02.2.03	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	16,991,017,589					2.15.02.2.03	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	16,074,351,876
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	16,991,017,589					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	12 Unit	16,074,351,876
				2.15.02.2.03.001	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	16,785,981,684					2.15.02.2.03.001	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	14,551,850,297
				2.15.02.2.04	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	16,785,981,684					2.15.02.2.04	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	14,551,850,297
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	16,785,981,684					Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan	60 Berkas	14,551,850,297

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dan Pembangunan Fasilitas Parkir							dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
				2.15.02.2.04.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	16,785,981,684					2.15.02.2.04.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	14,551,850,297
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	7,637,808,345					2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	120.000 Unit	7,200,696,214
				2.15.02.2.05.000 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	7,637,808,345					2.15.02.2.05.000 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	7,200,696,214
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	30,804,537,313					2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Lokasi	32,516,217,128
					Jenis Sarana Angkutan Jalan	7 Jenis							Jenis Sarana Angkutan Jalan	7 Jenis	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Diawasi dan Dikendalikan								yang Diawasi dan Dikendalikan		
				2.15.02.2.06.000 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	27,085,111,046					2.15.02.2.06.000 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30,819,975,153
				2.15.02.2.06.001 7 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan	3,719,426,267					2.15.02.2.06.001 7 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	1,696,241,975
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	176,957,118,454					2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	14 Koridor	171,736,398,806
					Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang							Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	
				2.15.02.2.09.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 Laporan	3,536,694,587					2.15.02.2.09.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 Laporan	1,738,294,034

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
					untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
					2.15.02.2.09.000 3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	72 Unit	173,420,423,867						2.15.02.2.09.000 3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	167 Unit	169,998,104,772		
					2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	3,845,386,490						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1,734,389,280		
					2.15.02.2.11.000 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3,845,386,490						2.15.02.2.11.000 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1,734,389,280		
			2.15..03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan	100%	1,472,330,120				2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Persentase Penyelenggaraan Keselamatan	100%	1,129,898,886		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Transportasi Perairan								Transportasi Perairan		
				2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,472,330,120					2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	1,129,898,886
				2.15.03.2.04.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,472,330,120					2.15.03.2.04.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	1,129,898,886
				2.15..05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	5,679,966,845					2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	5,208,641,716
				2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta	2 Kali	5,679,966,845					2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta	2 Kali	5,208,641,716

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rencana Induk Perkeretaapian								Rencana Induk Perkeretaapian		
				2.15.05.2.01.000 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,679,966,845					2.15.05.2.01.000 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	5,208,641,716
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							32,785,578,871	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							39,966,449,567
				2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31,109,301,783					2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38,459,867,685
				2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			31,109,301,783					2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			38,459,867,685
				2.07..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	17,337,460,194					2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	17,520,559,333
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,532,830,670					2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,790,479,430
				2.07.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	15,532,830,670					2.07.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,790,479,430

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1,804,629,524					2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1,730,079,903			
						Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan								Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan		
					2.07.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201,212,700					2.07.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138,232,000			
					2.07.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,603,416,824					2.07.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,591,847,903			
					2.07..03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83,02 %	9,137,008,743					2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83,02 %	11,366,564,089			
						Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,7 %								Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan		90,7 %		
					2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja	4 Laporan	6,357,685,747					2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja	4 Laporan	7,967,376,136			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				berdasarkan Unit Kompetensi	berdasarkan klaster kompetensi						berdasarkan Unit Kompetensi	berdasarkan klaster kompetensi	
					Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan						Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan
				2.07.03.2.01.000 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang 5,836,722,384					2.07.03.2.01.000 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang 7,553,259,896
				2.07.03.2.01.000 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koor dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga 520,963,363					2.07.03.2.01.000 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koor dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga 414,116,240
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen 287,688,800					2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen 277,960,320
				2.07.03.2.04.000	Jumlah	50 287,688,800					2.07.03.2.04.000	Jumlah	50 277,960,320

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan						1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	
					2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	2,491,634,196					2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	3,121,227,633
					2.07.03.2.05.000 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2,491,634,196					2.07.03.2.05.000 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	3,121,227,633
					2.07..04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	2,553,785,082					2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	2,442,732,658
					2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	1,749,005,136					2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	1,789,927,207
					2.07.04.2.01.000 2 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	136,669,442					2.07.04.2.01.000 2 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	141,945,248
					2.07.04.2.01.000 3 Penyuluhan dan Bimbingan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	1200 Orang	584,652,683					2.07.04.2.01.000 3 Penyuluhan dan Bimbingan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	1200 Orang	570,615,973

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan							Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
					2.07.04.2.01.000 5 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang 1,027,683,011						2.07.04.2.01.000 5 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang 1,077,365,986
					2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan 363,652,260						2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan 295,082,260
					2.07.04.2.03.000 3 Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang 363,652,260						2.07.04.2.03.000 3 Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang 295,082,260
					2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan 441,127,686						2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan 357,723,191
					2.07.04.2.04.000 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang 441,127,686						2.07.04.2.04.000 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang 357,723,191

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
						(PMI)										(PMI)			
				2.07..05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14,41 %	2,081,047,764					2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14,41 %	7,130,011,605		
						Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%								Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	1,311,953,210					2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	1,198,625,371		
					2.07.05.2.01.000 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	220 Perusahaan	56,869,090						2.07.05.2.01.000 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	220 Perusahaan	55,950,000		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Industrial dan Terdaftar di WLKP Online								Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		
				2.07.05.2.01.0003	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,255,084,120					2.07.05.2.01.0003	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,142,675,371
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	769,094,554					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	5,931,386,234
				2.07.05.2.02.0001	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	435,649,627					2.07.05.2.02.0001	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	446,384,611

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
					2.07.05.2.02.000 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	333,444,927						2.07.05.2.02.000 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	313,961,623
														2.07.05.2.02.000 5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25650 Orang	5,171,040,0 00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								1,676,277,0 88	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								1,506,581,8 82
		3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,676,277,0 88			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,506,581,8 82
		3.31..02 PROGRAM				Persentase pelaku	22%	958,755,231			3.31.02 PROGRAM				Persentase pelaku	22%	798,071,672

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		usaha yang mendapat pemberdayaan					PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		usaha yang mendapat pemberdayaan			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	958,755,231					3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	798,071,672
				3.31.02.2.01.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	136,965,000					3.31.02.2.01.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	136,965,000
				3.31.02.2.01.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	821,790,231					3.31.02.2.01.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	661,106,672
			3.31..03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	375,277,657				3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	368,530,210
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	375,277,657					3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	368,530,210

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
				3.31.03.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	375,277,657					3.31.03.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	368,530,210
				3.31..04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung	100%	342,244,200					3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung	100%	339,980,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kebijakan perencanaan Industri								kebijakan perencanaan Industri		
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	342,244,200					3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota surabaya	1 Laporan	339,980,000
				3.31.04.2.01.000 1 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	342,244,200					3.31.04.2.01.000 1 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	339,980,000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							41,869,776,537	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							42,569,111,386
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41,869,776,537		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42,569,111,386
		2.23 URUSAN PEMERINTAHAN					38,789,224,886			2.23 URUSAN PEMERINTAHAN					39,289,263,786

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
		BIDANG PERPUSTAKAAN						BIDANG PERPUSTAKAAN									
			2.23..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,03 %	23,276,788,230					2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,03 %	21,902,164,817	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,772,127,877						2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,175,615,007	
				2.23.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	20,772,127,877						2.23.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	19,175,615,007	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	105,521,773						2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	105,521,773	
				2.23.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	105,521,773						2.23.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	105,521,773	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	627,548,538						2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	547,735,389	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2.23.01.2.07.001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	627,548,538					2.23.01.2.07.001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	547,735,389	
					2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,771,590,042					2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2,073,292,648	
					2.23.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320,279,999					2.23.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	293,237,129	
					2.23.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,451,310,043					2.23.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,780,055,519	
				2.23..02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	79,2 %	15,512,436,656				2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	79,2 %	17,387,098,969			
					Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	79,95 %						Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	79,95 %				
					Persentase	89.07%						Persentase	89.07%				

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan						perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	15,015,943,012				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	16,848,422,667
					Tingkat Kepuasan Pemustaka	83 nilai						Tingkat Kepuasan Pemustaka	83 nilai	
					Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	230 Lembaga						Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	1.482 Lembaga	
				2.23.02.2.01.000 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1502 Perpustakaan	13,549,411,490				2.23.02.2.01.000 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1502 Perpustakaan	15,363,537,587
				2.23.02.2.01.000 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	55,675,000				2.23.02.2.01.000 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1.058 Perpustakaan	55,675,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Standar Nasional Perpustakaan									Standar Nasional Perpustakaan			
					2.23.02.2.01.000 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	208,084,652						2.23.02.2.01.000 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	239,184,724
					2.23.02.2.01.000 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1502 Eksempla r	927,128,270						2.23.02.2.01.000 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1502 Eksempla r	914,381,756
					2.23.02.2.01.001 3 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustak aan	275,643,600						2.23.02.2.01.001 3 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	424 Perpustak aan	275,643,600
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	6445 orang	496,493,644						2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	6445 orang	538,676,302

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					2.23.02.2.02.001 0 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	255 Lokus	496,493,644						2.23.02.2.02.001 0 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	255 Lokus	538,676,302
		2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3,080,551,651			2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3,279,847,600	
				2.24..02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	29,42 %	2,990,342,741			2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	29,42 %	3,189,638,690				
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan		88,10 %	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan		88,10 %									
			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		16,03 %	Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		16,03 %									
			2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	1,058,508,805			2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	1,063,919,008					
				Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan	60 lembaga		Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan	60 lembaga									

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kearsipan Internal dengan kategori Cukup								Kearsipan Internal dengan kategori Cukup		
				2.24.02.2.01.000 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	813,764,526					2.24.02.2.01.000 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	813,764,526
				2.24.02.2.01.000 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	244,744,279					2.24.02.2.01.000 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Laporan	250,154,482
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	1,439,993,827					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	1,613,146,191
				2.24.02.2.02.000 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1,439,993,827					2.24.02.2.02.000 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1,613,146,191
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	8200 item	491,840,109					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	8200 item	512,573,491
					PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga							PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	69 Lembaga	
				2.24.02.2.03.000 1 Penyediaan	Jumlah Layanan Penyediaan	100 Pengguna	315,574,969					2.24.02.2.03.000 1 Penyediaan	Jumlah Layanan Penyediaan	100 Pengguna	336,308,351

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
					2.24.02.2.03.000 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan	176,265,140					2.24.02.2.03.000 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan	176,265,140	
			2.24..03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	79,98 %	90,208,910				2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	79,98 %	90,208,910
					2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	90,208,910					2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	90,208,910	
					2.24.03.2.01.000 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	880 Arsip	90,208,910					2.24.03.2.01.000 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	880 Arsip	90,208,910	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan						596,104,938,468		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan						603,023,285,711	
				1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		506,899,067,572						1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		483,109,405,442	
				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		333,404,220,991						1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		309,316,902,290	
				1.03..08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,51 %	328,262,337,505					1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,51 %	302,880,987,674
					Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,99 %							Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,99 %	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	87%							Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	87%	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan	246 Bangunan	328,262,337,505					1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan	246 Bangunan	302,880,987,674

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	pemeliharaan							Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	pemeliharaan				
					Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1756 Berkas							Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1756 Berkas			
					Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen							Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen			
					Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1893 Lokasi							Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1893 Lokasi			
				1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	140 Bangunan Gedung	286,190,603 ,940					1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang D iubahsuaikan	140 Bangunan Gedung	258,754,846 ,018		
				1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung	30,200,143, 356					1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	161 Bangunan Gedung	32,021,793, 947		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kabupaten / Kota									Kabupaten / Kota			
					1.03.08.2.01.001 9 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	597,764,419						1.03.08.2.01.001 9 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	597,764,419
					1.03.08.2.01.002 1 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Dokumen	6,135,319,803						1.03.08.2.01.002 1 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Dokumen	6,135,319,803
					1.03.08.2.01.002 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraann ya	1861 Orang	1,790,467,426						1.03.08.2.01.002 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraann ya	1861 Orang	1,913,795,765
					1.03.08.2.01.002 3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	1 Dokumen	3,348,038,561						1.03.08.2.01.002 3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	1 Dokumen	3,457,467,722

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
				1.03..11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	97%	629,803,242						1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	97%	660,098,284			
					1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	629,803,242							1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	660,098,284			
						1.03.11.2.01.001 1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga	629,803,242								1.03.11.2.01.001 1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga	660,098,284			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			1.03..12 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG		Persentase pelayanan penataan ruang	96%	4,512,080,244				1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG		Persentase pelayanan penataan ruang	96%	5,775,816,332
			1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	3,027,557,868				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	4,120,765,407
				1.03.12.2.01.000 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3,027,557,868					1.03.12.2.01.000 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4,120,765,407
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	1,484,522,376				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	1,655,050,925
				1.03.12.2.03.000 5 Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	659,149,280					1.03.12.2.03.000 5 Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	728,175,607

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pemanfaatan Ruang									Pemanfaatan Ruang			
					1.03.12.2.03.000 7 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	825,373,096						1.03.12.2.03.000 7 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	926,875,318
		1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						173,494,846,581			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						173,792,503,152
			1.04..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	41,298,545,815				1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	41,192,873,505
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	78,582,259					1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	78,582,259
					1.04.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	78,582,259						1.04.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	78,582,259
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan	100%	31,250,731,146					1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan	100%	31,428,175,496

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perangkat Daerah	Tunjangan ASN						Perangkat Daerah	Tunjangan ASN	
				1.04.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan 31,250,731,146					1.04.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan 31,428,175,496
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis 7,074,258,076					1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis 7,100,329,970
				1.04.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket 7,074,258,076					1.04.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket 7,100,329,970
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis 2,894,974,334					1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis 2,585,785,780
				1.04.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit 2,894,974,334					1.04.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit 2,585,785,780
				1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100% 20,266,176,130					1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100% 19,727,556,168
				1.04.02.2.05 Pembinaan	Jumlah Unit Hunian rumah	5233 Unit Hunian 20,266,176,130					1.04.02.2.05 Pembinaan	Jumlah Unit Hunian rumah	5233 Unit Hunian 19,727,556,168

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	susun Pemerintah Kota Surabaya						Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	susun Pemerintah Kota Surabaya	
				1.04.02.2.05.000 2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen 20,266,176,130					1.04.02.2.05.000 2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen 19,727,556,168
				1.04..03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97% 89,581,794,035					1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	97% 89,697,322,114
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis 89,581,794,035					1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis 89,697,322,114
				1.04.03.2.03.000 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah 89,581,794,035					1.04.03.2.03.000 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah 89,697,322,114
				1.04..04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100% 21,192,044,300					1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100% 21,769,053,879
				1.04.04.2.01 Pencegahan	Jumlah lokasi pelaksanaan	8 lokasi 21,192,044,300					1.04.04.2.01 Pencegahan	Jumlah lokasi pelaksanaan	8 lokasi 21,769,053,879

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan permukiman kumuh						Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan permukiman kumuh	
				1.04.04.2.01.000 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah 21,192,044,300					1.04.04.2.01.000 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah 21,769,053,879
				1.04..05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	80% 1,156,286,301					1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	80% 1,405,697,486
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen 1,156,286,301					1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	12 dokumen 1,405,697,486

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						1.04.05.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		1,156,286,301						1.04.05.2.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		1,405,697,486			
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										89,205,870,896	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										119,913,880,269		
		2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								89,205,870,896			2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								119,913,880,269		
			2.10..05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	4.825 M2		89,205,870,896				2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	4.825 M2		119,913,880,269				
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		89,205,870,896					2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	1 lokasi		119,913,880,269				

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					2.10.05.2.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89,205,870,896						2.10.05.2.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	119,913,880,269	
Dinas Sosial								104,066,411,668	Dinas Sosial								100,305,714,777	
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							104,066,411,668		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100,305,714,777	
		1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						104,066,411,668			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						100,305,714,777	
			1.06..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	21,167,205,506				1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	21,012,387,182	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,012,806,399					1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,552,084,199	
					1.06.01.2.02.000	Jumlah Orang	48	18,012,806,						1.06.01.2.02.000	Jumlah Orang	48	18,552,084,	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan 399					1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan 199
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100% 1,886,979,894					1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100% 972,411,280
				1.06.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket 1,886,979,894					1.06.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket 972,411,280
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100% 1,267,419,213					1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100% 1,487,891,703
				1.06.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 1,267,419,213					1.06.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 1,487,891,703
				1.06..02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan	94.12% 6,332,770,225					1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan	94.12% 6,867,297,495

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					sosial								sosial		
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97%							Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	87.97%	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	6,332,770,225					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	6,867,297,495
					Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	367 orang							Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	852 orang	
				1.06.02.2.03.000 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	590 Orang	5,501,694,537					1.06.02.2.03.000 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545 Orang	6,071,260,156
				1.06.02.2.03.000 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	8 Lembaga	831,075,688					1.06.02.2.03.000 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	8 Lembaga	796,037,339

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
				1.06..04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	40,391,045,686				1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	41,017,046,315			
					Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%						Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%				
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%				
					Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%						Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%				
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	29,844,376,108				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	29,766,986,924			
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial	12 kali				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	dasar bagi Anak						Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	dasar bagi Anak			
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali		
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali		
				1.06.04.2.01.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Orang	13,487,004,921					1.06.04.2.01.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.346 Orang	13,487,004,921
				1.06.04.2.01.000 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	367,319,572					1.06.04.2.01.000 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	202,060,034
				1.06.04.2.01.000 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	8,386,630,063					1.06.04.2.01.000 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	8,087,866,122

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				1.06.04.2.01.000 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang 6,856,458,727					1.06.04.2.01.000 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	376 Orang 7,282,546,015
				1.06.04.2.01.001 2 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang 746,962,825					1.06.04.2.01.001 2 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang 707,509,832
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan 10,546,669,578					1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan 11,250,059,391
					Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali						Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali
				1.06.04.2.02.000 2 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang 3,703,644,466					1.06.04.2.02.000 2 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang 4,054,258,696
				1.06.04.2.02.000 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	900 Orang 6,843,025,112					1.06.04.2.02.000 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	1700 Orang 7,195,800,695

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						Kabupaten/Kota											Kabupaten/Kota						
				1.06..05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		87%		34,824,476,671						1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		87%		30,041,635,309	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR		12 laporan		34,824,476,671						1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR		12 laporan		30,041,635,309	
						Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial		12 laporan						Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial				12 laporan					
					1.06.05.2.02.000 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		92892 Orang		4,082,444,741							1.06.05.2.02.000 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		70.312 Orang		4,813,806,705	
					1.06.05.2.02.000 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		33723 Keluarga		658,855,486							1.06.05.2.02.000 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		25.901 Keluarga		668,752,856	
					1.06.05.2.02.000 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		33723 Keluarga		26,291,553,140							1.06.05.2.02.000 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		25.901 Keluarga		20,767,452,444	
					1.06.05.2.02.000	Jumlah Orang		2229		3,791,623,3							1.06.05.2.02.000	Jumlah Orang		680		3,791,623,3	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	04						4 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	04
				1.06..07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	1,350,913,580					1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	1,367,348,476
					1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	1,350,913,580						1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	1,367,348,476
					1.06.07.2.01.000 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,350,913,580						1.06.07.2.01.000 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	1,367,348,476
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga								1,793,647,044,506	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga								1,726,436,057,449
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,793,647,044,506		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,726,436,057,449
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN						1,793,647,044,506			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN						1,726,436,057,449

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	RUANG					RUANG			
	1.03..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	140,369,903,713		1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95%	138,164,787,513
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,50 %				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,50 %	
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	157,173,760		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	157,173,760
	1.03.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			1.03.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	51,223,248,164		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	53,636,443,554
	1.03.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	202 Orang/bulan			1.03.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	202 Orang/bulan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Tunjangan ASN	Tunjangan ASN							Tunjangan ASN	Tunjangan ASN		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	5,756,462,515					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	5,673,541,821
				1.03.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,756,462,515					1.03.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,673,541,821
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	83,233,019,274					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	78,697,628,378
					Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%							Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	
				1.03.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	15,290,831,891					1.03.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	14,701,597,127

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Operasional atau Lapangan									Operasional atau Lapangan			
					1.03.01.2.09.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	16,093,425,170						1.03.01.2.09.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	15,684,143,883
					1.03.01.2.09.000 9 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	51,848,762,213						1.03.01.2.09.000 9 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	48,311,887,368
			1.03..02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	51,297,298,237				1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	53,466,759,630
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	70 unit	51,297,298,237					1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	70 unit	53,466,759,630
					1.03.02.2.01.008 5 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	290 Unit	51,297,298,237						1.03.02.2.01.008 5 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	290 Unit	53,466,759,630

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
			1.03..05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	7,140,325,823				1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	6,309,632,362		
				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3						Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	917 m3			
			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	7,140,325,823				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	130 kelurahan	6,309,632,362		
				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis						Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis			
				1.03.05.2.01.003 8 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,676,665,577					1.03.05.2.01.003 8 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,650,374,056		
				1.03.05.2.01.003 9 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik	50 Rumah Tangga	1,463,660,246					1.03.05.2.01.003 9 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik	1.250 Rumah Tangga	659,258,306

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Sesuai dengan Standar								Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Sesuai dengan Standar		
			1.03..06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	881,484,794,323				1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	848,744,914,898
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1000 lokasi	881,484,794,323					1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1000 lokasi	848,744,914,898
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen								Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	82 dokumen	
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi								Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi	
					1.03.06.2.01.001 2 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	353,128,225,994						1.03.06.2.01.001 2 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7.500 M	231,458,124,347
					1.03.06.2.01.002 5 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan	9,210,978,232						1.03.06.2.01.002 5 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	10 Sistem Drainase Perkotaan	12,922,944,708
					1.03.06.2.01.002	Jumlah Sistem	15 Sistem	190,321,824						1.03.06.2.01.002	Jumlah Sistem	10 Sistem	163,286,308

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					8 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Drainase Perkotaan	,437						8 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Drainase Perkotaan	,066
					1.03.06.2.01.002 9 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan	250,672,021,627						1.03.06.2.01.002 9 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	338,738,658,157
					1.03.06.2.01.003 0 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	7,306,391,509						1.03.06.2.01.003 0 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	52 Dokumen	13,488,156,986
					1.03.06.2.01.003 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	70,845,352,524						1.03.06.2.01.003 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	88,850,722,634
				1.03..07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	2,193,755,882				1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	1,801,168,327			
					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%						Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%				
				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	2,193,755,882				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	1,801,168,327			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen					Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen
				1.03.07.2.01.001 8 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,413,022,096				1.03.07.2.01.001 8 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit
				1.03.07.2.01.003 0 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	780,733,786				1.03.07.2.01.003 0 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit
				1.03..10 PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	190.000 m2	711,160,966 ,528				1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	190.000 m2
					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter						Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.700 meter
				1.03.10.2.01	Jumlah lokasi	325 lokasi	711,160,966				1.03.10.2.01	Jumlah lokasi	200 lokasi
													677,948,794 ,719
													677,948,794

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun		,528				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun		,719	
					Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi						Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	3 lokasi		
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	2.500 lokasi		
				1.03.10.2.01.002 9 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jaringan Jalan dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jaringan Jalan dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	11,130,668,935				1.03.10.2.01.002 9 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jaringan Jalan dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Jaringan Jalan dan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	14,987,660,804	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Jembatan					Jembatan
				1.03.10.2.01.003 0 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					1.03.10.2.01.003 0 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
				Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya
				11.7 KM					11.7 KM
				9,229,012,098					7,341,936,407
				1.03.10.2.01.003 2 Pembangunan Jalan					1.03.10.2.01.003 2 Pembangunan Jalan
				Panjang Jalan yang Dibangun					Panjang Jalan yang Dibangun
				11.7 KM					11.7 KM
				414,412,327,305					368,901,092,688
				1.03.10.2.01.004 1 Pelebaran Jalan Menambah Lajur					1.03.10.2.01.004 1 Pelebaran Jalan Menambah Lajur
				Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur
				0.6 KM					0.6 KM
				185,275,191,952					184,194,779,378
				1.03.10.2.01.004 6 Pemeliharaan Rutin Jalan					1.03.10.2.01.004 6 Pemeliharaan Rutin Jalan
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin
				40 KM					110 KM
				91,113,766,238					102,523,325,442
Inspektorat				31,786,175,256	Inspektorat				31,644,147,124
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31,786,175,256	6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31,644,147,124
6.01 INSPEKTORAT DAERAH				31,786,175,256	6.01 INSPEKTORAT DAERAH				31,644,147,124
6.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27,047,086,868	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27,037,932,124
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan				100%	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan				100%
6.01.01.2.02 Administrasi				24,441,629,500	6.01.01.2.02 Administrasi				25,360,144,435
Persentase ketepatan waktu				100%	Persentase ketepatan waktu				100%

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Kuangan Perangkat Daerah	pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				
				6.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	24,441,629,500		
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	712,326,943		
				6.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	712,326,943		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,893,130,425		
				6.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,893,130,425		
				6.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	2,418,016,900		
					Persentase	100%			
				6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	2,344,095,000		
					Persentase	100%			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu								penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu		
					Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%							Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga	1,526,862,100					6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga	1,478,950,000
					Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi							Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi	
					Jumlah dokumen hasil revidu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen							Jumlah dokumen hasil revidu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	
				6.01.02.2.01.000 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	384,379,100					6.01.02.2.01.000 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	370,400,000
				6.01.02.2.01.000 3 Revidu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Kinerja	10 Laporan	340,348,000					6.01.02.2.01.000 3 Revidu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revidu Laporan Kinerja	10 Laporan	328,175,000

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			6.01.02.2.01.000 4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	422,240,000	
			6.01.02.2.01.000 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	379,895,000	
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	891,154,800	
			6.01.02.2.02.000 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	5 Laporan	314,326,000	
			6.01.02.2.02.000 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	576,828,800	
			6.01..03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	2,321,071,488	
			6.01.02.2.02.000 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	5 Laporan	304,400,000	
			6.01.02.2.02.000 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	560,745,000	
			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	2,262,120,000	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%						Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%		
					Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%						Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	532,417,600					6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	514,800,000
				6.01.03.2.01.000 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	266,208,800					6.01.03.2.01.000 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	257,400,000
				6.01.03.2.01.000 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	266,208,800					6.01.03.2.01.000 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	257,400,000
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan	Jumlah laporan yang dihasilkan	65 Laporan	1,788,653,888					6.01.03.2.02 Pendampingan dan	Jumlah laporan yang dihasilkan	65 Laporan	1,747,320,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
					6.01.03.2.02.000 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	339,181,388						6.01.03.2.02.000 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	328,900,000
Kec. Asemrowo								27,126,168,373	Kec. Asemrowo								27,390,518,113
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							27,126,168,373		7 UNSUR KEWILAYAHAN							27,390,518,113
		7.01 KECAMATAN						27,126,168,373			7.01 KECAMATAN						27,390,518,113
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	18,779,946,723				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	19,039,354,563
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,071,543,091					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,900,797,101
					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	16,071,543,091						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,900,797,101

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan					Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan
				100%					100%
				2,558,278,706					2,988,432,536
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				17 Paket					17 Paket
				2,558,278,706					2,988,432,536
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan					Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan
				100%					100%
				150,124,926					150,124,926
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				4 Unit					4 Unit
				150,124,926					150,124,926
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah					Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah
				100%					100%
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat
				100%					100%
				82,208,693					82,208,693

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27,27 %	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,450,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,450,000
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,450,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,450,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	45,659,200					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	45,659,200
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	45,659,200					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	45,659,200

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	33,099,493						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	33,099,493	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
						7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,189,424						7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,189,424	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,748,633						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,748,633
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,161,436						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12,161,436
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	8,118,654,965				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	8,123,596,865
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	8,055,750,965					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	8,055,750,965
						jumlah kelurahan	3					jumlah kelurahan			3		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	kelurahan							yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	kelurahan	
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	5,340,000					7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	5,340,000
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,965,831,492					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,041,459,729
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,516,065,899					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,516,065,899
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,488,107,932					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,488,107,932
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	369,072,600					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	369,072,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,299,065,440					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,223,437,203
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	412,267,602					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	412,267,602
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha	62,904,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha	67,845,900
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	54,264,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	59,205,900
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi	12 Laporan	8,640,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi	12 Laporan	8,640,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Masyarakat	Masyarakat							Masyarakat	Masyarakat			
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	131,426,992					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	131,426,992
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	131,426,992						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	131,426,992
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	131,426,992						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	131,426,992
					7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	13,931,000						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	13,931,000
					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan	Jumlah potensi konflik yang dapat	20 Kasus	13,931,000						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan	Jumlah potensi konflik yang dapat	20 Kasus	13,931,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas							Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas				
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	3,200,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	3,200,000		
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	10,731,000					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	10,731,000		
Kec. Benowo							32,575,244,951	Kec. Benowo							33,267,751,239		
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						32,575,244,951		7 UNSUR KEWILAYAHAN						33,267,751,239		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	7.01 KECAMATAN			32,575,244,951		7.01 KECAMATAN			33,267,751,239
	7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.00%	21,030,838,229		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.00%	21,723,271,762
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,392,610,323		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,604,269,983
	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	18,392,610,323		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	18,604,269,983
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	2,546,915,906		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,027,689,779
	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,546,915,906		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3,027,689,779
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	91,312,000		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	91,312,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	91,312,000					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	91,312,000	
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	83,908,212					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	82,012,920		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	5,308,092					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	2,700,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	5,308,092					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	2,700,000		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	55,749,600					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	56,462,400
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55,749,600					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	198 Laporan	56,462,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	22,850,520					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	22,850,520
					Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,863,840					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,863,840
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,122,840					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,122,840
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,279,516,258					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,287,074,458		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,180,468,918					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,180,468,918		
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyar akatan	4,800,000						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyar akatan	4,800,000		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	9 Unit	2,299,563,182						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	9 Unit	2,299,563,182		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Prasarana Kelurahan	Terbangun								Prasarana Kelurahan	Terbangun		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,979,781,485						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,979,781,485
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,213,518,899						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,213,518,899
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,230,029,447						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,230,029,447
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	905,400,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	905,400,000
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	727,010,854						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	727,010,854
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	482,053,590						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	482,053,590

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,338,311,461					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,338,311,461
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	99,047,340					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	106,605,540
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,992,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	90,550,200
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,055,340					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,055,340
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	159,216,552					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	154,339,199

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi			159,216,552
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi			154,339,199
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			159,216,552
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			154,339,199
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			21,765,700
				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			21,052,900
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 Kasus			21,765,700
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 Kasus			21,052,900
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi	2 Topik			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	7,100,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	6,387,200
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	14,665,700					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	14,665,700
Kec. Bubutan							44,441,007,957	Kec. Bubutan							44,661,510,540
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						44,441,007,957		7 UNSUR KEWILAYAHAN						44,661,510,540
	7.01 KECAMATAN						44,441,007,957		7.01 KECAMATAN						44,661,510,540
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12%	23,436,791,962			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12%	23,667,423,745

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAERAH KABUPATEN/KOTA								DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,752,594,721					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,290,118,051
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,752,594,721					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	19,290,118,051
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,573,363,441					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,281,741,930
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	3,573,363,441					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,281,741,930
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	110,833,800					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	95,563,764
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi	5 Unit	110,833,800					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi	2 Unit	95,563,764

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						atau Bangunan Lainnya	litasi									atau Bangunan Lainnya	litasi						
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	191,099,498					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	191,099,498							
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37%								
					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000							
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000							
					7.01.02.2.02	Jumlah lembaga	414	167,706,400					7.01.02.2.02	Jumlah lembaga	414	167,706,400							

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	Lembaga						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	Lembaga		
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,706,400						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,706,400
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	18,893,098						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	18,893,098
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang	6 Bidang							Jumlah Bidang	6 Bidang			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	
			7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	1,132,200				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	1,132,200
			7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,023,089				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,023,089
			7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,737,809				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,737,809
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang	87.50%	20,649,016,547				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang	87.50%	20,646,687,347

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	menindaklanjuti konsep inovasi					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	menindaklanjuti konsep inovasi	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,492,848,547			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan
			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	10,800,000			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,415,206,277			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,021,933,933			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit 1,611,278,391						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit 2,622,620,714
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit 2,751,399,209						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit 2,751,399,209
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit 3,876,388,820						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit 3,929,768,820
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 602,509,249						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 602,509,249
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 2,451,375,765						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 1,440,033,442
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 2,053,816,903						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 2,053,816,903

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,356,600,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,356,600,000
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,341,540,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,288,160,000
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	460 Lembaga	156,168,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	304 Lembaga	157,738,800
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	140,448,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	153,238,800
				7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	15,720,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	4,500,000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	143,153,400				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	143,153,400
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	143,153,400				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	143,153,400
			7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,153,400				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,153,400
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	20,946,550				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	13,146,550
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	24 Kasus	20,946,550				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	24 Kasus	13,146,550

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bersama Babinsa/Babinkamt ibmas							Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	13,256,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	5,456,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	7,690,550					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	7,690,550
Kec. Bulak							31,498,679,114	Kec. Bulak							32,048,136,860
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						31,498,679,114		7 UNSUR KEWILAYAHAN						32,048,136,860
		7.01 KECAMATAN					31,498,679,			7.01 KECAMATAN					32,048,136,

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
								114									860
				7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36%	21,791,584,843					7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.36%	22,345,967,245		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,676,993,159					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,742,676,299		
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17,676,993,159					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	17,742,676,299		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	4,011,034,884					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	4,512,569,346		
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,011,034,884					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,512,569,346		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	103,556,800					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	90,721,600		
				7.01.01.2.09.001	Jumlah Sarana dan	2 Unit	103,556,800					7.01.01.2.09.001	Jumlah Sarana dan	2 Unit	90,721,600		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	84,035,284					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	83,085,928		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6,540,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	3,540,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	2 Laporan	6,540,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	2 Laporan	3,540,000		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
				158 Lembaga					158 Lembaga
				66,848,800					66,848,800
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				12 Laporan					12 Laporan
				66,848,800					66,848,800
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidan g urusan pemerintahan					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidan g urusan pemerintahan
				24 Dokumen					24 Dokumen
				10,646,484					12,697,128

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat				terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat		
	Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	
	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	
7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	3,447,360	7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	6,447,360
7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,755,240	7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4,755,240
7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	2,443,884	7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	1,494,528

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	9,509,738,587					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	9,515,843,287		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	9,439,946,587					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	9,439,946,587		
						jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga								jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5 Lembaga Kemasyar akatan	5,550,000						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5 Lembaga Kemasyar akatan	5,550,000		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan							Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,706,563,386					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,706,563,386
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,707,995,747					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,749,440,720
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,689,696,641					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,690,877,794
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,263,419,105					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,273,427,371
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,363,523,257					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,322,078,284
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	505,914,727					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	495,906,461

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	341,320,183					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	340,139,030
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	855,963,541					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	855,963,541
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga	69,792,000					7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	460 Lembaga	75,896,700
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	67,032,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	73,136,700
				3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan								3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,760,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,760,000
				4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	109,899,600				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	99,819,600
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	109,899,600				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,819,600
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109,899,600				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,819,600
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	3,420,800				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	3,420,800
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan	Jumlah laporan potensi konflik	12 Laporan	3,420,800				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan	Jumlah laporan potensi konflik	12 Laporan	3,420,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas							Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		
					Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						46 Orang			
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	1,990,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	1,990,000
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	1,430,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	12 Laporan	1,430,800

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peraturan Perundang- Undangan	Peraturan Perundang- Undangan							Peraturan Perundang- Undangan	Peraturan Perundang- Undangan	
Kec. Dukuh Pakis							34,382,736,606	Kec. Dukuh Pakis							35,006,504,026
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						34,382,736,606		7 UNSUR KEWILAYAHAN						35,006,504,026
		7.01 KECAMATAN					34,382,736,606			7.01 KECAMATAN					35,006,504,026
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.79%	20,719,276,317			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.79%	21,333,293,287
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,569,082,701			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,579,286,781
		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	17,569,082,701			7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	17,579,286,781
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,027,235,416			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,631,048,306
		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	3,027,235,416			7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	3,631,048,306

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Kantor	Disediakan							Kantor	Disediakan		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	122,958,200					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	122,958,200
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	122,958,200					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	122,958,200
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99,558,187					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99,558,187
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	4 Lembaga	3,600,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada	4 Lembaga	3,600,000

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Tingkat Kecamatan	tingkat kecamatan				
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	71,652,000		
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71,652,000		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan	Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	24,306,187		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat							Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan
			7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3,256,028					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen 3,256,028
			7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	12 Laporan	11,701,099					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	12 Laporan 11,701,099

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					yang terkait dengan Nonperizinan	Pemerintahan								yang terkait dengan Nonperizinan	Pemerintahan		
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,349,060						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,349,060
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,401,928,574					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,410,940,274		
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	13,293,976,574					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	13,293,976,574		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga Kemasyar akatan	7,200,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga Kemasyar akatan	7,200,000	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,334,726,331						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,334,726,331
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,341,327,032						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,341,327,032
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,793,717,109						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,793,717,109
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,813,285,505						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,813,285,505
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	761,360,091						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	761,360,091
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	655,964,850						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas / Ormas	655,964,850

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	957,400,456					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	957,400,456	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	628,995,200					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	628,995,200	
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	107,952,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	116,963,700	
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga		
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	98,952,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	107,963,700	
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas	Jumlah Laporan Fasilitas	1 Laporan	9,000,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas	Jumlah Laporan Fasilitas	1 Laporan	9,000,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	141,514,200					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	142,252,950
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	141,514,200					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	142,252,950
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	141,514,200						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	142,252,950
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	20,459,328					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	20,459,328

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	36 Kasus	20,459,328					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	36 Kasus	20,459,328
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	11,874,528					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	11,874,528
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800
Kec. Gayungan							36,572,508,600	Kec. Gayungan							36,317,199,721

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	7 UNSUR KEWILAYAHAN			36,572,508,600		7 UNSUR KEWILAYAHAN			36,317,199,721
	7.01 KECAMATAN			36,572,508,600		7.01 KECAMATAN			36,317,199,721
	7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.23%	23,305,743,238		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.23%	23,031,873,891
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,968,301,495		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,244,973,175
	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19,968,301,495		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19,244,973,175
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,213,762,343		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,663,221,316
	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	3,213,762,343		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,663,221,316
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	123,679,400		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	123,679,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Pemerintahan Daerah									Pemerintahan Daerah					
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	123,679,400						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	123,679,400		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	66,691,786						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	66,691,786			
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.15%								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	31.15%				
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,000,000						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,000,000			
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	3,000,000						7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	3,000,000		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	44,859,200						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	44,859,200		
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44,859,200						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44,859,200		
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	18,832,586						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	18,832,586		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
			7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	8,878,608				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	8,878,608
			7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,997,148				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	7,997,148
			7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	4 Laporan	1,956,830				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	4 Laporan	1,956,830

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	yang Dilimpahkan								Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	yang Dilimpahkan				
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,054,881,944					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,063,602,944				
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	12,947,326,184					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	12,947,326,184				
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan					
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	3,600,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	3,600,000				
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	9 Unit	2,002,310,2					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	5 Unit	2,002,310,2				

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82						2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 1,403,707,459						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit 1,403,707,459
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 2,837,235,828						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit 3,160,544,233
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 1,941,378,945						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit 1,941,378,945
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 924,135,775						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 800,485,486
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 959,099,440						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 959,099,440
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 1,827,659,646						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 1,628,001,530

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,048,198,809						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,048,198,809
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	107,555,760					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	116,276,760		
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga			
						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	95,760,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	104,481,000	
						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,795,760					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	11,795,760	
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase koordinasi penanganan	100%	121,414,432					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase koordinasi penanganan	100%	131,253,900		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KETERTIBAN UMUM		pelanggaran Perda di Kecamatan					KETERTIBAN UMUM		pelanggaran Perda di Kecamatan			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	121,414,432				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	131,253,900	
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121,414,432				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	131,253,900	
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	23,777,200				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	23,777,200	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	45 Kasus	23,777,200				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	45 Kasus	23,777,200	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Daerah	Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik			
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	230 Orang	10,900,000		
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	12,877,200		
Kec. Genteng					Kec. Genteng				
				7 UNSUR KEWILAYAHAN			39,587,883,743		40,140,194,374
				7.01 KECAMATAN			39,587,883,743		40,140,194,374
				7.01..01 PROGRAM PENUNJANG	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97.60%	24,782,027,227		25,316,605,158
				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97.60%			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan					
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,186,620,097			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,964,423,147			
			7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	20,186,620,097			7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19,964,423,147			
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,498,945,530			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,255,720,411			
			7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,498,945,530			7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	5,255,720,411			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	96,461,600			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	96,461,600			
			7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	96,461,600			7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	96,461,600			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	106,711,747				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	106,711,747			
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
					Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38%						Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38%				
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,996,787				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,996,787			
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,996,787				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,996,787			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Terkait									Terkait			
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	74,037,600						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	74,037,600
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74,037,600						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74,037,600
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	27,677,360						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	27,677,360
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						kepada Camat											kepada Camat						
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		6 Bidang Urusan									Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		6 Bidang Urusan				
					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen		11,795,760						7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen		11,795,760		
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan		5,712,000						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan		5,712,000		
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan		10,169,600						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan		10,169,600		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	14,542,953,009				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	14,560,685,709
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%						
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,331,028,869				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,331,028,869		
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan							
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	17,319,055					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	17,319,055
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,680,174,306					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,680,174,306
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	13 Unit	1,923,736,448					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	7 Unit	2,137,857,659

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun								Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	66 Unit	2,308,022,048						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,390,762,186
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1,456,501,218						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,339,591,233
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	1,467,926,750						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,517,667,288
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,967,501						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,075,877,486
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	903,032,103						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	853,291,565
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,070,300,229						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	987,560,091

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,354,728,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,354,728,000
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,190,321,211						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	976,200,000
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	23 Lembaga	211,924,140					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	23 Lembaga	229,656,840		
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga			
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	194,712,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	212,444,700		
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan	12 Laporan	17,212,140					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan	12 Laporan	17,212,140		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat								Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat		
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	133,986,000					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	133,986,000	
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	133,986,000					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	133,986,000	
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	133,986,000						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	133,986,000	
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	22,205,760					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	22,205,760	
					7.01.05.2.01	Jumlah potensi	9 Kasus	22,205,760					7.01.05.2.01		Jumlah potensi	9 Kasus	22,205,760	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas			
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	11,474,760					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64 Orang	11,474,760	
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	10,731,000					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	10,731,000	
Kec. Gubeng								47,109,787,808	Kec. Gubeng								47,814,054,973
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							47,109,787,		7 UNSUR KEWILAYAHAN							47,814,054,

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
			808					973	
7.01 KECAMATAN			47,109,787,808		7.01 KECAMATAN			47,814,054,973	
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.02%	27,026,738,863		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.02%	27,715,889,628	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,971,096,074		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,827,302,954	
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	21,971,096,074		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	21,827,302,954	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,881,001,989		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,713,945,874	
7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,881,001,989		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5,713,945,874	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	174,640,800		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	174,640,800	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Daerah										Daerah					
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	174,640,800							7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	174,640,800	
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	150,383,338						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	150,383,338	
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%									Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77%									Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77%		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,000,000						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3,000,000	
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	3,000,000							7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan	3,000,000	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	113,648,000						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	113,648,000		
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	113,648,000						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	113,648,000		
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	33,735,338						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	33,735,338		
						Jumlah Bidang	1 Bidang								Jumlah Bidang	1 Bidang			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan						urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	13,583,786					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	13,583,786
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,287,712					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12,287,712
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,863,840					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,863,840

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,765,674,707					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,780,791,107			
						Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%							Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%				
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	19,584,990,707					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	19,584,990,707				
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan					
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	9,000,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	9,000,000			
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	2,321,336,059					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	2,356,729,963			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun								Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,005,843,013						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,658,664,061
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,545,644,856						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,545,644,856
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,386,491,302						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,386,491,302
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,830,202,114						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,830,202,114
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,328,258,554						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,328,258,554
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	714,685,302						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	714,685,302

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	Kelurahan				Kelurahan		
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,051,757,1 17	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,051,757,1 17
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,849,242,0 48	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,813,848,1 44
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	871,200,000	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	871,200,000
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	804,853,417	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	804,853,417
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,866,476,9 25	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,213,655,8 77
7.01.03.2.03 Pemberdayaan	Jumlah Potensi Usaha yang	90 Unit Kerja	180,684,000	7.01.03.2.03 Pemberdayaan	Jumlah Potensi Usaha yang	90 Unit Kerja	195,800,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	difasilitasi.							Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	difasilitasi.		
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	165,984,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	181,100,400
				7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,700,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,700,000
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	147,423,250					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	147,423,250
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	147,423,250					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	147,423,250
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	147,423,250					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	147,423,250

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	19,567,650				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	19,567,650
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 Kasus	19,567,650					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 Kasus	19,567,650
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 Topik		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	55 Orang	3,650,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	55 Orang	3,650,000		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	15,917,650						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	15,917,650
Kec. Gunung Anyar								31,329,516,538	Kec. Gunung Anyar								31,720,621,585
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							31,329,516,538		7 UNSUR KEWILAYAHAN							31,720,621,585
		7.01 KECAMATAN						31,329,516,538			7.01 KECAMATAN						31,720,621,585
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.06%	22,277,203,794				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.06%	22,660,043,841
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,386,932,261				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,136,201,441
					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,386,932,261						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,136,201,441

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	5,788,815,833					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	6,422,386,700
					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	5,788,815,833					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	6,422,386,700
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	101,455,700					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	101,455,700
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	101,455,700					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	101,455,700
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	78,850,055					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	78,850,055
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	10,485,120					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	10,485,120
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10,485,120					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10,485,120
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	37,106,400					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	37,106,400

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Kecamatan									Kecamatan			
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37,106,400						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37,106,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	630 Dokumen	31,258,535					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	630 Dokumen	31,258,535		
					Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan					Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		12 laporan				
					Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan					Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan		12 laporan				
					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	630 Dokumen	10,419,588					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	630 Dokumen	10,419,588	
					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	12	10,419,359					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	12	10,419,359	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan							2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10,419,588						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10,419,588
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	8,796,859,364				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	8,805,124,364
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	8,639,713,869					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	8,639,713,869		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
					7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga	5	17,920,000						7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga	5	17,920,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyar akatan							1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyar akatan	
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,281,848,465						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,281,848,465
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,354,169,533						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,546,583,089
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,206,425,120						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,206,425,120
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,147,349,554						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,020,830,704
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	901,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	901,200,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	771,768,091					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	771,768,091
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	966,463,675					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	774,050,119
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	992,569,431					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,119,088,281
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	157,145,495					7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	165,410,495
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	111,081,600					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	119,346,600
				3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga								3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kemasyarakatan									Kemasyarakatan			
						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	46,063,895						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	46,063,895
						7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	149,741,725						7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	149,741,725
						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	149,741,725						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	149,741,725
						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149,741,725						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149,741,725
						7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN	Persentase penanganan potensi konflik	100%	26,861,600						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN	Persentase penanganan potensi konflik	100%	26,861,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PEMERINTAHAN UMUM		tidak menjadi konflik di Kecamatan						PEMERINTAHAN UMUM		tidak menjadi konflik di Kecamatan		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 kasus	26,861,600					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	24 kasus	26,861,600
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik						
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang	9,692,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43 Orang	9,692,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	12 Laporan	17,169,600					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	12 Laporan	17,169,600

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
		Undangan	Undangan				Undangan		
Kec. Jambangan				33,437,859,275	Kec. Jambangan				33,889,093,026
7 UNSUR KEWILAYAHAN				33,437,859,275	7 UNSUR KEWILAYAHAN				33,889,093,026
7.01 KECAMATAN				33,437,859,275	7.01 KECAMATAN				33,889,093,026
	7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.49%	21,972,275,069		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.49%	22,441,512,346
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,226,460,010		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,189,352,890
	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19,226,460,010		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	19,189,352,890
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	2,627,476,259		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,162,571,056
	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	2,627,476,259		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,162,571,056
	7.01.01.2.09	Persentase Barang	100%	118,338,800		7.01.01.2.09	Persentase Barang	100%	89,588,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Unit		118,338,800						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit		89,588,400		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		113,044,577				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		83,948,423					
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%							
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		29,53 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		29,53 %							
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		3,276,600					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		1,800,000				
					7.01.02.2.01.000	Jumlah Laporan		178		3,276,600						7.01.02.2.01.000	Jumlah Laporan		178		1,800,000		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
					1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan							1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan		168 Lembaga	52,466,400						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan		168 Lembaga	52,466,400
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	52,466,400						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	52,466,400
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan		1 Bidang Urusan	57,301,577						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan		1 Bidang Urusan	29,682,023

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Dilimpahkan kepada Camat	perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat						Dilimpahkan kepada Camat	perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	982,980				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	36 Dokumen
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	23,818,597				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan
													20,828,827

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Nonperizinan									Nonperizinan			
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	32,500,000						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4,040,052
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,156,354,125					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,158,374,025		
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,058,362,125					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,058,223,825		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyar akatan	1,638,300					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga Kemasyar akatan	1,500,000		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan								Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,363,792,721						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,363,792,721
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,653,855,261						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,653,855,261
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,576,549,086						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,576,549,086
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,824,568,023						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,788,863,840
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	965,016,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,000,720,183
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	459,103,634						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	459,103,634

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	439,900,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	439,900,000
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,773,939,100					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,773,939,100
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	97,992,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	100,150,200
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	82,992,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	90,550,200
				7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	48 Laporan	15,000,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	48 Laporan	9,600,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan																	
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi			
					Masyarakat	Masyarakat										Masyarakat	Masyarakat								
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan		100%		156,997,152					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan		100%		181,910,632			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		8 Lokasi		156,997,152						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		8 Lokasi		181,910,632	
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		360 Laporan		156,997,152						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		360 Laporan		181,910,632				
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		39,188,352					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		23,347,600			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan			Jumlah potensi konflik yang dapat		30 Kasus		39,188,352						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan			Jumlah potensi konflik yang dapat		30 Kasus		23,347,600	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas							Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	22,018,752					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	6,178,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	30 Laporan	17,169,600					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	30 Laporan	17,169,600
Kec. Karangpilang							34,972,935,417	Kec. Karangpilang							35,459,420,735
7 UNSUR KEWILAYAHAN							34,972,935,417	7 UNSUR KEWILAYAHAN							35,459,420,735

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	7.01 KECAMATAN			34,972,935,417		7.01 KECAMATAN			35,459,420,735
	7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.80%	22,710,973,127		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.80%	23,189,028,145
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,066,147,053		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,077,305,903
	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	18,066,147,053		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	18,077,305,903
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,521,311,174		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,986,787,669
	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,521,311,174		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,986,787,669
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	123,514,900		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	124,934,573

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	123,514,900						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	124,934,573
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	119,744,320					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	119,744,320		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	100%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,200,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,200,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	4,200,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	4,200,000		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	86,636,000					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	86,636,000
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86,636,000					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86,636,000
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	28,908,320					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	28,908,320
					Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat								pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	7,392,000					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	7,392,000		
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,142,400					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,142,400		
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	20,373,920					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	20,373,920		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,865,784,370				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	11,874,214,670
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,769,616,370				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,769,616,370			
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	7,200,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	7,200,000		
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	3 Unit	3,164,776,109					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	3 Unit	3,164,776,109		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Prasarana Kelurahan	Terbangun								Prasarana Kelurahan	Terbangun		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,730,911,838						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,731,411,838
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,465,930,660						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,465,930,660
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,831,136,624						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	1,987,272,378
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	286,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	286,200,000
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,789,701,048						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,633,565,294
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	411,600,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	411,600,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,082,160,0 91					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,081,660,0 91
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	96,168,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	104,598,300
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	92,568,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	100,998,300
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,600,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,600,000
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	241,440,600					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	241,440,600

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi			241,440,600
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			241,440,600
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			34,993,000
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	73 Kasus			34,993,000
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi	2 Topik			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	73 Kasus			34,993,000
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi	2 Topik			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	2,800,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	2,800,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	32,193,000					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	32,193,000
Kec. Kenjeran							37,487,314,038	Kec. Kenjeran							38,256,919,267
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						37,487,314,038		7 UNSUR KEWILAYAHAN						38,256,919,267
		7.01 KECAMATAN					37,487,314,038			7.01 KECAMATAN					38,256,919,267
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.74%	20,767,263,754				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.74%	21,525,822,383

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				DAERAH KABUPATEN/KOTA								DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,754,413,065					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,823,450,085
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	16,754,413,065					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	16,823,450,085
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,905,890,689					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,595,412,298
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,905,890,689					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,595,412,298
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	106,960,000					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	106,960,000
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi	5 Unit	106,960,000					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi	5 Unit	106,960,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					atau Bangunan Lainnya	litasi								atau Bangunan Lainnya	litasi		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	171,890,793				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	171,890,793			
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33%				
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,250,000				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,250,000			
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	2,250,000				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	2,250,000			

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait								Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait				
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	132,932,800						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	132,932,800		
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,932,800						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,932,800		
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	36,707,993						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	36,707,993		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan	1 Bidang Urusan			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	10,830,876					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	10,830,876
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	21,369,174					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	21,369,174
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4,507,943					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4,507,943

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	16,386,235,491					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	16,397,282,091		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	16,250,449,491					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	16,250,449,491		
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	3,000,000						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	3,000,000		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,189,641,301						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3,189,641,301		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit 3,100,329,884						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit 3,100,329,884
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 2,068,866,200						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit 2,136,890,657
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit 1,714,821,911						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit 1,714,821,911
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 2,183,776,938						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 2,183,776,938
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,166,413,257						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,098,388,800
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 787,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 787,200,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kelurahan									Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,036,400,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,036,400,000
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	135,786,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	146,832,600		
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan		38 Lembaga				
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	121,296,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	132,342,600	
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,490,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14,490,000	
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	137,939,200					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	137,939,200		
				7.01.04.2.01	Objek yang	10 Lokasi	137,939,200					7.01.04.2.01	Objek yang	10 Lokasi	137,939,200		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan										Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan						
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan		137,939,200						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan		137,939,200		
					7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		23,984,800						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		23,984,800		
					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		24 Kasus		23,984,800						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		24 Kasus		23,984,800		
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan		2 Topik										Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan		2 Topik			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	15,400,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	15,400,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800
Kec. Krembangan							43,288,079,740	Kec. Krembangan							43,752,173,555
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						43,288,079,740		7 UNSUR KEWILAYAHAN						43,752,173,555
	7.01 KECAMATAN						43,288,079,740		7.01 KECAMATAN						43,752,173,555
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.39%	22,924,095,358			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.39%	23,375,398,373

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KABUPATEN/KOTA								KABUPATEN/KOTA				
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,858,150,718					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,720,063,988
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17,858,150,718					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17,720,063,988
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,926,364,640					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,515,754,385
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,926,364,640					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	5,515,754,385
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	139,580,000					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	139,580,000
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	139,580,000					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	139,580,000

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Lainnya											Lainnya							
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	135,963,011						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	135,963,011						
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37,11 %							
					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	8,650,224						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	8,650,224						
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8,650,224						7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8,650,224						
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	431 Lembaga	99,508,000						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	431 Lembaga	99,508,000						

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan				
7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
12 Laporan					12 Laporan				
99,508,000					99,508,000				
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan					Jumlah Bidang urusan				
6 Bidang Urusan					6 Bidang Urusan				
27,804,787					27,804,787				

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat								pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat						
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	9,272,778					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	9,272,778				
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,272,778					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,272,778				
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,259,231					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,259,231				
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	20,067,867,771				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	20,080,658,571				

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAN KELURAHAN	konsep inovasi					DAN KELURAHAN	konsep inovasi	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,907,019,771			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga
			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	13,700,000			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,198,090,474			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4,060,818,803			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,956,759,564						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,029,738,863	
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,118,093,695						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,072,895,126	
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	825,824,735						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,225,779,715	
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,344,440,275						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,271,460,976	
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,027,962,560						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,073,161,129	
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1,416,340,596						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,272,440,367	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,156,140,137						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,167,282,957
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2,788,848,932						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,388,893,952
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	160,848,000						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	173,638,800
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	140,448,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	153,238,800
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20,400,000						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	20,400,000
					7.01..04 PROGRAM	Persentase	100%	146,115,000						7.01.04 PROGRAM	Persentase	100%	146,115,000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan						KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	146,115,000					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	146,115,000
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146,115,000					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146,115,000
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,038,600					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,038,600
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	7 Laporan	14,038,600					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	7 Laporan	14,038,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas							Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	7,600,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	7,600,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7 Laporan	6,438,600					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7 Laporan	6,438,600
Kec. Lakarsantri							43,711,354,046	Kec. Lakarsantri							44,319,699,720
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						43,711,354,046		7 UNSUR KEWILAYAHAN						44,319,699,720
		7.01 KECAMATAN					43,711,354,046			7.01 KECAMATAN					44,319,699,720

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25%	27,585,899,234				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25%	28,183,206,858
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,644,594,953				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,774,941,113
			7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	23,644,594,953				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	23,774,941,113
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,842,086,281				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,319,463,745
			7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,842,086,281				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,319,463,745
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	99,218,000				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	88,802,000
			7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Unit	99,218,000				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Unit	88,802,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	158,268,120				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	154,437,720
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45%								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.45%	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,250,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,250,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	6 Laporan	2,250,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	6 Laporan	2,250,000		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait								Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait		
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	130,324,000						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	130,324,000
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,324,000						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,324,000
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	25,694,120						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	21,863,720
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	2,159,136				7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	2,159,136
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	13,705,184				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	9,874,784
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,829,800				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,829,800
			3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan			

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Lain yang Dilimpahkan									Lain yang Dilimpahkan					
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,764,755,252					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,779,623,702		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,637,372,852					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,637,372,852		
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	6,000,000						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	6,000,000		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,379,691,707						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,379,691,707		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			15 Unit				13 Unit
			1,732,552,375				2,146,253,063
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			1 Unit				1 Unit
			2,346,013,795				2,392,359,560
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			3 Unit				3 Unit
			1,785,441,622				1,730,281,530
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			33 Unit				8 Unit
			1,445,344,160				1,451,344,160
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			1 Unit				1 Unit
			3,402,928,913				3,402,928,913
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			517,559,808				511,559,808
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Ormas yang				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Ormas yang
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang				Jumlah Pokmas dan Ormas yang
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			496,488,000				551,648,092

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	479,295,159						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	479,295,159
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	396,048,726						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	396,048,726
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,335,763,328						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	922,062,640
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	314,245,259						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	267,899,494
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	127,382,400					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	142,250,850		
						Jumlah Lembaga yang sarana	32 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana	32 Lembaga			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan								/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan		
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	118,742,400					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	133,610,850
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8,640,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	8,640,000
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	185,667,600					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	185,667,600
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	185,667,600					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	185,667,600
				7.01.04.2.01.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12 Laporan	185,667,600					7.01.04.2.01.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12 Laporan	185,667,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	16,763,840					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	16,763,840
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	44 Kasus	16,763,840					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	44 Kasus	16,763,840		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	160 Orang	8,900,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	90 Orang	8,900,000	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							Ketahanan Nasional	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6 Laporan	7,863,840					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6 Laporan	7,863,840		
Kec. Mulyorejo									50,384,208,050	Kec. Mulyorejo									51,096,260,129
	7 UNSUR KEWILAYAHAN							50,384,208,050		7 UNSUR KEWILAYAHAN							51,096,260,129		
		7.01 KECAMATAN						50,384,208,050			7.01 KECAMATAN						51,096,260,129		
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98%	30,132,592,414				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98%	30,829,539,493
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,106,871,512					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,167,202,772
						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bul an	23,106,871,512					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bul an	23,167,202,772		
				7.01.01.2.06 Administrasi			Persentase barang dan jasa untuk	100%	6,826,911,001					7.01.01.2.06 Administrasi			Persentase barang dan jasa untuk	100%	7,463,526,820

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Umum Perangkat Daerah	menunjang administrasi umum yang disediakan						Umum Perangkat Daerah	menunjang administrasi umum yang disediakan	
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket 6,826,911,001					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket 7,463,526,820
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100% 198,809,901					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100% 198,809,901
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit 198,809,901					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit 198,809,901
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100% 116,470,482					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100% 116,470,482
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%
					Persentase usulan musrenbang	40,51 %						Persentase usulan musrenbang	40,51 %

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kecamatan yang dipertimbangkan								kecamatan yang dipertimbangkan		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	80,436,650					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	80,436,650
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	80,436,650					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	80,436,650

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	31,533,832					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	31,533,832		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		1 Bidang Urusan	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		1 Bidang Urusan									
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		6 Bidang Urusan	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		6 Bidang Urusan									
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelayanan Perizinan Non Usaha									Pelayanan Perizinan Non Usaha			
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,023,360						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,023,360
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,964,525,882				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,979,630,882			
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%				
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,729,514,682				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,729,514,682			
					jumlah kelurahan yang melaksanakan	6 kelurahan						jumlah kelurahan yang melaksanakan	6 kelurahan				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					musbangkel berdasarkan konsep inovasi								musbangkel berdasarkan konsep inovasi		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6,060,000					7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6,060,000
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,767,176,621					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,767,176,621
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,701,463,668					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,866,943,944
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,604,846,407					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,604,846,407
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,595,160,677					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,595,160,677
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	1 Unit	3,577,849,1					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	2 Unit	3,577,849,1

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		22					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		22	
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,220,735,250					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,220,735,250	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,220,592,080					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,220,592,080	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	744,070,660					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	744,070,660	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	602,400,000							7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	602,400,000				
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,376,788,192							7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,211,307,916				
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	235,011,200					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	250,116,200							
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga								
						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	203,011,200							7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	218,116,200				
						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	32,000,000							7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	32,000,000				
				7.01..04 PROGRAM		Persentase	100%	154,682,872					7.01.04 PROGRAM		Persentase	100%	154,682,872						

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan						KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872	
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	15,936,400				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	15,936,400	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 Kasus	15,936,400				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 Kasus	15,936,400	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas							Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas			
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	2,830,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	2,830,000
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	13,106,400					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	13,106,400
Kec. Pabean Cantian							36,900,600,505	Kec. Pabean Cantian							37,808,553,846	
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						36,900,600,505		7 UNSUR KEWILAYAHAN						37,808,553,846	
		7.01 KECAMATAN					36,900,600,505			7.01 KECAMATAN					37,808,553,846	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,93 %	22,098,926,032				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,93 %	22,992,344,373
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,325,190,048					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,600,501,728
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,325,190,048					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	17,600,501,728
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,662,319,984					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,280,426,645
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,662,319,984					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,280,426,645
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	111,416,000					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	111,416,000
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Unit	111,416,000					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Unit	111,416,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	102,435,492					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	102,435,492		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	18%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	18%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	1,500,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	1,500,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	1,500,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	1,500,000		

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait								Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait		
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	73,136,000						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga	73,136,000
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73,136,000						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73,136,000
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	27,799,492						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	27,799,492
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	1 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,871,004				7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,871,004
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,765,184				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,765,184
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	8,163,304				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	8,163,304
			3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan			

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
					Lain yang Dilimpahkan										Lain yang Dilimpahkan				
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	14,564,871,631					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	14,579,406,631				
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,394,771,631					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,394,771,631				
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan					
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyar akatan	6,540,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyar akatan	6,540,000				
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	972,422,346					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	966,443,962				

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				2 Unit					2 Unit
				2,797,577,729					2,797,577,729
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				2 Unit					2 Unit
				2,486,096,573					2,348,196,344
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				2 Unit					2 Unit
				1,776,802,785					1,776,802,785
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				2,378,520,000					2,516,420,229
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				1,860,294,847					1,860,294,847
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				1,205,760,551					1,205,760,551

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	910,756,800						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	916,735,184
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	170,100,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	184,635,000		
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga			
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	159,600,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	174,135,000
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	10,500,000						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	10,500,000
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	118,182,550				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	118,182,550	
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya	Objek yang berpotensi	12 Lokasi	118,182,550						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya	Objek yang berpotensi	12 Lokasi	118,182,550

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan						Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan			
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,182,550					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,182,550
					7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	16,184,800					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	16,184,800
					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	20 Kasus	16,184,800					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	20 Kasus	16,184,800
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan	2 Topik	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kebangsaan dan ketahanan nasional								kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	7,600,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	7,600,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800
Kec. Pakal							37,266,076,030	Kec. Pakal							37,677,982,533
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						37,266,076,030		7 UNSUR KEWILAYAHAN						37,677,982,533
	7.01 KECAMATAN						37,266,076,030		7.01 KECAMATAN						37,677,982,533
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44 %	21,965,314,230			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44 %	22,367,336,933

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,340,088,868					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,124,423,068
					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	17,340,088,868					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	17,124,423,068
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,461,338,911					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,078,013,632
					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,461,338,911					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,078,013,632
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	163,886,451					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	164,900,233
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	163,886,451					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	164,900,233

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	96,651,900			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	96,651,900	
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		53.19%
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,700,000			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,700,000	
			7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000			7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	229 Lembaga	69,666,400			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	229 Lembaga	69,666,400	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan							Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan		
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,666,400					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,666,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	24,285,500					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	24,285,500
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan	6 Bidang Urusan	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat								terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	6,058,380					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	6,058,380
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,060,436					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,060,436
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,166,684					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,166,684
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,048,080,800				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,057,964,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,919,152,800					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,919,152,800
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	6,000,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	6,000,000
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33 Unit	2,778,835,530					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,778,835,530
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20 Unit	2,130,051,849					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,130,051,849
					7.01.03.2.02.000	3 Unit	3,530,559,7					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	3 Unit	3,530,559,7

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		79					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		79	
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,959,583,192					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,959,583,192	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,451,025,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,451,025,000	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	618,225,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	618,225,000	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	943,047,450					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	943,047,450	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	501,825,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	501,825,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	128,928,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	138,811,800
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	108,528,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	118,411,800
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	20,400,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	20,400,000
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	138,571,200					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	138,571,200
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	138,571,200					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	138,571,200

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,571,200						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,571,200
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	17,457,900						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	17,457,900
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	12 Kasus	17,457,900						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	12 Kasus	17,457,900
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	166 Orang	7,800,000						7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	120 Orang	7,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	9,657,900						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	9,657,900	
Kec. Rungkut									46,288,273,634	Kec. Rungkut									47,318,807,721
	7 UNSUR KEWILAYAHAN								46,288,273,634		7 UNSUR KEWILAYAHAN								47,318,807,721
		7.01 KECAMATAN							46,288,273,634			7.01 KECAMATAN							47,318,807,721
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %	28,319,978,151				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %	29,329,000,438		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,638,377,128					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,747,739,368		
					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan	Jumlah Orang yang Menerima	64 Orang/bul	22,638,377,128						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan	Jumlah Orang yang Menerima	64 Orang/bul	22,747,739,368		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	an							Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	an	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,571,068,903					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	6,470,728,950
					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,571,068,903						7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,470,728,950
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	110,532,120					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	110,532,120
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	110,532,120						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	110,532,120
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	142,390,552			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	142,390,552	
						Persentase jenis pelayanan yang	100%							Persentase jenis pelayanan yang	100%		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					dinilai baik oleh masyarakat										dinilai baik oleh masyarakat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	urusan pemerintahan							oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	urusan pemerintahan				
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	120,916,000						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	120,916,000	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	20,424,552						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	20,424,552	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	30 Dokumen	900,000						7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Non Perizinan	30 Dokumen	900,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan								Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan		
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,660,712						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,660,712
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,863,840
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	17,652,415,531				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	17,673,927,331			
					Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase potensi Usaha yang difasilitasi		100%		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan	1 Kelurahan	17,406,377,731				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan	1 Kelurahan	17,406,377,731			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kelurahan	potensi wilayahnya						Kelurahan	potensi wilayahnya			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyar akatan							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2 Lembaga Kemasyar akatan
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyar akatan	4,500,000				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyar akatan	4,500,000	
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,687,983,470				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,687,983,470	
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,115,258,764				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,115,258,764	
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,158,333,305				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,267,317,145	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				10 Unit					10 Unit
				1,846,330,677					1,846,330,677
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				4 Unit					4 Unit
				1,694,605,903					1,694,605,903
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				4 Unit					4 Unit
				1,561,742,776					1,561,742,776
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				910,376,800					910,376,800
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				899,014,294					899,014,294
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				2 Pokmas / Ormas					2 Pokmas / Ormas
				1,358,134,332					1,358,134,332

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,043,097,600						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,043,097,600
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,661,671,200						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,661,671,200
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,465,328,610						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,356,344,770
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	246,037,800					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	267,549,600		
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga			
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	236,208,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	257,719,800

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
			7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	9,829,800			
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	153,829,800			
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	153,829,800			
			7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,829,800			
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi	100%	19,659,600			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			UMUM		konflik di Kecamatan				UMUM		konflik di Kecamatan		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	150 Kasus	19,659,600			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	150 Kasus	19,659,600
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	9,829,800			7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	9,829,800
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5 Laporan	9,829,800			7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5 Laporan	9,829,800

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
Kec. Sambikerep			34,233,977,704		Kec. Sambikerep			34,741,495,265	
7 UNSUR KEWILAYAHAN			34,233,977,704		7 UNSUR KEWILAYAHAN			34,741,495,265	
7.01 KECAMATAN			34,233,977,704		7.01 KECAMATAN			34,741,495,265	
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02 %	20,429,055,861		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02 %	20,925,526,822	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,623,922,362		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,486,325,802	
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,623,922,362		7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	16,486,325,802	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	3,717,266,499		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	4,351,334,020	
7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	3,717,266,499		7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,351,334,020	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah	100%	87,867,000		7.01.01.2.09 Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah	100%	87,867,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan																	
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi			
						Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan										Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan					
						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit		87,867,000							7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit		87,867,000		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		112,673,201						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		112,673,201		
							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%										Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%				
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		24.37%										Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		24.37%				
						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		5,400,000						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		5,400,000	
						7.01.02.2.01.000 1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi		1 Laporan		5,400,000							7.01.02.2.01.000 1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi		1 Laporan		5,400,000		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga		79,744,800						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	262 Lembaga		79,744,800			
						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		79,744,800						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		79,744,800			
						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan		27,528,401						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan		27,528,401			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				kepada Camat	usaha yang dilimpahkan kepada Camat						kepada Camat	usaha yang dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	8,990,664				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	144 Dokumen
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	16,539,022				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,998,715						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,998,715
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,529,969,702					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,541,016,302
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,393,695,709					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,393,695,709		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan			
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasyar akatan	5,400,000						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasyar akatan	5,400,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan								Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,004,356,681						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,004,356,681
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,310,056,733						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,298,975,651
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,304,606,479						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,306,768,566
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,253,508,059						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	3,253,508,059
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,600,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,600,000
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	1,432,800,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Pokmas / Ormas	1,443,881,082

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	536,809,921					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	534,647,834
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	324,557,836					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	324,557,836
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	136,273,993					7.01.03.2.03	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	147,320,593
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	121,296,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	132,342,600
				3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan								3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,977,993					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,977,993
				4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	147,515,100				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	147,515,100
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	147,515,100					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	147,515,100
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	147,515,100					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	147,515,100
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,763,840				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,763,840
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	37 Kasus	14,763,840					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	37 Kasus	14,763,840

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan																		
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi						
					Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bersama Babinsa/Babinkamt ibmas									Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bersama Babinsa/Babinkamt ibmas												
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik										Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik										
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang			6,900,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang			6,900,000								
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	37 Laporan			7,863,840					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	37 Laporan			7,863,840								
Kec. Sawahan								56,248,007,894		Kec. Sawahan								57,308,898,360										
	7 UNSUR KEWILAYAHAN								56,248,007,894		7 UNSUR KEWILAYAHAN								57,308,898,360									
	7.01 KECAMATAN								56,248,007,		7.01 KECAMATAN								57,308,898,									

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan												
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi
								894									360
				7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,82 %	28,217,327,358					7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,82 %	29,257,287,424		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,305,572,113					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	22,685,819,103		
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	22,305,572,113					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	22,685,819,103		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,811,963,733					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	6,471,676,809		
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	5,811,963,733					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6,471,676,809		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	99,791,512					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	99,791,512		
				7.01.01.2.09.001	Jumlah Sarana dan	3 Unit	99,791,512					7.01.01.2.09.001	Jumlah Sarana dan	6 Unit	99,791,512		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	240,676,104					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	240,676,104				
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	74,03 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	74,03 %					
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	2,981,706					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	2,981,706				
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	2,981,706					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	2,981,706				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait								Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	218,037,600					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	218,037,600		
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	218,037,600					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	218,037,600		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	19,656,798					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	19,656,798		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan	1 Bidang Urusan			

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,331,732				7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,331,732
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,495,266				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,495,266
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9,829,800				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	9,829,800
			3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	27,596,145,618			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	27,617,076,018	
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	27,356,885,010				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	27,356,885,010	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	10,616,184					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	10,616,184	
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,266,060,464					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3,359,217,135	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 3,569,922,541						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 3,569,922,541
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 3,148,874,860						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit 3,148,874,860
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 2,140,285,802						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 2,140,285,802
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 1,578,695,914						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit 1,578,695,914
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit 3,229,849,812						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit 3,229,849,812
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,996,572,225						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,996,572,225
					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	2 Pokmas 2,569,680,3						7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	2 Pokmas 2,569,680,3

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	50					3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	50
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,710,987,79					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,710,987,79
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,822,782,138					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,822,782,138
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,204,934,585					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,204,934,585
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,107,622,356					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,014,465,685
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	239,260,608					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	260,191,008
					Jumlah Lembaga	72							Jumlah Lembaga	72	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Tingkat Kecamatan	yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	Lembaga						Tingkat Kecamatan	yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	229,824,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	250,754,400
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9,436,608					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	9,436,608
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	146,262,000					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	146,262,000
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	146,262,000					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	146,262,000
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	146,262,000					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	146,262,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	47,596,814				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	47,596,814
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	144 Kasus	47,596,814					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	144 Kasus	47,596,814
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik									Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	64 Orang	21,842,414						7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	64 Orang	21,842,414

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	25,754,400						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	25,754,400	
Kec. Semampir									46,379,389,807	Kec. Semampir									47,087,434,123
	7 UNSUR KEWILAYAHAN								46,379,389,807		7 UNSUR KEWILAYAHAN								47,087,434,123
		7.01 KECAMATAN							46,379,389,807			7.01 KECAMATAN							47,087,434,123
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,67 %	25,423,355,564				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,67 %	26,098,635,320
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,895,993,402					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,741,244,432
						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bul an	19,895,993,402						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bul an	19,741,244,432	
					7.01.01.2.06		Persentase barang	100%	5,254,066,5					7.01.01.2.06		Persentase barang	100%	6,084,095,2	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan		54					Administrasi Umum Perangkat Daerah	dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan		80
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,254,066,554					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,084,095,280
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	273,295,608					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	273,295,608
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	273,295,608					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	273,295,608
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	242,075,411				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	242,075,411		
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
				Persentase usulan	24.45%						Persentase usulan	24.45%			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan								musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	5,820,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	5,820,000
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,820,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,820,000
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	214,062,400					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	214,062,400
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	30 Laporan	214,062,400					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	30 Laporan	214,062,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	22,193,011					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	22,193,011		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		1 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		6 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2,830,500					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	2,830,500		

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				
						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,000,000						7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,000,000	
						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,362,511						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,362,511	
					7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	20,545,473,072					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	20,567,817,072			
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%				
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	20,305,154,856					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	20,305,154,856			
						jumlah kelurahan yang	5 kelurahan							jumlah kelurahan yang	5 kelurahan				

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi								melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi		
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyar akatan	26,860,000					7.01.03.2.02.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyar akatan	26,860,000
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,360,244,391					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,565,624,552
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,447,128,345					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,447,128,345
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,069,814,812					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,069,814,812
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,034,985,488					7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,062,565,534

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			4 Unit				4 Unit
			2,046,039,946				2,044,444,333
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			2,450,889,280				2,452,484,893
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,951,830,654				1,746,450,493
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,640,608,499				1,640,608,499
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,708,493,120				1,708,493,120
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			1,568,260,321				1,540,680,275

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	240,318,216					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	262,662,216
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	221,445,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	243,789,000	
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	18,873,216					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	18,873,216	
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	138,444,960			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	148,865,520	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang	16 Lokasi	138,444,960					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang	16 Lokasi	148,865,520

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					dipantau dan ditertibkan								dipantau dan ditertibkan		
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,444,960					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	148,865,520
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	30,040,800				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	30,040,800
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	21 Kasus	30,040,800					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	21 Kasus	30,040,800
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti	561 Orang	5,433,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti	561 Orang	5,433,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	4 Laporan	24,607,800						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	4 Laporan	24,607,800
Kec. Simokerto							40,800,260,711	Kec. Simokerto							41,350,870,620
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						40,800,260,711		7 UNSUR KEWILAYAHAN						41,350,870,620
	7.01 KECAMATAN						40,800,260,711		7.01 KECAMATAN						41,350,870,620
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,53 %	23,484,850,640			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,53 %	24,021,506,949
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,543,175,508			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,518,523,998

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan 19,543,175,508					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan 19,518,523,998
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100% 3,837,981,832					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100% 4,399,289,651
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket 3,837,981,832					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket 4,399,289,651
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100% 103,693,300					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100% 103,693,300
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit 103,693,300					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit 103,693,300
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100% 114,200,264					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100% 114,200,264

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			PUBLIK	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%					PUBLIK	Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,7 %						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	81,7 %	
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	3,231,768				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	3,231,768
			7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,231,768				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,231,768
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	104,627,200				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	104,627,200

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					yang Ada di Kecamatan									yang Ada di Kecamatan					
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104,627,200						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104,627,200		
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	6,341,296						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	6,341,296		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan								Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				20 Dokumen					20 Dokumen
				405,594					405,594
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
				12 Laporan					12 Laporan
				2,283,851					2,283,851
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				4 Laporan					4 Laporan
				3,651,851					3,651,851
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi
				87.50%					87.50%
				100%					100%
				17,068,566,481					17,082,520,081
				7.01.03.2.02					7.01.03.2.02
				Jumlah kelurahan					Jumlah kelurahan
				2					2
				16,898,550,					16,898,550,

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	yang dikembangkan potensi wilayahnya	Kelurahan	481					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	yang dikembangkan potensi wilayahnya	Kelurahan	481			
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi		5 kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	4,800,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	4,800,000			
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,030,947,210					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,067,210,122			
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	931,200,084					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,309,756,148			
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,556,931,832					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,115,651,097			

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			40 Unit				7 Unit
			1,783,020,639				2,315,789,110
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			3 Unit				3 Unit
			2,736,488,359				2,337,999,165
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas
			731,400,000				1,129,889,194
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			2,227,157,440				1,848,601,376
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			1,562,288,654				1,029,520,183
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			4 Pokmas / Ormas				4 Pokmas / Ormas
			981,893,626				1,423,174,361

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kelurahan									Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,352,422,637						7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,316,159,725
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	170,016,000						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	183,969,600
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	153,216,000						7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	167,169,600
					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,800,000						7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	16,800,000
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	126,984,950						7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	126,984,950
					7.01.04.2.01	Objek yang	14 Lokasi	126,984,950						7.01.04.2.01	Objek yang	14 Lokasi	126,984,950

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126,984,950					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126,984,950
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	5,658,376					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	5,658,376
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	7 Kasus	5,658,376					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	7 Kasus	5,658,376
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	3,410,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	3,410,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	2,248,376					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	2,248,376
Kec. Sukolilo							52,470,747,880	Kec. Sukolilo							53,421,698,559
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						52,470,747,880		7 UNSUR KEWILAYAHAN						53,421,698,559
	7.01 KECAMATAN						52,470,747,880		7.01 KECAMATAN						53,421,698,559
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,18 %	31,577,287,314			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,18 %	32,451,568,353

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KABUPATEN/KOTA							KABUPATEN/KOTA					
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	25,578,226,051				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	25,517,663,161	
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	25,578,226,051				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	25,517,663,161	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,874,744,941				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	6,771,133,850	
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5,874,744,941				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6,771,133,850	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	124,316,322				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	162,771,342	
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	124,316,322				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	162,771,342	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi			
					Lainnya										Lainnya										
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	175,574,038							7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	175,574,038							
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%									Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%								
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %									Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26,71 %								
					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6,300,000							7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6,300,000							
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6,300,000							7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6,300,000							
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	439 Lembaga	121,038,400							7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	439 Lembaga	121,038,400							

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan				
7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
60 Laporan					60 Laporan				
121,038,400					121,038,400				
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan					Jumlah Bidang urusan				
6 Bidang Urusan					6 Bidang Urusan				
48,235,638					48,235,638				

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat									pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat					
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	14,150,274					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	14,150,274				
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5,342,293					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5,342,293				
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	28,743,071					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	28,743,071				
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	20,548,363,378				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	20,591,136,178				

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAN KELURAHAN	konsep inovasi					DAN KELURAHAN	konsep inovasi	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,311,389,358			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan
			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	7,770,000			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,744,464,715			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1,145,019,489			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			3 Unit				3 Unit
			1,406,383,316				1,406,383,316
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			5 Unit				5 Unit
			2,509,886,103				2,509,886,103
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			6 Unit				6 Unit
			2,256,617,775				2,256,617,775
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			5 Unit				5 Unit
			2,144,389,604				2,144,389,604
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			5 Unit				5 Unit
			2,320,563,272				2,320,563,272
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			4 Pokmas / Ormas				4 Pokmas / Ormas
			756,492,396				756,492,396
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Ormas yang				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Ormas yang
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang				Jumlah Pokmas dan Ormas yang
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			1,093,016,670				1,093,016,670

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,004,852,158						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,004,852,158
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,143,253,860						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas 1,143,253,860
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas 935,400,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas 935,400,000
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 896,080,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 896,080,000
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas 947,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas 947,200,000

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kelurahan							Kelurahan		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga
				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	213,864,000				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit
				7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	23,110,020				7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	130,686,000				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	11 Lokasi	130,686,000				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	11 Lokasi
													164,582,840

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						ditertibkan									ditertibkan		
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	130,686,000						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	164,582,840
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	38,837,150					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	38,837,150
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	2 Kasus	38,837,150					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	2 Kasus	38,837,150		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 Topik	
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	160 Orang	10,400,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	160 Orang	10,400,000	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	4 Laporan	28,437,150						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	4 Laporan	28,437,150
Kec. Sukomanunggal							45,245,648,113	Kec. Sukomanunggal							45,664,593,356
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						45,245,648,113		7 UNSUR KEWILAYAHAN						45,664,593,356
	7.01 KECAMATAN						45,245,648,113		7.01 KECAMATAN						45,664,593,356
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,90 %	26,526,926,599			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,90 %	26,935,406,642
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	21,235,793,100			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,936,894,400
					7.01.01.2.02.000 Jumlah Orang	59	21,235,793,						7.01.01.2.02.000 Jumlah Orang	59	20,936,894,

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	400
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,145,505,811						7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,852,884,554
					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,145,505,811						7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5,852,884,554
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	145,627,688						7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	145,627,688
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	145,627,688						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	145,627,688
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	161,365,808						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	161,365,808
						Persentase jenis	100%									Persentase jenis	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat							pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,520,000				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,520,000
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,520,000				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,520,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	103,782,400				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	103,782,400

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Kecamatan									Kecamatan			
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	103,782,400						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	103,782,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	55,063,408				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	55,063,408			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan				
					7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen	30	33,869,536						7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen	30	33,869,536

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen						1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,596,160					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,596,160
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11,597,712					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	11,597,712
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	18,391,079,706					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	18,401,544,906
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
				7.01.03.2.02 Kegiatan	Jumlah kelurahan yang	1 Kelurahan	18,253,267,706					7.01.03.2.02 Kegiatan	Jumlah kelurahan yang	1 Kelurahan	18,253,267,706

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pemberdayaan Kelurahan	dikembangkan potensi wilayahnya						Pemberdayaan Kelurahan	dikembangkan potensi wilayahnya	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyar akatan	2,520,000				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2,520,000
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,174,559,045				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,381,206,478				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,072,280,506				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit
				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	4 Unit	2,328,580,6				7.01.03.2.02.000	Jumlah Sarana dan	4 Unit

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	67						2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 1,819,862,410						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 2,018,625,424
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit 1,772,972,950						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit 1,772,972,950
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 670,800,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 1,112,080,734
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 553,780,129						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 541,040,367
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 622,811,485						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 622,811,485
					7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	2 Pokmas 2,300,727,1						7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	2 Pokmas 2,300,727,1

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	51					3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	51
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,092,142,885					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	893,379,871
				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,461,024,000					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,461,024,000
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	137,812,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	148,277,200
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	
				7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	114,912,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	125,377,200
				7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	22,900,000					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	22,900,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	152,553,600					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	152,553,600
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	152,553,600					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	152,553,600
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	152,553,600						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	152,553,600
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di	100%	13,722,400					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di	100%	13,722,400

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kecamatan								Kecamatan		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamti bmas	24 kasus	13,722,400					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamti bmas	24 kasus	13,722,400
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,430,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,430,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4 Laporan	4,292,400					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4 Laporan	4,292,400
Kec. Tambaksari							66,414,989,	Kec. Tambaksari							67,449,548,

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			517				207
7 UNSUR KEWILAYAHAN			66,414,989,517	7 UNSUR KEWILAYAHAN			67,449,548,207
7.01 KECAMATAN			66,414,989,517	7.01 KECAMATAN			67,449,548,207
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91 %	34,998,335,048	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91 %	36,010,219,138
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,937,694,430	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,890,310,150
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	27,937,694,430	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	27,890,310,150
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	6,860,142,478	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	7,919,410,848
7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6,860,142,478	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7,919,410,848
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	200,498,140	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	200,498,140

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan		
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200,498,140					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200,498,140
			7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	228,298,053				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	228,298,053
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %	
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	15,039,594				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	15,039,594		
			7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan	15,039,594				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan	15,039,594		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
				751 Lembaga					751 Lembaga
				184,246,400					184,246,400
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				12 Laporan					12 Laporan
				184,246,400					184,246,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang
				1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan
				29,012,059					29,012,059

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					dilimpahkan kepada Camat							dilimpahkan kepada Camat				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6,434,060					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6,434,060
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,777,999					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,777,999
					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	10,800,000					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	10,800,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	30,860,324,616				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	30,882,999,216	
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	30,580,220,916				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	30,580,220,916	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	7,000,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	7,000,000	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			Kelurahan				Kelurahan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			7 Unit				7 Unit
			2,104,868,352				2,104,868,352
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			11 Unit				11 Unit
			3,399,688,924				3,401,225,340
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			9 Unit				9 Unit
			3,736,782,784				3,736,782,784
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			12 Unit				12 Unit
			2,404,976,837				2,448,466,437
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			11 Unit				11 Unit
			2,577,156,661				2,577,156,661
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			9 Unit				9 Unit
			2,190,424,011				2,190,424,011
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			11 Unit				4 Unit
			1,398,770,772				1,398,770,772

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun								Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		
						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,578,174,290						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,635,854,290
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	977,914,413						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	977,914,413
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,409,060,800						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,409,060,800
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,585,483,296						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,583,946,880
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,335,100,160						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,291,610,560
						7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	3 Pokmas	1,554,118,7						7.01.03.2.02.000	Jumlah Pokmas	1 Pokmas	1,554,118,7

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	25						3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	25
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	821,180,800						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	821,180,800
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,160,960,091						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,160,960,091
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,338,560,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,280,880,000
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	280,103,700					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	302,778,300		
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga			
						7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan	78 Unit	248,976,000						7.01.03.2.03.000	Jumlah Sarana dan	78 Unit	271,650,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan								3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,127,700						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,127,700
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	285,406,800						7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	285,406,800
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	285,406,800						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	285,406,800
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285,406,800						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285,406,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						Kecamatan											Kecamatan						
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		42,625,000						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100%		42,625,000	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		2 kasus		42,625,000						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas		2 kasus		42,625,000	
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 Topik									
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		663 Orang		20,560,000							7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		312 Orang		20,560,000	
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan	Jumlah Laporan Konflik yang		12 Laporan		22,065,000							7.01.05.2.01.000 5 Penanganan	Jumlah Laporan Konflik yang		12 Laporan		22,065,000	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan											
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator	Alokasi		
						Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan								Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan					
Kec. Tandes									48,454,477,721	Kec. Tandes									49,409,066,723		
	7 UNSUR KEWILAYAHAN								48,454,477,721		7 UNSUR KEWILAYAHAN								49,409,066,723		
		7.01 KECAMATAN							48,454,477,721			7.01 KECAMATAN							49,409,066,723		
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,12 %		28,668,971,537				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,12 %		29,627,285,797
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		23,755,933,377					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		23,915,631,237	
						7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		23,755,933,377					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		23,915,631,237		
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		4,759,836,230					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		5,558,452,630	
						7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	10 Paket		4,759,836,230					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	10 Paket		5,558,452,630		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	153,201,930					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	153,201,930		
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	153,201,930					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	153,201,930		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	240,431,852					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	222,299,741		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 lembaga	18,840,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 lembaga	11,400,000		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan						Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
						18,840,000							11,400,000
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga
						155,055,634							159,914,007
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
						155,055,634							159,914,007

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	66,536,218					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	50,985,734
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	23,591,520					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	12,899,409
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	19,353,178					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	14,494,805

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan								Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23,591,520						7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23,591,520
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,311,466,932				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	19,302,292,632			
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi		100%		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,125,874,932				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,101,874,932			
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi		6 kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	36,000,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	12,000,000	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Kemasyar akatan				Kemasyar akatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			1 Unit				1 Unit
			2,487,178,272				2,487,178,272
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			1 Unit				1 Unit
			2,718,209,905				2,718,209,905
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			1 Unit				1 Unit
			1,529,802,005				1,529,802,005
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			2 Unit				2 Unit
			2,902,166,267				2,902,166,267
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			2 Unit				2 Unit
			1,990,934,627				1,990,934,627
			7.01.03.2.02.000				7.01.03.2.02.000
			Jumlah Sarana dan				Jumlah Sarana dan
			1 Unit				1 Unit
			1,689,811,3				1,689,811,3

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		36						2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		36
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	867,320,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	867,320,000
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,876,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,876,200,000
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	687,744,530						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	687,744,530
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	577,120,183						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	577,120,183
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,195,187,807						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,195,187,807

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Kelurahan									Kelurahan				
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	568,200,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	568,200,000		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	185,592,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	200,417,700				
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga										
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	162,792,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	177,617,700			
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22,800,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22,800,000			
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	202,733,000				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	226,314,153			
				7.01.04.2.01		Objek yang	15 lokasi	202,733,000				7.01.04.2.01		Objek yang	15 lokasi	226,314,153			

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketentrman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berpotensi mengganggu ketentrman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan			
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	202,733,000						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	226,314,153
					7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	30,874,400						7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	30,874,400
					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	20 Kasus	30,874,400						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	20 Kasus	30,874,400
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik								Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang	5,120,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	5,120,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	25,754,400					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	25,754,400
Kec. Tegalsari							43,674,829,362	Kec. Tegalsari							44,172,604,098
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						43,674,829,362		7 UNSUR KEWILAYAHAN						44,172,604,098
	7.01 KECAMATAN						43,674,829,362		7.01 KECAMATAN						44,172,604,098
		7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,25 %	23,642,875,392			7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,25 %	24,126,696,528

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				KABUPATEN/KOTA								KABUPATEN/KOTA				
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,773,261,949					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18,690,096,639
					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	18,773,261,949					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	18,690,096,639
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,617,236,643					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,184,223,089
					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	4,617,236,643					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	5,184,223,089
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	252,376,800					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	252,376,800
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	252,376,800					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	252,376,800

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan													
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Lainnya												Lainnya						
					7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		120,706,152						7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		120,706,152		
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%									Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%				
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		23.25%									Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		23.25%				
					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		9,829,800							7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 Lembaga		9,829,800	
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		125 Laporan		9,829,800							7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		125 Laporan		9,829,800	
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan		364 Lembaga		83,650,400							7.01.02.2.02 Penyelenggaraan	Jumlah lembaga kemasyarakatan		364 Lembaga		83,650,400	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan				
7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
12 Laporan					12 Laporan				
83,650,400					83,650,400				
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat				
1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan				
Jumlah Bidang urusan					Jumlah Bidang urusan				
6 Bidang Urusan					6 Bidang Urusan				
27,225,952					27,225,952				

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat							pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat			
			7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	5,060,733					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	5,060,733
			7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	5,729,017					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4140 Laporan	5,729,017
			7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	16,436,202					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	16,436,202
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	19,591,033,799					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	19,604,983,799

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAN KELURAHAN	konsep inovasi					DAN KELURAHAN	konsep inovasi	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,414,362,167			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan
			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	8,191,500			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	3,816,925,961			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	1,925,191,213			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			12 Unit				12 Unit
			2,217,399,118				2,217,399,118
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			20 Unit				12 Unit
			2,062,777,042				2,372,459,314
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			18 Unit				12 Unit
			1,944,205,307				1,944,205,307
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,599,998,861				1,599,998,861
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			1,094,600,000				1,094,600,000
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,505,697,100				1,505,697,100

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,394,487,025						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,084,804,753
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	844,889,040						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	844,889,040
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	176,671,632						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	190,625,232
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	153,216,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	167,169,600
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	23,455,632						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	23,455,632
					7.01..04 PROGRAM	Persentase	100%	297,509,019						7.01.04 PROGRAM	Persentase	100%	297,509,019

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan					KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan				
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	297,509,019				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	297,509,019	
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	297,509,019				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	297,509,019	
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	22,705,000				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	22,705,000	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	62 Kasus	22,705,000				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	62 Kasus	22,705,000	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas							Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas				
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	4,820,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	4,820,000	
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4 Laporan	17,885,000					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4 Laporan	17,885,000	
Kec. Tenggilis Mejoyo								32,691,847,103	Kec. Tenggilis Mejoyo								33,526,982,956
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						32,691,847,103		7 UNSUR KEWILAYAHAN						33,526,982,956		
		7.01 KECAMATAN					32,691,847,103			7.01 KECAMATAN					33,526,982,956		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,01 %	20,485,839,348				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,01 %	21,306,774,852
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,918,845,690					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,290,528,890
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	16,918,845,690					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	17,290,528,890
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3,424,368,858					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3,873,621,162
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3,424,368,858					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	3,873,621,162
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	142,624,800					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	142,624,800
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	35 Unit	142,624,800					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Unit	142,624,800

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	70,744,358					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	70,744,358		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %							Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24,73 %			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,950,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,950,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1,950,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1,950,000		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
				185 Lembaga					185 Lembaga
				26,895,200					26,895,200
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				12 Laporan					12 Laporan
				26,895,200					26,895,200
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				1 Laporan					1 Laporan
				41,899,158					41,899,158
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan
				4 Laporan					4 Laporan

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi				
					Pemerintahan									Pemerintahan					
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan				
				7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,888,550					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,888,550				
				7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17,941,974					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	17,941,974				
				7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	18,068,634					7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	18,068,634				
			7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	12,014,713,247					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti	87.50%	12,021,980,747				

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			DAN KELURAHAN	konsep inovasi					DAN KELURAHAN	konsep inovasi	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan	11,925,713,247			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/O rmas					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/O rmas
			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan	7,200,000			7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar akatan
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	2,381,060,083			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit
											2,573,814,251

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun							Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun	
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 3,029,659,211						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 3,029,659,211
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 1,659,501,357						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 1,659,501,357
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 1,382,992,669						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 1,410,824,669
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 842,256,915						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 814,424,915
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 1,279,407,175						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas 1,086,653,007
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas 561,343,688						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas 561,343,688

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	782,292,149						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	782,292,149
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	89,000,000					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	96,267,500		
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga			
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	79,800,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	87,067,500
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	9,200,000						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	70 Laporan	9,200,000
			7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda	100%	106,420,350				7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda	100%	113,353,199

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					di Kecamatan								di Kecamatan		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	106,420,350					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	113,353,199
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	106,420,350					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	113,353,199
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,129,800					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,129,800
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	24 kasus	14,129,800					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	24 kasus	14,129,800

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							Daerah	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	4,300,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	4,300,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9,829,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	9,829,800
Kec. Wiyung							34,670,837,	Kec. Wiyung							34,959,106,

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			714				011
7 UNSUR KEWILAYAHAN			34,670,837,714	7 UNSUR KEWILAYAHAN			34,959,106,011
7.01 KECAMATAN			34,670,837,714	7.01 KECAMATAN			34,959,106,011
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,43 %	21,239,003,521	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,43 %	21,517,388,018
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,078,146,286	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,805,385,506
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	17,078,146,286	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	16,805,385,506
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,063,821,309	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,578,582,777
7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,063,821,309	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4,578,582,777
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	97,035,926	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	133,419,735

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan										Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan						
					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit		97,035,926						7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit		133,419,735		
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		88,007,082					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		93,175,916				
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%								Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		100%						
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		55,81 %								Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		55,81 %						
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 lembaga		6,815,328						7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan		6 lembaga		6,815,328			
					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan		1 Laporan		6,815,328						7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinerg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan		1 Laporan		6,815,328		

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
				211 lembaga					211 lembaga
				60,981,600					60,981,600
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				12 Laporan					12 Laporan
				60,981,600					60,981,600
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang
				1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan
				20,210,154					25,378,988

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					dilimpahkan kepada Camat							dilimpahkan kepada Camat				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,526,276					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,526,276
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,829,800					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9,829,800
					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	12	854,078					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	12	6,022,912

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,179,150,511					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	13,189,034,311
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%								Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	
					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,058,040,367					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,058,040,367	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan								jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi		4 Kelurahan
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	1,310,640						7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	1,310,640

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 1,396,160,668						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 1,425,257,175
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit 2,067,627,288						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit 2,067,627,288
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 2,907,926,029						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 2,907,926,029
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit 2,912,278,870						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit 2,912,278,870
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 713,500,192						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 713,500,192
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 1,130,208,039						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas 1,130,208,039

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan															
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Target Indikator		Alokasi	
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	793,621,248							7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	764,524,741				
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,135,407,393							7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,135,407,393				
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	121,110,144								7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	130,993,944				
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga										Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga					
						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	108,528,000							7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	118,411,800				
						7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12,582,144							7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12,582,144				
					7.01..04 PROGRAM	Persentase	100%	146,262,000								7.01.04 PROGRAM	Persentase	100%	145,385,566				

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan					KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	146,262,000					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	145,385,566
				7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146,262,000					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	145,385,566
			7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	18,414,600				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,122,200
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 kasus	18,414,600					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 kasus	14,122,200

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
				Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas							Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Babinsa/Babinkamt ibmas				
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	136 Orang	9,829,800					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	136 Orang	9,829,800	
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	8,584,800					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	4,292,400	
Kec. Wonocolo							40,611,259,988	Kec. Wonocolo							41,112,009,401		
	7 UNSUR KEWILAYAHAN						40,611,259,988		7 UNSUR KEWILAYAHAN						41,112,009,401		
		7.01 KECAMATAN					40,611,259,988			7.01 KECAMATAN					41,112,009,401		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %	24,582,493,477				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %	25,059,980,310
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,535,769,044					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20,298,470,754
				7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20,535,769,044					7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20,298,470,754
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,977,959,435					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,652,790,599
				7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,977,959,435					7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,652,790,599
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	68,764,998					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	108,718,957
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	100 Unit	68,764,998					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan /	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	7 Unit	108,718,957

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	97,165,160					7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	96,448,136		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%							Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14%							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14%			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	1,800,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	1,800,000		
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	1,800,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	1,800,000		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait								Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait		
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	90,219,200						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	90,219,200
					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,219,200						7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,219,200
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	5,145,960						7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	4,428,936
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	1 Bidang Urusan									Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat							non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,500,000				7.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,500,000
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,965,960				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,965,960
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
			7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,680,000				7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	962,976
			3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan			

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Lain yang Dilimpahkan									Lain yang Dilimpahkan			
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,802,647,351					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	15,815,438,151		
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,629,821,751					7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,629,821,751		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan			
				7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	7,500,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	7,500,000		
				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,131,897,530					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,131,897,530		

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			12 Unit				12 Unit
			3,507,962,480				3,507,962,480
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			2 Unit				2 Unit
			1,567,901,151				1,567,901,151
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			8 Unit				8 Unit
			1,406,816,428				1,684,781,004
			7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			6 Unit				6 Unit
			2,923,787,557				2,923,787,557
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2 Pokmas / Ormas				2 Pokmas / Ormas
			1,070,128,122				1,070,128,122
			7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			3 Pokmas / Ormas				3 Pokmas / Ormas
			1,310,740,125				1,310,740,125
			7.01.03.2.02.000				7.01.03.2.02.000
			Jumlah Pokmas				Jumlah Pokmas
			3 Pokmas				3 Pokmas
			949,200,000				949,200,000

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas							3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas	
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	879,733,782						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	879,733,782
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	874,154,576						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	596,190,000
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	172,825,600						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	185,616,400
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga								Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	140,448,000						7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	153,238,800
					7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan	48	32,377,600						7.01.03.2.03.000	Jumlah Laporan	48	32,377,600

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan							4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	
				7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	121,104,000					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	132,292,804
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	121,104,000					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	132,292,804
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	121,104,000						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	132,292,804
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di	100%	7,850,000					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di	100%	7,850,000

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kecamatan								Kecamatan		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	88 Kasus	7,850,000					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	88 Kasus	7,850,000
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	
				7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	3,500,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	3,500,000
				7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24 Laporan	4,350,000					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24 Laporan	4,350,000
Kec. Wonokromo							53,940,380,	Kec. Wonokromo							54,714,322,

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			575				704
7 UNSUR KEWILAYAHAN			53,940,380,575	7 UNSUR KEWILAYAHAN			54,714,322,704
7.01 KECAMATAN			53,940,380,575	7.01 KECAMATAN			54,714,322,704
7.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,23 %	28,620,487,869	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,23 %	29,376,469,703
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,353,270,390	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	23,140,967,350
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	23,353,270,390	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	23,140,967,350
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	5,131,489,179	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	6,100,463,574
7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	5,131,489,179	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6,100,463,574
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	135,728,300	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	135,038,779

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan						Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang disediakan	
				7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit 135,728,300					7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit 135,038,779
				7.01..02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	193,779,120				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.15%						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.15%
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga 1,740,000					7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga 1,740,000
				7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan 1,740,000					7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan 1,740,000

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
				568 Lembaga					568 Lembaga
				183,722,400					183,722,400
				7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				12 Laporan					12 Laporan
				183,722,400					183,722,400
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang
				1 Bidang Urusan					1 Bidang Urusan
				8,316,720					8,316,720

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					dilimpahkan kepada Camat							dilimpahkan kepada Camat				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	452,880					7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	452,880
					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,931,920					7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,931,920
					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	3,931,920					7.01.02.2.04.000	Jumlah Laporan	4 Laporan	3,931,920

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
				7.01..03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	24,996,025,116				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	25,012,885,716	
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	24,803,689,116				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	24,803,689,116	
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	1,740,000					7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyar akatan	1,740,000	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kelurahan								Kelurahan		
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 3,605,692,3 26						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit 3,605,692,3 26
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit 1,485,173,5 10						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 1,485,173,5 10
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit 3,071,179,6 34						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit 3,071,179,6 34
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 2,616,481,2 87						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 2,539,981,2 87
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 2,190,920,6 19						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit 2,190,920,6 19
					7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit 3,482,668,4 71						7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit 3,482,668,4 71
					7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas / Ormas 1,443,755,9 15						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas 1,443,755,9 15

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,646,249,410						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,646,249,410
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,484,187,472						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,484,187,472
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,340,160,560						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,340,160,560
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	622,347,912						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	698,847,912
						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,813,132,000						7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,813,132,000

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Kelurahan									Kelurahan		
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	192,336,000						7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	209,196,600
					Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga			
					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	185,136,000					7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	201,996,600	
					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	7,200,000					7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	7,200,000	
					7.01..04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	115,681,200					7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	116,780,895	
					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	20 Lokasi	115,681,200					7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan	20 Lokasi	116,780,895	

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						ditertibkan									ditertibkan				
					7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115,681,200						7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116,780,895		
				7.01..05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,407,270					7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	14,407,270		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	12 Kasus	14,407,270					7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamt ibmas	12 Kasus	14,407,270				
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik					
					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	120 Orang	7,600,000					7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	60 Orang	7,600,000			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
					7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	6,807,270						7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	6,807,270
RSUD Bhakti Dharma Husada								286,851,844,557	RSUD Bhakti Dharma Husada								298,901,702,897
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							286,851,844,557		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							298,901,702,897
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						286,851,844,557			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						298,901,702,897
			1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	246,136,138,637				1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	258,185,996,977

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	77,005,757,162					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	89,055,615,502
				1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	77,005,757,162					1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	89,055,615,502
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,210,000,000					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,210,000,000
				1.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,210,000,000					1.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,210,000,000
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	167,920,381,475					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	167,920,381,475
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	167,920,381,475					1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	167,920,381,475

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan								Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan			
			1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	40,715,705,920				1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	40,715,705,920	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	40,715,705,920				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	40,715,705,920
					1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	12,865,628,540						1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	12,865,628,540	
					1.02.02.2.01.002 2 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah	1 Unit	27,850,077,380						1.02.02.2.01.002 2 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah	1 Unit	27,850,077,380	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan / atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
RSUD dr. Mohamad Soewandhie			426,981,357,463	RSUD dr. Mohamad Soewandhie			437,388,308,254
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			426,981,357,463	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			437,388,308,254
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			426,981,357,463	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			437,388,308,254
1.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.95%	425,548,909,013	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.95%	435,771,286,580
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,95 %			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,95 %	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%			127,934,242,602
				1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan			127,934,242,602
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			1,798,494,436
				1.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1,798,494,436
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%			295,816,171,975
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			295,816,171,975
				1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase ketersediaan	98,08 %			1,432,448,450
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%			138,347,114,605
				1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan			138,347,114,605
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			1,608,000,000
				1.02.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1,608,000,000
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%			295,816,171,975
				1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			295,816,171,975
				1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase ketersediaan	98,08 %			1,617,021,674

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	1,432,448,450				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	1,617,021,674	
				1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1,432,448,450				1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	1,617,021,674	
RSUD Eka Candrarini							171,410,751,644	RSUD Eka Candrarini							254,863,832,554
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						171,410,751,644		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						254,863,832,554
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					171,410,751,644			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					254,863,832,554
			1.02..01 PROGRAM PENUNJANG		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	85%	102,963,753,455				1.02.01 PROGRAM PENUNJANG		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	85%	171,784,916,076

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini			
			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	100%	35,749,890,868			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD Eka Candrarini	100%	113,841,553,956	
			1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/bulan	35,749,890,868			1.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476 Orang/bulan	113,841,553,956	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	7,469,942,396			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	9,423,121,959	
			1.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7,469,942,396			1.02.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9,423,121,959	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	59,743,920,191			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Eka Candrarini	100%	38,420,240,161	

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
					1.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59,743,920,191						1.02.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38,420,240,161
														1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	10,100,000,000
														1.02.01.2.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10,100,000,000
					1.02..02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	100%	68,446,998,189					1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Mutu di RSUD Eka Candrarini	100%	83,078,916,478	
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini		100%					Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Eka Candrarini	100%					
				Persentase ketersediaan		90%					Persentase ketersediaan	90%					

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit								sarana dan prasarana RSUD Eka Candrarini sesuai dengan kelas rumah sakit		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	100%	64,970,199,262					1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana RSUD Eka Candrarini	100%	79,602,117,551
					Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit							Jumlah Unit Layanan yang Terpenuhi Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	
				1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	55,140,054,962					1.02.02.2.01.001 4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit	55,140,054,962
				1.02.02.2.01.002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	3 Paket	9,830,144,300					1.02.02.2.01.002 3 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	5 Paket	24,462,062,589

Sebelum Perubahan										Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		
						Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang disediakan								Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
						1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	3,476,798,927						1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dipantau di RSUD Eka Candrarini	1 Unit	3,476,798,927	
						1.02.02.2.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	3,476,798,927						1.02.02.2.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	3,476,798,927	
Satuan Polisi Pamong Praja									107,381,951,928	Satuan Polisi Pamong Praja									154,845,457,995
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								107,381,951,928		1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								154,845,457,995
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							107,381,951,928			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							154,845,457,995

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan														
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi							
			MASYARAKAT						MASYARAKAT											
			1.05..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,5 %	33,615,721,720						1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,5 %	92,083,646,301			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27,625,941,289						1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	87,016,990,729		
				1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	27,625,941,289						1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	87,016,990,729		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	3,242,323,392						1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,918,511,000		
				1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3,242,323,392						1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,918,511,000		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,747,457,039						1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,148,144,572		
				1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2,747,457,039						1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2,148,144,572		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Umum Kantor	Kantor yang Disediakan							Umum Kantor	Kantor yang Disediakan		
				1.05..02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	73,766,230,208					1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	62,761,811,694
					Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%							Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	
					Persentase PPNS yang dibina	100%							Persentase PPNS yang dibina	100%	
					Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%							Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi	66,376,003,440					1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	110 Titik/Lokasi	56,411,362,205
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali							Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga						Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	11 Lembaga		
					Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang						Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1400 Orang		
				1.05.02.2.01.000 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	2,476,253,675					1.05.02.2.01.000 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1279 Orang	1,680,609,084
				1.05.02.2.01.000 6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	12 Dokumen	1,363,390,416					1.05.02.2.01.000 6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	12 Dokumen	1,300,273,778

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan										
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan								dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
						1.05.02.2.01.000 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	163,182,324						1.05.02.2.01.000 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	163,182,324
						1.05.02.2.01.001 5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	59,931,094,368						1.05.02.2.01.001 5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	50,825,214,362
						1.05.02.2.01.001 6 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	12 Laporan	2,176,669,800						1.05.02.2.01.001 6 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	12 Laporan	2,176,669,800

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				
Target Indikator					Target Indikator				
Alokasi					Alokasi				
				berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
				1.05.02.2.01.001 7 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					1.05.02.2.01.001 7 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
				12 Laporan					12 Laporan
				265,412,857					265,412,857
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan					Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan
				94 Objek					94 Objek
				7,180,571,631					6,140,794,352
				Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan					Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan
				4230 Objek					4230 Objek

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			1.05.02.2.02.001 0 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.05.02.2.02.001 0 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4 Laporan				4 Laporan
			1,267,510,858				1,015,304,743
			1.05.02.2.02.001 1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				1.05.02.2.02.001 1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
			12 Laporan				12 Laporan
			4,955,041,376				4,167,470,212
			1.05.02.2.02.001 2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.05.02.2.02.001 2 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			12 Laporan				12 Laporan
			958,019,397				958,019,397
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
			Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas				Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas
			70 Orang				70 Orang
			209,655,137				209,655,137
			1.05.02.2.03.000 6 Pengembangan				1.05.02.2.03.000 6 Pengembangan
			Jumlah Laporan Hasil				Jumlah Laporan Hasil
			4 Laporan				4 Laporan
			209,655,137				209,655,137

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda							Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	
Sekretariat Daerah							574,594,477,338	Sekretariat Daerah							650,138,995,564
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						574,594,477,338		4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						650,138,995,564
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH						574,594,477,338		4.01 SEKRETARIAT DAERAH						650,138,995,564
	4.01..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	278,995,000,022		4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	240,708,385,277
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100%				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100%	
		Persentase paket pengadaan barang				96%				Persentase paket pengadaan barang				96%	

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
	jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja				jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja		
	Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	90%	
	Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72,22 %			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	72,22 %	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	
	Persentase	100%			Persentase	100%	

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN						terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN			
				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%					Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	81,928,393,668			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	78,511,093,778
				4.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	81,928,393,668			4.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	78,511,093,778
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	536,430,800			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	536,430,800
				4.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	536,430,800			4.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	536,430,800
				4.01.01.2.07	Jumlah laporan	12	57,653,626,			4.01.01.2.07	Jumlah laporan	12	20,420,857,

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan 754					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan 300
				4.01.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit 57,653,626,754					4.01.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1400 Unit 20,420,857,300
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100% 105,064,832,586					4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100% 107,700,375,809
					Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%						Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%
					Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%						Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%
				4.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 2,051,672,734					4.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 2,051,672,734
				4.01.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan 3,140,117,606					4.01.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan 3,290,723,791

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Kantor	Disediakan							Kantor	Disediakan	
					4.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 99,873,042,246						4.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 102,357,979,284
					4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100% 12,222,634,448						4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100% 12,222,634,448
					4.01.01.2.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 186,165,013						4.01.01.2.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 186,165,013
					4.01.01.2.11.000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 12,036,469,435						4.01.01.2.11.000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan 12,036,469,435
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi	58 instansi 3,229,785,913						4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi	58 instansi 3,050,195,560

Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku							kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku			
				Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP		58 instansi							Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP		58 instansi
				Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan		253 unit							Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan		253 unit
				4.01.01.2.13.000 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1,019,345,050					4.01.01.2.13.000 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	929,758,134
				4.01.01.2.13.000 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,014,904,136					4.01.01.2.13.000 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	924,876,603
				4.01.01.2.13.000 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1,195,536,727					4.01.01.2.13.000 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1,195,560,823

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				Laksana								Laksana			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	18,359,295,853					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	18,266,797,582
					Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan							Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	
				4.01.01.2.14.000 1 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	17,923,136,628					4.01.01.2.14.000 1 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	17,869,745,757
				4.01.01.2.14.000 2 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	436,159,225					4.01.01.2.14.000 2 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	397,051,825
				4.01..02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	275,464,979,896					4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	390,105,035,995
					Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari							Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	
					Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97%							Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	97%	

Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90%					Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	90%		
				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%					Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%		
				Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77,83 %					Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	77,83 %		
				Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99%					Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	99%		
				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32 %					Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	90,32 %		
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%					Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		
				Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%					Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		
				Persentase realisasi produk hukum daerah	100%					Persentase realisasi produk hukum daerah	100%		

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					yang dihasilkan						yang dihasilkan			
					Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%					Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%		
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan	12,563,851,377				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	28 Kecamatan	7,077,549,405
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen	
					Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga						Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	144 Lembaga	
				4.01.02.2.01.000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4,410,785,176				4.01.02.2.01.000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	2,327,763,571
				4.01.02.2.01.000 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	3,726,719,083				4.01.02.2.01.000 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2,969,829,088
				4.01.02.2.01.000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,426,347,118				4.01.02.2.01.000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1,779,956,746
				4.01.02.2.02	Jumlah kegiatan	1	252,264,436				4.01.02.2.02	Jumlah kegiatan	1	373,428,897

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	Kegiatan	,925					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	Kegiatan	,723
						Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan							Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen							Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	
					4.01.02.2.02.000 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	32,633,395,437					4.01.02.2.02.000 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	37,024,726,145
					4.01.02.2.02.000 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1 Dokumen	158,177,076,727					4.01.02.2.02.000 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1 Dokumen	275,271,647,221

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan								
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
						Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
					4.01.02.2.02.000 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	61,453,964,761					4.01.02.2.02.000 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	61,132,524,357	
					4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	7,767,318,658					4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	7,947,190,200	
						Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum							Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum		

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
					Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum							Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum	
				4.01.02.2.03.000	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,091,595,868					4.01.02.2.03.000	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	4,198,232,754
				4.01.02.2.03.000	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	2,337,888,303					4.01.02.2.03.000	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	2,413,015,008
				4.01.02.2.03.000	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,337,834,487					4.01.02.2.03.000	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	1,335,942,438
				4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga	2,869,372,936					4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Lembaga	1,651,398,667
					Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga							Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga	
					Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga							Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	32 Lembaga	
				4.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	608,802,804					4.01.02.2.04.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	632,892,939

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				4.01.02.2.04.000 2 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,808,682,918					4.01.02.2.04.000 2 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	566,618,514
				4.01.02.2.04.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	451,887,214					4.01.02.2.04.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	451,887,214
				4.01..03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	20,134,497,420					4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	19,325,574,292
					Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %							Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %	
					Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90%							Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	90%	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	4,691,640,689					4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	3,931,665,640
				4.01.03.2.01.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	2 Dokumen	1,221,798,194					4.01.03.2.01.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	2 Dokumen	1,272,498,194

Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan									
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
						Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD								Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD		
						4.01.03.2.01.000 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,840,032,945						4.01.03.2.01.000 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	2,059,759,746
						4.01.03.2.01.000 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	629,809,550						4.01.03.2.01.000 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	599,407,700
						4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,532,329,372						4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	10,572,165,826
						4.01.03.2.02.000 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	4,003,545,742						4.01.03.2.02.000 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3,919,306,318
						4.01.03.2.02.000 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,528,783,630						4.01.03.2.02.000 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	6,652,859,508
						4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,819,622,269						4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4,730,837,736

Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96%						Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	96%	
			4.01.03.2.03.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,504,022,269				4.01.03.2.03.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	4,415,237,736
			4.01.03.2.03.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	315,600,000				4.01.03.2.03.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	315,600,000
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	90,905,090				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	90,905,090
			4.01.03.2.04.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	90,905,090				4.01.03.2.04.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	90,905,090

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Usuran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
Sekretariat DPRD			276,008,703,700	Sekretariat DPRD			254,667,343,113
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			276,008,703,700	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			254,667,343,113
4.02 SEKRETARIAT DPRD			276,008,703,700	4.02 SEKRETARIAT DPRD			254,667,343,113
4.02..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,5 %	198,903,813,192	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93,5 %	168,047,253,063
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,828,136,399	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,856,668,809
4.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	15,828,136,399	4.02.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	14,856,668,809
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	35,621,376,507	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	34,918,543,413
4.02.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35,621,376,507	4.02.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	34,918,543,413
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan	≤ 1 Hari	5,333,566,626	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan	≤ 1 Hari	9,126,569,570

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana rapat							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana rapat		
				4.02.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	5,333,566,626					4.02.01.2.09.001 0 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	9,126,569,570
				4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	85,215,577,527					4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	52,390,315,138
				4.02.01.2.14.000 1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	85,215,577,527					4.02.01.2.14.000 1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	52,390,315,138
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	54,522,056,860					4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	54,522,056,860
				4.02.01.2.15.000 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860					4.02.01.2.15.000 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	54,522,056,860
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	2,383,099,273					4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	2,233,099,273

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan			
Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan			
Target Indikator				Target Indikator			
Alokasi				Alokasi			
			4.02.01.2.16.000 3 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				4.02.01.2.16.000 3 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			36 Laporan				8 Laporan
			2,383,099,273				2,233,099,273
			4.02..02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi				Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi
			100%				100%
			77,104,890,508				86,620,090,050
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas				Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas
			6 Dokumen				6 Dokumen
			3,966,579,925				3,179,922,586
			4.02.02.2.01.000 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4.02.02.2.01.000 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			6 Dokumen				6 Dokumen
			3,966,579,925				3,179,922,586
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas				Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas
			50 Orang				50 Orang
			27,781,432,940				31,188,648,666
			4.02.02.2.04.000 2 Pendalaman Tugas DPRD				4.02.02.2.04.000 2 Pendalaman Tugas DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
			2 Dokumen				2 Dokumen
			1,876,347,250				2,221,500,000
			4.02.02.2.04.000 8 Publikasi dan Dokumentasi				4.02.02.2.04.000 8 Publikasi dan Dokumentasi
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi
			4 Dokumen				4 Dokumen
			25,905,085,690				28,967,148,666

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025

Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan							
Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi		Perangkat Daerah-Urusan-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Indikator	Alokasi	
				DPRD	DPRD							DPRD	DPRD		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	40,676,058,451					4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	47,787,361,435
				4.02.02.2.05.000 3 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	40,676,058,451					4.02.02.2.05.000 3 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	47,787,361,435
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,680,819,192					4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,464,157,363
				4.02.02.2.08.000 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,680,819,192					4.02.02.2.08.000 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,464,157,363
TOTAL							12,351,743,715,960	TOTAL							12,351,743,715,960

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini serta memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja Daerah disajikan dalam tabel V.3 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025.

Tabel V.3
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2025	P-RKPD 2025
A	PENDAPATAN	12,137,107,076,198	12,127,302,271,232
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,796,337,167,735	8,786,532,362,769
	a Pajak Daerah	7,307,751,999,326	7,297,947,194,360
	b Retribusi Daerah	486,207,862,705	486,207,862,705
	c Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	210,074,787,736	210,074,787,736
	d Lain-Lain PAD yang sah	792,302,517,968	792,302,517,968
2	PENDAPATAN TRANSFER	3,340,769,908,463	3,340,769,908,463
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2,891,048,679,000	2,891,048,679,000
	a 1) Dana Perimbangan	2,861,866,498,000	2,861,866,498,000
	b 2) Dana Insentif Daerah	29,182,181,000	29,182,181,000
	Transfer Antar - Daerah	449,721,229,463	449,721,229,463
	a 1) Pendapatan Bagi Hasil	449,721,229,463	449,721,229,463
	b 2) Bantuan Keuangan	0	0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0
	a Pendapatan Hibah		
	b Pendapatan Dana Darurat		
	c Pendapatan Lainnya		
B	BELANJA	12,351,743,715,960	12,351,743,715,960
	BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL	12,314,243,715,960	12,233,668,142,653
1	BELANJA OPERASI	9,424,466,068,551	9,481,773,015,128
	a Belanja Pegawai	3,764,318,412,108	3,665,203,431,595
	b Belanja Barang dan Jasa	5,215,155,800,507	5,381,293,198,062
	c Belanja Bunga	0	0
	d Belanja Subsidi	99,880,607,558	95,728,337,093
	e Belanja Hibah	338,348,048,378	338,348,048,378
	f Belanja Bantuan Sosial	6,763,200,000	1,200,000,000
2	BELANJA MODAL	2,889,777,647,409	2,751,895,127,525
	a Belanja Modal Tanah	267,796,713,386	298,062,201,410
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289,485,651,409	304,704,621,459
	c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	859,160,887,944	790,891,143,977
	d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,461,074,880,757	1,347,300,452,798

NO	URAIAN		APBD 2025	P-RKPD 2025
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,656,398,645	1,941,327,114
	f	Belanja Modal Aset Lainnya	10603115268	8995380767
3		BELANJA TIDAK TERDUGA	37,000,000,000	117,575,573,307
	a	Belanja Tidak Terduga	37,000,000,000	117,575,573,307
4		BELANJA TRANSFER	500,000,000	500,000,000
	a	Belanja Bagi Hasil	0	0
	b	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000	500,000,000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (diolah tahun 2025).

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN SUBSTANSIAL

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan memuat visi, misi, tema pembangunan, tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, dan program Pemerintah Kota Surabaya. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 telah diselaraskan dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan program strategis nasional serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan dilantikannya Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode Tahun 2025 - 2030 pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 juga memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan menjadi jembatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Dengan demikian, selain memuat visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, perubahan RKPD Kota Surabaya tahun 2025 menjadi transisi yang memuat visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025-2030. Visi dan Misi yang termuat dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah “Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode jabatan tahun 2025-2030 **adalah “Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”**, yang kemudian dijabarkan dalam 5 misi yakni :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;

2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul & Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tema RKP Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan**”, serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 yaitu “**Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis**”.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah.

- a. Kebijakan pajak daerah disusun berdasarkan :

- i. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
- ii. Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan

- pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- iii. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-141/PK.5/2024, Perihal : Penjelasan Terkait Pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan untuk Rumah Kos
 - iv. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB)
 - v. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2
 - vi. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%
 - vii. Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan
 - viii. Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%
 - ix. Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%
 - x. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut persentase tertentu
- b. Kebijakan retribusi daerah :
- i. Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - ii. Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
 - iii. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 - iv. Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal
 - v. Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
 - vi. Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir
 - vii. Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain
 - viii. Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan layanan dan alat kesehatan yang baru dan mutakhir

- ix. Meningkatkan sistem keuangan khususnya pendapatan dari sektor retribusi daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
 - i. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - ii. Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
 - iii. Meningkatkan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan BUMD untuk menghasilkan inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat dan kemanfaatan umum, melalui diversifikasi usaha dan investasi
 - iv. Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis. Restrukturisasi meliputi: restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan, dilaksanakan melalui restrukturisasi internal mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; serta penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik
- d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - i. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - ii. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama

Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- iii. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
- iv. Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

- a. Berubahnya pengelolaan PKB dan BBNKB menjadi objek pajak baru berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi faktor menurunnya potensi dana transfer provinsi, namun di sisi lain meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali secara lebih maksimal dan pengelolaannya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
- b. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;
- d. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
- e. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai

dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer;

- f. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8.796.337.167.735 menjadi sebesar Rp 8.786.532.362.770 di Perubahan RKPD Tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah pendapatan transfer pada APBD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 3.340.769.908.463. Penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 224.636.639.762 menjadi sebesar Rp 234.441.444.727 di Perubahan RKPD Tahun 2025.

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung **"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis"** serta berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2025 yaitu :

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinkronisasi dengan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan;
6. Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat kajian yang tidak memberikan dampak langsung dan pencetakan serta belanja perjalanan

dinas;

7. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
10. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jumlah belanja operasi semula di APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.424.466.068.551 menjadi sebesar Rp 9.481.773.015.128 di Perubahan RKPD Tahun 2025. Belanja modal semula di APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.889.777.647.409 menjadi sebesar Rp 2.751.895.127.525 di Perubahan RKPD Tahun 2025.

Belanja Tidak Terduga semula di APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 37.000.000.000 menjadi sebesar Rp 117.575.573.307 di Perubahan RKPD Tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu belanja transfer sebesar Rp 500.000.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,-

6.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, meliputi : Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Adapun ruang lingkup pengendalian dan evaluasi

terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan tahunan Kota Surabaya mencakup sinkronisasi visi, misi, dan tema pembangunan Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Raperda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perumusan isu strategis, arah kebijakan, program prioritas, kebutuhan pendanaan pagu indikatif, dan indikator kinerja Daerah. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Pengendalian pelaksanaan RKPD mencakup program pembangunan Daerah dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025. Pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan harus dapat menjamin :
 - a. Program pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan tahunan telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahunan Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tema pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai untuk mewujudkan misi pembangunan

jangka menengah daerah. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

6.3. PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak, selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.